



PROSIDING

SIMPOSIUM PENDIDIKAN MAJELIS NASIONAL
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(MN KAHMI) 2019

“Teknologi, Industri dan Pendidikan”

Sabtu, 16 Februari 2019

Hotel UNS Inn Surakarta
Jl. Ir Sutami No 36A, Pucangsawit,
Jebres, Surakarta

PROSIDING

SIMPOSIUM PENDIDIKAN MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MN KAHMI) 2019

“Teknologi, Industri dan Pendidikan”

**Hotel UNS Inn Surakarta
Jl. Ir Sutami No 36A, Pucangsawit, Jebres
Sabtu, 16 Februari 2019**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROSIDING

SIMPOSIUM PENDIDIKAN MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MN KAHMI) 2019

“Teknologi, Industri dan Pendidikan”

**Hotel UNS Inn Surakarta
Jl. Ir Sutami No 36A, Pucangsawit, Jebres
Sabtu, 16 Februari 2019**

UNS PRESS

**PROSIDING
SIMPOSIUM PENDIDIKAN MAJELIS NASIONAL KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA
ISLAM (MN KAHMI) 2019**

“Teknologi, Industri dan Pendidikan”

Hak Cipta©Ravik Karsidi dan Abdul Rahman. 2019

Steering Committee

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

Reviewer

Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.

Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si.

Lukman Hakin, S.E., M.Si., Ph.D

Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D, AK, CA, CFA

Widi Wardoyo, M.A

Editor

Leon Akbar

Ricky Handoko

Ilustrasi Sampul

UNS Press

Penerbit & Percetakan

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)

Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Telp. (0271) 646994 Psw. 341 Fax. 0271 7890628

Website : www.unspress.uns.ac.id

Email : unspress@uns.ac.id

Cetakan pertama, April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

ISBN 978-602-397-273-9

SUSUNAN PANITIA

Ketua panitia	: Abdul Rahman, Ph.D
Sekretaris	: Widi Wardoyo, M.A
Bendahara AK, CA, CFrA	: Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D,
Pelaksana teknis	: 1. Leon Akbar 2. Ricky Handoko 3. HMI cabang Surakarta
Reviewer makalah	: 1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. 2. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi. 3. Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum 4. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si. 5. Lukman Hakin, S.E., M.Si., Ph.D 6. Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D, AK, CA, CFrA 7. Widi Wardoyo, M.A
Editor	: 1. Leon Akbar 2. Ricky Handoko

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang terhormat,

1. Dr. Muhammad Dimiyati, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Prof. Laode M Kamaluddin, Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
3. Dr. Ananto Kusuma Seto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Prof. Muchlas Samani, alumni HMI dan dosen Universitas Negeri Surabaya.
5. Prof. Ravik Karsidi, alumni HMI dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
6. Prof. Dede Rosyada, alumni HMI dan dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Drs. Hardono MM, pengurus Majelis Daerah KAHMI Surakarta dan pengusaha sukses.
8. Setiap pemakalah, KAHMI maupun bukan KAHMI, dari Papua hingga Sumatera Utara.
9. Setiap peserta, pria dan wanita, warga HMI/KAHMI maupun lainnya, yang telah hadir memenuhi Gedung UNS Inn.
10. Warga HMI di Solo Raya.

Selamat datang di Solo. Selamat datang di UNS INN. Selamat symposium hingga selesai pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 bertempat di UNS Inn Campus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) telah menyelenggarakan simposium nasional dengan tema TEKNOLOGI, INDUSTRI DAN PENDIDIKAN.

Dengan narasumber yang memiliki reputasi, nasional maupun internasional di bidang masing-masing, MN-KAHMI mengundang para pembuat kebijakan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek-dikti), termasuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) Jakarta dan Universitas Negeri (UNESA) Surabaya, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Menjembatani pemikiran pendidikan antara ilmuwan senior dan generasi milenials muslim menjadi penting bagi HMI maupun bagi Indonesia. Kita semua ingin keberlanjutan perbaikan mutu pendidikan, yang akan dilakukan oleh guru dan dosen, dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kita ingin perbaikan mutu pendidikan berjalan dengan inisiatif, kreativitas dan inovasi gagasan baru secara terencana, sistematis dan progresif. Kita ingin pembangunan sumber daya manusia berkualitas bukan hanya untuk menghadapi perubahan teknologi dan industri dimasa mendatang tetapi juga menjamin layanan pendidikan bermutu untuk semua warga negara.

Teknologi telah merubah dunia industri. Industri berbasis teknologi menuntut perubahan sistem pendidikan. Indonesia belum memiliki sumberdaya manusia handal untuk menghadapi kecepatan dinamika masyarakat industri global. Fluktuasi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia 1990-2018 dapat menjadi bukti bahwa pendidikan lamban merespon perubahan teknologi dan industri. Pemikir, peneliti dan praktisi pendidikan, hadir dari Papua sampai Sumatera Utara hadir disini. Kita menekuni karir bidang pendidikan tentu dan terpanggil usaha memberikan kontribusi nyata dengan memanfaatkan teknologi dalam perbaikan dan pemerataan mutu pendidikan.

Dalam masa transisi kepemimpinan nasional tahun 2019 ini, para ahli pendidikan yang pernah dibesarkan di lingkungan KAHMI, termasuk para Profesor, Doktor dan Master semuanya terpanggil untuk bekerja tuntas membantu reputasi pendidikan, mulai dari prestasi kalangan negara Asia Tenggara. Menurut data United Nations Development Programme (UNDP) terbaru, Indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 185 (2010) ke peringkat 116 (2017). Namun IPM tersebut belum setinggi capaian peringkat 101 di tahun 1990. Pada tahun 2018 peringkat Indonesia di antara Negara-negara Asia Tenggara hanya lebih baik dari Kamboja 146, Laos 139 dan Timor Leste 132. Tapi, IPM Indonesia masih jauh di bawah peringkat Thailand 83, Malaysia 57, dan Brunei Darussalam 39. Menyadari pentingnya peringkat mutu pendidikan Indonesia di ASEAN, symposium nasional bidang pendidikan ini mempertemukan ahli pendidikan berpengalaman dengan generasi milenials muslim untuk berbagi gagasan pendidikan di era industri dan teknologi dan memberikan saran untuk perumusan strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan sektor pendidikan yang akan dilakukan oleh pemerintah 2019-2024.

Symposium nasional ini mengajak para peneliti dan pengambil kebijakan pendidikan dan peserta semuanya yang hadir di sini, untuk mengkaji sistem pendidikan agar bisa lebih berhasil mempersiapkan SDM yang siap bekerja di industri dengan pemanfaat teknologi. Penguatan kemitraan antara lembaga pemerintah dan swasta, antara pemerintah nasional, provinsi, kota dan kabupaten, dan juga memperkuat kolaborasi pembangunan regional maupun internasional adalah prioritas kebutuhan pendidikan kita. Arah dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Dimiyati, Dirjen Penuatan Riset dan Pengembangan, Kemristek-dikti perlu mendapat perhatian dan memulai pemikiran mendalam tentang pendidikan oleh peserta symposium.

MN-KAHMI bersama ahli dan praktisi pendidikan peduli terhadap bonus demografi di Indonesia. Dalam rangka Perbaikan sistem pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan dan terukur kemajuannya berbasis data. Menurut Data Pokok Pendidikan (DAPODIK, 2018) Kemdikbud, Pemerintah sedang melayani 45.332.238 peserta didik, termasuk 51.7% murid laki-laki. Mereka tersebar di 219,434 sekolah termasuk SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Untuk mengeksplorasi inisiatif baru untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, Dr. Ananto Kusumo Seto, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemdikbud, menyadarkan kepada para guru, kepala sekolah, dan pengawas, juga kepala dinas pendidikan yang berada di 465 kota/kabupaten dan tersebar di 34 provinsi, tentang adanya kesenjangan pendidikan, disebut 'horizontal and vertical mismatches,' untuk diteliti lebih lanjut agar setiap

pemangku kepentingan pendidikan mau mereformulasi pendidikan di era teknologi dan industri 4.0.

Selaras dengan isu kesenjangan diatas, Prof. Dede Rosyada menawarkan ‘link and match’ sebagai solusi pendidikan menghadapi perubahan teknologi dan idustri. Data BPS 2018 menunjukkan bahwa 133,94 juta angkatan kerja, terserap di dunia usaha dan industri sebanyak 127,07 juta. Pengangguran sebesar 5.13 % (7 juta) perlu perbaikan kualifikasi, sertifikasi, penempatan, dan pendampingan usaha. Usulan penguatan peran dan kapasitas Lembaga Research and Development di setiap perguruan tinggi atau perusahaan swasta bisa menjadi awal kolaborasi antara para ahli dari perguruan tinggi dan praktisi dari perusahaan. Mampukan perguruan tinggi menjadi pioneer program kerjasama antara pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengatasi kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan? Ini kesempatan kita semua dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa.

Para pemakalah yang hadir dari berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta, termasuk dari Kementerian Agama, hadir dan berbagi hasil penelitian atau gagasan baru untuk perbaikan pembelajaran di setiap jenis, jenjang dan bentuk sekolah di Indonesia. Pendidikan seharusnya segera menemukan bentuknya yang baru, sinergi antara ketrampilan teknologi dan ketrampilan kemanusiaan dalam membangun industri ke depan. Setelah diskusi panel, pemakalah akan diskusi dan berbagi pengalaman di tiga kelompok: Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidik, guru di sekolah/madrasah atau dosen di perguruan tinggi tetap memiliki peran penting dalam pendidikan. Para ahli pembangunan pendidikan di MN-KAHMI, yang hadir di symposium ini, mengajak para akademisi, peneliti, praktisi dan inovator pendidikan agar mampu menggerakkan 3,265,688 guru, dibantu oleh 648.863 tenaga kependidikan, menjangkau sekolah tersebar di 83,447 Kelurahan/Desa di Indonesia, dan meyakinkan bahwa 45 juta peserta didik terjamin menikmati mutu pembelajaran di setiap sekolah. Untuk merespon perkembangan teknologi dan industri saat ini, Prof. Muchlas Samani dari Universitas Negeri Surabaya menegaskan, ‘apapun teori, konsep, kebijakan yang diambil, akhirnya guru yang melaksanakan dalam proses pembelajaran.’ Para ahli dan praktisi pendidikan dalam symposium ini berbagi pengalaman dalam perbaikan mutu pembelajaran maupun perluasan akses layanan pembelajaran bermutu di sekolah/madrasah.

Dua dekade terakhir, keharmonisan sosial warga bangsa Indonesia, yang pernah menjadi best practices dan lessons learnt bagi bangsa-bangsa dunia, bahkan sebagai icon kehidupan masyarakat multi agama, suku, bahasa, nampak dan terasa semakin terkoyak, seakan menjadi fakta sosial budaya, tersebar di media sosial, yang tak mampu dikendalikan oleh pemuka agama dan masyarakat maupun pemerintah. Akibatnya, gejala pertumbuhan dari anomali sosial ke kontrasosial akan menjadi konflik sosial jika tidak dikelola dengan dengan baik melalui pendidikan. Kondisi tersebut melahirkan kesadaran kolektif dan perlu adanya revitalisasi pendidikan kebangsaan. Dalam kontek pendidikan ideologi, politik, sosial, budaya, Prof. Ravik Karsidi, guru besar Sosiologi Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan Ketua Dewan Pakar Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik MN-KAHMI, menyajikan fakta dan harapan baru dalam melakukan revitalisasi pendidikan. Peserta symposium diajak memperkokoh peran pendidikan dalam

melahirkan alumni yang dewasa, berkepribadian utuh, siap melaksanakan nilai keagamaan dan kebangsaan secara terpadu, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat.

Dengan simposium ini, KAHMI Solo berinisiatif mengumpulkan para peneliti dan akademisi dari anggota Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dengan kualifikasi Profesor, Doktor dan Master. Mereka berasal dari berbagai lembaga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dari Sabang sampai Merauke. KAHMI bekerjasama UNS memberikan kesempatan kepada para ilmuwan dan praktisi pendidikan, baik bukan/warga KAHMI/HMI untuk berbagi keahlian dan pengalaman untuk melahirkan inisiatif baru tentang kebijakan dan program pendidikan yang berbasis teknologi dan mendukung industri terkini.

Diikuti oleh sebanyak kurang lebih 900 peserta, mereka mendaftar lewat website dan manual, MN KAHMI melalui Simposium ini membuat sejarah baru di Solo. Kami mengharapkan para pemakalah dapat menyumbangkan konsep dan praktek pendidikan yang berorientasi industri berdasarkan hasil penelitian, karya inovasi dan pengalaman kolektif oleh para ilmuwan muslim. Setiap temuan dan gagasan akan dipertimbangkan untuk merumuskan:

1. Saran dan konsep perbaikan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (12 tahun) yang berkelanjutan
2. Saran dan konsep perbaikan mutu pendidikan vokasi yang berkelanjutan
3. Saran dan konsep perbaikan mutu pendidikan tinggi, riset dan inovasi yang mendorong pembangunan nasional.

Simposium ini didampingi oleh para senior KAHMI yang selalu setia dan akan berbakti kepada bangsa Indonesia, tim ahli MN-KAHMI, termasuk Prof. Mahfud MD, Prof. Ravik Karsidi, dan Prof. Asep Syaifuddin. Kami panitia berterimakasih, atas kepercayaan bahwa symposium dilaksanakan di kota Solo.

Seluruh anggota panitia symposium mengucapkan selamat datang di Solo. Kami mengucapkan terimakasih kepada para pembicara utama

1. Dr. Muhammad Dimiyati , Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Dr. Ananto Kusuma Seto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Prof. Muchlas Samani, dosen Universitas Negeri Surabaya.
4. Prof. Ravik Karsidi, Rektor Universitas Sebelas Maret.
5. Prof. Dede Rosyada, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Para narasumber telah memberikan data yang akurat dan lengkap disertai pembahasan yang jelas dalam symposium ini. Semuanya materi bermanfaat untuk menambah pengetahuan, memantapkan sikap dan meningkatkan ketrampilan dalam mengelola pendidikan setelah kembali dari symposium ini.

Bersama pengurus Majelis Daerah KAHMI di Solo, panitia symposium melibatkan juga ilmuwan, peneliti dan praktisi pendidikan warga KAHMI, termasuk:

1. Prof. Joko Nurkamto, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS
2. DR. Muhammad Jamin, Wakil Rektor II UNS dan dosen Fakultas Hukum UNS

3. DR. Munawir Yusuf, Wakil Dekan I - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. DR. Muhtar Mahmud, Staf Ahli Rektor bidang Keuangan dan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS
5. Lukman Hakim, PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS
6. Agung Nur Probohudono, PhD, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS
7. Widi Wardoyo, MA, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS
8. Abdul Rahman, PhD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS

Tepat kiranya, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada para mahasiswa, warga HMI Cabang Surakarta. Penuhnya ruangan ini adalah kebahagiaan kita semua. Hadirnya hampir 1000 peserta adalah kesuksesan kerja Anda. You are the dream team. Enjoy the Great success. Mulai hari, HMI di Solo akan bangkit kembali. Bangkit ide besar. Inisiatif brilliant. Membangun umat Islam. Melahirkan pemimpin bangsa. Yakusa, Yakin Usaha Sampai.

Yang terhormat kakanda, Prof. Komarudin, mohon kiranya berkenan memberikan sambutan dan membuka resmi symposium ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Abdul Rahman, PhD.

DAFTAR ISI

Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
Buku Ajar Penyebab Siswa Kesulitan Belajar Sains, Telaah Kritis pada Buku Ajar dan Cara Menjelaskan Pelajaran Sains Sekolah Dasar	1
Abdul Khoir HS	
Pembelajaran yang Berkualitas dan Berkarakter untuk Menghasilkan Lulusan yang Unggul di Era Industri 4.0	10
Aniek Irawatie, Iswahyuni dan Marina Eri Setiawati	
Desain Pengembangan Model Penguatan Hasil Belajar Afektif pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Fader	19
Lailial Muhtifah dan Hadiatus Sa'adah	
Hubungan Antara <i>Loneliness</i> dan Kepercayaan Diri dengan Penyesuaian Diri pada Mahasiswa Program Afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta	36
Letrine Paula Awek, Munawir Yusuf dan Afia Fitriani	
Pengembangan Pendidikan Vokasi Berbasis Humanisme Religius	44
Ida Zahara Adibah	
Efektivitas Hasil Belajar Menggunakan Media Papan Teka-Teki Logika (Pateka) pada Pokok Bahasan Gerbang Logika	52
Sigit Dwi Saputro	
Penguatan Identitas Vokasional Santri Memasuki Era Industri 4.0*	62
Dina Hermina	
Efikasi Diri Akademik Santri Baru Ditinjau dari Dukungan Guru dan Interaksi Teman Sebaya	69
Hafizh Khofaria Rosidah dan Siti Nurina Hakim	
Menuju Pendidikan Hukum yang Komprehensif, Progresif dan Relijius	78
Muhammad Nur Islami	
Kebahagiaan Di Tempat Kerja: Kajian Teoretik Upaya Peningkatan Mutu Guru ...	93
Nurochim dan Siti Ngaisah	
Orientasi Karir Mahasiswa Disabilitas (Studi Kasus Mahasiswa Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa di Universitas Sebelas Maret)	101
Meisayu Dwitami dan Munawir Yusuf	

Pembelajaran Bi-Gionistic Kecakapan Hidup Tradisi Lokal dalam Pendidikan Informal pada Masyarakat di Pedesaan	115
Zulkarnain	
Pendidikan Agama Islam Multikultural Dalam Pandangan Said Nursi dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam Multikultural di Indonesia	125
M. Khoirul Hadi al-Asy ari dan Alivia Nadatul Aisyi	
Pendidikan dan Kesempatan Memperoleh Akses Belajar: Perguruan Tinggi Islam di Papua	148
Ismail Suardi Wekke	
Pengembangan Model Penilaian pada Mahasiswa Strata Satu PGSD	164
Rahmi Tasty Rosandi, Yetti Supriyati dan Elindra Yetti	
Penguatan Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan Di Madrasah	174
M. Musfiqon	
Penugasan Permasalahan Dan Solusi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi	191
Siti Aisyah Ginting	
Peningkatan Kecerdasan Logika Matematika Melalui Permainan Bingo	200
Petronela J. P. Suripatty, Nadiroh dan Yuliani Nurani	
Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Indonesia Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia	215
Taufiqurokhman, Nirmala Afrianti Sahi dan Andriansyah	
Sukoreno Dan Desa Pancasila: Studi Membangun Pluralisme Pendidikan Di Ujung Timur Jawa	235
Afifatul Munawiroh dan Ahmad Musthofa Lutfiyanto	
Strategi Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Pendidikan Dan Ekonomi Pasca Bencana Alam	243
Hasanuddin, Alamsyah dan Abdul Malik	
Tipologi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Islam Terpadu (SIT)	249
Aji Sofanudin	
<i>Values Education And Global Citizenship: Towards The Achievement of Sustainable Development Goals And Humanities</i>	259
Abi Sujak dan Cahya Kusuma Ratih	
Pemberdayaan Pendidikan Di Madrasah (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Suku Laut (Duono) Kuala Tungkal Provinsi Jambi)	269
M. Syahrani Jailani	

Implikasi Industri Terhadap Adaptasi Peran Perguruan Tinggi Abdul Rahman, Budi Santosa dan Imam Mujahid	286
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Abad 21: Karakteristik, Asas dan Prinsip M. Alfian Santoso	299
Situasi Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan Siti Kasiyati dan Abdullah Tri Wahyudi	310
Variasi Model Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis “ <i>Tarbiya Mukmin Ulul Albab</i> ” Lailial Muhtifah dan Hadiatus Sa’adah	311
Budaya Mutu Dalam Bingkai Profesionalitas Dosen (Autokritik untuk Menjadi Dosen yang Sadar pada Profesinya) Adri Efferi	327
<i>Lesson Study</i> Sebagai Model Pembinaan Guru di Sekolah Tjipto Subadi	334
<i>Modalities to Unleash University Potential for Social Entrepreneurship: Indonesian Cases</i> Hafid Abbas	342
Model Penilaian Kemampuan Penalaran Proporsional Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar Awal Rahmi Tasty Rosandi, Yetti Supriyati dan Elindra Yetti	359
Mutu Lulusan Perguruan Tinggi, Antara <i>Softskill</i> dan Ijazah: Sebuah Pemikiran ... Okta Hadi Nurcahyono	372
Pentingnya Implementasi Good University Governance (GUG) Sebagai Penyempurna Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi ... Siti Nurjanah	373
Perguruan Tinggi, Riset, dan Inovasi: Upaya Merumuskan Kompetensi Perguruan Tinggi Budi Santosa dan Imam Mujahid	374
Regulasi Berbasis Hukum Pancasila untuk Meningkatkan Mutu Penelitian di Pendidik Tinggi Hassan Suryono	380

Sinergi Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi: <i>Best Practices</i> Dari Kalimantan Timur	382
Dwi Nugroho Hidayanto dan Abdul Rahman	

BUKU AJAR PENYEBAB SISWA KESULITAN BELAJAR SAINS TELAAH KRITIS PADA BUKU AJAR DAN CARA MENJELASKAN PELAJARAN SAINS SEKOLAH DASAR

Abdul Khoir HS

ABSTRACT

*Field study of science is one field of study is considered less desirable and difficult to learn. This is evidenced by the results of studying these subjects are low. The difficulty can be due to teachers and textbooks. Written textbook does not consider aspects of developmental psychology, the limitations of teaching styles and intelligences that determine the effectiveness of student learning. The presence of textbooks to teachers as well influence the way of explaining the material covered in each learning activity. By using qualitative research methods of science textbooks for grade IV elementary schools in three aspects of the textbook is the cause of learning difficulties in science. 1) Using subject matter many foreign terms, 2) material and impressed a lot of solid, 3) tend to be much memory. From this research, teachers are expected to consider: **first**, study materials science as a subject in its own right, but it taught systematically. **Second**, aspects of scientific work. **Third**, the use-oriented approach to the students.*

Kata kunci: *kesulitan belajar, istilah asing, padat dan cenderung menghafal.*

Tulisan ini merupakan ringkasan salah satu hasil temuan penelitian penulis pada kegiatan pembelajaran Sains pada beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi. Dari tulisan ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan materi dan kegiatan pembelajaran bidang sains di sekolah. Sudah menjadi animo umum dikalangan siswa bahwa mata pelajaran atau bidang studi Sains termasuk salah satu mata pelajaran yang kurang disukai dan dianggap sulit untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil belajar mata pelajaran ini yang rendah.

Kesulitan belajar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesulitan yang datang dari aspek eksternal siswa, karena jika aspek internal tentu ranahnya adalah fisiologis dan psikologis. Faktor di luar diri siswa berupa lingkungan sosial yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kedua faktor ini penting dalam membantu keberhasilan belajar siswa. Faktor lingkungan keluarga yang berupa penghasilan orang tua dan pendidikan orang tua akan mempengaruhi penyediaan fasilitas belajar siswa dan perhatian orang tua terhadap kemajuan belajar anaknya juga akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Faktor lingkungan sekolah berupa guru, buku ajar, media yang digunakan, perpustakaan, laboratorium dan praktikum.

Kesulitan belajar karena faktor guru dapat berupa tidak menguasai materi pelajaran, tidak cerdasnya menggunakan metode dan media pembelajaran sehingga

pembelajaran berlangsung dengan menjenuhkan, membingungkan dan melahirkan konvensasi tingkah laku siswa yang tidak relevan. Selanjutnya akan berpengaruh juga pada pendampingan guru dalam memanfaatkan perpustakaan dan laboratorium atau praktikum. Tentu faktor ini menempatkan katagori utama kegagalan pembelajaran.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang datang dari bahan ajar atau buku paket pelajaran. Buku pelajaran merupakan kumpulan materi pelajaran yang dirancang untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. sebagaimana lazimnya, guru akan menggunakan buku ajar sebagai media utama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buku juga menjadi pegangan utama siswa dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran. Karena itu buku menjadi sumber belajar yang signifikan pada keberhasilan pembelajaran. Buku yang didesain atau ditulis dengan tidak mempertimbangkan aspek keterbatasan, gaya belajar dan kecerdasan siswa tentu menentukan efektivitas pemahaman siswa. Keberadaan buku pelajaran juga berpengaruh pada guru dalam cara menjelaskan materi yang dibahas di setiap kali kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan atau catatan perilaku yang dapat diamati, yang menghasilkan temuan-temuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada dua obyek data yang di teliti yakni buku paket pelajaran Sains dan kegiatan pembelajaran Sains.

Temuan dan Pembahasan Penelitian

Telaah kritis penulis pada buku paket pelajaran Sains dan telaah data hasil observasi serta wawancara dengan pelaku utama kegiatan pembelajaran ditemukan adanya beberapa penyebab kesulitan siswa dalam belajar Sains, diantaranya:

1. Materi banyak menggunakan istilah dan kalimat asing

Yang dimaksud istilah asing adalah satu kata atau istilah yang digunakan dalam materi pelajaran Sains yang berasal dari bahasa aslinya dan belum atau tidak ditemukan padananya dalam bahasa Indonesia. sedangkan kalimat asing adalah yang digunakan untuk menjelaskan istilah tertentu namun sulit dimengerti dan membingungkan (ambigu). Pada buku paket pelajaran yang berjudul "SAINS untuk Sekolah Dasar Kelas 4", dengan Penyusun Tim BKG yakni Drs.R.B. Legowo, A.Malik Thachir,S.K., Parmin, S.Pd., Drs.Gordo Mikrodo, Lukman M.Soleh,B.A., dan Suroto Eko Susanto,S.Pd., Editor; Chrisnawati, penerbit Erlangga,2006, sistematika tulisan buku dibagi menjadi dua semester, masing-masing terdapat 2 unit terdiri dari 8 bab untuk semester 1 dan 2 unit dengan 7 bab untuk semester 2.

Temuan penelitian menunjukkan terdapat 123 kata atau istilah asing dan 56 kalimat yang sulit dimengerti bagi siswa. Istilah dan kalimat asing yang dimaksud diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut; (sebagian dari banyak contoh yang ditemukan)

Istilah asing	Kalimat asing
<p>Bab 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lordosis • Kifosis • Skoliosis • Kalsium • Forforus • Rakitis • Osteoarthritis • Tulang ubun-ubun (<i>lubang di kepala</i>) • Tulang pipi (<i>pipi itu lembut</i>) • Tulang sakrum • Tulang belakang (<i>apa ada tulang depan</i>) • Tulang hasta (<i>panjang</i>) • Tulang ekor • Tulang kering (<i>apa ada tulang basah</i>) 	<p>Bab 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tulang orang <i>dewasa 206</i> tulang. Jumlah tulang <i>bayi lebih dari 300</i> tulang • <i>Rangka anggota gerak</i> terdiri dari anggota gerak atas (tangan) dan anggota gerak bawah (kaki) • <i>Penonjolan</i> di sekitar persendian
<p>Bab 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kornea • Iris • Pupil • Lensa • Humor berair • Humor bening • Retina • Saraf mata • Otot mata • <i>Rabun Jauh – Miopi</i> • <i>Rabun dekat – hipermetropi</i> • Presbiopi • Katarak • Saluran <i>eustachius</i> • <i>Gendang</i> telinga (alat musik) • Tulang <i>martil</i> (<i>pemukul</i>) • Landasan • Sanggurdi • Sakulus dan utrikulus • Koklea • Epidermis • Dermis • Kulit ari • Lapisan <i>malpighi</i> • <i>Kelenjar</i> minyak • <i>Pembuluh</i> darah 	<p>Bab 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bulu mata tumbuh di <i>sepanjang tepi</i> kelopak mata • Penderita miopi harus menggunakan Kacamata <i>berlensa negatif</i> • Presbiopi menggunakan kacamata <i>berlensa ganda</i> • Ada tiga saluran <i>setengah lingkaran</i> • <i>Infeksi virus</i> yang menyerang telinga dapat mengakibatkan tuli • Kelenjar minyak <i>menghasilkan minyak</i> yang berfungsi sebagai <i>pelumas</i> • Saraf peraba menerima <i>rangsang</i> dari benda yang kita sentuh • Kurang <i>seimbang</i>nya <i>hormon</i> dalam tubuh dan.....

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Saraf</i> peraba • Elastis • Jamur (sayuran) • hormon • dst (pada setiap bab terdapat istilah asing) 	
---	--

Contoh-contoh istilah asing dan kalimat yang sulit dimengerti sebagaimana di atas hanya diambil dari 2 bab bagian awal dari 15 bab isi buku paket tersebut. Kata dan kalimat yang penulis tulis dengan huruf *miring* sebagai kata kunci yang menyebabkan terjadinya kesulitan untuk dimengerti dan membingungkan (ambigu). Pada istilah asing, misalnya istilah Tulang *Ubun-ubun*. *Ubun-ubun* dipersepsi oleh siswa adalah lubang ubun-ubun yang ada dibagian atas kepala – pertanyaan dengan ekspresi keheranan adalah “*ko’ dilubang ada tulang?*”. Tulang *pipi*, pipi yang siswa pahami adalah dagin yang lembut di bagian kiri dan kanan wajah. Pertanyaannya adalah “*yang keras dibagian pipi itu apakah tulang pipi atau tengkorak kepala?*”. Tulang *Martil*, *Martil* dipersepsi siswa adalah alat pemukul paku yang biasa digunakan tukang bangunan.

Sedangkan pada kalimat yang sulit dimengerti misalnya, “Jumlah tulang orang dewasa 206 tulang. Jumlah tulang *bayi lebih dari 300* tulang”. Kalimat itu memunculkan pertanyaan “mengapa jumlah tulang bisa berkurang sedangkan bentuk tubuh orang dewasa maupun anak-anak sama saja”. Sayangnya tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut dari pernyataan itu. “*Infeksi virus* yang menyerang telinga dapat mengakibatkan tuli”. Infeksi itu apa? dan virus itu apa? Untuk istilah ini pun tidak ditemukan penjelasannya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Penggunaan istilah asing pada pelajaran Sains hemat penulis memang tidak perlu dipersoalkan mengingat istilah itu sudah dibakukan menjadi istilah yang berlaku dalam Sains. siswa perlu disosialisasi dan diperkenalkan dengan istilah ilmu pengetahuan yang berlaku secara umum. Persoalannya adalah bagaimana memberikan kemudahan pemahaman siswa pada istilah-istilah asing dan kalimat-kalimat (pernyataan) ilmu pengetahuan Sains. persoalan ini tentu saja hanya bisa dijawab dengan hadirnya guru yang kompeten baik dalam penguasaan materi pelajaran, penggunaan metode dan yang terpenting keterampilan menggunakan media dan sumber belajar. Ketersediaan sarana jika tidak didampingi oleh guru yang handal tentu juga tidak menjawab persoalan. Namun demikian penggunaan istilah asing harus disertai dengan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti siswa dan menghindari penggunaan kata atau kalimat yang ambigu.

2. Materi terlalu banyak dan terkesan padat

Sejak peneliti memulai pengamatan terhadap proses belajar mengajar, data yang diperoleh menemukan bahwa materi Sains yang dipelajari oleh para siswa di kelas IV sekolah dasar sangat banyak dan terkesan padat. Ruang lingkup kajian dari setiap pokok bahasan sangat luas ditambah pokok bahasan berikutnya yang juga memiliki karakter yang sama.

Dalam satu kali jam pelajaran guru harus mampu mengejar target kurikulum yang sangat banyak, sementara muatan materi berikutnya kurang memiliki jatah waktu

penyampaian yang cukup. Sehingga pada beberapa pertemuan guru harus memadatkan materi yang tentunya hal ini cukup menjadi salah satu penyebab munculnya kesulitan siswa dalam mempelajari Sains.

Hasil penelitian dapat menunjukkan beberapa bukti yang menggambarkan kepadatan materi; (sebagian dari banyak contoh yang ditemukan)

“Disamping gambar ini coba kalian amati model atau rangka manusia yang tersusun dari 206 tulang-tulang yang saling berhubungan dan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu rangka kepala, rangka badan dan rangka anggota gerak.
” penyakit mata yang sering muncul diantaranya adalah Katarak, Trakoma, Glukoma, dan Alergi. Katarak adalah salah satu penyakit mata yang disebabkan oleh lensa mata buram, sedangkan Trakoma disebabkan oleh virus atau bakteri. Glukoma
Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari telinga dan kegunaannya serta Hidung dan Kegunaannya pula.
Pada gambar telinga ini terdapat bagian-bagian telinga antara lain, daun telinga, tiga buah tulang pendengaran saraf pendengaran, rumah siput, saluran eustachius, selaput pendengaran (gendang telinga), lubang telinga dan saluran setengah lingkaran.”
“Setelah kita membicarakan masalah lidah, kini bapak akan membahas masalah kulit dan kegunaannya

Pernyataan-pernyataan dalam contoh di atas tidak cukup disampaikan begitu saja melainkan menuntut penjelasan yang memadai kepada siswa. Sementara waktu yang tersedia sangat terbatas

Gambaran di atas diperkuat juga dengan jawaban guru saat di tanyakan ”Bagaimana penilaian Bapak terhadap materi Sains yang diajarkan pada siswa? ” jawabannya “Menurut saya kurikulum terbaru dengan muatan materi seperti yang tadi saya ajarkan, itu sangat numpuk. Terkesan dipadatkan, padahal anak-anak itukan perlu banyak menghafal istilah-istilah yang disampaikan oleh guru. Jadi mungkin Bapak juga bisa membayangkan, bagaimana mungkin anak dapat menguasai materi dengan baik jika dalam waktu yang bersamaan mereka harus menghafal istilah banyak, materi pun sangat padat.”

Penilaian dan pengakuan guru pengajar materi Sain tersebut mengandung makna bahwa kebijakan kurikulum yang mencantumkan materi pelajaran sains tersebut cukup memberatkan baik bagi guru apalagi siswa, dengan banyak dan padatnya materi yang harus mereka pelajari. Dengan demikian hal itu dapat menjadi salah satu penyebab kesulitan para siswa belajar sains.

3. Meteri cenderung harus banyak di hafal

Pengolahan data yang diperoleh baik melalui observasi maupun wawancara menunjukkan materi pelajaran Sains cenderung harus banyak dihafal oleh siswa agar dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Perhatikan kalimat-kalimat yang muncul dalam proses pembelajaran berlangsung dibawah ini;

“Anak-anak masih ingat penjelasan Bapak minggu kemarin?”, tanya laki-laki itu setelah selesai membagikan kertas dan kembali ke depan kelas. “Masih, Pak!”, jawab anak-anak bersama-sama

Isi laporannya sebagai berikut :”rangka badan manusia terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bagu dan tulang gelang panggul.”

dalam raut muka mereka merasa kebingungan setelah mendengar banyak istilah yang asing ditelinga mereka.

Memperhatikan ungkapan baik guru maupun para siswa dari hasil catatan lapangan tersebut, mengandung makna bahwa materi yang sedang mereka pelajari sangat memungkinkan untuk dikuasai apabila memulai cara menghafal. Sebab pengenalan banyak istilah, dan guru menuntut membuat laporan hasil para siswa membaca sajian materi tersebut, akan dapat dilakukan siswa dengan menghafal.

Penggunaan istilah asing, dan padatnya materi yang dipelajari, merupakan indikasi bahwa untuk dapat menguasai materi pelajaran sains harus melalui menghafal. Sebab tanpa melalui proses menghafal, istilah-istilah asing untuk memahami materi dari pelajaran sains itu akan sulit dikuasai siswa.

Kesimpulan

Standar kompetensi mata pelajaran Sains di Sekolah Dasar berdasarkan pedoman pembelajaran mata pelajaran Sains yang dirumuskan oleh Depdiknas tahun 2004 adalah:

1. mampu bersikap ilmiah dengan penekanan pada sikap ingin tahu, bertanya, bekerjasama, dan peka terhadap makhluk dan lingkungan.
2. mampu menterjemahkan perilaku alam tentang diri dan lingkungan di sekitar rumah dan sekolah
3. mampu memahami proses pembentukan ilmu dan melakukan inkuiri ilmiah melalui pengamatan dan sesekali melakukan penelitian sederhana dalam lingkup pengalamannya
4. mampu memanfaatkan sains dan merancang/ membuat produk teknologi sederhana dengan menerapkan prinsip sains dan mampu mengelola lingkungan di sekitar rumah dan sekolah serta memiliki saran/ usul untuk mengatasi dampak negatif teknologi di sekitar rumah dan sekolah.

Kompetensi itu diharapkan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, namun hal ini ditentukan oleh proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu sebaiknya guru mampu mengatasi kesulitan belajar sains pada siswa. baik yang disebabkan oleh muatan materi pelajaran sains yang dianggap terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing yang sulit difahami atau karena materi yang terlalu banyak dan padat serta menuntut banyaknya hapalan.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran sains dapat menjadikan rambu-rambu pembelajaran sebagai berikut, *pertama*; bahan kajian sains sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diajarkan secara sistematis. *Kedua*; aspek kerja ilmiah, bukanlah

bahan ajar melaikan cara untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Karena itu terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan dalam kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. *Ketiga*; pendekatan yang digunakan berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari menentukan “apa yang akan dipelajari” ke “bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa”. Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan dan nara sumber lain.

Biasanya tidak akan secara penuh memahami suatu konsep pada saat pertama kali diajarkan. Oleh karena itu dalam merancang kegiatan pembelajaran guru perlu menyadari keberadaan anak-anak dalam tahapan belajar. Mulyono Abdurahman dalam penelitiannya tentang pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, 2003. mengemukakan ada empat tahapan belajar yang perlu diperhatikan yaitu perolehan (*acquisition*), kecakapan (*proficiency*), pemeliharaan (*maintenance*) dan generalisasi (*Generalization*).

Perolehan. Pada tahap ini anak telah terbuka terhadap pengetahuan baru tetapi belum secara penuh memahaminya. Anak masih memerlukan banyak dorongan dan pengaruh dari guru untuk menggunakan pengetahuan tersebut.

Kecakapan. Pada tahap ini anak mulai memahami pengetahuan atau keterampilan tetapi masih memerlukan banyak latihan

Pemeliharaan. Anak dapat memelihara atau mempertahankan suatu kinerja taraf tinggi setelah pembelajaran langsung dan ulangan penguatan (*reinforcement*) dihilangkan.

Generalisasi. Pada tahap ini anak telah memiliki dan menginternalisasikan pengetahuan yang dipelajarinya sehingga ia dapat menerapkannya ke dalam berbagai situasi.

Jika dikaitkan dengan beberapa teori yang dikemukakan di atas, kesulitan belajar yang dialami siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri khususnya diwilayah kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada mata pelajaran Sains, sesungguhnya dapat dikurangi manakala guru secara tekun dan konsisten memahami proses pembelajaran secara baik dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Mulyono. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003
- Bloom, Benyamin S. et al, *Taxonomy of Education Obyektives The Classification of Education Gools Handbook I: Cognitive Domain*, New York: Longman Inc. 1956.
- Bogdan, Robert C and Sar Knopp Billen, *Qualitative Research for Education to Theori and Methods* (London : Allyn and Bacon Inc, 1982
- Bradford, Pamela, et al. *Learning*. Multanamah : Suit. 2000, <http://WWW.pacificor.Fondation.org>.
- Djaafar, Tengku Zahara, *Konstrubusi Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar*, Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2001

- Depdiknas, *Kurikulum 2004, mata pelajaran Sains untuk Sekolah Dasar*, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003
- Degeng, I Nyoman S. *Ilmu Pengajaran; Taksonomi Variabel*, Depdikbud Ditjen Dikti, Jakarta, 1989
- Gagne, Robert M. *The Condition of Learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977
- Miarso, Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta. Prenada Media, 2004
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993
- _____, *Penelitian Naturalistik*, Pascasarjana IKIP Jakarta, 1984
- Morris, Barbara. *Learning in Elementary and Early Childhood Education*, Columbia: University of Missouri. 2002
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian naturalistic Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 1992
- _____, *Diktat asas-asas Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Nonci, Syamsudin. *Laporan Penelitian; Hubungan antara Lingkungan Siswa dengan Kemampuan Belajar KIMIA di Sekolah Menengah seSulawesi Selatan*, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IKIP Ujung Pandang, 1992
- Purwanto, Ngalm. *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakaya, Bandung, 1986
- Sardiman, AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta. Rajawali Pers. 2001
- Slamento, DM. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Supartini, Endang. *Laporan Penelitian : Studi Tentang Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta*, FKIP IKIP Yogyakarta, 1992
- Spradly, James P. *Participant Observation* (new York : Holt Rinkhart and Winston, 1980
- Soerjabrata, Soemardi. *Psikologi Pendidikan*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 2002
- Sudirdjo, Sudarsono dan Evelina Siregar dalam Dewi Salma Prawiradilaga. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta. Universitas Negeri Jakarta, 2004
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003



Abdul Khoir HS, Lahir di Bekasi, 24 Pebruari 1969. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Dakwah IAIN SGD Bandung tahun 1993, S2 tahun 2008 dan S3 2015 pada jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1997 hingga sekarang masih menjadi dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi. Aktif sejak mahasiswa baik intra maupun ekstra universiter. Aktif di HMI mulai Komisariat hingga tingkat cabang Bandung antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1994. Aktif diberbagai kegiatan penelitian baik bidang agama, sosial, budaya, dan pendidikan. Saat ini dipercaya menjadi direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Kajian Agama (LP-dika) FAI UNISMA Bekasi. Anggota aktif Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (PUSKOTDA) Bekasi. Pernah menjadi pimpinan nasional delegasi pertukaran Pemuda Indonesia-Jepang bidang *Local Development* tahun 2003 dan mengikuti *ASEAN Regional Leaders Forum* di Thailand tahun 2008. Penulis dan penyusun Buku Kamus Dialek Bekasi 2002 dan Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Bekasi 2006 serta beberapa buku pembelajaran lainnya.

Alamat kantor; Fak Agama Islam UNISMA Bekasi Jl. Cut Mutia 83 Kota Bekasi dan alamat rumah ; Jl. Jatimayung 3 gg. Hikmah Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi. Email. Juragankhoir2@gmail.com

PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN YANG UNGGUL DI ERA INDUSTRI 4.0

Aniek Irawatie¹⁾, Iswahyuni²⁾, dan Marina Eri Setiawati³⁾

¹⁾FISIP UPN Veteran Jakarta, Jakarta, irawatieaniek@yahoo.com

²⁾FISIP UPN Veteran Jakarta, Jakarta, Iswahyuni_upnvj@yahoo.co.id

³⁾FIKES UPN Veteran Jakarta, marinaerysetiawati@ymail

ABSTRAK

Gerakan pembaharuan pendidikan era Industri 4.0 saat ini menjadi kebutuhan bahkan suatu keharusan bagi perguruan tinggi baik PTN maupun PTS sehingga diperlukan pembaharuan dan perubahan budaya baru untuk standarisasi pendidikan. Paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi juga harus diselaraskan dengan era industri 4.0, seperti halnya pembaharuan 3 Literasi baru yakni digital, teknologi dan human ; kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim serta entrepreneurship dan internship agar diwajibkan. Perubahan era industri 4.0 merupakan tantangan pendidikan ke depan bagi perguruan tinggi yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang tidak akan tergantikan dengan mesin, robot. Proses pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, salah satunya adalah peran dosen yang juga sebagai unsur dinamis suatu kesatuan dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran yang terkait pendidikan karakter merupakan bentuk perkembangan pembelajaran secara revolusioner yang mampu memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan pembelajaran seperti kurikulum, metode, evaluasi hingga media pembelajaran berkualitas tidak ada salahnya untuk diterapkan yang tentu dimaksudkan agar pembelajaran yang dilakukan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki karakter kepribadian yang kuat dan unggul.

Kata Kunci: *Pembelajaran, Berkualitas, Berkarakter, Industri 4.0*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 akan mendapatkan bonus demografi akibat porsi penduduk produktifnya lebih banyak dibanding jumlah penduduk non produktif atau disebut angka “*dependency ratio*” yang diperkirakan berada pada kategori terendah selama ini yakni sekitar 44% terutama pada tahun 2030. Bonus demografi ini bisa saja akan berubah menjadi suatu bencana demografi apabila salah dalam menata dan melaksanakan pendidikan.

Sistem pendekatan pembelajaran pada abad ke-21 tujuan pendidikannya adalah merupakan tugas dan peran aktif dosen yang memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran dimana diperlukan generasi muda yang menguasai keterampilan dan keahlian, meliputi: keunggulan intelektual, keunggulan vocational, keunggulan emosional, keunggulan moral dan keunggulan spiritual.

Berubahnya tujuan pendidikan abad ke-21 saat ini sudah mulai tergeser dengan pembaharuan pendidikan era Industri 4.0. Gerakan pembaharuan pendidikan era Industri 4.0 saat ini menjadi kebutuhan bahkan suatu keharusan bagi perguruan tinggi baik PTN maupun PTS sehingga diperlukan pembaharuan dan perubahan budaya baru untuk standarisasi pendidikan. Paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi juga harus diselaraskan dengan era industri 4.0, seperti halnya pembaharuan 3 Literasi baru yakni digital, teknologi dan human; kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim serta *ntrepreneurship* dan *internship* agar diwajibkan.

Perubahan dunia yang demikian cepat tentunya harus diiringi oleh praktik pendidikan yang relevan dengan tuntutan perubahan tersebut. Perubahan ini tentu juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua PTN maupun PTS, karena dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman adalah perguruan tinggi mampu mengharmonisasikan pendidikan era industri 4,0 dengan mengutamakan terbentuknya “*life skills*” dan “*soft skills*” disamping “*hard skills*” yang menjadi konsep pendidikan abad ke-21.

Banyak aspek yang dapat mengubah cara berpikir manusia di era digital, dimana karakteristik yang muncul di dunia digital abad ke-21 peran civitas akademika harus selalu menjelajah jejak teknologi, mampu menciptakan ide dan ilmu yang akan dibuat, secara sosial juga mampu berinteraksi serta berkolaborasi dalam melihat berbagai aspek yang akan diterapkan.

Peran tenaga pendidik amat sangat diperlukan untuk menjadi pemandu dalam kegiatan proses pembelajaran saat ini, apalagi tenaga pendidik di era revolusi industri 4.0 harus meningkatkan pemahaman dalam mengekspresikan diri di bidang literasi media, memahami informasi yang akan dibagikan kepada para peserta didik serta menemukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan akademisi literasi digital.

Peserta didik yang dihadapi dosen saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0. Ini menunjukkan bahwa peserta didik yang akan diluluskan harus mampu menjawab tantangan industri 4.0. Era Industri 4.0 tentu kompetensi yang dibutuhkan dalam era Pendidikan 4.0 adalah: Keterampilan berpikir kritis dan Pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skill*). Kompetensi ini sangat

penting dimiliki peserta didik dalam pembelajaran abad ke-21, sedangkan dosen 4.0 harus mampu meramu metode proses pembelajaran sehingga dapat mengeksplor kompetensi ini dari diri peserta didik

Apakah proses pembelajaran ini dapat terjadi dan selaras dengan baik? Tentu jawabannya adalah semua pihak dalam hal ini civitas akademika harus meningkatkan kolaborasi dalam orientasi pendidikan mendatang serta mengubah kinerja sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kualitas pola pikir pelajar dan penguatan digitalisasi pendidikan yang berbasis aplikasi.

PEMBAHASAN

Konteks pendidikan manusia abad ke-21, dimana asah *skill* terhadap keterampilan digital (*digital literacy skill*), keterampilan belajar dan inovasi (*learning and innovation skill*) serta keterampilan kehidupan dan karier (*life and career skill*) menjadi satu keharusan, maka peran dosen menjadi teramat penting dalam proses pembelajaran, terutama ketika dikaitkan dengan pendidikan karakter.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003). Mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. (BSNP: 2010).

Mempersiapkan sumberdaya manusia dalam dunia pasang surut, dinamis, *unpredictable*; perilaku yang kreatif; membebaskan kecerdasan individu; serta menghasilkan innovator, semua ini merupakan tujuan pendidikan abad 21. Model pembelajaran pada abad ke-21 tersebut mengharapkan pendidikan dapat menjadikan individu-individu yang mandiri, sebagai pelajar yang mandiri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi industri 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap (abad ke-18), revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis. Selanjutnya muncul revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik yang memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lainnya yang mengubah wajah dunia secara signifikan.

Disruptif teknologi Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kemunculan komputer cerdas, super atau Intelegensi Artifisial. Melihat kondisi ini tentu akan banyak pekerjaan yang biasa dikerjakan dengan tenaga manusia akan hilang digantikan dengan robot atau kecerdasan buatan. Apakah kondisi itu akan mengurangi tenaga kerja? Jika secara positif menghadapi kondisi saat ini maka bisa menjadi peluang karena banyak

bidang pekerjaan baru yang muncul dengan kreativitas, inovasi yang menjadi penyeimbangannya. Untuk bisa membaaur dan menang dalam “*disruption era*”, maka manusia harus memiliki kemampuan yang tepat, memiliki keterampilan yang mumpuni dan keahlian yang mendukungnya, hal ini dikarenakan bahwa hanya orang-orang kreatif, inovatif, komunikatif dan kolaboratiflah yang bisa bertahan dan memenangkan persaingan.

Perubahan era industri 4.0 merupakan tantangan pendidikan ke depan bagi perguruan tinggi yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang tidak akan tergantikan dengan mesin, robot. Selanjutnya apa yang harus dipersiapkan? Persiapan untuk sukses di Era Revolusi Industri 4.0 dan Era Disruptif tersebut, pemerintah melalui jalur pendidikan seperti terdapat dalam kurikulum di perguruan tinggi untuk setiap lulusannya harus memiliki minimal empat kompetensi yaitu:

1. *Academic Knowledge*
2. *Skill of Thinking*
3. *Management Skills*
4. *Communication Skills*

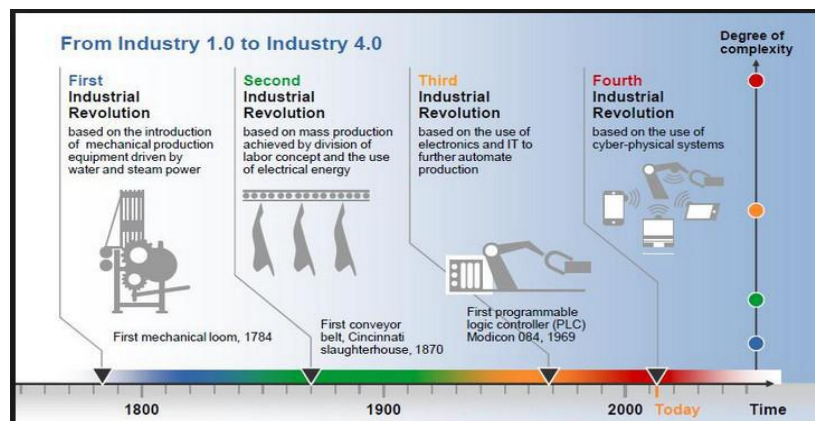
Menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyampaikan bahwa tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemenristekdikti agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia ditengah persaingan. Untuk itu Pendidikan Tinggi wajib merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, dan risbang hingga inovasi.

Menristekdikti (www.ristekdikti.go.id/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0) menjelaskan ada lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analitic, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy and human literacy.
2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsive, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu,

peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.

4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. Perkembangan era Revolusi Industri dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Sumber : <https://id.linkedin.com/pulse/peluang-di-era-revolusi-industri-40-indra-sosrodjojo>

Gambar 1. Perkembangan Revolusi Industri (from 1.0 to 4.0)

Kompetensi tersebut harus mampu dimiliki dan menyatu dalam diri seorang lulusan yang unggul di perguruan tinggi. Jika tidak lengkap maka akan berpengaruh terhadap kualitas diri lulusan tersebut (www.simbelmawa.ristekdikti.go.id).

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan melakukan inovasi bidang pendidikan, inovasi ini sangat diperlukan dan dapat diawali dengan mengubah paradigma mengenai pendidikan itu sendiri ke arah yang lebih baik dan menjadi tugas dan peran pendidik dalam hal ini adalah dosen yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan era industri 4.0 :

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia –Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Kerja
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi : Integrasi keterampilan baru dalam kurikulum tanpa menambah mata kuliah atau SKS
3. Pembelajaran Inovatif yang berkesinambungan dengan penelitian dan inovasi
4. Pembelajaran Daring: mata kuliah daring, program studi jarak jauh
5. Kemitraan dengan industri: internship, lab/bengkel, teaching factory/industry
6. Model bisnis pendidikan yang baru



Sumber <https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig>

Gambar 2. Pengembangan Karakter Bangsa

Pengembangan karakter bangsa khususnya peserta didik dalam suatu perguruan tinggi juga dapat dilihat bagaimana proses pembelajaran yang terkait pendidikan karakter merupakan bentuk perkembangan pembelajaran secara revolusioner yang mampu memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan pembelajaran seperti kurikulum, metode, evaluasi hingga media pembelajaran berkualitas tidak ada salahnya untuk diterapkan yang tentu dimaksudkan agar pembelajaran yang dilakukan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki karakter kepribadian yang kuat dan unggul.

Selanjutnya untuk mampu bersaing dan bertahan di era tersebut, perguruan tinggi mampu membekali peserta didiknya agar setelah lulus nanti harus memiliki tiga literasi utama yaitu;

1. Literasi Data (*Data Literacy*)
2. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)
3. Literasi Manusia (*Human Literacy*). Secara sederhana dijelaskan bahwa jenis literasi ketiga ini menyangkut keterampilan memimpin, kemampuan bekerja dalam tim serta keterampilan memahami budaya orang lain serta menjalin hubungan dengan manusia lintas budaya. Untuk menjalin hubungan tersebut manusia terlebih dahulu melakukan kontak dan komunikasi

Proses pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait, salah satunya adalah peran dosen yang juga sebagai unsur dinamis suatu kesatuan dalam sistem proses pembelajaran. Dosen sebagai pelaku terdepan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi tauladan yang baik (*role model*) untuk peserta didiknya, dosen yang profesional juga merupakan komponen pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Dosen sebagai unsur dinamis suatu kesatuan dalam sistem pembelajaran seiring waktu terus mengalami perkembangan perannya yang semakin luas yaitu sebagai:

pelatih (coaches), konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang. Dosen wajib memberikan peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada peserta didiknya untuk mengembangkan cara-cara atau inovasi pembelajarannya sehingga mencapai hasil pembelajaran optimal.

Istilah “Dosen selalu benar” di era digital sekarang sudah tidak jaman lagi, akan tetapi saat ini tugas dosen adalah mampu memotivasi serta menjadi filter dari beragam literasi media yang ditemukan peserta didiknya agar tidak mengarah pada hasil yang kontra-produktif. Jadi dengan demikian maka dosen harus mampu melahirkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dengan sumber-sumber yang kredible, ilmiah dan juga menjunjung etika. Jika perpaduan peran yang baik antara dosen dengan peserta didiknya baik maka akan bermunculan generasi 'kekinian' yang mampu menjawab setiap tantangan yang muncul di eranya dengan berkarakter dan berintegritas.

Menjadi dosen di era revolusi industri harus meningkatkan pemahaman dalam mengekspresikan diri di bidang literasi media, memahami informasi yang akan dibagikan kepada para peserta didik serta menemukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan akademisi literasi digital. Seluruh civitas akademika terus meningkatkan kolaborasi dalam orientasi pendidikan mendatang serta mengubah kinerja sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kualitas pola pikir dan penguatan digitalisasi pendidikan yang berbasis aplikasi. Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, dosen harus selalu bahkan wajib meng-upgrade kompetensi dalam menghadapi era Pendidikan 4.0.

Konferensi pers Menristek menjelaskan bahwa kualifikasi dan kompetensi dosen yang dibutuhkan di era 4.0 meliputi :

1. *Educational competence*, kompetensi berbasis *Internet of Thing* sebagai *basic skill* di era ini
2. *Competence in research*, kompetensi membangun jaringan untuk menumbuhkan ilmu, arah riset, dan terampil mendapatkan *grant* internasional
3. *Competence for technological commercialization*, punya kompetensi membawa grup dan mahasiswa pada komersialisasi dengan teknologi atas hasil inovasi dan penelitian
4. *Competence in globalization*, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, yaitu global competence dan keunggulan memecahkan national problem
5. *Competence in future strategies*, di mana dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara *joint-lecture*, *joint-research*, *joint-publication*, *joint-lab*, *staff mobility* dan rotasi, paham arah SDG's dan industri, dan lain sebagainya.

Peningkatan kompetensi peserta didik agar pencapaian prestasi akademik peserta didik yang unggul sebenarnya tidak semata-mata karena kemampuan intelektual umum, tetapi lebih dipengaruhi oleh kompetensi karakter kepribadian dan keterikatan peserta didik dengan dosen, peserta didik dengan tenaga kependidikan, peserta didik dengan

fakultas, peserta didik dengan universitas. Pengembangan kompetensi karakter kepribadian peserta didik harus terus diperhatikan dalam proses belajar mengajar sehingga nantinya peserta didik selain ditingkatkan prestasi akademiknya sebagai hasil akhir.

Karakteristik pembentukan tingkah laku dari proses belajar ini menunjukkan bahwa pembelajaran mampu membentuk sifat dasar dan tingkah laku peserta didik. Berbagai cara atau upaya-upaya yang dosen lakukan, diharapkan akan tumbuh dan berkembang karakter kepribadian yang memiliki kemampuan unggul seperti karakter mandiri dan unggul, komitmen pada kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab. Pendidikan karakter memang bertujuan agar lulusan nantinya akan menjadi lulusan yang berkualitas. Tidak hanya nilai yang tinggi, namun juga memiliki karakter yang berkualitas. Hal ini karena masyarakat Indonesia dipandang hanya mampu pintar dan menguasai banyak ilmu, tetapi karakternya masih yang belum berkualitas.

Saat ini untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter kepribadian yang unggul masih terus dilakukan dan ini menjadi perpaduan yang harmonis dan bersinergi antara peningkatan *softskill* dan *hardskill*. Era industri 4,0 dimana kompetensi yang dibutuhkan dalam mempersiapkan era industry 4.0 diantaranya adalah kemampuan memecahkan masalah (problem solving), beradaptasi (adaptability), kolaborasi (collaboration), kepemimpinan (leadership), dan kreatifitas serta inovasi (creativity and innovation). Proses pembelajaran yang aktif dari dosen harus mampu melahirkan peserta didik yang terus menjadi 'manusia pembelajar' atau long life learner, dan tentu saja memiliki keunggulan dan kepribadian yang berkarakter.

PENUTUP

Seiring berkembangnya dunia pendidikan maka setiap apa yang ada di dunia pendidikan harus diikuti dengan berkembangnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi, karena semua ini adalah bukti bagaimana perguruan tinggi memiliki peran pendidikan yang sangat penting dalam membangun peradaban bangsa berdasarkan atas jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Peran dosen wajib memiliki pengetahuan mengenai karakter peserta didik yang dibimbingnya, terutama dosen pembimbing akademik, dosen adalah mutiaranya *agent of change*, pelaku perubahan agar menghasilkan lulusan yang unggul secara religius, cerdas, produktif, andal dan komprehensif, mengembangkan keindahan dan belajar soft skills yang berguna bagi kehidupan peserta didik selanjutnya setelah lulus dari perguruan tinggi sehingga terwujud generasi emas yang berkualitas.

Bertransformasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran tentu diperlukan keterlibatan civitas akademiknya, demikian pula dengan peran dosen dalam membentuk karakter peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan peserta didik dalam mendiskusikan materi pembelajaran, memberikan tauladan kepada peserta didik dalam berperilaku dan bercakap, mendorong peserta didik aktif melalui penggunaan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan variatif, mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial peserta didik, mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial peserta didik.

Era revolusi industri 4.0 peran dosen harus mampu meningkatkan pemahaman dalam mengekspresikan diri di bidang literasi media, memahami informasi yang akan dibagikan kepada para peserta didik serta menemukan analisis untuk menyelesaikan permasalahan akademisi literasi digital. Seluruh civitas akademika terus meningkatkan kolaborasi dalam orientasi pendidikan mendatang serta mengubah kinerja sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kualitas pola pikir dan penguatan digitalisasi pendidikan yang berbasis aplikasi. Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, dosen harus selalu bahkan wajib meng-upgrade kompetensinya dalam menghadapi era Pendidikan 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia USA. Jones, Rachel, et. al ,2011, Transforming Education to Ensure All Students Are Successful in the 21st Century, Some Rights Reserved, California. (<http://setda.org/web/guest/2011nationaltrends>.)

BSNP. 2010, *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003

Depdiknas (2010). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014*. Jakarta: Kemendiknas.

<https://id.linkedin.com/pulse/peluang-di-era-revolusi-industri-40-indra-sosrodjojo>

<https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig>

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018. Mempersiapkan SDM Indonesia di Era 4.0

Sanjaya, Wina, 2008, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana, Jakarta.

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2007. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru
www.ristekdikti.go.id/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0

www.simbelmawa.ristekdikti.go.id.

Yudi Latif, 2014, *Basis Karakter Kemajuan*, Republika.Co.Id

DESAIN PENGEMBANGAN MODEL PENGUATAN HASIL BELAJAR AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS FADER

Lailial Muhtifah, Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri Pontianak dan
Hadiatus Sa'adah, MI Darul Ulum Natuna
Laily_azhar@yahoo.co.id/lailial.muhtifah23@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini fokus dan tujuan kajiannya pada desain pengembangan model penguatan hasil belajar afektif berbasis “FADER” pada kegiatan pembelajaran PAI. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode R&D dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif mencakup tiga tahap yaitu: (a) tahap penelitian pendahuluan (analisis kebutuhan, studi pustaka dan studi literatur) data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis domain sebagaimana yang diuraikan oleh Spradley analisis yang digunakan adalah model interkatif dan *content analysis*; (b) tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan kuantitatif; dan (c) tahap model validasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi. Artikel ini hasil penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan (*Exploring research fact-findings pertinent for further development of Affective learning outputs*). Temuan hasil analisis menunjukkan hasil belajar afektif cenderung penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran cenderung kurang mengeksplisitkan, mengelaborasi dan mengeksplorasi domain afektif dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Penguatan Hasil Belajar, Pembelajaran Domain Afektif, FADER

PENDAHULUAN

TQM (*Total Quality Management*) merupakan bagian strategi tingkat tinggi dan pendekatan sistem secara menyeluruh. Vincent Gaspersz (2005: 5-6) menegaskan bahwa TQM merupakan cara meningkatkan performansi secara terus-menerus (*continous performance inmpovement*) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Dalam kaitannya dengan penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER diperlukan strategi dan pendekatan sistem manajemen mutu secara menyeluruh, serta diperlukan jaminan mutu sesuai dengan kepentingan utama kegiatan pembelajaran yaitu dampak strategik. Dampak strategik kegiatan pembelajaran PAI perlu diperhatikan berkaitan dengan ciri khusus ilmu tarbiyah dan ciri khusus guru PAI hasil pembinaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Beberapa ciri khusus PAI yaitu; sumber pokok ajaran-Nya Al-Qur'an/Hadits, berbasis akhlak-al-karimah, berpusat pada tauhid, berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan larangan dan perintah, menjelaskan pahala dan dosa, dan pencapaian kebahagiaan dunia dan akherat. Ciri khusus guru PAI memiliki *akhlak al-karimah*, sebagai *spiritual father* (bapak rohani), dan memiliki kepribadian utama. Guru yang berakhlak mulia berarti guru yang mampu memberi uswah atau teladan yang baik, bagi murid dan masyarakat. Guru sebagai *spritual father* menurut Al-Abrasyi (1993: 136-141) yaitu pendidik yang memberi santapan jiwa dengan ilmu dan akhlak. Abd. Rachman Assegaf (2011: 252 – 255) menguraikan bahwa ilmu yang dituntut oleh guru bukan hanya ilmu untuk ilmu (*science for science*) saja, namun tujuan akhir menuntut ilmu adalah untuk mencari Ridha Allah Swt. Selain itu guru Agama Islam mempunyai nilai tambah (*added value*) bila dibandingkan dengan pendidik pada umumnya, dari aspek kapasitas keberagamaannya (*religious competency*).

Secara emprisris dan faktual, hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*) menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan pembelajaran PAI secara umum belum memahami kebutuhan perbaikan mutu, menyatakan masalah mutu pelaksanaan pembelajaran PAI secara umum, serta pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi akar penyebab masalah mutu. *Kedua*, pelaksanaan pembelajaran PAI secara umum dan khusus cenderung belum melakukan perencanaan solusi masalah atau perbaikan mutu secara lebih spesifik sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran. *Ketiga*, mempelajari hasil-hasil masalah atau perbaikan mutu pembelajaran PAI cenderung belum optimal. *Keempat*, menstandarisasikan hasil-hasil solusi masalah juga cenderung lemah.

Keempat masalah tersebut berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran PAI dari aspek penguatan 4 (empat) kompetensi, terutama kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian cenderung belum optimal. Dampak lainnya adalah kualitas pembelajaran PAI dalam menurunkan kompetensi inti kedalam indikator, tujuan pembelajaran, dan skenario pembelajaran cenderung belum maksimal tingkat profesionalismenya.

Secara institusional, pemerintah melalui Kemenag dan Kemendikbud telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembelajaran PAI serta profesionalisme guru, namun pelaksanaan pembelajaran, perencanaan dan evaluasinya

belum sepenuhnya memenuhi tuntutan UU, PP, dan KMA/Kemendiknas secara holistik-integralistik. Yang paling urgen dari hal tersebut adalah fungsi dan tujuan Sisdiknas, serta implementasi kurikulum 2013 dalam membentuk kepribadian guru PAI sesuai dengan karakteristik PAI dan karakteristik guru PAI yang memiliki kekuatan spritual keagamaan dan daya saing tinggi masih berhadapan dengan problem operasional pembelajaran PAI. Menurut Muhaimin (2010: 3) problem operasional secara mikro menyangkut hubungan input, proses, *output* dan *outcome*.

Faktor-faktor tersebut secara substansial disebabkan oleh: Pertama, perencanaan meliputi: belum dirumuskannya diversifikasi kurikulum dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; pertama, faktor kendala yang utama adalah belum ditemukannya model penguatan domain afektif dalam penyelenggaraan pembelajaran PAI yang sesuai dengan karakteristik PAI dan karakteristik guru PAI yang mengintegrasikan ilmu yang bersumber dari *Qauliyah* dan *Kauniyah* berbasis *akhlak-al karimah*. Kedua, penyelenggaraan pembelajaran PAI cenderung hanya sebatas administratif saja belum berpijak pada karakter dasar manusia secara holistik-integralistik (*Qauliyah-Kauniyah*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (ajaran Islam). Jadi, penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan.

Prosedur untuk tahap penelitian pendahuluan (analisis kebutuhan, studi pustaka dan studi literatur) data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis domain sebagaimana yang diuraikan oleh Spradley analisis yang digunakan adalah model interkatif dari Miles & Huberman (1994: 12) yang dituangkan dalam bentuk matrik-matrik (Strauss & Corbin, 2003: 175-195).

PEMBAHASAN

Penguatan Hasil Belajar Afektif

Penguatan merupakan proses peningkatan kejadian perilaku secara langsung terukur. Roy Wise (2009: 1) menguraikan bahwa penguatan adalah istilah yang digunakan oleh ahli teori belajar untuk menggambarkan proses yang mendasari pembelajaran asosiatif. Penguatan adalah istilah yang digunakan dalam konteks analisis perilaku dan jenis tertentu perubahan perilaku yang disengaja dikenal sebagai pengkondisian operan. Ini adalah proses meningkatkan kejadian yang (terukur) perilaku (48/reinforcement-as-a-management-tool-245-3538/). Penguatan terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan belajar menurut Sutton dan Barto (1998: 2) adalah "belajarapa yang harus dilakukan dengan cara memetakan situasitindakan-sehingga memaksimalkan proses pembelajaran."

Hasil Belajar Afektif

Hasil belajar afektif merupakan komponen penting dari abad 21. Hasil belajar afektif tidak kalah penting untuk keberhasilan peserta didik di era perubahan masyarakat, multikultural, global, dan era informasi. David Birbeck dan Kate Andre (2008: 1) berpendapat bahwa hasil belajar afektif lebih penting bagi keberhasilan lulusan dan keberhasilan masyarakat dari pada hasil belajar kognitif yang spesifik ditekankan dalam program saat ini. Hal ini diakui bahwa domain afektif umumnya

digunakan oleh para guru dan tertanam ke dalam metode pengajaran. Namun, ada kebutuhan untuk memikirkan cara-cara untuk menanamkan strategi pengajaran afektif sambil menilai hasil belajar kognitif.

Kualitas lulusan akan terjamin apabila pembelajaran memadukan hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Artinya, hasil belajar domain afektif tidak boleh diabaikan hanya karena dianggap sulit dan terjadi kontroversial dari pada hasil belajar domain kognitif. Domain afektif dan domain kognitif tidak harus dilihat sebagai dualisme, namun dapat menjadi usaha holistik, dimana keduanya diberi nilai. Penggunaan kedua domain tersebut karena pendidikan mengembangkan siswa tidak hanya berpengetahuan dan kompeten, namun memiliki kemampuan (Sumsion dan Goodfellow, 2004). Kedua domain itu penting untuk bekerja sama. Menurut Smith dan Ragan (1999) menjelaskan bahwa hasil belajar afektif melibatkan sikap, motivasi, dan nilai-nilai. Ekspresi ini sering melibatkan pernyataan pendapat, keyakinan, atau penilaian layak.

Domain afektif menggambarkan tujuan pembelajaran yang menekankan pada perasaan, emosi, atau tingkat penerimaan atau penolakan. Tujuan afektif bervariasi dari perhatian sederhana untuk fenomena yang dipilih untuk kualitas kompleks tetapi secara internal konsisten karakter dan hati nurani. Domain afektif merupakan bagian dari sebuah sistem yang diterbitkan pada tahun 1965 untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi bagaimana orang belajar. Dalam literatur pendidikan, hampir setiap penulis memperkenalkan kertas mereka dengan menyatakan bahwa domain afektif sangat penting untuk belajar, tetapi adalah yang paling dipelajari, paling sering diabaikan, yang paling samar-samar dan paling sulit untuk mengevaluasi Bloom tiga domain. Dalam pengajaran di kelas formal, sebagian besar upaya guru biasanya masuk ke aspek kognitif pengajaran dan pembelajaran dan sebagian besar waktu kelas dirancang untuk hasil kognitif. Demikian pula, evaluasi pembelajaran kognitif sangat mudah tapi menilai hasil afektif sulit.

Dengan demikian, ada nilai yang signifikan dalam mewujudkan potensi untuk meningkatkan belajar siswa dengan menekan ke dalam domain afektif. Demikian pula, siswa dapat mengalami hambatan afektif terhadap pembelajaran yang dapat tidak diakui atau dipecahkan bila menggunakan pendekatan kognitif murni. Perubahan sikap dalam hal ini adalah implementasi domain afektif dari Taksonomi Bloom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan mata pelajaran PAI di Madrasah (Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fiqih).

Pendekatan TQM dan Alat Peningkatan Mutu

Total Quality Management (TQM) dikembangkan oleh Edward Deming. TQM merupakan sebuah pendekatan holistik untuk keberhasilan jangka panjang yang memandang perbaikan terus-menerus dalam semua aspek dari suatu organisasi sebagai suatu proses, bukan sebagai tujuan jangka pendek. Tujuan TQM untuk secara radikal mengubah organisasi melalui perubahan progresif dalam sikap, praktek, struktur, dan sistem (http://www.businessdictionary.com/definition/total-quality-management-QM.html#ixzz3Haoyq_mdL). TQM dapat diringkas sebagai sistem manajemen untuk sebuah organisasi yang berfokus pada pelanggan yang melibatkan seluruh karyawan

dalam perbaikan terus-menerus. Menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan disiplin kualitas ke dalam budaya dan kegiatan organisasi. Ada 8 elemen kunci yang menjadi landasan atau prinsip-prinsip TQM, yaitu; (1) fokus pelanggan, (2) kepemimpinan, (3) keterlibatan orang, (4) pendekatan proses, (5) pendekatan sistem terhadap manajemen, (6) peningkatan terus-menerus, (7) pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan, dan (8) hubungan pemasok yang saling menguntungkan.

Pengertian TQM dalam prakteknya mendeskripsikan dua gagasan yang saling berkaitan. Pertama, filosofi perbaikan terus-menerus, dan kedua alat-alat dan teknik-teknik peningkatan mutu. Alat-alat peningkatan mutu antara lain; (1) brainstorming, (2) afinitas jaringan, (3) diagram tulang ikan, (4) analisis kekuatan lapangan, (5) pemetaan proses, (6) flowcharts, (7) grafik pareto, (8) standarisasi, (9) pemetaan jalur, dan (10) FADER. Penulis hanya akan menguraikan secara garis besar alat peningkatan mutu yang kesepuluh berupa FADER.

Alat Peningkatan Mutu FADER

Alat peningkatan mutu FADER singkatan dari *Focus, Analyses, Develop, Execute, dan Review*. FADER bisa dibaca pada gambar 1.



Gambar 1. FADER

KETERANGAN:

- 1. Fokus:** Problem apa yang ditemukan? Buat solusi problem
- 2. Analisis:** Apa penyebab masalah? Mengumpulkan data dan bukti untuk mengidentifikasi penyebab masalah.
- 3. Mengembangkan:** Menemukan solusi dengan pilihan terbaik. Mengembangkan solusi yang akan menghilangkan masalah secara permanen.
- 4. Pelaksanaan/Eksekusi:** Bagaimana untuk mengimplementasikan solusi. Mengembangkan dan melaksanakan aksion plan untuk mengimplementasikan solusi.

5. Meninjau Kembali: Apakah solusi itu memiliki efek atau dampak. Mengukur efek dari solusi, kemudian peninjauan ini menunjukkan kebutuhan untuk analisa selanjutnya dan pengembangan dari solusi yang lain.

Model Penguatan Hasil Belajar Afektif

Model pengembangan dalam penelitian ini berupa perpaduan model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Desain model pengembangan ini lebih menekankan pada komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat dalam pengembangan, karena model ini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Uraian model pengembangan secara detail sebagai berikut.

Pertama, kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan yaitu: 1) teori pendidikan agama Islam, 2) teori pedagogik Islam, 3) teori pedagogik modern, 4) teori TQM dalam pendidikan. *Kedua*, model (produk) memberikan penguatan kepada domain afektif. *Ketiga*, memiliki langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk, yaitu langkah-langkah FADER. *Keempat*, model tersebut menunjukkan adanya hubungan, keterlibatan, dan keterkaitan antar ke-4 komponen yang akan dikembangkan. *Kelima*, desain model pengembangan penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER meliputi; desain rencana pembelajaran, desain pelaksanaan pembelajaran, dan desain evaluasi hasil pembelajaran.

Model Pencanaan Pembelajaran

Menyusun rencana pembelajaran penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI adalah langkah awal dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dalam langkah ini unsur utama merumuskan rencana pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi yang ada dalam Kurikulum 2013, kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum berbasis KKNI sejalan dengan kebutuhan di Madrasah dan sekolah. Prosedur penyusunan RPP peningkatan mutu hasil belajar afektif, yang selama ini berlangsung ditemukan menggambarkan prosedur yang kurang efektif serta tidak sejalan dengan prinsip pembelajaran pada penguatan domain afektif, prinsip-prinsip pendidikan Islam dan kurikulum 2013, kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum berbasis KKNI yang menekankan kompetensi inti sikap spritual dan sikap sosial serta kurikulum berbasis KKNI di PT.

Secara konseptual perencanaan pembelajaran penguatan hasil belajar afektif harus berlandaskan pada pedagogi modern, pedagogi Islam, dan mengupdate hasil-hasil penelitian, dan hasil-hasil simposium nasional maupun internasional sesuai dengan ke mutahiran ilmu. Demikian juga, rumusan rencana pembelajaran harus mencerminkan penekanan pada penguasaan dasar-dasar keahlian kompetensi domain afektif, berupa sikap, nilai-nilai, dan perilaku. Dengan demikian, setiap guru dan calon guru PAI mampu membuat RPP yang mencakup aspek/komponen sebagai berikut: (1) perumusan indikator, (2) perumusan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan sumber belajar, (4) model pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, dan (6) penilaian.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian guru dan sebagian besar calon guru pada dasarnya telah mampu membuat RPP yang mencakup keseluruhan aspek/komponen di atas; namun demikian setidaknya ada enam aspek yang sebagian besar tidak memiliki keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, baik

dari sisi substansi maupun kedalamannya, yaitu: (1) perumusan indikator, (2) perumusan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan sumber belajar, (4) model pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, dan (6) penilaian. Pada keenam aspek tersebut banyak terjadi guru dan calon guru tidak mengeksplisitkan kompetensi domain afektif (KI.1 dan KI.2) secara benar dan sesuai/selaras dengan tujuan pembelajaran (TP) yang diturunkan dari KD dan indakotor ke dalam TP.

Dengan mendasarkan kepada fakta tersebut penulis melakukan pengembangan dalam perumusan RPP penguatan hasil belajar afektif, khususnya pada mata pelajaran PAI tersebut dikembangkan bersama, serta menitikberatkan kepada pengembangan prosedur dan isi/substansi materi pembelajaran yang selama ini terlaksana. Dengan demikian secara spesifik dapat dinilai hasil pengembangannya dibandingkan dengan model yang selama ini berlangsung. Secara bagan dapat dideskripsikan hasil pengembangan desain model rencana pembelajaran penguatan hasil belajar afektif sebagai berikut:

Tabel 1 Deskripsi Hasil Pengembangan Desain Model RPP Penguatan Hasil Belajar Afektif

No.	Aspek	Kondisi Sebelum Pengembangan	Deskripsi Hasil Pengembangan
1.	Perumusan indikator	a. Kesesuaian SKL, KI dan KD b. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur.	a. Kesesuaian dengan SKL, KI (KI.1, KI2, KI.3, dan KI4) dan KD (afektif, kognitif, dan psikomotor) b. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan kompetensi yang diukur.
2.	Perumusan Tujuan Pembelajaran	a. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar	a. Kesesuaian dengan kompetensi dasar (afektif, kognitif, dan psikomotor).
3.	Pemilihan sumber belajar	a. Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan <i>scientific</i> .	a. Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan <i>scientific</i> dan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai).
4.	Model pembelajaran	a. Kesesuaian dengan pendekatan <i>scientific</i>	a. Kesesuaian dengan pendekatan <i>scientific</i> dan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai).
5.	Skenario pembelajaran	a. Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan <i>scientific</i> .	a. Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan <i>scientific</i> dan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai).
6.	Penilaian	a. Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik.	a. Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat deskripsi hasil pengembangan desain model RPP penguatan hasil belajar afektif berbasis FADER, dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pengembangan desain mencakup beberapa komponen/aspek, yaitu: (1) perumusan indikator, (2) perumusan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan sumber belajar, (4) model pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, dan (6) penilaian. Kedua, aspek-aspek tersebut mengarah kepada K 13 yang menekankan domain afektif, kurikulum KTSP 2006 yang menekankan totalitas 3 kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotor) dan kurikulum berbasis KKNI di PT. Dalam mengembangkan desain model rencana pembelajaran tersebut penulis bersama para ahli merumuskan secara intensif sehingga RPP yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sebelum pengembangan. Ketiga, mengeksplisitkan KI.1 dan KI.2 dan/atau kompetensi domain afektif dalam kurikulum KTSP 2006, kurikulum K-13 dan kurikulum berbasis KKNI ke dalam ke-6 aspek tersebut dalam kegiatan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) dengan cara mengeksplorasi, mengelaborasi dan mengeksplisitkan kompetensi domain/ranah afektif dalam bentuk kata kerja operasional ke dalam langkah-langkah pembelajaran (skenario pembelajaran).

Model Pelaksanaan Penguatan Hasil Belajar Afektif Pembelajaran PAI Berbasis FADER

Pelaksanaan penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER pada dasarnya merupakan upaya peningkatan mutu pembelajaran dengan mengintegrasikan teori, teori pendidikan agama Islam, dan teori TQM dalam pendidikan. Penguatan hasil belajar afektif berbasis FADER dasarnya upaya menyempurnakan kurikulum 2013, kurikulum KTSP 2006 dan implementasi kurikulum berbasis KKNI. Pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum berbasis KKNI dalam pelaksanaannya perlu mendasarkan kepada penguatan domain afektif. Berdasarkan temuan studi lapangan dijelaskan bahwa seluruh penguatan domain afektif cenderung ribet, bingung, dan susah untuk mengimplementasikannya, baik oleh guru di madrasah dan sekolah maupun oleh calon guru. Guru dan calon guru pada umumnya kurang dapat mengembangkan pembelajaran domain afektif ke dalam penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Dari pihak jurusan atau lembaga belum ada upaya untuk melakukan terobosan yang tersistem melalui penelitian.

Keadaan lain adalah kesibukan dosen mengajar sehingga pembelajaran PAI pada ranah domain afektif cenderung statis, kurang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Madrasah dan sekolah sebagai Lembaga Pendidikan juga cenderung menunggu ide-ide dan inovasi dari PTKI.

Tabel 2 Deskripsi Hasil Pengembangan Desain Model Pelaksanaan Pembelajaran Penguatan Hasil Belajar Afektif Pembelajaran PAI Berbasis FADER

No.	Pelaksanaan Pembelajaran Sebelum Pengembangan	Pelaksanaan Pembelajaran Hasil Pengembangan
1.	Pelaksanaan kegiatan PPL untuk peningkatan mutu keberlanjutan PPL tanpa mengintegrasikan	1.1. Pelaksanaan kegiatan PPL untuk peningkatan mutu keberlanjutan PPL dengan menggunakan multidisipliner, yaitu; teori pendidikan Islam (pedagogik Islam), teori

	disiplin ilmu lainnya (multidisipliner).	keberlanjutan pendidikan, teori pedagogik Islam, dan teori TQM dalam pendidikan (pedagogik modern).
2.	Pembelajaran dilaksanakan tanpa menerapkan langkah-langkah proses pembimbingan yang tersistem dengan menggunakan alat. Proses pembimbingan cenderung konvensional/tradisional.	<p>2.1 Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan tahap, proses dan siklus yang bersistem dengan pendekatan TQM dengan alatnya FADER dengan uraian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fokus: Problem apa yang ditemukan? Buat solusi problem. b. Analisis: Apa penyebab masalah? Mengumpulkan data dan bukti untuk mengidentifikasi penyebab masalah. c. Mengembangkan: Menemukan solusi dengan pilihan terbaik. Mengembangkan solusi yang akan menghilangkan masalah secara permanen. d. Pelaksanaan/Eksekusi: Bagaimana untuk mengimplementasikan solusi. Mengembangkan dan melaksanakan aksion plan untuk mengimplementasikan solusi. e. Meninjau Kembali: Apakah solusi itu memiliki efek atau dampak. Mengukur efek dari solusi, kemudian peninjauan ini menunjukkan kebutuhan untuk analisa selanjutnya dan pengembangan dari solusi yang lain. <p>2.2. Upaya peningkatan mutu keberlanjutan PPL dengan pendekatan TQM dengan alatnya FADER dengan mengoptimalkan pemberian layanan pembelajaran yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian layanan baik secara individual maupun kelompok dengan disertai petunjuk pelaksanaan dan contoh-contoh pelaksanaan per kompetensi. b. Menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai (afektif, kognitif, dan psikomotor). c. Memberikan layanan tuntas per kompetensi.

3.	Pembelajaran kurang memunculkan hasil belajar afektif dan kurang mengeksplorasi, mengelaborasi dan kurang menerapkan kata kerja operasional domain afektif dalam perumusan indikator dan TP.	3.1. Pembelajaran memunculkan dan mengelaborasi hasil belajar afektif dengan memberi penguatan dalam proses pembelajaran, dengan langkah-langkah: <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa menurunkan KI.1, KI.2, KI.3, dan KI.4 ke dalam KD, indikator, TP, materi pembelajaran, skenario pembelajaran dan evaluasi. b. Pemilihan sumber belajar sesuai dengan materi pembelajaran dan pendekatan scientific dan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai). c. Mahasiswa menerapkan model pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan <i>scientific</i> dan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai). d. Mahasiswa menerapkan pendekatan pendidikan akhlak (penanaman nilai) dengan cara mengintegrasikannya kedalam langkah-langkah pendekatan <i>scientific</i> (mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikannya). e. Mahasiswa melaksanakan penilaian autentik (sikap, pengetahuan dan keterampilan).
----	--	--

Rumusan desain model pelaksanaan pembelajaran penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER dikembangkan seperti pada tabel 2 secara umum merujuk kepada karakteristik dan prinsip pembelajaran kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum berbasis KKNI di PT yang menekankan pada domain sikap. Namun demikian, secara spesifik desain model ini pada dasarnya berupaya menegaskan kembali pentingnya domain afektif dan diupayakan untuk diberikan penguatan dalam proses pembelajaran. Domain afektif perlu dieksplicitkan dengan cara mengeksplorasi, mengelaborasi dan menurunkan KD kompetensi domain afektif ke dalam kata kerja operasionalnya. Domain afektif sebenarnya adalah jantungnya proses pembelajaran, karena domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai dan perilaku. Memunculkan hasil belajar afektif dengan cara mengintegrasikan pendekatan pendidikan akhlak dengan pendekatan saintifik dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran.

Model Evaluasi Pembelajaran

Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan penguatan hasil belajar afektif adalah evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dikhususkan untuk kompetensi domain

afektif, bukan hanya memberikan penilaian pada kompetensi domain kognitif dan psikomotor saja, sebagaimana biasa dipraktekkan dalam pembelajaran selama ini. Pelaksanaan evaluasi pada semua kompetensi tersebut cenderung sesuai dengan konsep evaluasi dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik menurut Daniel Callison (1998: 1) penilaian autentik adalah “proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan siswa belajar, prestasi, motivasi, dan sikap tentang kegiatan yang relevan dengan pembelajaran. Contoh teknik penilaian otentik termasuk penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian diri”.

Lebih lanjut Daniel Callison (1998) menegaskan bahwa penilaian kinerja terdiri dari segala bentuk penilaian di mana siswa membangun respon secara lisan maupun tertulis. Penilaian portofolio adalah kumpulan karya siswa secara sistematis yang dianalisis untuk menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan tujuan instruksional. Penilaian diri (*self-assessment*) menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mengatur diri sendiri dalam belajar, dan tanggung jawab menilai kemajuan sendiri. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rudner & Boston, (1994) dan Wiggins (1989) yaitu penilaian kinerja adalah istilah yang umum digunakan di tempat, atau dengan, penilaian otentik. Penilaian kinerja menuntut siswa untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan membuat tanggapan atau produk.

Evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran dengan mengeskplisitkan penilaian pada aspek sikap; sikap spritual dan sikap sosial, dan tetap mengupayakan peningkatan mutu penilaian domain kognitif (KI.3) dan domain psikomotor (KI.4). Penilaian penguatan hasil belajar afektif diterapkan ketika proses dan setelah proses pembelajaran (penilaian hasil). Pendidikan agama Islam dapat memiliki peran penting dalam memungkinkan "pengalaman spiritual". Aspek spiritualitas terkait dengan kesadaran kemanusiaan. Aspek spiritualitas meningkatkan martabat manusia. Spiritualitas adalah sesuatu yang lebih dalam dari yang berbudi luhur dan moral. Penerapan penilaian autentik relevan dengan tuntutan kurikulum 2013 dan pembelajaran autentik dengan uraian sebagai berikut. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran; penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jaring, dan lain- lain; penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih atentik; penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu enerapkan perolehan belajar, dan sebagainya; penilaian autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama dengan peserta didik; penilaian autentik, seringkali pelibatan siswa sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai; dan penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar.

Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas – tugas yang

memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, ketampilan, dan pengetahuan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya dirumuskan desain model evaluasi proses dan hasil pembelajaran penguatan domain afektif dengan mendasarkan kepada konsep penilaian autentik. Hasil pengembangan desain model evaluasi proses dan hasil pembelajaran penguatan hasil belajar afektif dengan pendekatan TQM digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 Desain Model Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Penguatan Hasil Belajar Afektif dengan Pendekatan TQM

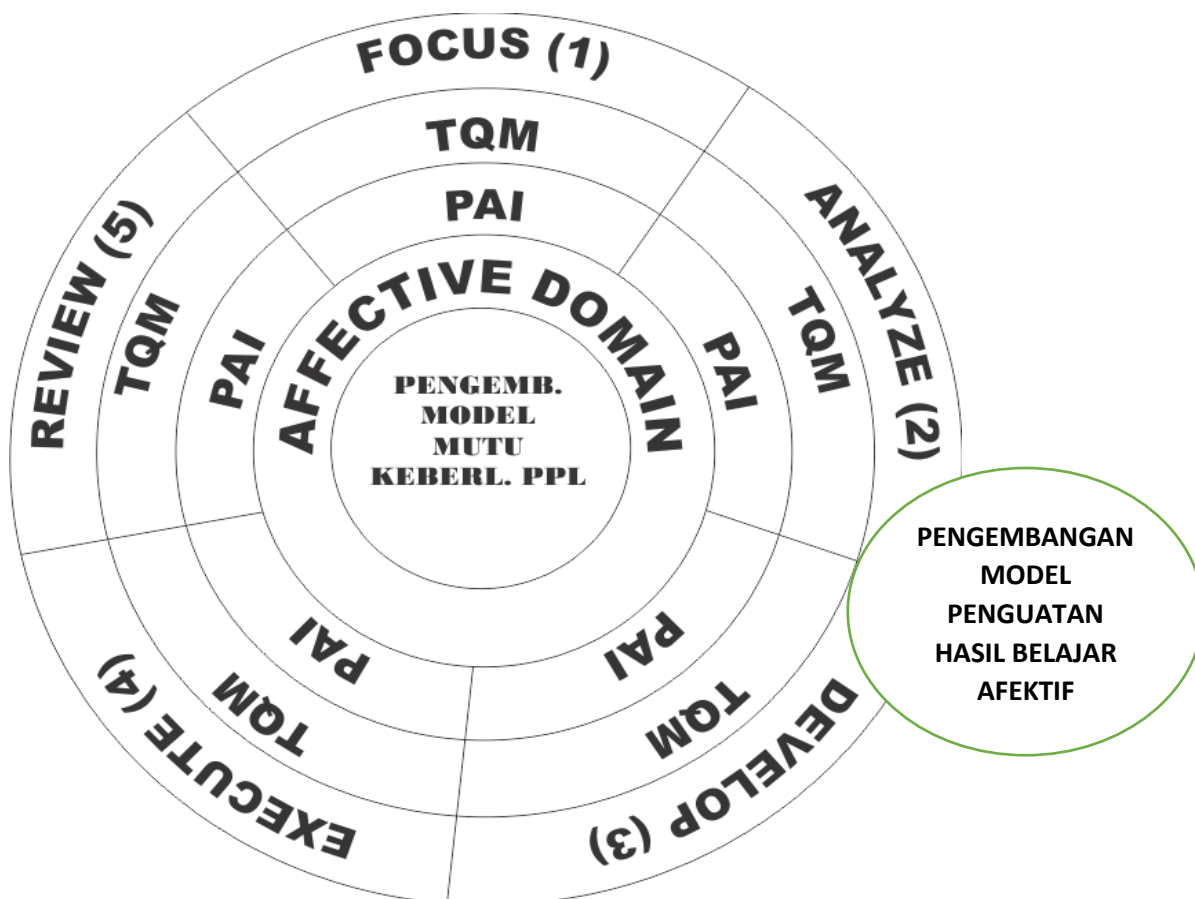
No.	Pelaksanaan Pembelajaran Pengembangan	Evaluasi Sebelum	Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Hasil Pengembangan
1.	Evaluasi pembelajaran cenderung hanya menyentuh sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.		1. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan melaksanakan penilaian autentik secara optimal sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum berbasis KKNI di PT.
2.	Melaksanakan penilaian hasil yang cenderung dilaksanakan dengan cara tes lisan.		2. Melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran melalui tes dan non tes sesuai dengan konsep penilaian autentik.

Rumusan desain model evaluasi dan proses pembelajaran penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER yang dikembangkan seperti pada tabel 3 secara umum merujuk kepada karakteristik dan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum berbasis KKNI di PT yang menekankan pada domain sikap. Namun demikian, secara spesifik desain model ini pada dasarnya berupaya menegaskan kembali pentingnya domain afektif dalam melaksanakan proses dan hasil pembelajaran dan diupayakan untuk diberikan penguatan dalam proses pembelajaran. Domain afektif perlu dieksplicitkan dengan cara mengeksplorasi, mengelaborasi dan menurunkan KD kompetensi domain afektif ke dalam kata kerja operasionalnya dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan evaluasi.

Produk Hasil Pengembangan Penguatan Hasil Belajar Afektif Berbasis FADER

Desain Produk dirancang berdasarkan pada penilaian terhadap sistem dan prosedur yang lama, sehingga dapat ditemukan kelemahan –kelemahan terhadap sistem dan prosedur tersebut. Hasil akhir dari kegiatan berupa produk baru yang lengkap

dengan spesifikasinya. Desain masih hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti. Produk yang dihasilkan dalam penelitian *Development Research* (DR) ini dapat dibaca dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1: Desain Model Revisi Produk

Keterangan Gambar

Dalam proses pembelajaran, domain afektif (*affective domain*) memegang peranan paling penting. Itu karena domain afektif mempengaruhi mutu pembelajaran. *Focus, Analyze, Develop, Excute, dan Review*, atau disingkat FADER berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran PAI sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi, akan tetapi tidak cukup dengan satu disiplin ilmu saja, sebagaimana yang sekarang ini dipakai yaitu Pendidikan Agama Islam, akan tetapi juga harus ditunjang dengan disiplin ilmu yang lain seperti disiplin ilmu keberlanjutan dan *Total Quality Management* (TQM). *Total Quality Management* atau yang biasa dikenal dengan Manajemen Mutu Terpadu mampu meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Karena sistem manajemen ini adalah pengawasan menyeluruh dari seluruh warga sekolah terhadap kegiatan sekolah, sehingga ketika kegiatan pembelajaran PAI dilangsungkan di madrasah dan sekolah, jalannya pembelajaran terdorong untuk melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran afektif perlu ditingkatkan dan diberikan penguatan dengan menerapkan model yang menjadikan pembelajaran yang berkualitas dengan memberikan penguatan pembelajaran afektif sebagai penentu peningkatan kualitas. Pengembangan desain model penguatan afektif pembelajaran PAI melalui alat peningkatan mutu FADER (*Focus, Analyze, Develop, Execute, and Review*). Ini adalah model desain peningkatan penguatan pembelajaran afektif pembelajaran PAI melalui langkah-langkah FADER.

Kesimpulan di atas didasarkan pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, sebagian guru dan sebagian besar calon guru pada dasarnya telah mampu membuat RPP yang mencakup keseluruhan aspek/komponen di atas. Namun demikian setidaknya ada enam aspek yang sebagian besar tidak memiliki keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, baik dari sisi substansi maupun kedalamannya, yaitu: (1) perumusan indikator, (2) perumusan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan sumber belajar, (4) model pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, dan (6) penilaian. Pada keenam aspek tersebut banyak terjadi guru dan calon guru tidak mengeksplisitkan kompetensi domain afektif (KI.1 dan KI.2) secara benar dan sesuai/selaras dengan tujuan pembelajaran (TP) yang diturunkan dari KD dan indikator ke dalam TP.

Kedua, desain pengembangan model penguatan hasil belajar afektif pembelajaran PAI berbasis FADER cenderung bersifat holistik, sistematis dan terstruktur. Model ini dapat digunakan dan diuji coba pada semua pembelajaran pada mata pelajaran apapun termasuk pada perkuliahan dan mata kuliah apapun. Namun untuk validitas dan reliabilitas model tersebut perlu dilakukan penelitian R&DD. Penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran cenderung kurang mengeksplisitkan, mengelaborasi dan mengeksplorasi domain afektif dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. 2009. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Abuddin Nata. 2009. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group
- Agus Suprijono. 2009. *Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ajem Ramzy Syaykh and Memon Nadeem, 2012. *Islamic Teacher Education Program's Principles of Pedagogy*. Workshop conducted at ISNA West Education Forum.
- Al-Abrasyi, Mohd. Athiyah. 1993. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, cet. ke-7, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry L.I.S. Jakarta: PT. Bukan Bintang.
- Andersen, Lorin W. 1981. *Assessing affective characteristics in the school. The united States of America: Allyn and Bacon*.

- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aris Shoimin. 2014. *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Asmaran Abdurrahmansyah, Sintesis Kreatif (Pembahasan Kurikulum Pendidikan Islam Ismail Raji' al Faruqi). (Global Pustaka, Yogyakarta 2002)
- Assegaf, Abd. Rachman, 2011, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Press.
- Birbeck, David, and Andre Kate, *The affective domain: beyond simply knowing*. Australia; Learning and Teaching Unit, University of South Australia.
- Birbeck, David, and Andre Kate. 2009. *The affective domain: beyond simply knowing*. Australia; Learning and Teaching Unit, University of South Australia.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1989). *Educational research: An introduction* (5th ed.). New York, NY: Longman. ISBN: 0-801-0334-6 [LB1028.B6 1989]
- Gaspersz Vincent. 2005. *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gill Scherto, and Thomson Garrett, 2014. *Redefining Religious Education Spirituality for Human Flourishing*. Palgrave Macmillan.
- H.M. Zein, *Methodologi Pengajaran Agama Islam*, (Yogyakarta : AK Group, 1995), hal 187
- Hsiao-chi Chen. *Review of the Affective Domain*. [http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Review of the Affective Domain](http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Review_of_the_Affective_Domain)
- J.M. Juran. 1992. *Merancang Mutu Buku ke 2 Ancangan Baru Mewujudkan Mutu Ke Dalam Barang dan Jasa*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
- Jeffrey Dalto. 2014. *Teaching Attitudes: The Affective Domain of Learning and Learning Objectives*. <http://blog.convergencetraining.com/category/elearning-articles>.
- Jufri, A. Wahab. 2010. *Belajar dan Pembelajaran Sains*. Mataram: Arga Puji Press.
- Kaballa Thomas. *Framework for the Affective Domain in Science Education*. Department of Mathematics and Science Education, University of Georgia
- Kerry Shephard. 2007. *Higher education for sustainability: seeking affective learning outcomes*. Higher Education Development Centre, University of Otago, Dunedin, New Zealand. Vol. 9 Iss: 1
- Krathwohl, David. E, Benjamin S, Bloom & Bertram B, Masia, 1964, *Taxonomy of Educational*
- Lynch, Kathleen, John Baker & Maureen Lyons, 2009, *Affective Equality*, Palgrave Macmillan.
- Mary Helen Immordino. *We Feel, There We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education*.

- Mary Miller. *Teaching and Learning in Affective Domain*. The University of Georgia. [http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Teaching and Learning in Affective Domain](http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Teaching+and+Learning+in+Affective+Domain)
- Melvin L. Silberman. 2009. *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Bandung: Penerbit Nusamedia
- Miles, M. B., & Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded source book*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Mulyadi. 1998. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Aditya Media
- Objects, The Classification of Educational Goals, Handbook II: Affective Domain*, Longmans
- Richard S Sutton, Andrew G Barto. 1998. *Reinforcement learning: An introduction*. London : MIT Press
- Ronny Wiestra. *A Study on Classroom Environment and on Cognitive and Affective Outcomes of the PLON-Curriculum*.
- Sabki, Aishah and Hardaker, Glenn (2012) *The Madrasah Concept of Islamic Pedagogy*. Educational Review, 65 (3). pp. 342-356. ISN 1465-3397
- Sauri Sofyan. Strategi meningkatkan kualitas akhlak peserta didik dalam pembelajaran. [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR. PEND. BAHASA ARAB/195604201983011-SOFYAN SAURI/presentasi2/STRATEGI MENINGKATKAN AKHLAK PESERTA DIDIK %5BCompatibility Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/presentasi2/STRATEGI_MENINGKATKAN_AKHLAK_PESERTA_DIDIK_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf)
- Smith & Ragan. 1999. *Instructional Design*. New York: Wiley
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumsion Jennifer, Goodfellow Joy. 2004. *Identifying generic skills through curriculum mapping: a critical evaluation*. New York: Taylor and Francis Ltd.
- Sutton and A.G. Barto. Reinforcement Learning An Introduction , Cambridge, MA: MIT Press, 1998
- Syaikh Abdurrahman Ya'qub. 2006. *Pesona Akhlak Rasulullah Saw*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- The Affective Domain in the Classroom Student Motivations and Attitudes: The Role of the Affective Domain in Geoscience Learning. <http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/affective/index.html>.
- The Affective Domain in the Classroom Student Motivations and Attitudes: The Role of the Affective Domain in Geoscience Learning*. <http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/affective/index.html>
- Thomas Koballa. *Framework for the Affective Domain in Science Education*. Department of Mathematics and Science Education, University of Georgia. <http://jane.coe.uga.edu/mse/faculty/koballa/index.html>

Thomas M Haladyna. *Resources On Evaluating Affective Outcomes Writing Test Items To Evaluate Higher Order Thinking*.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Using Affective Assessment. FCSE 4308 Evaluation and Research in FCSE. http://www.aafcs.org/res/Essential_Tools/Using_Affective_Assessments.pdf

Wise, R.A. (2009). Roles for nigrostriatal-not jus mesocorticolimbic-dopamine in reward and addiction. *Trends in Neurosciences*, 32, 517-524

Introduction to Quality Improvement Author: Nazanin Meshkat MD, FRCPC, MHSc, Assistant Professor, University of Toronto, Date Created: September 2011.

**HUBUNGAN ANTARA *LONELINESS* DAN KEPERCAYAAN DIRI
DENGAN PENYESUAIAN DIRI PADA MAHASISWA PROGRAM
AFIRMASI PAPUA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS AND SELF
CONFIDENCE WITH ADJUSTMENT IN PAPUA AFFIRMATION
PROGRAM STUDENTS OF SEBELAS MARET UNIVERSITY
SURAKARTA***

Letrinca Paula Awek, Munawir Yusuf, Afia Fitriani

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran

Universitas Sebelas Maret

letieawek@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2) hubungan antara *loneliness* dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta, (3) hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sampel dalam penelitian ini adalah 48 mahasiswa program afirmasi Papua yang berkuliah aktif di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Instrumen yang digunakan adalah skala penyesuaian diri ($r_{xx} = 0,843$), skala *loneliness* ($r_{xx} = 0,897$), dan skala kepercayaan diri ($r_{xx} = 0,800$). Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri, dengan nilai $F_{hitung} = 26,470$ ($>F_{tabel} 3,204$); nilai sig. 0,000 ($p < 0,05$) dan nilai $R = 0,735$. Nilai $R^2 = 0,541$ atau 54,1%, dengan sumbangan efektif *loneliness* = 10,03% dan kepercayaan diri = 44,04%. Secara parsial, terdapat hubungan antara *loneliness* dengan penyesuaian diri ($p < 0,05$; $r_{x1y} = 0,013$) dan terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri ($p < 0,05$; $r_{x2y} = 0,000$).

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *loneliness* dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua.

Kata Kunci: Penyesuaian diri, *loneliness*, kepercayaan diri, mahasiswa afirmasi Papua

PENDAHULUAN

Hak mendapatkan pendidikan lebih layak telah mendapat jaminan konstitusi, sehingga daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan dalam bidang pendidikan berhak untuk mendapatkan kebijakan afirmasi, agar tercipta pemerataan dalam bidang pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 5 ayat 3 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat, dan Pemerintah menyebutkan bahwa, Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2012 program beasiswa Afirmasi Tingkat Tinggi (ADik) telah dilaksanakan di dua Provinsi di pulau Papua, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Program ADik diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan kesempatan kepada anak-anak asli Papua agar dapat menempuh pendidikan tinggi di PTN terbaik di luar Papua. Beasiswa ADik adalah program keberpihakan pemerintah pusat untuk daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebagai upaya percepatan dan pemerataan untuk memperoleh akses pendidikan tinggi yang baik untuk putra-putri asli Papua dan daerah 3T. Beasiswa ADik diberikan sebesar Rp. 16.800.000,- setiap mahasiswa pertahun, yang dibayarkan setahun 2 kali setiap awal semester (Ristedikti, 2015).

Siswa SMA/SMK/MA dari provinsi Papua dan provinsi Papua Barat mendapat beasiswa Strata I (S1) di 32 PTN terbaik di Indonesia dengan program studi pendidikan dokter, agroteknologi, ekonomi, teknik sipil, teknik elektronika, teknik mesin, agroindustri dan akuntansi. 32 PTN yang menerima siswa dari Papua dan Papua Barat, beberapa diantaranya adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Hasanudin (Kompas, 2012). Program ADik telah memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi yang lebih baik. Akan tetapi program ADik tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa Papua saat memasuki dunia perkuliahan, seperti budaya yang berbeda, nilai, kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial, kemampuan akademik yang dianggap memiliki perbedaan yang cukup signifikan, persoalan iklim geografis (Wijanarko & Syafiq, 2013).

Salah satu perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa dengan program beasiswa ADik adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terdapat 56 mahasiswa afirmasi dari provinsi Papua, 38 orang merupakan mahasiswa aktif kuliah, 12 mahasiswa tidak melanjutkan perkuliahan, 2 mahasiswa telah menyelesaikan strata 1 dan 4 mahasiswa yang tidak memiliki keterangan yang jelas. Mahasiswa afirmasi dari provinsi Papua Barat berjumlah 17 orang, 11 mahasiswa masih aktif kuliah, 2 mahasiswa telah menyelesaikan strata 1 dan 4 diantaranya tidak melanjutkan kuliah. Secara keseluruhan jumlah mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret berjumlah 73 mahasiswa dari jumlah tersebut terdapat 4 mahasiswa yang memilih pindah jurusan dengan alasan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, baik dalam bidang akademik maupun lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Saidiyah (2016) terhadap mahasiswa asing, yang berkuliah di UIN Yogyakarta menyatakan bahwa penyesuaian diri

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan saat berada di lingkungan baru. Penelitian Wardani dan Saidiyah (2016) menunjukkan bahwa gagalnya melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan baru membuat satu dari beberapa mahasiswa asing yang berkuliah di UIN Yogyakarta memilih untuk DO (*Drop out*).

Menurut Abu (2009), penyesuaian diri dilakukan untuk melepaskan diri dari kendala-kendala dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, sehingga akan mendapat suatu keseimbangan psikologis yang tidak dapat menyebabkan konflik bagi dirinya sendiri. Penyesuaian diri dalam arti yang luas dapat diartikan bahwa individu dapat menjadi diri sendiri dan beradaptasi dengan baik sesuai keadaan lingkungan, akan tetapi individu juga dapat menjadikan lingkungan sesuai dengan kondisi (keinginan) diri. Akan tetapi, penyesuaian diri yang tidak berjalan dengan baik pada mahasiswa dapat menyebabkan timbulnya perasaan *loneliness* (Prasetya & Hartati, 2014)

Loneliness merupakan perasaan tidak menyenangkan yang bersifat subjektif yang dirasakan setiap individu. *Loneliness* bisa berkisar dari keadaan temporer yang diakibatkan oleh perubahan dalam kehidupan sosial kita sampai kondisi kronik dan bersifat menetap (Sears, Freedman, & Peplau, 1999). Menurut Rokach, Orzeck, dan Neto (2004), *loneliness* merupakan bagian dari kehidupan yang penting bagi manusia sama halnya dengan kehidupan, kematian dan merasakan sakit. Selain itu Van Staden dan Coetzee dalam penelitian juga menyatakan bahwa, salah satu penyebab *loneliness* adalah adanya perbedaan budaya, budaya yang berbeda membuat individu merasa sendiri dan kesepian. Sejalan dengan proses penyesuaian diri mahasiswa afirmasi Papua di tempat perkuliahan, peneliti berpandangan bahwa seseorang merasa sulit untuk melakukan proses penyesuaian diri di lingkungan yang baru, pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, individu merasa terdapat banyak perbedaan, sehingga individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan keadaan ini menyebabkan individu mengalami *loneliness*.

Menurut Perlman dan Peplau (1981), faktor kepribadian dapat mempengaruhi *loneliness*. Seseorang yang mengalami *loneliness* cenderung lebih tertutup, pemalu, dan sadar diri serta kurang asertif. Hal ini membuat individu lebih sering menyendiri dan kurang membuka diri dengan lingkungan. Selain itu, individu yang mengalami *loneliness* seringkali berhubungan dengan kepercayaan diri yang rendah dan memiliki ketrampilan sosial yang buruk (Perlman & Peplau, 1981).

Faktor lain yang penting untuk dibahas adalah kepercayaan diri. Pada mahasiswa Afirmasi Papua, kepercayaan diri dapat mempengaruhi penyesuaian diri di lingkungan perkuliahan. Hal tersebut disebabkan, kepercayaan diri merupakan suatu aspek kepribadian yang penting bagi seseorang. Individu yang yakin akan kemampuannya sendiri memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Kusriani dan Prihartanti (2014) juga menjelaskan bahwa, tingkat kepercayaan diri yang baik memudahkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, membangun hubungan dan membantu mempertahankan kesuksesan dalam akademik. Penelitian Widiastuti, Yumpi dan Istiqomah (2012) juga menyatakan bahwa kepercayaan diri mempengaruhi penyesuaian diri seseorang pada lingkungan sekitar. Penelitian tersebut juga dilakukan oleh Kristianawati dan Djalali (2014) terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan penyesuaian diri. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kepercayaan diri setiap individu maka semakin tinggi pula penyesuaian dirinya.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah semua mahasiswa afirmasi Papua yang masih berkuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta sejumlah 48 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tiga skala yaitu skala penyesuaian diri, *loneliness* dan kepercayaan diri. Skala penyesuaian diri merupakan skala yang disusun oleh Mayasari (2014) dan dimodifikasi oleh peneliti. Skala *loneliness* merupakan modifikasi skala yang telah disusun oleh Martanto (2014). Skala kepercayaan diri merupakan skala yang dimodifikasi oleh peneliti berdasarkan skala yang disusun oleh Matondang (2014).

Uji reliabilitas skala menggunakan formula *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas skala penyesuaian diri terdapat 22 aitem valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,843, kemudian pada skala *loneliness* terdapat 18 aitem valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,897, dan pada skala kepercayaan diri terdapat 15 aitem valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,800.

HASIL – PENELITIAN

1. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan F

Tabel. 1 Hasil Uji Simultan F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1761,005	2	880.527	26,470	,000 ^b
	Residual	1496,945	45	33,265		
	Total	3258,000	47			

a. Dependent Variable: Penyesuaian Diri

b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri, *Loneliness*

Hasil uji simultan F pada tabel diatas diketahui bahwa, nilai signifikansi (*p-value*) pada kolom signifikansi sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil dari uji F diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 26,470, sedangkan nilai F_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 3,204. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa $p-value < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan signifikan antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Uji t

Tabel. 2 Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	27.913	7.648		3.650	.001
	Loneliness	-.205	.079	-.266	-2.591	.013
	Kepercayaan Diri	.986	.158	.641	6.246	.000

a. Dependent Variable: Penyesuaian diri

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig, variabel *loneliness* adalah sebesar 0.013 dan nilai Sig. variabel kepercayaan diri sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p\ value < 0,05$). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *loneliness* memiliki hubungan signifikan dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua. Variabel kepercayaan diri memiliki hubungan signifikan dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua.

2. Analisis Deskriptif

Tabel. 3 Analisis Deskriptif

Variabel	Kategorisasi	Σ	%
Penyesuaian Diri	Tinggi	16	33,33%
	Sedang	30	62,5 %
	Rendah	2	4,17%
<i>Loneliness</i>	Tinggi	4	8,33 %
	Sedang	16	33,33 %
	Rendah	28	58,33 %
Kepercayaan Diri	Tinggi	8	16,67 %
	Sedang	39	81,25 %
	Rendah	1	2,08 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar penyesuaian diri mahasiswa afirmasi Papua berada dalam kategori sedang (62,5%). *Loneliness* berada dalam kategori rendah (58,33%), dan kepercayaan diri dalam kategori sedang (81,25%).

Riset ini juga menemukan sumbangan efektif *loneliness* terhadap penyesuaian diri sebesar 10,03%, dan sumbangan efektif kepercayaan diri terhadap penyesuaian diri sebesar 44,04%. Total sumbangan *loneliness* dan kepercayaan diri terhadap penyesuaian diri ditampilkan oleh nilai *R Square* sebesar 0,541 atau 54,1%.

3. Analisis Tambahan

Hasil uji *independent sample t-test* menunjukkan bahwa, nilai signifikansi sebesar 0,972 ($p \text{ value} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan pada mahasiswa afirmasi Papua berdasarkan jenis kelamin.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2006) dan Ardi (2014) menunjukkan bahwa, *loneliness* dan kepercayaan diri memiliki hubungan yang signifikan dengan penyesuaian diri.

Suhartini (2006) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara *loneliness* dan penyesuaian diri seseorang, artinya semakin rendah tingkat *loneliness* seseorang maka semakin tinggi penyesuaian diri seseorang. Disisi penelitian yang dilakukan oleh Ardi (2014) menunjukkan bahwa kepercayaan diri terbukti berkorelasi positif dan signifikan penyesuaian diri. Semakin tinggi kepercayaan diri seseorang maka semakin tinggi pula penyesuaian dirinya.

Hasil korelasi antara *loneliness* dengan penyesuaian diri menunjukkan hasil sebesar -0,377 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima. Dapat pula disimpulkan bahwa, semakin rendah tingkat *loneliness* seseorang maka semakin tinggi penyesuaian dirinya. Prasetya dan Hartanti (2014) dalam penelitiannya mengenai *loneliness* dan penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama menjelaskan bahwa, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *loneliness* dan penyesuaian diri. Hal tersebut di tunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,614. Artinya, semakin rendah *loneliness* seseorang maka semakin tinggi penyesuaian dirinya. Sebaliknya semakin tinggi *loneliness* seseorang maka semakin rendah penyesuaian dirinya.

Hasil korelasi antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri menunjukkan hasil sebesar 0,687 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima. Dapat pula disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri seseorang maka semakin tinggi penyesuaian dirinya. Penelitian Ernawati (2017) mengenai kepercayaan diri dengan penyesuaian diri menunjukkan bahwa, penelitian tersebut memiliki hubungan positif dan kuat, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,67. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2011) menunjukkan bahwa, kepercayaan diri memiliki hubungan positif dan signifikan dengan penyesuaian diri, artinya semakin tinggi kepercayaan diri seseorang maka semakin tinggi penyesuaian dirinya.

Hasil wawancara pada pertengahan bulan November 2017, terhadap tujuh rekan mahasiswa Papua program ADik di UNS diketahui bahwa, enam dari tujuh mahasiswa Papua yang diwawancarai menyatakan banyak faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses perkuliahan, mereka merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus, merasa diasingkan, merasa tidak memiliki teman-teman, dan sering merasa tidak percaya diri ketika harus menyampaikan pendapat. Salah satu mahasiswa Papua menjelaskan bahwa menyesuaikan diri di lingkungan kampus sangat susah. Ia

menjelaskan bahwa, Mahasiswa Papua di UNS mengalami banyak kendala-kendala saat hendak melakukan penyesuaian diri dengan tempat baru. Kesulitan dalam proses penyesuaian diri tersebut terjadi dikarenakan mahasiswa merasakan terdapatnya perbedaan antara budaya dan kemampuan akademik. Budaya yang berbeda terutama dalam hal bahasa membuat mahasiswa Papua kesulitan berkomunikasi sehingga proses penyesuaian diri tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemampuan akademik yang menurut mereka jauh berbeda, membuat mahasiswa Papua sering merasa kurang percaya diri saat mengikuti perkuliahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara *loneliness* dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa program afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara *loneliness* dengan penyesuaian diri pada mahasiswa program afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa program afirmasi Papua di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A. H. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ardi, I. (2014). Hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian sosial pada siswa kelas X di SMK negeri 1 Kalasan. *Jurnal Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Ernawati, R. (2017). Hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri siswa paket BDI kampus Diakonia Modern Jatiranggong, Jatisampurna kota Bekasi. *Jurnal Dinamika Pendidikan Volume 10, Nomor 1, April 2017: 61 – 80*
- Kompas. Com. (2012). 749 Siswa Papua Peroleh Beasiswa Jalur Afirmasi. *Nasional.Kompas.Com*. Retrieved October 18, 2017 from <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/01/05231133/749.siswa.papua.peroleh.beasiswa.jalur.afirmasi>
- Kristianawati, E. & Djalali, M.A. (2014). Hubungan antara kematangan emosi dan percaya diri dengan penyesuaian sosial. *Persona Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol 3, No 03
- Kusrini, W. & Prihartanti, N. (2014). Hubungan Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri dengan Prestasi Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Boyolali. *Jurnal Penelitian Humaniora* . Vol. 15, No. 2

- Mayasari, D. (2014). Hubungan antara dukungan sosial *peer group* dan persepsi status sosial ekonomi terhadap penyesuaian diri remaja yang memiliki ibu bekerja di luar negeri. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Martanto, A. (2014). Perilaku kecanduan *game online* ditinjau dari kesepian dan penerimaan kelompok teman sebaya pada remaja di kelurahan Jebres Surakarta. *Skripsi*. Univeristas Sebelas Maret : Surakarta
- Matondang, M B. (2014). Hubungan antara dukungan sosial dan kepercayaan diri dengan stress pada orang dewasa penderita lupus. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Perlman,. dan Peplau (1981). *Personal Relationships in Disorder*. London : Academic Press
- Prasetya, Dwi, N., dan Hartati, Sri. M, S. (2014). Hubungan Antara Kesepian dan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa (Studi Korelasi Pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro). *Jurnal*. Vol 3. No.1
- Ristedikti.go.id. (August, 6 2015). 746 calon mahasiswa penerima ADik diterima di 49 PTN. *Ristedikti..go.id*. Retrieved October 18, 2017 from [https:// www. ristekdikti. go. id/746-calon-mahasiswa-penerima-adik-diterima-di-49-ptn/](https://www.ristekdikti.go.id/746-calon-mahasiswa-penerima-adik-diterima-di-49-ptn/)
- Rokach, A., Orzeck, T., & Neto, F. (2004). Coping with Loneliness in Old Age: A Cross – Cultural Comparison. *Journal Curent Psychology: Development, Learning, Personality, Social*
- Sears, D., Freedman, J., dan Anne P,. (1999). *Psikologi Sosial, Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga
- Suhartini, T. (2006). Hubungan Penyesuaian Diri dan Kesepian pada remaja. *Tesis*. Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah : Malang
- Van Staden, C. W., dan Coetzee, K.(2010). Conceptual relations between loneliness and culture. *Reseacrgnet.net*. Retrieved November, 11 2017 from https://www.researchgate.net/profile/Cornelius_Van_Staden/publication/46256272_Conceptual_relations_between_loneliness_and_culture/links/5739864308ae298602e32c65/Conceptual-relations-between-loneliness-and-culture.pdf
- Wardani, W,. dan Saidiyah, S. (2016). Daya Juang Mahasiswa Asing. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Desember 2016, Vol. 3, No. 2, Hal: 213 – 224*
- Widiastuti, E. Yumpi, F. dan Istoqomah. (2012). Hubungan antara kepercayaan diri dengan penyesuaian diri pada anak korban kekerasan seksual usia 12-18 tahun di pusat perlindungan perempuan dan anak kabupaten Jember. *Jurnal Psikologi*. Fakultas Psikologi UMJ
- Wijanarko, E., dan Syafiq, M. (2013). Studi Fenomenologi Pengalaman Penyesuaian Diri Mahasiswa Papua Di Surabaya. *Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan, Vol 3, No 2*

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS HUMANISME RELIGIUS

Ida Zahara Adibah

FAI Undaris Ungaran, Email: idazaharaadibah@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Model pembelajaran humanis religius dapat mengintegrasikannya penanaman nilai-nilai dalam seluruh proses pendidikan antara lain dengan: 1). Pendidikan vokasi berbasis humanis religious harus dimulai dari guru kepada peserta didik agar praktik pendidikan bersifat mengarahkan, memandirikan dan memberdayakan peserta didik sebagai makhluk berdimensi horizontal dan vertical. 2). Memperkuat kemampuan soft skills peserta didik pendidikan vokasi melalui kualitas intra personal, kualitas batiniah (kualitas rohaniah) yang tercermin dalam pengamalan ajaran agama dalam bentuk kesalehan pribadi dan social akan sangat membantu karakter pendidikan vokasi dalam memasuki dunia kerja. 3). Membangun keselarasan (Link&match) dengan system dunia kerja pada khususnya, diupayakan pendidikan vokasi lebih mengarah kepada demand-driven yang dilakukan melalui pembelajaran yang lebih aktual tidak sekedar tekstual, lebih kongkrit dan nyata.

Kata Kunci: *Vokasi, Humanis, Religius*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai *human investment* tampaknya sudah menjadi kesadaran umum setiap manusia yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Pada era globalisasi bidang pendidikan merupakan salah satu andalan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena banyaknya teknologi yang bermunculan atau pesatnya peradaban yang akan menuntut kesiapan sumber daya manusia yang lebih matang dalam segala hal. Karena dengan melalui proses pendidikan, maka manusia akan menjadi pribadi yang matang dan dipenuhi dengan berbagai pengetahuan. Disamping itu, manusia kemudian juga bisa mengambil manfaat atas pendidikan yang telah dilaluinya. Manfaat yang bisa diperoleh manusia secara pribadi ada dua, yaitu manfaat konsumsi dan manfaat investasi. Yang termasuk ke dalam manfaat konsumsi adalah produk atau jasa yang bisa memberikan kepuasan segera dalam satu waktu. Sedangkan yang termasuk manfaat investasi adalah kepuasan untuk masa datang.

Disisi lain Dewey (1998:80) menyatakan bahwa “ pendidikan merupakan metode fundamental dari kemajuan dan pembaruan sosial”. Melalui pendidikan, terjadi proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Seluruh proses pendidikan dimulai dengan partisipasi individu dalam kesadaran sosial. Dengan demikian pendidikan juga merupakan proses untuk sampai pada partisipasi dalam kesadaran sosial tersebut. Senada dengan pendapat diatas, pendidikan adalah alat yang dapat digunakan dalam pembangunan moral manusia (Veugelers, 2010:1). Visi pedagogis pendidikan dapat terinspirasi oleh pandangan dunia yang berbeda, pengalaman budaya, serta ide-ide politik. Nilai-nilai moral yang diaplikasikan melalui pendidikan kemudian dibangun melalui tingkat sistem pendidikan, sekolah dan guru sebagai komponen-komponen pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan sendiri membedakan antara nilai-nilai moral, tujuan pedagogis dan praktek yang dapat dilakukan pada proses pendidikan.

PEMBAHASAN

Dua pokok bahasan penting dalam makalah ini adalah *pertama* revitalisasi pengembangan pendidikan vokasi dan *kedua* peran pendekatan humanisme religious dalam pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya qolbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta oleh raga. Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Sukses tidaknya peran pendidikan vokasi dapat diukur dari keseimbangan dua tujuan tersebut. Yaitu pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Lebih rinci, tujuan pendidikan vokasi mencakup empat dimensi utama, yaitu:

Pertama, mengembangkan kualitas dasar manusia yang meliputi kualitas daya pikir, daya qalbu, daya fisik. Pengembangan kualitas daya pikir meliputi antara lain, cara berfikir analitis, deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, nalar, lateral dan berfikir system. Pengembangan daya qalbu meliputi antara lain iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa kasih sayang, kesopansantunan, integritas, kejujuran dan kebersihan, respek terhadap orang lain, beradab, bermartabat, bertanggung jawab, toleransi terhadap perbedaan, kedisiplinan, beretika, dan berakhlakul karimah. Pengembangan daya fisik meliputi kesehatan, ketahanan, dan ketrampilan.

Kedua, mengembangkan kualitas instrument/ fungsional/ penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seni serta olah raga yang meliputi, antara lain: penguasaan mono disiplin, multi disiplin, baik disiplin ilmu sosial (sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, budaya) maupun disiplin ilmu eksakta (matematika, fisika, kimia, biologi beserta terapannya).

Ketiga, memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia, yaitu mampu memahami, menyadari, menjadikan hati nurani, mewajibkan hati nurani, mencintai dan bertindak nyata dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, melestarikan

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sekaligus terbuka terhadap gesekan-gesekan dengan kemajuan Negara-negara lain.

Keempat, menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia yaitu, mampu menjaga kelangsungan hidup melalui wadah-wadah kolektif dan mampu menjaga pembangunan dunia yang berkelanjutan dari persepektif lingkungan, ekonomi dan sosial cultural serta secara reaktif proaktif menjaga kelangsungan hudup perkembangan dunia baik dari perspektif ekonomi, politik, lingkungan hidup maupun sosio cultural (Slamet, 2011: 190).

- **Revitalisasi Pendidikan Vokasi**

Dalam pasal 15 undang-undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan/vokasi merupakan pendidikan pengembangan bakat untuk bekerja dalam bidang –bidang tertentu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja, perkembangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Pendidikan vokasi menyiapkan terbentuknya prilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industry (DU-DI), diawasi oleh masyarakat dan pemerintah atau dalam kontrak dengan lembaga atau badan usaha serta berbasis produktif. Prilaku, sikap dan kebiasaan kerja yang aktif, kreatif dan produktif menyenangkan dalam pendidikan kejuruan/ vokasi memerlukan penyesuaian pengembangan bakat dengan program keahlian.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian yang dulunya pernah hidup/ vital, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran. Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan untuk melakukan satu tujuan misalkan revitalisasi pendidikan. Adapun revitalisasi dalam pengembangan pendidikan vokasi adalah proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali tujuan pendidikan vokasi.

Adapun revitalisasi pendidikan vokasi diharapkan mampu:

- a. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh keahlian dan kompetensi;
- b. Mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk berihktiar menuju sukses dalam kehidupan;
- c. Mempunyai kemampuan dan kecerdasan dalam memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni sesuai dengan kebutuhan dunia usaha & dunia industri sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan, ketentraman, keamanan bagi masyarakat luas;
- d. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berkualitas sehingga mampu bersaing dalam bidang keahlian dan kompetensi yang dimilikinya baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Agar tujuan pendidikan vokasi benar-benar mampu memaksimalkan perannya dalam pengembangan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, maka ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi semestinya ilmu-ilmu yang cocok untuk memfasilitasi pengembangan peserta didik bangsa Indonesia. Keduanya sama-sama diperlukan agar menjadi manusia seutuhnya dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Mengorbankan pengembangan eksistensi peserta didik berarti mendehumanisasi manusia dan mengembangkan peserta didik yang tidak ada keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja akan membuat pendidikan vokasi terisolasi dan terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, terutama dengan dunia kerja. Jika ini terjadi, maka pendidikan vokasi tidak berperan sama sekali terhadap pembangunan masyarakat.

Pandangan filosofi klasik yang menjadi wacana public para ahli pendidikan adalah, bahwa pendidikan merupakan proses humanisasi atau pemanusiaan manusia. Suatu pandangan yang mengimplikasikan proses kependidikan dengan berorientasi kepada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, baik secara fisik biologis maupun ruhaniyah psikologis. Aspek fisik biologis manusia dengan sendirinya akan mengalami perkembangan, pertumbuhan dan penuaan. Sedangkan aspek ruhaniyah psikologis manusia melalui pendidikan dicoba didewasakan, disadarkan dan diinsan kamilkan (Malik, 2005:181). Proses pendewasaan dan penyadaran dalam konteks pendidikan ini mengandung makna yang mendasar, karena bersentuhan dengan aspek paling dalam dari kehidupan manusia, yaitu kejiwaan dan keruhanian. Sebagai dua elemen yang berpretensi positif bagi manusia utuh adalah manusia sebagai subyek. Sebaliknya manusia yang hanya beradaptasi adalah manusia sebagai obyek. Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena ia tidak mampu mengubah realitas. Menyesuaikan diri adalah kekhasan tingkah laku binatang, yang bila diperlihatkan oleh manusia akan merupakan gejala dehumanisasi.

- **Pendekatan humanis religius**

Tema pokok dari humanis religius adalah kebebasan manusia yang diperjuangkan bukanlah kebebasan yang absolute atau anti thesis. Pada abad pertengahan, hal ini dianggap tidak seimbang antara kepentingan agama dan kepentingan kemanusiaan. Menurut paham humanis religius, keseluruhan jiwa manusia yang memancarkan kebebasan tidak dapat dipisahkan dari dimensi eksistensial. Humanis religius menjamin kebebasan manusia untuk merancang sendiri kehidupannya di dunia dengan cara yang merdeka. Humanis religius memandang instruksi-instruksi tradisional para pemuka agama, bukan sebagai perintah yang akan membantu berbagai urusan yang mesti dilaksanakan, melainkan sebagai kendala dan rintangan bagi manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Amin (2011: 30), dalam konteks humanis religius, kejahatan dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan justru dianggap menodai ajaran-ajaran agama, dirinya dan para pemeluknya.

Istilah pendidikan humanis religius mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan yaitu "pendidikan humanis" dan "pendidikan religious". Humanism berasal dari bahasa latin humanus dan mempunyai akar kata homo yang

berarti manusia. Humanus berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Sedangkan pengertian religius berasal dari kata *relegere* dalam bahasa latin. Artinya berpegang kepada norma-norma. Sedangkan religius dimaksud sangat terkait dengan nilai keagamaan hubungan dengan Tuhan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaanya. Oleh karena itu, pendidikan humanis religius adalah lebih menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius agar peserta didik dapat membangun kehidupan social yang memiliki kemerdekaan, yaitu menempatkan individu yang rasional dalam kedudukan yang tinggi dan sebagai sumber nilai paling puncak tetapi tidak meninggalkan dari nilai-nilai keagamaan.

Teori Humanis tercipta sebagai suatu spectrum pemikiran modern. Teori humanis telah memberikan hal-hal positif bagi semangat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, teori humanis juga berimplikasi negative bagi pengembangan bidang filsafat dan keagamaan. Keyakinan yang berkembang bahwa hal-hal religius menjadi factor yang menghambat manusia dari perkembangan dan membawanya kepada konflik. Kaum humanis telah mengklaim bahwa pengingkaran kepercayaan religius akan membuat manusia bahagia. Namun, pengalaman sejarah justru membuktikan sebaliknya (Jumarudin, 2014: 115).

- **Revitalisasi Pendidikan Vokasi berbasis Humanis Religius**

Bangsa Indonesia memiliki cara yang unik dalam menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai humanis religius. Sekularisme radikal tidak menjadi pilihan bagi pengadopsian konsep humanis di Indonesia karena paham tersebut tidak memedulikan paham agama di ranah public. Hal ini disebabkan konsep dasar humanis sekuler yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Konsep mengenai humanis sekuler melihat akal budi manusia sebagai kekuatan yang membimbing dalam hidup, sehingga terdorong untuk membersihkan masyarakat dari kepercayaan-kepercayaan religius yang menurut mereka menghalangi kemajuan bangsa (Hadi, 2000:133). Humanis sekuler sangat mempercayai akal budi manusia sehingga terkesan meniadakan agama. Melalui pendidikan yang bercorak humanis religius berdasarkan Pancasila, Negara mengakui pluralitas agama sekaligus bertanggung jawab mendidik warga agar menjadi pemeluk agama yang taat. Revitalisasi Pendidikan Vokasi berbasis Humanis Religius antara lain dengan:

- a. Pendidikan vokasi berbasis humanis religious harus dimulai dari guru kepada peserta didik agar praktik pendidikan bersifat mengarahkan, memandirikan dan memberdayakan peserta didik sebagai makhluk berdimensi horizontal dan vertical. Humanis religius sangat mementingkan ditonjolkannya nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama (Adhiatera, 2008:173). Pandangan humanis religius merupakan suatu perpaduan dua konsep tentang penghargaan kepada kodrati kemanusiaan sekaligus bahwa kodrat itu sebagai ciptaan Tuhan. Pandangan humanis religius muncul akibat kebebasan manusia yang tidak di dikte oleh dogma-dogma, Disamping itu sebagai kritik terhadap praktik-praktik kehidupan yang semakin dehumanisasi. Praktik dehumanisasi di tandai penciptaan manusia sebagai mesin, memiliki penguasaan pengetahuan saja untuk kepemilikan material tidak terbatas, yang

akhirnya menjadikan manusia mengeksploitasi sumber daya alam terus menerus untuk menindas manusia lainnya maupun untuk membahayakan dirinya sendiri.

- b. Memperkuat kemampuan soft skills peserta didik pendidikan vokasi melalui kualitas intra personal, kualitas batiniah (kualitas rohaniah) yang tercermin dalam pengamalan ajaran agama dalam bentuk kesalehan pribadi dan social akan sangat membantu karakter pendidikan vokasi dalam memasuki dunia kerja. Ketrampilan intra personal adalah ketrampilan yang berkaitan dengan dengan hubungan antar manusia yang dimensi-dimensinya meliputi bertanggung jawab, respek kepada orang lain, komunikasi yang mengena, kehalusan berbudi, toleransi, bijaksana dan interpersonal lainnya.
- c. Membangun keselarasan (Link&match) dengan system dunia kerja pada khususnya. Diupayakan pendidikan vokasi lebih mengarah kepada demand-driven yang dilakukan melalui pembelajaran yang lebih aktual tidak sekedar tekstual, lebih kongkrit dan nyata.

Menurut teori humanistic, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Sifat teori belajar humanistik lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan proses belajar untuk mencapai tujuan belajar. Teori belajar humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, manusia yang humanis, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Pembelajaran yang dikembangkan berpijak pada teori belajar humanistik yang memiliki ciri-ciri humanis yaitu untuk mencapai kemanusiaan transprimordial berupa kemampuan untuk menghormati martabat, keutuhan dan hak-hak asasi manusia tidak pandang apakah ia termasuk golongan primordial suku, daerah, agama, bangsa sendiri dan lainnya (comer, 2012:18).

PENUTUP

Model pembelajaran humanisme religius sebagai revitalisasi pendekatan dalam pengembangan pendidikan vokasi dapat dimaknai sebagai keterpaduan antara aktivitas pengajaran dan pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai humanis sebagai jati diri bangsa. Model pembelajaran humanis religious didasarkan pada seperangkat asumsi yang berisikan wawasan dan aktifitas berfikir dalam merencanakan pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan sebagai area isi kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran humanis religius dapat mengintegrasikannya penanaman nilai-nilai dalam seluruh proses pendidikan. Sesuai dengan prinsip pembelajaran humanis religius, pendidikan karakter tidak hanya mengikutsertakan guru dalam proses pembentukan karakter, akan tetapi juga menempatkan peserta didik sebagai subyek atau individu yang memiliki kemampuan untuk mengorientasikan diri ke tindakan yang benar. Hal inilah yang menjadikan pentingnya revitalisasi pendidikan vokasi berbasis humanis religius. Gagasan liberatif freire diatas, mengandung kesamaan visi dengan ali syariati, pemikir Muslim kontemporer berhaluah Syiah, yang menawarkan ide-ide Liberasiasi Islam. Pada bukunya, *man and Islam* (1982) Syariati dalam Malik (2005: 181) mengungkap secara menarik tentang atribut yang melekat

pada diri manusia yang membedakannya dengan binatang adalah kesadaran diri, kemauan bebas dan kreativitas. Tiga ciri fundamental ini menjadi pembeda manusia dengan binatang. Yaitu dalam dimensi sebagai insan bukan sebagai basyar, jika sebagai basyar manusia berpotensi untuk terikat pada determinisme struktur fisiologis dan realitas empiris yang mengitarinya. Maka sebagai insan dengan kesadaran diri, kemauan bebas dan kreatifitas, manusia dapat melakukan pengembaraan dalam membangun kebudayaan dan peradaban.

Desain pendidikan yang mengacu kepada pembebasan, penyadaran dan kreativitas sesungguhnya sejak awal telah digagas oleh misalnya Ki Hajar Dewantara dan H. Ahmad Dahlan. Tidak saja memiliki gagasan yang cerdas pada zamannya. Tetapi aktual di masa sekarang. Dia menekankan praktek pendidikan yang mengusung kompetensi/ kodrat alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan sehingga menggugah perkembangan kehidupan anak didik baik lahir maupun batin. Kritik atas system pendidikan yang selama ini lebih menekankan dimensi pada kognitif yang memproduksi manusia-manusia cerdas, mahir dan terampil merupakan kesalahan fatal. Karena disadari bahwa penekanan yang berlebihan kepada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi yang lain telah berpretensi melahirkan manusia-manusia dengan kepribadian pecah (*split personality*). Dimensi yang utuh adalah dimensi yang mengakomodasi antara dimensi intelektual, moral dan spriritual serta professional. Dalam istilah lain dikenal dengan *humanism religious*

Watak eksistensial manusia sebagai ciptaan Allah yang merdeka dan otonom serta memiliki kemajemukan dalam berbagai dimensinya, adalah menjadi *mainstream*. Konsep tauhid yang mengandung ajaran pembebasan dan kemerdekaan merupakan acuan paradigmatis bagi keberlangsungan pendidikan yang humanis. Apresiasi terhadap kompetensi anak didik secara luas (*broad and competence based education*) menjadi titik orientasi, dengan cara menyingkirkan indoktrinatif dan monologis dalam pembelajaran yang bersifat uniform, adalah juga menjadi pokok bahasan system pendidikan yang memimpikan terciptanya masyarakat pembelajar (*learned community*) dengan lebih mengutamakan peningkatan belajar (*learning capacity*) anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatera, T, 2008, *Perjalanan spiritual Seorang Kristen Sekuler*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Amin, H. 2011, *Pendidik karakter di Zaman keblinger, mengembangkan Visi Guru sebagai pelaku Perubahan Pendidik Karakter*. Jakarta; Grasindo
- Dewey, J., terj. Zainuddin, A.R, 1998, *Budaya dan kebebasan*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia
- Fajar, Malik, 2005, *Holistika pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Grafindo Persada
- Hadi, 2000, *Ide-ide: Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Kanisius
- Jumarudin, 2014, *pengembangan model pembelajaran humanis religious dalam pendidikan Karakter di sekolah Dasar*, jurnal Pembangunan dan pendidikan, volume 2, Nomor 2

- Omer, R.& Gould, E., 2012, *psychology Around Us*. New York: Halsted Press, Division John Wiley&Sons, Inc
- Slamet PH, 2011, *Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal cakrawala Pendidikan, juni, tahun XXX, No.2
- Veugelers, W, 2008, *Education and Humanism: Linking Autonomy and Humanity*, Switzerland: Sense Publishers.

EFEKTIVITAS HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN TEKA-TEKI LOGIKA (PATEKA) PADA POKOK BAHASAN GERBANG LOGIKA

Sigit Dwi Saputro¹⁾

Universitas Trunojoyo Madura

Jalanan Raya Telang Po Box 02 Kamal, Kabupeten Bangkalan

email: sigitd.saputra@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Intisari –Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui a) ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi belajar, dan b) ingin menganalisis pengaruh motivasi. Metode penelitian menggunakan Quasi Eksperiment Non Equivalent Control Group Design. Polulasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika semester III yang terdiri dari kelas A, B, dan C. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sample yaitu sampel yang tidak dipilih secara acak yaitu berdasarkan pertimbangan bidang akademik. Instrumen yang digunakan antara yaitu angket motivasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian meliputi a). Terdapat pengaruh signifikan motivasi setelah menggunakan media pembelajaran pateka Berdasarkan dari ketiga kriteria disimpulkan bahwa pembelajaran pada materi gerbang logika menggunakan media pateka efektif terhadap hasil belajar kompetensi dasar yang ditetapkan.

Kata kunci:*efektivitas, hasil belajar, pateka, gerbang logika*

PENDAHULUAN

Prestasi belajar merupakan bagian penting setelah proses kegiatan belajar, hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Makna lain dari prestasi belajar adalah evaluasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Setiap dalam proses belajar akan berdampak terhadap perubahan sikap atau perilaku bagi peserta didik yang berupa kemampuan kognitif, psikomotor maupun aspek afektif. Suharsimi (2006) menyampaikan bahwa prestasi belajar adalah gambaran tingkat pemahaman yang telah diterima oleh peserta didik terhadap sebuah materi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu sebagai pendidik perlu meningkatkan kualitas proses sebelum adanya pengukuran dari hasil belajar.

Beberapa factor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu: (1) Sikap terhadap belajar, (2) Motivasi belajar, (3) Konsentrasi belajar, (4) Mengolah bahan ajar, (5) Menyimpan perolehan hasil belajar, (6) Menggali hasil belajar yang tersimpan, (7) Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, (8) Rasa percaya diri siswa, (9) Intelegensi dan keberhasilan belajar, (10) Kebiasaan belajar/cara belajar, (11) Cita-cita siswa, (12) Guru sebagai pembina belajar, (13) Prasarana dan sarana pembelajaran serta pemanfaatannya, (14) Kebijakan penilaian, (15) Lingkungan sosial siswa di sekolah dan (16) Kurikulum sekolah (Mudjiono: 2006)

Pendapat lain yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu menurut Tu'u (2004) (1) Faktor Kecerdasan, (2) Faktor Minat dan Perhatian (3) Faktor Motivasi (4) Faktor Cara Belajar (5) Faktor Lingkungan Keluarga (6) Faktor Lingkungan Sekolah. Begitu halnya Slameto (2010) factor internal yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi (1) Faktor Jasmaniah, antara lain faktor kesehatan dan cacat tubuh, (2) Faktor Psikologis, antara lain intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan dan (3) Faktor Kelelahan, antara lain kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.

Dari beberapa pendapat terkait factor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi belajar. Menurut Sardiman (2011: 75) motivasi belajar merupakan sebuah kemampuan yang dapat menimbulkan seseorang untuk belajar, yang membuat mengakibatkan terlaksananya dan memberikan arahan kegiatan belajar, sehingga tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan diawal sebelum proses belajar. Dalam makna lain motivasi belajar merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk belajar. Begitu halnya Greenberg menyebutkan bahwa motivasi dapat memberikan pengarahan dan pemantapan perilaku dalam sebuah tujuan (Djaali, 2013:101).

Pendapat lain motivasi belajar dikemukakan oleh Dimiyati dan Mudjiono (2006 : 80) juga mengemukakan bahwa motivasi belajar dapat menjadi kekuatan sebagai pendorong untuk belajar dan mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku yang positif terhadap belajar. Berkaitan dengan motivasi belajar yang berdampak terhadap perubahan perilaku karena adanya dorongan baik di dalam diri maupun luar siswa yang sedang belajar dikemukakan juga oleh (Uno, 2010: 23). Dengan demikian motivasi belajar dapat diartikan bahwa sebuah dorongan baik yang ada dalam diri maupun luar siswa untuk tetap konsisten dalam belajar yang berdampak terhadap perilaku terkait sikap belajar.

Faktor luar yang mempengaruhi motivasi belajar adalah media pembelajaran. Hamalik, (dalam Arsyad, 1986: 19) mengemukakan bahwa pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.

Kata media berasal dari latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa arab, media adalah pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Garlah & Ely (dalam Arsyad, 1971: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu menyerap oleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

Menurut Susilana dan Riyana (2012: 7) media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, pesan dalam media pembelajaran berisi materi yang ingin disampaikan dan tujuan yang ingin dicapai adalah proses pembelajaran. Sedangkan, menurut Daryanto (2011: 5) media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif akan menambah keinginan peserta didik untuk lebih banyak belajar dan menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen dari pembelajaran untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, dan kemauan peserta didik. Media pembelajaran cukup penting dalam penyaluran pesan. Karena tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung secara optimal.

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah gerbang logika dengan indikator materi yang sesuai dengan Panduan Akademik di Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan matakuliah Elektronika Analog dan Digital dengan kode PIN 236 (TIM: 2018).

Manfaat media pembelajaran telah dikemukakan oleh Hakim, Nur F dan Sholichan, Ahmad (2018) yaitu media pembelajaran dapat memberi umpan balik untuk menilai keberhasilan dan efektif dalam kegiatan pembelajaran, pembelajaran multimedia dapat meningkatkan kinerja dan pemahaman siswa. Penelitian yang dirancang adalah menggunakan media “PATEKA” papan teka-teki logika. Dalam pengembangan media pembelajaran pateka memperhatikan beberapa aspek seperti mengkombinasikan dalam strategi pembelajaran dan penilaian alat ukur yang sesuai dengan materi (Gu and Guo, 2017). Sehingga pateka akan semakin menantang untuk menjawab teka-teki jawaban setelah memilih tombol-tombol yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan sebuah penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Papan Teka Teki Logika (Pateka) Pokok Bahasan Gerbang Logika terhadap Motivasi Belajar”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi tempat penelitian, rancangan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tempat penelitian di Program studi Pendidikan Informatika semester III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan Quasi Eksperiment Non Equivalent Control Group Design. Penelitian ini memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu dengan pembelajaran berbantuan media pateka. Subjek penelitian meliputi populasi dan sample. Populasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan informatika semester III. Teknik pengambilan sampling menggunakan sampling jenuh, yaitu mengambil seluruh sampel untuk penelitian. Data diperoleh dengan memberikan beberapa instrumen penelitian. Pertama adalah tes. Tes yang digunakan adalah pre-test dan post-test untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa baik sebelum maupun sesudah pemberian media pembelajaran. Data tes yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui tingkat pengaruh menggunakan uji t signifikasnsi. Perhitungan menggunakan program statistic PASW.

Hasil dari post tes akan diukur rerata kelas yang akan dibandingkan dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) dan akan di analisis prosentase tingkat kelulusan mahasiswa. Metode penelitian meliputi subjek penelitian, jenis penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Subjek penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika Semster III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Quasi Eksperiment Non Equivalent Control Group Design. Polulasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika semester III yang terdiri dari kelas A, B, dan C. Teknik pengambilan sampel yaitu purpouse sample yaitu sampel yang tidak dipilih secara acak yaitu berdasarkan pertimbangan bidang akademik. Data diperoleh dengan memberikan instrument penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket motivasi belajar yang di berikan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Instrumen ini memodivikasi AimeeOxarart, Jennifer Weaver and Adel Al-Bataineh dan Mohamed T. Al Bataineh (2014) dengan pernyataan sebagai berikut

No	Pernyataan
	Saya berfikir akan menambah lagi ilmu pengetahuan tentang gerbang logika karena penggunaan media Pateka.
	Belajar tentang gerbang logika melalui media Pateka membantu proses belajar saya
	Saya yakin akan kemampuan saya dalam bidang gerbang logika setelah menggunakan media Pateka
	Saya termotivasi untuk belajar gerbang logika setelah menggunakan media patek
	Belajar gerbang logika melalui media pateka itu sangat manantang.
	Saya merasa senang belajar dengan media pateka
	Pembelajaran gerbang logika melalui media pateka membantu saya focus dalam pembelajaran di kelas
	Belajar gerbang logika melalui media pateka lebih tersistem dalam membangun pengetahuan

Data hasil instrumen yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui tingkat pengaruh motivasi belajar menggunakan uji t signifikasnsi. Perhitungan menggunakan program statistic PASW. Dan analisis motivasi tiap pernyataan akan di analisis dalam data persamaan akan dianalisis dengan persamaan

$$\text{Hasil (H)} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \%. \text{ Dan akan ditampilkan dalam bagan.}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Pengaruh

1. Pengujian Persyaratan Analisis

Pengujian persyaratan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut pengujian persyaratan tersebut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan PASW. Data hasil uji normalitas secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas	Signifikansi Terhadap Prestasi Kognitif (Kolmogorov-Smirnov ^a) Alpha = 0,05	Keputusan	Kesimpulan
Media	0,2 > 0,05	Kognitif = ditolak	Ho Data Normal

b. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui sampel berdistribusi homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan menggunakan PASW. Data hasil uji homogenitas secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas Alpha = 0,05	Signifikansi Terhadap Prestasi Belajar Kognitif	Keputusan	Kesimpulan
Media	0,622 > 0,05	Kognitif = Ho ditolak	Homogen

Kognitif P-value (signifikansi terhadap variabel terikat) lebih dari ($>$) 0,05, sehingga diputuskan bahwa H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi homogen

c. *Uji Hipotesis*

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi uji t. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan program PASW. Hasil data hipotesis secara ringkas diperlihatkan ke dalam Tabel.

Tabel 3. Uji Signifikansi

Hipotesis dengan Uji Signifikansi	Signifikansi Terhadap Prestasi Belajar Kognitif		Keputusan
	Uji	Prestasi Belajar Kognitif	
Media	0,000	$<0,05$	Kognitif = H_0 ditolak

Berdasarkan dari uji signifikansi pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media pateka berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar mada materi gerbang logika.

B. *Hasil Post Test*

Untuk mengetahui hasil belajar dapat diketahui dari hasil evaluasi post test. Adapun hasil evaluasi post tes diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil evaluasi post tes

No	Responden	Pos tes	Keterangan
1.	Res-1	100	Tuntas
2.	Res-2	100	Tuntas
3.	Res-3	80	Tuntas
4.	Res-4	80	Tuntas
5.	Res-5	80	Tuntas
6.	Res-6	60	Tidak Tuntas
7.	Res-7	80	Tuntas
8.	Res-8	80	Tuntas
9.	Res-9	80	Tuntas
10.	Res-10	80	Tuntas

11.	Res-11	60	Tidak Tuntas
12.	Res-12	80	Tuntas
13.	Res-13	80	Tuntas
14.	Res-14	60	Tidak Tuntas
15.	Res-15	100	Tuntas
16.	Res-16	80	Tuntas
17.	Res-17	60	Tidak Tuntas
18.	Res-18	100	Tuntas
19.	Res-19	100	Tuntas
20.	Res-20	80	Tuntas
21.	Res-21	80	Tuntas
22.	Res-22	60	Tidak Tuntas
23.	Res-23	80	Tuntas
24.	Res-24	100	Tuntas
25.	Res-25	60	Tidak Tuntas
26.	Res-26	100	Tuntas
27.	Res-27	100	Tuntas
	Rerata	81.48148	
	KKM	75	
	Tuntas	22	
	Tidak Tuntas	6	

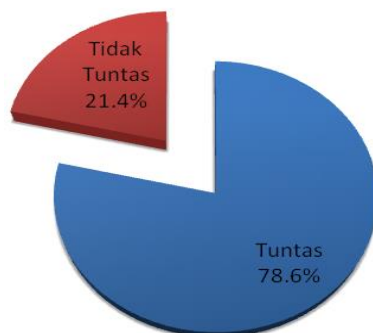
C. Perbandingan terhadap KKM

Berdasarkan tabel tersebut nilai KKM yang ditentukan adalah nilai 75 sedangkan rerata kelas dalam proses pembelajaran menggunakan media papan Teka-Teki Logika (PATEKA) dengan nilai 81.48, maka rerata kelas ($81,48 > \text{KKM } (75)$). Artinya rerata kelas lebih tinggi dari pada nilai KKM

D. Ketuntasan Klasikal

Batasan ketuntasan klasikal adalah 75 %, memiliki persamaan prosentase ketuntasan klasikal $= (\text{Tuntas}) / (\text{Jumlah seluruh mahasiswa}) \times 100\%$ maka Ketuntasan Klasikal $= 22/28 \times 100 \% = 78,6 \%$

Pembelajaran menggunakan media papan Teka-Teki Logika (PATEKA) dengan 78,6%, maka ketuntasan klasikal (78,6%) > 75%. Artinya ketuntasan klasikal kelas telah memenuhi batas kriteria yang telah ditentukan. Berikut rincian ketuntasan klasikal dalam gambar 1.



Gambar 1. Ketuntasan klasikal

E. Pembahasan

Penggunaan media pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) berpengaruh terhadap hasil belajar . Hal ini ditunjukkan uji signifikansi nilai sig = 0,00 yang nilainya lebih kecil dari 5%, sehingga H_0 ditolak, kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan media pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) berpengaruh terhadap hasil belajar. Kedua rerata prestasi belajar kelas eksperimen (81,48) dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 75, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) memiliki hasil belajar lebih tinggi dari pada KKM. Ketiga, prosentasi prestasi belajar kelas eksperimen (78,6%) dibandingkan prosentase yang telah ditentukan yaitu 75%, hal ini dapat disimpulkan ketuntasan klasikal kelas telah memenuhi batas kriteria yang telah ditentukan.

Dengan diterimanya ketiga hipotesis penelitian ini, membuktikan bahwa pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) efektif terhadap hasil belajar pada materi gerbang logika. Hal ini sesuai dengan penelitian Khoiriati [13] simpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran joyfull learning media SMART-Interaktif pada hasil belajar materi gerak lurus. Begitu halnya Izzudin [14] menyimpulkan bahwa media pembelajaran video interaktif engine tune-up EFI efektif digunakan sebagai media pembelajaran kompetensi dasar service engine dan komponen-komponennya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hipotesis penelitian dan hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) efektif terhadap hasil belajar pada materi gerbang logika, karena:

1. Ada pengaruh yang signifikan media pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) terhadap hasil belajar pada materi gerbang logika dengan signifikansi 0,00.
2. Pembelajaran papan teka-teki logika (Pateka) pada materi gerbang logika mencapai ketuntasan belajar minimal (KKM = 75).
3. Ketuntasan klasikal kelas telah memenuhi batas kriteria yang telah ditentukan. Yaitu persentase prestasi belajar kelas eksperimen (78,6%) dibandingkan prosentase yang telah ditentukan yaitu 75%.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam gerbang logika disarankan agar menerapkan menggunakan media pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih tertantang.
2. Penerapan pembelajaran gerbang logika lebih mengoptimalkan aktivitas belajar melalui uji coba secara langsung menggunakan sebuah media pembelajaran salah satunya adalah pateka.
3. Kepada para pendidik maupun peneliti, disarankan agar melakukan penelitian yang serupa dengan memperhatikan kelemahan – kelemahan atau keterbatasan – keterbatasan dalam penelitian ini, misalnya dengan menambah/memperluas sampel penelitian, memperhatikan latar belakang keluarga, faktor sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anitah, SW, Strategi Pembelajaran di SD, Tangerang: Universitas Terbuka, 2007.
- Balkun, M. M, 'Teaching with Digital Media: Widening the Framework', Transformations, 22(1), p. 15–24, 143, 2011.
- Creemers, et All, "Teori dan Praktik Kefektifan Pendidikan Kelas, Sekolah dan Kebijakan," Unesa University Press, Surabaya, 2005.
- Depdiknas, Pembelajaran Berbasis PAIKEM (CTL, Pembelajaran Terpadu, Pembelajaran Tematik). Materi Penguatan Pengawas Sekolah, Jakarta, 2010.
- Gregory. A. a. A. D, Learning in Action, Morgan State University Associate.: College Media, 2016.
- Gruer, Lin "Encounters with Difference: Community-based New Media Programs and Practices," Studies In Art Education, pp. 139-151, 2012.
- Gu, and Guo "Digital case-based learning system in school," PLoS ONE, pp. 1-16, 2017.
- Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hosnan, Pendekatan Siantifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21 Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Izzudin. A. M, "Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Vidio Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Praktik Service dan Komponen-Komponenya," Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Khoiriati. V.E, "Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Joyfull Learning Berbantuan Modul SMART-Interaktif pada Hasil Belajar Materi Gerak Lurus," Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- M. d. Dimiyati, Belajar & Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2015.
- Sharon et All, Edisi Kesembilan Instructional Technology and Media For Learning Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Susanto,A, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Prenamedia, 2013.
- TIM, "Permendikbud nomor 104 tahun 2014," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2014
- TIM, Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Informatika, Bangkalan: Universitas Trunojoyo madura, 2018.
- Uno, Hamzah and Muhammad Nur, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua belah pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan media sehingga media papan teka-teki logika dapat di uji cobakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa. Pihak Universitas Trunojoyo Madura yang telah memfasilitasi dosen untuk dapat mengembangkan media pembelajaran melalui hibah pembelajaran yang inovatif. Terakhir, buat Universitas Muhammadiyah Purworejo yang turut serta membantu mempublikasikan hasil penelian.

PENGUATAN IDENTITAS VOKASIONAL SANTRI MEMASUKI ERA INDUSTRI 4.0*

Dina Hermina

Email: dinahermina@uin-antasari.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan apa yang dimaksud identitas vokasional santri dan bagaimana menguatkan identitas vokasional santri dalam memasuki era industri 4.0. Identitas vokasional santri yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap gambaran tujuan, minat, kepribadian, dan bakat dari seseorang dengan jelas dan stabil, yang dapat berbentuk *diffusion identity*, *moratorium identity*, *foreclosure identity* dan *achievement identity*; dan penguatan identitas vokasional santri dalam memasuki era industri 4.0 dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan berbasis *metaskills*, *soft skills*, dan *hard skills* yang dibutuhkan dalam memasuki era industri 4.0. selain kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan mengelola orang-orang, berkoordinasi dengan yang lain, memiliki kecerdasan emosional, kemampuan membuat keputusan dan adil, berorientasi jasa, kemampuan bernegosiasi, dan memiliki fleksibilitas kognitif.

Kata Kunci: Penguatan, Identitas Vokasional, Santri, Industri 4.0

PENDAHULUAN

Saat ini tidak ada satu titik di belahan dunia mana pun yang dapat menghindari dari pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran strategis, berada di antara benua-benua besar, memiliki keharusan terlibat dalam perkembangan dunia saat ini. Saat ini kita berada di era industri 4.0 yang semakin maju dengan pesatnya melampaui industri 3.0. Menurut Wikipedia, industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi industri. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Namun secara garis besar, revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya, semua proses produksi ditopang dengan internet. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, bahwa revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, namun menjadi peluang baru, sehingga Indonesia perlu mempersiapkan diri. "Jadi, kita

* Makalah disajikan pada Simposium Nasional MN KAHMI dengan Tema: Teknologi, Industri dan Pendidikan di UNS Inn, Kampus Utama UNS, Ketingan, Surakarta pada hari Sabtu, 16 Pebruari 2019.

perlu menginformasikan kepada para pemangku kepentingan bahwa industri 4.0 ini bukan hanya di depan mata, tetapi sudah berjalan. Ke depan, kebijakan industri harus selaras disesuaikan dengan perkembangan teknologi," ujar Menteri Airlangga (Kemenperin.go.id).

Revolusi industri 4.0 ini dicetuskan pertama kali pada 2011 oleh Klaus Schwab, orang Jerman, Founder dan *Executive Chairman of the World Economic Forum* dalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution*, yang kemudian menjadi tema utama pada pertemuan *World Economic Forum (WEF)* 2016 di Davos, Swiss. Beberapa negara yang telah memiliki program-program untuk mendukung industrinya menuju Industri 4.0 seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea, dan Vietnam. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak berubah, sejak revolusi industri 1.0 dimana tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin, yang pertama kali dengan kemunculan mesin uap di abad ke 18. Revolusi industri saat itu memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan ekonomi hingga enam kali lipat. Revolusi industri 2.0 memunculkan pembangkit tenaga listrik produksi massal dan standarisasi mutu, sehingga kemudian muncul pesawat telepon, pesawat terbang, mobil, dan sebagainya. Dalam revolusi industri 3.0 muncul teknologi digital, internet, komputer dan otomatisasi. Selanjutnya saat ini revolusi industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi manufaktur yang diakibatkan oleh kekuatan komputasi dan konektivitasnya serta kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), termasuk *internet of thing*, yang mana segala sesuatu dikerjakan secara otomatis sehingga terjadi distrupsi teknologi yang sangat cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan besar saat ini.

Kehadiran revolusi industri 4.0 tidak hanya menjadi peluang tetapi juga menjadi tantangan. Untuk itu diperlukan penguatan identitas vokasional pada santri untuk dapat memiliki gambaran tujuan, minat, kepribadian, dan bakat dengan jelas dan stabil.

IDENTITAS VOKASIONAL SANTRI

Pada perkembangan remaja, identitas merupakan aspek penting agar dapat mengenali dirinya pribadi sehingga tidak tenggelam dalam kehidupan lingkungannya. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, "Siapakah saya?" ketika berada di sekitar lingkungannya. Hal ini terkait dengan peran yang harus dimainkannya. Oleh karena itu identitas akan berhadapan dengan difusi peran (*role diffusion*). Menurut Berk (2000), identitas merupakan konsepsi yang disusun dengan baik dari nilai, keyakinan, dan tujuan yang terbentuk sendiri agar individu berkomitmen keras. Van Aardweg dan Van Aardweg (1988) mendefinisikan identitas sebagai mengetahui siapa dirinya dan pengetahuan itu yang membedakan dirinya dengan yang lain. Menurut Louw dan Louw (2007), identitas pribadi seseorang termasuk identitas sosial budaya, identitas peran gender, identitas vokasional, dan sistem nilai pribadi. Menurut Marcia dalam Woolfolk (1984), identitas merujuk pada pengaturan dorongan, kemampuan, keyakinan, dan sejarah seseorang kedalam struktur dirinya. Menurut Marcia, lebih lanjut, identitas ini hampir mirip dengan konsep diri (*self-concept*), tetapi lebih kepada pilihan (*choices*)

dan keputusan (*decisions*), khususnya vokasi (*vocation*)/pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup (*philosophy of life*). Ketiga hal tersebut harusnya menjadi pegangan remaja terkait untuk menjawab pertanyaan “siapakah saya” dan lebih jauh lagi pertanyaan “saya menjadi apa” di tengah masyarakat, dan ini merupakan difusi peran.

Menurut Holland (1997), identitas vokasional merupakan kepemilikan gambaran diri yang jelas dan stabil dari tujuan, minat, kepribadian, dan bakat seseorang. Identitas vokasional menurut Skorikov dan Vondracek (2011) dapat disebut juga *occupational identity*, *work identity*, *professional identity*, atau *career identity*, yang merujuk pada kesadaran seseorang sebagai pekerja. Selain itu, Kielhofner (2007) mengatakan bahwa identitas vokasional itu merupakan persepsi seseorang terhadap minat, kemampuan, tujuan, dan nilai bekerja. Meijers (1998) berpendapat bahwa identitas vokasional merupakan struktur makna yang kompleks dimana individu menghubungkan motivasi dan kompetensinya dengan peran pekerjaan yang dapat diterima. Kemudian Kroger (2007) dan juga Skorikov dan Vondracek (2007) mengatakan bahwa identitas vokasional seringkali dianggap sebagai kompoten utama dari makna keseluruhan identitas seseorang. Itu semua sejalan dengan pendapat Erikson (1968) bahwa elemen utama, yang bersifat integratif, dari identitas memberikan tidak hanya sebagai determinan pilihan dan pencapaian vokasi/okupasi, tetapi juga sebagai faktor utama kemunculan makna dan struktur kehidupan individu. Riset tentang struktur, fungsi, dan perkembangan identitas vokasional sudah banyak dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin, sekalipun mayoritas dilakukan di bidang psikologi vokasional. Para ahli psikologi vokasional dan perkembangan melihat pembentukan identitas vokasional sebagai tugas perkembangan kritis remaja, dan bentuk identitas vokasional merupakan indeks kemajuan keseluruhan dalam perkembangan karier seseorang (Kroger, 2007; Savickas, 1985; Vondracek, 1995; Ximmer-Gembeck dan Mortimer, 2006).

Holland, Daiger, dan Power (1980) mendefinisikan identitas vokasional sebagai kesadaran dan kemampuan seseorang menentukan minat, karakteristik pribadi, kekuatan, tujuan yang dimilikinya yang terkait dengan pilihan pekerjaannya. James Marcia mengidentifikasi empat alternatif yang berbeda bagi remaja selama pembentukan identitas (*the period of identity*). Yang pertama, pencapaian identitas (*identity achievement*), artinya individu telah mempertimbangkan segala kemungkinan, membuat pilihan-pilihan pribadi, dan mengusahakan mengejar pilihan-pilihan tersebut. Yang kedua, penyitaan (*foreclosures*), sudah memiliki tujuan tertentu (*particular goals*), tetapi tujuan tersebut dipilihkan oleh orangtua, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, difusi identitas (*identity diffusion*), yang terjadi ketika mencapai yang bukan keputusannya (*no conclusions*) dan tidak memiliki arah pekerjaan (*no firm direction*), sekalipun mereka sudah melewati masa untuk mencoba membuat keputusan. Yang terakhir, penangguhan (*moratorium*), merupakan pergumulan dengan pilihan-pilihan (*the midst of struggling with choices*). Di sini terjadi krisis identitas (*identity crisis*), atau bisa terjadi ‘kegalauan’.

Menurut Marcia dalam Woolfolk (1984), ketika anak-anak memasuki usia remaja, mereka dengan kesadarannya sudah membuat keputusan tentang siapa dirinya (*who they are*) dan apa yang mereka yakini (*what they believe*). Menurut Marcia ada lima wilayah pembentukan identitas individu pada masa remaja, yaitu identitas vokasional, identitas religius, identitas politik, identitas etnis, dan identitas seksual. Identitas vokasional

sebagai salah satu identitas individu terbentuk melalui dua proses, yaitu proses eksplorasi dan proses komitmen. Proses eksplorasi merupakan periode atau tahap berjuang dan aktif mencari dalam membuat keputusan terkait tujuan, nilai dan keyakinan individu. Hal ini akan nampak dari keluasan dan intensitas individu, dalam beberapa aktivitas sebagai berikut. (1) Kemampuan untuk mengetahui (*knowledgeability*), yaitu sejauhmana tingkat pengetahuan yang dimiliki individu berdasarkan keluasan dan kedalaman informasi yang berhasil dihimpun terkait berbagai alternatif pilihan pekerjaan dan studi lanjut yang mendukung pilihan pekerjaan tersebut. Individu mencari tahu tentang berbagai alternatif pekerjaan yang diambilnya nanti. (2) Aktivitas yang mengarahkan pada pengumpulan informasi (*activity directed toward gathering information*), yaitu aktivitas yang dipandang tepat untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan bidang pekerjaannya. (3) Pertimbangan elemen identitas potensial pilihan (*considering alternative potential identity element*), yaitu sejauhmana individu dapat mempertimbangkan berbagai informasi yang sudah diperoleh terkait kemungkinan dan peluang dari beberapa pilihan pekerjaan. (4) Irama perasaan (*emotional tone*), yaitu perasaan emosional yang masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena memungkinkan memilih yang lain dari beberapa pilihan pekerjaan yang tersedia. (5) Keinginan membuat keputusan lebih awal (*desire to make an early decision*), yaitu keinginan membuat keputusan lebih awal atas keragu-raguan yang terjadi secara realistis dan meyakinkan berkenaan dengan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.

Proses selanjutnya adalah terkait dengan komitmen. Menurut Marcia, komitmen berhubungan dengan keyakinan untuk memilih dari berbagai pilihan yang ada dan tidak berubah lagi, pilihan tersebut sulit untuk diubah. Komitmen merupakan usaha membuat keputusan mengenai pekerjaan atau ideologi, kemudian menentukan berbagai strategi untuk mencapainya. Komitmen adalah kekuatan hati bertahan padah pilihan pekerjaan dan setiap untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Terkait dengan komitmen terhadap pekerjaan, terdapat beberapa hal yang dilakukan. (1) Kemampuan mengetahui (*knowledgeability*), yaitu dengan merujuk pada sejumlah informasi yang dimiliki dan dipahami dari pilihan-pilihan yang telah ditetapkan. Remaja yang memiliki komitmen tentu memiliki pengetahuan yang mendalam, terperinci dan akurat tentang hal-hal yang sudah diputuskan. (2) Aktivitas yang diarahkan pada penerapana elemen identitas yang dipilih (*activity directed toward implementing the chosen identity elemen*). (3) Irama perasaan (*emotional tone*), yaitu irama perasaan yang terkait dengan perasaan individu, baik dalam menetapkan keputusan maupun dalam penerapannya. Irama perasaan itu dapat dilihat dari keyakinan diri, stabilitas, dan optimisme terhadap masa depan. (4) Identifikasi dengan orang lain secara meyakinkan (*identification with significant other*), yaitu mengidentifikasi orang-orang yang dianggap penting atau figur yang dianggap ideal, atau idola remaja tersebut dan melihat aspek positif dan negatifnya. (5) Kemampuan memproyeksi masa depan (*projecting one's personal future*), yaitu kemampuan memproyeksikan diri ke masa depan dengan membuat rencana masa depan yang jelas. (6) Bertahan dari berbagai godaan (*resistence to being swayed*), yaitu ketahanan individu terhadap godaan yang dapat mengalihkan keputusan yang telah ditetapkan. Tetap berpegang teguh pada pilihan, dengan mengikuti irama perubahan terkait dengan kemampuan diri dan peluang yang ada. Dengan demikian, proses

ekplorasi dan pembuatan komitmen pada remaja menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas remaja itu sendiri.

Santri pondok pesantren rata-rata berada pada usia remaja, yaitu antara 13-18 tahun. Remaja (*adolescent*). Dalam psikologi perkembangan pada usia tersebut santri berada pada masa transisi, dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Artinya, pada masa transisi ini seorang santri belum menentukan dengan pasti arah masa depannya. Namun demikian, mereka telah memilih tempat belajar dan menghabiskan waktu belajar di pondok pesantren.

Di usia remaja ini, santri berada sepanjang waktu di pondok pesantren. Menjalani kehidupan di pondok pesantren. Jauh dari orangtua dan mengurus dirinya secara mandiri. Santri dididik untuk mandiri dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bagi santri yang semasa anak-anak dan tinggal bersama orangtua, terbiasa dilayani orangtua, tentu ini menjadi saat yang sulit ketika memulai berada di pondok pesantren. Kebanyakan santri mengalami hal demikian. Di awal-awal berada di pondok pesantren mereka ingin pulang kembali ke rumah, berkumpul dengan orangtua dan keluarga. Kemudian mereka melakukan penyesuaian dengan lingkungan pondok pesantren, bergaul dengan sesama santri (*peer group*), belajar dari cara teman-temannya mengatasi permasalahan masing-masing, dan selanjutnya merasa terbiasa. Sehingga lambat laun mereka tidak ingin lagi kembali pulang ke rumah. Rasa senasib sepenanggungan sesama santri menjadikan mereka bisa mengakrabkan diri. Mereka juga saling memberikan kekuatan kepada yang sedang menghadapi masalah. Tidak hanya kekuatan moril, bahwa harus tetap kuat berada di pondok pesantren, tetapi juga saling meminjamkan barang dan uang. Kehidupan seperti tidak ditemukan di sekolah lainnya, kecuali di pondok pesantren.

PENGUATAN IDENTITAS VOKASIONAL SANTRI

Pada beberapa pesantren modern, santri telah dibekali dengan keterampilan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu mata pelajaran komputer. Sehingga ketika lulus, santri sudah memiliki keterampilan mengoperasikan komputer. Hal ini dapat membawa dampak pada penguatan identitas vokasional santri. Identitas merupakan aspek penting pada santri, agar dapat mengenali dirinya pribadi sehingga tidak tenggelam dalam kehidupan lingkungannya. Seringkali timbul pertanyaan, siapakah saya? Seakan tidak mengenal siapa dirinya.

Untuk itu pesantren memiliki peran penting dalam menguatkan identitas diri santri (termasuk identitas vokasionalnya), karena berbagai informasi, pengetahuan, dan sebagainya diperoleh santri di pesantren. Santri dapat mengenal 'siapa dirinya', menjadi apa, dan apa perannya di lingkungannya setelah lulus dari pesantren.

Di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat, tentu pesantren dituntut pula memberikan informasi yang baik dan benar kepada santri dan mengenalkan teknologi yang tengah berkembang saat ini. Sekalipun santri tidak diperbolehkan membawa dan mempergunakan gawai (*gadget*) yaitu suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget merupakan peranti (perangkat) elektronik atau

mekanik, yang memiliki fungsi praktis. Jadi, gadget merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Saat ini gadget identik dengan benda elektronik berukuran kecil, yang mudah dibawa kemana-mana (mobile), contohnya smartphone – handphone, iphone, ipad, tablet – notebook, dan mp3 player. Dengan menggunakan gadget ini memudahkan untuk berkomunikasi. Pesantren melarang santri membawa gadget ke pondok dengan alasan di antaranya agar santri terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, karena santri yang masih dalam usia remaja masih rentan dengan masuknya pengaruh-pengaruh negatif.

Menurut IDN Times generasi millennial membawa gaya kehidupan yang unik dan terbaru, sehingga menyebabkan banyaknya sistem kehidupan yang bertransformasi. Selain itu, kaum millennial menganggap kehidupan sosial sebagai aspek yang penting, dimana berbagai kemajuan teknologi, dan perilaku konsumtif lekat sebagai karakteristiknya. Keadaan ini tentu berbahaya, karena remaja tersebut tidak dapat membuat tujuan hidupnya, berperan di lingkungannya, dan mampu membuktikan keberadaan dirinya.

Skills yang dibutuhkan di era Industri 4.0 menurut World Skills Rusia dalam Skill for Industry 4.0 adalah:

- 1) *Metaskills*: Environmental intelligence (sustainability); Sustainability skills (Green including recycle); Continuous learning; Multidisciplinary transfer; Creativity dan Adaptivity.
- 2) *Soft skills*: Communication; EQ (emotional intelligence); Safety skills; Collaboration (human-human and human-machine); dan Problem identification and solving.
- 3) *Hard skills*: Design; Programming; CPS (Cyber-physical systems) dispatching; CPS maintenance; Data management; Knowledge transfer and usage; dan Quality control.

Menurut *The World Economic Forum* dalam *Future of Jobs Report* terdapat 10 keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang, yaitu (1) Complex problem solving; (2) Critical thinking; (3) Creativity; (4) People management; (5) Coordinating with others; (6) Emotional intelligence; (7) Judgment and decision-making; (8) Service orientation; (9) Negotiation; dan (10) Cognitive flexibility.

Untuk itu santri perlu dibekali dengan *metaskills*, *soft skills*, dan *hard skills* yang dibutuhkan dalam memasuki era industri 4.0. selain kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan mengelola orang-orang, berkoordinasi dengan yang lain, memiliki kecerdasan emosional, kemampuan membuat keputusan dan adil, berorientasi jasa, kemampuan bernegosiasi, dan memiliki fleksibilitas kognitif.

KESIMPULAN

Identitas vokasional santri yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap gambaran tujuan, minat, kepribadian, dan bakat dari seseorang dengan jelas dan stabil, yang dapat berbentuk *diffusion identity*, *moratorium identity*, *foreclosure identity* dan *achievement identity*; dan penguatan identitas vokasional santri dalam memasuki era industri 4.0

dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan *metaskills*, *soft skills*, dan *hard skills* yang dibutuhkan dalam memasuki era industri 4.0. selain kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan mengelola orang-orang, berkoordinasi dengan yang lain, memiliki kecerdasan emosional, kemampuan membuat keputusan dan adil, berorientasi jasa, kemampuan bernegosiasi, dan memiliki fleksibilitas kognitif, agar santri memiliki kesiapan memasuki dunia kerja/dunia usaha yang sesuai dengan perkembangan tuntutan di era industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Why the Pesantren as Center for Islamic Studies Remains Unique and Stronger in Indonesia?" *Makalah Seminar Internasional* di Prince of Songkla University Pattani, tanggal 25-28 Juni 1998.
- Burhanudin, Jajat & Afrianty, Dina. *Mencetak Muslim Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Calhoun, C.C., & Finch, A.V. *Vocational Education: Concepts and Operations*. Belmont, California: Wadsworth, Inc, 1982.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3S, 2011.
- Glasser, William. *Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom*. New York: NY Harper, 1998.
- Kroger, Jane & Marcia, James E. "The Identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations." dalam *Handbook of Identity Theory and Research*. ed. Schwartz, S.J. et al., 31-53. Springer Science+Business Media, LLC., 2011.
- Sambodo, Amir. *Membangun Teknopreneur: Menyongsong Gelombang Baru Bisnis Teknologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- SM, Ismail, et.al., ed. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3S, 1994.
- Suharto, Toto. et al. *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.
- Takdir, Mohammad. *Modernisasi Kurikulum Pesantren: Konsep dan Metode Antroposentris*. Yogyakarta: IRCiSod, 2018.
- Wahid, Marzuki. et al. ed. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*. 1989. USA: dilithium Press, Ltd.
- Woolfolk, Anita E. *Educational Psychology for Teacher*. Englewood Cliffts, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1984.

EFIKASI DIRI AKADEMIK SANTRI BARU DITINJAU DARI DUKUNGAN GURU DAN INTERAKSI TEMAN SEBAYA

Hafizh Khofaria Rosidah, Siti Nurina Hakim
snh147@ums.ac.id
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efikasi diri akademik santri baru ditinjau dari dukungan guru dan interaksi teman sebaya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian yaitu santri baru kelas VII MTs Al-Mukmin Ngruki tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 186 santri yang terdiri dari 6 kelas, sedangkan sampel penelitian berjumlah 124 santri yang diambil dengan teknik *cluster random sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan Skala Efikasi Diri Akademik, Skala Dukungan Guru, Skala Interaksi Teman Sebaya. Data dianalisis dengan teknik *Non Parametric Spearman's* berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (r_{xy})=0,173 dengan sig (1-tailed)= 0,027 ($p<0,05$) yang berarti ada hubungan positif antara efikasi diri akademik dengan dukungan guru, namun hasil koefisien korelasi (r_{xy})=0,136 dengan sig (1-tailed)=0,065 ($p<0,05$) yang berarti bahwa efikasi diri akademik santri tidak ada hubungan dengan interaksi teman sebaya. Sumbangan efektif antara efikasi diri akademik dan dukungan guru pada santri baru sebesar 2,9% sedangkan 99,71% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa efikasi diri akademik memiliki rerata yang tergolong tinggi, dukungan guru memiliki rerata yang tergolong tinggi dan interaksi teman sebaya memiliki rerata yang tergolong tinggi.

Kata Kunci: Efikasi diri akademik, Dukungan guru, Interaksi teman sebaya, Santri baru

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia bukan hanya ada pada sekolah, namun sekolah dapat mengadakan suatu pendidikan formal yang terencana untuk para siswa secara klasikal. Sedangkan, belajar bertujuan sebagai upaya untuk mencapai sebuah pendidikan di sekolah. Interaksi aktif yang ada di sekolah antara siswa dan guru merupakan hakekat dari belajar mengajar antara guru dan siswa. Interaksi yang ada di sekolah yaitu hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan tempat belajar. (Ahmadi, 2008)

Pada UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam undang-undang no. 20, tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Triyanto dkk, 2013)

Kajian tentang efikasi diri termaktub dalam Al-quran khususnya dalam ayat yang menjelaskan tentang keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, firman Allah dalam Qs. Ali-Imron: 39 yang memerintahkan hamba-Nya untuk tidak takut dan bersedih:

((وَلَا تَهْؤُا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ))

139. Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.

Larangan bersikap lemah dan takut tersebut mengisyaratkan akan perintah untuk memupuk keyakinan dan mental yang kuat dalam menghadapi situasi apapun bahkan dalam situasi yang menyulitkan sekalipun. Disamping itu pandangan islam terhadap konsep islam lebih luas dari pada perspektif barat. Hal tersebut dikarenakan islam megaitkan konsep ini dengan konsep *uluhiyah* dan konsep manusia sebagai sebaik baik ciptaan (*ahsan al-taqwim*). Pendapat ini di perkuat dengan penggalan ayat berikut ((وَأَنْتُمْ ((الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) sehingga seseorang yang beriman kepada Allah maka ia termasuk orang yang beriman sehingga tidak perlu takut dan merasa lemah. (Noornajihan, 2014)

Menurut Bandura (dalam Feist & Feist, 2009), orang-orang yang percaya bahwa dirinya memiliki potensi untuk merubah hal-hal yang ada di lingkungannya akan bertindak aktif serta lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki efikasi diri yang rendah. Remaja yang memiliki efikasi diri yang positif ialah remaja yang yakin bahwa dirinya mampu menjalankan tugas perkembangan sebagai seorang remaja dan cenderung mampu melewati masa remaja ini dengan baik. Sebaliknya remaja yang memiliki efikasi diri yang negatif akan cenderung mengalami kebingungan dan bermasalah pada masa remaja ini.

Kasus yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Sukma Bangsa, Caleue, Kecamatan Indrajaya, Pidie, NAD. Pada saat Ujian Nasional hari kedua, pihak pengawas UN menemukan 11 siswa dari sekolah tersebut yang kedapatan mencontek pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk jurusan IPA dan pelajaran Ekonomi pada jurusan IPS sehingga pada akhirnya ke 11 siswa tersebut harus di keluarkan dari sekolah. Dari kasus tersebut dapat ditilik bahwa masih banyak siswa yang memiliki efikasi diri yang rendah, sehingga melakukan kecurangan dalam kegiatan belajar (Sari, 2016)

Selain itu Hasil survey Litbang Media Group (2007) mayoritas anak didik, baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat. Hal sama terungkap dalam survei yang dilakukan 19 April 2007 di enam kota besar di Indonesia yaitu: Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan. Dapat disimpulkan bahwa fenomena mencontek (plagiat) hampir terjadi di semua jenjang pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi (Suryana, 2016). Pada tahun 2006 dilakukan oleh *Josephson Institute Of Ethics* di amerika serikat pada responden Sekolah Menengah Pertama (SMP) 60% peserta didik mengakui pernah melakukan kecurangan dalam ujian maupun mengerjakan tugas bersama teman-teman (Manoppo & Mardapi, 2014)

Efikasi diri akademik diartikan sebagai keyakinan seseorang dalam mengerjakan tuntutan akademik pada tingkat kemampuan tertentu (Santrick, 2009). Dalam Pendidikan, efikasi diri akademik merupakan faktor pendukung utama keberhasilan peserta didik, karena efikasi diri akademik dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Efikasi diri akademik yang tinggi diprediksi akan menggerakkan mereka untuk mampu mengeluarkan kemampuan yang lebih besar dalam menyelesaikan tugas-tugas nya, meskipun dengan banyaknya kendala yang dihadapi. Keefektifan akademik mengacu pada keyakinan individu (keyakinan) bahwa mereka dapat berhasil mencapai tingkat yang ditentukan pada tugas akademik atau mencapai tujuan akademis tertentu (Sharma, 2014)

Efikasi diri akademik pada santri baru berdasarkan observasi peneliti pada 3 oktober 2017 banyak santri baru yang memiliki efikasi rendah yaitu ketika subjek tidak faham dengan pelajaran yang disampaikan maka subjek hanya diam saja sehingga sampai akhir pelajaran subjek tidak faham dengan materi tersebut, namun ada pula yang memiliki efikasi diri yang tinggi, ketika para santri diminta untuk maju kedepan kelas mereka ada yang maju kedepan kelas dan mengerjakan walaupun dari beberapa pertanyaan ada yang kurang benar.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 13 November 2017 di salah satu pesantren di Sukoharjo. Subjek adalah salah seorang santri laki-laki yang berinisial ZK berusia 14 tahun, MAL berusia 12 tahun, LH berusia 13 tahun merasakan kurang percaya diri karena materi pelajaran yang sulit dengan berbahasa arab dan menggunakan teknik hafalan. Namun MAL sering merasa bosan ketika guru hanya menerangkan saja dan lebih sering tidur dikelas. Namun MAL tidak keberatan dengan mata pelajaran bahasa arab. Dari ketiga subjek tersebut memiliki kesamaan malu bertanya ketika pelajaran berlangsung.

Menurut Eccles dkk bahwa siswa yang memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) merasakan transisi yang berbeda pada saat sekolah dasar, hal ini membuat para siswa merasa stress dengan adanya banyak perubahan disekolah maupun dalam individu itu sendiri. Namun hal itu memiliki stimulasi tersendiri pada diri siswa walaupun memiliki banyak perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa SMP berkaitan dengan perubahan guru, ruang kelas, sekolah, peraturan dan prosedur kelas, mata pelajaran, dan pertemanan (Schunk dkk, 2008).

Pasangan, orang tua, keluarga, teman, anggota komunitas, psikolog merupakan sumber sumber dari dukungan sosial. sehingga, dukungan dari berbagai sumber tersebut membuat individu yakin bahwa dirinya dicintai, dihargai, disayangi sehingga menjadi bagian dari jaringan sosial, serta dapat meningkatkan motivasi, semangat belajar juga efikasi diri akademik pada individu tersebut Kehidupan akademik pada santri tahun pertama cenderung tidak lepas dari pengaruh orang lain. Bantuan dari orang lain yang diterima dan diyakini oleh individu tersedia untuknya disebut dengan dukungan sosial, terutama dukungan guru dan interaksi teman sebaya. Kedua sumber tersebut penting karena kehidupan akademik santri baru tidak dapat lepas dari kedua sumber yang berpeluang besar dapat memberi dukungan secara langsung terhadap santri dalam menghadapi tuntutan akademik. Guru merupakan penilai akademik santri baru yang berpeluang memfasilitasi dan menciptakan situasi kondusif pada proses belajar Santri,

sedangkan interaksi teman sebaya berperan dalam membantu penyelesaian tugas-tugas pelajaran santri. (Purba, 2007)

Peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada ALS salah satu santri perempuan di salah satu pesantren di Sukoharjo pada tanggal 15 Januari 2018. ALS dan TAR merasa ketika tidak faham dengan pelajaran disekolah akan meminta bantuan teman nya untuk menjelaskan ulang apa yang tidak difahami. Namun ALS dan TAR menyukai bahasa arab dan tidak menyukai hitungan, keduanya tidak malu malu bertanya ketika tidak faham dengan materi disekolah, subjek juga tidak malu meminta tolong untuk meminta bantuan teman nya.

Hasil penelitian Handono (2013) dukungan sosial pada santri baru sebesar 86,96% yaitu dapat meningkatkan efikasi diri. Sedangkan pada kategori stres lingkungan, hasil dari penelitian termasuk kategori cukup tinggi sebesar 80,43%. Dukungan sosial tetap berpengaruh pada efikasi diri namun stress lingkungan juga berpengaruh pada efikasi diri santri baru selain itu juga efikasi diri di pengaruhi oleh dukungan guru dan interaksi teman sebaya.

Hasil penelitian Utami (2016) yang dilakukan pada mahasiswa Psikologi tingkat pertama di Universitas Diponegoro menyatakan bahwa dukungan dosen memiliki sumbangan efektif sekitar 15% pada efikasi diri akademik, namun Interaksi teman sebaya tidak memiliki sumbangan yang efektif pada efikasi diri akademik mahasiswa tingkat pertama. Hasil penelitian Handono (2013) dukungan sosial pada santri baru sebesar 86,96% yaitu dapat meningkatkan efikasi diri. Sedangkan pada kategori stres lingkungan, hasil dari penelitian termasuk kategori cukup tinggi sebesar 80,43%. Dukungan sosial tetap berpengaruh pada efikasi diri namun stress lingkungan juga berpengaruh pada efikasi diri santri baru selain itu juga efikasi diri di pengaruhi oleh dukungan guru dan interaksi teman sebaya

Santri-santri merupakan anak rantau dari berbagai wilayah di Indonesia, yang nantinya akan tinggal di Pondok Pesantren yang jauh dari orangtua sehingga kondisinya akan berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya. Mereka akan bersama-sama dengan para santri lainnya yang memiliki latar belakang, budaya dan tempat tinggal yang berbeda mulai mencari teman sebaya yang memiliki tujuan yang sama. (Handono, 2013). Dari penjabaran diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu *“Apakah ada hubungan dukungan guru dan interaksi teman sebaya dengan efikasi diri akademik pada santri baru?”*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efikasi diri akademik santri baru ditinjau dari dukungan guru dan interaksi teman sebaya , mengetahui sumbangan efektif efikasi diri akademik melalui dukungan guru dan interaksi teman sebaya dan mengetahui tingkat efikasi diri akademik Santri baru, dukungan guru dan interaksi teman sebaya santri baru.

1. METODE

Penelitian ini memiliki variabel tergantung Efikasi Diri Akademik, variabel bebas: Dukungan Guru dan Interaksi Teman Sebaya. Populasi penelitian yaitu santri baru kelas VII MTs Al-Mukmin Ngruki tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 186 santri yang

terdiri dari 6 kelas yaitu kelas A-F. Peneliti mengambil sampel 4 kelas (124 santri) dengan menggunakan teknik *cluster randomsampling*.

Pengumpulan data menggunakan skala yaitu Skala Efikasi Diri Akademik dalam penelitian ini merupakan skala yang disusun oleh peneliti. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek Efikasi Diri dikemukakan oleh Bandura (Ghufron 2010) yang meliputi tingkatan (*Magnitude*), kekuatan (*Strength*), keluasaan (*generality*). Skala Dukungan Guru disusun oleh Sepfitri (2011) melalui indikator dukungan guru yang diungkap oleh Sarafino (2002) meliputi dukungan emotional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan penilaian dan dukungan jaringan sosial. Sedangkan Skala Interaksi Teman Sebaya diperoleh dari Rahmawati (2016) melalui aspek Interaksi Teman Sebaya dari Purtowarsito (1983) yaitu keterbukaan individu dalam kelompok, kerjasama individu dalam kelompok dan interaksi atau pertemuan individu dalam kelompok.

Reliabilitas skala dihitung dengan teknik *Alpha Cronbach* untuk mengetahui koefisien reliabilitas (α). Ketiga skala tergolong reliable dengan nilai α efikasi diri akademik = 0,765 (14 aitem), α skala dukungan guru = 0,910 (34 aitem), α skala interaksi teman sebaya = 0,856 (19 aitem).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas data variabel efikasi diri akademik, dukungan guru dan interaksi teman sebaya terpenuhi karena asumsi dari data tersebut normal. Namun hasil uji linieritas antara dukungan guru dan efikasi diri akademik, hubungan antara efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya tidak linier. Uji asumsi normalitas dan linieritas dari ketiga variabel efikasi diri akademik dan dukungan guru serta efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya tidak terpenuhi sehingga analisis data menggunakan teknik *statistic analisis non-parametic*, karena salah satu uji asumsi tidak terpenuhi yaitu tidak linier. Analisis yang tepat menggunakan analisis *non parametric Spearman's*, sebagai jalan keluar nya tidak dapat menggunakan teknik analisis regresi, maka hipotesis yang diajukan mayor tidak dapat diujikan dan yang dapat diujikan hanya hipotesis minor saja.

Hasil dari efikasi diri akademik dan dukungan guru memiliki hubungan positif yang signifikan, namun efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya tidak memiliki hubungan dalam meningkatkan efikasi diri akademik pada santri baru di MTs Al-Mukmin Ngruki.

Tabel 1. Hasil uji Hipotesis

Uji Hipotesis	Variabel	r	Signifikansi
Minor 1	Efikasi diri akademik dan dukungan guru	0,173*	0,027
Minor 2	Efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya	0,136	0,065

*. Correlation is significant at the 0,05 level (1-tailed)

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis mayor yaitu hubungan antara efikasi diri akademik ditinjau dari dukungan guru dan interaksi teman sebaya tidak dapat diuji karena hipotesis mayor dari ketiga variabel (efikasi diri akademik,

dukungan guru dan interaksi teman sebaya) normal namun tidak linier atau searah pada (hubungan efikasi diri akademik) serta (hubungan efikasi diri akademik dengan interaksi teman sebaya) sehingga analisis hipotesis mayor tidak dapat dilakukan.

Melihat kejadian diatas maka tidak mungkin dilakukan analisis dengan menggunakan teknik statistik regresi, sehingga menggunakan *statistic non parametik Spearman'S*. Analisis yang dilakukan yaitu analisis korelasi untuk data yang tidak memiliki distribusi sebaran data yang normal namun tidak linier (non-Parametik). Sehingga hipotesis yang diuji hanya hipotesis minor menggunakan teknik *statistic non parametric spearman's* yaitu hubungan efikasi diri akademik dengan dukungan guru (minor 1) dan hubungan efikasi diri akademik dengan interaksi teman sebaya (minor 2).

Hasil dari korelasi hipotesis minor 1 dengan menggunakan teknik analisis *non parametric spearman's* antara variabel efikasi diri akademik dengan dukungan guru dapat di peroleh nilai koefisien korelasi $(r_{xy}) = 0,173$ dengan $\text{sig (1-tailed)} = 0,027$ ($p < 0,05$) yang menyatakan bahwa efikasi diri akademik dengan dukungan guru memiliki hubungan yang signifikan dan positif. Semakin tinggi efikasi diri akademik santri maka semakin tinggi dukungan guru yang diberikan begitu pula sebaliknya semakin rendah efikasi diri akademik santri maka semakin rendah dukungan guru yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Baron dan Byrne mendefinisikan efikasi diri akademik sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatur aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan tugas, dan mewujudkan harapan akademik baik harapan akademik dari diri sendiri maupun harapan akademik dari orang lain. Siswa yang memiliki efikasi diri akademik yang tinggi menggunakan lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan PR dan mengutamakan yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang optimal (Baron dan byrne, 2004).

Selain itu menurut Alwisol, Efikasi diri dapat diperoleh maupun ditingkatkan atau diturunkan dengan salah satu atau kombinasi dari empat sumber yaitu melalui pengalaman menguasai sesuatu prestasi, persuasi *social* dan pengalaman *vicarious* serta pembangkitan emosi. Pengalaman menguasai situasi adalah suatu tindakan yang pernah dicapai pada masa lalu. Sedangkan, Persuasi sosial yaitu rasa percaya terhadap pemberi persuasi dan kenyataan sifat dari apa apa yang dipersuasikan misalnya apa pun yang dicontokan oleh guru. Kemudian pengalaman *vicarious* di peroleh melalui permodelan sosial seperti dukungan yang diberikan guru. (Adicondro dan Purnamasari, 2011).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan guru terhadap efikasi diri akademik khususnya untuk santri baru sangat penting karena guru adalah orangtua yang ada di sekolah maupun di pesantren, ketika guru memberikan perhatian lebih seperti membantu menyelesaikan permasalahan akademik maka santri akan lebih memperhatikan akademiknya sehingga dapat meningkatkan efikasi diri akademik santri. Dari hasil diatas bahwa dukungan guru sangat berhubungan dengan efikasi diri akademik santri. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Blumer (Rhoton dkk, 2010) menyatakan bahwa manusia itu bertindak atas dasar segala sesuatu bermakna bagi dirinya seperti efikasi diri akademik, dan makna tersebut dapat dikembangkan melalui dukungan sosial dengan orang lain seperti dukungan yang diberikan oleh guru. Hal ini terkait dengan motivasi individu untuk maju di bidang akademik, interaksi sosial

melalui dukungan sosial guru berguna selain itu dalam dirinya yaitu motivasi dari lingkungan atau sosialnya (Handono, 2013)

Hasil dari korelasi minor 2 dengan menggunakan teknik *rank spearman* antara variabel efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya diperoleh koefisien korelasi (r_{xy}) = 0,136 dengan sig (1-tailed) = 0,065 ($p > 0,05$) yang menyatakan bahwa efikasi diri akademik santri dengan interaksi teman sebaya tidak memiliki hubungan positif yang signifikan. Bila seseorang memiliki interaksi sosial yang baik dan harmonis maka akan memunculkan persahabatan yang harmonis. Pada interaksi teman sebaya anak-anak dapat mendukung pengembangan kompetensi sosial melalui efikasi diri. Kompetensi dikembangkan melalui kombinasi pengalaman di anak remaja dan rekan bisa melalui sebuah tindakan akademik. Selama interaksi sosial ini anak-anak belajar keterampilan yang interaktif antara teman dan guru untuk mencapai efikasi diri di sekolah (Nijs, 2014)

Selain itu Menurut Charlesworth dkk (dalam Dagun, 2002) melakukan interaksi dengan teman sebaya akan mempunyai unsur positif yang saling memberikan perhatian dan saling bermufakat membagi perasaan, saling tolong menolong dalam belajar, saling menerima diri, dan saling memberikan sesuatu antara individu yang berarti seperti dukungan dalam akademik walaupun tidak intensif. Namun Mahendrani (2014), *self efficacy* dapat dipengaruhi oleh penyesuaian diri pada santri baru, seseorang dengan *self-efficacy* tinggi cenderung lebih belajar dan berprestasi daripada mereka yang memiliki *self-efficacy* rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Pritaningrum dan Hendriani (2013) menemukan bahwa bentuk penyesuaian diri pada kedua subjek adalah adaptasi, yaitu mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan. Kedua subjek pada penelitian ini mengubah tingkah laku mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tercapainya efikasi diri yang tinggi. Maka santri baru yang memiliki penyesuaian diri yang baik maka akan tercapai efikasi diri yang tinggi.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa efikasi diri akademik pada santri baru di MTs Al-Mukmin Ngruki tidak memerlukan interaksi teman sebaya dalam meningkatkan efikasi diri akademik karena santri baru memiliki penyesuaian diri yang baik terlebih dahulu, selain itu dukungan guru juga diperlukan.

Hasil dari sumbangan efektivitas yang diberikan dari dukungan guru terhadap efikasi diri akademik sebesar 2,9% dan 99,71% di pengaruhi oleh faktor yang lain seperti karena stress lingkungan, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bisa juga karena perpindahan pelajaran dari sekolah dasar terhadap sekolah menengah pertama. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan guru yang diberikan pada sekolah MTs Al-Mukmin tidak begitu besar sehingga tingkat efektivitas pada efikasi diri akademik santri baru sekolah tersebut tidak begitu besar. Jadi pada dasarnya dukungan guru merupakan hubungan yang sifatnya menolong disaat individu sedang mengalami persoalan atau kesulitan, baik berupa informasi maupun bantuan nyata, sehingga membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. Selain itu faktor yang tidak di teliti seperti penyesuaian diri juga sangat diperlukan oleh santri baru karena akan berpengaruh pada minat dalam proses belajar mengajar.

Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa efikasi diri akademik memiliki rerata empirik (RE) = 41,2 dan rerata hipotetik (RH) = 35 yang berarti tergolong tinggi. Subjek yang berada dikategori sangat rendah 0%, rendah 1,6%, sedang 36,3%, tinggi 42% dan

sangat tinggi 20,1%, dukungan guru memiliki rerata empirik (RE)= 107,93 dan rerata hipotetik (RH)=85 artinya dukungan guru tergolong tinggi. Subjek yang berada di kategori sangat rendah 0%, rendah 0%, sedang 13,0%, tinggi 56,45 dan sangat tinggi 30,6% dan interaksi teman sebaya memiliki rerata empirik (RE)= 56,4 dan rerata hipotetik (RH)= 47,5 artinya tingkat interaksi teman sebaya tergolong tinggi. Subjek yang berada di kategori sangat rendah 0%, rendah 3,2%, sedang 29,9%, tinggi 49,2% dan sangat tinggi 17,7%.

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada hubungan antara efikasi diri akademik dan dukungan guru yang artinya ketika dukungan guru tinggi maka efikasi diri akademik santri juga tinggi.
2. Tidak ada hubungan antara efikasi diri akademik dan interaksi teman sebaya.
3. Sumbangan efektif atau peranan efikasi diri akademik terhadap dukungan guru 2,9% hal ini berarti ada 99,71% faktor lain yang mempengaruhi efikasi diri akademik santri baru seperti: penyesuaian diri, stress lingkungan, dukungan orangtua, religiusitas.
4. Tidak ada sumbangan efektif atau peranan efikasi diri akademik terhadap interaksi teman sebaya karena tidak memiliki hubungan yang signifikan namun memiliki hubungan yang positif.
5. Subjek penelitian memiliki efikasi diri akademik yang tinggi, dukungan guru yang tinggi dan interaksi teman sebaya yang tergolong tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Adicondro , N., & Purnamasari , A. (2011). Efikasi diri, dukungan sosial keluarga dan self regulated learning pada siswa kelas VIII. *Humanitas*, Vol. VIII.
- Ahmadi , A., & Supriyono, W. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baron, R., & Donn, B. (2004). *Psikologi Sosial jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ghufron , M., & Rini , R. (2011). *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Handono, O. T., & Bashori, K. (2013). Hubungan antara penyesuaian diri dan dukungan sosial terhadap stres lingkungan pada santri baru. *Empthy, Jurnal Fakultas Psikologi, Vol. 1 No. 2*, 79-80.
- Mahendrani , W., & Rahayu, E. (2014). Hubungan antara self efficacy dengan penyesuaian diri pada siswa ekselesari. *Psikodimensia*, 8.
- Manoppo, Y., & Mardapi , D. (2014). Analisis Metode Cheating pada Tes Berskala Besar. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 1*, 117.

- Nijs , S., & Maes, B. (2014). Social Peer Interactions in Persons with Profound Intellectual and Multiple Disabilities: A Literature Review. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, Vol. 49 (1), 154.
- Noornajihan, J. (2014). Efikasi sendiri: perbandingan antara islam dan barat. *GJAT*, Vol. 4 (2), 93-94.
- Pritaningrum , M., & Hendriani, W. (2013). Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal di Pondok Pesantren Modern Nurul Izzah Gresik Pada Tahun Pertama. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol. 1, 142.
- Purba, J., Yulianto, A., & Widyanti, E. (2007). Pengaruh dukungan sosial terhadap burout pada guru. *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, 78.
- Purtowisastro. (1983). *Dinamika Psikologi sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Rahmawati, A. (2015). Hubungan antara Efikasi Diri dengan Penyesuaian Diri santri baru. In *skripsi tidak di publikasikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sarafino, E. P. (2002). *Health Psychology Biopsychosocial Interactions*. United State: John Wiley & Sons, Inc.
- Sari, A., & Sumiati, A. (2016). Hubungan antara dukungan sosial dengan efikasi diri pada siswa kelas X akuntansi di SMK Bina Pangudi Luhur Jakarta. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 127.
- Schunk, D. (2012). *Learning Theories An Educational Perspective*. Boston: Publishing as Allyn & Bacon 501.
- Sepfitri, N. (2016). Pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi berprestasi siswa MAN Jakarta. In *Skripsi Tidak Dipublikasikan* . Jakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sharma , H. L., & Nasa, G. (20114). Academic Self Efficacy: A Reliable Predictor of educational performance. *British Journal of Education*, Vol. 2, 59.
- Triyanto , E., Anitah, S., & Suryani, N. (20013). Peran Kepemimpinan Kepala sekolah dalam pemanfaatan media pembelajaran sebagai upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran . *Jurnal Teknologi Pendidikan* , vol.1, 227.
- Utami, D. L., & Sawitri, D. (2016). Dukungan dosen dan teman sebaya dengan efikasi diri akademik pada mahasiswa tahun pertama jurusan teknik sipil fakultas teknik universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, Vol. 5 (1), 1

MENUJU PENDIDIKAN HUKUM YANG KOMPEREHENSIF, PROGRESIF DAN RELIJIUS

Dr.Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Pendidikan hukum di Indonesia sudah saatnya diperbaharui, dan pembaharuan itu meliputi tidak hanya pada hukumnya itu sendiri, tetapi juga membangun metodenya, dan sumber daya manusianya. Materi hukum produk kolonial sudah saatnya digantikan dengan produk hukum asli Indonesia dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Paradigma liberalisme hukum sudah saatnya diantarkan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan bidang-bidang ilmu yang lain, terutama ilmu agama. Kekaburan konsep relativisme hendaknya segera digantikan dengan konsep-konsep hukum yang berdimensi ke ilahian, sehingga keadilan yang terbentuk adalah juga keadilan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Studi eklektisisme diperlukan karena sebenarnya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain merupakan satu kesatuan (*The Unity of Knowledge*). Tujuan utama tercapainya pendidikan hukum adalah munculnya produk-produk hukum yang progresif dan responsive serta munculnya penegak-penegak hukum yang mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Relijius, Komperehensif.

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya orang berpandangan bahwa Ilmu Hukum adalah Ilmu yang Progresif, yang selalu berproses seiring dengan perkembangan zaman. Hukum itu tidak mengenal skema yang final (*Infinite scheme*), sebab garis batas Ilmu Pengetahuan selalu bergeser (*the frontier of science is always changing*). Hukum pada dasarnya adalah “*a framework of discussion*”. Dapat juga dikatakan bahwa hukum itu relatif, tergantung pada perkembangan zaman. Maka Hukum itu dinamis, akan selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya hukum harus selalu dirubah disesuaikan dengan pandangan masyarakatnya.

Sehubungan dengan pandangan seperti itu, maka orang sering berkata bahwa kebenaran absolut hanya milik Tuhan, sedangkan manusia hanya berusaha mendekati kebenaran tersebut, yang dikatakan tidak akan pernah sampai, sebab manusia adalah mahluk yang lemah, terbatas, oleh karena itu pemahaman manusia tentang kebenaran adalah relatif. Dapat dikatakan inilah sebuah “Tragedi yang dramatis”, “*Searching for the Ultimate meaning of Law, although we never find it*”. Hal ini juga menjadi diskusi yang menarik dalam tulisan ini. Benarkah semua kebenaran absolut tidak dapat dijangkau oleh manusia?

Pro kontra tentang pandangan-pandangan tersebut di atas tentu saja sangat berpengaruh pada pelaksanaan pendidikan hukum kita yang terutama dilaksanakan di fakultas-fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Hukum kita sebagian besar adalah produk kolonial, meskipun saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Ketika persoalan tersebut didekati dengan perspektif pemikiran modern yang cenderung liberal dan sekuler tentu pandangan seperti itu disetujui. Oleh karena itu kebanyakan para pendidik (SDM) yang kita miliki telah terseret dalam arus pemikiran tersebut.

Hal yang demikian itu tentu akan berbeda jika pendekatan yang digunakan adalah perspektif Islam, karena di dalam Islam kebenaran yang haq dari Allah swt. telah disampaikan kepada umat manusia di dunia ini melalui para Nabi dan Rasul-Nya, Wujud nyata dari kebenaran itu terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Hanya sebagian saja yang tidak dapat dijangkau oleh manusia yaitu hal-hal yang ghaib yang memang tidak mungkin dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia sebagai makhluk yang lemah ini. Oleh karena itu terhadap hal-hal yang demikian manusia tinggal mengimaninya saja.

B. MENGAPA NILAI AGAMA PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENDIDIKAN HUKUM KITA?

Pandangan tentang hukum yang bebas (*liberal*) di satu sisi dan religius (*agamis*) di sisi yang lain akan selalu menjadi wacana yang menarik dalam pendidikan hukum di Indonesia. Tentu saja tidak mudah untuk mempertemukan ke dua pandangan tersebut. Namun karena mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka tidak ada salahnya jika perspektif pemahaman hukum juga harus disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional menyatakan:¹

Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bila kita melihat rumusan dari Pasal 3 tersebut nyatalah bahwa tujuan utamanya adalah menjadi manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Ternyata tujuan yang mulia dari pendidikan nasional tersebut saat ini sudah dicemari oleh ajaran liberalisme. Dengan melihat kenyataan seperti itulah maka konsep pendidikan hukum harus diarahkan, bukan semata-mata pendidikan profesi yang mengajarkan ketrampilan hukum, seperti bagaimana membuat perjanjian, bagaimana menguasai hukum beracara di sidang pengadilan, bagaimana membuat surat gugatan, dan sebagainya, melainkan juga pendidikan keilmuan, yang mengajarkan bagaimana menganalisis permasalahan hukum dengan perspektif yang komprehensif. Artinya

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional.

hukum harus dianalisis dengan berbagai disiplin ilmu dan fakta sosial. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu perlu dikembangkan di Indonesia. **Integrasi terpenting justru pada ajaran agama.**

Pentingnya studi hukum terhadap segala fenomena kejadian di sekeliling kita ini barangkali dapat digambarkan sebagai berikut:

Through science activities, students should develop an interest in science and thus they will be motivated to become active learners in science. Students should also develop an understanding of the interrelationship between science, technology, society and environment (STSE), and strengthen the ability to integrate and apply knowledge and skills across disciplines. They should be able to meet the changes and challenges in the ever developing society and contribute towards the scientific and technological world..²

Semua orang yang sedang berusaha mempelajari hukum harus memahami bahwa hukum itu memiliki banyak ruang dan sudut pandang. Adagium *dimana ada masyarakat di sana ada hukum (Ubi Societas Ibi Ius)* sebenarnya sudah memberikan isyarat kepada kita semua bahwa hukum sebagaimana nampak dalam kehidupan nyata itu adalah hukum yang plural, jamak, bervariasi, tak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu usaha-usaha untuk menyeragamkan hukum, universalisme hukum akan selalu menemui kegagalan dalam masyarakat yang heterogen. Sedangkan dalam masyarakat yang homogen hal itu sangat mungkin terjadi (misalnya Saudi Arabia). **Hukum buatan manusia** sangat terkait erat dengan kehendak masyarakatnya. Oleh karena itu di tingkat nasional hukum kebiasaan/adat istiadat menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Ini berarti bahwa pada kasus-kasus tertentu penegak hukum harus mengutamakan bagaimana adat-istiadat itu mengatur suatu persoalan, sebab adat istiadat itu telah menyatu dengan masyarakatnya. Hukum negara seolah hanya berfungsi menjadi semacam “*complementary*” saja

Hukum Indonesia adalah “Hukum Indonesia” yang tidak harus sama dengan Hukum barat. Memang dalam kenyataannya sebagian besar hukum kita adalah hukum peninggalan pemerintah kolonial, oleh karena itu secara bertahap kini harus mulai disesuaikan dengan keadaan masyarakat kita yang (terutama) mayoritas beragama Islam. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam tersebut kini semakin merasakan kebutuhan akan perlunya kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya agar penerapan Syariat Islam dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya, *sebab ajaran Islam itu merupakan suatu sistem yang harus dilaksanakan secara kaffah*³, dan sebenarnya dasar hukum untuk itu telah dijamin oleh Pemerintah dalam Pasal 29 UUD 1945.

²<https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kla/science-edu/index.html>, diakses 28 Januari 2018 pk.03.04.

³ Periksa ketentuan surat al Baqarah ayat 208,

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara *menjamin* kemerdekaan tiap-tiap *penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

C. MANUSIA, HUKUM DAN KEBEBASAN BERPIKIR.

Apakah model pendidikan hukum kita saat ini yang hanya sarat dengan aturan normatif dan prosedur masih cocok untuk mencetak para praktisi hukum dan akademisi hukum? Sebab perkembangan kehidupan modern yang kompleks saat ini tentu membutuhkan ilmu bantu untuk mengembangkan hukum. Tugas akademisi itu bukan memutus perkara, tetapi memberikan penjelasan, *to theorize, giving explanation*

Professional Education memang diperlukan, tetapi bagaimana dengan para lulusan yang ingin menjadi seorang akademisi?

Pendidikan Ilmu Hukum ini lebih merupakan suatu “*laboratory*”. Di dalam kelas/perkuliah, maka hubungan antara dosen dan mahasiswa lebih banyak dilakukan dengan lebih mengutamakan “dialog interaktif” (*discussion*), mengkaji lebih jauh tentang apa mahluk yang dinamakan “hukum” itu.⁴

Maka essensi dari *Scientific Programme* ini adalah mencari kebenaran. Di sinilah dibutuhkan adanya “Kebebasan Berpikir”, **Kebebasan Berpikir** menurut **Taufiq at-Thawil** adalah membebaskan akal dalam mengekspresikan kehendaknya dari segala intervensi dan gangguan eksternal yang bisa menghambat kemauannya, serta melecut kemampuan akal sehingga bisa menjangkau apa yang dahulu dianggap jauh disamping mempublikasikan berbagai pendapat dari hasil buah pemikiran kendati harus berlawanan dan bertentangan dengan adat, aqidah agama maupun taklid buta.⁵

Sebenarnya inti dari hukum itu adalah keadilan, bukanlah kepastian hukum. Kepastian hukum memang penting dan kita butuhkan, tetapi keadilan jauh lebih penting daripada kepastian hukum. Ajaran yang demikian ini dikemukakan oleh **Gustav Radburgh** yang menyatakan bahwa dalam hukum yang ideal itu hendaknya terkandung di dalamnya 3 unsur, yaitu **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan/kegunaan**.⁶ Namun ke tiga unsur tersebut tidak selalu terdapat dalam satu keputusan hakim, Nah apabila hakim disuruh memilih antara kepastian hukum dan keadilan, seharusnya dia lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Bila putusan hakim tersebut memenuhi rasa keadilan, pastilah keputusan tersebut bermanfaat, tetapi jika keputusan tersebut hanya mencapai kepastian hukum saja, maka keputusan tersebut belum tentu adil, dan tentu saja tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya tugas hakim itu tidak hanya menerapkan aturan hukum saja, tetapi selain itu seorang hakim harus mampu memberikan penafsirannya yang terbaik terhadap suatu ketentuan hukum, dan pada

⁴Catatan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, catatan kuliah dari Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. 2 September 2002.

⁵Taufiq At-Thawil, *Pertarungan antara Agama dan Filsafat*. (Madiun : Yayasan PP al Furqon, 2013), hlm.18.

⁶Theo Huijbers, *Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.161-162

puncaknya hakim harus berani menggali sumber sumber hukum yang lain, termasuk tidak malu bertanya pada seorang ahli demi tercapainya keputusan yang adil. Bahkan hakim harus berani “membuat” hukum” (*judge made law*).

Seorang hakim Inggris yang bernama Dworkin selalu mengedepankan “*interpretative approach*” dalam menghadapi kasus-kasusnya, bagi dia berhukum itu adalah Proses Penafsiran yang konstruktif (*Process of constructive interpretation*). Dia katakan : “*Every time a judge is confronted with a legal problem, should construct a theory of what the law is...*”. Sementara Paul Scholten juga menyatakan bahwa hukum itu ada dalam Undang-undang, tapi masih harus ditemukan/dicari.

Kemudian, Langdell menambahkan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang adalah daftar hubungan sebab akibat. Kalau ada orang berbuat baik hukumnya begini, kalau berbuat jahat hukumnya begitu. Sedangkan muridnya, yang bernama Roscoe Pound mengatakan, bahwa akibat hukum itu tidak ditulis dalam undang-undang, tetapi terdapat dalam “**kearifan Hakim**”. Suatu contoh, hakim bisa memikirkan bahwa ketika terdakwa dihukum, dia masih dapat makan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), tetapi anak istrinya bagaimana?⁷

Dari pandangan-pandangan beberapa ahli di atas, nyatalah bahwa hakim dan penegak hukum lain, termasuk para akademisi, harus selalu “ijtihad” (*to search for the ultimate meaning of law*).

Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral. Disamping hukum itu memuat *moral values*, maka moral penegak hukum juga perlu diperhatikan. Sebab, begitu hukum itu dipisahkan dari moral, maka ambruklah bangunan hukum yang autentik itu. Hukum normatif indah bunyinya bila kita baca dalam teks undang-undang. Namun dari aturan yang indah tersebut bila kemudian diterapkan oleh manusia, maka hukum berada diantara dua kutub, yaitu ditegakkan secara baik, benar dan adil atau sebaliknya bahwa hukum itu direkayasa sedemikian rupa bagi yang berkepentingan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. **Jadi hukum berkorelasi secara ketat dengan manusia penggunaannya.** Dalam ajaran Islam manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi apabila dia berbuat dosa maka jatuhlah derajat dia menjadi makhluk yang sejelek-jeleknya. surat at Tin. ayat 4-6 dan surat al-A’raaf yat 179.

Dalam surat al a’raaf ini derajat manusia dapat turun sejelek-jeleknya ibarat binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi mengapa? Sebab manusia mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Manusia mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan manusia memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.

Inilah petingnya pendidikan moral bagi mahasiswa saat ini, perkuliahan bukan sekedar persoalan transfer ilmu semata, tetapi pendidikan moral, pendidikan karakter. Bicara kepada mahasiswa harus dari hati ke hati, sehingga diterima dengan hati, dan ini hanya bisa terjadi dalam kuliah yang sifatnya “**Tatap Muka**”, disamping itu perilaku dari dosen juga harus dapat dicontoh oleh mahasiswanya. Hasil dari pendidikan pada

⁷ Bahan/Catatan Kuliah “teori Sosial” dari Prof.Dr.Soetandyo Wignyosoebroto, di PDIH UNDIP .1 oktober 2002.

setiap mahasiswa tidak hanya diwujudkan dalam kecerdasannya (menurut IQ semata) tetapi juga harus unggul dalam EQ dan SQ nya.

Oleh karena itu mengharapkan terjadinya “keadilan” di Indonesia harus dimulai dari membangun manusianya. Di sinilah peran pendidikan agama menjadi sangat penting.

Ada yang lebih penting daripada hukum, apakah itu? Yaitu manusia yang menjalankan hukum itu. Pandangan yang demikian muncul mengingat kondisi cara ber hukum di Indonesia yang hanya mengedepankan kepastian hukum, **terlebih lagi, hukum tersebut adalah hukum yang sekuler yang terpisahkan dengan nilai-nilai religius**, akibatnya hukum ditafsirkan sesuai dengan logika manusia, sesuai juga dengan hawa nafsu manusia. Padahal sudah semestinya faktor manusia yang berada di belakang hukum itu jauh lebih penting. Manusalah yang harus lebih dulu dibangun baru hukum dapat ditegakkan dengan baik oleh manusia-manusia yang sudah dipersiapkan untuk itu. Konsep ber hukum yang manusiawi dengan dukungan penegak-penegak hukum yang sudah terdidik secara agamis ini dinyatakan oleh Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH. dalam bukunya yang berjudul “**Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan manusia**”. **Pengadilan bukan lagi “Rumah Keadilan”, melainkan ibarat “Rumah Undang-Undang dan Prosedur**”, demikian juga dengan Hakim, harus direkrut dari mereka yang telah menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum, bukan dicari orang-orang yang berintegritas tinggi dan memiliki rasa keadilan tinggi.⁸

Dalam proses berpikir manusia, maka yang berperan adalah akal nya, kemudian diikuti oleh hati dan perasaannya. **Jadi berpikir itu tidak cukup dengan akal tapi harus diimbangi dengan hati dan perasaannya.** Akal yang tidak dituntun oleh hati dan perasaan yang bersih tentu saja akan menghasilkan pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Sebaliknya akal yang dituntun oleh hati dan perasaan yang mendapatkan petunjuk Allah tentu saja akan menghasilkan pemikiran yang cemerlang dan mendapat ridla dari Allah swt. Padahal hati yang bersih dan perasaan/jiwa yang tenang hanya akan didapat manusia dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Dengan demikian dalam perspektif Islam proses berpikir manusia tidak cukup dengan akal yang bebas berdasarkan hawa nafsu, tetapi akal yang dituntun oleh wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Saw. **Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya konsep kebebasan berpikir yang mutlak sebeb-asbebnya itu tidak ada, melainkan kebebasan berpikir yang tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.** Oleh karena itu Allah menyuruh manusia memperhatikan ayat-ayatNya. Jadi manusia berpikir dengan berpijak pada ayat-ayat Allah. Manakala ketentuan dalam ayat suci itu sudah jelas maka manusia tidak ada alternatif lain kecuali hanya mentaati ketentuan ayat tersebut (baik yang berupa perintah maupun larangan), kalau ketentuan dalam suatu ayat belum jelas, maka manusia harus mencari penjelasannya dalam sunnah, dan apabila belum ketemu juga jawabannya, maka dapat bertanya kepada ulama (berdasarkan ijtihad ulama). Namun demikian dapat dipastikan tidak ada satupun persoalan pokok (penting) yang belum diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah, semua pasti

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.57-59.

sudah diatur di dalam keduanya. Persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang di luar itu lah yang diserahkan oleh Allah dan RasulNya untuk diselesaikan sendiri oleh manusia dengan menggunakan akalnyanya, yakni dengan mengambil pedoman/pelajaran dari al-Qur'an dan sunnah.⁹

Konsep Islam tentang kebebasan berpikir yang dibatasi dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw ini sebenarnya justru rasional. Sebab manusia itu akalnyanya terbatas, akal manusia ini pemberian Tuhan, maka akal manusia tidak mungkin menyamai dan menjangkau sang Khalik si pemberi akal, yaitu Allah Swt. Maka dengan keterbatasan akal tersebut, segala fenomena dalam alam tidak akan terjawab semuanya oleh akal, meskipun sampai hari kiamat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam berpikir ini, hasil pemikiran manusia tidak akan tuntas, selalu berhenti di satu titik, tak terjawab sampai akhir kehidupan di bumi.¹⁰ Allah swt. dalam al-Qur'an Surat al-Israa (S.17) ayat 85 Allah swt. berfirman:

*85 Wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah; "Ruh itu urusan Tuhan-Ku, dan **kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali.***

Menurut para ahli hukum, manusia adalah seperti seorang wakil untuk suatu tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Wakil ini harus memenuhi syarat untuk memiliki kemampuan melakukan tindakan yang legal (*ahliyyaal-ada'*) yang mengharuskannya bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dalam hal ini manusia digambarkan sebagai obyek dari suatu tugas keagamaan (*mukallaf*), suatu keadaan mendasar dimana kemampuan akal dan pemahaman terhadap wacana keagamaan (*aqilan yahwan al khitab*). Tujuan akhir dari tugas ini adalah bahwa wakil tersebut mematuhi dan menjalankan apa yang diperintahkan..¹¹

Bila OE Wilson memunculkan konsep bersatunya Ilmu Pengetahuan ini¹², Wilson menolak pemisahan yang ketat antara ilmu-ilmu alam (Fisika, Kimia dan Biologi) dari ilmu-ilmu sosial dan Humaniora, karena pemisahan seperti itu hanya akan menimbulkan pendangkalan dalam masing-masing ranah studi tersebut. Di sisi yang lain Fritjof Capra lebih fenomenal lagi dengan menyatakan bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi dunia seisinya ini sebenarnya merupakan jaringan besar kehidupan (*The Web of Life*) ***"they are systemic problems, which means that they are interconnected and interdependent"***

Bersatunya ilmu pengetahuan ini menurut para ahli dimulai dari ilmu yang mendalami tentang sel dan diakhiri dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Sciences*).

Jadi para akademisi harus selalu mencari makna yang sebenarnya, berdekatan dengan makna keilahian. Pendekatan hukum yang kita butuhkan saat ini adalah pendekatan yang bersifat religius dan transenden. Mengapa demikian? Sebab

⁹ Muhammad Nur Islami, dalam Sulaiman (ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm.14-16).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Baca dalam Machasin, *Konsep Manusia Dalam Islam*, dalam Hasan Hanafi, dkk., *Islam dan Humanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm.65.

¹² Edward O Wilson, *Consilience, the Unity of Knowledge* (New York: Alfreda A. Knopp, 1998), hlm.264.

pendekatan sekuler dan liberal telah jauh menyesatkan manusia dari jalan kebenaran yang telah ditunjukkan Allah kepada kita semuanya. Pemikiran liberal telah jauh masuk ke ranah hukum dan pendidikan kita. Ini berarti masa depan generasi penerus kita sangat memprihatinkan karena semakin jauh dari nilai-nilai agama, khususnya Islam.

Dengan demikian konsep pendidikan hukum kita harus diarahkan dengan dilakukan studi dari berbagai sumber (Eclectic Study)¹³

D. PENCARIAN KEBENARAN, SEBUAH TRAGEDI YANG DRAMATIS?

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa semua akademisi itu sebenarnya sedang berusaha keras untuk mencari dan menemukan kebenaran. *Searching the Truth nothing but the truth*, (pencarian kebenaran, tiada lain kecuali hanya kebenaran). Namun perlu dipahami bahwa banyak diantara para akademisi kita yang mengatakan bahwa: “...tidak dijamin seseorang yang sudah menamatkan pendidikan tertingginya di bidang hukum itu akan menemukan apa sebenarnya hukum itu, apalagi menemukan bagaimana kebenaran hukum. Sebab proses pembebasan, pencarian dan pencerahan itu harus dilakukan secara terus menerus sepanjang hidupnya”. Kebanyakan ilmuwan mengatakan inilah suatu “**Tragedi yang dramatis**”, karena semua dari mereka itu termasuk kita ini tidak akan menemukan kebenaran yang absolut. Karena kebenaran yang absolut itu hanyalah milik Tuhan. Maka *searching the truth nothing but the truth* tadi harus dilakukan dengan suatu kesadaran “*searching the truth although never find it*”.¹⁴ Ya kita semua ini berusaha keras selalu mencari kebenaran walaupun tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang absolut tadi. Prof.Mahadi mengatakan: “...Kita hanya berkeinginan kuat untuk memahami hukum, kita tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang sebenarnya tentang hukum”.¹⁵

Memang dalam kenyataannya, garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (*the frontier of science is always changing*). Lebih maju dan lebih maju. Studi hukum harus mengikuti garis depan ilmu tersebut. Makaminan Makagiansar (mantan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) pernah mengatakan:

*Science education should not limit itself to the transmission of established knowledge only but the teacher must impart an understanding of connectivity between scientific disciplines and acquaint the learner with the promise of frontier science.*¹⁶

¹³ A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004). hlm.184-185.

¹⁴ Catatan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip, catatan kuliah dari Prof,Dr,Satjipto Rahardjo, SH, 2 September 2002.

¹⁵ Mahadi, *Falsafah Hukum, Sebuah Pengantar*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1991) hlm.13.

¹⁶ Pidato dalam *third annual Meeting of Asean cademics of Science, Engineering and technology and Similar National Organizations*, July 8-9, 1999, Philippines dalam Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan*, Pidato Mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Semarang, 15 Desember 2000), hlm.11

Lebih maju di sini diartikan meninggalkan wawasan, konsep, doktrin atau paradigma lama yang dianggap gagap untuk memberikan penjelasan. Kalau dulu teori Newton telah berjasa besar, namun kini kita telah sampai pada teori Quantum (*Quantum Era*). Tumbangnya Era Newton ini merupakan isyarat penting dalam perubahan metodologi ilmu, maka sebaiknya Ilmu Hukum juga harus memperhatikannya dengan cermat. Metode Newton yang linear, sistematis, matematis dan deterministik menurut Prof. Dr. Satjipto, SH (sering dipanggil Prof. Tjip) telah menjalin hubungan erat dengan “*analytical positivism*” atau *recht dogmatiek*, Keduanya ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang tersusun logis dan teratur tanpa cacat logika.

Demikianlah sifat dari hukum manusia yang memang rentan terhadap perubahan karena kelemahan hukumnya sebagai akibat kelemahan manusianya. Sehingga pergantian paradigma dan penafsiran hukum akan selalu terjadi mengikuti konteks waktu dan perubahan sosial.

Menurut **Thomas Kuhn** perubahan paradigma (*paradigm shift*) ini selalu terjadi, setiap kali terjadi masa krisis, selang beberapa waktu kemudian muncullah paradigma baru, maka paradigma lama akan ditinggalkan. Begitu seterusnya tanpa tiada akhirnya.¹⁷

Maka benar juga bila dikatakan upaya “*searching the truth*” dalam dunia hukum (buatan manusia) akan selalu berputar terus menerus dan seolah kita tidak pernah menemukan apa sebenarnya kebenaran yang absolut itu, karena kebenaran yang absolut hanya milik Tuhan.

Pada Tahun 1966 ada buku yang ditulis oleh Julien Benda, buku itu berjudul “*The Betrayal of Intellectuals*” atau “*The Treason of the Intellectuals*” (Pengkhianatan Para Intelektual). Buku itu laris sekali di Indonesia, karena di kalangan intelektual sendiri disadari sering terjadi kondisi seperti itu.¹⁸

Menurut Julien Benda, cendekiawan dalam sosok ideal, yang kegiatan utamanya bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis demi kepentingan pribadi, tapi orang yang mencari kegembiraan dalam mengolah seni, ilmu, atau renungan metafisik. Benda menyebut cendekiawan sejati ini dengan prinsip “Kerajaanku bukan di bumi”. Tulisan Julien Benda tersebut menggambarkan bagaimana kaum intelektual selalu bergulat dengan wacana dan diskursus. Kaum cendekiawan diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat awam yang tak tercerahkan, merupakan ikhtiar bagi kaum cendekiawan untuk tidak berkhianat. Dosa besar seorang intelektual adalah bila ia mengetahui kebenaran, tetapi ia takut dan tak mau mengungkapkan kebenaran tersebut.¹⁹

Di dalam ajaran Islam, Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berpesan kepada Abu Dzarr Al Ghifari agar mencintai orang miskin dan lemah dan supaya mengatakan yang benar meskipun pahit.²⁰

¹⁷ Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, Peran Paradigma Dalam Revolusi sains, Terjemah oleh Tjun Surjaman (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.43-50.

¹⁸ Catatan kuliah dari Prof. Satjipto, 9 September 2002.

¹⁹ <http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-cendekiawan.html>, diakses 16 Desember 2018, pk.02.21.

²⁰ <https://www.naqsdna.com/2011/10/agama-itu-nasehat-sampaikan-kebenaran.html> diakses 24 nop.2018 pk.09.56.

Sebagai *scientist* di bidang hukum, kita juga tidak boleh bersikap bohong, tidak menjawab sesuai dengan kebenaran.

E. LIBERALISASI DI BIDANG HUKUM DAN PENDIDIKAN PADA UMUMNYA.

Apakah manusia bisa mencapai Kebenaran? Baru saja sudah penulis jawab “bisa”, bagi umat Islam dengan meyakini bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah. Pertanyaan ini berlaku dan meliputi semua bidang ilmu. Bila tadi telah dibahas bahwa pencarian kebenaran merupakan tragedi yang dramatis, karena manusia hanya berkelana terus mencari kebenaran namun tidak menemuinya. Dengan perkataan lain apakah memang kebenaran yang absolut tidak pernah dicapai oleh manusia?

Sering kita mendengar orang mengatakan:

“ Manusia itu mahluk yang relatif,, maka kebenaran yang dicapainya pun adalah kebenaran relatif, tidak mutlak. Oleh sebab itu seseorang jangan memutlakkan pendapatnya. Seseorang tidak patut mengklaim pendapatnya benar sendiri, dan menyalahkan pendapat lain.”

Pendapat semacam ini secara sepintas tampak logis dan indah. Padahal jika ditelaah secara mendalam, pendapat ini sangat keliru, bahkan berbahaya. Golongan ini berpaham skeptik, relativistik yang sebenarnya adalah golongan anti ilmu²¹

Menurut hemat penulis, pola pikir bahwa kebenaran yang absolut tidak akan pernah kita temui ini tidak seluruhnya benar. Pola pikir seperti ini akan menjadi benar bila yang dibicarakan adalah **hukum buatan manusia**, dimana manusia adalah mahluk yang lemah yang terbatas akalanya.

Hukum buatan manusia terbuka untuk dikritik, tetapi bila hukum itu datang dari Allah swt, beranikah dengan alasan hawa nafsu manusia kita merubah Hukum Allah?

Contoh permainan logika adalah bahwa dalam penegakan hukum “pertempuran” sebenarnya itu bukan di tingkat legislatif, tetapi pada waktu sidang pengadilan. Hakimlah yang harus berperan, untuk menerapkan, menafsirkan atau menemukan hukum, bukan undang-undang nya. “Not the Law but the Judge”²²

Hal yang sebaliknya perlu ditegaskan di sini, bahwa Syari’at Islam itu mengajarkan jalan hidup yang benar, tidak semuanya bisa diutak-atik dengan logika seperti pada pemikiran manusia yang terbatas akalanya. Iman misalnya, tidak bisa dilogikakan. Bila orang sudah menyatakan beriman, maka dalam hal-hal yang ghaib pun dia percaya, meskipun secara logika dia tidak mampu menjangkaunya.

Cara berpikir para filosof barat tadi lebih banyak terpengaruh oleh ajaran relativisme. **Dalam ajaran relativisme memang diajarkan bahwa kebenaran yang**

²¹ Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006) hlm.200-201.

²² Diambil dari catatan kuliah Prof.Dr.Soetandyo Wignjosubroto, *Teori Sosial*, pada PDIH UNDIP, 30 Oktober 2002.

absolut itu tidak ada, semuanya serba relatif. Sebenarnya hal seperti ini tergantung pada paradigma/pendekatan apa yang kita pakai.

Dalam surat al-Mukminun ayat 71 Allah swt berfirman:

71. *Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.*

Ayat di atas ini secara jelas membantah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran bersifat relatif sehingga dapat berjumlah banyak sesuai jumlah hawa nafsu manusia. Bahkan melalui ayat ini Allah swt. menegaskan betapa dahsyatnya dampak yang bisa timbul dari mengakui kebenaran berbagai pihak secara sekaligus. Digambarkan bahwa langit dan bumi bakal binasa karenanya. Sebab masing-masing pembela kebenaran tersebut pasti akan mempertahankan otoritas kebenarannya tanpa bisa menunjukkan dalil atau wahyu Ilahi yang membenarkannya.

Bila kita menerapkan pola pikir barat, maka tentu saja hasilnya memang seperti itu. Dalam pandangan filsafat barat semuanya serba relatif. Mengapa demikian? Sebab pola berpikir ala barat itu tidak melibatkan ajaran yang ada dalam kitab suci, dalam arti tidak melibatkan agama dalam pembicaraan politik dan hukum. Inilah prinsip pemikiran **sekularisme**. Oleh karena itu agama tidak boleh dibawa dalam tatanan politik dan hukum. Hukum dari ajaran agama (Kitab Suci) itu termasuk dalam urusan pribadi masing-masing individu, dan tidak boleh dibawa dalam urusan kenegaraan. Para penganut “liberalisme” menolak Hukum Allah. Inilah yang mereka sebut dengan “*freedom*”, kebebasan. Sebab bila ajaran agama diterapkan kedalam pengaturan ketatanegaraan, maka mereka merasa ada “beban”. Agama menghalangi kebebasan mereka. **Jean Paul Satre** (1905-1980) seorang filosof Perancis telah membuat pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan “*even if God existed, it will still necessary o reject him, since the idea of God negates our freedom*”. Meskipun Tuhan diakui keberadaannya, namun apabila Hukum Tuhan ini menghalangi kebebasannya, maka dia berani menolak keberadaan Tuhan.²³

Sebaliknya **Socrates** dan **Plato** berpandangan bahwa pengertian “*sophia*” hanya ada pada Tuhan, kebenaran yang hakiki hanya diketahui oleh Tuhan. Sifat Sophia hanya ada pada Tuhan. Manusia hanya sampai pada keinginan untuk ber “*sophia*”, sebab pengetahuan manusia, atau ilmu manusia hanya terbatas.²⁴

Sementara Hasbullah Bakry mengatakan bahwa: “Falsafah adalah bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani”*Philosophia*” yang berarti suka atau cinta kepada kebijaksanaan. Menurut Bakry, tidak semua manusia yang berpikir adalah filosof, tetapi filosof itu hanyalah orang yang memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam tentang hakekat segala sesuatu.²⁵

Dalam ajaran Islam, manusia juga diperintahkan untuk menggunakan pikirannya, tetapi karena pikiran manusia itu terbatas, maka dalam hal-hal yang bersifat Ghaib,

²³ Karen Armstrong, *History of God* (1993:378).

²⁴ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 1991, hlm.2-3

²⁵ Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat*. Surakarta: Penerbit AB Siti Syamsiyah, 1980.

manusia tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan dan menyelidikinya. Manusia cukup meyakinkannya saja. Sebab percuma saja manusia memikirkannya, menyelidikinya dan mencarinya, karena tidak mungkin ketemu jawabannya. Oleh karena itu umat Islam percaya adanya hari akhir, surga dan neraka, adanya siksa kubur, dan sebagainya itu **hanya dengan mengimaninya**. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam ada rukun Iman (yang jumlahnya ada enam), dan beberapa diantara rukun iman ini berhubungan dengan yang ghaib, misalnya Iman Kepada Allah, Iman kepada Hari Akhir (dimana di dalamnya ada ajaran tentang surga dan neraka). Bagi orang-orang atheis ataupun orang yang tidak mempercayainya, *wujud dari Allah itu Ghaib*, demikian juga *Surga dan Neraka*, bagaimana kejadian hari akhir nanti, semuanya tidak terjangkau oleh akal, apakah hal seperti itu mau dibuktikan dengan panca indera manusia ? Jelas tidak bisa. Tapi orang beriman sangat yakin, *haqqul yakin* akan adanya semua itu. *Meskipun demikian tidak semua yang ada di dunia ini bersifat relatif*. Bahkan hal-hal yang ghaib itupun adalah sesuatu yang nyata, karena umat Islam meyakinkannya, bahwa hal itu pasti akan terjadi. Apabila keyakinan ini tidak melekat pada diri seorang muslim, maka berarti gugurlah aqidahnya, atau dia sudah keluar dari Islam.

Dalam Islam **bersatunya konsep iman, ilmu dan amal** membawa pengaruh besar dalam ilmu atau pendapat ilmuwan. *Maka keimanan seseorang akan diketahui melalui perkataan dan perbuatannya*. Seorang ilmuwan Islam akan selalu berkata berdasarkan ilmu, ilmu yang datang/diberikan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum berkata dan berbuat dia harus berilmu dulu.

Para filosof muslim menggambarkan ikatan yang erat antara akal dan agama dengan masalah yang menyatakan tidak adanya pertentangan antara keduanya. Imam al-Ghazali berkata:

“ akal bagaikan sebuah fondasi, sedangkan syariat bagaikan sebuah bangunannya. Bila fondasi tidak kuat maka tidak mungkin dibangun sesuatu di atasnya. Begitu juga sebuah bangunan tidak mungkin kokoh kalau tidak memiliki fondasi yang kuat. Dengan demikian syari’at adalah akal dari luar, sedangkan akal adalah syari’at dari dalam. Keduanya adalah hal yang berbeda tapi saling bersatu dan saling melengkapi”.²⁶

Islam telah memotivasi manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalunya secara ideal, bahkan lebih jauh lagi yakni, menjadikan akal manusia memiliki tanggung jawab pada hari kiamat kelak. **Manusia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut, sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam surat al-Isra’ (S.17) ayat 36 sebagai berikut:**

36. *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.*

Al-Qur’an juga menyatakan “berdosa” bagi orang yang tidak mau menggunakan akalunya untuk berpikir, sehingga merendahkan martabat manusia kepada yang lebih rendah dari martabat hewan. (Surat al-A’raaf ayat 179)

²⁶ Mahmud Hamdi Zaquq, *Islam dan Tantangan Menghadapi Pemikiran Barat* . (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hlm.66.

Dampak ajaran liberalisme ini telah menyasar jauh ke anak-anak didik kita, yang merupakan generasi penerus bangsa baik anak-anak kita yang sedang belajar di SLTP, SLA maupun perguruan Tinggi.

Sebagai contoh misalnya dalam mata pelajaran Sosiologi untuk tingkat SLA. Dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah dalam masalah strata sosial. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa strata sosial masyarakat ditentukan oleh berapa banyak materi yang dimiliki orang²⁷, Ini membuktikan bahwa anak didik kita telah disusupi ajaran materialisme, cinta kepada harta (*Hubbud dunya*). Harta memang dibutuhkan oleh tiap orang, tapi kalau tingkat strata sosial hanya diukur dengan materi saya rasa ini kekeliruan besar dan fatal. Mengapa misalnya faktor pendidikan tidak dilibatkan dalam mengukur strata sosial? Bukankah pendidikan jauh lebih penting dari harta itu sendiri?

Contoh berikutnya yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah masalah toleransi dalam beragama. Dalam Buku Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terbitan DIKTI Tahun 2013, dijelaskan bahwa Konsep Ke Tuhanan menurut pancasila adalah ... *Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme agama*.²⁸

Pertanyaannya: *Bagaimana mungkin Satu Tuhan cocok untuk semua agama?* sementara faktanya setiap agama mendudukkan Tuhannya masing-masing. Demikian juga Kitab Sucinya. Kalau satu Tuhan cocok untuk semua agama, berarti semua agama mestinya bersatu dalam satu Tuhan, apakah demikian yang dimaksudkan? Pasti tidak mungkin kalau Tuhannya satu untuk semua, mengapa mereka punya Kitab suci yang berbeda dan punya sebutan juga untuk Tuhan nya masing-masing? Hal tersebut menunjukkan adalah sulit membuat rumusan Pancasila yang bisa diterima semua pihak.

Dalam Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas 1 SMA dijelaskan bahwa: “ *Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar, tetapi saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat hidup rukun, saling berdampingan dan tolong menolong di masyarakat*”. Bukankah hal ini sudah merupakan suatu kesalahan besar?

Dalam masalah kesetaraan gender juga terjadi perubahan hak wanita dalam menerima harta warisan. Sebagai contoh di sini di dalam buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas XI,

Husni Thoyar si penulis buku mengatakan sebagai berikut:

Dalam menjalankan Hukum Waris, mungkin kita juga akan merasakan kejanggalan, pada saat emansipasi wanita telah berkembang seperti sekarang ini Hukum Islam menuntunkan bahwa bagian sorang anak laki-laki dua kali bagian

²⁷Bagja Waluyo, *Sosiologi 2, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* untuk Kelas XI SMA/MA, Program Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 62.

²⁸ Lihat buku *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta, 2013), hlmn. 59-60.

anak perempuan. Dimana letak keadilan Tuhan? Bukankah lebih adil jika warisan untuk anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan?²⁹

Berkenaan dengan berlakunya KUHP sebagai produk hukum kolonial ini, maka **Prof.Dr.Muladi SH** dalam artikelnya di kompas menyatakan bahwa:

“...secara tidak sadar para dosen Hukum Pidana di Perguruan Tinggi telah terlena menggunakan KUHP Kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad sebagai salah satu sumber materi ajarannya dan para penegak Hukum Pidana juga telah hanyut menerapkannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.”³⁰

Coba kita renungkan bahwa ajaran Islam itu melarang adanya perzinahan dalam arti yang luas, termasuk berkhalwat, zina mata, sampai kepada zina bersetubuh (hubungan badan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali perkawinan). **Sementara di KUHP tidak ada aturan yang melarang hal tersebut.** Ini artinya hak asasi umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam belum dijamin sepenuhnya di Indonesia ini.

F. PENUTUP

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUD 45 Pada ayat 2 telah dijelaskan bahwa terdapat hak (kemerdekaan) tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap orang yang beragama Islam dijamin dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dan tidak ada batasan dalam melaksanakannya. Sebab memang tidak mungkin sebenarnya negara itu melarang warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya secara seutuhnya (lengkap). Tapi kenyataannya di Indonesia ini umat Islam **belum bisa** melaksanakan ajaran agamanya secara lengkap. Bahkan boleh dikatakan umat Islam di Indonesia ini seolah-olah sudah melupakan /dipaksa untuk melupakan perintah Allah swt untuk melaksanakan Syariat Islam itu secara lengkap.

Dari ketentuan Firman Allah swt di atas jelas, bahwa kita umat Islam harus melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Allah tersebut secara lengkap (*kaffah*), dan apabila kita mengingkarinya maka kita termasuk orang-orang yang merugi di hari akhir nanti.

Jadi sebenarnya negara telah menjamin dan memberikan dasar hukumnya secara tegas dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945, tetapi tentang pelaksanaan atau penerapan pasal tersebut masih harus diperjuangkan dan dituntut oleh umat Islam.

²⁹ Husni Thoyar, *Pendidikan Agama Islam*, untuk SMA Kelas XI (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan Nasional, 2011) hlm.58.

³⁰ Baca pada Harian *Kompas*, Sabtu, 15 Desember 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Bagja Waluyo, *Sosiologi 2, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* untuk Kelas XI SMA/MA, Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Edward O Wilson, *Consilience, the Unity of Knowledge* (New York: Alfreda A.Knopp, 1998).
- Husni Thoyar, *Pendidikan Agama Islam*, untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Karen Armstrong, *History of God* . 1993
- Hasan Hanafi,dkk., *Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Mahadi, *Falsafah Hukum, Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sulaiman (Ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*** Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, Peran Paradigma Dalam Revolusi sains, Terjemah oleh Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Taufiq At-Thawil, *Pertarungan antara Agama dan Filsafat*. Madiun : Yayasan PP al-Furqon, 2013
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan*, Pidato Mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Semarang, 15 Desember 2000
- Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila**, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta, 2013)'
- Kamus Bahasa Indonesia**, 2008 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Harian *Kompas*, Sabtu, 15 Desember 2018.
- Kitab Suci Al-Qur'an, Terjemah Tafsiriyah, oleh Ustadz Muhammad Thalib, Yogyakarta: Penerbit Ma'had An-Nabawy 2012.
- <https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kla/science-edu/index.html>, diakses 26 Desember 2018,pk.03-04.
- <http://paradigmabebasnilai.blogspot.com/2012/10/pengkhianatan-kaum-cendekiawan.html> , diakses pada 26 Desember 2018,pk.02.21.

KEBAHAGIAAN DI TEMPAT KERJA: KAJIAN TEORETIK UPAYA PENINGKATAN MUTU GURU

Nurochim¹, Siti Ngaisah²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹

nurochim@uinjkt.ac.id

Universitas Indonesia²

siti.ngaisah61@ui.ac.id

ABSTRAK

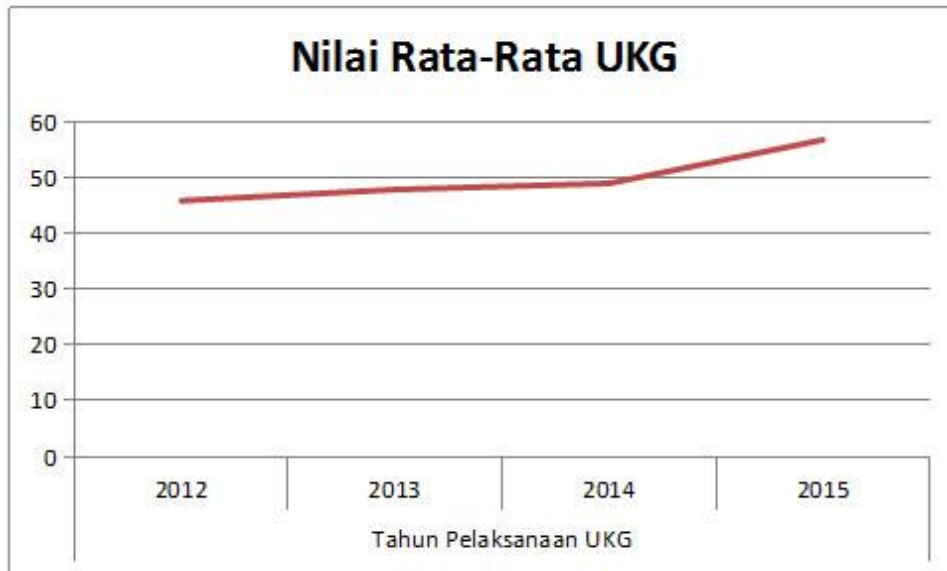
Penelitian tentang kebahagiaan merupakan hal yang relatif baru di Indonesia (Sujatmiko, Pattinasarany, Upaya, & Nihayah, 2016:75). Yang terbaru adalah survey yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2014 dan 2017. Survey tersebut menggunakan indikator sosio-ekonomi, dan survey kebahagiaan yang berfokus pada subjektif dan objektif kebahagiaan individu. Namun demikian belum dilaksanakan studi lebih lanjut dan mendalam mengenai peran dari faktor kebahagiaan seperti sosial, kebijakan, dan fasilitas, aktor kebahagiaan seperti relasi pertemanan, keluarga, pasangan, dan komunitas, dan mobilitas kebahagiaan. Selain itu penelitian kebahagiaan juga belum dilaksanakan secara spesifik untuk meningkatkan mutu guru sebagai sumber daya manusia pendidikan. Dalam artikel ini dipaparkan secara teoretik tentang upaya peningkatan mutu guru berdasarkan tingkat kebahagiaan.

Kata Kunci: Guru, tempat kerja, kebahagiaan dan mutu.

PENDAHULUAN

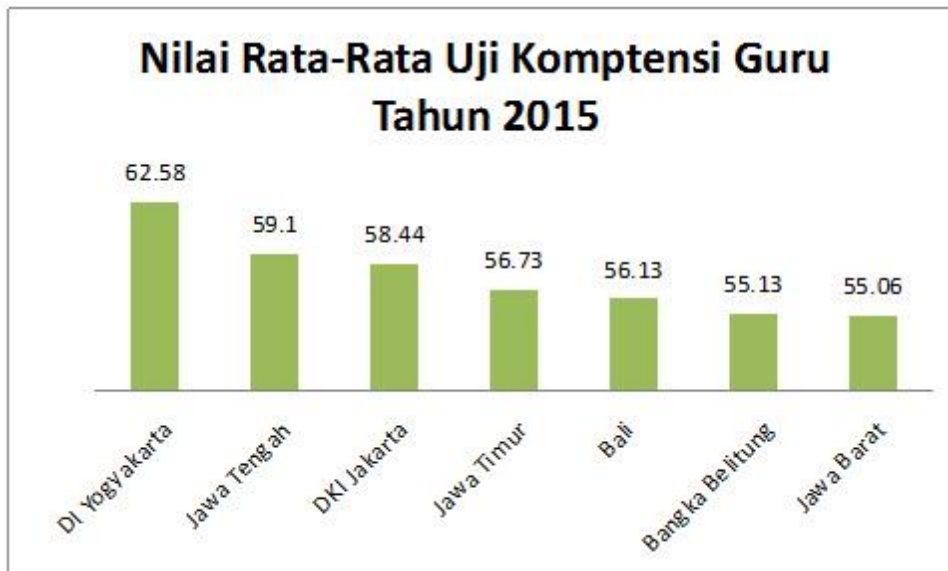
Guru merupakan sumber daya manusia pendidikan yang terpenting. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru berada pada urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Dari 3.9 juta guru yang ada, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% di antaranya belum memiliki sertifikat profesi (Aisyah Maura, 2018).

Walaupun nilai rata-rata UKG sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 cenderung naik, namun belum mencapai standar kompetensi minimum (Sabon, 2017:59).



Sumber: (Sabon, 2017)

Pada tahun 2015 hanya 7 Provinsi yang mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55 (Desliana Maulipaksi, 2016).



Sumber: (Desliana Maulipaksi, 2016)

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru, seperti sertifikasi, dinilai belum efektif meningkatkan mutu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Guru, Satriawan Salim, bahwa program sertifikasi hanya menambah pendapatan bukan menambah kemampuan atau profesionalisme (Winda Destiana Putri, 2018). Kebijakan secara makro tersebut dinilai tidak dilaksanakan berdasarkan pada pelatihan, pendampingan yang jelas, terukur dan

konsisten terus menerus. Selain itu kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan penelitian secara detail dan mendalam baik secara kultural maupun struktural. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh USAID, Peningkatan sarana belajar mengajar juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas kompetensi guru (USAID, 2018).

Berdasarkan penelitian Leonard, reformasi kurikulum universitas sebagai pemasok calon guru juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu guru (Leonard, 2015:201). Rendahnya mutu guru juga disebabkan karena adanya kekeliruan dalam distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten/kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru tidak profesional (Jepen Musfah, 2018). Oleh karena itu solusinya adalah manajemen perekrutan guru yang seharusnya profesional. Selain itu menurut Jepen, regulasi dan sistem terkait guru harus direvisi, mulai dari penertiban fakultas keguruan, PPG, perekrutan guru, penempatan, perlindungan, pelatihan kompetensi, dan tentu saja kesejahteraan. Pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

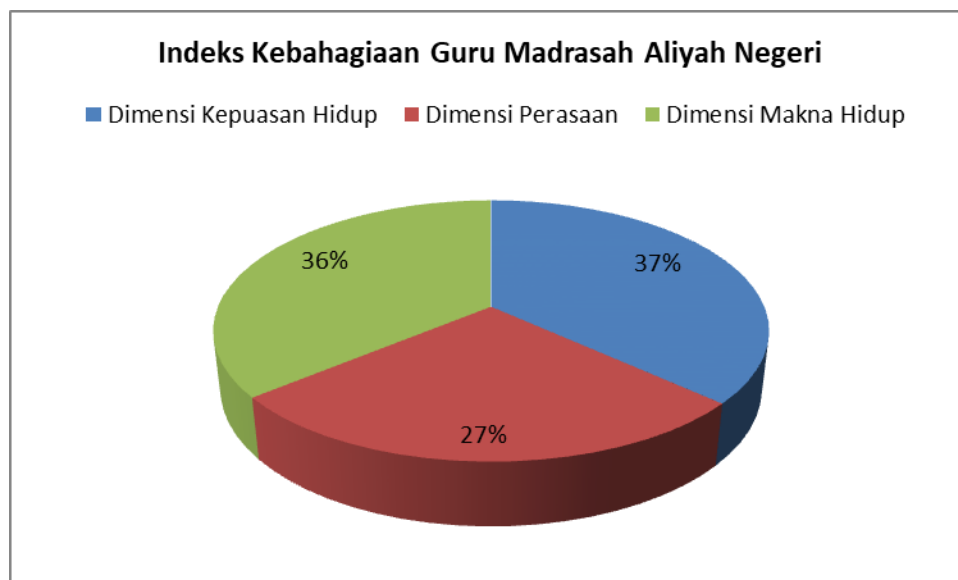
Oleh karena itu penting dilaksanakan perbaikan manajemen sumber daya manusia pendidikan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan (Sergiovanni, 2009). Pendekatan mikro penting dilaksanakan dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia pendidikan. Sebab manusia memiliki kemampuan untuk menanggapi apa yang ada di dalam dan di luar dirinya. Sebagai contoh, kebijakan pelatihan profesi guru masih memerlukan biaya untuk transport, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup keseharian (Aniza Ambarwati, 2017). Yang hal tersebut membuat kecemasan bagi guru. Guru yang cemas merupakan salah satu indikator guru yang tidak bahagia.

Penelitian tentang kebahagiaan yang sudah dilakukan, belum dilaksanakan secara spesifik pada kelompok pendidik atau guru. Hal ini penting dilakukan sebab untuk mendukung pengembangan dan perbaikan kebijakan pengelolaan pendidik. Kebijakan pengelolaan pendidik seharusnya memperhatikan aspek sosial dan individual. Sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh komponen pendidikan termasuk guru. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005). Dapat dipahami bahwa pemahaman akan jati diri seorang guru pada setiap jenjang pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam mengajar.

KEBAHAGIAAN KEBAHAGIAAN GURU MADRASAH ALIYAH NEGERI: GAMBARAN UMUM

Berdasar pada data World Happiness Report, dari tahun 2015 sampai 2018 tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia menurun. Dari laporan tersebut pada tahun 2015, Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun dan mendapat peringkat 96 (CNN Indonesia, 2018).

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nurochim (2018)



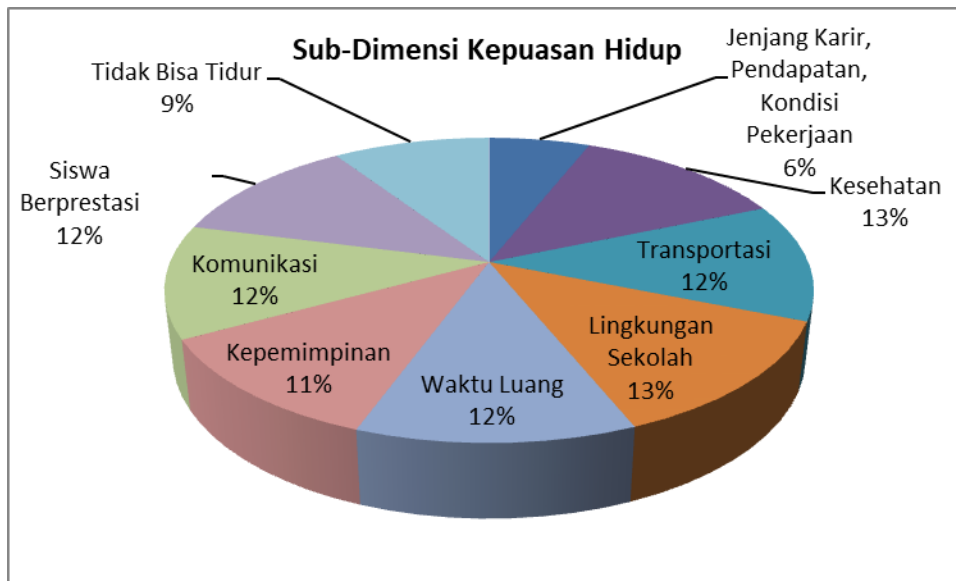
Sumber:(Nurochim, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa dimensi kepuasan hidup memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan sebesar 37%, dimensi perasaan memberikan kontribusi sebesar 27%, dan dimensi makna hidup memberikan kontribusi sebesar 36%. Pada dimensi kepuasan hidup, guru puas dengan jenjang pendidikan yang mereka miliki. Jenjang pendidikan yang mereka miliki, mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas pengajaran. Dengan bekal jenjang pendidikan yang mereka miliki, para guru dapat mengurangi emosi negatif berupa rasa tertekan dalam memberikan layanan pengajaran kepada para siswa.

Pengelolaan perasaan penting untuk para guru. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kompetensi personal yang wajib dimiliki oleh para guru. Dalam penelitian ini skala perasaan yang dimiliki oleh para guru Madrasah Aliyah cukup tinggi. Para guru cukup mampu untuk mengelola perasaan yang dimiliki, termasuk mengendalikan kecemasan, rasa tidak nyaman, marah, memiliki tekad yang kuat untuk mendidik para siswa, memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, memiliki rasa bangga dalam menjalankan kewajiban menjadi guru, bangga terhadap prestasi yang dicapai oleh siswa, bangga ketika siswa memiliki sikap yang baik.

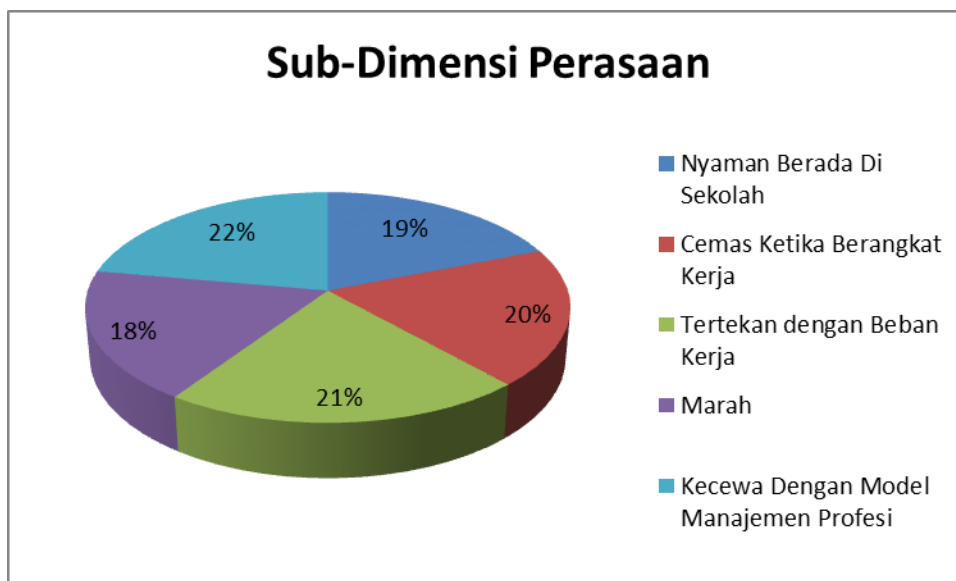
Pada dimensi makna hidup, guru memiliki tingkat makna hidup yang tinggi. Para guru memahami betul tentang apa yang mereka laksanakan dalam kegiatan pengajaran. Para guru memiliki harapan dan cita-cita dalam menjalankan kegiatan mengajar, mereka menitipkan masa depan bangsa pada siswa yang mereka ajar, dengan menitipkan pengetahuan kepada siswa, para guru berharap ilmu yang terus mengalir dalam diri siswa, sehingga dapat berperan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah rincian sub-dimensi dari Kepuasan Hidup:



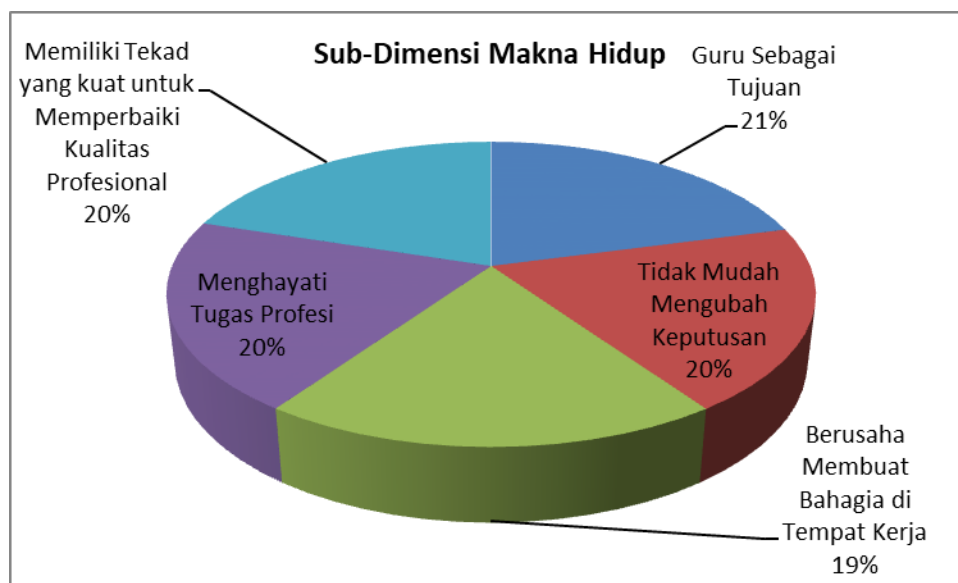
Sumber:(Nurochim, 2018)

Kepuasan terhadap lingkungan sekolah baik lingkungan sosial, internal dan eksternal sekolah dan kondisi kesehatan menjadi faktor penentu masing-masing sebesar 13%. Kemudian waktu luang dan komunikasi dengan siswa, orang tua siswa, dan sesama guru masing-masing serta kondisi transportasi yang digunakan untuk mobilitas ke tempat kerja sebesar 12%. Kepuasan terhadap siswa yang berprestasi sub dimensi kepuasan hidup sebesar 12%. Kepuasan terhadap tipe kepemimpinan menjadi sub dimensi kepuasan hidup sebesar 11%. Kondisi tidak bisa tidur nyenyak karena banyak pekerjaan sebesar 9%. Kepuasan terhadap pendapatan, jenjang karir, dan kondisi pekerjaan sebesar 6%.



Sumber:(Nurochim, 2018)

Tingkat perasaan nyaman di tempat kerja yang dimiliki oleh guru sebesar 19%. Sebesar 20% guru merasa cemas ketika berangkat ke tempat kerja. Beban kerja membuat guru merasa tertekan menjadi faktor dimensi perasaan sebesar 21%. Sebanyak 18% guru merasa marah di tempat kerja ketika pendapat yang dimiliki tidak diterima oleh rekan sejawat. Model manajemen profesi menimbulkan kekecewaan sebesar 22%.



Sumber: (Nurochim, 2018)

Sub dimensi makna hidup terdiri dari adanya tekad yang kuat untuk memperbaiki kualitas profesional sebesar 20%. Menjadi guru adalah tujuan hidup sebesar 21%. Menghayati tugas profesi guru sebesar 20%. Berusaha menciptakan suasana bahagia ditempat kerja bersama siswa, rekan sejawat dan orang tua sebesar 19%. Tidak mudah mengubah keputusan dan keyakinan yang dimiliki sebesar 20%.

MUTU GURU BERDASARKAN KEBAHAGIAAN DI TEMPAT KERJA: KAJIAN TEORETIK

Dengan mengkaji kebahagiaan guru maka dapat dikaji sumber daya manusia pendidikan yang “positif”. Guru yang bahagia berada pada kondisi psikologis yang positif. Kondisi psikologis guru yang positif berpengaruh positif pada siswa, guru, dan komunitas pendidikan (White & Kern, 2018). Kondisi psikologis yang positif harus dikaji, diterapkan, dan dikelola di lingkungan kerja guru. Kajian kebahagiaan dikaji secara eksternal dan internal (Ahuvia et al., 2015), sebagai contoh kebahagiaan muncul karena optimisme (internal) dan uang (eksternal).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh SMERU Institute, dapat dilihat bahwa gaji guru di semua jenjang pendidikan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand (Suryahadi, 2017:6).

Menurut USAID (2009), forum KKG dan MGMP belum berjalan efektif dalam memfasilitasi peningkatan kualitas guru terkait kompetensi dan keterampilan di bidang mata pelajaran dan pedagogi. Sebagian besar forum itu tidak berjalan lancar karena

masalah manajemen dan kurangnya perhatian pihak pemerintah daerah, khususnya kepala sekolah. Cakupan program forum-forum tersebut sangat terbatas dan tidak ada penyebarluasan contoh-contoh praktik atau program terbaik. Kurangnya narasumber adalah salah satu masalah dalam meningkatkan kualitas guru melalui forum KKG dan MGMP (Suryahadi, 2017). Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru masih dinilai belum berhasil. Artinya berbagai kebijakan masih bersifat makro struktur, belum melihat berbagai masalah yang muncul dari internal guru.

KESIMPULAN

Dengan adanya analisis yang berfokus pada kebahagiaan di tempat kerja, maka dapat ditemukan pola manajemen sumber daya manusia yang “positif”. Sehingga dapat meningkatkan mutu guru. Mutu guru dapat ditingkatkan melalui manajemen sumber daya manusia pendidikan berdasarkan pada potensi sosial dan psikologi yang ada. Perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu guru dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup sebagai faktor pembentuk kebahagiaan guru. Yang paling rendah pada dimensi perasaan yakni sebesar 27%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuvia, A., Thin, N., Haybron, D. M., Biswas-Diener, R., Ricard, M., & Timsit, J. (2015). Happiness: An interactionist perspective. *International Journal of Wellbeing*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.5502/ijw.v5i1.1>
- Aisya Maura. (2018). Fakta Kualitas Guru di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui. Retrieved January 30, 2019, from <https://blog.ruangguru.com/fakta-kualitas-guru-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui>
- Aniza Ambarwati. (2017). PPG, Korban dan Kompetensi Guru. Retrieved February 1, 2019, from <https://www.kompasiana.com/untukimpianku/592cd862d593738a7522dc0e/ppg-korban-dan-kompetensi-guru>
- CNN Indonesia. (2018). Studi: Rangkaing Kebahagiaan Indonesia di Dunia “Jeblok.” Retrieved January 30, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180329074022-277-286709/studi-rangkaing-kebahagiaan-indonesia-di-dunia-jeblok>
- Desliana Maulipaksi. (2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. Retrieved January 31, 2019, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015>
- Jejen Musfah. (2018). Permasalahan Guru di Indonesia | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website. Retrieved January 31, 2019, from <https://www.uinjkt.ac.id/id/permasalahan-guru-di-indonesia/>
- Leonard. (2015). Kompetensi Tenaga Pendidik Di Indonesia Analisis Kualitas SDM Guru Dan Solusi Perbaikannya. *Jurnal Formatif*, 5(3), 192–201.
- Nurochim. (2018). *Indeks Kebahagiaan Guru Madrasah Aliyah Negeri Di DKI Jakarta dan Banten*. Jakarta.

- Sabon, S. S. (2017). Students' Perception of the Competence of Certified and Uncertified Teachers. *Journal of Educational and Cultural , Ministry Education and Cultural of Republic Indonesia*, 2(1), 55–80.
- Sergiovanni, T. J. (2009). *Educational Governance and Administration*. Boston, MA; Montreal: Pearson/Allyn & Bacon.
- Sujatmiko, I. G., Pattinasarany, I. R. I., Upaya, G., & Nihayah, R. W. (2016). Social well-being research and policy in Indonesia. *The Sensus Social Well-Being Review*, 3(3), 86–90. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0039-z>
- Suryahadi, A. P. S. (2017). *Penilaian Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Guru dan Mengurangi Ketidakhadiran Guru*. Jakarta.
- USAID. (2018). Upaya Peningkatan Kualitas Guru untuk Pendidikan yang Lebih Baik. Retrieved January 31, 2019, from <http://www.prestasi-iiief.org/index.php/id/feature/103-upaya-peningkatan-kualitas-guru-untuk-pendidikan-yang-lebih-baik>
- White, M. A., & Kern, M. L. (2018). Positive education: Learning and teaching for wellbeing and academic mastery. *International Journal of Wellbeing*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.5502/ijw.v8i1.588>
- Winda Destiana Putri. (2018). FSGI: Sertifikasi Guru Belum Berhasil Cetak Guru Berkualitas | Republika Online. Retrieved January 31, 2019, from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/14/p5kl6e359-fsgi-sertifikasi-guru-belum-berhasil-cetak-guru-berkualitas>

ORIENTASI KARIR MAHASISWA DISABILITAS (Studi Kasus Mahasiswa Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa di Universitas Sebelas Maret).

Meisayu Dwitami dan Munawir Yusuf

Post Graduate of Special Education Department, Universitas Sebelas Maret

meisayudwitami@gmail.com; munawir_uns@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan orientasi karir mahasiswa dengan hambatan fisik di Universitas Sebelas Maret berdasarkan jenis disabilitasnya (tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yaitu 16 mahasiswa berkebutuhan khusus dengan rincian enam penyandang tunanetra, enam penyandang tunarungu, dan empat penyandang tunadaksa. Pengumpulan data dilaksanakan melalui survey menggunakan skala orientasi karir Schein's dan wawancara. Analisis data menggunakan *interactive model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan orientasi karir antara mahasiswa tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Mahasiswa tunanetra cenderung menginginkan pekerjaan yang sifatnya dedikasi sosial (*service dedication to a cause*), mahasiswa tunarungu memiliki kecenderungan memiliki pekerjaan yang memberikan kebebasan (*autonomy/independence*), sementara mahasiswa tunadaksa cenderung mengutamakan keamanan dan stabilitas (*security-stability*) pada orientasi karirnya.

Kata kunci: orientasi karir, mahasiswa, tunanetra, tunarungu, tunadaksa.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu medium penting untuk mencapai tingkat kehidupan yang berkualitas, baik untuk individu normal maupun individu penyandang disabilitas. Montgomery & Cote (2003) mengungkapkan pendidikan tinggi mengembangkan kesempatan kerja dan menghasilkan kekuatan serta meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bagi seluruh orang dewasa seluruh dunia. Seseorang yang berpendidikan tinggi mempunyai kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghargaan dari orang lain.

Di Indonesia, pendidikan untuk individu penyandang disabilitas mulai berkembang ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Saat ini, terdapat beberapa universitas yang menyediakan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Sunan Kalijaga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain-lain.

Menurut data Pusat Studi Disabilitas Universitas Sebelas Maret tahun 2018, terdapat 16 mahasiswa disabilitas dengan berbagai hambatan fisik, yaitu hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), dan hambatan anggota gerak (tunadaksa). Mahasiswa disabilitas adalah pelajar yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi (Supena, dkk, 2017).

Pengadaan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas di jenjang perguruan tinggi adalah wujud nyata pemenuhan hak pendidikan, yang diharapkan dapat berpengaruh kepada kualitas tenaga kerja dan pemenuhan hak pekerjaan untuk disabilitas di masa mendatang. *The Survey on Social Participation and Disability* mengungkapkan pendidikan membuka peluang dunia kerja lebih banyak untuk penyandang disabilitas dan 89% disabilitas lulusan perguruan tinggi menyetujui tingkat pendidikannya membuat mereka mendapat kualifikasi layak bekerja (Kerka, 2002).

Elwan (1999) mengungkapkan hampir di setiap negara, individu penyandang disabilitas memiliki angka kesejahteraan yang lebih rendah dan tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan kelompok non disabilitas. Gibson & Mitchell (2011) memperkirakan terdapat enam juta penduduk Amerika di usia kerja mengalami berbagai disabilitas fisik dan mental, dan hampir duapertiga jumlah anggota kelompok ini tidak mempunyai pekerjaan. Sementara Hakeem, K.A. (2015) menjelaskan selain persepsi negatif masyarakat, kemiskinan menjadi masalah terbesar untuk kaum disabilitas. Hal ini didukung dengan fakta bahwa 80% dari penyandang disabilitas di Finlandia tidak diterima di lapangan pekerjaan.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Direktur Penempatan Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI mengatakan sebanyak 414 ribu penyandang disabilitas terdata sebagai pengangguran terbuka, sementara sekitar 10 juta penyandang disabilitas usia kerja termasuk dalam kelompok angkatan kerja (Nuraini, 2018). Maka, mahasiswa disabilitas mempunyai tantangan yang lebih tinggi dalam mempersiapkan diri untuk bekerja.

Di tingkat perguruan tinggi, rata-rata mahasiswa berusia di atas 18 tahun atau memasuki masa dewasa awal. Menurut Izzaty, dkk (2008) dan Dariyo (2003), salah satu ciri khas perkembangan dewasa awal adalah memantapkan letak kedudukan (*settling down age*) dalam pola-pola hidup. Mulai muncul keinginan untuk mengaktualisasikan segala bentuk ide dan pemikiran yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran di pendidikan tinggi untuk persiapan masa depannya. Sejalan dengan pendapat Schaie dan Wills (dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2009) bahwa pada masa dewasa muda, individu menggunakan pengetahuannya untuk mengejar tujuan di masa depan, seperti karir dan keluarga

Dalam tahapan perkembangan vokasional disebutkan pada usia 15-24 tahun merupakan tahap *exploratory* yang ditandai dengan fase tentatif yakni pilihan karir mulai dipersempit walaupun belum final (Super dalam Sharf, 1992). Pada usia dewasa awal, seseorang seyogyanya sudah mempunyai orientasi karir. Menurut Bouffard, T., Boisvert, J. Vezeau, C, and Larouche, C. (1995), tipe orientasi karir seseorang akan

berpengaruh pada kemampuan kognitifnya dan menguatkan komitmen dalam mempelajari bidang tertentu.

Schein (1978) menjelaskan orientasi karir adalah konsep diri seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam pekerjaan, dan berfungsi di dalam kehidupan kerja agar mampu memilih jenis pekerjaan yang sesuai harapan dan potensi. Terdapat delapan tipe kecenderungan orientasi karir, yakni meliputi kebebasan otonom (*autonomy-independence*), rasa aman dan stabilitas (*security-stability*), teknis/fungsional (*technical/functional*), umum/manajerial (*general managerial competence*), jiwa kewirausahaan (*entrepreneurial creativity*), dedikasi social (*service dedication for a cause*), tantangan (*pure challenge*), dan keseimbangan gaya hidup (*lifestyle*). Di dalam orientasi karir tercermin pula kesiapan seorang individu dalam membuat keputusan-keputusan karir yang tepat. Orientasi karir harus dimaknai oleh seorang mahasiswa sebagai pedoman memilih jalur yang tepat dalam menentukan karir di masa depan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi karir, dan terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal (Winkel & Hastuti, 2006; Sukardi, 1989). Faktor eksternal terdiri dari masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara dan daerah, status, sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari keluarga besar dan inti, pendidikan sekolah, pergaulan teman sebaya, pengalaman kerja, dan tuntutan pilihan karir. Faktor internal meliputi nilai-nilai kehidupan, taraf intelegensi, bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan, dan keadaan jasmani. kepribadian, nilai, hobi, prestasi, keterampilan, penggunaan waktu senggang, aspirasi dan pengetahuan sekolah, pengetahuan dunia kerja, kemampuan dan keterbatasan fisik, serta masalah dan keterbatasan pribadi. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan kemampuan mobilitas, ketajaman penglihatan, dan pendengaran mempengaruhi orientasi karir mahasiswa disabilitas fisik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan individu dewasa yang menyandang hambatan fisik mempunyai orientasi karir yang rendah. Penelitian Spain (1981) menunjukkan hasil pekerja tunadaksa seringkali mempunyai persepsi diri negatif dan membatasi diri sebelum terjun ke dunia kerja. Lombana (1980) menjelaskan halangan pelajar tunanetra dalam menentukan pilihan karir disebabkan ketidakmampuan mengakses informasi pekerjaan. Selanjutnya tunarungu usia dewasa muda seringkali kesulitan berkomunikasi dan menyesuaikan sikap dengan lingkungan sekitar sehingga menghambat mereka mendapatkan prestasi akademik maupun karir (Punch, Hyde, & Creed, 2004). Hal ini sangat disayangkan karena sejatinya bekerja untuk kaum disabilitas tidak sekadar mendapatkan penghasilan, namun juga dampak psikologi positif melalui peningkatan kontribusi sosial dan tingkat inklusivitas masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi karir dari mahasiswa tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa di Universitas Sebelas Maret. Adapun subjek penelitian ini adalah 16 orang mahasiswa disabilitas yang terdiri dari enam penyandang tunanetra, enam penyandang tunarungu, dan empat penyandang tunadaksa. Penelitian ini juga mencari tahu hambatan yang ditemui mahasiswa berkebutuhan khusus dan harapan mereka terhadap pihak universitas terkait pemenuhan hak atau kebutuhannya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Universitas Sebelas Maret dengan pertimbangan universitas ini merupakan salah satu instansi perguruan tinggi yang memiliki label kampus inklusi, selain itu tersedia pula lembaga Pusat Studi Disabilitas.

Subjek dalam penelitian ini adalah 16 mahasiswa dengan hambatan fisik, yang terdiri dari enam laki-laki dan sepuluh perempuan. Adapun keenam belas mahasiswa tersebut terbagi menjadi enam tunanetra, enam tunarungu, dan empat tunadaksa. Mereka menjalani studi di berbagai fakultas, diantaranya fakultas keguruan ilmu pendidikan, fakultas seni rupa dan desain, fakultas teknik, dan fakultas hukum. 15 dari 16 subjek berasal dari sekolah menengah inklusi di berbagai kota sebelum melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret.

Terdapat satu variabel yang diteliti yaitu orientasi karir pada mahasiswa disabilitas di Universitas Sebelas Maret. Data dikumpulkan menggunakan metode survey dan wawancara. Instrumen yang digunakan adalah *Career Orientation Inventory* milik Schein yang menjabarkan delapan tipe kecenderungan orientasi karir, yakni meliputi kebebasan otonom (*autonomy-independence*), rasa aman dan stabilitas (*security-stability*), teknis/fungsional (*technical/functional*), umum/manajerial (*general managerial competence*), jiwa kewirausahaan (*entrepreneurial creativity*), dedikasi social (*service dedication for a cause*), tantangan (*pure challenge*), dan keseimbangan gaya hidup (*lifestyle*). Kuisisioner survey milik Schein memiliki rentang skala 1 sampai 4 dengan keterangan tidak sesuai sampai sangat sesuai, terdapat lima pernyataan untuk masing-masing tipe kecenderungan. Peneliti akan melihat orientasi karir subjek berdasarkan tipe kecenderungan dengan skor tertinggi. Selain survei peneliti juga melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Wawancara ini digunakan untuk memperdalam hasil survei yang dilakukan sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis diskriptif dilanjutkan dengan *interactive model* milik Miles & Huberman (1992). Adapun langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) reduksi data, yaitu memilah, menyederhanakan, dan transformasi data kasar di lapangan; 2) penyajian data, yakni dengan menarasikan data yang sudah direduksi dan menyajikannya dalam bentuk tabel sederhana; dan 3) penarikan kesimpulan, yaitu mengambil intisari yang kredibel dari pemaknaan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survey menggunakan instrumen Schein diperoleh data orientasi karir mahasiswa dengan hambatan fisik di Universitas Sebelas Maret.

Tabel 1. Orientasi Karir Mahasiswa dengan Hambatan Fisik di UNS

Kecenderungan Tipe Karir	Jenis Disabilitas		
	Tunanetra	Tunarungu	Tunadaksa
Kebebasan otonom (<i>autonomy/independence</i>)	-	3	-
Rasa aman dan stabilitas	-	-	3

(<i>security/stability</i>)			
Teknis/fungsional (<i>technical/functional</i>)	1	2	-
Umum/manajerial (<i>general managerial competence</i>)	-	-	-
Jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurial creativity</i>)	1	1	1
Dedikasi sosial (<i>service or dedication to a cause</i>)	3	-	-
Tantangan (<i>pure challenge</i>)	-	-	-
Keseimbangan gaya hidup (<i>lifestyle</i>)	1	-	-

Kecenderungan orientasi karir mahasiswa dengan hambatan fisik tersebar di tipe kebebasan otonom (*autonomy-independence*), rasa aman dan stabilitas (*security-stability*), teknis/fungsional (*technical/functional*), jiwa kewirausahaan (*entrepreneurial creativity*), dedikasi sosial (*service dedication for a cause*), dan keseimbangan gaya hidup (*lifestyle*). Sebanyak 19% mempunyai orientasi karir yang memberikan kebebasan, 19% mengutamakan keselamatan dan stabilitas untuk karirnya; 19% menginginkan bekerja di bidang khusus, yang sifatnya teknis dan fungsional ; 19% mempunyai keinginan untuk membuka usaha mandiri; 19% menginginkan pekerjaan yang didasari dedikasi sosial; dan 5% menginginkan pekerjaan yang seimbang dengan pola hidupnya.

Selain itu terlihat pula perbedaan yang mencolok pada orientasi karir mahasiswa tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Mahasiswa tunanetra dominan memilih tipe karir yang sifatnya dedikasi sosial, mahasiswa tunarungu dominan memilih tipe karir yang memberikan kebebasan, dan seluruh mahasiswa tunadaksa dominan mengutamakan keamanan serta stabilitas pada orientasi karirnya.

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap subjek penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. Subjek mahasiswa tunanetra terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan. Subjek laki-laki terdiri dari PD, MH, AP, dan WY, sementara subjek perempuan terdiri dari NV dan SY. Tiga orang memilih orientasi karir yang didasari dedikasi sosial, satu orang memilih orientasi karir yang mengarah pada kewirausahaan, satu orang memilih orientasi karir yang sifatnya teknis atau fungsional, dan satu orang memilih orientasi karir yang seimbang dengan gaya hidupnya. Berikut uraian datanya secara detail, termasuk di dalamnya memuat hambatan yang dialami selama perkuliahan.

Subjek PD merupakan mahasiswa strata satu Teknik Informatika dan berasal dari SMA inklusi di Kebumen. Orientasi karirnya berdasarkan survey adalah *entrepreneurial creativity*, dengan skor 19 dari skor maksimal 20. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh melalui wawancara, PD memilih jurusan Teknik Informatika karena merasakan kebermanfaatannya yang sangat besar dari teknologi, seperti

aplikasi JAWS dan ingin memiliki kehidupan yang layak dengan menyandang gelar sarjana. Di masa depan, PD ingin bekerja menjadi seorang *programmer* yang membuat beragam aplikasi. Hambatan yang dialami oleh PD saat menjalani perkuliahan adalah kesulitan mengakses informasi visual yang sering ditampilkan oleh dosen melalui tayangan *power point*, dan ia mengharapkan ada pendampingan khusus serta pemberian beasiswa tugas belajar untuk disabilitas di Universitas Sebelas Maret.

Subjek MH merupakan mahasiswa strata satu Pendidikan Luar Biasa dan berasal dari MA Inklusi di Klaten. Orientasi karirnya berdasarkan survey adalah *service dedication to a cause*, dengan skor 18 dari skor maksimal 20. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh melalui wawancara, MH memilih jurusan Pendidikan Luar Biasa karena menyukai kegiatan mengajar dan ingin meningkatkan kualitas moral dari teman-teman tunanetra sehingga bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selain itu, MH terinspirasi oleh tokoh Didi Tarsidi sehingga ia menjadikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sebagai referensi kerja sebagai guru atau dosen. Hambatan yang dialami oleh MH saat menjalani perkuliahan adalah aksesibilitas bus kampus, ia mengharapkan adanya petugas yang memberitahukan lokasi-lokasi pemberhentian bus selama perjalanan. Selain itu, MH menginginkan adanya paguyuban yang mewadahi mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Sebelas Maret agar dapat berdiskusi dan sebagai sarana advokasi, serta peran aktif Pusat Studi Disabilitas untuk mengadakan pelatihan *soft skill* baik untuk meningkatkan wawasan maupun mempersiapkan keterampilan bekerja.

Subjek AP merupakan mahasiswa strata dua Pendidikan Luar Biasa. Orientasi karirnya berdasarkan survey adalah *service dedication to a cause*, dengan skor 20 dari skor maksimal 20. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara, AP memilih melanjutkan studinya karena ingin mengembangkan wawasan dan kemampuannya dalam mengelola sebuah sekolah di Jawa Barat. Beliau juga mengungkapkan kebanyakan siswa di sekolahnya merupakan anak dengan tunaganda sehingga muncul keinginan untuk memfasilitasi murid-muridnya mencapai kemandirian. Adapun hambatan yang dialami oleh AP saat menjalani perkuliahan tidak krusial, karena beliau sudah mendapatkan pelayanan yang baik dan terhubung langsung dengan pihak terkait, seperti rektor yang langsung menghubungkan beliau ke kepala perpustakaan untuk kemudahan akses informasi.

Subjek WY merupakan mahasiswa strata satu Pendidikan Luar Biasa dan berasal dari SMA Inklusi di Surakarta. Orientasi karirnya berdasarkan survey adalah *service dedication to a cause*. Mulanya, WY lebih berminat mengambil jurusan keolahragaan, namun karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Alasan memilih jurusan Pendidikan Luar Biasa adalah keresahan ketika mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, WY merasa intensitas calon guru Pendidikan Luar Biasa yang turun ke lapangan dan berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus semakin berkurang sehingga ia tertarik untuk mengetahui isi perkuliahannya dan faktor penyebab fenomena tersebut. Saat ini, WY ingin melanjutkan karirnya sebagai atlet catur sekaligus melakukan advokasi kepada masyarakat bahwa seorang disabilitas mampu berprestasi. Nantinya WY berencana mendirikan sebuah yayasan yang memberdayakan kelompok disabilitas. Adapun hambatan yang dialaminya saat menjalani perkuliahan sama seperti subjek MH, yakni minimnya aksesibilitas bus kampus dan kesulitan mengikuti

pembelajaran mata kuliah umum. WY berharap dilakukan acara orientasi menyeluruh ke lokasi kampus secara mendetail, dan kegiatan sosialisasi untuk dosen non pendidikan luar biasa sehingga mereka dapat menyesuaikan cara menyampaikan materi maupun saat memberikan tugas.

Subjek NV adalah mahasiswa strata satu Pendidikan Luar Biasa dan berasal dari SMA Inklusi di Wanadadi. Berdasarkan suvey, orientasi karir NV adalah *lifestyle*, dengan skor 18 dari skor maksimal 20. Alasan beliau memilih jurusan Pendidikan Luar Biasa adalah keinginannya menjadi seorang guru yang punya waktu cukup untuk mengurus rumah. NV merasa pekerjaan guru cukup ideal, semisal tidak bisa bekerja di sekolah maka ia akan menjadi tutor atau guru kunjung ke rumah anak tunanetra. Adapun hambatan yang dialaminya saat kuliah adalah kesulitan mengakses buku di perpustakaan, ia mengharapkan fasilitas audio book dan ruang baca khusus.

Subjek SY adalah mahasiswa strata satu Pendidikan Luar Biasa dan berasal dari SMA Inklusi di Surakarta. Berdasarkan suvey, orientasi karir SY adalah *technical function*, dengan skor 16 dari skor maksimal 20. Alasan SY memilih jurusan Pendidikan Luar Biasa adalah keinginan untuk menjadi ahli praktisi untuk anak tunanetra. Ia merasa perkembangan media untuk anak tunanetra di Indonesia stagnan. SY ingin bekerja di lembaga yang memberdayakan kaum tunanetra, seperti Yayasan MitraNetra. Adapun hambatan yang dialaminya sama seperti subjek NV yaitu kesulitan mengakses buku di perpustakaan, ia mengharapkan peran aktif dari Pusat Studi Disabilitas untuk menyediakan relawan atau mengadakan pelatihan untuk petugas perpustakaan mengenai pelayanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Dari keenam subjek, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan orientasi karir pada mahasiswa tunanetra adalah *service dedication for a cause*, mereka mengungkapkan keinginan untuk berbagi ilmu kepada generasi penerus, baik dengan mengajar maupun mendirikan yayasan khusus untuk anak tunanetra. Pada penelitian sebelumnya, Duquette, J & Baril, F. (2013) menjelaskan bahwa kelompok tunanetra mempunyai frekuensi membentuk komunitas lebih tinggi, kelekatan yang kuat terhadap komunitasnya sehingga mempunyai kepedulian lebih tinggi terhadap isu disabilitas, dan tendensi untuk bekerja di lingkungan yang berkaitan dengan komunitasnya.

Adapun hambatan yang dialami oleh mahasiswa tunanetra berkaitan dengan aksesibilitas informasi visual saat mengikuti pembelajaran maupun mengakses buku di perpustakaan, serta orientasi mobilitas. Mereka mengharapkan adanya pendampingan khusus untuk pendalaman materi, pelatihan untuk tenaga dosen dan perpustakaan yang lebih ramah disabilitas, pembentukan wadah komunitas mahasiswa disabilitas, dan pengoptimalan bus kampus sebagai sarana mobilitas.

Subjek mahasiswa tunarungu terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan. Subjek laki-laki terdiri dari BM, sementara subjek perempuan terdiri dari CY, TF, NN, WD, dan LH. Tiga orang memilih orientasi karir yang didasari otonomi kebebasan, satu orang memilih orientasi karir yang mengarah pada kewirausahaan, dan dua orang memilih orientasi karir yang sifatnya teknis atau fungsional. Berikut uraiannya secara detail.

Subjek BM adalah mahasiswa strata satu Seni Rupa Murni dan berasal dari SMK di Surakarta. Berdasarkan survey, orientasi karir BM adalah *autonomy independence*,

dengan skor 18 dari skor maksimal 20. Alasannya memilih jurusan Seni Rupa Murni adalah hobinya menggambar sketsa dan mural sejak SMK. BM ingin bekerja sebagai pekerja lepas, dan seniman visual, serta melanjutkan studi pascasarjana di bidang seni rupa. BM mengungkapkan selama ini tidak ada hambatan besar dalam menjalani perkuliahan, namun ia jarang mendapatkan informasi mengenai gambaran pekerjaan di masa depan maupun tawaran pekerjaan, informasi tersebut lebih banyak didapatkan dari lingkup pertemanan. Harapannya untuk Universitas Sebelas Maret adalah diadakannya kegiatan diskusi atau *workshop* antar seniman dalam maupun luar kampus yang akomodatif untuk tunarungu, dan pameran yang bisa meningkatkan pemahaman kaum awam tentang disabilitas sekaligus menjadi perluasan jaringan relasi.

Subjek CY adalah mahasiswa strata satu jurusan Pendidikan Luar Biasa dan berasal dari SMA inklusi di Demak. Orientasi karir CY adalah *technical function* dengan skor 19 dari skor maksimal 20. Alasannya memilih jurusan Pendidikan Luar Biasa sejalan dengan keinginannya untuk menjadi dosen atau ahli anak berkebutuhan khusus, utamanya bidang tunarungu. Hambatan yang dialaminya selama perkuliahan adalah kesulitan mengikuti pembelajaran yang dosennya bukan berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa sehingga tidak ada prinsip keterarahwajahan dan keterarahsuaraan. Selain itu, CY merasa belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai profesi ahli anak berkebutuhan khusus karena kesulitan mencari teman diskusi. Rencana CY untuk mendukung orientasi karirnya adalah melanjutkan studi, dan ia mengharapkan ada beasiswa khusus untuk kelompok disabilitas serta program magang yang lebih intens.

Subjek TF adalah mahasiswa strata satu jurusan Pendidikan Luar Bisa, sebelumnya ia sempat berkuliah di jurusan Sastra Inggris selama satu semester. Namun dengan pertimbangan ketidakmampuan TF mengikuti mata kuliah *listening*, Pusat Studi Disabilitas memindahkannya ke jurusan Pendidikan Luar Biasa. Berdasarkan survey, orientasi karir TF adalah *autonomy-independence* dengan skor 19 dari skor maksimal 20. TF mengakui belum ada ketertarikan untuk menjadi guru maupun bekerja di perusahaan, ia ingin bekerja sebagai *freelance* dan membuka usaha perawatan kucing bersama keluarga. Hambatan yang dialami selama perkuliahan adalah proses adaptasi dari perpindahan jurusan. Selain itu, TF mengaku beberapa dosen sudah memahami kebutuhannya dan memberikan perhatian lebih kepadanya, seperti mencoba berkomunikasi lewat teks. Harapan dari TF untuk Universitas Sebelas Maret adalah penyediaan konseling untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengalami perpindahan seperti dirinya, atau masalah lainnya.

Subjek NN adalah mahasiswi strata satu jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan berasal dari SMA inklusi di Gunungkidul. Hasil survey menunjukkan orientasi karirnya adalah *autonomy-independence* dengan skor 17 dari skor maksimal 20. Alasan NN memilih jurusan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu keinginan mendirikan taman kanak-kanak khusus anak tunarungu sesuai prinsip dan refleksi pengalamannya menjadi seorang tunarungu. Selanjutnya, karena menyadari kemampuan komunikasinya sulit dipahami anak usia dini, NN tidak ingin mengajar namun memilih menjadi konsultan pendidikan yang jadwal kerjanya lebih fleksibel. Selama kuliah, NN menemui hambatan berupa kesulitan komunikasi dengan dosen dan petugas administrasi. Harapannya untuk Universitas Sebelas Maret adalah adanya pelatihan untuk dosen dan

petugas terkait pelayanan untuk kelompok disabilitas, serta membentuk komunitas mahasiswa berkebutuhan khusus.

Subjek WD adalah mahasiswi diploma tiga jurusan Agribisnis dengan konsentrasi bidang Farmaka. Berdasarkan survey, orientasi karir WD adalah *technical function* dengan skor 16 dari skor maksimal 20. Alasan WD memilih jurusan Agribisnis adalah ketertarikannya pada pengobatan herbal, hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya yaitu SMK Farmasi. WD ingin bekerja di perusahaan produsen obat herbal, dan melanjutkan studinya. Adapun hambatan yang ditemui WD selama perkuliahan adalah dosen yang belum mengakomodasi kebutuhannya, sehingga ia berharap semua dosen dapat terbiasa untuk menuliskan poin penting ketika pembelajaran dan memberikan instruksi secara individual.

Subjek LH adalah mahasiswi strata satu jurusan Seni Rupa Murni dan berasal dari SMALB di Surakarta. Hasil survey menunjukkan orientasi karirnya adalah *entrepreneurial creativity*. LH memiliki keinginan mempunyai studio sendiri yang memproduksi desain interior dan animasi dua dimensi. Hambatan yang ditemui LH selama perkuliahan adalah kesulitan memahami materi dari dosen karena LH terbiasa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, baru sebagian kecil dosen yang mencoba berkomunikasi lewat teks. LH berharap ada pendampingan khusus dari Pusat Studi Disabilitas, dan program pelatihan *softskill* utamanya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berinteraksi.

Dari kelima subjek, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan orientasi karir pada mahasiswa tunarungu adalah *autonomy-independence*. Mereka mengakui keterbatasan komunikasi menjadi hambatan terbesar selama kuliah dan takut hal tersebut juga akan terjadi di dunia kerja. Maka dari itu, mereka cenderung memilih pekerjaan yang sifatnya memberi kebebasan namun tetap disertai pendampingan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cooper, S.B., Emmanuel, D.C., Cripps, J.H. (2012) yang mengungkapkan bahwa bekerja di firma swasta, tenaga kerja lepas (*freelance*), dan berwirausaha menjadi tiga pilihan karir utama tunarungu di Kanada.

Adapun hambatan mahasiswa tunarungu selama mengikuti perkuliahan adalah mengakses informasi auditoris, terutama saat dosen mengajar atau karyawan universitas memberikan pengarahan, serta minimnya interaksi dengan teman. Mereka mengharapkan adanya kebiasaan untuk staff pengajar maupun karyawan memberikan informasi secara individual, konseling, dan program pelatihan *softskills* untuk meningkatkan relasi serta kepercayaan diri dalam berinteraksi.

Subjek mahasiswa tunadaksa terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan. Subjek laki-laki adalah RD, sementara subjek perempuan terdiri dari NR, AF, dan ND. Tiga orang memilih orientasi karir yang mengutamakan keamanan dan stabilitas, sementara satu orang memilih orientasi karir yang mengarah pada kewirausahaan. Berikut uraiannya secara detail.

Subjek RD merupakan mahasiswa strata satu di fakultas Ilmu Hukum dan berasal dari SMA inklusi di Jakarta. Alasan RD memilih fakultas Ilmu Hukum adalah keinginannya bekerja di belakang meja atau tidak terlalu banyak terjun ke lapangan, seperti di institusi Badan Keuangan Negara, Kemenkumham, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil surveynya yang menunjukkan orientasi karir RD adalah *security-stability*

dengan skor 18 dari skor maksimal 20. RD mengungkapkan selama kuliah sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ranah pekerjaan di bidang hukum, dan tidak menemui hambatan yang besar. Namun ia menyayangkan pemeliharaan fasilitas untuk disabilitas yang kurang, seperti toilet disabilitas, dan jalur pedestrian yang berbatu. Harapan RD terhadap Universitas Sebelas Maret adalah pengoptimalan pemeliharaan fasilitas untuk disabilitas dan pengadaan kegiatan rutin yang sifatnya inklusif sehingga label kampus inklusi dapat terwujud secara utuh.

Subjek NR merupakan mahasiswi diploma tiga Jurusan Teknik Informatika dan berasal dari MA inklusi di Bekasi. Hasil survey menunjukkan orientasi karirnya adalah *security-stability* dengan perolehan skor maksimal yakni 20. NR mengungkapkan ketertarikannya kepada bidang *start-up*, dan orang tua mendukung pemilihan jurusan tersebut dengan pertimbangan proyeksi pekerjaan yang tidak melibatkan banyak aktivitas fisik. NR menginginkan karir di sebuah perusahaan atau *agency* kreatif digital, desain, atau media. Keinginan ini memotivasi NR untuk mencari informasi mengenai kesiapan kerja melalui *Career Development Center* di kampus dan mengikuti program *pre-job training*. Adapun hambatan yang dialaminya selama perkuliahan adalah mobilitas kelas maupun gedung, dan saat kuliah praktikum yang melibatkan aktivitas seperti memasang kabel, dan sebagainya. Harapan NR kepada Universitas Sebelas Maret adalah Pusat Studi Disabilitas lebih aktif menjangkau mahasiswa berkebutuhan khusus dan bekerjasama dengan staff pengajar, petugas perpustakaan, maupun petugas administrasi untuk mewujudkan layanan yang akomodatif.

Subjek AF merupakan mahasiswi strata satu jurusan Pendidikan Akuntansi dan berasal dari SMA inklusi di Magelang. Hasil survey menunjukkan orientasi karirnya adalah *security-stability* dengan perolehan skor 18 dari skor maksimal 20. Alasan memilih jurusan Pendidikan Akuntansi adalah ketertarikan pada bidang akuntansi dan pertimbangan pekerjaan di masa depan yang lebih minim resikonya. AF mengungkapkan selama berkuliah ia sudah mendapatkan gambaran mengenai pekerjaan sebagai akuntan maupun guru. Sampai saat ini AF masih punya keinginan kuat untuk bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Hambatan yang ditemui oleh AF adalah mobilitas, terlebih jika harus berpindah gedung. Harapan AF untuk Universitas Sebelas Maret adalah penyediaan beasiswa untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Subjek ND merupakan mahasiswi strata satu jurusan Pendidikan Sosio Antropologi. Berdasarkan survey, orientasi karir ND adalah *entrepreneurial creativity* dengan peroleh skor 18 dari skor maksimal 20. Hal ini disebabkan oleh didikan orang tuanya yang mempunyai usaha sendiri lebih baik daripada bekerja di perusahaan orang lain. Adapun alasan pemilihan jurusan Pendidikan Sosio Antropologi didasari oleh ketertarikannya walaupun mulanya ia ingin mengambil jurusan keolahragaan karena profesinya sebagai atlit atletik. Namun ada isu bahwa kondisi fisik yang tidak lengkap (re: tangan hanya satu) tidak boleh menjadi mahasiswi jurusan keolahragaan. ND mempunyai cita-cita mendirikan usaha penyewaan tempat tinggal/kos-kosan yang modalnya berasal dari jerih payahnya sebagai atlit. Adapun hambatan yang ditemui oleh ND tidak terlalu krusial, dan ia merasa pelayanan di kampus sudah akomodatif. ND juga merasa sudah menerima gambaran mengenai kewirausahaan dari mata kuliah umum dan berbagai seminar yang diikutinya.

Dari keempat subjek, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan orientasi karir pada mahasiswa tunadaksa adalah *security-stability*. Mereka mengakui keterbatasan mobilitas dan aktivitas fisik menjadi pertimbangan dalam memilih jurusan serta karir yang minim resiko. Maka dari itu, mereka cenderung memilih pekerjaan yang sifatnya di belakang meja, dan tidak melibatkan banyak aktivitas fisik. Adapun hambatan mahasiswa tunadaksa selama mengikuti perkuliahan adalah mobilitas saat berpindah kelas atau gedung kuliah, dan minimnya kegiatan pendukung Mereka mengharapkan adanya pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang memadai, seperti bidang miring yang dilapisi karpet agar tidak licin, tangga yang disertai pegangan, dan pedestrian yang rata.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Dent & Rennie (2005) yakni masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terbagi menjadi lima kategori, yakni akademik, karir, professional, personal, dan administratif. Pada mahasiswa dengan hambatan fisik di Universitas Sebelas Maret umumnya mengalami masalah akademik, karir, dan administratif.

Masalah akademik disebabkan karena tidak semua staff dosen memahami kebutuhan mereka, terlebih menyediakan akomodasi khusus. Hanya sebagian kecil yang memberi perhatian khusus seperti mencoba komunikasi melalui teks ketika mengajar mahasiswa tunarungu. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakeem, K.A. (2015) yang menyatakan masih ada tantangan besar mengubah kompetensi guru untuk lebih menghargai kemampuan dan memberikan dukungan moral kepada siswa berkebutuhan khusus.

Pada bidang karir, umumnya mereka tidak mengalami masalah untuk praktik magang namun informasi mengenai gambaran dunia kerja maupun pelatihan *softskills* sangat minim. Selain itu, program konseling karir belum tersedia, padahal salah satu peran kampus adalah menyiapkan lulusannya ke dunia kerja. Terlebih kelompok disabilitas mempunyai permasalahan dalam memperoleh pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisik mereka sendiri, ketidakmampuan mengakses informasi pekerjaan, dan ketakutan mengulang kegagalan melamar pekerjaan (Hakeem, K.A. (2015).

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan keenam belas subjek, dalam memilih orientasi karir rata-rata baru sampai tahap mengkorelasikan karakteristik diri terhadap pekerjaan tertentu namun belum mempunyai informasi atau gambaran detail mengenai karir yang diinginkan. Goldstein, T., Chunn. M., and Winkler, M. (2001) menguraikan tujuh tahap dalam menentukan orientasi karir, yaitu; a) mengetahui hambatan utama (baik fisik maupun mental); b) mengetahui minat, keterampilan, dan nilai diri; c) mengkorelasikan karakteristik diri terhadap beberapa pilihan karir;d) mengumpulkan data mengenai karir yang diinginkan; e) mengevaluasi dan membuat prioritas karir; f) menetapkan tujuan karir; dan g) merencanakan aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi masih ada empat tahapan yang belum dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa dengan hambatan fisik di Universitas Sebelas Maret.

Upaya untuk menyiapkan kesiapan mahasiswa disabilitas sekaligus mencegah permasalahan dalam memperoleh pekerjaan dapat diatasi melalui konseling karir dan pelatihan *softskills*. Menurut Gibson & Mitchell (2011), meskipun isu-isu pengembangan karir individu penyandang disabilitas mirip dengan yang dialami

kelompok non disabilitas, namun penanganan terhadap kelompok khusus ini memerlukan strategi perencanaan yang lebih matang dan luas, termasuk memberikan pendidikan tambahan dan keterampilan spesifik.

Seorang konselor karir untuk klien mahasiswa berkebutuhan khusus sebaiknya memahami keragaman disabilitas dan implikasi karirnya. Selain itu ia harus mengetahui sumber daya, pelatihan, dan peluang karir yang tepat sehingga di saat bersamaan dapat mendukung, dan realistis. Kelompok disabilitas juga dibantu oleh konselor untuk mengakses pendidikan atau pelatihan, serta berhubungan dengan kelompok pendukung rekan sebayanya, atau rekan lain yang juga penyandang disabilitas (Punch, R., Hyde, M. & Creed, P.A. (2004). Hal ini bertujuan untuk menguatkan konsep diri mereka dan membantu mengembangkan keahliannya.

Selain itu pelatihan *softskills* juga diperlukan untuk mahasiswa dengan hambatan fisik. Adapun kemampuan yang dapat dilatihkan diantaranya kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengatur waktu dan sumber daya, kepemimpinan, kemampuan berpikir logis, etika, dan evaluasi karir (O'Brien (2013); Utomo & Hargianto (2011)).

Sementara, masalah administratif umumnya berhubungan dengan regulasi dan kegiatan administrasi seperti peminjaman buku perpustakaan, pemberian informasi beasiswa, dan pengisian rencana studi, karena tidak semua staff karyawan memiliki kemampuan melayani mahasiswa berkebutuhan khusus. Sekilas terlihat sepele namun bagi kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi akan menimbulkan masalah besar.

D. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan orientasi karir dari mahasiswa tunetra, tunarungu, dan tunadaksa. Mahasiswa tunetra cenderung menginginkan pekerjaan yang sifatnya dedikasi sosial (*service dedication to a cause*), mahasiswa tunarungu memiliki kecenderungan memilih pekerjaan yang memberikan kebebasan (*autonomy/independence*), sementara mahasiswa tunadaksa cenderung mengutamakan keamanan dan stabilitas (*security-stability*) pada orientasi karirnya. Selain itu, dalam memilih orientasi karir, keenam belas subjek masih pada tahap mengkorelasikan karakteristik diri terhadap pekerjaan tertentu namun belum mempunyai informasi atau gambaran detail mengenai karir yang diinginkan.

Mahasiswa diharapkan dapat menggali dan memaksimalkan upaya untuk mencapai tujuan masa depan dengan meningkatkan kompetensi melalui partisipasi di kegiatan universitas, baik pembelajaran formal maupun organisasi. Selain itu, Pusat Studi Disabilitas diharapkan dapat membimbing mahasiswa dalam merencanakan masa depan yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhannya, serta memberikan gambaran masa depan dan alternatif pilihan yang masih berkaitan dengan kemampuan dan keilmuan mahasiswa tersebut. *Career Development Center* di Universitas Sebelas Maret juga diharapkan dapat mengadakan *workshop* dan seminar yang berkaitan dengan pengenalan diri dan perencanaan masa depan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus sebagai sarana merealisasikan orientasi karirnya.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan agar di setiap perguruan tinggi yang terdapat mahasiswa disabilitas, disediakan layanan bimbingan karir khusus bagi mahasiswa disabilitas. Program ini sangat penting agar mahasiswa disabilitas setelah lulus dapat memasuki dunia kerja dengan tenang dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouffard, T., Boisvert, J. Vezeau, C, and Larouche, C. (1995). The impact of goal orientation on self regulation and performance among college students. *British Journal of Educational Psychology*, 65, page 317-329.
- Cooper, S.B., Emmanuel, D.C., Cripps, J.H. (2012). Deaf studies alumni perceptions of the academic program and off-campus intership. *American Annals of The Deaf*, 157 (4), page 373-390.
- Dariyo, A. (2003). Psikologi perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: PT Grasindo.
- Dent & Rennie. (2005). Student support in a practical guide for medical teachers. Edinburgh: Elsevier Churcill Livingstone.
- Duquette, J & Baril, F. (2013). Factors influencing work participation for people with a visual impairment. *Documentary research*: Institute Nazareth & Louis-Braille.
- Elwan, A. (1999). Poverty and Disability: A Survey of The Literature. Diunduh dari <http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Background/elwan.pdf> pada hari Minggu, 7 Oktober 2018 pukul 12.55 WIB.
- Gibson, R.L & Mitchell, M.H. (2011). Bimbingan dan Konseling (Edisi Ketujuh). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goldstein, T., Chunn. M., and Winkler, M. (2001). Job Seeking Skills for People with Disabilities: A Guide to Success. Washington DC: Bibliogov.
- Hakeem, K.A. (2015). People with Physical Disabilities and Their Working Life: A Case Study about Finnish People with Physical Disabilities. *Thesis*: Magister of Social Services.
- Izzaty, R. E, dkk. (2008). Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press.
- Kerka, S. (2002). Learning Disabilities and Career Development: Practice Application Brief No. 20..Washington DC: Eric Publication.
- Lombana, J.H. (1980). Career Planning with Visually Handicapped Students. *The Vocational Guidance Quarterly*. Volume 28, page 219-224.
- Montgomery, C. & Cote, J.E. (2003). College as a transition to adulthood. *Journal Backwell Handbook of Adolescence*, 31 (3), page 149-172.
- Nuraini. (2018). Catatan Pemerintah, Sebanyak 414.222 Penyandang Disabilitas Butuh Kerja. Diakses dari <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/319416-catatan->

pemerintah-sebanyak-414-222-penyandang-disabilitas-butuh-kerja_pada_hari_Minggu_7_Oktober_2018_pukul_12.39_WIB.

- Papalia, Old, dan Feldman. (2009). *Human Development* (10th ed). Jakarta: Salemba Humanika.
- Patrick O'Brien. (2010). *Making College Count: A Real World Look at How to Succeed IN and After College*. Miami: Patrick O'Brien Enterprises.
- Punch, R., Hyde, M. & Creed, P.A. (2004). Issues in the school-to-work transition of hard of hearing adolescents. *American Annals of the Deaf*. Volume 149, page 28-38.
- Schein, E.H. (1978). *Carrer Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs*. London: Addison-Wesley.
- Spain, J. B. (1981). Employment of Handicapped People: *An Enigmatic Future*. *Journal of Visual Impairment and Blindness*. Volume 75, page 122-125.
- Sukardi, D.K. (1989). *Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supena, A., Yusuf, M., Budiyanto, Azizah, N., Tutupoho, R. (2017). Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Diunduh dari <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/12/29/panduan-layanan-mahasiswa-disabilitas-di-perguruan-tinggi/> pada hari Sabtu, 6 Oktober 2018 pukul 20.17 WIB.
- Utomo. N.B & Hargiarto, P. (2011). *Kiat Sukses Kuliah dan Memasuki Dunia Kerja*. Yogyakarta: D COLT.
- Winkel, W.S, Hastuti, S. (2006). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.

PEMBELAJARAN BI-GIONISTIC KECAKAPAN HIDUP TRADISI LOKAL DALAM PENDIDIKAN INFORMAL PADA MASYARAKAT DI PEDESAAN

Zulkarnain

Universitas Negeri Malang
Email: zulkarnain.fip@um.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan informal adalah pengalaman hidup sehari-hari yang memberi unsur-unsur pendidikan kepada setiap orang. Unsur pendidikan tersebut bersumber dari interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya sepanjang hayat. Lingkungan tersebut terutama adalah lingkungan sosial budaya, dimulai dari kehidupan keluarga hingga lingkungan kehidupan lainnya. Jalur pendidikan informal memiliki peranan membentuk watak masyarakat, bahkan secara tradisional pewarisan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai isi dari kearifan lokal banyak diajarkan dan dipelajari melalui interaksi pendidikan informal. Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang diturunkan melalui konsep dan jalur pendidikan informal salah satunya adalah kecakapan hidup (*life skills*) dimana kecakapan hidup merupakan keterampilan untuk menunjang dan menyambung kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan konsep dan ruang lingkup pendidikan informal, (2) Mendeskripsikan pengertian dan proses pembelajaran bi-gnostic, (3) Mendeskripsikan model pembelajaran Be-gnostic dalam pengobatan tradisional sebagai kearifan lokal masyarakat di pedesaan. Kesimpulannya adalah (1) pendidikan informal itu pengalaman hidup sehari-hari setiap orang, bersumber dari interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya, dan berlangsung sepanjang hayat; (2) Pembelajaran tradisional melalui pendidikan informal menjadi kearifan lokal di Indonesia di bidang kesehatan, termasuk pengobatan sangkal putung, karena banyak diminati, perlunya untuk dikaji terbuka, bermanfaat bagi masyarakat secara luas; (3) Pengobatan tradisional sangkal putung merupakan kecakapan bidang kesehatan, disebut *knowledge of local wisdom in health care*. Pembelajaran kecakapan hidup pengobatan tradisional sangkal putung terdiri dari 5 (lima) tahapan yakni: tahap tumut, tahap njjal, tahap laku, tahap ngtrapake, dan tahap jumeneng piyakkak.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan proses dimana manusia mengembangkan dan menciptakan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk merubah dan memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan lingkungannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan terdiri atas 3 (tiga) jalur yang saling mengisi, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pendidikan informal telah sejak lama mempunyai peran dan andil yang sangat penting dan luhur dalam mewariskan nilai-nilai budaya dan pendidikan di masyarakat, salah satu contoh implementasi dari pendidikan informal di masyarakat adalah proses pewarisan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal. Definisi pendidikan informal adalah menurut Coombs (dalam Sudjana, 1991) adalah “proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media.

Konsep tersebut memberikan penjelasan bahwa pendidikan informal pada dasarnya adalah pengalaman hidup sehari-hari yang memberi unsur-unsur pendidikan kepada setiap orang. Unsur pendidikan tersebut bersumber dari interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya dan berlangsung sepanjang hayat. Lingkungan tersebut terutama adalah lingkungan sosial budaya, dimulai dari kehidupan keluarga hingga lingkungan kehidupan lainnya.

Proses dan program pendidikan informal merupakan salah satu hal menarik untuk dipelajari namun kurang mendapat perhatian dari akademisi, pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan nasional. Jalur pendidikan informal memiliki peranan yang tidak kecil sumbangsinya dalam membentuk watak dan karakter masyarakat, bahkan secara tradisional pewarisan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai isi dari kearifan lokal banyak diajarkan dan dipelajari melalui interaksi pendidikan informal. Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang diturunkan melalui konsep dan jalur pendidikan informal salah satunya adalah kecakapan hidup (*life skills*) dimana kecakapan hidup merupakan keterampilan yang dipergunakan untuk menunjang dan menyambung kehidupan masyarakat.

Program pembelajaran kecakapan hidup dapat diterapkan di semua jalur dan jenjang pendidikan, setelah melalui proses penyesuaian kondisi sasaran dan potensi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Salah satu pembelajaran kecakapan hidup adalah melalui magang (*apprentice*). Istilah magang di Indonesia diartikan sebagai proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai suatu keterampilan tanpa dan atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (Anwar, 2006). Kegiatan belajar melalui magang merupakan bagian dari kegiatan belajar umat manusia, yang keberadaannya jauh sebelum pendidikan persekolahan lahir dalam kehidupan manusia. Berawal dari lingkungan keluarga akibat terjadinya interaksi antara orang tua dengan anak, melalui pola transmisi pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam bentuk asuhan, suruhan, larangan dan bimbingan (Sudjana, 2000)

Pembelajaran Bi-gnostic merupakan model pembelajaran yang digunakan dan dikembangkan oleh Peeranut Kanhdilok, yang mempelajari tentang sebuah model pembelajaran diantara pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal (Kanhdilok, 2013). Bi-gnostic berfungsi sebagai model yang mengkonsep dan mensistematisasi pembelajaran yang berpijak pada dua pengetahuan yaitu pengetahuan modern dengan pengetahuan tradisional.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan konsep dan ruang lingkup pendidikan informal, (2) Mendeskripsikan pengertian dan proses pembelajaran bi-gnostic, (3) Mendeskripsikan model pembelajaran Be-gnostic dalam pengobatan tradisional sebagai kearifan lokal masyarakat di pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup Pendidikan Informal

Berdasarkan undang-undang yang sama pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kalau dari definisi-definisi di atas, kelompok-kelompok belajar. Untungnya ada definisi pendidikan informal menurut Axin (1976) dan Soedomo (1989) yang menyatakan bahwa dalam pendidikan informal warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajar tidak sengaja untuk membantu warga belajar. Suprojanto (2007) memberikan contoh bahwa pendidikan informal terjadi dalam keluarga, melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam organisasi, dan lain-lain.

Definisi pendidikan informal adalah menurut Coombs (dalam Sudjana, 1991) adalah “proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media.

Konsep tersebut memberikan penjelasan bahwa pendidikan informal pada dasarnya adalah pengalaman hidup sehari-hari yang memberi unsur-unsur pendidikan kepada setiap orang. Unsur pendidikan tersebut bersumber dari interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya dan berlangsung sepanjang hayat. Lingkungan tersebut terutama adalah lingkungan sosial budaya, dimulai dari kehidupan keluarga hingga lingkungan kehidupan lainnya.

Berkenaan dengan proses edukatif di dalam pendidikan informal memang terjadi perdebatan pendapat para ahli pendidikan, apakah pendidikan informal boleh diintervensi dengan pendidikan informal merupakan substansi yang berlangsung secara alamiah sehingga tidak layak diintervensi. Pendapat para ahli yang membolehkan adanya intervensi pada pendidikan informal memiliki persepsi bahwa pendidikan informal sebagai substansi yang sangat berharga, sehingga terlalu sayang jika tidak dioptimalkan dan untuk itu perlu diintervensi, meskipun dalam batas-batas tertentu. Dalam konteks ini keberadaan pihak lain yang dapat berkontribusi untuk mengembangkan potensi manusia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Menurut Moedzakir (2015) bahwa kubu yang tidak membolehkan adanya intervensi memandang bahwa secara tidak langsung juga mengakui adanya “intervensi” meskipun terjadinya secara alamiah atau tidak disengaja. Karenanya sebetulnya hal itu hanya soal setting atau pengelolaan antara sengaja-tidaknyanya dan kurang atau lebih ketatnya intervensi tersebut. Dengan demikian keduanya dapat diintegrasikan dalam satu persepsi bahwa pendidikan informal pada dasarnya merupakan setting pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel, bisa disengaja ataupun tidak disengaja.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, pendidikan informal pada dasarnya adalah peristiwa pendidikan yang berlangsung secara alamiah, sepanjang hayat, tidak terstruktur, disengaja atau tidak disengaja, serta tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dalam konteks apapun, oleh siapapun. Jenis pendidikan ini bersifat cair dan sekaligus terintegrasi dengan semua aspek kehidupan. Karenanya pendidikan informal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, melainkan juga di tengah interaksi sosial dalam masyarakat, baik di lingkungan pekerjaan, peribadatan, maupun politik, bahkan juga di lingkungan sekolah itu sendiri. Isi yang termuat di dalamnya juga bisa tentang dan mulai dari hal-hal apapun. Mulai dari hal yang paling sepele sampai yang paling bermakna, mulai dari hal-hal yang paling humoris hingga yang paling serius, mulai dari hal-hal yang paling rasional hingga yang kurang rasional, mulai dari hal-hal yang menyangkut diri sendiri hingga hal-hal yang menyangkut masyarakat luas, mulai dari hal-hal yang berkenaan dengan aspek jasmani hingga yang terkait aspek-aspek emosional, sosial, dan spritual.

Pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan. Dalam keluarga yang memahami arti penting pendidikan keluarga, maka ia akan secara sadar mendidik anak-anaknya agar terbentuk kepribadian yang baik. Pendidikan informal sama sekali tidak terorganisasi secara struktural, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil pengalaman individual mandiri dan pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar buatan (Aini, Wirdatul. 2006).

Menurut Coombs (1999) pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai meninggal. Contoh pendidikan informal: agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi.

Alo Liliweri (2003:137) menjelaskan bahwa "...setiap kebudayaan harus memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan pandangan hidup dan sistem kepercayaan dimana semua pengikutnya berkiblat. Nilai dasar itu membuat para pengikutnya melihat diri mereka ke dalam, dan mengatur bagaimana caranya mereka keluar. Nilai dasar itu merupakan filosofi hidup yang mengantar anggotanya ke mana dia harus pergi.."

Lontara'na, Pattoriolongda dan Pangaderreng (dalam Rafiuddin, 2003:7), Rafiuddin menegaskan: "...Sangatlah disayangkan bila nilai-nilai budaya kita yang begitu tinggi harus hilang begitu saja, oleh kita sendiri, hanya karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk mempelajari dan memahami secara benar sesuai apa yang diwariskan leluhur kita...". Sehingga generasi penerus kita akan kehilangan identitas dan orang asinglah yang akan meletakkan identitas itu pada generasi kita.

Berdasar hal demikian, menjadi penting adanya usaha menelaah nilai-nilai tradisi lokal yang masih dilakukan dan dipertahankan sebagai pendidikan informal selain usaha-usaha lainnya. Hal ini untuk menjaga warisan budaya, maka tidak ada lagi nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan kepribadian.

Kegiatan tradisi lokal ini perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan berangsur-angsur melalui rangkaian proses kegiatan pengenalan, pemahaman, pendalaman,

pembinaan melalui dialog aktif sehingga apa yang diharapkan dapat memotivasi untuk mewujudkannya.

Dalam rangka mewujudkan pemasyarakatan nilai-nilai kearifan lokal pembinaannya cukup banyak dilakukan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh untuk memasyarakatkan nilai-nilai kearifan lokal dengan menggunakan beberapa jalur, antara lain: (1) Jalur pendidikan, melalui pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan non formal (luar sekolah), dan pendidikan informal yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan lingkungan. (2) Jalur media massa, meliputi media tradisional seperti pewayangan dan bentuk-bentuk seni rakyat lainnya, serta media modern seperti pers, radio, dan televisi. (3) Jalur organisasi sosial politik (buku kunyit, 1978: 46-48).

Oleh karena itu, pendidikan informal pada dasarnya adalah setting pendidikan yang paling luas, mendalam, lama bermakna dan sulit dilupakan ketimbang setting-setting pendidikan yang lain. Hal yang paling esensial disini adalah bahwa konten pesannya harus berkenaan dengan hal-hal yang edukatif, baik terkait dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, ataupun makhluk susila. Aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan tidak mengembangkan potensi atau tidak memenuhi kebutuhan kodrat tersebut dapat dikategorikan non edukatif. Konten pendidikan informal harus sesuai dengan karakteristik individu, norma-norma positif kehidupan masyarakat dimana yang bersangkutan berada, dan nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi masyarakat. Konten nilai pendidikan yang paling dibutuhkan adalah prinsip-prinsip hidup. Keluarga sebagai unit kehidupan sosial terkecil diharapkan merupakan unit yang paling berfungsi sebagai pendidikan informal bagi setiap orang, terutama anak usia dini. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang berhasil memerankan fungsi tersebut, makin banyak anak usia dini yang memiliki masa depan lebih baik. Begitu sebaliknya. Sangat keliru dan terlalu menyepelekan pendidikan informal hanya sekedar diartikan sebagai pendidikan keluarga.

Sebagai peristiwa pendidikan yang berlangsung secara alamiah sepanjang hayat, esensi pendidikan informal pada dasarnya terletak pada learning (proses pembelajarannya). Berkenaan dengan proses pembelajaran tersebut, Jeffs dan Smith (dalam Moedzakir, 2015) menjelaskan bahwa nilai dari proses pembelajaran terletak pada intensitasnya dan intensitas tersebut ditentukan oleh pengalaman.

Pengertian dan Proses Pembelajaran Bi-Gnostic

Bi-gnostic learning merupakan model pembelajaran yang dipakai dan dikembangkan oleh Peeranut Kanhdilok. Menurut Kanhdilok (2013) *Bi-gnostic Learning* adalah sebuah model pembelajaran antara pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal. Apabila diartikan menurut kamus. Awalan bi berarti dua, kata gnostic maknanya pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Be-gnostic Learning* merupakan konsep pembelajaran yang berpijak pada dua pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmiah (modern) di satu sisi dan pengetahuan kearifan lokal (*local wisdom*) pada satu sisi lainnya. Model pembelajaran bi-gnostic dalam beberapa penelitian digunakan untuk mengembangkan pembelajaran tradisional agar bisa bersanding dengan pembelajaran modern, yaitu dengan mengkonstruksikan komponen pembelajaran yang ada terkait dengan bidang pekerjaan di masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan, seperti sangkal putung atau pengobatan

melalui proses pijat, getok magig memperbaiki kondisi mobil yang peyot, pijat bayi, dan lain-lainnya yang mengandung pekerjaan tradisional dan yang memiliki kearifan lokal.

Menurut Promdee, dkk (2014), kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan kumpulan pengalaman yang bersifat unik dari generasi terdahulu dan telah digunakan secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui proses-proses penanaman pola-pola hidup (*life style*) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan selanjutnya menjadi pengetahuan lokal milik masyarakat tersebut.

Kearifan lokal menurut Sibarani (2012) dapat diklasifikasikan pada beberapa kategori sebagai berikut: (a) pengetahuan budaya dan kepercayaan agama, tradisi, prinsip dan ritual, (b) pengetahuan seni dan kerajinan lokal, (c) pengetahuan ekonomi yang memadai, (d) pengetahuan kearifan rakyat tentang makanan dan pengolahan, (e) pengetahuan kearifan lokal dalam perawatan kesehatan.

Kearifan lokal merupakan warisan pengetahuan dan kekayaan intelektual dari generasi terdahulu yang sangat berharga dan perlu dipelihara kelestariannya agar tidak punah. Hasil penelitian Kanhdilok (2013) menyimpulkan bahwa *Be-gnostic Learning* merupakan strategi yang cukup efektif untuk menjaga kelestarian sekaligus mengembangkannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang di era global sekarang ini. Model pembelajaran yang dideskripsikan menurut prinsip operasional memiliki unsur-unsur antara lain sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran.

Cheng (2002) mengemukakan ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk pengembangan *Bi-gnostic learning* sebagai upaya pelestarian dan pengembangan lokal *knowledge* atau lokal *wisdom* di era sekarang ini. Beberapa teori tersebut dijabarkan sebagai berikut.

The Theory of Birdcage (teori sangkar burung) yang meminimalisasi dominasi global sebagai dampak dari modernisasi, teori ini terbuka pada pengetahuan global namun juga menahan arus tertentu yang dapat menghambat perkembangan lokal.

The Theory of DNA (teori mencangkok) menjelaskan bahwa tidak semua muatan lokal itu baik sehingga perlu di *mixed* dengan pengetahuan global. *The Teori of Fungus* yakni teori yang membudidayakan dan beranggapan bahwa dengan cara mengadopsi pengetahuan global berupaya untuk mengembangkan pengetahuan lokal itu sendiri.

The Theory of Tree (teori pohon atau penanaman) menjelaskan bahwa proses penguatan pengetahuan lokal berakar pada tata nilai dan tradisi masyarakat setempat serta menyerap pengetahuan lain yang relevan untuk diadopsi dan bermanfaat untuk pertumbuhan serta pengembangan tata nilai lokal dan budaya setempat. Teori ini mengasumsikan bahwa apa yang dimiliki dari pengetahuan lokal (*local knowledge*) termasuk dalam tradisi yang akan menjadi sumber transformasi, desain kurikulum menjadikan pengetahuan lokal sebagai basis atau sumber transformasi globalisasi bagi pengembangan masyarakat sebagai warga bangsa. Kearifan lokal di bidang kesehatan misalnya pengobatan tradisional sangkal putung (pijat untuk patah tulang).

Kemudian *The Theory of Crystal* (Teori Batu Kristal) menjelaskan bahwa yang menggunakan pengetahuan lokal sebagai bibit untuk mengakumulasi pengetahuan global yang sesuai dengan harapan dan tuntutan lokal. Teori ini mengaktualisasikan pengetahuan lokal yang terus diasah dan dikembangkan sebagai dasar pengetahuan global sehingga tetap lestari dan tidak punah. Relevansinya dengan pengobatan sangkal putung atau pijat bayi sebagai salah satu kearifan lokal, yaitu pada transfer pengetahuan yang terus dipertahankan dan diperbaharui dengan metode dan teknik pemijatan serta alat dan bahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman namun juga tetap tidak melunturkan norma yang ada di dalamnya.

Teori kognitif sosial adalah teori yang menekankan pentingnya gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial, dengan mengamati orang lain memperoleh pengetahuan, keterampilan, strategi, keyakinan dan sikap (Schunk, 2012). Dalam hal ini teori kognitif sosial yang dikemukakan Alber Bandura ini memiliki asumsi mengenai interaksi timbal balik antar manusia, perilaku dan lingkungan, dalam pengertian lain adalah suatu pembelajaran melalui praktek dan melalui pengamatan tentang bagaimana suatu pembelajaran terjadi (Zimmerman dan Schunk, 2003)

Teori kognitif sosial mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas pengolahan informasi dimana informasi tentang struktur perilaku dan tentang peristiwa-peristiwa lingkungan ditransformasikan menjadi representasi-representasi simbolis yang berperan sebagai tuntutan bagi tindakan.

Model Pembelajaran Be-gnostic Pengobatan Tradisional Masyarakat di Pedesaan

Pengobatan tradisional *Sangkal Putung* yang dikaji, pembelajarannya terjadi dengan pengamatan (*vicarious learning*) dan praktek (*enative learning*). Belajar dengan pengamatan artinya belajar dengan cara mengamati atau mendengarkan dari sumber magang. Belajar dengan praktek artinya belajar dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan akibat.

Pelaksanaan pembelajaran yang diwariskan oleh sumber magang (pemijat) kepada pemegang (pewaris) pengobatan sangkal putung menggunakan belajar secara informal yaitu disebut magang. Istilah magang (apprentice) diartikan sebagai proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai suatu keterampilan tanpa dan atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Kegiatan belajar melalui magang merupakan bagian dari kegiatan belajar umat manusia, yang keberadaannya jauh sebelum pendidikan persekolahan lahir dalam kehidupan manusia. Berawal dari lingkungan keluarga akibat terjadinya antara orang tua dan anak, melalui pola transfer pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam bentuk asuhan, suruhan, larangan, dan bimbingan (Sudjana, 2000).

Kegiatan belajar magang atau indigenous (asli) merupakan akar pertumbuhan pendidikan luar sekolah dan pendidikan persekolahan sebagaimana yang dikenal sekarang ini (Anwar, 2006). Pola magang yang terjadi pada pengobatan tradisional Sangka Putung, Pijat Bayi, dan pengobatan tradisional lainnya dalam pola magang dengan jenis magang tradisional. Berlangsung secara sederhana, karena calon pemijat (pemegang atau pewaris) berasal dari lingkungan keluarga, kegiatan magang dilakukan sejak awal diperkenalkan dan diikuti oleh pewaris serta terdapat kecenderungan inisiatif

berasal dari sumber amagang (pemijat/pengajar), untuk secepatnya melibatkan anggota keluarganya dalam kegiatan yang ditekuninya atau dititipkan kepada anggota keluarga yang memiliki keterampilan khusus (*vokasional skill*) dan *personal skill*.

Albert Bandura mengajukan sebuah teori yang disebut teori permodelan tingkah laku yang termasuk ke dalam teori kognitif sosial yang mirip dengan teori konstruktivisme. Bandura (1986) menyebutkan bahwa konstruktivistik memiliki asumsi yang senada dengan teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Teori pemodelan tersebut adalah teori masa magang kognitif (*cognitive apprenticeship*). Bandura (1977) telah mengembangkan enam macam metode mengajar yang didasarkan pada teori masa magang kognitif, yaitu: (a) pemodelan, (b) pembinaan, (c) perancangan, (d) artikulasi, (e) refleksi, dan (f) eksplorasi.

Pertama. Pemodelan, dalam proses pembeajaran Sangkal Putung yang diteliti adalah metode mengajar kecakapan yang dilakukan oleh pemijat/sumber magang dengan cara mendemonstrasikan (praktek) kecakapan memijat secara nyata sehingga dapat diamati oleh pemegang/pewaris sangkal putung.

Kedua. Pembinaan, pada proses pembelajaran Sangkal Putung yang diteliti adalah metode mengajar kecakapan yang dilakukan oleh sumber magang kepada pemegang dengan memberikan suruhan atau perintah dengan tujuan agar kecakapan pemegang semakin berkembang.

Ketiga. Perancangan, pada proses pembelajaran Sangkal Putung yang diteliti adalah tindakan yang dilakukan sumber magang/pemijat dengan memberikan tahapan pembelajaran sehingga pemegang dapat memposisikan di tahap mana dia dapat memulai atau mampu belajar dan tahapan yang sulit dilakukan.

Keempat. Artikulasi, pada proses pembelajaran Sangkal Putung yang diteliti adalah proses menyuarkan (melakukan dialog atau diskusi dan Tanya jawab) antara pemijat/sumber magang dengan pemegang/pewaris.

Kelima. Refleksi, pada proses pembelajaran sangkal Putung adalah membandingkan proses belajar kecakapan Sangkal Putung dengan para ahli (pemijat lain atau rrekan magang). Tujuannya adalah memperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan-perbaikan penguasaan kecakapan.

Keenam, Eksplorasi. Pada proses pembelajaran Sangkal Putung adalah memungkinkan pemegang untuk memecahkan masalah mereka sendiri melalui tahapan pembelajarn yang dilakukan oleh pemegang Sangkal Putung.

Pada hakikatnya pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan informal adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup di dasarkan atas prinsip emapt pilar, yakni: “learning to know” (belajar untuk memperoleh pengetahuan), “learning ti learn” (belajar untuk tahu cara belajar), “learning to do” (belajar untuk dapat berbuat atau melakukan pekerjaan), “learning to be” (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri) dan “learning to live together” (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).

Kearifan lokal dalam bidang kesehatan atau knowledge of local wisdom in health care yang dipelajari secara turun temurun salah satunya adalah kecakapan pengobatan tradisional sangkal putung. Pembelajaran kecakapan hidup yang ada pada pengobatan tradisional sangkal putung berdasarkan hasil penelitian Yuniar (2017) terdiri dari 5 (lima) tahapan yakni: tahap tumut, tahap njjal, tahap laku, tahap ngrapake, dan tahap jumeneng piyakbak. Sedangkan komponen pembelajaran yang ditemukan adalah: warga belajar, metode pembelajaran, alat pembelajaran, bahan pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, tempat dan waktu pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, pendidikan informal pada dasarnya adalah pengalaman hidup sehari-hari yang memberi unsur-unsur pendidikan kepada setiap orang. Unsur pendidikan tersebut bersumber dari interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya dan berlangsung sepanjang hayat. Lingkungan tersebut terutama adalah lingkungan sosial budaya, dimulai dari kehidupan keluarga hingga lingkungan kehidupan lainnya.

Kedua, pembelajaran tradisional yang turun temurun diwariskan melalui pendidikan informal yang menjadi suatu kearifan lokal di Indonesia di bidang kesehatan yaitu pengobatan sangkal putung, karena keberadaannya yang masih banyak diminati, dan perlunya untuk dikaji secara terbuka, agar bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat secara luas.

Kedua, pengobatan tradisional sangkal putung merupakan salah satu bentuk kearifan lokal berupa kecakapan dalam bidang kesehatan atau disebut knowledge of local wisdom in health care. Pembelajaran kecakapan hidup yang ada pada pengobatan tradisional sangkal putung terdiri dari 5 (lima) tahapan yakni: tahap tumut, tahap njjal, tahap laku, tahap ngrapake, dan tahap jumeneng piyakbak. Sedangkan komponen pembelajaran yang ditemukan adalah: warga belajar, metode pembelajaran, alat pembelajaran, bahan pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, tempat dan waktu pembelajaran.

Saran

Lembaga pendidikan formal dan Institusi pemerintah melalui jalur pendidikan informal memiliki peranan yang sangat besar sumbangsuhnya dalam membentuk watak dan karakter masyarakat, bahkan secara tradisional pewarisan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai isi dari kearifan lokal banyak diajarkan dan dipelajari melalui interaksi pendidikan informal. Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang diturunkan melalui konsep dan jalur pendidikan informal salah satunya adalah kecakapan hidup (*life skills*) dimana kecakapan hidup merupakan keterampilan yang dipergunakan untuk menunjang dan menyambung kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*. Bandung: Alfabeta.
- Axinn, Nancy W. 1976. *Non-Formal Education and Rural Development*. Monograph. Michigan: Michigan State University.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Clifft, NJ: prentice Hall.
- Coombs, P.H. 1973. *New Paths to Learning for Rural Children and Youth*. USA: International Council for Educational Development.
- Cheng, C.Y. 2002. *Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education: Multiple Theories, Presented at the 8th International Conference on Globalization and Localization Enmeshed (Searching for a balance in Education)* 22 November 2002, Bangkok, Thailand.
- Liliweri Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Kultural*. Yogyakarta: LKIS
- Moedzakir, Djauzi. M. 2015. *Pembelajaran Transformatif untuk Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Elang Emas.
- Promdee, S, dkk. 2014. *Thai Traditional Medicine: Applying Local Wisdom Knowledge for Health treatment of Cancer Patient in Aphinyana Aroal Khayasala Foundition Asian Cultureand Gistory*. Vol 6 No. 2: 2014. Hal. 126-133
- Sudjana, D 2000. *Pendidikan Luar Sekolah, Sejarah, Azas*. Bandung: Falah Production
- Sibarani, Robert. 2102. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (Atl)
- Yuniar, Dias, Putri. 2017. *Model Bi-Gnostic Learning Transfer Pengetahuan pengobatan Tradisional Sangkal Putung (Studi Pengembangan pada Rumah Pijat terapi di Desa Sumberejo Kecamatan Talun kabupaten Blitar)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Zimmerman, BJ & Schunk. 2003. DH. 2003. *Albert Bandura: The Scholar and His Contribution to Educational Pshycology*. Mahwah, NJ: Erlbaum
- Zulkarnain, dkk. 2015. *Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Tradisi Lokal Masyarakat Desa Sebagai Media Pendidikan Informal dalam Membina Keharmonisan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Malang sebagai Labsite Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang*. Laporan Penelitian LP2M UM.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DALAM PANDANGAN SAID NURSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DI INDONESIA

M. Khoirul Hadi al-Asy ari¹ dan Alivia Nadatul Aisyi²
Alumnus Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta²
Hadiari701@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepustakaan atau library Reseach , dalam penelitian ini ingin mengangkat tentang pendidikan Agama Islam multicultural dalam pandangan Said Nursi dan relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam di Indonesia, tema dan kajian ini sangat menarik melihat fenomena yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam bahasa ataupun berbagai macam Agama, wacana Multikulturalisme menjadi satu hal yang menarik dalam biangkai Agama-Agama dunia salah satunya adalah Agama Islam, dalam Agama Islam yang Rahmatal Lil alamin pastilah mempunyai kerangka pendidikan Agama Islam multicultural yang didalamnya mengajrkan konsep cinta kasih konsep kasih sayang dan kosep perdamaian. Sala satu Ulama yang terkenal toleran adalah Said Nursi dari Turki mencoba menggambarkan konsep agama Islam yang rohmatal lil alamin. Dalam peper ini ingin menjawab tiga pertanyaan penelitian: 1) Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam Multikulturalisme dalam pandangan Said Nursi? 2) Bagaimana pemikiran serta Historis dab biografi Hidup Said Nursi dan pengaruh pemikirannya. 3). Apa relevansinya pendidikan Agama Islam multikulturalisme ala Said Nursi dengan Pendidikan Agama Islam di Indonesia? Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan konten analisis, penelitian melakukan kajian mendalam terhadap karya-karya Said Nursi, mendiskripsika relevansi dengan pendidikan Agama Islam di Indonesia. Hasilnya antara lain: 1) Pendidikan Agama Islam multikulturalisme dalam pandangan Said Nursi; 2) biografi dan sejarah hidup Said Nursi, dan 3) Relevansi pemikirannya dengan pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Multikulturalisme, Said Nursi, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari yang namanya pendidikan, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar, dalam rumah tangga misalnya dalam pendidikan Anak sepenuhnya terserah pada kedua Orang Tua (atau keluarga Primer) dengan mematuhi patokan-patokan nilai yang telah ditetapkan oleh tradisi, kondisi ini mendorong dilakukan pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal yang direktornya tenaga-tenaga pendidik secara resmi, berbagai segi

seperti pendidikan gedung, guru, murid mata pelajaran dan lain sebagainya, dan apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Peningkatan mutu dalam pendidikan menjadi prioritas yang utama dan selalu dievaluasi serta dikembangkan, sedemikian perhatian terhadap lembaga menjadi sangat pengaruh dan dominan terhadap peserta didik dan yang berkaitan dengan hal tersebut.³¹

Jika kita melihat kebelakang bahwa dalam zaman kemas Islam sudah maju dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan serta dalam ilmu kebudayaan peradaban dan pemerintahan, dalam waktu itu pendidikan menjadi sangat di prioritaskan, mulai dari masjid- ke masjid sampai ke bentuk madrasah serta lembaga keilmuan sains serta keilmuan agama berkembang pesat pada waktu itu, dan sekaligus menghasilkan segi keilmuan yang sangat mumpuni didalam bidangnya mulai dari bidang Kedokteran Ibnu Sina³², kemuidan pakar Filsafat Ibnu Rusyd (W 1126 M.) bidangan Hukum Islam Empat Imam Mazhab, Syafi'I, Hambali, Hanafi, Maliki, serta pakar tafsir Ibnu Katsir , dan lain sebgainya para ulama ulama tersebut sangat mahir dibidangnya serta menguasai semua ilmu secara mendalam, salah satu hal yang menarik adalah kebanyakan mereka adalah alumni kajian keislaman yang kinsen dalam bidangnya masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pendidikan pada waktu itu sangat maju dan membuat peradaban Umat Islam disegani di seluruh penjuru Dunia.

Salah satu khazanah yang menarik untuk di kaji adalah lembaga keimuan yang berkembang di wilayah Turki Ottoman, atau Turki Usmani salah satunya adalah Ulama yang lahir dari Suku Kurdi yang sangat fenomenal dalam decade terkahir ini di menjadi wacana dalam berbagai pendektan keislaman serat pendidikan Islam yang lebih Humanis, salah satu tokohnya adalah Baiduzzaman Said Nursi salah satu Ulama termashur di zamannya di wilayah Turki pada waktu itu, salah satu karyanya yang

³¹ Baihaqi, *Pendidikan Anak Dlam Rumah Tangga Menrut Ajaran Islam* (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1989) halaman 3.

³² Nama lain Ibnu Sina adalah Abu Ali Al Husain Ibn Abdullah Ibn Sina. Di Eropa dia lebih dikenal dengan nama Avicenna. Lahir di sebuah desa Afsyaha di daerah Bukhara pada tahun 340 H (980 M). Ibnu Sina dibesarkan di daerah kelahirannya. Ia belajar Al-Qur'an dengan menghafalnya dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti astronomi, matematika, fisika, logika, kedokteran dan ilmu metafisika. Ketika umurnya belum mencapai 16 tahun sudah menguasai ilmu kedokteran. Pada waktu Nuh bin Mansur, penguasa Bukhara menderita sakit, banyak dokter yang tidak mampu mengobatinya, maka setelah diperiksa dan diobati oleh Ibnu Sina ia menjadi sembuh. Pada usia 22 tahun ayahnya meninggal, kemudian dia pergi ke Jurjan dan ke Chawarazm. Hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai di Hamadan. Di tempat ini ia menjadi seorang menteri. Ia meninggal pada tahun 428 H/1037 M pada usia 57 tahun. Ibnu Sina dibesarkan dalam lingkungan keluarga Syi'ah Isma'iliyah pada kurun kekacauan dan kemunduran Dinasti Abbasyiah; kurun menyaksikan Banu Buwaih menduduki Baghdad setelah melengserkan dinasti Abbasiyah, Ibnu Sina mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Qur'an, sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles yang telah dibacanya empat puluh kali. Pada usia 16 tahun beliau telah banyak mengetahui ilmu pengetahuan, sastra Arab, Fiqih, Ilmu hitung, filsafat bahkan ilmu kedokteran beliau pelajari sendiri. Profesiya dibidang kedokteran dimulai usia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur (976-997 M), salah seorang penguasa Dinasti Samaniyah. Banyak tabib dan para ahli tidak berhasil menyembuhkan penyakit itu. Sebagai penghargaan Ibnu Sina disuruh menetap di istana selama sang raja dalam proses penyembuhan. Tetapi, ia menolaknya dengan halus, dan hanya meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kerajaan yang kuno dan antik untuk mempelajari buku-buku yang ada di sana. Heris Hermawan, Yaya Sunarya, *Filsafat Islam*, (Bandung, CV.Insan Mandiri, 2011), Cet. Ke-1, hlm 45.

sangat menginspirasi dan menjadikan gerakan Said Nursi adalah kitab yang berjudul *Risalai-Nur* salah satu karya yang menjadi bacaan bagi pengikut Badiuzzaman Said Nursi.

BIOGRAFI BADIUSZAMAN SAID AN-NURSI

Badiuzzaman Said Nursi dilahirkan pada tahun 1877 M (1294 H) dari keluarga petani sederhana di kampung Nurs, Hizan masuk dalam distrik Bitlis di wilayah timur Turki.³³ Ayahnya bernama Mirza, maka nama lengkap Said Nursi adalah Said Mirza, tambahan nama Nursi dinisbahkan pada desa kelahirannya. Yaitu Nurs, sedangkan ibunya bernama Nuriyye yang keduanya merupakan anggota suku Kurdi.³⁴ Nursi merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara yakni, Durriye, Hanim, Abdullah Said (Nursi) Mehemd, Abdul Majid, dan Mercan.³⁵

Bagi kebanyakan Tempat di wilayah suku Kurdi, tidak mudah mendapatkan tempat belajar yang mudah dan permanen, termasuk Kampung Nurs, sehingga pendidikan warganya sudah di mulai sejak pendidikan Keluarga dan pendidikan di Masjid bersama dengan para Mollah (Ulama)³⁶ di dalam “*climate and culture*” intelektual seperti ini, jiwa keilmuan yang di miliki oleh Said Nursi tertanam dalam keluarga Mirza, ayahnya, yang sering mengadakan pertemuan para *Molla* dan dalam sebuah majelis Ta’lim di Rumahnya,³⁷ sekalipun demikian karena di Nurs tidak ada madrasah, maka pendidikan awal Nursi diperoleh dari kakaknyam Abdullah dengan belajar bahasa Arab, oleh karean Abdullah hanya dapat memebrikan pelajaran Bahasa Arab pada akhir pecan ketika pulang dari Madrasah, maka bersama kakanya Nursi jug aikut merantau keluar dari Nurs untuk belajar di pusat-pusat pengkajian di wilayah Tenggara Turki.³⁸

³³ Penanggalan Tahun kelahiran Said Nursi disepakati oleh kalangan Penulis, karena yang di pakai adalah dasar penanggalan Rumi yang berlaku pada masa Said Nursi lahir, yaitu 1293, tidak bisa di pastikan tahun tersebut masuk pada tahun 1876 atau 1877 dalam perhitungan Masehi. Tetapi yang Umum di pakai adalah 1293 (1877 M), lihat selengkapnya Sukron Vahide, *The author of The Risala-I Nur : Badiuzzaman Said Nursi*, (Istambul: Sozler Publication 1992) halaman 3. Periksa juga Said Nursi, *Sirah Zatiyyah*, Terjemahan Ihsan Qasim al-Sahili (Istambul : Matba’ Suzlar, 1998) 35.

³⁴ Secara geografis wilayah perbukitan yang berhawa dingin, pencarian warganya adalah bertani dan berladang sebagian besar penduduk adalah suku Kurdi yang tersebr di wilayah tenggara Turki dan menempati wilayah-wilayah yang secara ekonomi sangat marginal, lihat selengkapnya Helen Chapin Metz (ed) *Turki a Countri Study*, (London : Federa research Division, Library of Congres, 1996). Suku kurdi merupakan suku terbesar kedua di Turki dengan populasi 15 % (tahun 1988)

³⁵ Durriye, saudara paling tua dari Said Nursi meninggal pada waktu Perang Dunia I

³⁶ Lihat Sukron Vahide, *The Author*, perikas pula Urkham Muhammad Ali, *Said Nursi Rajul al-Qadr fi Bayat Ummah*, (Istambul: Syarikat al-Nasl li al-Tiba’ah, 1995) halamn 9. Perkembangan pendidikan turki dari awal di bawa pengasuhan para Hoca sampai dengan munculnya pengajaran yang modern dengan tetap mempertahankan supremasi pendidikan Agama, termasuk Karier Said Nursi, lihat selengkapnya pada Ricardh D. Robinson, “Mosquo and School in Turkey” *The Muslim Word* (Vol 1, LI, 1961, part I, 107-110, dan Part II 185, 188.

³⁷ Untuk melihat pendidikan awal Nursi periksa Ihsah Qasim alSahili, *Badi al-Zaman Said al-Nursi: Nadrah Ammah an Hayati wa athariht*, (Al-Magrib: Matba’at al-Najah al-Jadidiah 1999) halaman 19.

³⁸ Abdullah belajar dengan merantau keluar Nurs, dia, harus mengajr Said tipa akhir pecan, harus pulang ke Nurs, karena suasana yang tidak memungkinkan untuk pengembangan kelimuan Said,

Said Nursi memulai studinya dengan berguru kepada *Molla> Mehmed Efe>ndi* di Tag, yang emimpin madrasah, yang pada waktu itu Said Nursi baru berumur Sembilan tahun, dia tidak menyelesaikan studi di Madrasah tersebut karena sering di ganggu oleh murid-murid lainnya, sehingga ia kembali ke kampungnya dan hannya menerima pengajaran dari Abdullah, kakaknya, selama hampir satu tahun.³⁹ Untuk stud selanjutnya ia berguru kepada Syeikh Sayyid Nur Muhammad, seorang Syeikh dari *Na>qsa>ba>ndiyya>h*, pengaruh kesalehan seorang Guru itu sangat mendalam dalam diri Said Nursi, terutama dalam konsep zuhudnya, yang bersumber dari ajaran Tarekat Naqsabandiyah sehingga Said Nursi menjalankan parkatik-praktik Sufi dalam mendukung pendalaman sebuah Ilmu.⁴⁰ Sprit asketisme dalam perjumpaan Said Nursi dengan Rasulullah dalam mimpinya ketik adi Hizan, dalam mimpinya tersebut Said Nursi akandi beri anugrah Ilmu Al-Qur'an dengan syarat tidak boleh bertanya kepada siapapun,⁴¹ perpaduan antara “janji Rasulullah” dan kehidupan asketis tersebut mendorong Said Nursi untuk terus memperdalam ilmu.

Adapun orang yang pertama yang menimba Ilmu setelah peristiwa itu adalah Sayyed Muhammad Amin Affandi.⁴² Di Arvas, dari sinilah ia melanjutkan study kemadrasah Mir Hasan Veli di Mukus, kemudian ia melanjutkan belajar ke Madrasah Beyezit di bawah bimbingan Syeikh Mehmed Celali, di sini Nursi belajar serius memepdalam Ilmu-Ilmu Agama, karean hanya sebelumnya menerima pelajaran Nawau dan Sharaf.⁴³ Selama tiga bulan di Madrasah ini dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Said Nursi ia telah dapat merampungkan dan menyelesaikan Kitab-Kitab seeperti Jami' al-Jawami' karangan Taj al-Din Abd al-Wahab ibn Ali al-Subki SraKh al-Mwakib fi ilm Kalam karangan ad al-Din al-Iji, dan kitab Tuhfah al-Muhtaj fi sarh al-Minhaj karangan Ibnu Hajar al-Haitamy, dengan mengutip Shamir Muhammad Rajab, Mohamamed Zaid bin Mat menyatakan masa-masa di Beyezit adalah masa yang paling penting dalam study Said Nursi, masa Ini merupakan, meminjam Istilah Syamir, “masa pembentukan pemikiran” karean penguasanya terhadap kitab-kitab tersebut secar Tuntas.⁴⁴

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Said Nursi menerima ijazah diploma dari Syeikh Mehmed Celali yang di beri gelar kehormatan *Molla Said*.⁴⁵ Pengembaraan intelektualnya semakin meningkat dengan mempertajam kemampuan dengan

abdulalah menganjurkan Said untuk belajar merantau keluar Nurs, lihat Said Nursi, *Sirah Dhatiyyah*, halaman 43.

³⁹ Sukron Vahide, halaman 6.

⁴⁰ Vahide, *The Author*. Halaman 10-11.

⁴¹ Kisah lengkap tentang cerita ini adalah dapat di simak dalam Said Nursi, *Sirah Zhatiyyah*, halaman 45.

⁴² Dengan mengutip Shamir Muhammad Rajab, Muhammad Zaidin bin Mat menyatakan bahwa dia adalah seorang Ulama terkenal dengan edalaman Ilmu dan kesalehannya, dia pernah ditawari untuk menduduki jabatan Tinggi tetapi di tolaknya karena terlampau berat beban yang harus di embannya selaku pejabat tersebut, lihat selengkapnya dalam *Baiduzzaman Said Nursi : Sejarah Perjuangan dan Pemikiran* (Selanggor: Malita Jaya, 2001) 120 end Note no- 20.

⁴³ Vahide, *The Author*..... Perikasa Said Nursi *Sirah Zhatiyyah*..... 45.

⁴⁴ Zaidin, Bin Mat, *Bediuzzman* Halaman 11.

⁴⁵ Vahide, *The author* Halamn 11, gelar Molla merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada para sarjan dan cerdas cendekia yang sudah menyelesaikan pendidikan dalam bidang agama dan kecerdasan untuk mengungkapkan keilmuannya. Gelar ini sejajar dengan “Alim “ Atau Ulama, kata Mollah merupakan deriviasi dari kata Aramb Maula, yang berrti Tuan, atau master, penyebaran ungkapan Maula ini meluas di wilayah Turco Iranian, yang secara khusus di berikan

menguasai berbagai kitab, selain itu, pergaulan dengan paar cerdik cendikia dan kultur di sekelilingnya (Bitlis) menempa jiwanya menjadi orang dewasa dalam berpikir dan bertindak, hal inilah yang kemudian menntun *Ghirah* terhadap ilmu pengetahuan “a remarkable achievement” menurut Syarif Mardin, dengan alasan ini, ketiak di Sirt, meskipun ditolak oleh Said Nursi, Syeikh Fethullah Efendi, seorang Naqsabandiyyah termashur di Sirt, memberikan kepada Said Nursi dengan julukan Bediuzzaman (penghias, atau keajaiban zaman).⁴⁶ Said Nursi lebih suka menggunakan gelar al-Mashur (Said Mashur) dan baru pada tahun 1894 secara resmi dan sukarela menggunakan gelar Badiuzzaman yang selalu dipakai didepan Namanya. Said Nursi memang terkenal (mashur) dan dengan kemashurannya tersebut muncul berbagai masalah yang emaksanya berurusan dengan penguasa, di Bitlis, misalnya, setelah menyelesaikan Studynya dengang Syeikh Fethullah Efendi dia mengajar di Jami’ Quraisy, Namun, di kota itu juga ada atau terdapat Madrasah Syeik Amin Efendi, maka terjadi persaingan pengikut. Persoalan ini mengakibatkan Said Nursi keluar dari Bitlis dan menuju kota Shirvan. Kemudian dilanjutkan ke Tillo. Di Tillo Nursi berhadapan langsung dengan para penguasa setempat, karena seruan Said Nursi kepada Mustafa Fasa, seorang kepala suku di Tillo yaitu tepatnya adalah Suku Mirzan di Cirze, untuk menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Seruan ini dilakukan Nursi karena perintah Syeik Abd al-Qadir al-Jaylani.⁴⁷ Yang diperoleh melalui alam mimpinya.⁴⁸

Kemudian ketika di mardin setelah selesai dengan persoalan dengan Ahmad Pasa, Mursi juga harus berhadapan dengan Nadir Beik, penguasa Mardin (1895). Persolan ini dipicu oleh aktivitas politiknya.⁴⁹ Di Mardin Nursi bertempat tinggal di kediaman Seikh Eyyub Ensari dan mulai memberikan pelajaran di Masjid Jami’ Sehide, selain itu Nursi juga mengajar dan berdiskusi dengan para Ulama setempat tentang persolan Umat dan Dunia Islam, sebagaimana isu yang berkembang saat itu. Keterlibatan dalam dunia politik adalah karean naluri yang bernafaskan al-Qur’an untuk membebaskan Manusia dari penderitaan dan penindasan, selain itu pandangan dan semngta Pan Islamisme memng sediki mempengaruhi bagaimana adan cara pandangan yang dilakukan oleh Said Nursi pada waktu itu. Ketelibatan yang dilakukan oleh Said Nursi membawa dia harus diasingkan oleh Pemerintah kedaerah yang bernama Bitlis. Kemashuran di Bitlis juga mengantarkan Said Nursi kepada Umar PAsa gubernur Bitlis, Umar Pasa mengenalkannya karena kemashuran ilmu yang Said Nursi kuasai, meskipun pada awalnya Said Nursi menolak, akhirnya permintaan itu dipenuhi juga, Omar Pasa

⁴⁶ Vahide , *The Author* halamn 12.

⁴⁷ Adalah pendiri Tarikat al-Qodariyyah yang nama Aslinya adalah Muhy al-Din Muhammad ibn Abi Shalih Jangi Dost, lahir di Jilan antara Bagdad dan Wasit (wilayah Persia) yang merupakan keturunan Nabi dari garis Ayahnya ke al-Hasan, dia merupaka seorang Teolog dan Sufi dari Mazhab Hambali, karya karyanya adalah Futuh al-Ghaib, al-Qasidah, al-Ghawaitiyyah, al-Nujum a;-Zahirah, al-Fath al-Rabbani, lihat selengkapnya W, Braune, “ Abd al-Kadir al-Djilani” El, Vol, 1, 69-70.

⁴⁸ Untuk maslah mimpi tersebut secara lengkap lihat Said Nursi, *Sirah Dzatiyah* 55,periksa juga Vahide, *The author*.... Halaman 15.

⁴⁹ Salah satu bentuk dari aktivitas politik Said Nursi adalah dengan adanya pertemuan Said Nursi dengan pengikut Jamaludin al-Afgnani (1255/1839-1315/1897) ketika Nursi di undang oleh Sulat Abdul Hamid II tahun 1892 dan bertemu dengan salah satu tarekat Sanusiyah yang sedang mengobarkan semngta menentang kolonialisme di afrika utara, tahun 1915, di a-Nursi, aktif memikirkan nasib umat Islam yang menjadi bangsa terjajah oleh kekuatan Eropa Kristen, di mardin inilah diskusi tentang Umat Islam sering di lakukan oleh Said Nursi untuk menggalang umat Islam secara politis, lihat selengkapnya Vahide, *The author* 19.

menyediakan sebuah perpustakaan yang dapat digunakan oleh Said Nursi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama dua tahun berdiam di kediaman Umar Pasa, Nursi telah menyelesaikan beberapa kitab besar dan menghafal kitab *Matali al-anwar fi al-mantiq wa la-Hikmah* karya *al-Qa>di Sira>j al-Din a>l-Ijji*, dan kitab *mirqa>t a>l-wushul fi ilmi a>l ushu{l*, karya Muhammad Ibnu Faramuz al-Kasrawi.⁵⁰ Dengan kelengkapan ilmu tersebut Nursi semakin dikenal oleh para khalayak dan para pejabat yang ingin berguru kepadanya. Meskipun demikian Said Nursi masih bergeur kepada Sheikh Mehmed Kufri dan itu adalah Gur terakhir yang Sain Nursi belajar kepadanya.

Atas undangan Gubernur Van Hasan Pasa, tahun 1897 dia pergi ke Van, di kota ini ia banyak bergaul dengan para cendekiawan Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu Agama, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu modern seperti sejarah, geografi, serta fisika, biologi, geologi, kimia, astronomi, dan filsafat modern, atmosfer ini yang membuat perkembangan dan mendorong Nursi untuk menguasai disiplin ilmu-ilmu tersebut ia memanfaatkan perpustakaan Tahir Pasa, Gubernur Van, pengganti Hasan Pasa dan dalam forum diskusi dengan para cendekiawan ia sering mengadakan pertemuan di rumah Tahir Pasa, dan memperdalam ilmu-ilmu modern secara otodidak bahkan sempat menulis buku tentang al-Jabar setelah betul-betul menguasainya.⁵¹

Dengan penguasaan ilmu yang sedemikian rupa, baik ilmu agama maupun sains modern, Said Nursi semakin dikenal oleh banyak orang dengan gelanya *Badiuzzaman*, meskipun sebutan tersebut selalu dipakai sendiri oleh Said Nursi, ia tetap memebrikan pertimbangan terhadap sebutan tersebut. Said Nursi juga menyatakan bahwa dalam hal ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan modern Said Nursi mengetahui betul lemahnya kemampuan Umat Islam, khususnya di Turki, dalam penguasaan Ilmu,⁵² padahal bagi Said Nursi ilmu merupakan ujung tombak bagi kemajuan sebuah komunitas.⁵³ Ide ini dikembangkan oleh Nursi dengan berusaha mendirikan lembaga pendidikan Tinggi yang diusulkan kepada pemerintah dengan nama *medresetu z-Zehra*.⁵⁴ Meskipun tidak berhasil, karena terganjal kepentingan politik dari pemerintah, usaha Said Nursi terus dilanjutkan oleh dan menumbuhkan kesadaran bagi Umat Islam tentang kebenaran Agamanya.⁵⁵ Yang pada periode kemudian dituangkan dalam *Realia Nur*, bagi Said Nursi, kebenaran Al-Qur'an ada di peroleh dengan ilmu pengetahuan, dan kebenaran tersebut akan mampu melindungi umat Islam dari serangan yang mendiskreditkan Umat Islam. Ini menurut Vahide, tersalurkan dalam dua jalan yang pertama, *Medrezeti z-Zehra*, tetapi gagal dan yang kedua adalah jalur *Risalah* –

⁵⁰ Sirah Zhatiyah, Said Nursi... Halaman 60.

⁵¹ Buku-buku karangan Said Nursi tentang berbagai persoalan aljabar musnah ketika terjadi kebakaran yang melanda Van, lihat Said Nursi, *Sirah Zhatiyah*.... 64.

⁵²
⁵³ Zaidin bin Matt, *Bediauzzaman*..... halaman 20

⁵⁴ Ide pendirian Madrasah ini datang dari Said Nursi ketika Umat Islam terlalu lebar memisahkan ilmu Agama dengan ilmu –ilmu modern, dia ingin mencontohkan Universitas al-Azhar di Mesir yang memadukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu Umum dan mendirikan madrasah ini di wilayah Turki (Anatolia Timur). Obsesi Said Nursi adalah kemajuan pendidikan Umat Islam secara utuh, tidak mendikotomikan ilmu, proyek ini dinamakan dengan reformasi pendidikan (Educational reformasi) lihat selengkapnya di proposal Nursi tentang hal ini di Vahide, *The Author*.... 41-52.

⁵⁵ Kita di Van, Said Nursi diberitahu oleh Tahir Pasa tentang statemen Gladestoen, menteri jajahan kerajaan Inggris, untuk menaklukkan dunia Islam. Lihat selengkapnya Said Nursi, *Sirah Zhatiyah* 65.

Nur, yang baru di realisasikan pada periode “New Said” setelah perang Dunai I. dan di kota Van ini Said mengisi aktifitasnya dengan berbagai kegiatan yang bersifat sosila dan yang bersifat pendidikan tanpa melibatkan diri dalam dunai politik yang pada saat itu sushunya semkain meningkat.

RISALE-I NUR BERBICARA MULTIKULTURAL

Dalam karya Said an-Nursi, berupa Risala-I Nur bisa kita temukan berbagai konsep, mulai konsep pendidikan sampai konsep multicultural, dalam Risale-I Nur Said Nursi menyatakan bahwa dalam sebuah keimanan, menurut Said, Iman selalu meniscayakan konsep lain sebagai implikasi langsung dari transendensi, yaitu konsep syari’ah dan din, dalam pandangan Said Juga di jelaskan bahwa risalah kenabian itu adalah yang membawa kosep syari’ah ini, konsep syari’ah adalah sebuah manifesto konsep Tarnsendensi sedangkan konsep din adalah interpretasi dari konsep syari’ah itu sendiri. Dalam pandangan Said Nursi memahami Tuhan adalah sebagai Harf dan ism, sehingga bisa di pastikan bahwa Alam semesta ini di sebut dengan Shahid.⁵⁶ Ketika proses musahadah tersebut maka akan bersatunya antara transendensi dengan kosmos, upaya bersatunay ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa ulama dan sufi sebelumnya semisal ittihadnya Abu Yazid, atau wahdatul wujudnya Ibnu al_arabi, serta Hullulnya alHalaj. Atau seperti trinitas yang ada di ajaran Agama Nasrani atau Kristen, atau konsep moksa dalam agama dalam Agama Hindu. Tetapi yang dilakukan oleh Said Nursi adalah musahadah terhadap Ism Allah dimana adanya persaksian kosmos terhadap eksistensi Tuhan di alam semesta, ketika konsepsi paham demikain di kaitkan dengan dalam implementasi reel misalnya dalam konsep pruralitas. Dengan melakukan atau memahami konsep din dan Syari’ah dalam padangan Said Nursi kita di bawa dalam pemahaman dimana syari’ah adalah satu konsep yang di mungkinkan adanya “kesatuan” antara entitas-entitas din yang beragam dan satu sama lain yang berbeda. Bila pemahaman ini yang di pakai maka sebenarnya sesame orang beriman walaupun lain agama itu bisa melakukan persahabatan. Agama dalam pandangan Said Nursi sebagai sebuah being religion (ber-agama, menghayati nilai-nilai agama) dan bukan beragama atau having religion (beragama, memeluk agama). Dengan pendektan seperti ini dapat di turnkan bahwa dalam memebrikan pendidikan Agama nilai-nilai multicultural terbentuk dari persaudaranan antar umat yang beriaman dan hal ini di yakini oleh Said Nursi.

Dasar yang digunakan adalah surat al-Angkabut (29) 46. Yang artinya: dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".(QS al-Ankabut (29) : 46).

Penggunaan istilah mujahadah adlah penggunaan istilah yang melekat ketika terjadi dialog antara Umat Islam dengan Ahl al-Kitab, yang di dalamnya banyak sekali perdebatan yang mewarnai dilog tersebut dalam sejarahnya. Dan ketika wahyu itu turun.

⁵⁶ Ustadi Hamzah, *Paradigma Hubungan antar Agama (studi pruralitas Agama dalam pandangan Said an-Nursi dalam kitabnya Resale-I Nur)* (Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011) halaman 172.

Mujahadah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah dialog yang bagus dan baik, Said Nursi memang menghormati Agama lain dengan cara pernah berdialog dan melakukan bedah arguemntasi dengan pakar Agama lain. Dengan demikian upaya itu memperlihatkan bahwa dalam ajaran-ajaran Said Nursi memberikan gambaran tentang toleransi dan pruralitas yang beliau miliki dalam bersanding dengan agama lain.

Dalam fase pemikiran Said Nursi ada tiga fase yang di alami oleh Said Nursi, pertama adalah fase penguatan aqidah atau dapat dikatakan denngan fase Said Nursi Qadim fase ini terjadi pada waktu (1908-1923) dalam fase ini lebih membicarakan tentang pondasai dasar dari Risale-I Nur pada tataran aqidah. Sedangkan dalam fase kedua yaitu pada Said Jadid (1923-1949) dalam decade ini penulisan Resale-I Nur berkuat pada pengembangan pendidikan, awal dari adanya Said Jadid adalah karean pemerintah selepas melakukan kemerdekaan di bawah pimpinan musthafa kemal, turki di bawa dalam bentuk yang sangat berbeda dengan hal sebelumnya. Ide yang diusung oleh Musthafa Kemal adalah ide sekuler, dengan melakukan proses sekularisasi yang sangat sistematis adalah buh tangan dari teori-teori modernitas dan teori pembaharuan yang terjadi dengan menggunakan teori westernisasi dalam bidang sosial dan politik. Dalam tataran landasan negar Musthafa Kemal menggunakan landasan tata Negara ala Ziya Golklap.⁵⁷ Dalam penerapannya ada 4 katagori besar yang di gulung oleh Musthafa kemal *pertama*, Syimboic secularization, *kedua*, institutional secularization, *ketiga*, fuctional secularization, *keempat*, legal secularization, lembaga yang pertam dia gulung adalah Khilafah di ganti dengan republic, *kedua*, adalah lembaga Ulama dan urusan Agama, senjutnya pelarang Organisasi sufi, *ketiga*, pelarangan azan menggunakan bahasa arab dig anti dengan menggunakan bahasa turki. Dan hal itu sampai menjalar pada wilayah pendidikan dan dokrinasinya begitu kuat di wilayah pendidikan. Melihat fenomena tersebut akhirnya Said Nursi melakukan Uzlah berupa mengasingkan diri untuk memikirkan pendidikan Umat Islam Turki agar tidak terjerumus di dalam proyek besar yang di kembangin oleh Musthafa Kemal.

Secara faktual, fakta kehidupan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun adalah adanya kemajemukan realitas dalam wajah kehidupan manusia. Kemajemukan tersebut tidak saja meliputi kemajemukan budaya, etnis, adat, bahasa, dan warna kulit, tapi juga mencakup doktrin keyakinan seseorang, yakni agama yang dianutnya. Terlebih lagi dalam era pasca industri⁵⁸ atau era informatika, jarak geografis antara pelbagai negara dan bangsa yang berbeda dalam hal budaya, etnis, adat, bahasa, warna kulit, dan bahkan agama bukan lagi menjadi persoalan. Melalui jaringan komunikasi global yang menyentuh sebagian besar masyarakat dunia, teknologi tersebut telah memadatkan dunia menjelma sebuah kampung global (*global village*) dan memutus isolasi yang

⁵⁷ Dengan mengmbangkan teori sisologi Emile Durkheim, dia mengadopsi teori civil Religion. Menurut dia bahwa agama dalam sebuah Negara adalah merupakan wilayah privasi yang sama seklai terpisah dengan wilayah politik. Teori ini merupakan sebuah pengembangan dari teori distigtif dari pemisahan dari teori pemisahan Gereja dengan Negara. Di negar muslim, lembaga gereja di definsikan dengan seorang Ulama atau legislator. Konsekuensi logis dari penelitian ini adalah terpisahnya ulama dari Negara sehingga agama tidak mencampuri urusan negar ataupun sebaliknya.

⁵⁸ Istilah era pasca industri diadopsi dari Kuntowijoyo yang membagi tiga fase perkembangan perubahan masyarakat: masyarakat agraris, industri, dan pasca industri. Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), h. 141 & 219. Bandingkan dengan Alvin Tofler, *Gelombang Ketiga*, terj. Sri Koesdiyantiah (Jakarta: PantjaSimpati, 1992).

disebabkan oleh jarak dan waktu.⁵⁹ Konsekuensinya, secara spesifik setiap penganut suatu agama tidak bisa tidak bersentuhan dengan para penganut agama lain. Dewasa ini, nyaris tak seorang pun yang beragama tanpa berinteraksi dengan komunitas agama lain dalam pelbagai aspek kehidupan.

Setiap wilayah negara atau bangsa hampir dapat dipastikan tidak ada masyarakat tanpa pluralitas, yang terdiri dari para penganut berbagai agama yang berbeda-beda, kecuali di kota-kota eksklusif tertentu saja, seperti Vatikan, Makkah, dan Madinah. Bahkan negeri-negeri Islam Timur Tengah yang *nota bene* bekas pusat-pusat agama Kristen dan Yahudi, sampai saat ini masih mempunyai kelompok-kelompok minoritas Kristen dan Yahudi tersebut. Jadi selain kompleks Makkah dan Madinah (Hijaz) yang tidak boleh ada penduduk tetap penganut agama selain Islam, semua negeri Islam hingga hari ini mempunyai minoritas-minoritas Yahudi dan Kristen.⁶⁰ Demikian pula negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, seperti Amerika Serikat dan beragama Hindu seperti India, tetap memiliki minoritas-minoritas agama-agama lain semacam Islam, Yahudi, atau Buddha. Fakta tersebut memperlihatkan sebuah formulasi singkat yang diungkapkan oleh seorang sarjana terkenal Abraham Heschel, *No Religion is an Island*, yakni tidak ada lagi agama yang menjadi pula bagi dirinya sendiri.⁶¹

Ketika berbicara tentang kesalingtergantungan antaragama, menurut Heschel agama-agama dunia tidak lagi berdiri sendiri, tidak lagi independen, dan tidak lagi terisolasi dari pada individu dan bangsa. Energi, pengalaman, dan gagasan yang mulai hidup di luar batas agama tertentu atau semua agama terus menantang dan mempengaruhi setiap agama, sehingga tidak ada agama yang terpisah. Semuanya saling membutuhkan satu sama lain.⁶²

Persoalannya, pluralitas secara spesifik dalam pusa ragam agama tersebut tidak jarang diwarnai dengan benturan demi benturan antara pelbagai penganut agama yang berbeda satu sama lain. Di Bosnia umat-umat Ortodoks, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara, umat Katolik dan umat Protestan saling bermusuhan. Di Timur Tengah ketiga cucu Nabi Ibrahim—umat Yahudi, Kristen, dan Islam—saling menggunakan bahasa kekerasan. Di Sudan, senjata adalah alat komunikasi antara umat Islam dan umat Kristen. Di Kashmir, pengikut agama Hindu dan umat Muhammad saling bersitegang. Di Sri Lanka, kaum Buddha dan kelompok Hindu bercakara-cakaran. Di Armenia-Azerbaijan, umat Kristen dan umat Islam saling berlomba untuk berkuasa dengan cara destruktif.⁶³

Pada awal millenium ketiga, tragedi tersebut memuncak dengan pemusnahan World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat yang memakan begitu banyak korban tak bersalah. Meskipun bisa dicari pelbagai motif-motif selain agama, para pelaku terorisme modern tersebut mengaku diilhami dan dimotivasi oleh pemahaman

⁵⁹ Kishore Mahbubani, *Bisakah Orang Asia Berpikir*, terj. Salahuddin Gz (Jakarta: Teraju, 2005), h. 44.

⁶⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 178.

⁶¹ Charles Kimball, *Kala Agama Menjadi Bencana*, terj. Nurhadi (Bandung: Mizan, 2003), h. 63.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1998), h. 40.

tertentu atas agama (baca doktrin Islam).⁶⁴ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga sebagian ilmuwan, cendekiawan, dan teolog merumuskan konsep-konsep pluralisme agama. Wilfred Cantwell Smith mengklaim bahwa pluralisme agama merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Dari perspektif Cantwell Smith, semua doktrin agama harus bisa diaktualisasikan secara cerdas dan secara spiritual dalam masyarakat dunia yang damai oleh para pemeluknya masing-masing demi kemajuan bersama umat manusia.⁶⁵

Keniscayaan pluralisme agama tersebut dinyatakan oleh Cantwell Smith dengan bahasa yang cukup bersahaja namun sangat bermakna:

*"Mulai dari sekarang, kehidupan manusia, kalau memang dijalankan, akan terlaksana dalam konteks pluralisme agama. Ini terjadi pada kita semua; bukan hanya terjadi pada manusia umumnya ditingkat abstrak, tetapi juga pada Anda dan saya sebagai individu; manusia tidak lagi berada dalam periferi atau jauh dari sesamanya seperti yang terungkap dalam kisah para petualang. Semakin kita sadar semakin kita terlibat dalam kehidupan, maka kita semakin menemukan bahwa agama-agama lain itu merupakan sesama kita, rekan kita, saingan kita, sejawat kita. Penganut Konghucu, Hindu, Buddha, dan Islam tidak hanya kita temukan di gedung PBB, tetapi di jalan-jalan. Sedikit demi sedikit, bukan hanya peradaban kita dipengaruhi mereka, tetapi kita juga duduk minum kopi dengan mereka."*⁶⁶

John Hick, seorang pakar filsafat agama, menawarkan pandangan pluralisme bahwa tradisi-tradisi agama dunia lebih baik dipahami sebagai respons yang berlainan atas suatu Realitas Ilahi. Perbedaannya terdapat di antara umat beragama, yang menurut Hick muncul dari persepsi yang dikondisikan oleh konteks sejarah dan budaya.⁶⁷ Mendekati Hick, Paul Knitter berargumentasi bahwa setiap pemeluk agama menggunakan teleskop kultural-religiusnya masing-masing sehingga memiliki kekurangan tersendiri. Di sini, setiap pemeluk agama harus bijaksana untuk tidak memutlakan pandangannya dan bahkan mau melihat teleskop kultural-religius para penganut agama lain.⁶⁸ Demikian pula cendekiawan-cendekiawan lain yang menawarkan paradigmanya masing-masing mengenai prinsip-prinsip pluralisme agama dengan berdasarkan pada doktrin-doktrin fundamental agama mereka.⁶⁹ Pada konteks

⁶⁴ Para pelaku terorisme tersebut yang berjumlah 19 orang mengaku bahwa mereka memang telah diilhami dan dimotivasi oleh pemahaman tertentu atas Islam. Sang pemimpin, Muhammad Atta, sudah melakukan perencanaan matang yang diletakkan dalam kerangka yang lebih besar seolah-olah mereka telah siap "bertemu Tuhan." Kimball, *Kala Agama...*, h. 32.

⁶⁵ Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion* (Minneapolis: Fortress Press, 1991), h. 11.

⁶⁶ Paul Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, terj. Nico. A. Likumahuwa (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 4.

⁶⁷ John Hick, *Tuhan Punya Banyak Nama*, terj. Amin Ma'ruf dan Taufik Aminuddin (Yogyakarta: Interfidei, 2006), h. 9.

⁶⁸ Paul Knitter, *Pengantar Teologi ...*, h. 12-14.

⁶⁹ Huston Smith menguraikan doktrin-doktrin penting Hinduisme, Buddhisme, Confusianisme, Taoisme, Islam, Yahudi, dan Kristen. Lihat Huston Smith, *The World Religions* (New York: HarperCollins, 1991). Farid Esack mengelaborasi secara langsung prinsip-prinsip pluralisme dari Al-Quran. Farid Esack, *Quran, Liberation, and Pluralism* (England: Oneworld Publications, 1997). Dan untuk menyebut nama yang mewakili Indonesia adalah Nurcholish Madjid. Lihat dalam Ahmad Gaus

ini pula, salah satu solusi yang digulirkan sebagai fondasi prinsip pluralisme agama adalah wacana-wacana sufisme.

KAEDAH DAN METODE PENDIDIKAN RISALE AL-NUR BEDIUZZAMAN SAID NURSI

Pertama, menurut pandangan Nursi, untuk membangun pembentukan insan yang baik, pendidikan sebuah Negara atau institusi harus berlandaskan sebagaimana berdasarkan falsafah pembangunan insane dan falsafah pendidikan hikmah. Dan merujuk pada pembangunan diri yang menyeluruh. Jika di lihat konsep pembangunan diri meliputi dua pandangan *pertama*, pembangunan diri meliputi kerohanian, (SQ), intelektual (IQ), dan emosi (EQ). moral (MQ), sosial,(SQ). estetika (AQ), dan fisikal(PQ). Ia perlu mengembangkan berbagai kecerdasan. Ia perlu mengembangkan berbagai kecerdasan, sebenarnya untuk membangun kembali falsafah pembangunan Insan Kamil dan pendidikan hikmah atau filsafat Islam, kita tidak usah mengubah teks falsafah yang baru. Muhammad Said an-Nursi menyatakan pendekatan yang boleh diambil adalah dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang telah berkembang di Dunia Barat dan mencoba dengan konsep-konsep Islam.

Adapun *yang kedua* adalah meletakkan beberapa syarat penting dalam membangun sistem pendidikan yang dualism di dalam sebuah sistem pendidikan, antara pendidikan yang berdasarkan al-Quran dan Hadis yang di terjemahkan didalam kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah-sekolah dan seluruh perguruan tinggi, dan kurikulum itu juga menjangkau pendidikan yang bersifat sains dan matematis.⁷⁰ Hal itu juga di amini oleh Ghazali Darussalam bahwa dalam pendidikan Agama dan Sains tidak perlu di bedakan karean Ilmu bersumber dari al-Quran dan Hadis. Integrasi ilmu dan Agama, Agama sebagai sebuah cahaya ilmu pengetahuan dan berlandaskan al-Quran dan hadis.⁷¹

Ketiga, Said Nursi mencadangkan agar dengan menjalankan keseluruhan terhadap sistem pendidikan yang sedia ada. Ia mencoba mengubah pendidikan serta pembelajaran sejak dari kecil. Yaitu dimulai dengan peringkat sekolah rendah sampai peringkat sekolah yang atau perguruan tinggi, dan menjadi tumpuan dari segenap pembelajaran dengan AL-Quran. Tujuan pengambungan adalah untuk menjadikan manusia yang cermelang dunia akhirat. *Keempat*, Said Nursi menyatakan bahwa para pelajra di ajarkan untuk mencari kepakaran pada ilmu atau bidang studi yang diminatinya. Dan yang *kelima* adalah Said Nursi juga memberikan atau membuat prinsip psikologi pendidikan yang murni berlandaskan Islam, yang didalamnya adalah memuat proses pengajaran hendaklah berlangsung melalui komunikasi yang mudah di pahami oleh para pelajar, semua topic yang di ajarkan dengan contoh-contoh yang mudah, Said Nursi juga menekankan untuk memepelajari Sains sebagai aspek untuk mendalami Islam dan memantapkan Iman kepada Allah. Lebih dari itu Al-Quran mengandung maklumat-

(eds.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Vol. 3* (Bandung & Jakarta: Mizan & Paramadina, 2006), h. 2694-2712.

⁷⁰ Badiuszaman Said Nursi, *The Letter 1928-1932*, terjemahan Sukron Vahide (Istanbul: Nesriyet AS, 2000) halaman 102.

⁷¹ Ghazali Darussalam, *Kursus Tamadun Islam Dan Pendidikan Moral* (Kuala Lumpur Utusan Publication dan distribution,2000).

maklumat tentang Sains jauh lebih awal dari sains Moderen, dan hal itu menjadi landasan bagi pembelajaran Agama dan Ilmu Moderen.

Metode yang pertama adalah metode *Muhadharah* Dalam proses interaksi pendidikan biasanya Metode Ceramah paling sering dilakukan. Metode ini mudah dilaksanakan, mengingat guru pendidik tidak perlu banyak-banyak menyiapkan alat bantu, karena ketepatan penggunaannya hanya bergantung pada kesiapan guru menyampaikan materi pendidikan sudah cukup. Metode Ceramah yang bisa disebut pula Metode Pengajaran Langsung (*direct lecturing method*) dilaksanakan dengan satu arah (*one way communication*), transfer pengetahuan dari guru pendidik kepada anak didik. Metode Ceramah merupakan metode yang ampuh dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa, dan merupakan metode yang sering dipakai oleh guru di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Metode Ceramah cukup mudah dilakukan karena kurang menuntut usaha yang terlalu banyak dari seorang guru⁷². Kemudahan penggunaan metode ceramah ini yakni dalam proses pentransferan pengetahuan yang berada pada *line* komunikasi satu arah, yaitu dari guru sebagai pemberi pengetahuan kepada murid sebagai penerimanya. Metode ini identik dengan *ta'lim* yakni, metode mengajarkan pengetahuan kepada orang yang belum mengetahuinya.⁷³

Selanjutnya Said Nursi menawarkan enam pelajaran berharga dari “apotek al-Quran” sebagai sebuah obat penawar untuk menyembuhkan enam penyakit yang dahsyat ini. *Pertama, al-Amal* yaitu, harapan yang kuat (optimisme) dari rahmat Ilahi, di mana dengan optimisme ini dapat menyembuhkan penyakit “putus asa” yang disebut Said Nursi sebagai “racun yang mematikan” (*al-ya'su da'un al-qatil*). *Kedua, ash-shidq* yaitu kejujuran sebagai pondasi agama. *Ketiga, al-Mahabbat* yaitu cinta atas dasar keadilan dan kewajaran. Cinta merupakan suatu yang layak untuk dicintai dan permusuhan layak untuk dimusuhi; dengan begitu kejahatan permusuhan tidak ada artinya jika dihadapkan dengan kebaikan (*tadha' as-sayyiat wa al-hasanat*); dan *mahabbat* semacam ini menjadi obat penawar untuk permusuhan internal di kalangan umat Islam. *Keempat, ukhuwah al-Islamiyah* yaitu persaudaraan yang didasarkan ruh Islam untuk memperkuat tali ikatan batin antar-sesama umat Islam. *Kelima, as-Syura* yaitu musyawarah dengan menegakkan persatuan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syar'i.⁷⁴

Dalam kesempatan lain, Said Nursi pernah menyampaikan pengajaran kepada masyarakat ketika Said Nursi pergi ke Anatolia untuk menjelaskan seputar konstitusionalisme di antara suku di tempat itu, ia menjelaskan kepada para penggembala, petani, dan warga desa yang secara kebetulan bertemu dengannya tentang kebenaran *ukhuwah Islamiyah* berdasarkan al-Quran. Walaupun dalam kasus tertentu – dalam memberi ceramahnya tersebut—Said Nursi bermaksud mengalamatkan

⁷² Semiawan Conny dkk. 1987. *Pendekatan Keterampilan Proses: Bagaimana Mengaktifkan Siswa Dalam Belajar*, Jakarta: Gramedia, 1987) halaman 7.

⁷³ Thalib, M. 1996. *Metode Pendidikan Islam 30T* Jakarta: Gema Insani Press, 1996, halaman 16.

⁷⁴ Said Nursi, 1999b. *Mastbawi al-'Arabi an-Nuriy*. Penerjemah Ihsan Qasim Salih, Istanbul: Sozler Nesriyat AS halaman 452-515.

kebenaran itu kepada dunia Islam secara keseluruhan, bukan untuk kelompok tertentu saja:

*“If some problem emerged, Bediuzzaman used to try to illuminate or admonish those around him. During the 31st March incident, he delivered speeches and addresses to the scholars and student, and to factly the people and persuade them that what they were doing was wrong. He also gave speeches that adressed the Islamic world as a whole, rather than particular groups. His Damascus Sermon was one of these. Rather than giving speeches in specially organized circumstances, he would use this method whe the need arose to effer guidance to the people, for instance, when he travelled among the tribes of eastern Anatolia to inform them about constitutionalism. When walking in the countryside, he would explain the Qur’anic truth to the shepherds, formahands, and villagers he came across.”*⁷⁵

Metode Debat/Diskusi adalah pendidikan yang dilakukan Said Nursi dengan cara mendebat atau mengkritik pemahaman iman manusia yang menyimpang dari koridor Islam. Metode debat antara lain digunakan Said Nursi untuk menyangkal kekeliruan pemahaman masyarakat. Dalam *Shaiqal al-Islam* bab *Munazarat* banyak menampilkan metode ini. Misalnya, Nursi menulis tentang perdebatannya dengan masyarakat seputar *konstitusionalisme* mengenai konsep *hurriyat* (kebebasan), hak-hak kaum minoritas, *ukhuwah Islamiyah*, dan lain-lain, Menyimak kondisi tersebut Said Nursi merasa terpenggil untuk menjembatani kepentingan Pemerintah dan umat Islam di Turki dengan menentang pemikiran yang sesat dari Eropa dan menguatkan kembali tradisi kekuatan diri umat Islam di masa jayanya Usmani.

Metode *Yabyin* berarti cara mendidik Said Nursi dengan memberi penjelasan dan bukti (dalil) untuk mendapatkan hakikat yang terkandung dalam suatu ayat. Said Nursi menggunakan Metode *Tabyin*, salah satunya dalam pembahasan *The fourth point: Divine Name of Single’* dari Q.S. al-Ikhlâs ayat 1. Di penjara Aski Syahr dalam bulan Ramadhan, Said Nursi terinspirasi mengenai hakikat nama Allah *al-Fard* yang mencakup *al-Wahid al-Ahad* disebutnya sebagai *Tauhid Hakiki*. Dalam *Tauhid Hakiki* ini mengandung indikasi pembuktian:

”Dengan memanifestasinya nama *al-Fard* di letakkan di atas seluruh bumi ini lewat tanda ketauhidan yang spesifik dan stempel kekuasaannya yang jelas pada seluruh alam, spesies dan seluruh bagiannya. Contoh kesatuan bagian seluruh organ tubuh manusia di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Juga semua entitas alam bekerja sama, masing-masing berusaha menyempurnakan tugas yang lain. Bumi dan sebagainya menunjukkan Dzat yang memegang kendali sebuah unsur pasti memegang kendali semua unsur”⁷⁶

Metode *Qishah* adalah suatu cara mendidik dengan menyuguhkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersifat mendidik. Said Nursi dalam karyanya *Risale-i Nur* cukup banyal mengetengahkan kisah-kisah tertentu sebelum menjelaskan nilai-nilai

⁷⁵ Ibid halaman 516.

⁷⁶ Said Nursi, 2003a. *Risalah An-Nur; Said Nursi; Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Menikmati Takdir Langit: Lama’at)* Jakarta: Murai Kencana. 2003) halaman 517-572.

pendidikannya, misal kisah para Nabi. Menurut Gozutok, metode ini cukup efektif dalam memberikan pembelajaran yang sedang berlangsung: “*Stories are one of the most effective means in the direct lecturing method. They can be used to explain obscure matters and they are easily impresses on the mind. Religious stories from the Scriptures are even more powerful. They always help those who listen to them or read them*”⁷⁷

Berikut ini dapat disimak contoh *Metode Qishah* yang digunakan oleh Said Nursi dalam *Risale-i Nur*, dalam Cahaya Pertama tentang Munajat Nabi Yunus AS. Nursi menceritakan bahwa munajat Nabi Yunus AS adalah salah satu munajat paling agung dan paling indah serta salah satu media paling manjur agar do’a dikabulkan oleh Allah SWT Dikisahkan, bahwa nabi Yunus AS dilemparkan ke laut lalu ditelan ikan besar dan diombang-ambing ombak malam yang pekat pun menurunkan tirainya. Nabi Yunus AS pun ditimpa ketakutan dan terputuslah sebab-sebab pengharapan. Sirnalah angan-angan. Lalu dengan merendahkan diri dan mengikhlaskan hati beliau melantunkan doa yang lembut memelas hati. :

“*Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.*” [QS. Al-Anbiyah (21): 87].

Metode *Mukatabah* (*membuat surat-Menyurat*) adalah cara mendidik dengan membuat surat-menyurat atau tulisan-tulisan, kemudian mengumpulkan tulisan tersebut untuk menjadi pedoman pembelajaran. Metode ini dilaksanakan oleh Said Nursi dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*) antara pendidik dengan anak didik. Seperti penuturan dari salah seorang murid-murid istimewanya yang juga orang pertama menulis buku-buku *Risale-i Nur*. “Kami pergi bersama guru ke tempat-tempat yang sunyi, ia duduk di satu tempat dan melihat pada satu titik tertentu, kemudian ia mendiktekan kepada saya dengan cepat sekali dan saya pun menuliskannya dengan cepat pula. Kemudian ia memberi isyarat kepada saya agar menulis dan jangan pernah melihat kepadanya di mana ia sedang berkonsentrasi kepada tempat khusus itu. Kemudian ia berkata: Berhenti. Kemudian ia meminta agar saya menulis kembali”⁷⁸

Metode tematik yang digunakan Said Nursi untuk menafsirkan ayat-ayat yang mengandung tema bahasan tertentu. Tematik berarti pula pembagian judul-judul bahasan sesuai dengan corak tafsir *Risale-i Nur* sebagai *Tafsir Mauslu’i*. Dari koleksi *Risale-i Nur* terkandung Enam Tema Besar, yakni Enam Rukun Iman. Seperti pada dalam Pertanyaan Kedua yang mengandung tema tentang Keimanan Kepada Hari Akhirat, yang meliputi hakikat Kematian, Kehidupan Sesudah Mati, Alam Kubur, Alam Keabadian, Keadilan Allah SWT (Adzab), Syurga dan Neraka, dan lain-lain. Dari tema ini, antara lain dicontohkan tentang Hakikat Kematian, Diisyaratkan dalam ayat-ayat al-Quran misalnya: “*Dia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya*” (Q.S. 67: 2). Kematian dalam ayat tersebut secara *tafsiriyah* mengandung makna yang dalam, tidak sekedar terjemahan istilah bahwa kematian adalah berpisahny ruh dari jasad manusia.

⁷⁷ Gozutok, Sakir 2002. *The Risale-i Nur in The Context of Educational Principles and Methods (The Paper Presented In The Fifth International Symposium On Bediuzzaman Said Nursi)*, Istanbul: Sozler Publication halaman 405.

⁷⁸ Salih, Salih, Ihsan Kasim 2003. *Said Nursi Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Membebaskan Agama dari Dogmatisme dan Sekularisme)*, Jakarta: Murai Kencana. Halaman 131.

Metode *Tamtsil* berarti metode pendidikan yang diterapkan oleh Said Nursi melalui perumpamaan (misal). Metode ini banyak sekali disajikan oleh Said Nursi dalam kitabnya. Di antaranya, dalam karyanya *Menjawab Yang Tak Terjawab, Menjelaskan Yang Tak Terjelaskan* (Alih bahasa dari al-*Mmktebeh* (*The Letters*)), yang memuat 29 surat umumnya menggunakan pendekatan analogis,. Umpamanya ada 5 Surat Pertama, mengenai Tingkat Kehidupan, Rahmat dalam Kematian, Cahaya dari Keindahan al-Quran, Seberkas Siar Perwujudan Allah SWT, dan Pelabuhan Terakhir dalam Perjalanan Rohani.⁷⁹

Metode *I'tibar* (*Mengambil Pelajaran dari Suatu Kejadian atau Kisah*) adalah cara mendidik yang dilakukan said Nursi dengan mengambil pelajaran (hikmah) terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang berasal dari dalam diri manusia maupun dari luar dirinya. Metode *Uswah* (*Memberi Keteladanan*) adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik (*uswah al-hasanah*) berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Contoh tauladan ini merupakan pendidikan yang mengandung nilai *paedagogis* tinggi bagi peserta didik. Pendidik yang berkarakter ideal—yang komitmen penuh dengan standar al-Quran dan as-Sunnah—sekarang sudah sulit dijumpai. Tetapi keinginan para guru pendidik untuk meraih karakter ideal itu banyak caranya, seperti kriteria unggul dan aspek pengetahuan dan akhlak mulia. Guru pendidik berkarakter berdasarkan pandangan Said Nursi di atas akan mampu bermain peran dalam mewariskan budaya Islam dan mengembangkannya kepribadian manusia anak didiknya sesuai idealitas Islam pula.

Menurut Said Nursi pendidik harus berkonsentrasi penuh menjalankan kewajiban mendidik, jangan terlibat dalam urusan politik, karena dengan keadaan demikian murid akan mencontoh gerak-geriknya. Begitu pun murid tidak diperkenankan terjun ke dalam arena politik, karena urusan politik akan membebani mereka dengan segenap urusan, sementara tugas murid dalam proses pendidikan merupakan upaya mengatur diri sendiri, belum pada tugas kepresidenan. Belajar harus memiliki visi yang jelas berdasarkan minat, bakat, dan kondisi yang mendukung. Untuk itu pelajar lebih difokuskan pada spesialisasi atau konsentrasi dalam penguasaan bidang yang mereka inginkan, dan dimotivasi oleh semangat penyelidikan ilmiah (*scientific inquiry*) melalui kegiatan intra dan ekstra kelas.

TOLERANSI AGAMA-AGAMA: PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Secara doktrinal, sebenarnya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap-sikap penuh pengertian dalam masyarakat majemuk sudah ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran: “*Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia jadikan manusia ini umat yang tunggal. Namun (Tuhanmu menghendaki) mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang mendapat rahmat Tuhanmu. Dan memang untuk itulah Allah menciptakan mereka.*”⁸⁰

Menurut Nurcholish Madjid, melalui firman suci di atas, dapat diperoleh beberapa penegasan, yaitu (1) pluralitas masyarakat manusia sudah merupakan kehendak dan

⁷⁹ Said Nursi, 2003b *Risalah An-Nur; Said Nursi; Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Menjawab yang Tak Terjawab, Menjelaskan yang Tak Terjelaskan)*, Jakarta: Murai Kencana halaman 1-28.

⁸⁰ QS. Hud: 118-119.

keputusan Allah; (2) pluralitas itu senantiasa membuat manusia berselisih pendapat sesamanya; (3) namun orang yang mendapat rahmat Allah tidak akan mudah berselisih karena ia akan bersikap penuh pengertian, lemah lembut, dan rendah hati kepada sesamanya; (4) persetujuan sesama anggota masyarakat majemuk karena adanya rahmat Allah ini pun ditegaskan sebagai kenyataan diciptakannya manusia, jadi merupakan sebuah hukum Ilahi.⁸¹

Beberapa prinsip yang ditarik dari ayat suci tersebut yang menggambarkan realitas kehidupan manusia yang bersifat pluralitas dan sudah menjadi desain Tuhan bisa dijadikan pijakan bagi pluralisme. Pluralisme di sini berarti sebagai suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.⁸²

Akan tetapi, rumusan bagi pluralisme tersebut masih bersifat teologis-eksoterik, yang sangat membuka ruang penolakan dari para penganut agama lain.⁸³ Begitu pula ketika para penganut keyakinan lain di luar Muslim yang hanya menawarkan pluralisme secara teologis-eksoteris dari sudut pandang keyakinan mereka, boleh jadi akan terjadi penolakan bahkan benturan prinsipil dengan para penganut Muslim dan lainnya. Melalui argumentasi di atas, di sini dibutuhkan sebuah tawaran yang lebih menukik dan fundamental sehingga dapat diterima oleh sebagian besar antar umat beragama. Tawaran tersebut mesti berhubungan dengan dimensi Pendidikan Multikultural dengan landasan hubungan antar Agama, tema-tema hubungan antar agama adalah tema klasik yang selalu hangat di bahas di dalam kajian-kajian keislaman maupun dalam kajian pendidikan, memang asalnya hubungan antar agama adalah bahasan pada wilayah agama, tetapi seiring waktu persoalan hubungan antar agama tidak sesalu menjadi antar agama atau wacana keagamaan saja tetapi juga wacana pendidikan, karena dengan pendekatan pendidikan yang multikultural maka adanya hubungan antar agama. Bahwa pengaruh dunia luar ekonomi dan sebgainay serta budaya juga sangat ikut berpengaruh, dalam bahasa lain bahwa pendidikan Multikultural adalah pendidikan bagi “kampong Global” jika kita merujuk sejarah Islam bahwa pada masa Nbai kehidupan multicultural telah di mulai sejak Nabi lahir dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Agama, ketika pendeta Buhayra melihat tanda-tanda kenabian Muhammad.⁸⁴ Begitu pula ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul dan Nabi ketika memimpin Kota Madinah Beliau melakukan perjanjian yang berbasis pada kekayaan multicultural. Nabi Muhammad lebih mengedepankan kesatuan dari perbedaan yang ada di kota Madinah. Di Madinah persentuan antara Islam dan yahudi berjalan apresiatif dan membangun hal inilah yang nantinya ingin di *break down* dalam bidang pendidikan Agama Islam yang berbasis Multikultural.

Signifikansi Agama dalam ranah sosiologis untuk menciptakan kondisi yang harmanis adalah possible, terciptanya relais antar agama adalah kunci terjadi

⁸¹ Budhy Munawar-Rachman (eds.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Vol 3* (Bandung: Mizan, 2006), h. 2707.

⁸² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. Ixxv.

⁸³ Pemaknaan pluralisme yang bersifat teologis dari prinsip-prinsip qurani tersebut juga dilakukan oleh sebagian pemikir Muslim lain, yaitu Farid Esack. Lihat Farid Esack, *Qur'an, Liberation & Pluralism, Bab 4,5, & 6* (England: Oneworld Publications, 1998), h. 114-203.

⁸⁴ Al-Baihaqi, *Dalail al-nubuwwah* .

harmonisitas antar Agama dan masyarakat. Jika kita mengacu pada awal sejarah Islam di Madinah hal ini adalah contoh yang baik, pola relasi pendidikan antar kelompok adalah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bentuk massif toleransi dan pendidikan multicultural membentuk solidaritas kelaurga beriman,⁸⁵ sesama orang beriman adalah sama di depan Tuhan-Nya masing-masing. Jika para penganut Agama saling sadar akan keberimanan mereka itu membentuk pentingnya solidaritas kelompok beriman. Dalam kacamata pendidikan hal itu bisa diajarkan dengan pendidikan multicultural dengan mengedepankan toleransi antar kelompok beriman, sesama murid yang saling beriman kepada Tuhan-Nya masing-masing ditanamkan bahwa sama-sama beriman pastinya harus saling toleransi dengan mengartikan unsur-unsur perdamaian keindahan kebersamaan dalam menjalin hubungan antara kelompok beriman. Said Nursi berdasarkan hal ini menegaskan :

As for Quranic Wisdom, its points of support is "truth" instead of force, it takes 'virtues and God's pleasure' as its aims in place of benefits, it takes the principle of mutual assistance as the principle on life in place of the principle of conflict. And it takes the ties of religion, class, and country to be the ties binding communities, its aims to form or barrier against the lust of the soul, urge the spirit to sublime matter, satisfy the high emotions, and urging man to the human perfections, make him a true human being. And the mark of the truth is accord. The mark of virtue is solidarity, the mark of the mutual assistance is hastening to assist one another the mark of religion is brotherhood an attraction and the mark of reigning in and tethering the soul and leaving the spirit free and urging it towards perfection is happiness in this world and next.⁸⁶

Bahwa etos kesadaran relasi yang baik dengan komunitas agama-agama lain telah menjadi semacam "worldview" yang diajarkan oleh Rasulullah.⁸⁷ Meskipun demikian, Islam mengajarkan sikap kritis terhadap bentuk-bentuk "deviasi nilai" yang terjadi pada komunitas Agama-Agama lain.⁸⁸ Dalam wilayah sosiologis, apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah itu di rumuskan oleh Said Nursi adalah mengkritik perilaku keagamaan Agama-Agama lain yang tidak berbasis pada Rahmat Allah, atau keberlanjutan Syariah Nabi. Hal ini menjadi senjata empuk terjadinya perang saudara sesama agama Ibrahimian terjadi perang Salib adalah bentuk dari cara mendidikan Agama yang tidak berbasis multicultural ala Nabi Muhammad. Said Nursi adalah penggerak pendidikan multicultural yang pada waktu itu hidup pada dimensi dua wilayah yaitu Turki dan sekularisme, Said Nursi juga menjadi saksi sejarah Sekularisme Turki yang tanpa ampun mengampusti Agama dari ranah public, pemikiran pendidikan multicultural ala Said Nursi adalah berupaya mengembalikan Agama Islam atau pendidikan Agama Islam dalam sendi-sendi pendidikan Nasional dengan mengedepankan pendidikan multicultural. Memang Said Nursi tidak bersentuhan secara langsung dengan tarik ulur dinamika paradigma Hubungan antar agama yang muncul di barat. Tetapi Said Nursi bersinggungan langsung dengan dinamika paradigmatic yang

⁸⁵ Kita bisa baca lebih lanjut dalam Ibnu Khaldun, dalam *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986) halaman 187.

⁸⁶ Sukron Vahide..... halamn 146.

⁸⁷ Hal ini terdapat dalam firman Allah yang ada di dalam al-Quran.

⁸⁸ Dalam Sutra at-Taubah (9) : 31.

berkembang di Eropa yang menjadi landasan pemikiran hubungan antar Agama yang berkembang pada masa-masa sesudahnya. Landasan yang diungkapkan oleh Said Nursi adalah apa yang telah dikembangkan oleh Nabi Muhammad *pertama*, Pendidikan Agama Islam yang berbasis Rahmatilil alamin, *kedua*, Agama Islam berjiwa Toleransi, *ketiga*, Agama Islam yang kasih sayang, tiga nilai ini adalah nilai dasar Multikulturalisme dalam pandangan Said Nursi.

Berkaitan dengan Pendidikan Agama di Indonesia, masih sangat jarang sekali Pendidikan Agama di Indonesia yang berbingkai dengan pendidikan yang berbasis pada pendidikan Agama Islam yang multicultural, sebenarnya dalam pendidikan Pesantren hal itu diajarkan tetapi masih dalam lingkup sesama penganut Agama Islam bukan kepada non-Muslim. salah satu ajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural yang berkembang di Indonesia adalah adanya sekolah Gulen Movement yang pendiri yayasan tersebut adalah perpanjang lidah dari Said Nursi, pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Sekolah tersebut mencerminkan pemikiran Said Nursi yang diramu dengan baik oleh Fethullah Gulen dan di implementasikan dalam pendidikan.

Gulen mengembangkan Pendidikan Integratif dalam pengembangan pendidikan, yang paling ditekankan adalah kesalehan seorang Islam. Dan tetap berpegang teguh pada Ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pemahaman Umat Islam yang umum dan berkembang pada waktu itu. Umat Islam meyakini bahwa ilmu Pengetahuan “barat” semata hanya milik barat. Gulen melalui gerakan pendidikannya dan ingin menciptakan generasi Islam yang lebih baik di masa yang akan datang dengan melakukan simboisis mutualisme antara ilmu Agama dan Ilmu Umum. Gulen Menyatakan “*as For Man, Real life is accompanied by Knowledge and education: Those neglating learning and teaching, even if the may be alive, can be considered as dead because the aim’s of man creation consistsof seeing, understanding, and teaching the learned Knowledge to others.*”⁸⁹ Generasi inilah yang diharapkan Gulen bisa duduk di pemerintahan sehingga mereka punya visi yang benar untuk menggapai kesejahteraan rakyat.

Gulen berpendapat bahwa masalah mendasar dalam Umat Islam dewasa ini adalah masalah Pendidikan, kondisi ini yang menjadikan Umat Islam jauh tertinggal untuk itu membangkitkan Umat Islam dari keterpurukan adalah dengan menyebarkan pengetahuan dengan jalan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Dengan jalan pendidikan inilah akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan masyarakat dunia.⁹⁰ Pendidikan bermutu adalah salah satu jalan penting yang harus di tempuh oleh Umat Islam. Gulen mencoba mengembangkan tiga unsur penting dalam ilmu pengetahuan, *pertama* ilmu Alam, *kedua*, ilmu sosial, dan *ketiga*, ilmu agama. Ketiga dimensi itu penting untuk ditanamkan pada masyarakat Muslim. Gulen mempercayai bahwa modernisasi pendidikan yang terjadi di barat seharusnya di barengi dengan ilmu etika dan moral, sedangkan Islam malah sebaliknya, moral berjalan tetapi ilmu mengalami kemandekan. Gulen mencoba mengkawinkan kedua problem tersebut dalam

⁸⁹ Bekim Agai, “*Gulen Movement’s Islamic Ethic of Education.*” Dalam M. Hakan Yakuz dan John L-Espito (ed) *Turkish Islam and the Seculer State : The Gulen Movement*, New York: Syracuse University Press, 2003, halaman 48.

⁹⁰ Amin Abdullah, “Fethullah Gulen and Character Education in Indonesia,” Makalah di presentasikan dalam *The Significance of Education for The future : The Gulen Model of Education*, Jakarta, 19-20 oktober, 2010.

satu bidang kemajuan umat, dengan mengkawinkan antara kemajuan barat dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Gulen juga menyatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan bukanlah dua dimensi yang berjalan sendiri-sendiri akan tetapi dua kutub yang saling melengkapi. Pandangan dunia (world view) yang berbasis agama dapat menyediakan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif untuk mendukung dan member makna pada pendidikan yang sekuler yang di kembangkan di barat. Gulen mengajak para murid untuk melakukan rasionalisasi bahwa ada hubungan yang jelas pada relasi agama dan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan menurut Gulen adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat⁹¹ pandangan Gulen hampir sama atau saling terkait dengan pandangan Imam al-Ghazali.

Al-ghazali menyatakan:

*“Dan sesungguhnya engkau mengetahui bahwa hasil pengetahuan adalah mendekatkan diri kepada Allah, menghubungkan diri dan berhampiran dengan ketinggian malaikat, demikian itu di akhirat, Adapun di dunia adalah Kemuliaan, Kesabaran, dan Penghormatan menurut kebiasaannya.”*⁹²

Ungkapan tersebut menunjukkan Fethullah Gulen dan al-Ghazali sangat memperhatikan kehidupan Dunia dan akhirat sekaligus. Sehingga terciptanya kebahagiaan bersama di Dunia dan di Akhirat, dari sini bisa di pahami bahwa menurut dua pemikir besar ini seorang Muslim tidak boleh memandang dunia dala satu sisi saja yaitu Dunia saja atau akhirat saja, tetapi harus memperhatikan kedua-duanya. Sehingga yang diajarkan di sekolah Gulen adalah terbuka terhadap non-muslim, di Indonesia sendiri memang terjadi hal tersebut. Sekolah-sekolah Gulen yang ada di Jakaa dan Joga memberikan tempat dan layanan kepada Non muslim sehingga mereka mendapatkan pendidikan tanpa melihat latar belakang Agama Mereka. Gulen adalah murid Said Nursi yang mengamalkan Pendidikan Agama Islam multicultural dalam Resale-Nur.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengasilkan *pertama*, pandangan Said Nursi tentang Pendidikan Islam adalah sangat toleran, Said Nursi sebagai sosok Ulama yang menentang Sekularisme di Negara Turki adalah upaya Said Nursi dalam menjaga bagaimana pembaharuan tidak keblabasan dengan tetap mengajarkan Pendidikan Agama Islam dan Tauhid dalam Kurikulum, *kedua*, bahwa dalam pemikiran Said Nursi kental dengan Toleransi dan berpegang teguh pad Ketauhidan Islam. *Ketiga*, bahwa pemikiran toleransi dan multicultural dalam pendidikan Agama Islam Said Nursi di bangun dan di kembangkan dalam bentuk sekolah-sekolah di seluruh Dunia oleh salah satu Muridnya yaitu Fethullah Gulen yang mempunyai yayasan Gulen Movment dan tersebar di seluruh dunia salah satunya ada di Indonesia. Sistem yang diajrkan adalah sistem Inegrasi antar Ilmu dan Agama yang membikai Agama yang bersifat Rahmatal lil alamin.

⁹¹ M. Fethullah Gulen, *Olcu Veya Yodalki Isiklar*, (Istambul: Nil Yayinlari, 2003) halaman 25.

⁹² Imam Al-ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* (Istambul: Beyazit: Cile Yayinevi) halaman 14.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, 2010. "Fethullah Gulen and Character Education in Indonesia," Makalah di presentasikan dalam *The Significance of Education for The future : The Gulen Model of Education*, Jakarta.
- Agai, Bekim, 2003. "*Gulen Movement's Islamic Ethic of Education.*" Dalam M. Hakan Yakuz dan John L-Espito (ed) *Turkish Islam and the Secular State: The Gulen Movement*, New York: Syracuse University Press.
- Al-Attas, Syed M. Naquib 1998. *Filsafah dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, Wa Mohd Wan Daud2
- Al-Faruqi, Ismail Raji 1982. *Tauhid*, Bandung: Pustaka
- Al-Ghazali, Abu Hamid 2003. *Tahafut al-Falasifah*. Penerjemah: Ahmad Maimun, Yogyakarta: Islamika.
- Al-Syaibany, Omar Muhammad Al-Thoumy 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Sahili, Ihsah Qasim, 1999. *Badi al-Zaman Said al-Nursi: Nadrah Ammah an Hayati wa athariht*, Al-Magrib: Matba'at al-Najah al-Jadidiah.
- Ali, A. Mukti 1989. *Metodologi Penelitian Agama; sebuah Pengantar*, Taudik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ali, Urkham Muhammad, 1995, *Said Nursi Rajul al-Qadr fi Bayat Ummah*, Istanbul: Syarikat al-Nasl li al-Tiba'ah.
- Aly, Hery Noer 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Arifin, Muzayin 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (islam dan umum)* Jakarta: Bumi Aksara
- Baihaqi, 1989, *Pendidikan Anak Dlam Rumah Tangga Menurut Ajaran Islam* Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Budhy Munawar-Rachman, 2006, (eds.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Vol 3* Bandung: Mizan.
- Conny, Semiawan dkk. 1987. *Pendekatan Keterampilan Proses: Bagaimana Mengaktifkan Siswa Dalam Belajar*, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI 1993 *Al-Quran dan Terjemahannya* Surabaya: Surya Cipta Aksara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Darussalam, Ghazali, 2000. *Kursus Tamadun Islam Dan Pendidikan Moral* Kuala Lumpur Utusan Publication dan distribution.
- Esack, Farid, 1997. *Quran, Liberation, and Pluralism* England: Oneworld Publications.
- Al-Ghazali, Imam, tt. *Ihya 'Ulumuddin* Istanbul: Beyazit: Cile Yayinevi.
- Gulen, M. Fethullah, 2003. *Olcu Veya Yodalki Isiklar*, Istanbul: Nil Yayinlari

- Gozutok, Sakir 2002. *The Risale-i Nur in The Context of Educational Principles and Methods (The Paper Presented In The Fifth International Symposium On Bediuzzaman Said Nursi)*, Istanbul: Sozler Publication
- Hermawan, Heris, Sunarya, Yaya, 2011 Sunarya, *Filsafat Islam*, Bandung, CV.Insan Mandiri.
- Hamzah, Ustadi, 2011. *Paradigma Hubungan antar Agama (studi pruralitas Agama dalam pandangan Said an-Nursi dalam kitabnya Resale-I Nur)* (Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hick, John, 2006. *Tuhan Punya Banyak Nama*, terj. Amin Ma'ruf dan Taufik Aminuddin. Yogyakarta: Interfidei, 2006.
- Kimball, Charles, 2003, *Kala Agama Menjadi Bencana*, terj. Nurhadi Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid* .Bandung: Mizan.
- Khuldun, Ibnu, 1986. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Knitter, Paul, 2008. *Pengantar Teologi Agama-Agama*, terj. Nico. A. Likumahuwa Yogyakarta: Kanisius.
- Metz, Helen Chapin (ed), 1996, *Turki a Countri Study*, London: Federa research Division, Library of Conggres.
- Madjid, Nurcholish, 1995. *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Paramadina.
- Mahbubani, Kishore, 2005. *Bisakah Orang Asia Berpikir*, terj. Salahuddien Gz Jakarta: Teraju.
- Nursi, Bediuzzaman Said 1998. Sirah *Dzatiyah*, Penerjemah Ihsan Qasim Salih, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 1999a. *Isyarat al-I'jaz*, Penerjemah Ihsan Qasim Salih, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 1999b. *Mastbawi al-'Arabi an-Nuriy*. Penerjemah Ihsan Qasim Salih, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 1999c. *Shaiqal al-Islam*, Penerjemah Ihsan Qasim Salih, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 1999d, *Pembahasan 'ana' [Aku] dan Zarah*, Penerjemah: Anuar Fakhri Omar, Kuala Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Trengganu Sdn Bhd
- , 1999e. *Bediuzzaman Said Nursi (Tariche-i Hayati)*, Istanbul: Sozler Yayinevi
- , 2000a. *The Words (On The Nature and Purpose of Man Life, and All Things)* Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2000b. *The Letters 1928-1932*, Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2000c. *The Flashes Collection*. Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS

- , 2000d. *The Rays Collection*, Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2000e. *Bediuzzaman Said Nursi* Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2000f. *Thirty-Three Windows: Making Known The Creator*, Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Publication
- , 2000g. *Persoalan Tauhid dan Tasbih*. Penerjemah Maheram Binti Ahmad Istanbul: Sozler Publication
- , 2002a. *Man and Universe*. Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2002b. *The Short Words*. Penerjemah: Sukran Vahide, Istanbul: Sozler Nesriyat AS
- , 2003a. *Risalah An-Nur; Said Nursi; Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Menikmati Takdir Langit: Lama'at)* Jakarta: Murai Kencana
- , 2003b. *Risalah An-Nur; Said Nursi; Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Menjawab yang Tak Terjawab, Menjelaskan yang Tak Terjelaskan)*, Jakarta: Murai Kencana
- , 2003c. *Risalah An-Nur; Said Nursi; Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Sinar Yang Menangkap Sang Cahaya; Epitomes OF Light)*, Jakarta: Murai Kencana
- , 2003d. *Alegori Kebenaran Ilahi*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003e. *Dimensi Abadi Kehidupan*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003f. *Dari Balik Lembaran Suci*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003g. *Episode Mistis Kehidupan Rasulullah*. Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003h. *Dari Cermin Kekuasaan Allah*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003i. *Al-Ahad: Menikmati Ektase Spiritual cinta Ilahi*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003j. *Mi'raj Menembus Konstelasi Langit*, Penerjemah: Sugeng Hariyanto, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2003k. *Makna Hidup Sesudah Mati: Kebangkitan dan Penghisaban*. Penerjemah: Sugeng Hariyanto dan Fathor Rasyid, Jakarta Timur; Pranada Media.
- , 2004a. *Mengokohkan Aqidah Menggairahkan Ibadah*. Penerjemah: Muhammad Misbah, Jakarta: Robbani Press.
- , 2004b. *Iman Kunci Kesempurnaan*. Penerjemah: Muhammad Misbah, Jakarta: Robbani Press.

- Rahman, Fazlur 1984. *Islam*, Bandung: Pustaka
- , 1985. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung Pustaka.
- Robinson, Ricardh, 1961, "Mosquo and School in Turkey" *The Muslim Word* Vol.1.
- Smith, Huston, 1991. *The World Religions* New York: HarperCollins,
- Salih, Salih, Ihsan Kasim 2003. *Said Nursi Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Membebaskan Agama dari Dogmatisme dan Sekularisme)*, Jakarta: Murai Kencana.
- Shihab, Alwi, 1998. *Islam Inklusif* Bandung: Mizan, 1998.
- Smith, Wilfred Cantwel, 1991, *The Meaning and End of Religion* Minneapolis: Fortress Press.
- Tafsir, Ahmad 2003. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tafsir, Ahmad et.al. 1995. *Epistemologi Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Thalib, M. 1996. *Metode Pendidikan Islam 30T* Jakarta: Gema Insani Press
- Tofler, Alvin, 1992. *Gelombang Ketiga*, terj. Sri Koesdiyantiah Jakarta: PantjaSimpati.
- Vahide Sukran 1992. *Bediuzzaman Said Nursi*, Istanbul: Sozler Publication
- , 1998. *A Contemporary Approach to Understanding The Qur'an The Example of The Risale-i Nur*, International Symposium Bediuzzaman Said Nursi, Istanbul Sozler Publication
- Yavuz, M. Hakan. *Islamic Political Identity in Turkey*, (Oxford University Press 2003)
- Yildiz, Ilhan 2002. *The Search in The Traditional Period (1924-1950) for a Religion Education Model (The Paper Presented at the fifth international symposium on Bediuzzaman Said Nursi 24-26 September 2000)*, Istanbul: Sozler Publication

PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN MEMPEROLEH AKSES BELAJAR: PERGURUAN TINGGI ISLAM DI PAPUA

Ismail Suardi Wekke

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, Papua Barat

Email: iswekke@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan sampai saat ini diyakini sebagai salah satu metode untuk melakukan transformasi pengetahuan. Hanya saja, dalam implementasi pendidikan terkadang aksesibilitas yang menjadi salah satu penghambat. Untuk itu, makalah ini menguraikan beberapa hal berkenaan perlunya perluasan akses pendidikan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan sehari-hari tetapi lebih dari itu diperlukan kebijakan politik yang berpihak terhadap ketersediaan sarana pendidikan. Dengan mengambil setting di Provinsi Papua Barat, penelitian ini menguraikan pendidikan tinggi dalam memperkuat kapasitas individu. Ketika seorang individu mampu berdaya, maka tidak saja keluarganya yang akan menikmati kemampuan tersebut. Jauh dari itu, masyarakat dan bangsa akan turut menikmati kemajuan dan daya saing atas keunggulan sumber daya manusia. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana keterbatasan dapat saja menjadi sumber kekuatan. Sehingga tidak dapat dengan menjadikan keterbatasan sebagai hambatan. Justru itu menjadi kesempatan untuk melakukan inovasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bagaimana pendidikan tinggi yang tidak tertata dapat berakibat kepada ekonomi tinggi. Dengan demikian akan merintang perjalanan untuk meraih kesempatan untuk tahu. Akhirnya, dengan rekonstruksi pelbagai sumber daya, dapat saja perguruan tinggi tetap menjadi sarana terbaik bagi penyediaan tenaga untuk mengabdikan bagi peradaban.

Kata Kunci: pendidikan tinggi, akses, sumber daya, hambatan

PENDAHULUAN

Pendidikan dijadikan sebagai target strategis. Ini tertuang secara implisit dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Sehingga perhatian segenap lapisan masyarakat senantiasa mempersoalkan pendidikan sebagai kebutuhan utama. Untuk itu, tuntutan akan peningkatan kapasitas pendidikan senantiasa menjadi keinginan semua pihak. Terlebih lagi, dengan pendidikan menjadi sarana untuk melahirkan tenaga terampil untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Cita-cita inilah yang menjadi kerangka kerja bagi kelangsungan pendidikan saat ini. Tidak saja untuk memenuhi amanat undang-undang tetapi lebih dari itu, menyiapkan tenaga terdidik untuk menjadi pionir di masyarakat. Sebagaimana McCrea dan Ehrich (2000) menjelaskan bahwa dengan pendidikan tinggi yang memadai dapat saja mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat.

Kalaulah wacana universitas riset sudah menjadi bagian cita-cita ideal perguruan tinggi saat ini, maka impian itu belum digapai untuk kawasan Papua dan Papua Barat. Saat ini, paling utama dan mendesak bagaimana untuk membuka rintangan. Sehingga kemudian akses terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka lebar. Setelah agenda ini selesai, maka target yang perlu dikemukakan adalah bagaimana penguatan institusi yang pada gilirannya akan berdampak terhadap menguatnya kapasitas individu yang terlibat di dalamnya. Ketika ini tercapai, maka pembebasan manusia dari segala belenggu akan menjadi capaian dan prestasi tersendiri. Tetapi selama pendidikan tidak dibenahi, maka keterbelakangan tetap saja akan menjadi realitas kehidupan sehari-hari. Kegagalan ini dimulai dari ketidakmampuan membentuk komunitas ilmiah di perguruan tinggi (Roebken, 2010).

Agenda masyarakat Papua Barat sekarang ini adalah bagaimana menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam artian mampu untuk dijangkau, sekaligus memberikan penguatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Prasyarat pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang dapat digunakan sebagai bagian dari adaptasi lingkungan. Kegagalan pendidikan jika hanya memenuhi kebutuhan keilmuan tetapi tidak mampu membebaskan manusia dari belenggu alam. Kesalahan lebih tinggi lagi jika kemudian pendidikan justru hanya menjadi alat penghambaan terhadap sesama manusia. Untuk memenuhi cita-cita ideal pendidikan, maka segala potensi harus diarahkan untuk menggali dan memaksimalkan potensi kemanusiaan itu sendiri. Dengan penggunaan teknologi yang memadai, maka memungkinkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang dapat mengakselerasi keperluan masyarakat (Jetnikoff, 2007).

Jika dilihat dari perspektif penjenjangan, pendidikan tinggi hanyalah tingkatan yang lebih tinggi dari pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Dengan menggunakan pandangan ini, maka seyogyanya pendidikan tinggi harus mampu mencakup pendidikan dasar dan menengah yang sudah dijalani sebelumnya. Pengalaman belajar yang didapatkan di bangku sekolah menemukan tempat untuk diasah dan dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi. Bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, justru pendidikan tinggi harus mampu digunakan untuk mengidentifikasi, merangkul, dan juga mendayagunakan pengalaman belajar sebagai bagian untuk membentuk seorang sarjana dalam artian pakar. Agenda berikutnya adalah kemerdekaan dalam akademik (Balyer, 2011).

Agenda mendesak sebuah universitas adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sekecil dan seterbatas apapun yang dimiliki, ini harus mampu digunakan untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan. Tidak bisa dengan menunggu sampai terbentuk sumber daya yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitas. Soekartawi (2005) mengusulkan untuk melaksanakan strategi “revitalisasi sumber daya universitas”. Peran perguruan tinggi dimulai dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ini dimunculkan bukan karena kekurangan sumber daya tetapi tidak mengoptimalkan apa yang dimiliki dengan justru mengidam-idamkan apa yang sudah dimiliki lembaga lain. Untuk memiliki kemampuan kompetisi, maka solusi yang perlu dilakukan sejak awal adalah sinergitas antar pelbagai elemen yang ada. Di era mondial sekarang ini, bukan lagi bertumpu kepada figur

seorang pemimpin tetapi dialihkan menjadi kekuatan tim yang mampu menstimulasi setiap individu yang untuk bekerja dengan orientasi pada hasil yang maksimal.

Peran pendidikan tinggi dengan tiga pilar mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki lembaga lain. Kredibilitas pendidikan, ditunjang dengan objektivitas pendidikan kemudian dipandang dapat menjadi harapan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang terkemuka. Uraian sebelum ini menjadi landasan bahwa ada harapan untuk mendorong warga di tanah Papua untuk maju bersama-sama. Untuk itu, tulisan ini akan mengeksplorasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat Papua Barat.

Politik Pendidikan: Kepemimpinan dan Manajemen Strategik

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki posisi sebagai regulator dari terciptanya tatanan masyarakat. Begitu juga dalam pembentukan sistem permanen seperti dalam pendidikan. pendidikan yang tertata akan memberikan dampak positif berupa kemajuan pendidikan dengan membaiknya struktur demografi. Ini selanjutnya akan mencapai kualitas kehidupan yang berdampak dalam pengembangan di pelbagai sektor. Kunci utama pendidikan terletak pada pemerintah berupa kepedulian dan keseriusan untuk menangani pendidikan. Maka, dalam sistem pendidikan bangsa, perguruan tinggi muncul dari suatu proses yang panjang. Kepiawaian, kemampuan dan wawasan yang sudah diperoleh dari pendidikan dasar sampai menengah akan mendapatkan legitimasi jika sudah mendapatkan pengesahan dari pendidikan tinggi. Perubahan dinamika masyarakat dari waktu ke waktu senantiasa menuntut universitas untuk menjadi motor transformasi dalam perubahan itu sendiri. Kepekaan terhadap perubahan ini diwujudkan sebagai tanggung jawab sosial atas didirikannya universitas untuk masyarakat. Visi pemerintah akan mengurus kebutuhan masyarakat di masa depan (Blass, Jasman, dan Shelley, 2010).

Kesempatan untuk mengenyam pendidikan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Maka, muncullah kebijakan dengan kewajiban seorang warga negara untuk menempuh pendidikan. jika sebelumnya hanya enam tahun, maka ditingkatkan menjadi sembilan tahun. Sementara perkembangan terakhir sudah sampai di tahun keduabelas. Ini berarti bahwa seorang warga negara di Indonesia, setidaknya menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas. Sebagai kewajiban pemerintah, maka disediakan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran negara secara keseluruhan untuk dijadikan sebagai ongkos pendidikan. apapun program yang dilaksanakan jika tidak dibarengi dengan dua hal, kekuatan kepemimpinan dan perumusan strategik manajemen. Dapat disimpulkan, dari pengalaman bangsa lain terbukti bahwa adanya tata kelola pendidikan akan memberikan dampak kecerdasan. Jika kelompok warga negara cerdas, maka kesejahteraan dan daya saing bangsa akan terwujud secara langsung. Kesempatan berperan dalam pendidikan juga harus dimaknai bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah tetapi diperlukan kepemimpinan pemerintah. Untuk itu, jalan menuju ketersediaan pendidikan harus dipersiapkan sejak awal (Sibbel, 2009).

Jika pendidikan dikelola dengan menggunakan prinsip kepemimpinan (Azizi, 2008), maka ini akan mempengaruhi kinerja ekonomi bangsa. Secara potensial, pemimpin harus merumuskan sekaligus menjual kepada warganya visi positif untuk masyarakat di masa depan. Disinilah pemimpin dengan meyakinkan bagaimana

gambaran visi masa depan bagi bangsa yang dipimpinnya. Kegagalan untuk merumuskan ini, tentu memainkan peranan untuk membentuk lingkungan yang aman bagi kelangsungan karir politik seorang pemimpin. Demikian pula bagi kelompoknya. Ini harus dimulai dengan adanya visi masa depan, lalu membangun birokrasi elit dengan staf dengan keterampilan manajerial yang memadai. Berikutnya, walaupun terbentuk sistem politik yang otoriter tetapi harus ada ruang lingkup yang mendukung untuk pengambilan inisiatif kebijakan yang dikonsultasikan. Terakhir, kerjasama antar pebagai elemen dalam pembuatan kebijakan akan menjadikan kesatuan organisasi sekaligus menghindarkan diri dari perpecahan dan ketiadaan dukungan dalam aspek inisiatif dan teknis. Pesona hubungan ini akan menyajikan kekuatan untuk mewujudkan visi yang diyakini sebagai harapan kelompok besar di masa depan walaupun awalnya dimulai dari hanya keinginan seorang saja. Keberhasilan pucuk pimpinan dalam mengkomunikasikan keinginannya akan berakhir pada realitas. Begitu pula pendidikan harus berorientasi ke masa depan (Rieckmann, 2012).

Jika ingin menghasilkan keluaran dari riset yang dapat mendorong penemuan baru, maka diperlukan manajemen yang mampu mendorong *research and development* strategis. Sebagaimana kemajuan teknologi informasi menghasilkan layanan jasa yang lain untuk menopang industri ini, maka ini bermakna perkembangan suatu teknologi tidak hanya berpengaruh secara internal tetapi berdampak secara tidak langsung dalam bidang kehidupan lain. Makna lainnya adalah tanpa dukungan suasana yang kondusif, maka tidak akan pernah wujud inovasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada manajemen strategik akan menjadi *value driver* (motor penggerak) sehingga menjadi pemicu untuk menopang kelangsungan pendidikan. Jika gagal mewujudkan ini, maka secara prosedural bisa saja menjadi kegagalan untuk pembentukan keunggulan kompetitif antar lembaga sekaligus pada saat yang sama akan gagal dalam daya saing perguruan tinggi. Namun tidak berhenti sampai di situ sekaligus menjadi kegagalan untuk menjadi kekuatan daya saing bangsa.

Selain visi, ada pula aspek dari kekuatan politik dalam bentuk mengatasi hambatan yang menghalangi tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya berusaha untuk menjalankan pilihan politik tersebut secara maksimal. Kekuatan dan kelemahan sebuah kebijakan dilihat pada efektifitas membangun sistem pendidikan. Jika kebijakan ditetapkan semata-mata karena keterpaksaan, maka ini bisa saja mencerminkan dari sebuah kelemahan pemerintahan. Salah satu lahan subur yang memungkinkan bersemainya lalu tumbuh kelemahan berada dalam wilayah korup. Jika birokrasi tidak dapat berjalan sebagai bentuk pelayanan, maka bisa saja ada bentuk pemborosan, ketidakpastian, sekaligus kelambanan dalam memutuskan sebuah pilihan. Kelangsungan seperti ini pada saatnya akan menidorsi alokasi sumber daya. Sudah tentu masyarakat sendiri yang akan rugi. Akan ada pula konsentrasi kekayaan yang tidak produktif, sekaligus secara bersamaan akan mengikis kebudayaan, sikap dan nilai-nilai luhur yang sudah ditunkan dari waktu ke waktu. Tanpa kepemimpinan yang kuat, maka akan menjadikan perguruan tinggi secara struktur lemah dan tidak mampu mengemban amanat yang diembannya. Ini ditunjukkan di universitas-universitas Spanyol dimana dalam kajian Castro dan Ion (2011) beberapa perguruan tinggi tidak dapat menjalankan mandate otonomi akibat dari lemahnya kepemimpinan.

Ada perubahan yang terjadi secara terus menerus. Fungsi inilah yang diemban oleh pelaku politik praktis untuk senantiasa bekerja dalam usaha membangun kemampuan portofolio bangsa melalui pendidikan. Ada lingkungan umum yang didalamnya menyertai persaingan. Kohesi sosial harus dijadikan sebagai landasan bagi pergerakan selanjutnya. Pembuat kebijakan harus memusatkan perhatian tidak hanya melihat faktor pendidikan semata-mata tetapi juga melakukan sinergitas agar unsur yang lain dapat berkolaborasi dalam kerangka waktu. Ada prioritas yang perlu dijalankan setiap kurun waktu tertentu. Jika gagal membaca peluang ini, maka akan bermakna kehilangan mengeksplorasi kesempatan. Ada kesempatan yang didalamnya usaha untuk memperoleh tambahan keberhasilan. Probabilitas ini tidak semata-mata dalam bentuk kompetitif tetapi sampai juga pada nilai tertinggi yang berlangsung. Kesimpulannya, harus ada rencana-rencana untuk mengejar kesempatan dalam meningkatkan perkembangan sosial. Kesalingtergantungan global semakin memberikan kesempatan ini untuk terus bekerja sama dengan bangsa lain. Tetapi jika lingkungan tidak memberikan berkecambahnya semua proses, secara alami yang datang adalah hilangnya kemampuan dalam memanfaatkan nilai yang ada untuk dijadikan sebagai pondasi bagi kelangsungan kehidupan selanjutnya. Dengan optimalnya lingkungan akan membentuk atmosfer bagi berkembangnya *performance* sebagaimana dalam temuan Fernandez dan Morales, Rodriguez, dan Salmeron (2011) yang menunjukkan bahwa universitas dengan elaborasi pelbagai variable, mampu meningkatkan *performance* dari waktu ke waktu.

Akhirnya, memilih strategi yang tepat sama pentingnya dengan memilih tindakan politik yang dijalankan atas strategi yang dipilih. Diperlukan pula kualitas birokrasi yang unggul untuk dapat menjalankan keputusan secara maksimal. Transformasi diperlukan dari waktu ke waktu. Secara bertahap ada transformasi organisasi. Diperlukan pula gaya kepemimpinan dengan politik yang mendasarkan strategi pada politik rasional. Tentu saja sebegitu apapun nilai, keyakinan dan kebudayaan yang terbentuk tetapi arah pengembangan yang tidak menggunakan semua sumber daya itu untuk kemajuan, maka arah yang dituju tentu akan berbeda. Ketidaksesuaian dengan harapan ini semakin jauh dari harapan nasional jika kesehatan dan pendidikan semata-mata hanya menjadi alat politik. Tetapi keduanya tidak digunakan untuk membangun bangsa dengan angkatan kerja yang produktif sekaligus bersamanya ada bakat dan pengetahuan yang kuat, sudah tentu kesempatan pengembangan modal manusia akan menemui kegagalan.

Realitas dari Lapangan

Sekarang ini mulai dilihat pergeseran peran universitas yang sudah berlangsung dalam satu dekade terakhir. Seiring dengan reformasi, maka tatanan lingkungan perguruan tinggi juga berubah. Jika selama ini istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi “kitab suci” di pendidikan tinggi, maka perlu dilakukan pemaknaan bagi kelangsungan pilar tersebut. Pilar pertama pendidikan dan pengajaran. Jika pengajaran berlangsung secara sempit, maka harus diperluas dengan proses pendidikan. Pertemuan dengan lima puluh menit persatuan kredit setiap semester dapat saja diperkaya dengan adanya kesempatan untuk mengolah informasi yang setiap detik muncul melalui instrument teknologi informasi. Dosen menjadi fasilitator pendidikan. tetapi tidak lagi menjadi sumber informasi satu-satunya. Mata kuliah yang diajarkan di dalam kelas,

dapat dilengkapi dengan sumber informasi yang tersedia melalui pelbagai saluran. Informasi yang dikemukakan dosen dapat lebih lengkap jika mahasiswa memiliki spirit belajar. Bukan karena nilai semata-mata yang merupakan dampak, tetapi keinginan untuk meningkatkan profesionalisme diri.

Kekayaan utama mahasiswa dan dosen terletak pada idealisme dimana bagian masyarakat lain tidak berada dalam lingkaran ini. Ilmu pengetahuan dapat saja diperoleh dari mana saja. Termasuk dengan berkembangnya pendidikan komunitas, lembaga pelatihan dan institusi yang juga mendorong terhadap penguasaan keterampilan. Tetapi, dalam lingkup idealisme, hanya perguruan tinggi yang senantiasa memiliki ciri khas ini. Dengan demikian, pergeseran dinamika global tidak perlu menjadi alasan untuk melunturkan kondisi ini. Justru dengan pergeseran yang ada, mempertahankan semangat dan moral yang sudah ada sebelumnya sama pentingnya dengan merespon perubahan yang terus berlangsung. Karakter bangsa diharapkan terbentuk dengan tentang langgengnya idealism. Moral dan sikap yang dimiliki dosen diharapkan dapat menular kepada mahasiswa sehingga membentuk sikap positif dan kretaif untuk kemajuan.

Pilar kedua riset. Kata ini sering juga dipertukarkan dengan istilah penelitian. Untuk mendukung pilar ini, maka unsur yang harus selalu ada terdiri atas keinginan untuk selalu mempertanyakan sesuatu dan sikap kreatif. Jika kedua hal ini tidak ada, maka keinginan memajukan riset akan berhenti begitu saja. Proses keilmuan terutama di tingkat sarjana, namun bukan pada pendidikan vokasional yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Seorang sarjana dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang diidentifikasi dengan menggunakan prosedur ilmiah yang baku. Kekuatan analisis pada gilirannya akan memperoleh nilai yang tinggi dalam objektivitas dan kebaruan penemuan. Aktivitas seperti ini akan menjadi sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ruang-ruang kuliah akan semakin kaya dengan materi temuan riset yang dihasilkan dari lingkungan sendiri. Sebaliknya jika hanya mengandalkan apa yang sudah ada, dilanjutkan dengan menerima hasil riset dengan seadanya. Ini bukan menyumbang terhadap dialektika keilmuan tetapi justru merobohkan bangunan keilmuan yang sudah ada. Sehingga akan menimbulkan stagnasi. Kelangsungan pendidikan ditopang dengan pilar ini.

Tantangan riset adalah publikasi dan pemanfaatan. Penelitian yang berjalan selama ini, sebagaimana juga menjadi prasyarat kelulusan di tingkatan pendidikan mulai strata satu sampai strata tiga tidak berlangsung secara optimal. Kendala utamanya di samping kualitas riset yang tidak memadai karena tidak dilaksanakan secara serius juga karena minimnya publikasi dari hasil riset yang ada. Penelitian berhenti di ruang ujian dan perpustakaan. Tidak dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Selanjutnya sematang dan sebagus apapun riset itu, hanya dinikmati dikalangan terbatas. Ini ditopang pula ketidaktertarikan birokrasi pemerintah untuk memanfaatkan hasil-hasil riset untuk membuat kebijakan. Mata rantai yang terputus antara publikasi dan pemanfaatan karena tidak dibarengi oleh iktikad baik dan justru yang muncul adalah ego sektoral. Padahal penelitian skripsi saja, belum pada disertasi, sudah menghabiskan tenaga dan dana yang tidak sedikit. Dengan tersusunnya secara rapi skripsi yang ada sampai di perpustakaan, ibarat menumpuk uang dan informasi yang dihasilkan dari mahasiswa, tim pembimbing dan juga penguji. Semuanya sia-sia, hanya karena tiak terbaca oleh orang lain.

Pilar ketiga, pengabdian masyarakat. Sebagaimana penelitian yang menjadi struktur pendidikan tinggi dengan pembentukan Lembaga Penelitian atau Pusat Penelitian, maka pengabdian masyarakat juga difasilitasi oleh lembaga yang secara khusus mengurus keperluan pengabdian masyarakat ini. Universitas tidak terlena dengan pendidikan dan riset semata-mata lalu kemudian menjauh dari realitas masyarakat. Justru keberadaan universitas adalah untuk mendorong eksistensi masyarakat untuk juga berlangsung secara dinamis. Maksud ini terimplementasi dalam bentuk pengabdian masyarakat. Komunitas masyarakat dapat dibangun dengan adanya pandangan pakar yang terlibat secara langsung dalam kondisi kekinian. Tenaga ahli dan mahasiswa secara langsung terjun untuk belajar dari masyarakat. Jika selama ini hanya tenaga pengajar saja yang menjadi dosen, maka dengan berada di masyarakat, setiap individu yang ada dalam masyarakat itu memungkinkan untuk menjadi dosen bagi mahasiswa.

Satu dekade terakhir, sejak reaktivasi Provinsi Papua Barat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menanjak ke peringkat yang lebih tinggi. Bergeser dua posisi dari sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan perguruan tinggi memberikan sumbangsih bagi tingkat melek huruf. Di Kota Sorong, perguruan tinggi baik swasta maupun negeri memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak bangsa untuk memilih pelbagai program studi (prodi). Bahkan sejak 2010 pembukaan program studi baru mencapai angka dua digit. Dengan melihat potensi kesempatan kuliah yang terbuka, maka Kementerian Kesehatan membuka Politeknik Kesehatan Sorong. Sementara di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah sebelum ini hanya menyelenggarakan kelas mitra untuk prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), mulai 2013 menyelenggarakan kelas reguler untuk prodi tersebut. Berarti kebutuhan tenaga guru yang akan ditugaskan sebagai guru kelas di sekolah dasar dapat diperoleh dari lulusan setempat. Selama ini, untuk merekrut guru SD diperlukan lulusan dari perguruan tinggi yang ada dari luar pulau Papua.

Namun antusiasme pengelola perguruan tinggi tidak dibarengi dengan kebijakan primer pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang mengelola administrasi pendidikan tinggi. Parameter yang digunakan untuk memberikan izin operasional pada suatu perguruan tinggi dalam prodi yang baru kadang tidak dapat dipenuhi secara administratif sebagaimana yang diberlakukan untuk kawasan lain. Sementara kebutuhan masyarakat memerlukan adanya pengelolaan prodi tersebut. Adapun tenaga pengajar yang tersedia sudah mampu melaksanakan kelas yang akan dibuka, hanya saja indikator yang digunakan pemerintah tidak dapat dicapai. Dalam pada itu, tidak terbuka juga pilihan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga dalam praktik sering terjadi penyelenggaraan kelas jauh terutama untuk program pasca sarjana. Kelas magister hanya diselenggarakan dalam tiga hari, mulai Sabtu sampai Minggu. Biasanya diikuti oleh pegawai atau karyawan. Jika menelusuri ini dalam perspektif perundang-undangan dan perangkat hukum turunannya, maka akan dianggap sebagai penyimpangan. Hanya saja atas nama kebutuhan, maka beberapa kelompok masyarakat berupaya menambah pengetahuan dengan menggunakan jalan pintas seperti ini. Tentu tidak dapat dibenarkan, namun tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya. Ini juga harus memperhitungkan kerumitan administrasi pendidikan yang tidak dapat diatasi.

Moratorium penerimaan tenaga pegawai termasuk di dalamnya guru dan dosen secara nasional merugikan masyarakat di wilayah Papua Barat. Sekolah-sekolah mengalami kekurangan guru. Satu madrasah di Kampung Tarof, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, dari enam kelas hanya diasuh dua orang guru. Bahkan salah satunya sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Sang kepala sekolah ini juga kadang bertugas menjadi bujang sekolah yang mengurus kunci dan kebersihan sekolah. Sementara guru yang satu lagi bertugas juga menjadi bendahara untuk membantu pengelolaan dana operasional sekolah. Dengan guru yang hanya dua sejak delapan tahun yang lalu ditambah dengan tiga tahun moratorium, maka sempurnalah kedua guru ini mengurus enam rombongan belajar yang ada dan berganti setiap tahun selama sebelas tahun. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan kasus yang ada di pedalaman Papua Barat. Bukan saja di pedalaman, tetapi begitu juga di jantung kota Sorong dimana berdiri perguruan tinggi negeri dengan nama Sekolah Tinggi. Sejak 2010 bertambah empat program studi. Penerimaan dosen terakhir 2010 hanya bertambah lima orang sehingga menjadi enam belas orang. Sementara empat orang dosen mengikuti studi lanjut. Dengan penambahan empat prodi yang sebelumnya hanya tiga menjadi tujuh, maka beban kerja dosen untuk mengajar sudah melebihi dua belas sks.

Dari gambaran ini, maka untuk mengharapkan maksimalnya proses perkuliahan tidak mampu dipenuhi. Tenaga yang dimiliki sang dosen juga digunakan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Bertindak selaku ketua jurusan, atau ketua prodi, maka administrasi pendidikan dijalankan juga oleh dosen. Disamping tugas pokok untuk mengajar. Termasuk mengadakan rapat internal dan menghadiri koordinasi di tingkat yang lebih tinggi. Melayani mahasiswa yang mencapai 500 orang dengan tenaga dosen hanya 13 orang, maka kesempatan untuk menempatkan pembelajaran di kelas sebagai salah satu mekanisme menumbuhkan minat riset tidak berlangsung secara utuh. Jika dosen semata-mata dibebani dengan tugas untuk mengajar, dapat dipastikan kesempatan untuk meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat akan berkurang. Dengan mengasuh empat mata kuliah berbeda, maka dosen akan disibukkan dengan mempersiapkan bahan ajar, penilaian proses, evaluasi dan melengkapi perangkat pembelajaran lainnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyusun buku ajar. Kadang proses kuliah diinterupsi lagi dengan rapat yang dilangsungkan di ibukota negara atau di tempat lain. Beberapa dosen kadang diminta untuk menjadi panitia kegiatan. Maka bukan suatu keanehan kalau dosen ada yang memberikan tugas mata kuliah tertentu berupa penyusunan makalah kepada mahasiswa.

Tidaklah mengherankan kalau se usai visitasi prodi dalam rangka akreditasi beberapa dosen yang menjadi panitia akreditasi memerlukan istirahat total untuk beberapa hari. Dimulai penyusunan borang, mempersiapkan bukti fisik dalam rangka visitasi, sampai kemudian menerima assesor yang khusus melakukan verifikasi segala apa yang dituliskan di borang dan begitu juga dengan bukti fisik yang menjadi pendukung bahwa prodi tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam kacamata Jakarta. Ada proses yang berlangsung berbulan-bulan, ini memerlukan waktu bukan saja di jam kerja, tetapi sudah di luar itu. Sekaligus ditambah dengan jam lembur yang tidak memiliki konsekuensi apa-apa dari segi keuangan. Kesiediaan untuk melakukan ini, semata-mata didorong karena adanya keinginan untuk mempersiapkan lulusan yang memenuhi syarat administratif. Tetapi seharusnya ada kepedulian dan

keberpihakan pihak yang mengakreditasi. Jika ini dibiarkan sebenarnya kompetensi lulusan tidak berubah. Karena kondisi lapangan yang tidak memenuhi syarat. Namun dikonstruksi sedemikian rupa untuk memenuhi syarat. Maka ada tenaga yang ditumpukan ke sana. Padahal cita-cita ideal akreditasi dalam rangka pemetaan prodi untuk memenuhi keperluan masyarakat. Solusi yang diharapkan, dengan adanya proses seperti ini, maka tentu diperlukan langkah-langkah pembenahan. Bukan saja dengan hanya mengakreditasi tetapi menempatkan pembelajaran sebagai proses pencerdasan. Tri Dharma Perguruan Tinggi menuntun sekaligus menuntut untuk mengarahkan pendidikan tinggi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Tetapi kalau ini semata-mata hanya menjadi slogan, maka masyarakat tentu tidak dapat berharap apa-apa dari semua ini.

Memperluas Akses Mendorong Daya Saing

Jika menggunakan Model Rostow (1964) dalam pendidikan tinggi, maka ada lima tahapan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pendidikan di Tanah Papua. Kata kunci dari tahapan demi tahapan adalah pertumbuhan. Pertama, masyarakat tradisional. Dalam aktivitas pendidikan, masyarakat tradisional tidak dapat menggunakan potensi pendidikan untuk menyebarkan kemampuan dan keterampilan bagi lulusan pendidikan. tingkat kelek huruf yang rendah kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mendorong pendapatan yang semakin tinggi. Pertukaran ekonomi yang terjadi semata-mata hanya karena dorongan pemerintah. Pihak swasta tidak berperan dalam porsi tertentu.

Kedua, masyarakat transisi. Ada hubungan dengan kebudayaan lain. Sekaligus terjadi kontak, kesepahaman nilai, bantuan luar regional, perbaikan sarana yang khusus diinventasikan sebagai modal jangka panjang dan kemauan untuk berubah. Jika saja tidak ada keinginan yang kuat, maka ini menjadi masa yang rawan dimana akan ada pengaruh dominan dari kelompok tertentu. Di tahap ini, perlu adanya infrastruktur fisik dan sosial walaupun kecil tetapi harus strategis. Perubahan pendidikan sudah mampu memberikan daya dorong bagi aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat tetapi berlangsung dalam skala terbatas.

Selanjutnya, masyarakat lepas landas. Istilah ini populer di bagian akhir pemerintahan Soeharto sebelum didera dengan krisis moneter. Jika sudah sampai pada tahapan ini, maka ada laju pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Untuk mendukung industri yang berkembang secara cepat, maka tenaga-tenaga terampil dari lembaga pendidikan terbentuk dalam jumlah yang memadai untuk menyokong industri yang juga berlangsung secara cepat. Mulai pula berkembang adanya keinginan untuk belajar di luar kawasan sehingga mampu menghasilkan ilmuwan yang mengembangkan daerah. Pendidikan tidak lagi berlangsung secara teoritis semata tetapi keahlian dan keterampilan yang dihasilkan dengan bukti lulusan yang terserap pada lapangan kerja.

Berikutnya, kematangan teknologi. Dalam rangkaian pendidikan, maka teknologi tinggi dan berbiaya mahal akan mendominasi rangkaian dan tahapan pendidikan. keterampilan lulusan yang memadai dan menguasai teknologi menggantikan tenaga kerja yang tidak mengadaptasi diri dengan teknologi yang berkembang. Penggunaan teknologi kemudian mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan upah yang memadai bagi tenaga kerja yang terampil. Produktivitas menjadi kata kunci. Pendidikan kemudian menjadi area untuk menentukan penggunaan teknologi. Sejak awal sudah

diperkenalkan adanya aspek teknis di unit-unit pendidikan. Jika didukung teknologi, maka pendidikan akan membuka landasan bagi loncatan yang lebih besar dibandingkan ketiadaan teknologi (Forkosh-Baruch dan Hershkovitz, 2012).

Terakhir, konsumsi massal yang tinggi. Akibat pendapatan perkapita yang sudah melampaui kebutuhan dasar, maka ada perhatian kepada kualitas hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak lagi menjadi penting. Sebaliknya, bagaimana keberadaan manusia yang menjadikan hidup sebagai instrumen penting dalam masyarakat menjadi keinginan. Pendidikan diarahkan untuk menjadi pendidikan yang humanis. Begitu pula terbentuk keunggulan kompetitif setiap lulusan. Tidak sekedar menguasai bidang tertentu tetapi sudah sampai pada lulusan yang secara spesifik menguasai bidang keilmuan yang sangat khusus.

Dari lima tahapan tersebut, maka kata kunci pendidikan adalah pengelolaan pendidikan secara efisien. Perlu ditumbuhkan semangat inovasi dengan senantiasa mempelajari keunggulan dan kegagalan dari setiap lembaga pendidikan. kemudian melakukan modifikasi sesuai dengan kemampuan dan keberadaan lingkungan masing-masing. Pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada ditunjang dengan teknologi yang memadai akan memberikan keunggulan kompetitif tidak saja di lembaga pendidikan tetapi juga bagi alumninya. Semuanya dapat dimulai dengan menerapkan akuntabilitas lembaga sehingga muncul kepercayaan masyarakat. Di dalamnya tercakup otonomi, akreditasi dan evaluasi yang berkelanjutan.

Selanjutnya dengan mengenali tahapan-tahapan yang akan dicapai, maka strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai daya saing dengan melakukan tiga hal. Pertama, menetapkan kompetensi keilmuan utama. Kompetensi keilmuan dicirikan dengan tiga hal yaitu potensi akses yang luas berupa sumber daya, program, dan produk. Kedua, kemampuan untuk meningkatkan manfaat yang lebih kepada pengguna lulusan perguruan tinggi, dan terakhir, sulit disaingi oleh lulusan perguruan tinggi lain dengan adanya kemampuan sumber daya, program dan lulusan yang handal. Maka, pimpinan perguruan tinggi beserta perangkat yang tersedia sejak awal melakukan perumusan apa yang akan dihasilkan setelah proses mengkonstruksi pengalaman pendidikan. Harus pula ada nilai tambah lulusan yang diraih selama proses perkuliahan. Tidak terbatas pada kemampuan keilmuan semata-mata tetapi juga penunjang bagi kelangsungan dinamika kehidupan.

Kedua, tersedianya evaluasi diri yang dapat digunakan untuk pelbagai keperluan seperti perencanaan program dan perbaikan proses pendidikan. Evaluasi diri merupakan "potret" akan dua hal yaitu kemajuan dan keberadaan. Dengan gambaran potret ini, maka akan juga digunakan sebagai respon terhadap lingkungan pendidikan masa sekarang dan yang akan datang. Ini berkaitan dengan antisipasi dan respon terhadap kondisi yang terus berkembang. Tidak dimungkinkan adanya kata terlambat. Dengan keterlambatan, maka para pesaing siap merebut posisi terdepan yang selalu saja menjadi hak setiap institusi.

Ketiga, strategi dan teknik untuk merespon kondisi global. Ini dimulai dari pengenalan kawasan. Selanjutnya memperkuat kapasitas institusi. Kekuatan yang dimiliki lembaga tidak terbatas semata-mata lingkungan internal tetapi juga mendayagunakan lingkungan eksternal untuk mendukung keberadaan internal. Kompetisi yang berlangsung sudah mencapai *hyper-competition* dalam istilah Goldstein

(2004). Resep yang disarankan Goldstein dalam menyikapi suasana ini dengan mengerjakan beberapa hal, antara lain: memperkuat jaringan kerjasama yang sudah ada kemudian membentuk aliansi baru. Mengimplementasikan kegiatan dalam rangka mengubah jaringan (*network*) menjadi kemitraan (*partnership*). Kemampuan menggunakan teknologi informasi. Terakhir, efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui sinergitas pelbagai kegiatan.

Penguatan kerjasama baik dengan lembaga serumpun maupun lintas disiplin akan mendukung proses belajar mengajar. Begitu pula riset bersama dengan adanya alih daya untuk memberikan keterampilan penelitian. Jaringan kelembagaan ini akan mampu juga untuk mendukung peningkatan status kelembagaan, terutama jika lembaga yang menjadi mitra adalah lembaga dengan reputasi nasional dan internasional. Gaya yang dapat dikembangkan dengan memulai pada *personal network* (jaringan pembuat keputusan) kemudian dilanjutkan kepada pengelola institusi penyanggah dana. Daya dorong ini akan memadai jika ditunjang dengan penguasaan dan ketersediaan teknologi informasi. Kesatuan antara jaringan, dukungan dana serta pengelolaan teknologi mampu untuk memperkuat kelembagaan dan akan berdampak bagi kelangsungan perguruan tinggi. Termasuk mengakses sumber dana yang tidak dibatasi dalam lingkungan sendiri (Rey dan Racionero, 2010).

Pola kemitraan yang strategis antara perguruan tinggi, masyarakat, dan industri akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perguruan tinggi dengan mengemban objektivitas dan kredibilitas. Pelibatan mahasiswa dalam program-program yang dilaksanakan akan memunculkan kepekaan terhadap problematika yang ada di masyarakat. Nilai yang menonjol dari program seperti ini adalah pelibatan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman sekaligus pengetahuan. Sementara bagi institusi akan memunculkan kepercayaan. Untuk industri dapat saja menemukan sebuah teknologi dengan terbangunnya sinergitas seperti ini. Akan lahir ilmuwan yang tidak berdiri di menara gading tetapi tetap berpijak ke realitas kehidupan masyarakat yang didiaminya. Sekaligus menjauhkan perguruan tinggi dari keterasingan dari lingkungan tetapi justru memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi bahan kajian dalam ruang kuliah.

Unsur penting dalam pembentukan daya saing sebagai faktor utama terletak pada modal manusia. Kekayaan nasional tidak menjadi penting jika tidak ditopang dengan kehandalan sumber daya manusia. Jika tingkat pengetahuan dan keterampilan semakin tinggi, maka ada kemudahan bagi individu untuk mengerti persoalan. Pada tingkat pemahaman, akan mampu menerapkan dan mendapatkan hasil untuk kemajuan teknik. Jika ini dimanfaatkan secara maksimal, maka akan mendorong tinggi standar hidup. Untuk memperoleh ini, harus ada investasi dalam pendidikan untuk membangun sistem pendidikan dan keterampilan. Strategi pembangunan pendidikan dalam jangka panjang akan mendukung strategi industrialisasi yang diperoleh dari keterampilan ilmuwan dan insinyur. Investasi modal fisik dan kekayaan nasional tidak akan berarti apa-apa jika produktivitas sumber daya manusia yang handal. Ketidakmampuan dalam investasi, produktivitas, dan produksi barang diantaranya disebabkan kedudukan modal manusia berupa tenaga kerja terampil menekan tingkat perkembangan industri dan teknologi.

Penciptaan kekayaan bangsa melalui daya saing akan dipermudah dengan adanya infrastruktur yang memadai. Ini dapat dicapai dengan penciptaan infrastruktur yang

mendukung ekspansi ekonomi berikutnya. Sementara negara maju dalam keadaan seimbang mampu mempertahankan sarana transportasi, komunikasi dan energi untuk lebih maju. Ini akan merangsang investasi bisnis, mengukuhkan infrastruktur sosial, dan juga menambah kapasitas fisik dengan lebih baik. Maka, sekali lagi perbedaan berada dalam personil yang berpendidikan. Dengan faktor yang diwarisi ketersediaan pendidikan dari generasi sebelumnya. Faktor pembeda ini akan semakin mapan jika generasi setelahnya diisi dengan tenaga kerja yang terlatih. Dibandingkan dengan faktor umum, maka faktor khusus menjadi landasan bagi penentuan dan pelestarian keunggulan kompetitif yang dibangun atas dasar faktor umum. Kualitas kompetitif dalam aspek kualitas dan kuantitas sekali lagi ditentukan atas dasar investasi sosial dalam pendidikan. termasuk di dalamnya inetrvensi pemerintah dalam pendidikan swasta (Altan, 2010).

Konstruksi Teoritis: Pembelajaran untuk Semua

Perawakan strategis kelembagaan harus diarahkan dalam bentuk pedoman yang dapat diplikasikan. Semakin prgmatis dan konkrit identifikasi kebijakan yang akan ditempuh, maka akan membantu dalam mewujudkan daya saing. Mosley dan Schmid (1993) mengajukan dua hal yang harus dipenuhi yaitu daya saing mikro dan daya saing internasional. Daya saing mikro merupakan keunggulan kompetitif dalam wilayah domestik dimana perguruan tinggi yang sama dalam lingkup nasional. Biaya yang rendah dalam penyelenggaraan pendidikan, daya tarik kelimuan yang dikuasai para tenaga pengajar, dan ekosistem keilmuan yang lebih menguntungkan dibanding dengan pesaing asing berupa perguruan tinggi internasional. Sementara daya saing internasional sebagai keunggulan komparatif. Faktor ini ditunjukkan dengan kemampuan bersaing dengan perguruan tinggi internasional yang memiliki cakupan kelimuan yang sebidang. Bukan semata-mata ikut dalam lingkungan keilmuan tetapi menghasilkan riset terkemuka untuk mendorong penelitian berikutnya. Begitu perguruan tinggi melakukan riset, maka dalam tahap aplikatif di tingkatan ilmu eksakta ditandai dengan pemerolehan paten sebagai bentuk pengakuan.

Untuk meningkatkan ini, maka diperlukan kebijakan utama yaitu kebijakan primer yang bersumber dari pemerintah. Sekaligus yang kedua adalah kebijakan berupa dukungan pemerintah untuk melakukan sinergi atas perawakan strategis yang hendak dicapai. Bagi perguruan tinggi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan primer berupa investasi dalam bentuk infrastruktur yang memadai, strategi pembangunan industri dan dukungan iklim bagi publikasi untuk produksi. Sementara dalam hal kebijakan pendukung memungkinkan jika kebijakan primer pemerintah berlangsung dengan efisien, seperti kebijakan makroekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan kerangka kelembagaan. Infrastruktur yang memadai baik berupa fisik, teknologi, pembangunan modal manusia, dan pengembangan wirausaha kecil akan menjadi lahan subur bagi perkembangan pendidikan tinggi.

Jika perguruan tinggi sudah mampu membenahi diri dan lingkungannya, maka aada harapan besar untuk dilanjutkan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada empat hal yang dapat dikerjakan perguruan tinggi dalam rangka menopang strategi pembangunan kekayaan suatu bangsa dalam bentuk aktivitas yaitu menilai kekuatan dan kelemahan institusi negara, menyadari dilema dan trade-off sebuah pilihan kebijakan, membangun hubungan sinergitas dengan pemerintah yang

baik, dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah. Pembangunan pendidikan mensyaratkan adanya kerjasama dunia bisnis dengan pemerintah. Dengan struktur pemerintahan yang memadai sekaligus melibatkan bentuk-bentuk perwakilan kelompok, maka akan terbentuk kesatuan tujuan yang sama. Jika ini dapat dicapai maka perlu ditopang dengan kepemimpinan yang kuat dan kharismatik, untuk menjembatani dua sektor agar dapat bekerja bersama-sama. Kepemimpinan yang kuat akan membantu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tata kelola untuk mengatasi masalah internal sekaligus eksternal (Coco, 2011).

Keberadaan lembaga pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan bukan saja “learning organization” melainkan juga “learning nation”. Porter (1996) awalnya memperkenalkan istilah ini yang berawal dari konsep “learning organization”. Perkembangan learning organization sebagai akibat dari perkembangan lingkungan yang kadang mengalami turbulensi dan ketidakpastian. Dalam status *learning organization*, maka universitas dituntut untuk membentuk mahasiswa dan dosen yang senantiasa melahirkan ide kreatif dengan dimulai dari keinginan untuk tahu. Namun tingkatan ini berlanjut ke tingkatan negara dengan istilah learning nation. Untuk membentuk daya saing bangsa, maka diperlukan kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Sebagaimana sebuah riset yang memiliki siklus dan prosedur, maka penguasaan kemampuan pengetahuan dan ekonomi dituntut secara nasional untuk mewujudkan lingkungan *learning nation*. Ini bisa saja terbentuk jika ada konsolidasi pelbagai elemen bangsa untuk mencapai cita-cita ini. Dengan terus belajar, maka selalu ditemukan informasi baru dan juga pengembangan atas pencapaian apa yang sudah ada. Untuk itu, diperlukan *knowledge management*, dimana pengetahuan yang dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen moderen.

Kalaupun hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak tersedia tata kelola yang memadai, maka sumber daya yang ada tersebut tidak akan memberikan kontribusi apa-apa. Dengan pengelolaan yang baik, maka akan lahir satau kebijakan yang disertai dengan kearifan (*wisdom*). Sebagai proses yang panjang, *knowledge* berawal dari pengumpulan rangkaian tanda tanya yang ditindaklanjuti dengan desain penelitian yang sesuai untuk menjawab keingintahuan itu. Pengolahan informasi secara akurat disertai dengan analisis yang tepat akan memberikan makna bagi sebuah informasi. Tanpa pemberian makna dan analisis yang tepat, hanya akan menjadi sekumpulan data yang tidak bisa dikatakan *knowledge*. Disinilah merefleksikan pentingnya sumber daya manusia. Dengan bentangan daerah dan wilayah yang tidak dapat diakses memadai, maka salah satu pilihan yang dapat dijalankan adalah dengan membentuk jaringan belajar jarak jauh. Walaupun tidak mementingkan tatap muka, tetapi ada proses pendidikan yang tetap berlangsung untuk menjamin keluaran pendidikan (Chi Ng dan Murphy, 2005).

Untuk itu, alasan ketidakterjangkauan wilayah tidak akan lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak belajar. Kesempatan untuk belajar harus terbuka untuk siapa saja dalam semua jenjang. Belajar adalah hak setiap individu sehingga negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan setiap warga negara dalam memperoleh hak ini. Perluasan kesempatan ini mesti menjadi prioritas (Keane, 2012). Kecuali setelah disediakan dan ada warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak, maka itu adalah sepenuhnya pilihan individu.

Tetapi pada sisi komunitas berbangsa dan bernegara, maka menjadi amanat undang-undang untuk mengusahakan ketersediaan kesempatan belajar. Tujuan akhir dari semua proses memerdekakan diri dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan setiap warga negara. Inilah cita-cita yang hendak diwujudkan sejak awal sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Negara berkewajiban mempersiapkan seluruh keperluan belajar warganya (Byrne, Flood, dan Hassall, dkk., 2012).

PENUTUP

Tuntutan terhadap universitas sudah berada dalam tahap dimana pendidikan tinggi harus menjadi pelopor transformasi. Bukan saja tugas tri dharma perguruan tinggi yang harus diperkaya dengan inovasi tetapi sekaligus mengasah kepekaan untuk ikut berusaha dalam memecahkan masalah yang berlangsung di masyarakat. Tidak terbatas dalam lingkungan kawasan, tetapi sampai pada nasional dan bahkan internasional. Tuntutan yang menjadi tantangan komunitas perguruan tinggi adalah peranan dalam ikut membangun masyarakat madani. Senyampang dengan itu juga tuntutan untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai ekonomis bagi masyarakat juga senantiasa mengemuka. Kemampuan ini bisa terwujud jika dibarengi dengan aktivitas riset yang berkelanjutan. Ketiadaan penelitian menunjukkan tidak adanya identifikasi masalah secara kritis sekaligus inovasi yang sudah berhenti sama sekali.

Universitas juga tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan ekonomi. Perubahan daya saing global selalu didalamnya disertai oleh perguruan tinggi. Sebelumnya, daya saing hanya berada pada kekayaan sumber daya alam serta upah buruh yang murah. Tetapi era itu sudah berakhir. Daya saing yang harus ditunjukkan berada dalam inovasi dan kreativitas dalam hal sains, teknologi dan juga seni. Kerjasama tripartit antara pendidikan tinggi, industri dan pemerintah diperlukan lebih implementatif dan terkoordinir. Jika mengacu kepada pengalaman selama ini yang hanya sporadis dan temporer tidak akan menguntungkan. Tanpa itu, maka tampilan (*performance*) perguruan tinggi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Sekalipun itu sudah dilakukan restrukturisasi kelembagaan dan pembenahan administrasi. Semuanya akan sia-sia.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka pemanfaatan teknologi komunikasi akan membantu proses belajar mengajar. Sekaligus mendorong penguasaan hasil belajar yang memadai dibandingkan dengan media belajar lainnya. Ada pula efisiensi baik dari segi waktu maupun pembiayaan yang dapat timbul akibat penggunaan teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Dari segi waktu, ada percepatan peningkatan kapasitas dan begitu juga dengan produktivitas dengan dukungan teknologi. Sekaligus didapatkan keuntungan pelestarian lingkungan dengan tidak mempergunakan kertas dalam hal pengarsipan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga akan berpengaruh secara langsung dalam kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Pertimbangan seperti ini, menjadikan perlunya memaksimalkan teknologi termasuk teknologi informasi sehingga menghasilkan riset berkualitas tetapi juga dampak riset yang dapat diperoleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Altan, Hasim., Energy efficiency interventions in UK higher education institutions, *Energy Policy* 38, 2010, 7722 – 7731.
- Azizi, Mirwais., Leaders Of Higher Education In Afghanistan: Leadership Beliefs, And Challenges For The 21st Century, *Disertasi* (Amerika Serikat: Graduate School of Education and Psychology, Pepperdine University, 2008).
- Balyer, Aydin., Academic Freedom: Perceptions of Academics in Turkey, dalam *Egitim Ve Bilim-Education and Science*, Vol. 36 (162), Oktober 2011, 138 – 148.
- Blass, Eddie., Jasman, Anne., dan Shelley, Steve., Visioning 2035: The future of the higher education sector in the UK, dalam *Futures* 42, 2010, 445 – 453.
- Byrne, Marann., Flood, Barbara., dan Hassall, Trevor., dkk., , Motivations, expectations and preparedness for higher education: A study of accounting students in Ireland, the UK, Spain and Greece, *Accounting Forum* 36, 2012, 134 – 144.
- Castro, Diego dan Ion, Georgeta, Government dilemmas in the Spanish universities: autonomy, structure, participation and descentration, *Revista De Educacion*, No. 355, Mei - Agustus 2011, 161 – 183.
- Chi Ng, Kwok. dan Murphy, David., Evaluating Interactivity and Learning in Computer Conferencing Using Content Analysis Techniques, dalam *Distance Education*, Vol. 26 (1), Mei 2005, 89 – 109.
- Coco, Charles M., Emotional Intelligence in Higher Education: Strategic Implications for Academic Leaders, dalam *Journal of Higher Education Theory and Practice*, Vol. 11 (2) 2011, 112 – 117.
- Fernandez, Antonio, Morales, Maria, Rodriguez, Carmelo, dan Salmeron, Antonio, A system for relevance analysis of performance indicators in higher education using Bayesian networks, dalam *Knowledge and Information Systems*, Vol. 27 (3), Juni 2011, 327 – 344.
- Forkosh-Baruch, Alona., dan Hershkovitz, Arnon., A case study of Israeli higher-education institutes sharing scholarly information with the community via social networks, *Internet and Higher Education* 15, 2012, 58 – 68.
- Goldstein, M., *The Potential Competitive Advantage of Innovative for Profit/Non-Profit Partnership in Higher Education* (Higher Education Consortium, 2004).
- Jetnikoff, Anita L., *From Apprentice to Performer: Using Vodcasts to Bring English Teaching into the Tertiary Classroom*, dalam *Proceedings 30th HERDSA Annual Conference-Enhancing Higher Education, Theory and Scholarship*, Adelaide, Australia. 8 s.d. 11 Juli 2007.
- Keane, Elaine., Differential prioritising: Orientations to higher education and widening participation, *International Journal of Educational Research* 53, 2012, 150 – 159.
- McCrea, Nadine L. and Ehrich, Lisa C., Completing an Educational Leadership Picture: Feminine Essentials from an Australian Perspective, dalam Pankake, A and Schroth, G and Funk, C, (peny.) *Women as School Executives: The Complete*

Picture, (Texas, USA: Texas A & M University-Commerce Press, 2000), hlm. 48-54.

Rey, Elena Del., dan Racionero, María., Financing schemes for higher education, *European Journal of Political Economy* 26, 2010, 104 – 113.

Rieckmann, Marco., Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning?, *Futures* 44, 2012, 127–135.

Roebken, Heinke, Similarity Attracts: An Analysis of Recruitment Decisions in Academia, *Educational Management Administration & Leadership*, Vol. 38 (4), Juli 2010, 472 – 486.

Rostow, Walt Whitman, *The Stages of Economic Growth: a Non-communist Manifesto* (Cambridge, UK: The University Press, 1964).

Sibbel, Anne., Pathways towards sustainability through higher education, dalam *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 10 (1), 2009, 68 – 82.

Soekartawi, Revitalisasi Sumber Daya Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif, *Makalah* disampaikan di hadapan pimpinan Universitas Brawijaya, Malang, 30 Agustus 2005.

Ismail Suardi Wekke memperoleh International Fellowship Program untuk menempuh pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah pendidikan, dilantik menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong sejak 2010. Menerima beasiswa untuk Visiting Research di Waseda University, Jepang dan Far Eastern Federal University, Vladivostok Rusia sepanjang Oktober sampai November 2012. Paruh waktu, mengajar di Universitas Muhammadiyah Sorong, STKIP Muhammadiyah Sorong dan Universitas Victory. Atas aktivitas dan perhatian dalam pendidikan Papua Barat, diberikan amanah untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan Lembaga Persada Papua. Ketika kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujungpandang mengemban amanah sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tarbiyah, selanjutnya sebagai Bendahara Umum Koordinator Komisariat IAIN Alauddin. Sementara di Cabang Ujungpandanga sebagai Wakil Bendahara Umum, dan di Pengurus Besar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional.

PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN PADA MAHASISWA STRATA SATU PGSD (Studi tentang Penilaian Kemampuan Penalaran Proporsional)

Rahmi Tasty Rosandi, Yetti Supriyati, dan Elindra Yetti
Paud Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
rahmitasty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan produk instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan proporsional mahasiswa S1 PGSD UNJ. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan model Borg and Gall, yang meliputi mengumpulkan informasi, melakukan perencanaan, mengembangkan produk awal, ujicoba lapangan utama, dan uji coba lapangan operasional. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 PGSD. Penelitian dilakukan tiga tahap uji one to one 8 orang mahasiswa, pengujian lapangan awal 15 orang mahasiswa, dan uji coba kelompok besar sebanyak 30 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan uji coba lapangan yang telah dilakukan persentase rata-rata keseluruhan aspek sebesar 78,43%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaiannya yang dikembangkan menunjukkan interpretasi baik produk penilaian untuk mengukur kemampuan penalaran proporsional dapat digunakan.

Kata kunci: kemampuan proporsional, penilaian, penelitian pengembangan.

PENDAHULUAN

Pendidikan telah diakui sebagai pendorong utama berbagai aspek kehidupan manusia melalui tenaga kerja yang dihasilkan. Pendidikan merupakan cara utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bernilai dan mampu berdaya saing selaras perkembangan zaman. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal berkewajiban menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi lingkungan hidup yang selalu mengalami dinamika yang sangat pesat, dapat bersaing di kehidupan dan dapat menyesuaikan diri terhadap tantangan yang semakin besar. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang tepat untuk anak, khususnya anak usia dini.

Usia dini adalah usia dimana yang tepat untuk diberikan berbagai konsep kehidupan sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Semenjak seorang manusia lahir dari rahim ibu sampai ia dapat hidup mandiri memerlukan waktu yang sangat panjang dibanding dengan makhluk hidup lainnya (Bronowski: 1973). Pendidikan anak usia dini

merupakan bagian dari pendidikan yang bertanggung jawab besar, karena pada masa ini anak-anak membentuk keterampilan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan pesat yang mana periode ini disebut dengan masa *golden age*, dimana anak pada usia dini memiliki daya serap yang sangat baik dalam menyerap informasi yang diberikan kepadanya melalui interaksi yang ada. Berbagai macam pendidikan diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan kognitif anak, salah satunya melalui pendidikan tentang sains. Anak mampu memahami gejala fenomena yang terjadi di sekitarnya, mengetahui sebab dan akibat mengenai sesuatu dan juga dibutuhkan pola berfikir matematika untuk berbagai macam kegiatan seperti berbelanja, membuat sesuatu, dan sebagainya. Untuk dapat memberikan pengetahuan sains pada anak dengan baik, dibutuhkan sosok yang mengerti akan pendidikan tersebut, seperti dosen yang mengajarkan pendidikan sains kepada mahasiswanya, serta mahasiswa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mendidik anak usia dini.

Pendidik anak usia dini mempunyai tugas yang sangat kompleks dalam menghadapi anak yang masih dalam usia muda. Tugas mendidik anak usia dini tidaklah mudah, karena anak belajar dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya. Pendidik bukan sekedar orang yang mentransfer ilmu ke anak-anak, namun lebih dari itu, merupakan orang yang memberikan konsep ilmu serta pembentukan perilaku. Untuk seorang dosen ataupun calon pendidik diperlukan adanya penguasaan materi dan konsep yang baik sehingga bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dalam penyampaian informasi kepada pihak lain. Calon guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan kreativitas karena ketika menyajikan dan mentransferkan ilmu kepada pihak lain, diharapkan ilmu tersebut dapat diterima dan diserap dengan baik. Salah satu kemampuan seorang calon pendidik yaitu harus dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif.

Pendidikan sains dan matematika dapat diajarkan kepada anak sesuai tahap perkembangan anak. Anak yang sudah memasuki fase operasi formal lebih dapat berfikir abstrak. Kemampuan berfikir abstrak dapat dinilai melalui kemampuan mengemukakan ide-ide atau pendapat dan memprediksi kejadian yang akan terjadi. Adapun bagian dari fase operasional formal adalah penalaran proporsional, yang mana dibutuhkan oleh anak untuk berfikir matematika yang melibatkan pemahaman anak tentang kovariansi dan berbagai perbandingan.

Sehubungan dengan masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian mengenai penalaran formal, khususnya mengenai penalaran proporsional. Penelitian dilakukan oleh Stephen ditemukan hasil bahwa ditemukannya banyak siswa yang dapat menerapkan pendekatan numerik tetapi tidak dapat menerapkan struktur perkalian yang terkait dengan penalaran proporsional. Setiap orang akan dihadapkan dengan kecepatan, kepadatan, jarak tempuh suatu bensin mobil, dan berbagai satuan angka.

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathrin dan Peter ditemukan bahwa masih banyaknya siswa yang cukup mengalami kesulitan dalam menerapkan penalaran proporsional mengenai rasio atau produk dari dua kuantitas varian, yaitu jumlah yang sebanding ataupun berbanding terbalik dengan satu dan lainnya.

Menurut Lamon dalam John a Walle (2008: 97), diperkirakan lebih dari setengah populasi orang dewasa tidak dapat dianggap sebagai pemikir proporsional. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya usia kita, belum tentu kita dapat

menguasai kebiasaan dan keterampilan proporsional. Pengajaran yang diberikan dapat memberikan pengaruh, terutama jika aturan dan logaritma untuk perhitungan pecahan, untuk membandingkan rasio, dan untuk menyelesaikan proporsi ditunda terlebih dahulu. Seorang anak harus diberikan waktu yang cukup dalam memahami sesuatu, sebelum memasuki ke tahapan pembelajaran selanjutnya.

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang telah dilakukan untuk membuat penelitian khusus yang mampu mengukur penalaran proporsional mahasiswa khususnya di bidang sains. Mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia PAUD tentunya diharapkan memiliki kemampuan proporsional dalam memahami variasi dan perbandingan serta penggunaan alat ukur yang berguna dalam praktek kegiatan anak usia dini, khususnya sains. Oleh karena itu, penulis mencoba mengembangkan model penilaian yang valid dan reliable untuk mengukur penalaran proporsional mahasiswa.

Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu tugas dari seorang guru dalam menilai kemampuan siswanya. Proses penilaian menurut Mardapi (2007: 6) meliputi pengumpulan bukti-bukti mengenai hasil belajar peserta didik, dimana bukti ini tidak hanya diperoleh melalui tes saja, tetapi bisa dikumpulkan melalui pengamatan atau laporan diri. Penilaian memerlukan data yang baik mutunya sehingga perlu didukung oleh proses pengukuran yang baik.

Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah *assessment*. Depdikbud dalam Arifin (2011: 4) menjelaskan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Gronlund dalam Arifin (2011: 4) mengartikan penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Chittenden dalam Mardapi (2007: 6), kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada empat hal, yaitu (1) penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai yang direncanakan atau tidak; (2) pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran; (3) pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung; dan (4) kesimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik. Data untuk kepentingan penilaian diperoleh dengan menggunakan alat ukur, dimana alat ukur yang banyak digunakan dalam penilaian pendidikan adalah tes.

Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak secara tidak pasif menerima informasi. Desmita (2007: 46) mengungkapkan menurut Hetherington & Parke walaupun proses berfikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalamannya dengan dunia disekitarnya, anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman serta dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia miliki.

Jamaris (2006: 19-22) mengatakan bahwa Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam empat fase, yaitu fase sensorimotor (usia 0-2 tahun), fase praoperasional (usia 2-7 tahun), fase operasional konkret (usia 7-12 tahun) dan fase operasi formal (12 tahun sampai usia dewasa). Adapun keempat fase tersebut tersusun secara hierarkis, yaitu seseorang tidak akan dapat memasuki fase tahapan operasi formal sebelum fase sensorimotor dan praoperasional dilampai.

Fase operasional formal dapat dilihat melalui perpindahan cara berfikir konkret ke abstrak. Berdasarkan teori perkembangan kognitif yang diusulkan oleh Jean Piaget, anak usia 12 tahun keatas berada pada tahap operasional formal yang mana pada masa itu anak sudah dapat berfikir logis tentang proposisi abstrak dan uji hipotesis. Seperti halnya yang dikatakan oleh Wilson dalam Yoon Lay Fah (2009), penalaran operasional formal merupakan penentu keberhasilan siswa dalam sains dan matematika pada jenjang berikutnya. Lemahnya siswa dalam mengembangkan daya nalar bisa berdampak pada kemampuan pemecahan masalah. Piaget menyatakan bahwa siswa dianggap siap mengembangkan konsep atau materi khusus apabila memperoleh skema yang diperlukan. Artinya, proses belajar mengajar tentunya akan menjadi terhambat apabila penalaran formal siswanya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diperlukan.

Perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang begitu pesat membuat guru dan para pendidik berpacu untuk menyiapkan mahasiswanya agar siap bersaing dalam kehidupan global. Keterampilan dalam memecahkan masalah adalah poin utama dalam kehidupan, karena melalui pemecahan masalah mahasiswa terlatih dan terdorong untuk mengembangkan penalaran formalnya secara mandiri dalam menjalani kehidupannya dikemudian hari.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Wilson dalam Lay Yoon Fah (2009), penalaran proporsional merupakan penentu keberhasilan siswa dalam sains dan matematika pada tahap selanjutnya dalam menjalani kehidupan. Nickerson dalam Nur juga mengemukakan bahwa anak yang mampu menalar proporsional dapat mengembangkan hubungan proporsional berat dan volume, mentransfer penalaran proporsional dari dua dimensi ketiga dimensi, menggunakan penalaran proporsional untuk menaksir ukuran suatu proporsional satu populasi yang tidak diketahui. Lesh, Post dan Behr (1988: 93) mendefinisikan penalaran proporsional sebagai berikut:

“Proportional reasoning is a form of mathematical reasoning that involves a sense of co-variation and of multiple comparisons, and the ability to mentally store and process several pieces of information. Proportional reasoning is very much concerned with inference and prediction and involves both qualitative and quantitative methods of thought”.

Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa penalaran proporsional adalah bentuk penalaran matematika yang melibatkan pemahaman tentang kovariansi dan berbagai perbandingan, serta kemampuan secara mental dalam menyimpan dan memproses beberapa informasi. Penalaran proporsional sangat terkait dengan kesimpulan dan prediksi dengan melibatkan kedua metode berfikir secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka siswa yang telah memasuki tahap operasional formal akan dapat memahami dan menjawab dengan benar soal-soal yang berkaitan dengan masalah proposisi dan rasio, walaupun mereka belum pernah mempelajarinya.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa yang telah memasuki operasi formal akan mempunyai kemampuan penalaran proporsional. Penalaran proporsional telah dikaji dan disepakati oleh peneliti bahwa penalaran proporsional merupakan konsep penting bagi mahasiswa sehingga mahasiswa harus selalu melibatkan penalaran proporsional dalam proses pemecahan masalah. Untuk dapat meningkatkan kemampuan tersebut, kemampuan memecahkan masalah terlebih dahulu harus ditingkatkan.

Adapun keempat penalaran yang terdiri dari hipotesis deduktif, proporsional, kombinatorial maupun reflektif merupakan suatu penguat seseorang saat berada di tahapan operasional formal, karena di periode ini akan sangat menentukan dan membantu dalam kehidupan di masa yang akan datang.

Seseorang yang mampu berfikir secara proporsional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 1) memiliki pemahaman tentang kovariansi, dimana dapat memahami hubungan dua kuantitas yang mempunyai variasi yang sama dan dapat melihat kesesuaian antara dua variasi yang berbeda; 2) mampu mengenali hubungan proporsional dan non proporsional dalam dunia nyata; 3) mampu mengembangkan banyak strategi untuk menyelesaikan masalah proporsi; 4) mampu memahami rasio sebagai entitas tersendiri yang menyatakan hubungan yang berbeda antar kuantitas-kuantitas yang dibandingkan.

Berdasarkan pengertian kemampuan penalaran proporsional menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran proporsional adalah kemampuan tahapan berfikir lebih mendalam yang berada di tahapan operasional formal, dimana pada penalaran ini seseorang memiliki kemampuan dalam menjawab dan memahami suatu masalah yang berkaitan dengan proporsi dan rasio dengan aspek (1) memahami berbagai variasi; (2) memahami perbandingan; (3) memiliki kemampuan dalam memproporsikan sesuatu serta; (4) dapat menggunakan rasionalnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R & D). Desain penelitian yang digunakan adalah model Borg and Gall. Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar yang telah mengikuti perkuliahan mata kuliah Konsep Dasar Biologi. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian itu sendiri yaitu mengembangkan penilaian mata kuliah Konsep Dasar Biologi untuk mengukur Kemampuan Penalaran Proporsional.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil skor angket subjek penelitian. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari tanggapan para ahli dan subjek penelitian. Data yang diperoleh dari validasi uji kelayakan ahli dan dari uji kelayakan (baik dari uji coba perorangan, kelompok kecil, dan uji lapangan atau kelompok besar) yang akan di analisis dengan cara menghitung nilai berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Skala yang akan digunakan adalah Skala Likert dengan nilai maksimal adalah empat.

PEMBAHASAN

Validasi Teoritik

Validasi teoritik dilakukan dengan meminta penilaian dan masukan dari beberapa *expert judgement* (para ahli) dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas dari produk model yang dikembangkan oleh peneliti yaitu model penilaian mata kuliah Konsep Biologi Dasar untuk mengukur penalaran proporsional mahasiswa PGSD di UNJ. Para ahli yang diminta untuk menguji kelayakan model memiliki latar belakang keahlian dalam bidang desain dan materi yang tepat bagi mahasiswa.

Pakar Materi

Validasi uji kelayakan materi biologi yang kedua juga memiliki dua aspek penilaian yaitu kesesuaian materi dan kesesuaian kemampuan peserta didik. Adapun hasil dari validasi ditinjau dari segi kesesuaian materi sebesar 4,8% dan kesesuaian kemampuan peserta didik sebesar 4% serta validasi keseluruhan aspek sebesar 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang ditinjau dari kedua segi aspek tersebut memiliki interpretasi sangat baik dan produk instrumen yang dikembangkan layak digunakan sebagai penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam pembelajaran konsep dasar biologi.

Validasi uji kelayakan bahasa memiliki dua aspek penilaian yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian. Adapun hasil dari validasi ditinjau dari segi kelayakan bahasa sebesar 4,2% dan kelayakan penyajian sebesar 4,5% serta validasi keseluruhan aspek sebesar 4,33%. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang ditinjau dari kedua segi aspek tersebut memiliki interpretasi sangat baik dan produk instrumen yang dikembangkan layak digunakan sebagai penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam pembelajaran konsep dasar biologi.

Validasi Empiris

1. Uji coba *one to one*

Uji coba *one to one* pada penelitian ini menggunakan jumlah siswa sebanyak 10 orang. Dimana mahasiswa dipilih secara acak yang sedang atau yang telah mengikuti perkuliahan mata kuliah konsep dasar biologi. Setelah melakukan ujicoba, mahasiswa memberikan masukan-masukan mengenai instrumen yang telah peneliti kembangkan, adapun komentar dan masukan yang diberikan berupa adanya kalimat yang kurang dipahami serta ada beberapa pertanyaan yang mereka kesulitan untuk menjawabnya.

Dalam melakukan uji coba produk *one to one* diperoleh data rata-rata persentase penilaian seluruh aspek adalah 66,89% dan jawaban butir soal mahasiswa peroleh adalah 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan oleh peneliti memiliki interpretasi yang baik dan penalaran proporsional mahasiswa dinyatakan rata-rata baik. Dari hasil validasi dan uji coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bahwa produk penilaian tersebut layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar biologi. Sebelum melakukan ujicoba kelompok kecil dan ujicoba lapangan skala besar maka perlu dilakukan berbagai

macam revisi baik berupa masukan dari beberapa para ahli (*expert judgement*) maupun mahasiswa.

2. Uji coba kelompok kecil

Setelah melakukan ujicoba *one to one*, maka langkah selanjutnya yaitu merevisi produk yang akan digunakan. Setelah Draf I selesai, maka dapat dilakukan ujicoba pada kelompok kecil, hal ini dilakukan guna melihat dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam produk model yang dikembangkan. Revisi yang dilakukan telah melalui proses *expert judgement* oleh 3 orang ahli, masing-masing 2 orang pada ahli materi biologi, dan 1 orang pada ahli bahasa. Ujicoba yang dilakukan pada kelompok kecil ini yaitu melibatkan 15 orang mahasiswa, yang dipilih secara random yang sedang mengikuti mata kuliah konsep dasar biologi maupun yang telah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Dari rekapitulasi data yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Lapangan Kelompok Kecil

No	Aspek Penilaian	Presentasi Keseluruhan	Interprestasi
1	Variasi	71,66667	Baik
2	Perbandingan	74,1667	Baik
3	Proporsi	74,1667	Baik
4	Rasional	29,1667	Kurang Baik
Rata-rata		62,2917	Baik

Keterangan:

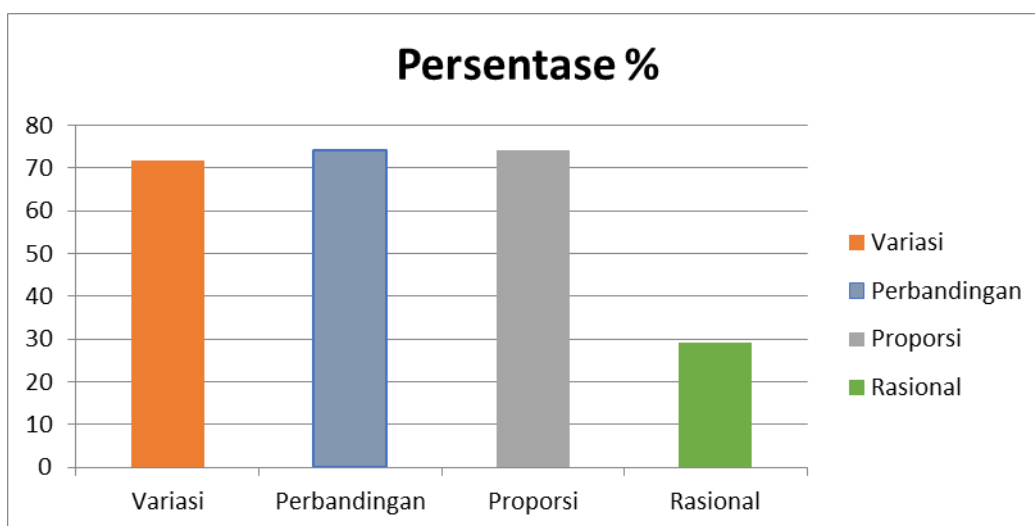
81% - 100% = Sangat Baik

61% - 80% = Baik

41% -60% = Sedang

21% - 40% = Tidak Baik

0 – 25% = Sangat Tidak Baik



Gambar 4.2 Diagram Batang Persentase Aspek Proporsional Kelompok Kecil

Dari hasil ujicoba kelompok kecil di atas diperoleh hasil rata-rata persentase penilaian seluruh aspek sebesar 62,29% yang berarti bahwa produk penilaian yang dikembangkan memiliki interpretasi yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian dalam mengukur kemampuan penalaran proporsional mahasiswa.

3. Uji coba kelompok besar

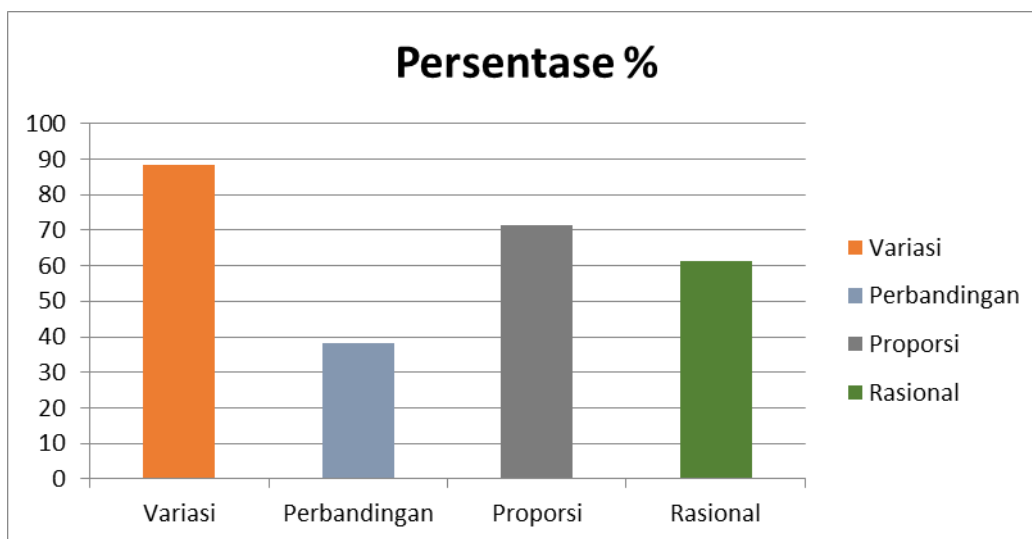
Uji coba kelompok besar dapat diuji cobakan kepada mahasiswa setelah dilakukan revisi kembali terhadap produk model yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan oleh *expert judgement* dan mahasiswa. Dari hasil ujicoba yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 30 orang tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Kelompok Besar

No	Aspek Penilaian	Presentasi Keseluruhan	Interprestasi
1	Variasi	88,3333	Sangat Baik
2	Perbandingan	38,3333	Kurang Baik
3	Proporsi	71,25	Baik
4	Rasional	61,25	Baik
Rata-rata		64,7917	Baik

Keterangan:

- 81% - 100% = Sangat Baik
- 61% - 80% = Baik
- 41% -60% = Sedang
- 21% - 40% = Tidak Baik
- 0 – 25% = Sangat Tidak Baik



Gambar 4.3 Diagram Batang Persentase Aspek Proporsional Kelompok Besar

Dari hasil ujicoba kelompok besar di atas diperoleh hasil rata-rata persentase penilaian seluruh aspek sebesar 64,79% yang berarti bahwa produk penilaian yang dikembangkan memiliki interpretasi yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian dalam mengukur kemampuan penalaran proporsional mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar biologi.

KESIMPULAN

Guru belum memiliki produk penilaian khusus untuk mengukur berfikir tingkat tinggi mahasiswa, terutama dalam aspek proporsional. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, model penilaian yang dikembangkan peneliti mampu mengukur kemampuan penalaran mahasiswa calon guru sekolah dasar. Melalui rangkaian proses uji coba kelompok kecil maupun besar, ditemukan hasil interpretasi yang cukup baik. Tentunya, model penilaian ini akan layak untuk diterapkan agar dapat membantu guru dalam mengukur tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki mahasiswa yang akan menjadi calon guru, sehingga guru dapat memberikan rangsangan agar setiap aspek yang ada pada penalaran proporsional dapat tercapai yang nantinya akan menunjang keberhasilan anak dalam berfikir tingkat tinggi dalam kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2011). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2011). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Borg, W.R. dan Gall, M.D. (2009). *Educational Research: An Introduction*. London: Longman.
- Bruce, Joyce, Marsha Well, dan Emily Calhoun. (2009). *Models of Teaching*. America: Allyn an Bacon Pearson.
- Desmita. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fah, Yoon Lay. (2009). *Logical Thinking Abilities Among Form 4 Students In The Interior Devision of Sabah Malaysia*. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia Vol. 32 No. 2 (diakses 10 Oktober 2016).
- Gallenstein, Nancy L. (2005). *Engaging Young Children in Science and Mathematics*. Journal of Elementary Science Education Vol. 17 No. 2. (diakses 15 Oktober 2016).
- Glaser, Kathrin dan Peter Riegler. (2015). *Beginning Students May Be Less Capable of Proportional Reasoning Than They Appear To be*. Journal of Teaching Mathematics and Its Applications Vol. 34. (diakses 08 Oktober 2016).
- Hino, Keiko Ito. "Proportional Reasoning and Learning in American and japanese Sixth-Grade Students." ProQuest Dissertations Publishing (diakses 08 Oktober 2016).

- Howe, Christine et al. (2015). "*Rational Number and Proportional Reasoning in Early Secondary School Toward Principled Improvement in Mathematics*" *Research in Mathematics Education* Vol. 17 No. 1. UK: Routledge.
- Jamaris, Martini. (2006). *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Grasindo.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012.
- Lesh, R., Post, T., dan Behr, M. *Proportional Reasoning Number Concepts and Operations on the Middle Grades*. Journal of Rston Lawrence Erlbaum & National Council of Teachers of Mathematics (diakses 08 Oktober 2016).
- Mardapi, Djemari. (2007). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maryatun, Ika Budi. (2016). *Peran Pendidik PAUD dalam Membangun Karakter Anak*. *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 5 (diakses 9 Maret 2018)
- Norton, Stephen J. (2005). *The Construction of Proportional Reasoning*. Queensland University of Technology Vol. 4 Melbourne: PME. (diakses 08 Oktober 2016).
- Nugraha, Ali. (2005). *Pengembangan Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Tinggi.
- Nur. (1991). *Pengadaptasian Test of Logical Thinking (TOLT) dalam Setting Indonesia*. *Laporan Hasil Penelitian, IKIP Surabaya*.
- Nur, Andi Saparuddin. (2013). *Pemecahan Masalah Matematika Sebagai Sarana Mengembangkan Penalaran Formal Siswa Sekolah Menengah Pertama*. *Jurnal Sainsmat* Vol. 11 No. 1. (diakses 8 Oktober 2016).
- Nurani, Yuliani dan Bambang Sujiono. (2010). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: Indeks.
- Richey, Rita C. (2007). *Design and Development Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc..
- Pribadi, Benny A. (2009). *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Putra, Sitiavata Rizema. (2013). *Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains*. Yogyakarta: Diva Press.
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Eko. (2018). *Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAUD dan SD/MI*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno dan Suyadi. (2016). *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi mengacu kerangka Kualifikasi nasional Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tegeh, I Made, I Nyoman Jampel dan Ketut Pudjawan. (2014). *Model Penelitian Pengembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Walle, Van de dan Jhon A. (2008). *Matematika Sekolah Dasar dan Menengah Jilid 2 Edisi 6* Terjemahan Suryono. Jakarta: Erlangga.

PENGUATAN BUDAYA MUTU DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH

M. Musfiqon - Balai Madrasah Keagamaan Surabaya

Email: Fiqon78@gmail.com. Hp.081515973369

ABSTRACT

Makalah ini bertujuan membahas konsep penguatan budaya mutu layanan pendidikan bagi pengelola lembaga pendidikan. Dalam makalah ini dikaji juga strategi menumbuhkan budaya mutu pelaksanaan pendidikan agar kualitas pendidikan madrasah menjadi lebih bagus hasilnya, baik dari sisi input, proses dan hasil. Strategi mutu dalam pelayanan pendidikan di madrasah diawali dengan beberapa langkah yaitu (1) menentukan kriteria mutu, (2) membangun komitmen mutu, (3) membangun budaya mutu, (4) mengembangkan mutu layanan pendidikan, dan (5) mengevaluasi budaya mutu madrasah. Dengan demikian, pendidikan madrasah akan mampu bersaing dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan, bahkan dari lembaga bertaraf internasional yang telah saat ini menjadi kebutuhan global. Kualitas mutu layanan pendidikan madrasah merupakan modalitas penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam ke depan agar mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain, baik kancah nasional, regional, serta tingkat internasional. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam legendaris akan menjadi lebih dipercaya masyarakat melalui penguatan budaya mutu layanan pendidikan. Bentuk layanan berbasis budaya mutu dapat dilakukan dengan melakukan penguatan kualitas akademik yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, serta standar penilaian. Keempat komponen ini jika dijalankan dengan optimal akan menjadi indikator sekaligus deskriptor layanan pendidikan di madrasah berbasis budaya mutu. Strategi mutu dalam pelayanan pendidikan di madrasah perlu diawali dengan beberapa langkah yaitu (1) menentukan kriteria mutu, (2) membangun komitmen mutu, (3) membangun budaya mutu, (4) mengembangkan mutu layanan pendidikan, dan (5) mengevaluasi budaya mutu madrasah. Dengan demikian, madrasah akan mampu bersaing dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, bahkan bertaraf internasional yang telah menjadi kebutuhan global. Kualitas mutu layanan pendidikan tersebut merupakan modalitas penting dalam pengembangan madrasah ke depan agar mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Madrasah akan menjadi lebih dipercaya masyarakat melalui penguatan budaya mutu pendidikan.

Keywords: *Budaya Mutu, Layanan, Madrasah*

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap mutu Pendidikan semakin kuat. Masyarakat terus menuntut perbaikan layanan pendidikan berbasis mutu dengan kriteria mutu yang sangat detail. Kualitas proses penyelenggaraan pendidikan dan kualitas alumni madrasah akan menjadi ukuran sebuah mutu lembaga pendidikan dalam memberikan layanan.

Kompetisi dunia pendidikan pun kini semakin ketat. Persaingan konsep kurikulum, sarana pra sarana, program kegiatan pembelajaran serta kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi ukuran sebuah lembaga pendidikan dikatakan bermutu atau tidak bermutu. Bahkan dalam kompetisi internasional, pendidikan dihadapkan pada persaingan mutu alumni yang *well educated*, *well skill* dan *well technology*. Lulusan lembaga pendidikan yang bermutu tidak hanya memiliki pengetahuan tentang ilmu serta wawasan yang dipelajari, tetapi juga memiliki *skill* serta kepribadian yang memadai. Untuk itu upaya, menyiapkan daya saing madrasah perlu dilakukan, terutama madrasah.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal menempati posisi strategis dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), yang kompeten yang memiliki pemahaman agama yang kuat serta memiliki keahlian yang handal. Dunia pendidikan kini ditantang untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dengan beragam skill serta keluasan pengetahuan. Lulusan madrasah saat ini tidak hanya dihadapkan pada kebutuhan nasional dalam negara Indonesia, tetapi sudah harus berpikir global. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan (UN: 2014)

Dalam rangka menyiapkan daya saing madrasah, pilihan paling tepat bagi pemerintah adalah membangun sistem pendidikan madrasah melalui penguatan budaya mutu pelayanan pendidikan secara komprehensif. Kurikulum dan program pendidikan diarahkan dan berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keimanan, keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan bertaraf internasional. Yaitu manusia yang berkarakter, memiliki kemampuan berbasis multi literasi, serta kecakapan hidup. Manusia adalah aset yang paling nyata dari sebuah bangsa yang mampu menciptakan produktivitas dan kesejahteraan (*prosperity*) di berbagai bidang kehidupan masyarakat di manapun juga. SDM adalah kekuatan utama dalam seluruh bidang pembangunan bangsa dan oleh karena itu pembangunan madrasah harus terpadu dan berjalan seirama, selaras dan serasi dengan pembangunan pada bidang lain, terutama program prioritas negara.

Layanan pendidikan madrasah merupakan hal yang esensial bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu permasalahan madrasah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah masih rendahnya mutu madrasah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu madrasah, antara lain melalui berbagai pelatihan bagi tenaga pendidik dan peningkatan kompetensitenaga kependidikan, pengadaan buku, perbaikan sarana dan prasarana. Namun peningkatan mutu madrasah belum menunjukkan hasil yang berarti dan merata, karena berbagai faktor.

Pendidikan madrasah yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas madrasah dalam mentransformasikan peserta madrasah untuk memperoleh nilai tambah, baik dari

aspek olah pikir, rasa, hati dan raganya. Dalam konsep Bloom disebut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keberhasilan lembaga pendidikan dipengaruhi pengembangan budaya mutu yang dilakukan oleh pimpinan lembaga, tenaga pendidik, dan lingkungan akademik di madrasah dalam memberi layanan pendidikan.

Pengembangan budaya mutu (*quality culture*) di madrasah bukanlah sesuatu yang bersifat instan dan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses perjuangan yang relatif panjang dengan berbagai tantangan dan bahkan resistensi yang dihadapi. Untuk pengembangan budaya mutu harus dimulai dari kemauan dan kemampuan kepala madrasah bersama tenaga pendidik, staf dan *stakeholders* dalam melakukan *educational review* secara cermat dan obyektif.

Dalam konteks ini, budaya mutu bertujuan untuk membentuk budaya mutu di madrasah agar menjadi organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi dapat dilaksanakan semua komponen madrasah. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan hendaknya berusaha membangun kesadaran para anggotanya mulai dari pimpinan sendiri, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, peserta didik, dan berbagai unsur yang terkait, misalnya satker dan para pengguna lulusan (Prim Masrokan Mutohar, 2013:123).

Madrasah sebagai salah satu lembaga penyedia jasa layanan pendidikan (*the provider of education service*) harus mampu memenuhi tuntutan mutu yang dibutuhkan masyarakat. Paparan di atas mendorong penulis untuk menyusun makalah berjudul penguatan budaya mutu dalam layanan pendidikan di madrasah. Dengan harapan makalah ini dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas lulusan madrasah.

KONSEP BUDAYA MUTU MADRASAH

Mutu identik dengan hasil sebuah produk yang dalam konteks madrasah dapat diartikan alumni madrasah. Konsep mutu pun memiliki beragam definisi yang disesuaikan dengan perspektif pakar yang mendefinisikan serta disesuaikan bidang ilmu yang dimiliki. Diantara pakar kajian mutu yang sering menjadi rujukan penulisan antara lain: Crosby (1979), Deming (1982), Feigenbaum (1986), Juran (1993), dan Garvi dan Davis (1994). Para pakar ini memiliki konsep mutu setelah melakukan kajian serta penelitian, yang pada awalnya banyak dilakukan di dunia perusahaan.

Crosby mendefinisikan mutu adalah sebuah produk yang distandarkan. Sebuah produk dikatakan bermutu jika hasil produksinya sesuai dengan standard mutu yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai dengan standard mutu yang ditentukan sejak awal berarti tidak bermutu. Lembaga pendidikan sejak awal telah menentukan kriteria mutu alumni melalui standard mutu madrasah. Jika standard lulusan telah dipenuhi selama proses madrasah dan hasilnya sesuai kriteria mutu yang ditetapkan maka lembaga pendidikan tersebut dikatakan bermutu.

Sementara itu, Deming mengatakan mutu adalah kesesuaian pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu adalah yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jika konsumen puas maka akan membeli terus bahkan memunculkan kepercayaan atau *minded*. Dalam konteks madrasah dapat diartikan,

madrrasah yang mampu memenuhi kebutuhan user dan *stakeholders* maka lembaga tersebut disebut bermutu.

Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Suatu produk dianggap bermutu jika memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan perusahaan. Senada dengan konsep mutu Juran, yang mengatakan mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Begitu juga konsep mutu Davis yang mengatakan mutu adalah pemenuhan standard pelanggan atau lebih dari keinginan pelanggan (Abdul Hadis dan Nurhayati, 2014:84-86). Dalam konsep ini kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama dalam mengukur mutu madrasah. Kepuasan peserta didik, orang tua, serta masyarakat pengguna alumni madrasah akan menentukan ukuran mutu madrasah.

Berbagai konsep mutu di atas dapat dipahami bahwa mutu madrasah adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama peserta didik dan orang tua dalam meningkatkan skill dan pengetahuan. Jika alumni madrasah memiliki kriteria mutu dan dapat memenuhi harapan masyarakat maka madrasah tersebut dapat dikatakan bermutu. Ukuran mutu madrasah mungkin lebih kompleks karena indikator teknisnya tidak berupa benda fisik, tetapi banyak yang berbentuk non fisik. Pengetahuan, skill, peningkatan layanan, sikap, serta mindset peserta didik.

Meski demikian, ukuran mutu madrasah tetap dapat dilihat melalui berbagai indikator iringan yang mencerminkan keberhasilan madrasah dalam mewujudkan budaya mutu pendidikan. Harapan masyarakat dan satker diwujudkan dalam peningkatan kualitas mutu di madrasah. Lembaga pendidikan yang mampu membaca kebutuhan masyarakatlah yang akan makin dipercaya untuk melaksanakan pendidikan bagi masyarakat.

Secara lebih tegas dapat diartikan, mutu madrasah adalah pemenuhan standar pendidikan yang berorientasi pada kepuasan alumni, orang tua, dan masyarakat yang mendapatkan layanan prima. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang dapat memenuhi harapan masyarakat melalui standard mutu yang telah ditetapkan melalui penjaminan mutu pendidikan.

Mutu lembaga pendidikan memiliki karakter tersendiri, berbeda dengan mutu perusahaan. *Input*, proses, dan *output* lembaga pendidikan tidak sama dengan perusahaan, karena input berupa manusia. Oleh karena itu, ukuran mutu serta pembentukan budaya mutu juga berbeda dengan perusahaan. Secara lebih jelas dipaparkan konsep mutu menurut para ahli sebagai berikut:

a. Filsafat Mutu Deming

Karya terpenting W. Edwards Deming, *out of the crisis*, dipublikasikan pada tahun 1982. Tujuan diterbitkannya buku tersebut adalah untuk mentransformasikan gaya manajemen amerika. Sebagaimana ia kemukakan dalam pengantar buku tersebut, “ini bukanlah sebuah rekonstruksi atau revisi kerja... manajemen amerika memerlukan struktur baru secara keseluruhan, dari dasar hingga ke atas.”Deming prihatin terhadap kegagalan manajemen Amerika dalam merencanakan masa depan dan meramalkan per-soalan yang belum muncul. Dia percaya bahwa pendekatan menggunakan system “pemadam kebakaran” memiliki asosiasi dengan perkiraan

jangka pendek yang mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya produksi dan meningkatnya harga yang harus dibayarkan pelanggan. Konsekuensinya adalah hilangnya pasar dalam hal tersebut akan mengorbankan para pekerja.

Deming melihat bahwa masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Masalah utama dalam dunia industri adalah kegagalan manajemen senior dalam menyusun perencanaan kedepan. Biasanya, perencanaan tersebut bukan merupakan serangkaian langkah untuk menerapkan mutu, tetapi merupakan desakan serius terhadap manajemen (Edward Sallis, 2015: 81).

Tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan agar organisasi berhasil dengan baik. Empat belas poin deming yang termasyhur merupakan kombinasi filsafat baru tentang mutu dan seruan terhadap manajemen untuk merubah pendekatannya. Dia mengombinasikan konsep tersebut mulai dari wawasan psikologis sampai pada kendala-kendala dalam mengadopsi kultur mutu (*Quality culture*). Pendekatan dengan sistem “Mencegah lebih baik dari pada mengobati” merupakan kontribusi unik deming dalam memahami bagaimana cara menjamin pengembangan mutu. Empat belas poin tersebut merupakan intisari dari teori dari teori manajemennya. Sementara “*tujuh penyakit mematikan*” adalah konsepnya tentang kendala bagi perbaikan mutu. (Edward Sallis: 2006)

b. Empat Belas Langkah Philip Crosby Untuk Meraih Mutu

Nama Philip Crosby selalu diasosiasikan dengan dua ide yang sangat menarik dan sangat kuat dalam mutu. Pertama, ide bahwa mutu itu gratis. Menurut Crosby, terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu.

Kedua, ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu- serta semua hal yang tidak bermutu lainnya-bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Ini adalah gagasan tanpa cacatnya yang kontroversial. Kedua ide tersebut sangat menarik jika diterapkan dalam dunia pendidikan. Gagasan bahwa peningkatan mutu dapat membantu organisasi menghilangkan kegagalan, khususnya kegagalan pelajar dan murid merupakan gagasan yang sering kali diabaikan oleh sebagian besar institusi. Crosby-seperti para guru lain-telah berusaha keras menekankan bahwa tanpa cacat adalah sebuah hal yang dapat diwujudkan meskipun memang sangat sulit. Sebagaimana yang ia tulis, “mutu itu Cuma-Cuma. Itu memang bukan hadiah, tetapi Cuma-Cuma. Semua hal yang membutuhkan uang adalah hal yang tidak bermutu-segala bentuk kegiatan yang tidak melibatkan mutu sejak awal”.

Program peningkatan mutu Crosby adalah salah satu dari bimbingan atau arahan yang paling detail dan praktis. Tidak seperti pendekatan deming yang cenderung lebih filosofis, pendekatan Crosby dapat diterapkan sebagai rencana kegiatan. Crosby adalah seorang penulis yang populer dan pendekatannya sangat praktis. Dalam bukunya, *quality is free*, crosby menguraikan pendapatnya bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik. Penghematan sebuah institusi akan datang dengan sendirinya ketika institusi tersebut melakukan segala sesuatunya dengan benar (Edward Sallis, 2015:97)

STRATEGI BUDAYA MUTU

Melalui lembaga penjaminan mutu, pemerintah melakukan penguatan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui program akreditasi madrasah dalam melaksanakan program pendidikan. Kegiatan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah setiap empat tahun sekali ini dimaksudkan untuk memastikan jaminan mutu pendidikan secara nasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan jaminan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu harus dibangun dari lembaga pendidikan melalui optimalisasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan komite madrasah untuk memastikan standard mutu pendidikan telah dilaksanakan. Dengan demikian, sebaiknya paradigm penjaminan mutu bergeser dari inspeksi dan *quality control* menuju *quality assurance, improvement dan development* (Djam'an Satori, 2016: 128). Dengan demikian pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan madrasah dilaksanakan secara sinergis antara pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta pemerintah melalui Kementerian Agama.

Jaminan mutu pendidikan madrasah dilaksanakan untuk memberi kepastian proses dalam mewujudkan alumni madrasah sesuai dengan kriteria mutu yang telah ditetapkan pemerintah maupun yang ditetapkan lembaga pendidikan itu sendiri. Penjaminan mutu pendidikan madrasah perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik dalam pengelolaan lembaga pendidikan, baik yang lembaga pemerintah atau pun yang swasta. Sebab, sebagian besar madrasah adalah swasta. Didirikan oleh masyarakat dan dikelola masyarakat.

Memperhatikan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa praktik *Quality Assurance* dalam pendidikan merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan yang menempatkan sistem penjaminan mutu sebagai bagian integral dari sistem manajemen di madrasah. Tata kerja lembaga pendidikan yang telah berkomitmen melaksanakan jaminan mutu akan membangun budaya mutu yang ditunjukkan dalam peningkatan mutu berkelanjutan (Djam'an, 2016:141).

Penjaminan mutu pendidikan madrasah akan memberikan dampak positif bagi lembaga pendidikan Islam. Tata kelola administrasi, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta manajemen peserta didik akan memiliki kepastian prosedur dalam pelaksanaannya. Di sisi lain masyarakat dapat melihat serta memiliki kepastian *out put* saat peserta madrasah kembali di tempat tugas.

Kesadaran tentang penjaminan mutu pendidikan ini dapat dilihat dari makin banyaknya madrasah yang tidak hanya melakukan akreditasi dan peningkatan kualitas proses, tetapi juga makin banyaknya lembaga pendidikan nirlaba yang melakukan standarisasi mutu melalui *International Organization for Standardization (ISO)*. Penjaminan mutu pendidikan ini disesuaikan dengan standard perusahaan bertaraf internasional.

MEMBANGUN BUDAYA MUTU MADRASAH

a. Mutu Madrasah

Dalam situasi persaingan global yang semakin kompetitif, persoalan kualitas menjadi isu sentral bagi setiap pendidikan. Kemampuan lembaga pendidikan untuk

menyediakan alumni berkualitas akan menjadi senjata untuk memenangkan persaingan, karena dengan memberikan produk berkualitas kepuasan masyarakat akan tercapai. Oleh karena itu pendidikan harus menentukan definisi yang tepat dan pemahaman yang akurat tentang kualitas atau mutu pendidikan.

Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan. Akan tetapi aspek ini bukanlah satu-satunya aspek kualitas. TQM merupakan konsep yang lebih luas, yang tidak hanya menakanan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya. Bahkan Stephen Uselac menegaskan bahwa kualitas bukan mencakup produk dan jasa, tetapi juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia (Fandy Tjiptono & Anastasiana Diana, 2001).

Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Performance to the standard expected by the customer* (Penampilan terhadap standar yang diharapkan oleh pelanggan).
- b. *Meeting the customer's needs the first time and every time* (Memenuhi kebutuhan pelanggan pertama kali dan setiap waktu).
- c. *Providing our customers with products and services that consistently meet their needs and expectations* (Menyediakan pelanggan kita dengan produk dan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan mereka).
- d. *Doing the right thing right the first time, always striving for improvement, and always satisfying the customer* (Melakukan hal yang benar di awal, selalu berjuang untuk perkembangan, dan selalu memuaskan pelanggan).
- e. *A pragmatic system of continual improvement, a way to successfully organize man and machines* (Sebuah sistem perbaikan berkesinambungan yang pragmatik, cara untuk mengelola manusia dan mesin secara sukses).
- f. *The meaning of excellence* (Makna keunggulan/ keistimewaan).
- g. *The unyielding and continuing effort by everyone in on organization to understand, meet, and exceed the needs of its customers* (Tidak mau menyerah dan melanjutkan usaha dengan setiap orang dalam sebuah organisasi untuk memahami, menemui dan mengutamakan kebutuhan customernya).
- h. *The best product that you can produce with the materials that you have to work with* (Hasil terbaik yang dapat kamu hasilkan dengan bahan-bahan yang harus kamu kerjakan).
- i. *Continuous good product which a customer can trust* (Produk bagus yang berkesinambungan yang dapat dipercaya oleh customer).
- j. *Not only satisfiying customers, but delinghting them, innovating, creating* (Tidak hanya memuaskan customer, tetapi menyenangkan, menemukan dan menciptakan) (Fandy Tjiptono & Anastasiana Diana, 2001).

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
- b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.
- c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Dengan berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goetsch dan Davis (Goetsch & Davis, 1994) membuat definisi mengenai kualitas yang lebih luas cakupannya. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut (Tom Petters dan Nancy Austin, *A Passion For Excellence*, 1985), Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri (Edward Sallis, 2006).

Menurut *The American Society of Quality Control*, Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. (Evans dan dean, 2003) (Nursyabani Purnama, 2006). Sedangkan menurut filsafat Jepang, kualitas adalah "zero defect" mengerjakan pertama kali dengan benar.

Definisimutu atau kualitas yang populer di antaranya dikembangkan oleh empat guru atau empat pakar kualitas, yaitu Crosby, Deming, Juran dan Feigenbaum antara lain:

- 1) Menurut **Crosby**, mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.
- 2) Menurut **Deming**, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
- 3) Menurut **Juran**, mutu adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- 4) Menurut **Feigenbaum**, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*) (Nasution M.N., 2001).

Madrasah yang berfokus pada mutu akan memiliki kapasitas dalam melaksanakan pendidikan dengan sistem kontrol kualitas yang terukur. Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (*Conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya (Philip B. Crosby, 1979). Oleh karena itu, mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan madrasah dituntut untuk memiliki baku standar mutu madrasah yang telah ditetapkan. Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar (Deming, W. Edward, 1989). Dalam konsep Deming, madrasah yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar) nya. Sedangkan menurut konsep Juran adalah bahwa

dasar misi mutu sebuah madrasah dalam mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna, seperti peserta didik, orang tua, dan masyarakat (Jerome S., 2005) Masyarakat dimaksud adalah secara luas sebagai pengguna alumni, yang meliputi satker kementerian, lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat luas.

Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*) (Armand V. Fiegenbaum, 1991). Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan madrasah bermutu adalah madrasah yang dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Mutu menurut Carvin, sebagaimana dikutip oleh Nasution, adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan pelanggan pada suatu produk selalu berubah, sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan organisasi agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (Nasution M.N., 2001).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian mutu lembaga pendidikan mengandung tiga unsur, yaitu: (1) Kesesuaian dengan standar, (2) Kesesuaian dengan harapan stakeholders, (3) Pemenuhan janji yang diberikan. Dilihat dari sumbernya terdiri dari dua sisi yaitu produsen dan konsumen. Produsen menentukan persyaratan atau spesifikasi kualitas, sedangkan konsumen menentukan kebutuhan dan keinginan. Pendefinisian akan akurat jika produsen mampu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan atas produk ke dalam spesifikasi produk yang dihasilkan.

Mutu pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna). Output dinyatakan bermutu jika hasil pelaksanaan madrasah baik dari sisi proses akademik dan non akademik peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila alumni madrasah mengalami peningkatan pengetahuan dan *skill* dan masyarakat merasa puas dengan layanan publik (Husaini Usman, 2010).

Budaya kualitas adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk kelangsungan dan keberlanjutan perbaikan kualitas. Budaya kualitas terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dari harapan tentang promosi kualitas (Nursyabani Purnama, 2006). Dalam konsep ini layanan pendidikan tidak hanya mengejar ketersediaan materi tetapi juga mendidik, mengarahkan, serta menginternalisasikan nilai karakter positif.

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Stoner, dkk., memberikan arti budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota

masyarakat tertentu. (Stoner dkk., 1995) Pengertian lain yang dikemukakan oleh Krench dalam Sugeng, adalah sebagai suatu pola semua susunan, baik internal maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah anggotanya (Sugeng Listiyo Prabowo, 2008). Budaya di dalamnya juga termasuk semua cara yang telah teorganisasi, kepercayaan, asumsi, nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. Beberapa pemikir dan penulis telah mengadopsi tiga sudut pandang berkaitan dengan budaya:

- 1) Budaya merupakan produk yang sesuai dengan pasar di tempat organisasi berprestasi, peraturan yang menekan dan sebagainya.
- 2) Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi, misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi.
- 3) Budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan mereka, hal ini berarti produk perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi (Sugeng Listiyo Prabowo, 2008).

Budaya mengandung berbagai aspek pokok menurut Bounds, G, 1994 dalam Mulyadi (Mulyadi, 2010), seperti berikut:

- a. Budaya mengandung konstruksi sosial unsur-unsur budaya, seperti nilai-nilai, keyakinan dan pemahaman, yang dianut oleh semua anggota kelompok.
- b. Budaya memberikan tuntutan bagi para anggotanya dalam memahami suatu kejadian.
- c. Budaya berisi kebiasaan atau tradisi
- d. Dalam suatu budaya, pola nilai-nilai, keyakinan, harapan, pemahaman, dan perilaku timbul dan berkembang sepanjang waktu
- e. Budaya mengarahkan perilaku: kebiasaan atau tradisi merupakan perekat yang mempersatukan suatu organisasi dan menjamin bahwa para anggotanya berperilaku sesuai dengan norma.
- f. Budaya masing-masing organisasi bersifat unik.

Budaya madrasah adalah perwujudan sehari-hari dari nilai-nilai dan tradisi yang mendasari madrasah dalam melaksanakan program pembelajaran. Hal ini terlihat pada bagaimana tenaga pendidik dan karyawan berperilaku. Harapan peserta didik terhadap lembaga pendidikan adalah untuk mendapatkan nilai tambah. Nilai-nilai dalam interaksi tersebut akan mencerminkan kualitas budaya lembaga pendidikan.

Goetch dan Davic (2000) dalam Nusyabani (Mulyadi, 2010), menyebutkan karakteristik umum organisasi yang memiliki budaya kualitas sebagai berikut:

- a. Perilaku setiap individu dalam organisasi sesuai slogan
- b. Masukan dari konsumen secara aktif dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas secara terus menerus.

- c. Para pekerja diberikan keterlibatan dan perbedayaan
- d. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kelompok
- e. Manajer level eksekutif dituntut memiliki komitmen dan keterlibatan, tetapi pertanggungjawaban yang menyangkut kualitas tidak bisa didelegasikan.
- f. Sumber daya yang diperlukan organisasi tersedia kepada dan di mana diperlukan untuk mendukung perbaikan kualitas yang kontinyu
- g. Pendidikan disediakan bagi para pekerja semua level, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk program perbaikan kualitas secara kontinyu.
- h. Sistem penghargaan dan promosi didasarkan atas kontribusi pekerja terhadap perbaikan kualitas terus menerus.
- i. Rekan pekerjaan dipandang sebagai konsumen internal.
- j. Pemesok diperlakukan sebagai partner (mitra kerja).

Juran dalam Goetch dan Davis (2000) (Mulyadi, 2010) memberikan rumusan organisasi yang memiliki budaya kualitas yang kuat sebagai berikut:

- a. Filosofi manajemen dijabarkan secara luas
- b. Menekankan pentingnya sumber daya manusia organisasi
- c. Menyelenggarakan upacara untuk merayakan momen-momen penting organisasi
- d. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pekerja yang berhasil
- e. Memiliki jaringan komunikasi internal yang efektif untuk mengkomunikasikan budaya
- f. Memiliki aturan perilaku yang bersifat informal
- g. Memiliki sistim nilai yang kuat
- h. Memiliki standar kinerja yang tinggi
- i. Budaya organisasi terdefinisi secara jelas.

Menurut Woods sebagaimana dikutip oleh Kamaruddin, terdapat enam nilai budaya mutu yang menjadi dasar sebuah organisasi/institusi dalam usaha menerapkan budaya kualitas secara menyeluruh yaitu meliputi: (1) Kami semua adalah bersama (organisasi, pembekal dan pelanggan); (2) Tiada orang bawah atau atasan dibenarkan; (3) Terbuka dan perhubungan yang ikhlas; (4) Pekerja boleh capai maklumat yang diperlukan; (5) Fokus kepada proses; (6) Tiada kejayaan atau kegagalan, tetapi pembelajaran daripada pengalaman (Mulyadi, 2010).

Visi dan misi lembaga pendidikan merupakan faktor yang sangat kuat mempengaruhi budaya mutu layanan pendidikan madrasah. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa budaya merupakan sesuatu yang dibangun atas nilai-nilai yang dianut oleh organisasi termasuk madrasah. Khasali dalam mulyadi (Mulyadi, 2010)

memberikan gambaran bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk budaya organisasi yang juga sering disebut dengan budaya korporat.

Budaya kelompok yang berintikan nilai-nilai untuk selalu berkembang itulah yang kemudian disebut dengan budaya mutu. Budaya ini akan diwujudkan dalam hal-hal yang nampak (*visible*) seperti logo, simbol-simbol yang kasat mata, cara-cara berpakaian, seremonial-seremonial yang dilakukan, cerita/perilaku-perilaku yang muncul, ritual-ritual dan hal-hal lain yang kasat mata.

Komunikasi merupakan faktor penting dalam banyak hal, termasuk dalam menumbuhkan budaya mutu di madrasah. Organisasi yang memiliki budaya mutu yang baik selalu memiliki model komunikasi yang efektif, baik antar individual dalam kelompok maupun antar kelompok. Alur komunikasi dapat digunakan dengan leluasa, terbuka, jujur dan berlangsung dua arah, bahkan sebuah perusahaan besar. Pengambilan keputusan akan sangat terlihat dalam organisasi-organisasi yang memiliki budaya mutu. Pengambilan keputusan dalam organisasi seringkali berkaitan dengan wewenang atau otoritas. Otoritas yang cukup dari suatu jabatan akan terhindar dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berbelit-belit.

Perencanaan kurikulum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi budaya mutu madrasah. Hal ini dikarenakan kurikulum merupakan pengendali utama proses pembelajaran di madrasah. Dapat diibaratkan bahwa kurikulum merupakan "software" sistem operasi di lembaga pendidikan. Tanpa kurikulum maka lembaga pendidikan tidak lagi disebut lembaga pendidikan. Kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan bagaimana proses penyusunannya, bagaimana proses pengembangannya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum akan mempengaruhi bagaimana budaya mutu di lembaga pendidikan tersebut dibangun atau ditumbuhkan.

Manajemen sumber daya dan anggaran merupakan faktor penting lain yang mempengaruhi budaya mutu di lembaga pendidikan. Anggaran dan keuangan merupakan jantung utama dalam keseluruhan detak organisasi, termasuk madrasah. Anggaran di madrasah hendaknya memfokuskan pelaksanaannya pada pelaksanaan kurikulum, karena pelaksanaan kurikulum merupakan inti dari kegiatan yang ada di lembaga pendidikan dengan bentuk utamanya adalah kegiatan pembelajaran di madrasah.

Disiplin merupakan faktor penting lain yang dapat mempengaruhi budaya mutu di madrasah. Khasali dengan mengutip dari Collins mengatakan bahwa budaya disiplin merupakan faktor penting dalam meraih keunggulan bersaing. Tiga pilar utama yang membentuk budaya disiplin adalah: 1) *Discipline people*, manusia yang diseleksi ditempatkan dengan baik, 2) *Discipline action*, strategi yang diimplementasikan dengan benar, 3) *Discipline thought*, mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin, tetapi dengan budaya disiplin

Faktor terakhir yang mempengaruhi budaya mutu lembaga pendidikan adalah kualitas hubungan dengan budaya masyarakat. Hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan orangtua, dengan dunia usaha dan dengan *stakeholders* lainnya akan menyebabkan budaya mutu di madrasah tumbuh seiring dengan faktor perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan yang ada di masyarakat akan dengan mudah

dapat diikuti oleh lembaga pendidikan, sehingga upaya untuk selalu berkembang dan tumbuh yang merupakan inti dari budaya mutu dapat diwujudkan oleh madrasah.

Di sisi lain, pengembangan budaya mutu lembaga pendidikandewasa ini dihadapkan pada tuntutan mutu yang tinggi dari pengguna alumni madrasah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan beralih pada pertimbangan mutu. Ada dua masalah yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan, yaitu kualitas dan equitas, karena keduanya menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan (Sing Kong Lee, dkk, 2014:10)

Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecepatan perubahan saat ini sudah barang tentu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat diabaikan. Lembaga pendidikan sebagai lembaga profesional dan lembaga pemerintah yang bersifat terbuka juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) perlu memperhatikan adanya tuntutan perubahan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, setiap lembaga pendidikan akan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu alumni. Merupakan sesuatu yang mustahil jika pendidikan madrasah dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, akan tetapi tidak melalui proses pendidikan yang bermutu. Mutu pembelajaran di madrasah bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen pelaksana dan kegiatan pendidikan, yang disebut sebagai mutu total (*total quality*). Strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah lembaga pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa yakni institusi yang memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan oleh pelanggan (*customer*). Jasa atau pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada mereka. Maka pada saat itulah, dibutuhkan suatu sistem manajemen yang mampu memperdayakan lembaga pendidikan agar lebih bermutu.

Manajemen mutu terpadu berlandaskan pada kepuasan pelanggan sebagai sasaran utama. Pelanggan jasa lembaga pendidikandikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, pelanggan internal, yaitu pelanggan jasa pendidikan yang bersifat cenderung permanen, yaitu masyarakat, tenaga kependidikan, tenaga administrasi pendidikan, dan aparatur sipil negara di kementerian dimana madrasah berada. Kedua, pelanggan eksternal, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jasa layanan lembaga pendidikantetapi sifatnya tentatif, yang meliputi kementerian lain, masyarakat, dan dunia usaha (Sudarwan Danin, 2006). Oleh sebab itu, untuk memposisikan institusi madrasah sebagai industri jasa, maka madrasah tersebut hendaknya memenuhi standar mutu, baik mutu sesungguhnya (*quality in fact*) maupun mutu persepsi (*quality in perception*).

Standar mutu produksi dan pelayanan diukur dengan kriteria sesuai dengan spesifikasi, cocok dengan pembuatan dan pengguna, tanpa cacat dan selalu baik sejak awal. Mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan pelanggan, meningkatnya minat, dan harapan pelanggan. Dalam penyelenggaraannya '*quality infact*' merupakan profil lulusan madrasah sesuai dengan kualifikasi tujuan madrasah, yang berbentuk standar kemampuan dasar berupa kualifikasi akademik dan skill minimal yang dikuasai peserta madrasah. Sedangkan pada *quality in perception* madrasah adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan madrasah.

Dalam operasional *total quality* manajemen dalam dunia pendidikan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan: (1) Perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*), (2) Menentukan standar mutu (*quality assurance*), (3) Perubahan organisasi (*upside-down organization*), (4) Mempertahankan hubungan pelanggan (*keeping close to the customer*), dan (5) Perubahan budaya mutu (*change of quality culture*) (Edward Sallis, 2006).

Perubahan budaya mutu bertujuan untuk membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasional. Jika manajemen ini ditetapkan di lembaga pendidikan, maka pihak pimpinan hendaknya berusaha membangun kesadaran para anggotanya mulai dari pimpinan sendiri, tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan berbagai unsur yang terkait. Di sinilah letak penting dikembangkannya faktor rekayasa dan faktor motivasi agar secara bertahap dan pasti budaya mutu itu akan berkembang di dalam organisasi lembaga pendidikan bernama madrasah. Di sini pula penting diterapkan bentuk-bentuk hubungan manusia yang efektif dan konstruktif agar semua anggota organisasi madrasah merasakan ada hubungan yang harmonis bagi terbentuknya kerjasama yang berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan mutu berkesinambungan adalah ciri manajemen pengendalian mutu. Oleh karena itu, untuk mengembangkan budaya mutu pendidikan madrasah, kepala madrasah dituntut untuk terus mengadakan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Jika perbaikan mutu madrasah berkesinambungan itu mengacu kepada Siklus Deming (Deming Cycle), maka langkah-langkahnya adalah:

Mengadakan riset pelanggan dan menggunakan hasilnya untuk perencanaan produk pendidikan (plan). Menghasilkan produk pendidikan melalui proses pembelajaran (do). Memeriksa produk pendidikan melalui evaluasi pendidikan/evaluasi pembelajaran, apakah hasilnya sesuai rencana atau belum (check). Memasarkan produk pendidikan dan menyerahkan lulusannya kepada orangtua atau masyarakat, pendidikan lanjut, pemerintah dan dunia usaha (action). Menganalisis bagaimana produk tersebut diterima di pasar, baik baik pada pendidikan lanjut ataupun di dunia usaha dalam hal kualitas, biaya dan kriteria lainnya (analyze) (Nasution M.N., 2001).

KESIMPULAN

Strategi mutu dalam layanan pendidikan di madrasah merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat dielakkan lagi. Pengelola madrasah dituntut terus melakukan pengembangan strategi mutu dalam menyelenggarakan pendidikan. Kualitas proses dan kualitas hasil madrasah menjadi ukuran dalam penguatan budaya mutu yang telah dijalankan di madrasah.

lembaga pendidikan saat ini juga dituntut untuk memiliki standard dan kriteria mutu selayaknya perusahaan berbasis profit, seperti perusahaan. Keberadaan manajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan ini dilandaskan pada perangkat ISO yang menjamin seluruh aktivitas produksi serta pemasaran sesuai dengan ketentuan prosedur pelayanan dan penjualan produk internasional. Lembaga pendidikan juga memerlukan proses jaminan mutu tersebut.

Layanan lembaga pendidikan memerlukan strategi mutu untuk peningkatan kualitas layanan serta membangun kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi. Sebagaimana konsep Crosby yang menyatakan, mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Sedangkan menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.

Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Lembaga pendidikan saat ini dihadapkan pada kebutuhan untuk memuaskan pelanggan secara penuh, artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat lembaga pendidikan perlu memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

Simpulnya, strategi mutu dalam pelayanan pendidikan di madrasah perlu diawali dengan beberapa langkah yaitu (1) menentukan kriteria mutu, (2) membangun komitmen mutu, (3) membangun budaya mutu, (4) mengembangkan mutu layanan pendidikan, dan (5) mengevaluasi budaya mutu madrasah.

Dengan demikian, madrasah akan mampu bersaing dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, bahkan bertaraf internasional yang telah menjadi kebutuhan global. Kualitas mutu layanan pendidikan tersebut merupakan modalitas penting dalam pengembangan madrasah ke depan agar mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Madrasah akan menjadi lebih dipercaya masyarakat melalui penguatan budaya mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis, Nurhayati. (2014). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Crosby, Philip B. (1979). *Quality is Free* (New York: New American Library).
- Danin, Sudarwan. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dirjen Dikdasmen. (2000). *Pengarahan Dirjen Dikdasmen tentang Pergeseran Paradigma Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Djam'an Satori. (2016). *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Edward, Deming. (1986). W. *Out of Crisis*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.
- Evans, J.R. and Dean, Jr. James W. (2003). *Total Quality: Management, Organization, and Strategy*. 3rd ed. Thomson South-Western.
- Feigenbaum, Armand V. (1991). *Total Quality Control*. 3rd Edition.
- Gannon, Martin J. (1986). *Management An Integrated Framework*. Edisi ke2. Little, Brown & Company. Canada.
- Guyub Nuryanto. (2012). *Budaya Sekolah Dan Peningkatkan Mutu Pendidikan*. STAI Al-Qolam Gondanglegi. Malang

- Paul Hersey & Kenneth H. Blanchard. (1986). *Management of Organizational Behavior : Utilizing Human Resources*. Edisi 4. Prentice-Hall.Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Goetsch & Davis. (1994). *Intruduction to Total Quality: Quality. Productivity. Competitiveness*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall International. Inc .
- Goetsch, David L. dan Stanley B. Davis. (2002). *Manajemen Mutu Total* . alih bahasa ; Benyamin Molan. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Hunt, Daniel V. (1993). *Managing for Quality*. Illinois: Business one Irwin Homewood.
- Indrajit, Eko Richardus, et al. (2005). *E-government in Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jerome S. (2005). *Quality in Education: An Implementation Handbook*. Alih Bahasa: Yosol Iriantara Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I.
- Juran J. M. (1990). *Juran on Leadership for Quality*. USA: Juran Institute. Inc.
- Kisupriyoko. (2007). *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mutohar, PM. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Nasution M.N. (2001). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PERKALAN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Pemerintah Penyelenggara Pendidikan Prajabatan Dan Kepemimpinan.
- Prabowo, Sugeng Listiyo.. *Penjaminan Mutu dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:(2000) di Perguruan Tinggi. Studi Multi Situs pada STIE Malangkecewara Malang dan Universitas Narotama Surabaya*”. Disertasi. Universitas Negeri Malang.
- Purnama, Nursyabani. (2006). *Manajemen Kualitas Perspektif Global*. Jogyakarta. Ekonisia.
- Rifai, Vithzal et all. (2011). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Robbins, Stephen P. (1989). *Organizational Behaviour: Concept. Controversies Application*. Englewood Cliffs: New Jersey Prentice Hall Inc.
- Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management In Education*. (alih bahasa: Ahmad Ali Riyadi. et all). Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sing Kong Lee. (2014). *Educational Policy Innovations*. Singapore: Springer.
- Stephen P. Robins. (1991). *Organization Behaviour: Concept. controversies. Application*. New Jersey: Prentice Hall International.

- Stone, W. F. T. & Wilson, B.L. (1985). *Using Bureaucratic and Cultural Linkages to Improve Instructional: The Principle Contribution*. EAQ. Vol. 21. No.2. Spring.
- Stoner dkk. (1995). *Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Tjiptono, Fandy & Anastasiana Diana. (2001). *Total Quality Management*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Usman, Husaini. (2010). *Manajemen Teori. Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Yukl. (1998). *Leadership In Organizations*. Diterjemahkan oleh Jusuf Udaya. Jakarta: Prenhallindo.

PENUGASAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Dr. Siti Aisyah Ginting, M.Pd
Dosen Fakultas Bahasa dan Seni UniveNIMED
e-mail: aisyahginting@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penugasan merupakan hal yang penting dalam perkuliahan, untuk itu penugasan dirancang untuk mencapai *high order thinking (HOT)* sebagai upaya untuk menghadapi industri revolusi 4.0. Penugasan meliputi enam macam tugas, yaitu tugas rutin, critical book report, journal review, mini riset, rekayasa ide, dan tugas proyek. Dalam pelaksanaannya pemberian keenam tugas wajib tersebut memiliki beberapa kendala, baik dari pihak mahasiswa maupun dosen. Tugas yang banyak yaitu enam jenis tugas dikalikan dengan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester. Setiap mahasiswa rata-rata mengerjakan 60 tugas dalam satu semester. Akibatnya tugas yang dihasilkan tidak dapat memenuhi tujuan pemberian tugas. Selain itu, tugas tidak dilengkapi dengan rubrik sehingga mahasiswa kurang memahami atau tidak tahu bagian-bagian mana yang harus mendapat penekanan. Dengan kata lain tugas yang dilengkapi rubrik akan menambah motivasi mahasiswa mengerjakannya. Dari pihak dosen kendala yang dihadapi adalah tentang pemeriksaan kebenaran tugas dan penilaian. Dibutuhkan waktu yang lama serta ketelitian dosen untuk memeriksa tugas mahasiswa yang jumlahnya banyak. Setiap dosen mendapat lebih dari satu matakuliah. Jika dosen mendapat lima mata kuliah x 60 tugas x jumlah mahasiswa (30-35 orang)/kls = 180 – 200 tugas yang harus diperiksa dosen setiap akhir semester.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dosen dan mahasiswa berkaitan dengan enam tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah dengan membuat enam tugas dalam satu produk yang dihasilkan. Keenam tugas tersebut didesain sedemikian rupa. Dosen memberikan keterangan tentang penugasan dan melengkapi keterangan tersebut dengan rubrik. Langkah diawali dengan mengkaji materi yang terdapat dalam RPS dan Selanjutnya secara berkelompok mahasiswa menentukan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (rekayasa ide). Langkah berikutnya mahasiswa melakukan review buku dan jurnal untuk menemukan teori-teori dan kajian yang relevan (CBR dan CJR). Setelah teori ditemukan disusun proposal dengan sampel kecil dan dilakukan penelitian kecil (mini research). Berdasarkan hasil penelitian kecil ini dilakukan analisis apa yang perlu dikembangkan dan dibutuhkan untuk melakukan penelitian dalam populasi yang lebih besar (Project). Hasil akhir dari project ini adalah satu produk yang bentuknya bergantung kepada jenis penelitiannya. Tugas rutin dapat diberikan di saat proses penelitian dilakukan. Misalnya ketika mahasiswa mereview buku atau jurnal mereka dapat diberikan tugas dengan membandingkan beberapa teori dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan mereka lakukan.

Dengan melakukan tahapan-tahapan di atas diharapkan permasalahan yang dihadapi dosen dan mahasiswa berkenaan dengan penugasan dapat dieliminir.

Kata kunci: Penugasan, Permasalahan, Solusi

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 disebut juga sebagai era digital dimana segala aktivitas dilaksanakan secara digitalisasi. Pada era ini cara kerja dititikberatkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Untuk mampu menghadapi tantangan yang ada, sangat diperlukan sumber daya yang inovatif dan peka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Perguruan dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan yang nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang akan terjun pada masyarakat diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan inovatif sehingga lulusannya dapat bersaing di dunia kerja pada era ini. Penyesuaian sarana dan prasarana pembelajaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk dapat menciptakan sumber daya yang inovatif dan berdaya saing.

Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi dosen dan mahasiswa. Inovasi-inovasi perlu dilakukan, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam pemberian perkuliahan. Penugasan merupakan hal yang penting dalam perkuliahan, untuk itu hal ini pun harus disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar pada saat ini. Penugasan yang berkaitan dengan hal teknologi informasi, internet, analisis *big data* dan komputerisasi diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Dengan penyesuaian penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era ini, diharapkan lulusan-lulusan perguruan tinggi dapat terbiasa dengan pola pikir kritis yang sangat diperlukan pada era ini.

Pemberian tugas terhadap mahasiswa sebenarnya disebabkan terbatasnya waktu yang ada di dalam kelas, sementara dosen harus menyampaikan bahan ajar yang begitu banyak yang ditetapkan di dalam RPS. Biasanya jika dosen tidak hadir mereka menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah berdasarkan materi ajar yang telah diberikan atau menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bahan ajar. Jika pertanyaan tidak terdapat di dalam bahan ajar, mereka disuruh membuat pertanyaan berdasarkan materi yang telah ataupun yang belum dipelajari. Kondisi demikian jika berlangsung terus menerus kurang bermanfaat bahkan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkuliahan secara maksimal. Pemberian tugas seperti itu juga tidak dapat mendukung siswa untuk memahami matakuliah lainnya terlebih dalam penyelesaian tugas akhir. Sering ditemukan tugas kopasus singkatan dari **kopi paste susun** bahkan pengerjaan tugas yang hanya mengganti nama dan NPM tugas temannya dan mengganti jenis huruf dan *font*-nya saja, dengan harapan perbuatannya tidak akan diketahui oleh dosennya. Jika kondisi demikian terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan fungsi tugas sebagai sumber belajar dan sarana penilaian keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran tidak akan terjadi.

Berdasarkan kondisi di atas, tugas yang diberikan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti kehadiran dosen tersebut karena tidak memenuhi standar tugas yang baik. Fungsi tugas menjadi tidak optimal karena pemberian tugas tidak dirancang untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran tersebut. Keadaan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika saja dosen melakukan perubahan terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa mencakup variasi jenis dan bentuk tugas, melengkapi tugas dengan rubrik, penilaian yang transparan dan juga menjelaskan kepada mereka bahwa tugas berkontribusi besar terhadap nilai akhir. Hal terakhir ini akan sangat berpengaruh terhadap kesediaan dan

kesungguhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Untuk itu sudah waktunya dosen merubah cara dan jenis tugas yang diberikan.

Jenis tugas sangat berpengaruh terhadap fungsi tugas. Umumnya, tugas yang diberikan dosen tidak memenuhi kriteria yang baik sehingga adanya tugas hanya sebagai pengganti ketidakhadiran dosen. Seharusnya tugas-tugas dirancang untuk mencapai *high order thinking (HOT)* mahasiswa sebagai upaya untuk menghadapi industri revolusi 4.0. Jenis tugas juga sebaiknya dibuat bervariasi sehingga dapat membuat mahasiswa berfikir kritis, sistematis dan logis yang pada akhirnya menciptakan *high order thinking (HOT)* seperti tugas rutin, *critical book review*, *critical journal review*, *mini research*, *project* dan rekayasa ide yang dapat memancing *critical thinking* mahasiswa. Menyadari betapa pentingnya penugasan ini, pihak pemerintah juga telah memuat memuat penugasan dalam kurikulum. Kehadiran kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memiliki dampak terhadap perubahan dalam proses belajar-mengajar khususnya dalam pemberian tugas pada setiap mata kuliah yang terkait dengan 6 (enam) penugasan, yaitu Tugas Rutin, Critical Book Report (CBR), Critical Journal/Research Report (CJR), Rekayasa Ide, Mini Research dan Project. Dengan pemberian tugas rutin seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkuliahan yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas-kelas dan wawancara terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan pemberian enam tugas wajib di atas masih terdapat kendala-kendala yang akan menghambat tujuan utama penugasan-penugasan tersebut. Enam jenis tugas tersebut jika dikalikan dengan jumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester maka rata-rata mahasiswa mengerjakan 60-70 tugas dalam satu semester (setiap mahasiswa mengambil 20-24 sks/10-12 mata kuliah yang masing-masing memiliki 6 tugas wajib). Akibatnya tugas yang dihasilkan tidak dapat memenuhi tujuan pemberian tugas. Selain itu, tugas tidak dilengkapi dengan rubrik sehingga mahasiswa kurang memahami atau tidak tahu bagian bagian mana yang harus mendapat penekanan dalam pembahasan. Dengan kata lain tugas yang dilengkapi rubrik akan menambah motivasi mahasiswa mengerjakannya. Demikian juga dosen akan lebih mudah menilainya jika tugas dilengkapi dengan rubrik penilaian. Dari pihak dosen kendala yang dihadapi adalah tentang pemeriksaan kebenaran tugas dan penilaian. Dibutuhkan waktu yang lama serta ketelitian dosen untuk memeriksa tugas mahasiswa yang jumlahnya banyak. Setiap dosen mendapat lebih dari satu matakuliah. Jika dosen mendapat lima mata kuliah x 60 tugas x jumlah mahasiswa (30-35 orang)/kls = 180 – 200 tugas yang harus diperiksa dosen setiap akhir semester. Kondisi demikian tidak menutup kemungkinan adanya tugas yang tidak diperiksa dengan benar. Berdasarkan masalah di atas, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dosen dan mahasiswa.

PEMBAHASAN

Tugas merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam kontrak perkuliahan yaitu perintah yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Good & Brophy (2003) menyatakan tugas merupakan perpanjangan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar. Sementara Hill *et al.* (1986) menyatakan bahwa pemberian tugas sangat positif peranannya terhadap pencapaian belajar mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan belajar siswa diharapkan

memperoleh suatu hasil berupa perubahan tingkahlaku tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pemberian tugas, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berlatih karena mahasiswa harus terlebih dahulu menguasai bahan ajar agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini tentunya menjadikan tugas sebagai salah satu sumber belajar yang bermanfaat dalam perkuliahan.

Zehnstall & Goldstein (1999) menyatakan bahwa ada enam tujuan pemberian tugas dalam pembelajaran, lima di antaranya berlaku bagi mahasiswa, yaitu (1) dengan pengerjaan tugas menjadikan mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. (2) mahasiswa menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran, (3) menumbuhkan proses pembelajaran yang eksploratif. (4) melatih cara mencari informasi secara langsung dari sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, dan (5) menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri dalam lingkungan bersama (kolektif) maupun sendiri. Tugas juga dapat dijadikan sebagai sarana penilaian terhadap berhasil tidaknya mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Selain itu, keberanian, kemampuan mengungkapkan pendapat, kemandirian, kemauan untuk mendengarkan dan menerima pendapat orang lain, bekerjasama, dapat menerima keberadaan orang lain, dan inisiatif juga akan tercipta dalam mengerjakan tugas. Selain itu, Zehnstall & Goldstein (1999) dan North & Pillay (2002) menambahkan bahwa dengan adanya tugas yang harus dikerjakan di luar ruang kelas, mahasiswa dilatih manajemen waktu, menjadikan adanya hubungan yang erat antara dosen-mahasiswa, dan sebagai alat ukur pencapaian perkembangan kemajuan studi mahasiswa. Sementara itu, Rhodes (2009) menambahkan bahwa pemberian tugas untuk dikerjakan di luar kelas adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di waktu yang paling sesuai dengan mahasiswa itu sendiri. Adanya tugas akan memaksa mahasiswa membentuk etika kerja dan disiplin diri, karena bekerja di luar kelas membutuhkan adanya motivasi diri dan melakukan penelitian sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas. Dengan kata lain pemberian tugas akan membentuk mahasiswa yang berkarakter baik. Namun kenyataannya pemberian tugas tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa sehingga tujuan utama dari pemberian tugas tidak tercapai. Oleh karenanya tugas harus dirancang sedemikian rupa karena kesalahan dalam merancang sebuah tugas terstruktur, akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai (Davis, 1993).

Fakta dilapangan memperlihatkan bahwa selama ini tugas yang diberikan kepada mahasiswa didominasi dengan tugas membuat makalah berdasarkan materi ajar yang telah diberikan atau menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bahan ajar (Ginting, dkk). Tentu saja penugasan seperti ini tidak sesuai dengan tujuan penugasan (Zehnstall & Goldstein: 1999; North & Pillay: 2002; Rhodes:2009). Penugasan seperti ini juga dapat ditemukan pada kebanyakan mata kuliah. Akibat dari pemberian tugas seperti Sering ditemukan tugas kopasus singkatan dari **kopi paste susun** bahkan pengerjaan tugas yang hanya mengganti nama dan NPM tugas temannya dan mengganti jenis huruf dan *font*-nya saja, dengan harapan perbuatannya tidak akan diketahui oleh dosennya. Kondisi demikian jika berlangsung terus menerus kurang bermanfaat bahkan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkuliahan secara maksimal. Mahasiswa tidak mengerjakan dan menuangkan semua kemampuan dan kreativitasnya karena menganggap bahwa tugas mereka tidak akan diperiksa oleh dosen yang bersangkutan. Jika kondisi demikian terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan fungsi tugas sebagai

sumber belajar dan sarana penilaian keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran tidak akan terjadi. Dalam hal ini penugasan juga tidak dapat mendukung siswa untuk memahami matakuliah lainnya terlebih dalam penyelesaian tugas akhir dan melatih mahasiswa untuk dapat berpikir kritis.

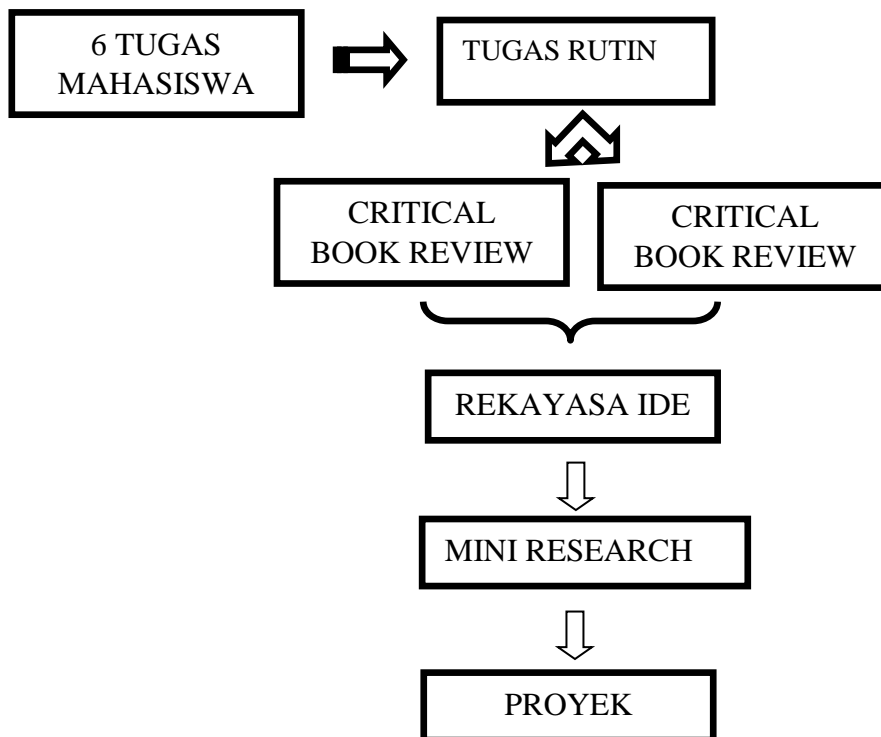
Untuk menciptakan budaya berpikir kritis pada mahasiswa dan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menulis tugas akhir, maka Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menerapkan perubahan dalam pemberian tugas pada setiap mata kuliah. Perubahan dalam pemberian tugas ini juga sudah diterapkan di Universitas Negeri medan (UNIMED). Penugasan yang diberikan pada mahasiswa saat ini diwujudkan dengan 6 (enam) penugasan, yaitu:

1. Tugas Rutin adalah tugas mahasiswa mandiri yang secara rutin diberikan oleh dosen untuk melatih sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu, yang dapat terdiri dari pengerjaan lembar kerja yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Pada akhirnya tugas rutin ini bertimplikasi memperkaya bahan untuk menulis karya ilmiah.
2. Critical Book Review (CBR) adalah tugas individu yang mengkaji sebuah buku dengan tujuan umum untuk melatih mahasiswa merumuskan definisi konseptual berdasarkan sintesis teori-teori yang berkembang dari buku yang direview. Tujuan khusus dari pemberian tugas ini adalah mahasiswa dapat meringkas isi buku, membandingkan dan menghubungkan isi buku yang direview dengan buku-buku yang relevan, serta melatih mahasiswa lebih kritis dan berani berargumentasi berdasarkan teori dari buku teks.
3. Critical Journal/Research Review (CJR) adalah tugas individu dan atau kelompok yang mengkaji sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional dengan cara menganalisis temuan utama, keunggulan dan kelemahan yang ada dalam penelitian tersebut. Tujuan pemberian tugas ini adalah untuk melatih mahasiswa merumuskan definisi konseptual berdasarkan sintesis teori-teori yang berkembang dalam jurnal yang direview, membandingkan dan menghubungkan isi jurnal yang direview dengan jurnal atau buku yang relevan, serta melatih mahasiswa lebih kritis dan berani berargumentasi berdasarkan teori dari jurnal ilmiah.
4. Rekayasa Ide adalah tugas yang berisi konsep pemikiran yang melahirkan gagasan-gagasan baru yang kreatif, inovatif dari berbagai informasi yang diperoleh. Tugas ini bertujuan untuk melatih mahasiswa melahirkan ide atau gagasan baru/inovatif dalam mengantisipasi permasalahan yang ada pada saat ini. Gagasan tersebut bersifat solusi berdasarkan teori atau konsep yang berkembang. Sumber informasi dapat diperoleh dari buku teks, jurnal, hasil diskusi, materi perkuliahan dan berbagai media elektronik lainnya (internet). Produk Rekayasa Ide dapat berupa makalah, proposal atau artikel.
5. Mini research adalah tugas yang bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian sederhana dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian, mulai dari penyusunan proposal, penyusunan instrumen, survey lapangan, analisis data dan pelaporan. Diharapkan, melalui penugasan ini mahasiswa dapat menyusun proposal mini riset, memiliki pengalaman dalam melakukan mini riset tentang kepemimpinan, serta memiliki tertib berfikir ilmiah berbasis teori.

6. Proyek adalah tugas yang bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan transfer pengetahuan yang dipelajari dalam pemecahan masalah. Mahasiswa dituntut untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan kegiatan investigasi secara mandiri ataupun berkelompok.

Meskipun penugasan enam tugas wajib diatas memiliki tujuan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala yang dikhawatirkan menghambat tujuan utama dari penugasan tersebut. Kendala utama yang dihadapi mahasiswa dan dosen adalah banyaknya jumlah tugas yang harus dikerjakan dan diperiksa.

Upaya untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan cara membuat tugas dengan menghasilkan satu produk. Dalam proses penyelesaian produk tersebut keenam jenis tugas terdapat di dalamnya. Tugas rutin, book review dan jurnal review dapat dijadikan mahasiswa sebagai modal awal untuk membangun kerangka maupun konsep teoritis yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan ide yang akan digunakan dalam tugas rekayasa ide. Kajian-kajian teoritis yang terdapat dalam tugas ini juga akan memudahkan mahasiswa untuk dapat melaksanakan mini riset hingga nantinya dapat juga dikembangkan lagi dalam tugas proyek. Misalnya mahasiswa farmasi dengan mata kuliah Teknologi Formulasi, tugas rutin yang diberikan dosen akan memudahkan mereka untuk memilih topik yang mereka gemari yang nantinya dapat mereka kembangkan untuk tugas-tugas berikutnya. Sebagai contoh, mereka dapat memilih topik mengenai tumbuh-tumbuhan yang berkhasiatnya misalnya jeruk purut. Mahasiswa kemudian mencari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan topik ini untuk direview. Hasil kajian terhadap jurnal dan buku yang membahas tentang jeruk purut ini nantinya akan dirangkum dalam tugas *book review dan jurnal review*. Teori-teori yang mereka bahas dalam tugas tersebut pun akan membantu mereka untuk mengembangkan ide-ide baru tentang pengolahan limbah jeruk tersebut. Ide-ide itu dapat pula dikembangkan untuk mengerjakan tugas Rekayasa Ide, misalnya membuat shampo dari jeruk purut. Hasil dari rekayasa ide inilah yang nanti dapat diwujudkan dalam bentuk penelitian skala kecil untuk tugas mini research mereka. Tak hanya sampai disitu, hasil akhir dari mini research yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya juga dapat dilanjutkan dalam tugas proyek sehingga menghasilkan produk yang berhasil guna.



Dengan pemberian penjelasan mengenai keterkaitan tugas seperti ini diharapkan dapat menghilangkan anggapan memberatkan yang ada pada mahasiswa. Sebaliknya mereka akan dilatih untuk dapat memilih topik maupun ide yang nantinya dapat dikembangkan secara berkesinambungan dalam setiap tugas-tugas yang diwajibkan ini. Kreativitas mahasiswa juga dapat dikembangkan, karena mereka haruslah memilih topik dengan hati-hati agar topik tersebut dapat dikembangkan secara berkesinambungan dalam tugas-tugas perkuliahan mereka.

Kehadiran rubrik dalam pemberian tugas dapat memotivasi dan menolong mahasiswa dalam mengerjakan tugas karena mereka mengetahui apa saja yang harus ada dalam satu tugas dan kriteria apa saja yang mendapat penilaian baik. Keuntungan yang diperoleh dosen dengan kehadiran rubrik dalam penugasan adalah kemudahan yang dapat dilakukan dosen dalam menilai secara objektif. Selain itu, tugas dilengkapi dengan rubrik penilaian berguna bagi dosen untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah memahami materi yang diberikan atau sejauh mana kompetensi yang telah ditentukan dicapai mahasiswa. Objektivitas penilaian sering menjadi bahan pembicaraan di antara mahasiswa. Mereka beranggapan untuk apa mengerjakan tugas dengan baik karena tidak ada perbedaan penilaian antara tugas yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, penilaian yang objektif juga berakibat terhadap kualitas tugas mahasiswa. Oleh karena itu, sudah seharusnya tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa dilengkapi dengan rubrik.

Pengawasan yang ketat dan sistematis dalam pengerjaan tugas serta informasi-informasi mengenai tugas yang diberikan haruslah tersedia agar kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dapat diminimalisir. Pemecahan masalah-masalah tersebut sangat

penting agar tujuan dari penugasan yang berupa peningkatan kompetensi mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan serta hasil akhir berupa kemampuan berpikir kritis dapat dicapai. Hal ini tentunya sangat penting karena penugasan adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi perkuliahan.

PENUTUP

Desain penugasan yang diterapkan pada kurikulum saat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan yang mengacu pada *high order thinking (HOT)* selain itu kemampuan untuk dapat menulis karya ilmiah juga akan diperoleh mahasiswa melalui penugasan yang diberikan. Penugasan tersebut dalam bentuk tugas terstruktur yang terdiri atas 6 tugas yaitu Tugas Rutin (TR), Critical Book Review (CBR), Critical Journal Report (CJR), Mini Riset (MR), Rekayasa Ide (RI) dan Project (PR). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa.

Keterbatasan informasi-informasi yang berkaitan dengan waktu penyerahan tugas, komitmen dosen dalam penilaian dan detail jenis tugas merupakan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan enam jenis tugas tersebut. Dosen sebaiknya mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai jenis tugas, format penulisan maupun pelaporannya, serta bagaimana tugas tersebut terkait satu dengan yang lainnya. Rubrik penilaian juga harus disediakan agar mahasiswa mengerti betul komponen-komponen penilaian yang diharapkan untuk dipenuhi dalam setiap penugasan. Komponen-komponen penilaian yang terkandung dalam rubrik penilaian tersebut juga akan memudahkan dosen untuk menilai hasil tugas mahasiswanya. Dengan hal ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi dalam pemeriksaan hasil tugas mahasiswa. Untuk menghindari adanya plagiarisme yang dilakukan mahasiswa, dosen juga diharapkan melakukan koreksi dan pemeriksaan terhadap hasil tugas mahasiswa. Pengawasan yang ketat dan sistematis dalam pengerjaan tugas sangat dibutuhkan agar tujuan dari penugasan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, B.G. 1993. *Tools for Teaching*. Jossey-Bass Publishing, San Fransisco.
- Hill, S., Spencer, S., Alston, R. & Fitzgerald, J. 1986. *Homework policies in the schools. Education*, 107(1): 58-70.
- Good, T. L., & Brophy, J. E. 2003. *Looking in classrooms (9th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Ginting, Siti Aisyah, Husein, R., dan Meisuri. 2016. *Pengembangan Pedoman Tugas Proyek dan Rubrik Berbasis PBL pada Bidang Studi Discourse Analysis*. Laporan Penelitian Bidang Kualitas Pengajaran. Universitas Negeri Medan, Medan.
- Ginting, Herawati, Surjanto, dan Sudarmi. 2014. *Pemanfaatan Hasil Sortasi Limbah Jeruk Menjadi Shampo Anti Ketombe*. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Program Mono Tahun. FF USU, Medan

North, S. and H. Pillay. 2002. *Homework, Re-examining the Routine*. ELT Journal Vol 56 No. 2: 137-145.

Rhodes, J. 2009. *Why homework is important?*. Tersedia di http://www.helium.com/users/30613/show_articles. Diakses 19 Agustus 2016.

Zehnstall & Goldstein (1999) Zentall, S.S. and S. Goldstein. 1999. *Seven Steps to Homework Success: A Family Guide for Solving Common Homework Problems*. Specialty Press, Inc.

PENINGKATAN KECERDASAN LOGIKA MATEMATIKA MELALUI PERMAINAN BINGO

Petronela J. P. Suripatty, Nadiroh, dan Yuliani Nurani
PAUD PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)
Email : ellasuripatty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tindakan ini menggambarkan proses dan hasil dalam meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpattimelalui permainan bingo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan model Kemmis dan Taggart, yang meliputi perencanaan, tindakan dan pengamatan, refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpattiyang berjumlah 15 orang anak. Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari delapan pertemuan pada setiap siklus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan logika matematika anak mengalami peningkatan setelah diterapkan permainan bingo. Skor kecerdasan logika matematika anak pada pra siklus sebesar 51,93% siklus I sebesar 63,93%, dan siklus II sebesar 74,26%. Hasil tersebut memberikan implikasi bahwa kecerdasan logika matematika anak dapat ditingkatkan melalui permainan bingo.

Kata kunci: Kecerdasan Logika Matematika, Permainan Bingo, Penelitian tindakan

PENDAHULUAN

Anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rangsangan yang diberikan oleh berbagai faktor. Di dalam diri anak terdapat beberapa kecerdasan yang perlu dioptimalkan, salah satu kecerdasan yang perlu dirangsang dan dioptimalkan yaitu logika matematika.

Menurut Niroo Nejhad dan Haghani (2012), mengemukakan dalam penelitiannya bahwa: *“In the popular teaching of mathematics, which is highly reliant on the mathematical-logical intelligence; students mathematical functioning is related to their mathematical/logical intelligence.”*

Seperti tertuang dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 menjelaskan pada tingkat pencapaian perkembangan dalam lingkup perkembangan berpikir logis anak usia 5-6 tahun, bahwa anak sudah mampu berpikir logis matematika. Namun permasalahan yang banya ditemui oleh guru adalah anak tidak menyukai pelajaran matematika. Hal ini dikarenakan anak menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dengan menggunakan banyak angka dan rumus yang membuat anak sulit untuk berpikir dan memahami. Untuk itulah pengenalan

matematika sejak usia dini perlu dilakukan dengan cara yang menarik agar ketika anak ada pada jenjang pendidikan berikutnya, anak tidak lagi menganggap matematika sebagai pelajaran yang membosankan.

Kalapriya (2011: 9), bermain adalah dunia anak dan sekaligus cara yang tepat untuk memberi pengalaman belajar. Dengan bermain yang menarik dan menyenangkan, maka akan membantu mengoptimalkan kecerdasan logika matematika anak. Bermain membantu anak-anak mengembangkan diri di semua bidang dasar, fisik, intelektual, sosial dan emosional. Bermain membantu anak mendapatkan sesuatu yang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya.

Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan logika matematika anak. Peneliti memilih menggunakan permainan bingo untuk dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “*Playing Bingo to Review Fundamental Concepts Courses*”, Weisskirch mengemukakan dalam penelitiannya bahwa:

“Students rated the Bingo activity highly after participating. They noted that the activity helped them to understand the concepts and was academically challenging. They also indicated enjoying activity and learning more about the concepts by participating. The students strongly indicated that the instructor should use the exercise in future semesters and that the activity was not a waste of time”.

Dapat diartikan bahwa siswa dinilai berpartisipasi setelah aktivitas bingo berlangsung. Mereka mencatat bahwa aktivitas itu membantu mereka untuk memahami konsep-konsep akademis yang menantang. Mereka juga melihat anak menikmati aktivitas dan belajar lebih banyak tentang konsep-konsep dengan berpartisipasi. Para siswa juga ingin agar instruktur mereka menggunakan aktivitas belajar itu di semester yang akan datang.

Sedangkan Tietze dalam penelitiannya yang berjudul “*Instructional Design and Assessment: A Bingo Motivates Students To Interact With Course Material*” mengemukakan bahwa:

“Approximately 85%-90% of student participated over a 2-year period. Though data were not provided, the author stated that the bingo game decreased procrastination and increased understanding of course content. Prompted more in-class questions, and provided student feedback. The bingo game concepts seemed like a realistic motivational tool for students in the introduction to Clinical Pharmacy Skills courses.”

Dapat diartikan bahwa sekitar 85%-90% dari siswa berpartisipasi selama periode 2 tahun. Meskipun data tidak tersedia, penulis menyatakan bahwa permainan bingo menurun penundaan dan meningkatkan pemahaman isi kursus, pertanyaan yang lebih banyak dalam kelas, dan memberikan umpan balik siswa. Konsep permainan bingo tampak seperti alat motivasi yang realistis bagi siswa dalam pengantar keterampilan farmasi klinik.

Pengaruh aplikasi teori Gardner pada kecerdasan logika matematika, kemudian tindakan bermain dan penalaran logis matematika pendekatan bermain bingo untuk

meninjau konsep fundamental, serta permainan bingo memotivasi siswa untuk berinteraksi. Pada penelitian yang akan peneliti lakukan belum ada pada penelitian sebelumnya yaitu peningkatan kecerdasan logika matematika melalui permainan bingo. yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan permainan bingo dibuat menarik dan kreatif dalam meningkatkan kecerdasan logika matematika. Diharapkan dengan menggunakan permainan bingo dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan peneliti pada Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti di Ambon, dengan jumlah 15 orang anak, yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sesuai pengamatan peneliti, masih terdapat sebagian anak yang kecerdasan logika matematikanya belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat karena 1) terdapat 10 atau 67% anak belum mampu mengurutkan angka, keadaan yang terlihat karena anak masih mengurutkan angka secara acak tidak beraturan, 2) terdapat 11 atau 74% anak belum mampu mencocokkan angka keadaan yang terlihat adalah anak masih belum mampu mencocokkan angka dengan lambang bilangannya, 3) terdapat 10 atau 67% anak belum mampu memecahkan masalah, keadaan yang terlihat adalah anak masih meminta bantuan guru untuk membedakan angka enam dan angka sembilan, 4) terdapat 10 atau 67% anak belum mampu mengenal pola sederhana, keadaan yang terlihat adalah anak belum mampu menyeleraskan pola yang ada oleh guru untuk dipasangkan dengan benda yang sama, 5) terdapat 12 atau 80% anak belum mampu berpikir logis.

Kecerdasan Logika Matematika

Sejak usia dini kecerdasan anak sudah seharusnya di asah agar dapat terlihat. Anak yang memiliki kecerdasan akan mudah untuk menalar sesuatu dan mampu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.

Gardner (2006: 6), mengatakan bahwa kecerdasan adalah sebuah kapasitas komputasi untuk memproses jenis informasi tertentu yang berasal dari biologi dan psikologi manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk dapat mengolah kembali informasi yang diterima dengan mengandalkan kekuatan fisik maupun psikis, sehingga dalam melakukan setiap kegiatan tertentu manusia dapat dengan mudah menyelesaikannya.

Kecerdasan menurut Hoerr (2000:2) adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan sebuah produk yang dihargai dalam budaya. Seseorang yang cerdas akan memiliki kemampuan atau kapasitas yang baik dalam melakukan pekerjaan. Seseorang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi mampu menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam kehidupan.

Amstrong (2009: 6), mengemukakan Kecerdasan Logika Matematika adalah kapasitas untuk menggunakan angka secara efektif (sebagai matematikawan, akuntan pajak, atau ahli statistik) dan untuk alasan baik (sebagai ilmuwan, programmer komputer, atau ahli logika). Kecerdasan ini termasuk kepekaan terhadap pola logis dan hubungan, pernyataan dan proposisi, fungsi, dan abstraksi terkait lainnya. Jenis-jenis proses yang digunakan dalam layanan kecerdasan logika matematika termasuk kategorisasi, klasifikasi, inferensi, generalisasi, perhitungan, dan pengujian hipotesis. Amstrong

dengan jelas menggambarkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan logika matematika selalu identik dengan profesi yang berhubungan dengan penggunaan angka-angka.

Kecerdasan logika matematika menurut Nelson (1998: 10) adalah berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir deduktif atau induktif dan untuk mengenali dan memanipulasi pola abstrak dan hubungan. Siswa yang unggul dalam kecerdasan ini memiliki penalaran keterampilan, pemecahan masalah dan mengajukan pertanyaan secara logis. Mereka juga dapat unggul dalam ilmu logika yang berhubungan dalam pemecahan masalah. Kecerdasan ini dapat terlihat pada orang seperti ilmuwan, bankir, ahli matematika, programer komputer, pengacara, dan akuntan.

Santrock (2011: 116) juga berpendapat bahwa kecerdasan matematika adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan operasi matematika (Ilmuwan, insinyur, dan akuntan). Beberapa ahli berpendapat bahwa kecerdasan logika matematika dikaitkan dengan profesi yang tetap berkaitan dengan penggunaan atau mengolah angka-angka.

Morisson (2012: 86) menjelaskan kecerdasan logika matematika adalah ketika anak-anak memperlihatkan bakat di bidang angka, penalaran, dan penyelesaian masalah. Anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika biasanya menyukai permainan dengan menggunakan angka atau sesuatu yang membutuhkan daya nalar.

Berdasarkan teori yang dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logika matematika adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan matematika dan berpikir logis. Kecerdasan logika matematika adalah diantaranya: 1) Pengenalan Angka 2) Pengenalan Geometri, 3) Mengelompokkan benda, dan 4) Berpikir Logis.

Permainan Bingo

Bermain merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan manusia dalam kehidupannya sejak kecil hingga dewasa. Dalam kegiatan bermain, biasanya seseorang akan merasa mendapatkan kepuasan dan kesenangan.

Bermain menurut Piaget dalam Mayesty dikutip oleh Sujiono (2010: 34), adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang, sedangkan Parten memandang kegiatan sebagai sarana sosialisasi di mana diharapkan melalui bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Anak dapat melakukan aktivitas bermain secara berulang-ulang karena memiliki perasaan senang dan ingin mencoba hal baru sebagai jembatan untuk menemukan jawaban dari setiap rasa ingin tahunya.

Robinson (2008: 150) juga menyatakan bahwa bermain adalah untuk mengeksplorasi, menemukan, dan bereksperimen, bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dan menggunakan banyak bakat mereka sejak lahir. Semua manusia sejak lahir telah memiliki bakat dan bakat itulah yang perlu dikembangkan. Dengan bermain anak dapat menyalurkan semua yang dimilikinya serta mengekspresikan diri sesuai kemauannya.

Bennet (1999: 288) mengatakan bahwa permainan sederhana seperti bingo mengharuskan anak untuk menemukan angka-angka yang tepat. Permainan bingo adalah permainan dengan menggunakan kartu yang telah diisi angka-angka pada setiap kolomnya. Permainan yang didalamnya memuat sejumlah angka ini memuat nilai edukatif sebagai proses belajar yang menyenangkan yang dapat diterapkan pada anak usia dini. Secara umum permainan bingo dimainkan per individu. Angka yang ada pada kartu bingo biasanya di acak.

Jumlah kolom angka pada kartu bingo ada dua puluh kolom, 5x4 kolom vertikal dan horizontal. Angka yang disebutkan akan dicari dan dipasangkan sesuai dengan angka yang ada pada kartu bingo. Jumlah pemain bingo tidak terbatas, minimal pemain pada permainan pada permainan bingo ini adalah 3 orang, 1 orang biasanya sebagai penyebut angka. Jika angka yang disebutkan secara berturut-turut ada pada kartu bingo yang dimiliki pemain dan telah membentuk posisi diagonal, vertikal, atau horizontal secara utuh maka pemain harus berteriak “bingo”.

Berdasarkan beberapa uraian prosedur permainan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa permainan bingo dapat dikreasikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Angka pada kartu bingo diisi secara berurutan atau pun acak, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut terlihat pada uraian permainan bingo oleh Smith, yang mengajarkan perkalian lewat permainan bingo.

Tabel 2.1 contoh kartu bingo dengan angka berurutan

B	I	N	G	O
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Tabel 2.3 contoh kartu bingo dengan angka acak berpola warna

B	I	N	G	O
10	5	18	7	16
9	1	8	11	7
14	4	16	6	18
2	20	3	19	12

METODE PENELITIAN

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model spiral Kemmis dan Taggart. Pada model Kemmis dan Taggart menganggap tindakan (*acting*) dan observasi (*observing*) dijadikan sebagai satu kesatuan karena tidak dapat di lepas pisahkan. Dimana pada penelitian ini, peneliti akan memberikan tindakan dalam rangka meningkatkan kecerdasan logika matematika melalui permainan bingo, yang akan dilakukan dalam dua siklus.

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini mengacu pada kriteria yang ditetapkan Mills yang menyatakan bahwa penelitian tindakan ini dikatakan berhasil apabila 71% dari jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Artinya 12 dari 15 anak di kelompok B Paud Mawar FKIP Unpatti Ambon telah mencapai tingkat capaian minimal. Dalam penelitian ini tingkat capaian tindakan (TCP) minimal yang ditetapkan peneliti bersama kolaborator adalah 75% dari TCP maksimal. Tingkat capaian perkembangan minimal yang disepakati oleh kolaborator yaitu 72 dari TCPmax 96. Jika dikonversikan ke nilai 100%, maka TCPmin sebesar 75.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non tes, yaitu: 1) Lembar observasi, 2) Catatan wawancara, 3) Catatan lapangan dan 4) Dokumentasi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif yaitu

Penelitian yang tindakannya dilakukan merujuk pada teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang ditemui di lapangan. Analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif yang bertujuan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul. Data tersebut berdasarkan lembar observasi yang dinilai oleh observer.

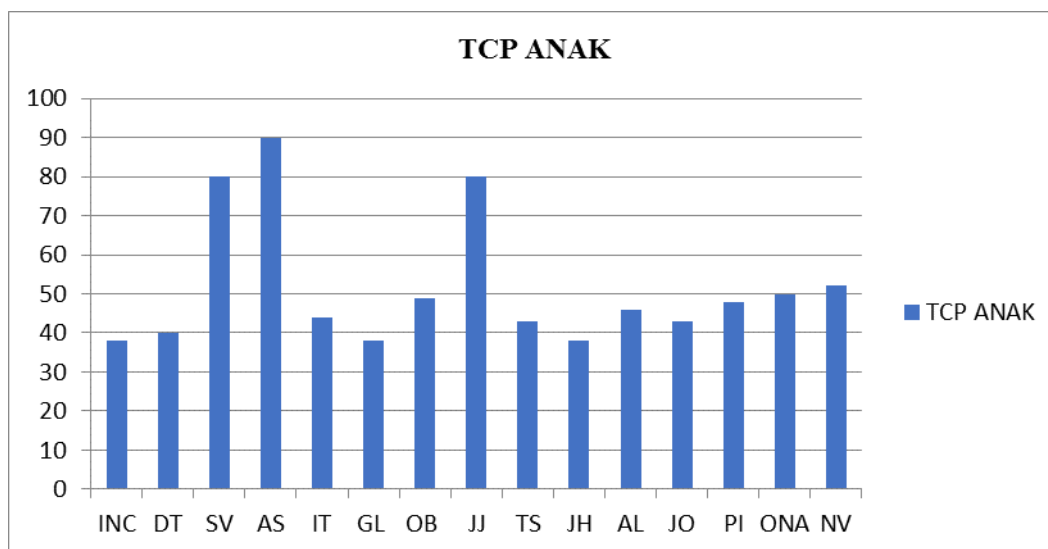
PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecerdasan Logika Matematika anak kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti sudah mulai meningkat dari pra-intervensi sampai siklus II. Berikut perbandingan data hasil Kecerdasan Logika Matematika anak pada pra intervensi, siklus I dan siklus II. Berikut data hasil Kecerdasan Logika Matematika anak kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti dalam bentuk tabel dan grafik.

PRA TINDAKAN

Tabel. 1. Pra Tindakan Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

NO	Siswa	TCP Anak	Kategori
1	INC	38	Belum Berkembang
2	DT	40	Belum Berkembang
3	SV	80	Berkembang Sangat Baik
4	AS	90	Berkembang Sangat Baik
5	IT	44	Mulai Berkembang
6	GL	38	Belum Berkembang
7	OB	49	Mulai Berkembang
8	JJ	80	Berkembang Sangat Baik
9	TS	43	Mulai Berkembang
10	JH	38	Belum Berkembang
11	AL	46	Mulai Berkembang
12	JO	43	Mulai Berkembang
13	PI	48	Mulai Berkembang
14	ONA	50	Mulai Berkembang
15	NV	52	Mulai Berkembang
		51,93	Mulai Berkembang



Grafik 1. Pra Tindakan Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

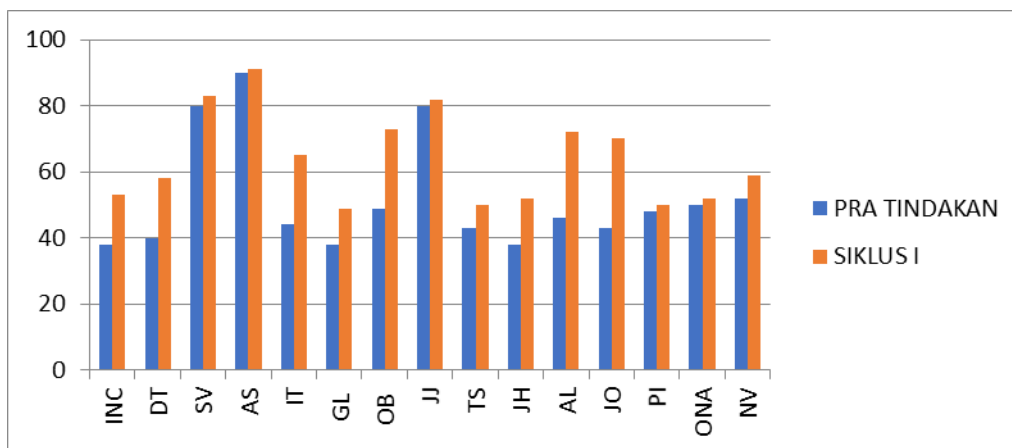
Berdasarkan tabel 1. dan grafik 1. diatas, rata-rata tingkat capaian perkembangan (TCP) yang diperoleh anak kelompok B KB Mawar adalah sebesar 51,93 dan berada pada kategori mulai berkembang (MB). Anak dengan TCP tertinggi ialah AS dengan jumlah TCP 90, sedangkan TCP terendah diperoleh INC dengan jumlah TCP 38. Hasil Asesmen Pra Intervensi menunjukkan bahwa nilai anak berada jauh dibawah target. Target yang disepakati peneliti bersama kolaborator adalah 75% dari TCP maksimal, artinya TCP minimal anak adalah 72 dari 96.

SIKLUS I

Tabel 2. Pra Tindakan dan Siklus I Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

NO	Siswa	Pra Tindakan		Siklus I	
		TCP Anak	Kategori	TCP Anak	Kategori
1	INC	38	Belum Berkembang	53	Mulai Berkembang
2	DT	40	Belum Berkembang	58	Mulai Berkembang
3	SV	80	Berkembang Sangat Baik	83	Berkembang Sanga Baik
4	AS	90	Berkembang Sangat Baik	91	Berkembang Sangat Baik
5	IT	44	Mulai Berkembang	65	Berkembang Sesuai Harapan
6	GL	38	Belum Berkembang	49	Mulai Berkembang
7	OB	49	Mulai Berkembang	73	Berkembang Sesuai Harapan
8	JJ	80	Berkembang Sangat Baik	82	Berkembang Sangat Baik
9	TS	43	Mulai Berkembang	50	Mulai Berkembang

10	JH	38	Belum Berkembang	52	Mulai Berkembang
11	AL	46	Mulai Berkembang	72	Berkembang Sesuai Harapan
12	JO	43	Mulai Berkembang	70	Berkembang Sesuai Harapan
13	PI	48	Mulai Berkembang	50	Mulai Berkembang
14	ONA	50	Mulai Berkembang	52	Mulai Berkembang
15	NV	52	Mulai Berkembang	59	Mulai Berkembang
		51,93	Mulai Berkembang	63,93	Mulai Berkembang



Grafik 2. Pra Tindakan dan Siklus I Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

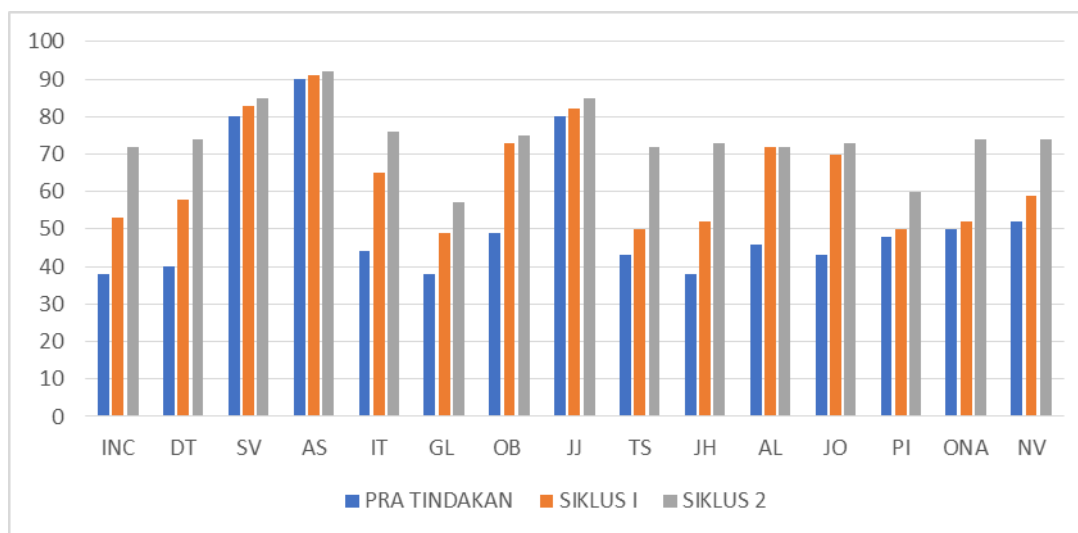
Tabel 4. dan grafik 4. menunjukkan bahwa kecedasan logika matematika anak mengalami peningkatan setelah diberi tindakan berupa pembelajaran bermain bingo. Rata-rata TCP anak pada Pra Intervensi sebesar 53,93 mengalami peningkatan menjadi 63,93 pada siklus I. Berdasarkan kategori yang ditentukan sebelumnya, rata-rata TCP anak pada siklus I termasuk dalam kategori berkembang sesuai harapan (BSH).

SIKLUS II

Tabel 3. Pra Tindakan Siklus I dan Siklus II Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

No	Siswa	Pra Tindakan		Siklus I		Siklus II	
		TCP Anak	Kategori	TCP Anak	Kategori	TCP Anak	Kategori
1.	INC	38	Belum Berkembang	53	Mulai Berkembang	72	Berkembang Sesuai Harapan
2.	DT	40	Belum Berkembang	58	Mulai Berkembang	74	Berkembang Sesuai Harapan
3.	SV	80	Berkembang	83	Berkembang	85	Berkembang

			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
4.	AS	90	Berkembang Sangat Baik	91	Berkembang Sangat Baik	92	Berkembang Sangat Baik
5.	IT	44	Mulai Berkembang	65	Berkembang Sesuai Harapan	76	Berkembang Sesuai Harapan
6.	GL	38	Belum Berkembang	49	Mulai Berkembang	57	Mulai Berkembang
7.	OB	49	Mulai Berkembang	73	Berkembang Sesuai Harapan	75	Berkembang Sesuai Harapan
8.	JJ	80	Berkembang Sangat Baik	82	Berkembang Sangat Baik	85	Berkembang Sesuai Harapan
9.	TS	43	Mulai Berkembang	50	Mulai Berkembang	72	Berkembang Sesuai Harapan
10.	JH	38	Belum Berkembang	52	Mulai Berkembang	73	Berkembang Sesuai Harapan
11.	AL	46	Mulai Berkembang	72	Berkembang Sesuai Harapan	72	Berkembang Sesuai Harapan
12.	JO	43	Mulai Berkembang	70	Berkembang Sesuai Harapan	73	Berkembang Sesuai Harapan
13.	PI	48	Mulai Berkembang	50	Mulai Berkembang	60	Berkembang Sesuai Harapan
14.	ONA	50	Mulai Berkembang	52	Mulai Berkembang	74	Berkembang Sesuai Harapan
15.	NV	52	Mulai Berkembang	59	Mulai Berkembang	74	Berkembang Sesuai Harapan
		51,93	Mulai Berkembang	63,93	Mulai Berkembang	74,26	Berkembang Sesuai Harapan



Grafik 3. Pra Tindakan Siklus I dan Siklus II Kecerdasan Logika Matematika Anak Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Tahun 2016/2017

Tabel 3. dan grafik 3. menunjukkan bahwa kecerdasan logika matematika anak mengalami peningkatan setelah diberi tindakan berupa metode permainan bingo. Rata-rata TCP anak pada siklus I sebesar 63,93 mengalami peningkatan menjadi 74,26 pada siklus II. Berdasarkan kategori yang ditentukan sebelumnya, rata-rata TCP anak pada siklus II termasuk dalam kategori berkembang sesuai Harapan.

Proses Metode Permainan Bingo Dapat Meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika Anak.

Dalam penelitian ini kecerdasan logika matematika anak ditingkatkan melalui metode permainan bingo, kegiatan menggunakan permainan bingo menekankan pengalaman anak dalam berpikir logis. Anak diminta untuk menuangkan imajinasinya dalam permainan bingo.

William J. Bennett (1999: 288) mengatakan permainan bingo masuk kedalam bermain konstruktif dan peneliti menggunakan media kartu dan buah bingo. Bennet mengatakan bahwa permainan sederhana seperti bingo mengharuskan anak untuk menemukan angka-angka yang tepat. Permainan bingo adalah permainan dengan menggunakan kartu yang telah diisi angka-angka pada setiap kolomnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Amstrong mengemukakan Kecerdasan Logika Matematika adalah kapasitas untuk menggunakan angka secara efektif (sebagai matematikawan, akuntan pajak, atau ahli statistik) dan untuk alasan baik (sebagai ilmuwan, programer komputer, atau ahli logika). Thomas Amstrong (2009: 6) mengungkapkan bahwa kecerdasan ini termasuk kepekaan terhadap pola logis dan hubungan, pernyataan dan proposisi, fungsi, dan abstraksi terkait lainnya. Jenis-jenis proses yang digunakan dalam layanan kecerdasan logika matematika termasuk kategorisasi, klasifikasi, inferensi, generalisasi, perhitungan, dan pengujian hipotesis. Amstrong dengan jelas menggambarkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan logika

matematika selalu identik dengan profesi yang berhubungan dengan penggunaan angka-angka.

William Crain (3), Pertumbuhan dan perkembangan anak memang berbeda-beda seperti yang diungkapkan oleh Gessel bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu anak adalah produk dari lingkungan, dan yang lebih fundamental anak berasal dari dalam, yaitu aksi gen-gen tubuhnya. Dalam artian pertumbuhan dipengaruhi oleh lingkungan dan mendapatkan stimulus yang baik.

Hasil Peningkatan Kecerdasan Logika Matematika Anak di Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon Melalui Permainan Bingo.

Kecerdasan logika matematika yang yang di optimalkan pada anak sejak dini akan menjadi dasar bagi anak untuk berpikir logis. Hal ini sejalan dengan Niroom Nejjhad, dan Haghani (2012) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa: *“In the popular teaching of mathematics, which is highly reliant on the mathematical-logical intelligence; students mathematical functioning is related to their mathematical/logical intelligence.”* Dijelaskan bahwa dalam ajaran populer matematika sangat bergantung pada kecerdasan logika matematika; matematika berkaitan dengan kecerdasan logis matematika siswa.

Hilda L. Jackman (2012: 153), kecerdasan logika matematika anal memiliki lima aspek yaitu pengenalan angka, pengenalan geometri, pengenalan pola, mengelompokkan benda, dan berpikir logis. Pada aspek mengelompokkan benda dalam mengelompokkan berdasarkan benda berdasarkan bentuk yaitu Anak mampu mengelompokkan segitiga biru, persegi merah, lingkaran kuning, dan persegi hijau. Anak mengelompokkan objek dengan atribut umum atau karakteristik, seperti ukuran, bentuk, atau warna, yang dikelompokkan dan dipilah. Anak-anak ini berinteraksi dengan lingkungan, menggunakan diskriminasi visual dan memanipulasi benda-benda nyata.

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan II, terlihat bahwa kecerdasan logika matematika anak telah mengalami peningkatan. Temuan data kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan melalui permainan menjadikan kreativitas bingo anak menjadi lebih baik dan dengan permainan bingo anak menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

KESIMPULAN

Pembelajaran permainan bingo yang tepat materi/bahan ajar yang dikembangkan, metode dengan pendekatan yang berpusat pada anak, media yang bervariasi sesuai dengan pengembangan tema yang dikembangkan dan pengembangan tema yang beragam, dengan tujuan agar anak dapat bereksplorasi, bereksperimen dan berimajinasi yang dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika anak, yang telah diterapkan oleh guru dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) perencanaan pembelajaran permainan bingo dan pengembangan tema/sub tema yang berbeda, (2) mengembangkan bahan ajar/materi permainan bingo yang beragam, (3) menerapkan permainan bingo berdasarkan 4 komponen yaitu materi, metode, media dan alokasi waktu pada kegiatan inti yang berbeda, (4) memberikan kebebasan seluas-luasnya pada anak untuk

berekplorasi, berimajinasi dan bereksperimen. Sehingga tujuan permainan bingo dapat tercapai dengan optimal. Pada implementasi pembelajaran dengan kegiatan permainan telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur yang baik dan benar. Peningkatan Kecerdasan Logika Matematika Anak-anak melalui metode permainan bingo di Kelompok B Kelompok Bermain Mawar FKIP Unpatti, Kota Ambon yang mana hasilnya meningkat dibandingkan dengan sebelum dilakukan tindakan. Keberhasilan peningkatan kecerdasan logika matematika anak melalui permainan bingo sangat ditentukan oleh guru. Hal ini terlihat jelas dari observasi dan catatan lapangan tindakan secara keseluruhan. Lima aspek yang dijadikan fokus pengembangan peningkatan kecerdasan logika matematika yaitu; pengenalan angka dalam mengurutkan angka, pengenalan geometri dalam menyebutkan bentuk geometri, pengenalan pola dalam menyusun pola berdasarkan warna, mengelompokkan benda dalam mengelompokkan berdasarkan benda berdasarkan bentuk, dan berpikir logis dalam mencocokkan hubungan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan logika matematika pada anak setelah mengikuti pembelajaran dengan metode permainan bingo. Data menunjukkan bahwa tingkat kreativitas anak tercatat sebesar 51,93 % pada tahap pra intervensi. Tingkat kreativitas anak selanjutnya meningkat menjadi 63,93 % pada akhir siklus ke I dan meningkat lagi menjadi 74,26 % pada akhir siklus ke II dan ada 3 anak (dari 15 anak) pada tahap pra penelitian. Pada akhir siklus ke I jumlah tersebut meningkat menjadi 5 anak (dari 15 anak) dan meningkat lagi menjadi 13 anak (dari 15 anak) pada akhir siklus II. Karakteristik utama dari kegiatan permainan bingo yang dinilai mampu meningkatkan kecerdasan logika matematika anak yaitu kegiatan berpikir logis, eksperimen, dan imajinasi. Penelitian merekomendasikan kepada guru untuk mempertimbangkan penggunaan permainan bingo sebagai upaya dalam meningkatkan kecerdasan logika matematika anak. Dalam penerapan bermain pembelajaran permainan bingo masih memiliki kendala-kendala antara lain; keadaan tempat yang kurang maksimal untuk aktivitas anak karena dua kelas menjadi satu ruangan, kondisi anak yang belum terbiasa dalam penerapan permainan bingo, dan guru masih kaku dalam penerapan permainan bingo. Karena baru diterapkan, guru kurang memberi keluesan dan kurang memberi kesempatan bagi anak-anak agar lebih berimajinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Markos, Patricia. (2006). *Play in Supervision: Exploring the Sandtray with Beginning Practicum Students*. Journal of Creativity in Mental Health. Vol. 2(3).
- Adams, Ken. (2006). *Semua anak jenius*. Jakarta: Esensi.
- Ali Nugraha. (2008). *Pengembangan Sains pada Anak Usia Dini*. JLIS Foundatio.
- Arikunto, Suharsimi dkk. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asfandiyar, Andi Yudha. (2010). *Kenapa Guru Harus Kreatif*. Bandung: IKAPI.
- B. O. J Omatseye.(2010) "Art in Early Childhood Education Classrooms: An Invitation to Creativity" *An International Multi-Disciplinary Journal, Ethiopia Vol.4 (3a) July, 2010*.

- Church, Ellen Booth. (2006). *Grand Sand*. Scholastic Parent a Child.
- Cobra Emami Rizi et all. (2011). *The Effect group plays on the Development of the Creativity of Sixyear Children*. Procedia Social and Behavioral Sciences 15.
- Cooper, Carol, Clair Halsey dkk. (2010). *Ensiklopedia Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Gellens. R.S. (2014). *Membangun Daya Pikir Otak*. Jakarta: Indeks.
- Geoffrey E. Mills. (2000). *Action Research : Aguide For the Teacher Research* Columbus, obio: Southern Oregon University.
- Jamaris, M. (2013). *Orientasi dalam Psikologi Pendidikan*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Jill Englebright Fox dan Robert Schirrmacher. (2012). *Art & Creative Development for Young Children, 7th edition*, Wadsworth: Belmont.
- John W. Santrock. (2009). *Child Development Ninth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Kadir, A. et al. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lexy J. Maleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Kemple, Kristen. (2000). *Nurturing Creativity in Early Childhood Education: Families Are Part of It*. Early Childhood Education Journal, Vol. 28, No. 1.
- Mayesky, Mary. (2002). *Creative Activities for young children*. New York: Deimar Publisher Inc.
- Moeslichatoen. (2004). *Metode Pengajaran Di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Munandar. (2012). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mutiah, Diana. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Naomi, Angela and Audrey C. Rule. (2012). *Developing Second Graders' Creativity Through Literacy-Science Integrated Lessons on Lifecycles*. Early Childhood Educ J.
- Nugraha, Ali. (2008). *Pengembangan Sains pada Anak Usia Dini*. JLIS Foundatio.
- Nurjatismika, Yusep. (2012). *Ragam Aktivitas Harian untuk TK*. Yogyakarta: IKAPI.
- Oliver, Ann. (2006). *Creative Teaching: Science In The Early Years And Primary Classroom*. David Fulton, Chiswick High Road, London.
- Rachmawati, Yeni dan Kurniati Euis. *Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak*. Jakarta : Kencana.
- Scoffham, Stephen. (2009). *Teaching Geography Creatively*. USA: open university.
- Sudarma, Momon. (2013). *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Soegeng Santoso. (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini: Menurut Pendirinya I* (Jakarta: Unpublished).

- Sumanto. (2005). *Pengembangan Kreativitas Senirupa Anak TK*. Jakarta: Depdiknas.
- Susanne Klaarand Johan Öhman. (2014). *Children's meaning-making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish preschool practice*. *European Early Childhood Education Research Journal*, 2014 Vol. 22, No. 2.
- Susanto. (2011). *Perkembangan Anak usia Dini*. Jakarta: permada media group.
- Sutrisno, Harjodan Hary, Soedarjo. (2005). *Pengenalan Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdiknas.
- Suyadi. (2014). *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- T. Isbell, Rebecca and Shirley C. Raines. (2013). *Creativity and the Art with Young Children, 3rd edition*. International Edition. Wadsworth Cengage Learning, United State..
- T. Isbell, Rebecca and Shirley C. Raines. (2007). *Creativity and the Art with Young Children Second Edition*. Delmar, Cengage Learning, USA.
- Trister, Diane, Laura J. Colker and Cate Heroman. (2000). *The Creative Curriculum For Early Childhood Third Edition*. Washington, Provided by quality books, Inc.
- Wiriastmajdaya Rocahiti. (2008). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Yamin, Martinis dan Jamilah. (2013). *Panduan Pendidikan Anak usia dini*. Ciptuat: Gaung Persada.
- Yusep Nurjatmika. (2012). *Ragam Aktivitas Harian untuk TK*. Yogyakarta: IKAPI.

STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

Taufiqurokhman¹, Nirmala Afrianti Sahi², dan Andriansyah³

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama),
jalan Hanglekir I Nomor 8 Jakarta, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo, Jalan Jendral Sudirman,
Limboto, Kabupaten Gorontalo, Indonesia.

Email:

taufiqurokhman@dsn.moestopo.ac.id¹; nirmalaathirah@gmail.com³;

andriansyah@dsn.moestopo.ac.id²;

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan strategi pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena masalah kebijakan pemerintah meningkatkan mutu pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, pendidik juga memiliki kewajiban turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti.

Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan. Diharapkan mutu-mutu pendidikan agama akan semakin meningkat. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di pedesaan dianggap masih kurang layak. Karena fasilitas dan kualitas guru yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: *Strategi Kebijakan Pemerintah, Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia.*

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (Asmani. Ma'mur, 2009:12). Dengan demikian, Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak,

generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Syafauddin, 2002:17).

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implemetasi penggunaan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012:23). Utamanya di daerah-daerah tertinggal masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program yang dibuat oleh pemerintah seringkali hanya program tambal sulam (incremental) dan tidak berkelanjutan (sustainable), (Suryana, 2009:12). Banyaknya sekolah, utamanya sekolah dasar yang dalam kondisi rusak berat dan hanya direhabilitasi melalui Biaya Orientasi Sekolah (BOS), dan berbagai paket program sejenis lainnya, tidaklah menjadikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut menjadi lebih baik, (Suwanto, 2009:32). Banyaknya sekolah dasar yang rusak tersebut menyebabkan anak-anak usia pendidikan dasar tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Padahal untuk anak-anak usai tersebut, dukungan sarana dan prasarana yang memadai amat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pendidikannya, (Amrullah Aziz, 2015:21).

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, (Hamalik, 2003:19). Utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya, (Akhwan, 2003:26). Bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, sekolah yang rusak berat dan masih belum direhabilitasi masih ada ditemui. Apalagi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dengan kata lain, sekolah-sekolah diperkotaan saja kondisinya masih diperlu ada perbaikan, apalagi di pelosok yang ada di Indonesia, (Usman, 2014:21).

Selain ketersediaan sarana dan prasarana fisik dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya yang masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kurikulum pendidikan dasar pun menjadi permasalahan, (Mukhid, 2007:27). Kurikulum yang seringkali berubah seiring dengan pergantian rezim pemerintahan menyebabkan anak-anak usia sekolah dasar menjadi korbannya. Anak-anak usia sekolah dasar merupakan anak-anak yang mind set berfikirnya belum terbentuk, anak-anak tersebut masih dalam tahap amati dan tiru, belum sampai tahap modifikasi. Selain itu, beban kurikulum yang berat menyebabkan anak-anak kehilangan kreativitasnya karena hanya dibebani dengan mata pelajaran yang terkonsep dan berpola baku secara permanen. Artinya, apa yang di dapat di sekolah, itulah yang ada pada dirinya, tanpa kecuali, (Muhammad Fadhli, 2017:32).

Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara, (Sabar Budi Raharjo, 2012:14). Wajar saja ketika banyak orang menyerukan bahwa anak adalah bibit-bibit masa depan bangsa, yang harus diperhatikan dan dirawat dengan baik. Merekalah pewaris masa depan, tulang punggung dan harapan bangsa dan negara ada di pundak mereka, (Sabar Budi Raharjo, 2012:18). Namun, harapan itu ternyata masih membentur tembok yang sangat besar. Ternyata masih banyak di temukan anak-anak kurang mampu harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Sering dijumpai bahwa anak-anak Indonesia harus dipaksa mengemis demi menghidupi keluarga, melakukan tindak kriminal dan

terlantar, (Mukhid, 2007:23). Karena ketimpangan ekonomi. Tidak jarang pula anak-anak seringkali menghadapi bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik. Padahal, anak-anak Indonesia harusnya berada di rumah, belajar dengan baik dan menikmati tugas-tugas bagi tumbuh kembang diri mereka. Disinilah peran pemerintah harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pendidikan anak-anak Indonesia, (M. U. Usman, 2007:27).

Pendidikan Karakter merupakan proses pemberian tuntunan peserta atau anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif. Selain itu pendidikan juga merupakan sebagai sebuah sarana strategis dalam meningkatkan potensi anak bangsa, agar mampu bersaing dalam tataran dunia pendidikan global, (Syafauddin, 2002:29).

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan untuk satuan pendidikan, mulai jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) hingga pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan), (Malik, 2016:29). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), menyebutkan (Hanson, 2000:42), terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Keempat aspek itu yakni: (1) kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Kebijakan hal terpenting, utamanya yang berlaku secara nasional meliputi kurikulum dan ujian nasional. Hal itu termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru; (2) kepemimpinan (leadership) kepala sekolah juga tak kalah penting di dalam manajemen berbasis sekolah; (3) infrastruktur, yang tidak lain adalah sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua kata Supriano, berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. "Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial; (4) proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas lanjut Supriano, dapat mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru, (Malik, 2016:56).

Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21, (Mulyasa. E, 2007:34). Empat kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut meliputi Critical Thinking (berpikir kritis), Collaboration (kemampuan bekerja sama dengan baik), Communication (berkomunikasi) dan Creativity (kreativitas). Keempat kompetensi tersebut harus masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. Inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi. Sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21.

Hanson (2000) menyebutkan pendidikan adalah sebagai "*investment in people*" untuk pengembangan individu dan masyarakat, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan di sisi lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi. Perbaikan

kualitas pendidikan tidak dapat hanya dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana, perubahan kurikulum atau meningkatkan kualifikasi masukan dari system pendidikan, tanpa memperhatikan kualitas dan nasib atau kesejahteraan pendidik. Perbaikan sarana dan prasarana, kurikulum telah banyak dilakukan. Namun demikian, masih sedikit yang dilakukan dengan menyentuh kebutuhan dan nasib pendidik secara utuh, (Sallis, 2010:29).

Para ahli dibidang pendidikan, secara terus terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum ketimbang dengan masalah pendidik. Padahal, telah menjadi pemahaman umum bahwa masalah pendidik jauh lebih penting daripada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. Pernyataan tersebut, memberikan gambaran bahwa masalah pendidik atau guru memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh para praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan, (M. U. Usman, 2007:36).

Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus mendapat perhatian yang utama dan utama. Kualitas atau mutu pendidik harus senantiasa ditingkatkan. Selain itu, kesejahteraan dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius, (Syafauddin, 2002:19). Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup pendidik.

Dalam uraian di atas, penulis menjelaskan kriteria seorang pendidik yang dapat dikatakan profesional dan kompeten, (Mulyasa. E, 2007:21). Disamping itu dijelaskan juga hal-hal yang terkait dengan program peningkatan mutu pendidik, baik yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, maupun yang saat ini dilakukan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru dan dosen, (Hanson, 2000:27). Dari uraian diatas, maka penulis akan menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis akan menjelaskan kajian analisis dari penulisan tersebut di bawah ini.

B. STRATEGI PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN

Peningkatan memiliki kata dasar tingkat ditambah dengan imbuhan pe-an. Sehingga berubah menjadi peningkatan yang berupa kata benda dengan arti proses, cara, perbuatan meningkatkan sesuatu untuk kemajuan. Mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya) atau bisa di sebut dengan kualitas. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan, sikap yang berahlak disegala bidang untuk keberhasilan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan, (Asmani. Ma'mur, 2009:39). Selanjutnya penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia seperti di bawah ini:

B.1. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan

Adapun faktor–faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu:

- (a) Rendahnya kualitas sarana fisik: Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya, (Muhammad Fadhli, 2017:37). Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya;
- (b) Rendahnya kualitas guru: Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan ([https://www.slideshare.net/iwansukma/pp-no-32-tahun-2013-tentang-standar-nasional-
pend](https://www.slideshare.net/iwansukma/pp-no-32-tahun-2013-tentang-standar-nasional-) Diakses 5 Januari 2019). Guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, (M.U.Usman, 2007:29). Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru;
- (c) Rendahnya kesejahteraan guru: Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal;
- (d) Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan: Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut;
- (e) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (Hamalik, 2003:39). Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja;
- (f) Mahalnya biaya pendidikan: Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman

Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah;

- (g) Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis, (Suryana, 2009:24).

Siapa yang bertanggungjawab dan seharusnya membayar biaya pendidikan? Pemerintah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu, (Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2005:21) Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’. Selanjutnya penulis akan menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

B.2. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Penulis akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah, sebagai berikut:

- (a) Perubahan kurikulum belajar: Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakannya dengan baik;
- (b) Peningkatan mutu guru: Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah, (Syafauddin, 2002:34). Dengan adanya seleksi yang tepat ini diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Dan Insan Pendidikan patut mendapatkan penghargaan karena itu berikanlah penghargaan, “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi, (Malik, 2016:29). Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan intrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir). Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (*hierarchy of needs*) dengan Tuhanya seperti dalam ajaran islam misalnya, (Daulay, Haidar, 2007:36). Yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat;
- (c) Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarginalkan dalam kehidupan masyarakat;

- (d) Bantuan Operasional Sekolah. Pada intinya bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun kadang program ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal;
- (e) Bantuan Khusus Murid (BKM): Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya;
- (f) Sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak: Bila mutu pendidikan di negara kita ingin maju maka sarana dan prasarana dari pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman, (Malik, 2016:56). Kenyamanan mereka itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam proses belajar. Dengan diberlakukannya kurikulum 2004, kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata, (Asmani. Ma'mur, 2009:39). Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan);
- (g) Pemerataan pendidikan: Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota namun di daerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan pendidikan di semua wilayah; (h) Kurangi dan Berantas Korupsi: Korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama (Amin Rais menyebutnya korupsi berjamaah) dalam berbagai jenjang mulai tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan praktik korupsi kepada peserta didik, (Harris Y. P. Sibuea, 2014:37).

B.3. Pendidikan Karakter Untuk Perbaikan Mutu

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia meluncurkan sebuah program pendidikan, yang dikenal dengan Pendidikan Karakter. Dominasi ranah kognitif dan psikomotorik harus dikurangi, ranah afektif sudah seharusnya menjadi fokus utama. Sehingga terbentuklah manusia-manusia yang berkarakter luhur, berbudi pekerti tinggi. Manusia-manusia seperti inilah yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, (Sallis, 2010:18).

Pendidikan karakter dibutuhkan untuk mencegah setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat merusak pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, semua peran sangat dibutuhkan untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia mengalami pemerataan, peningkatan dan perubahan yang signifikan. Pendidikan Karakter bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk, kemudian membuat hal yang baik menjadi suatu kebiasaan. Budaya ini harus dipelihara agar pendidikan di Indonesia berkembang dan bisa menjadi daya saing bagi pendidikan lainnya secara global, (Syafauddin, 2002:36).

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, (Sallis, 2010:65). Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bagi anak bangsa memang membutuhkan waktu yang cukup lama serta melibatkan semua stake holder pendidik yang ada. Sehingga hasilnya adapat dirasakan oleh semua pihak, terlebih pemerinah sendiri sebagai pemegang kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, (Malik, 2016:26).

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Desaint penelitian mengunaan deskriptif. Data diperoleh secara purpose, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek penelitian yang berkedudukan terkait dengan obyek penelitian serta memahami masalah dan kompeten untuk mengurai obyek penelitian secara mendalam, (Bungin, 2007:27).

Dalam Hal ini bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Alasan ini merujuk pada pendapat (Creswell. J. W, 2012), menjelaskan: Equally, all qualitative research tradition give as much attention to the inner as well as the outer states of human activity, Jacob (1987), for instance, notes the “subjective perceptions,” “emotions,” “reflective interpretations,” and “mental standards,” that can be include within the “characteristics” of qualitative research, (Arikunto, 2010:36). Artinya: Sama halnya, semua tradisi penelitian kualitatif memberikan perhatian yang sama besar pada kondisi batin maupun luar dari aktivitas manusia, Yakub (1987), misalnya, mencatat "persepsi subjektif," "emosi," "interpretasi reflektif," dan "mental standar," yang dapat dimasukkan dalam " karakteristik "penelitian kualitatif.

Penelitian dilaksanakan dengan pandangan yang mengacu pada pandangan (Creswell. J. W, 2012:39), yaitu sebagai berikut : (a) Qualitative researchers is the concerned primarily with process, rather than outcomes or product; (b) Qualitative researchers are interested in meaning – how people make sense of their lives, experiences, and their structures of the world; (c) The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediated through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines; (d) Qualitative researchers involve fieldwork. The researcher sprucely goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting;(e) Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through world or picture; and The process of qualitative research is inductive in that the researcher builds abstractions, concepts, hypotheses, and theorities from detail, (Arikunto, 2010:29).

Artinya: (a) Peneliti kualitatif lebih mementingkan proses, daripada hasil atau produk; (B) Peneliti kualitatif tertarik pada makna - bagaimana orang memahami hidup

mereka, pengalaman, dan struktur dunia mereka; (c) Peneliti kualitatif adalah instrumen utama untuk pengumpulan dan analisis data. Data dimediasi melalui instrumen manusia ini, bukan melalui inventaris, kuesioner, atau mesin; (d) Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan. Peneliti sering pergi ke orang-orang, pengaturan, situs, atau lembaga untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam pengaturan alaminya, (e) Penelitian kualitatif adalah deskriptif di mana peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui dunia atau gambar; dan Proses penelitian kualitatif bersifat induktif karena peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari detail, (Creswell. J. W, 2012:39).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya. Dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya. Dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri, (Tjiptono, Fandy, 1998:28).

Istilah pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, dan mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar atau professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan satuan pendidikan tinggi, (Sabar Budi Raharjo, 2012:36)

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produksi jadi, (Amrullah Aziz, 2015:32).

Kualitas adalah “*doing the right thing, right time, always striving for improvement, and always satisfying the customers*”. Selain itu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan kedalam dunia pendidikan sebagai berikut: (a) kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (b) kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan; (c) kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang), (Suryana, 2009:56).

Dalam manajemen mutu terpadu. Makna kualitas mutu adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan lembaga yang menekankan perbaikan

berkelanjutan tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan mengurangi pembiayaan. Dari uraian tentang mutu diatas, maka mutu pendidik merupakan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

D.1. Standar Mutu Pendidik atau Guru Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (A.S. Usman, 2014:27). Selanjutnya standar Mutu Pendidikan di bagi menjadi seperti dijelaskan di bawah ini:

a) Standar kualifikasi

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan mutu guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, dilakukan kegiatan penyediaan guru pendidikan untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal, (Akhwan, 2003:29).

Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian bea peserta didik Strata 1 (S1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam. Peningkatan kemampuan guru juga diberikan kepada guru-guru yang belum mencapai gelar Sarjana, sesuai dengan Undang-Undang. Yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan tugas-tugas disekolah. Yaitu dengan merancang suatu program pendidikan *dual mode system*. *Dual mode system*, adalah dua modus belajar. Yaitu menggunakan modul sebagai bahan belajar mandiri (BBM), kemudian ada kuliah secara tatap muka ditempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya. *Dual mode system* itu hakekatnya sama dengan Universitas Terbuka yang melaksanakan belajar jarak jauh, namun berbeda dengan kelas jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas diluar kampusnya, sehingga menyulitkan untuk mengontrol kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya. Secara Undang-Undang kegiatan ini legal, karena ada asal atau Bab dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 31 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 107/U/2001, tentang PTJJ (Perguruan Tinggi Jarak Jauh). Dalam Undang-Undang itu, secara lebih spesifik mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara Perguruan Tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Misalnya, dengan memanfaatkan perangkat computer dengan internetnya seperti e- learning atau e-mail. Belajar jarak jauh ini tidak boleh diselenggarakan atau di buka oleh perguruan tinggi yang tidak ditugasi,

Jadi, harus dikendalikan atau dikoordinasikan. Ada dua jalur atau cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru. Pertama, adanya jalur resmi untuk mengikuti pendidikan Sarjan. Kedua; yang rutin mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan disekolah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat, (Hamalik, 2003:43).

Sebagai manusia ada satu pegangan yang dapat kita pegang dalam suatu kaidah yang menyatakan bahwa *“kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka beruntung”*. Maka harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar *minal-mahdiilaal- lahdi*. Artinya, guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Dalam manajemen mutu perbaikan terus menerus merupakan suatu keharusan. Artinya, semua komponen yang terlibat dalam sebuah organisasi termasuk guru harus senantiasa melihat segala kekurangannya dan tetap melakukan perbaikan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama, (Philip B. Crosby, 2007:28).

b) Standar kompetensi

Istilah kompetensi guru mempunyai makna, *Brokeand Stone* mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Noomor 32Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan, (Akhwan, 2003:31), menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (Amrullah Aziz, 2015:28).

Lebih lanjut dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa “kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) Pemahaman terhadap peserta didik; (c) Pengembanagan kurikulum/silabus; (d) Perencanaan pembelajaran; (d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) Evaluasi hasil belajar; (h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (Muhammad Fadhli, 2017:45).

2) Kompetensi kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (b), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, (Syafauddin, 2002:35). Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Pasal 3 ayat (5), menjelaskan kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya mencakup: beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja diri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. (M. U. Usman, 2007:37), menjelaskan bahwa kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut: (a) Mengembangkan kepribadian yang meliputi; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru; (b) Berinteraksi dan berkomunikasi, yang meliputi; berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan; (c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, yang meliputi; mengkaji siswa yang mengalami kesulitan belajar; membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus; (d) Melaksanakan administrasi sekolah, yang meliputi; mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah; dan melaksanakan kegiatan administrasi sekolah; (e) Melaksanakan penelitian sederhana, yang meliputi; mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah; dan melaksanakan penelitian sederhana, (Saifulloh et al., 2012:45).

3) Kompetensi profesional

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Burhanudin Salam dalam Haidar Putra Daulay menyatakan profesionalis adalah pekerjaan yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian. Cirinya, sebagai berikut: (a) Memiliki keahlian dibidang tertentu; (b) Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut; (c) Hidup dari pekerjaan tersebut; (d) Bukan sebagai hobi. Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus, (Sabar Budi Raharjo, 2012:32).

Sebagai suatu profesi yang memiliki kompetensi profesional seorang pendidik menurut Akhwan, (2003:31), yaitu harus memenuhi kriteria profesional, sebagai berikut: (a) Fisik: sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau rasa kasihan dari peserta didik; (b) Mental/kepribadian: berjiwa pancasila, mampu menghayati Garis-garis Besar Haluan Negara, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu

mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, mampu mengembangkan kecerdasan tinggi, bersikap terbuka, peka, dan inovatif, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan disiplin, dan memiliki *sense of humor*; (c) Keilmiahan atau pengetahuan: memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan diri, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami dan menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar; (d) Keterampilan: mampu berperan sebagai organisator proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pembelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, mampu menyusun garis besar program pembelajaran, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah, (M. U. Usman, 2007:42).

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar secara lisan, tulisan dan isyarat. Arikunto mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, (Hamalik, 2003:21). Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung dimasyarakat. Guru dalam pandangan Al-Gazali mengemban dua misi sekaligus, (Akhwan, 2003:29). Yaitu tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, menyucikan dan membawa hati itu menuju Allah. Tugas lainnya adalah tugas sosio politik (kekhalifahan), dimana guru membangun, membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, menjamin kelangsungan masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan diakhirat. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Setidaknya ada tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun dimasyarakat, (Tjiptono, Fandy, 1998:37).

Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) Memiliki pengetahuan, tentang adat istiadat baik sosial maupun agama; (b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi; (c) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi; (d) Memiliki pengetahuan tentang estetika; (e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial; (f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan; (g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia. Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikemas terutama guru pendidikan agama Islam, dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertaqwa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Dikalangan pemikir yang ada tentang para pendidik, pembicaraan tentang pendidik yang professional sudah lama berlangsung, walaupun penjabarannya belum tersistematiskan dan terkoordinasi sebagaimana yang terjadi dimasa sekarang. Pejabaran profesi dan kompetensi pendidik terkadang masih bercampur aduk dengan pembicaraan, kode etik pendidik yang merupakan salah satu ciri kalangan professional. Seperti: dokter dan pengacara. Abuddin Nata, menyimpulkan kriteria seorang pendidik yang dipaparkan oleh Al-Ghazali kedalam enam belas kriteria. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah, harus manusiawi, humanis, demokratis, terbuka, adil, jujur, berpihak pada kebenaran, menjunjung akhlak mulia, toleran, egaliter, bersahabat, pemaaf, menggembirakan. Dengan sifat-sifat yang demikian, maka seorang pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, (Syafauddin, 2002:23).

Sebagian besar dari kriteria yang disampaikan oleh ahli pendidikan, seperti Al-Ghazali diatas, lebih banyak terkait dengan kompetensi kepribadian dan sosial. Adapun kompetensi akademik, pedagogic tampaknya kurang mendapat perhatian. Hal ini menurut mereka, kompetensi kepribadian, akhlak dan sosial lebih utama dibandingkan dengan kompetensi lainnya. Kompetensi akademik dan pedagogik berkaitan dengan pembinaan mutu intelektual dan keterampilan peserta didik, sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial berkaitan dengan pembinaan mutu akhlak dan kepribadian peserta didik, (Philip B. Crosby, 2007:56).

D.2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sudahkah guru di negeri ini menjadi sosok yang ideal bagi murid-muridnya? Secara kasat mata sepertinya belum, masih banyak kelemahan dan kekurangan guru di negeri Indonesia saat ini, baik aspek intelektualitas, moralitas, maupun dedikasi sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru adalah salah satu kunci memajukan pendidikan yang ditunggu-tunggu oleh anak didik dan masyarakat secara umum. Berbagai program harus diadakan untuk menunjang pengembangan potensi guru ini. Disisi lain guru juga harus termotivasi untuk banyak membaca, berlatih berkarya, serta menjadi figure inspiratory dan motivator bagi anak didik dan masyarakat. Tanpa daya keinginan dalam diri guru, maka usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada artinya, karena hanya formalitas belaka, tanpa ada energy perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak. Hanya sekedar mengikuti pelatihan tanpa ada efeknya, (Philip B. Crosby, 2007:34).

Menurut Ali Ghufron Mukti, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia untuk Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatakan: Sasaran Startegis Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Untuk Indonesia adalah: (a) Meningkatnya kualitas pembelajaran; (b) mahasiswa pendidikan tinggi (Undang-undang Pendidikan Tinggi); (c) Meningkatnya kualitas kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (d) pendidikan tinggi terakreditasi Unggul; (e) Meningkatnya relevansi, kualitas, (f) kuantitas sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pendidikan tinggi; (g) Meningkatnya relevansi dan produktivitas; (h) riset dan pengembangan; (i) Menguatnya kapasitas inovasi. (<https://med.unhas.ac.id/kedokteran/en/wp-content/uploads/2017/01/UNHAS.Kebijakan-Prof.-Ali-Guftron.pdf>). Diakses Tanggal 5 Januari 2019.

Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan, menurut Mulyasa.E, (2007), menyebutkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini: (a) Evaluasi diri *self assessment*: Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat *brain storming* yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu *sense of quality*, serta merumuskan titik tolak *point of departure* bagi sekolah atau madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu; (b) Perumusan Visi, Misi, dan tujuan: Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal atau pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah ke masa depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (c) Perencanaan: Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan scenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis: (d) Pelaksanaan: Apabila bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya dikenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai

dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih kecil atau mikro, baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya, (Muhaimin dan Mudjib, 1993:34).

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan, (Malik, 2016:45).

Peran masing-masing itulah yang juga perlu disoroti didalam implementasi strategi peningkatan mutu pendididkan tenaga kependidikan, Hanson, JohnW. Dan Cole S.Brembeck. (200). Untuk melihat peran tersebut, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran kepala sekolah atau Madrasah: Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah atau Madrasah bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan, (Amrullah Aziz, 2015:48).

Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja disekolah atau madrasah, pembuatan rencana, peramalanapa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang; (2) Peran Guru dan Staf Sekolah: Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Artinya di samping tugas-tugas mendidik guru juga memiliki tugas-tugas yang bersifat manajemen; (3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat: Kedua peran tersebut akan sulit dilaksanakan tanpa keikutsertaan peran orang tua siswa dan masyarakat. Orang tua siswa dan masyarakat berperan dalam mengawasi mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di sekolah; (4) Pemerintah: Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian; (5) Evaluasi: Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini, adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikannya itu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan focus pada capaian hasil (prestasi belajarsiswa); (6) Pelaporan: Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian

atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stakehokders, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut, (Muhammad Fadhli, 2017:67).

Strategi tersebut menurut (Hanson, 2000:43), menyebutkan dalam esensi tertentu sebenarnya sudah diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka yang terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat) tumbuh besar, bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan tradisional.baik yang berlandaskan agama maupun budaya.

Demikian juga penerapan scenario peningkatan mutu pendidikdan tenaga kependidikan di Indonesia sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan pelaksanaannya masih terus berkembang), sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang dapat digunakan sebagai guru terbaik disamping mengambil manfaat dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama, Asmani. Ma'mur. Jamal, (2009). Tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hamper semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan, (Akhwan, 2003:59).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*: sarana dan prasaran serta pendidik sebagai salah satu komponen strategi kebijakan pemerintah Indonesia yang terpenting dalam sistem pendidikan nasional yang mendapat perhatian utama. *Kedua*: Kualitas mutu pelayanan menyangkut sarana dan prasarana serta pendidik harus terus ditingkatkan. *Ketiga*: kesejahteraan pendidik dari sisi material juga harus mendapat perhatian yang serius. Dengan begitu mereka dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan kedalam dunia pendidikan sebagai berikut: (a) Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; (b) Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan; (c) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang). Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP NO.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa Pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.

Sedangkan rekomendasi dari penulisan ini penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*: kualifikasi akademik mutu guru sebagai pendidik dan tenaga

kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidikan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.

Kedua: perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan, pemberian bea siswa peserta didik Strata atau Sarjana untuk guru pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga standar kualitas guru sebagai pendidik seperti yang dicanangkan pemerintah Indonesia harus berpendidikan Pasca Sarja atau S2. Dan perlu dilakukan sertifikasi guru pendidikan secara terpadu dan massif agar terlihat potensi guru sebagai pendidik memang sudah merata di Indonesia. Sedangkan untuk kompetensi pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI Pasal 28 Ayat (3), menyebutkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, Daulay, Haidar, Putra, (2007). *Ktiga: saranadan prasarana* sebagai media belajar perlu mendapatkan prioritas, selain di perkotaan juga di perdesaan yang masih jauh dari harapan sebagai media belajar mengajar untuk bisa lebih meningkatkan mutu standar pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhwan, M. (2003). Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan; Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah, VIII(VI)*, 36–45. Retrieved from <http://jurnal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/5201>
- Amrullah Aziz. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, p. 157.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmani. Ma'mur. (2009). *Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell. J. W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Research Design, 04(01)*, 26.
- Daulay, Haidar, P. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Hamalik. (2003). Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Indonesia Policy Briels- Ide-Ide Program 100 Hari, 01(03)*, 9. Retrieved from <https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/education.pdf>

- Hanson, J. W. dan C. S. B. (2000). *Education and the Development of Nations*. New York: Holt: Rinehart and Winston.
- Harris Y. P. Sibuea. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Info Singkat Hukum*. *Info Singkat Hukum*, p. 388.
- Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang RI Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2005). Surabaya.
- Malik, O. (2016). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin dan Mudjib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Tarsito.
- Muhammad Fadhli. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Manajemen Pendidikan*, 01(02), 216–240. Retrieved from file:///C:/Users/Hp/Downloads/Manajemen_Peningkatan_Mutu_Pendidikan.pdf
- Mukhid, A. (2007). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang Tepat. *Journal Tadris*, 02(01), 119–133. Retrieved from file:///C:/Users/Hp/Downloads/211-288-1-SM.pdf
- Mulyasa. E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Philip B. Crosby. (2007). *Quality is Free, Mc-Graw Hill Book, New York*. Qomar, Mujamil. New York: Qomar, Mujamil.
- Sabar Budi Raharjo. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 298–319. Retrieved from <http://perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/1129-4239-1-PB.pdf>
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suryana, S. (2009). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(02), 553. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1131/2821><https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/1131/2821>
- Suwarto. (2009). Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Propinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 492–510. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S95054>
- Syafauddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Tjiptono, Fandy, A. D. (1998). *Total Quality Management (TQM)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Ilmiah Didaktika*, 15(1), 13–31. Retrieved from file:///C:/Users/Hp/Downloads/211-288-1-SM.pdf

Usman, M. U. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

SUKORENO DAN DESA PANCASILA: STUDI MEMBANGUN PLURALISME PENDIDIKAN DI UJUNG TIMUR JAWA

Afifatul Munawiroh¹ dan Ahmad Musthofa Lutfiyanto²

Mahasiswa Fakultas Syari'ah¹ dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Afifatulmunawiroh93@gmail.com dan ahmadmusthofa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berbasis pada *Eksploratoris* dan *Field research*, tema yang diangkat adalah Sukoreno dan Desa Pancasila: Studi Membangun Pluralisme Pendidikan di Ujung Timur Jawa. **Pertama**, Apa maksud desa Pancasila di Sukoreno? **Kedua**, bagaimana pengembangan kehidupan masyarakat dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa? **Ketiga**, bagaimana perwujudan rasa kemanusiaan dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa? Dengan pendekatan *Phenomenologi* dan *Sosiologi* yaitu fenomena dan kehidupan masyarakat di desa Sukoreno untuk membaca kehidupan masyarakat dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa dan perwujudan rasa kemanusiaan dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa. Sedangkan, pemahaman desa Pancasila dijelaskan dalam konten analisis. Hasil penelitian ini: **pertama**, mengetahui desa Pancasila di Sukoreno dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa; **kedua**, adanya pengembangan kehidupan masyarakat dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa; **ketiga**, adanya perwujudan rasa kemanusiaan dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa.

Kata Kunci : Sukoreno, desa Pancasila, pendidikan

PENDAHULUAN

Agama atau kepercayaan merupakan keharusan bagi semua umat manusia di muka bumi. Indonesia salah satunya memiliki masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia dengan keanekaragamannya yang cenderung memiliki sumber utama terjadinya konflik antar sesama. Perbedaan agama atau keyakinan adalah salah satu faktor yang menimbulkan konflik antar sesama umat manusia tetapi disisi lain ada banyak faktor yang menimbulkan konflik tersebut seperti suku, ras dan golongan. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia sekarang ini adalah agama islam, kristen, katolik, protestan, hindu, budha dan konghucu. Agama inilah yang merupakan hasil era reformasi pemerintahan yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Nazmudin. 23-39).

Perbedaan yang jelas dimiliki masyarakat Indonesia, dengan banyaknya agama yang dianut akan menimbulkan benih-benih perdebatan perbedaan keyakinan. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik

antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama itu sendiri yang pada intinya mengajarkan, kedamaian, kasih sayang, toleransi dan saling tolong menolong.

Banyak persoalan bermunculan mengenai *teologis* yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat majemuk. Keagamaan di era modern sekarang ini adalah masalah hubungan antar agama atau pluralisme agama (*Religion Pluralism*). Hubungan antar agama yang menimbulkan masalah bukan sesuatu yang baru, tetapi banyak faktor melatarbelakangi timbulnya masalah. Salah satunya ialah apa yang di sebut oleh Gilles Kepel sebagai krisis modernitas. Adanya pluralisme agama bertujuan mengusung agenda untuk menciptakan jalinan hubungan umat beragama secara harmonis, khususnya di masyarakat Sukoreno dan Desa Pancasila yang selalu di warnai oleh adanya pasang surut yang tidak selamanya harmonis. Doktrin dasar masing-masing agama mengajarkan dan mengutamakan kedamaian, kerukunan, keharmonisan, dan saling toleransi. Tetapi semua itu dalam realitas historis empiris doktrin agama, keputusan majelis ulama dan kesepakatan dewan gereja-gereja sedunia belum bisa di terapkan sebagaimana mestinya yang di harapkan. Bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi penghambat kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan beragama yang begitu sulit di wujudkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadikan dinamika dan fluktuatif hubungan antar umat beragama *Pluralism Religio* (Puspo Nugroho: 2016).

Ketika melihat kebelakang maka kita akan mendapati sejarah islam yang gemilang dengan ilmu pengetahuan dan toleransi agama. Jika kita melihat kebelakang bahwa dalam zaman keemasan Islam sudah maju dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan serta dalam ilmu kebudayaan peradaban dan pemerintahan, dalam waktu itu pendidikan menjadi sangat di prioritaskan, mulai dari masjid- ke masjid sampai ke bentuk madrasah serta lembaga keilmuan sains serta keilmuan agama berkembang pesat pada waktu itu, dan sekaligus menghasilkan segi keilmuan yang sangat mumpuni didalam bidangnya mulai dari bidang Kedokteran Ibnu Sina. 93 Kemudian pakar

93 Nama lain Ibnu Sina adalah Abu Ali Al Husain Ibn Abdullah Ibn Sina. Di Eropa dia lebih dikenal dengan nama Avicenna. Lahir di sebuah desa Afsyaha di daerah Bukhara pada tahun 340 H (980 M). Ibnu Sina dibesarkan di daerah kelahirannya. Ia belajar Al-Qur'an dengan menghafalnya dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti astronomi, matematika, fisika, logika, kedokteran dan ilmu metafisika. Ketika umurnya belum mencapai 16 tahun sudah menguasai ilmu kedokteran. Pada waktu Nuh bin Mansur, penguasa Bukhara menderita sakit, banyak dokter yang tidak mampu mengobatinya, maka setelah diperiksa dan diobati oleh Ibnu Sina ia menjadi sembuh. Pada usia 22 tahun ayahnya meninggal, kemudian dia pergi ke Jurjan dan ke Chawarazm. Hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai di Hamadan. Di tempat ini ia menjadi seorang menteri. Ia meninggal pada tahun 428 H/1037 M pada usia 57 tahun. Ibnu Sina dibesarkan dalam lingkungan keluarga Syi'ah Isma'iliyah pada kurun kekacauan dan kemunduran Dinasti Abbasyiah; kurun menyaksikan Banu Buwaih menduduki Baghdad setelah melengserkan dinasti Abbasiyah, Ibnu Sina mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Qur'an, sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles yang telah dibacanya empat puluh kali. Pada usia 16 tahun beliau telah banyak mengetahui ilmu pengetahuan, sastra Arab, Fiqih, Ilmu hitung, filsafat bahkan ilmu kedokteran beliau pelajari sendiri. Profesinya dibidang kedokteran dimulai usia 17 tahun. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur (976-997 M), salah seorang penguasa Dinasti Samaniyah. Banyak tabib dan para ahli tidak berhasil menyembuhkan penyakit itu. Sebagai penghargaan Ibnu Sina disuruh menetap di istana selama sang raja dalam proses penyembuhan. Tetapi, ia menolaknya dengan halus, dan hanya

Filsafat Ibnu Rusyd (W 1126 M.) bidang Hukum Islam Empat Imam Mazhab, Syafi’I, Hambali, Hanafi, Maliki, serta pakar tafsir Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Para ulama ulama tersebut sangat mahir dibidangnya serta menguasai semua ilmu secara mendalam, salah satu hal yang menarik adalah kebanyakan mereka adalah alumni kajian keislaman yang konsen dalam bidangnya masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pendidikan pada waktu itu sangat maju dan membuat peradaban Umat Islam disegani di seluruh penjuru dunia.

Para tokoh diatas membangun toleransi dengan ilmu pengetahuan, hal ini juga kita tawarkan dan kita tanamkan dalam konteks keindonesian. Dewasa ini masih terdapat sikap eksklusif pada sebagian kelompok/masyarakat, yang dalam memandang perbedaan atau pluralitas tidak hanya merugikan orang lain. Tetapi sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Karena sikap eksklusifitas, tidak jarang membuat tekanan batin atau sakit hati yang mendalam sehingga terdapat problem batin yang membuat hidup tidak nyaman karena tidak bisanya menghargai dan menerima perbedaan pemahaman agama yang beragam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membangun sikap inklusif pada keberagaman, sehingga setiap orang atau anak mempunyai kesadaran toleransi yang menghargai perbedaan keberagaman sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi semua manusia dan alam sekitarnya.

Paper ini ingin mengangkat Sukoreno dan desa Pancasila untuk menjadi pilot project terkait dengan kajian toleransi keberagaman dalam konteks ke Indonesian. Sukoreno menjadi disain masyarakat yang inklusif dan memberikan pandangan yang bersih terkait bagaimana menjadi masyarakat yang pluralis dan masyarakat yang terbuka, masyarakat yang toleran terhadap aliran dan perbedaan beragama, dalam kontek ini hal ini penting di ajukan sebagai gren disain masyarakat *civil society*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemecahan masalah di kancah pendidikan, perlu mengetahui makna yang diambil dari pendidikan sendiri. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai “educare”, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa dan dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai “Erzichug” yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak yang diberi pendidikan. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti “Panggulawentah” yakni pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran dan watak, dan juga mengubah kepribadian sang anak. Sedangkan, menurut Herbart pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada yang diinginkan sipendidik yang diidtilahkan dengan Educare (Rohimin dkk, 2004 : 2). Jadi, pendidikan merupakan proses penyaluran ilmu dari seorang pendidik kepada anak didik melalui suatu program pendidikan. Dalam proses perubahan anak yang belum terdidik dengan anak yang sudah terdidik sangat terlihat perbedaan

meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kerajaan yang kuno dan antik untuk mempelajari buku-buku yang ada di sana. Heris Hermawan, Yaya Sunarya, *Filsafat Islam*, (Bandung, CV.Insan Mandiri, 2011), Cet. Ke-1, hlm 45.

dari segi pola pikir, tindak tubuh dan gaya berbicara. Tidak menutup kemungkinan jika tindakannya bisa saja sama, tetapi pola pemikiran yang sangat berbeda.

Pandangan-pandangan pluralisme yang berakar pada teolog Kristiani di atas telah menjadi isu global, sehingga pemikiran Islam pun belakangan ini mulai menyadari pentingnya mengembangkan pemikiran pluralisme, termasuk di Indonesia. Apalagi jika kita membandingkan teologi Kristiani dan teologi Islam, maka pluralisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru bagi Islam. Hal ini karena, secara teologis dan historis agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini tidak dapat dipisahkan posisi dan eksistensinya dari agama-agama lain. Hanya saja, bentuk corak dan hubungan tersebut berlangsung menurut konteks hubungan Islam dan agama-agama lain itu dalam lintasan sejarah yang spesifik. Kadang-kadang berlangsung secara polemis, tetapi lebih banyak terjadi dalam sebuah dialog. Pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu secara epistemologis merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Jika sebuah agama mengaku bisa merumuskan segala hal tentang Tuhan, maka ia sudah menjadikan dirinya Tuhan, dan bukan lagi sebagai jalan keselamatan menuju Tuhan. (Sumbulah dan Nurjanah, 2013: 4-5).

Pertama, pengenalan desa Sukoreno yang dijuluki sebagai desa Pancasila. Keberagaman yang dimiliki di desa Sukoreno sebenarnya yang menjadi landasan nama yang patut diberikan kepada desa ini dengan sebutan desa Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang didalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis (Irhandayaningsih: 3). Dari penjelasan arti dari Pancasila dalam tersinyalir bahwa desa Sukoreno mampu menjadikan rakyat yang tinggal disana damai, walaupun beragam agama dan suku budaya berbaur rata didalam lingkup desa Sukoreno. Selain sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya Pancasila juga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan.

Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Ditinjau dari asal-usulnya, kata "*Pancasila*" berasal dari bahasa sansekerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima dan sila dengan huruf yang dibaca pendek mempunyai arti satu sendi, dasar, alat atau asas. Sedangkan sila dengan pengucapan "i" panjang (syi:la) berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan berlaku sendi lima atau lima tingkah laku utama atau pelaksanaan lima kesusilaan (Panca Syila Krama). Pancasila memang sangat tepat sebagai dasar negara bagi NKRI karena didalam Pancasila memiliki makna Pancasila digali dari alat dan budaya bangsa Indonesia, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistic bangsa. Pancasila menjamin kebebasan warganegara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya, yang diterapkan di desa Sukoreno sangat sesuai dengan makna Pancasila yang satu ini karena di desa Sukoreno ada berbagai agama yang dianut warga meliputi Islam, Hindu, Budha dan juga Kristen Katolik. Semua warga hidup berdampingan dan belum pernah ditemukan perdebatan sedikitpun tentang perbedaan agama yang diyakini masing-masing warga desa. Hal yang menarik lagi adalah adanya kepercayaan Sapta Dharma yang berarti tujuh kewajiban. Dari

beberapa sumber, wahyu Sapta Dharma diterima oleh Bapak Hardjosapoero di Pare, Kediri Jawa Timur pada jam 01.00 WIB, tanggal 27 Desember 1952 tepatnya malam jum'at wage. Hardjosapoero, nama aslinya Arjo Sopuro lahir pada tahun 1910 di desa Semanding, sebelah Utara kecamatan Pare Kediri.

Para pemeluk aliran Sapta Dharma juga memiliki Tuhan. Tuhan menurut pemeluk agama ini adalah sebuah zat yang mutlak dalam arti yang mendasar Allah Hyang Maha Kuasa adalah zat yang bebas dari segala hubungan sebab akibat. Ritual yang dilakukan mereka saat sembahyang dengan duduk bersila dengan posisi sedekap mengarah ke timur dan berada dalam ruangan kosong sendiri. Setelah melakukan posisi tersebut, penganut aliran ini akan secara pelan-pelan menjatuhkan kepalannya dari posisi duduk bersila tadi menuju sujud, dan biasanya proses ini membutuhkan waktu berjam-jam. Penganut aliran ini juga memiliki tempat ibadah sama halnya dengan pemeluk agama lainnya. Tempat peribadatnya dimakan Sanggar, ada dua macam sanggar pertama Sanggar Candi Sapto Renggo dan Sanggar Candi Busono. Candi yang pertama hanya ada satu di Yogyakarta (merdeka.com, mistis: kol 2-8). Namun, di desa Sukoreno penganut aliran Sapta Dharma ini masih proses pembangunan tempat peribadatan yang resmi, ujar Bapak Nurul Huda yang merupakan salah satu warga di desa Sukoreno.

Makna yang ada dalam Pancasila meliputi memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya Pancasila juga memberikan jaminan terselenggarakannya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa, dan juga Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur (Pradina: 6-7).

Keberagaman budaya, adat istiadat, suku, rasa dan agama serta kedamaian kehidupan menjadikan desa Sukoreno dijuluki sebagai desa Pancasila. Hal yang patut diapresiasi dari desa Sukoreno ini adalah masyarakatnya yang tidak menjadikan perbedaan agama menjadi suatu masalah besar. Tetapi, perbedaan agama dijadikan sebagai ajang saling menghargai dan saling mencintai terhadap sesama makhluk Tuhan.

Kedua, pengembangan kehidupan masyarakat dalam membangun pluralisme pendidikan di desa Sukoreno sangatlah baik. Pencapaian pendidikan disana tidak mengekang siswa/siswi untuk membetasi mereka mengetahui ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi di sebuah SDK yang dulunya merupakan penjara yang dibangun oleh penjajah Belanda. Sekarang, alih fungsi menjadi SDK. Menariknya dari sini adalah siswa/siswi yang mengenyam pendidikan di SDK ini merupakan orang yang beragama Islam. Dari fenomena seperti ini, dapat dilihat tidak ada perbedaan untuk mencari ilmu walaupun dari sudut keyakinan yang berbeda. Siswa/siswi muslim yang bersekolah di SDK di Sukoreno ini tidaklah dikucilkan karena perbedaan keyakinan yang dianut. Tetapi, tetap sama layaknya siswa/siswi lainnya yang bersekolah di SDK ini.

Membangun suatu masyarakat demokrasi yang multikultural tentunya meminta sistem pendidikan nasional yang dapat membangun masyarakat demikian. Artinya sistem pendidikan nasional harus mengacu dan menerapkan proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia yakni di desa Sukoreno ini. Istilah prural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut. Namun, mempunyai implikasi-implikasi politik,

sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak juga negara yang menyatakan dirinya demokrasi sebagai negara yang demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas.

James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa seorang siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang-pandangannya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan (Hanum: 2-4).

Pentingnya pendidikan berbasis pluralisme, dalam rangka meningkatkan nilai-nilai toleransi ditengah keanekaragaman perbedaan untuk menjadikan pendidikan sebagai garda depan terciptanya rasa toleransi. Nilai-nilai dalam pendidikan pluralitas tidak bisa kita pungkiri akan menjadi salah satu alternatif terhadap carut marutnya sistem pendidikan di Indonesia. Perbedaan dan keragaman kehidupan bermasyarakat bukan lantas menjadi permusuhan dan konflik yang tajam, akan tetapi perbedaan itu akan terasa lebih indah dengan konsepsi saling menjaga dan menghormati, sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga penyeragaman identitas perlu menjadi kajian yang berkelanjutan guna menemukan titik temu diantara perbedaan-perbedaan yang seringkali mencuat permukaan. Sementara itu, jika pengertian dilihat menurut UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak (Faisol, 2015).

Garis-garis yang dapat dijadikan pedoman membuat kurikulum pendidikan pluralisme bisa meliputi *Pertama*, penyusunan kurikulum harus didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma-norma atau nilai-nilai absolut yang diambil dari agama-agama besar dunia dan hubungan integral antara Tuhan, manusia, dan alam. Karena ilmu pengetahuan datang dari Tuhan, maka manusia tidak dapat disebut sebagai pembuat ilmu pengetahuan (*the creators of knowledge*). Akan tetapi disebabkan manusia dapat dengan mudah menemukan aspek-aspek yang terkandung dalam dunia ini, maka nilai-nilai kemanusiaan dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk menyeleksi, menginvestigasi, menerima, dan menikmati adanya sebuah kebenaran. *Kedua*, peserta didik diharuskan mengetahui hirarkhi antara ilmu pengetahuan dan sumber nilai. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui sebuah pengalaman yang harus tunduk terhadap pengetahuan rasional, dan pengetahuan rasional harus tunduk terhadap norma-norma agama yang datang dari Tuhan. *Ketiga*, keimanan dan nilai-nilai harus

diakui sebagai dasar kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, keduanya tidak boleh dipisahkan dalam proses belajar mengajar. *Keempat*, Ilmu pengetahuan tidak harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pandangan agama. Dengan demikian, dalam pendidikan harus digunakan untuk mendorong value atau nilai-nilai yang baik. *Kelima*, Manusia tidak dapat mengetahui kebenaran absolut, tetapi suatu kebenaran dapat direalisasikan pada level yang berbeda-beda melalui perasaan, pemikiran, institusi, dan intelektual. Keempat bentuk ini harus bekerja secara harmoni dan terintegrasi ke dalam sebuah sistem pendidikan yang komprehensif. *Keenam*, Peserta didik harus didorong untuk mengetahui prinsip-prinsip unity and diversity dan menyadari adanya dasar-dasar keamanan yang menembus dunia biologis dan psikis. Ini sebuah refleksi terhadap sebuah kesatuan prinsip-prinsip penciptaan dunia (Abdurrahman, 2010).

Ketiga, Perwujudan rasa kemanusiaan dalam membangun pluralisme pendidikan di ujung timur jawa. Wujud dari adanya pengembangan pendidikan pluralisme di desa Sukoreno adalah dibuktikan dengan antusiasme warga yang hidup dengan kerukunan. Warga di desa Sukoreno memang dominan bermata pencaharian sebagai petani. Rumah yang mereka tempati rata-rata merupakan rumah yang kecil dan penuh dengan rasa kesederhanan. Ternyata, ini memang diperintahkan dalam Islam yakni zuhud, sedangkan dalam ajaran kristiani disebut dengan asketik.

Perwujudan rasa kemanusiaan yang ada di desa Sukoreno yang dapat juga dilihat saat perayaan Hari Raya masing-masing agama. Warga desa ini, seluruhnya ikut merayakannya. Dicontohkan saat Hari Natal tiba, gedung gereja dipenuhi oleh jemaat beragama kristiani dan di pelataran gedung dipenuhi warga agama lain yang ikut membantu dan menjaga warga yang beragama kristen di dalam gereja. Organisasi-organisasi Islam pun turut membantu menjaga gereja dari perilaku kejahatan. Begitu juga saat Hari Raya Idul Fitri tiba, warga negara non islam pun ikut menjaga dan membantu warga muslim untuk merayakan hari rayanya itu.

Toleransi-toleransi antar umat beragama dan antar suku yang rukun menjadikan desa Sukoreno menjadi desa Pancasila. Dalam sebuah keluarga, disana juga banyak yang antara anggota keluarga berkeyakinan berbeda dan hal-hal seperti ini sudah biasa terjadi di desa Sukoreno. Warga disini beranggapan bawasanya memilih menyakini Tuhan itu merupakan hak setiap individu, jadi terserah individu itu sendiri untuk memilih apa yang harus dia yakini.

KESIMPULAN

Adanya pluralisme agama ini sangat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat majemuk, mengingat Indonesia salah satunya memiliki beragam agama (*Pluralism Religio*) khususnya di Sukoreno yang di juluki desa Pancasila. Mendapat julukan desa pancasila karena didalamnya terdapat beragam agama seperti islam, hindu, budha dan kristen katolik dan semua itu dibangun dengan rasa toleransi dan harmonisasi yang tinggi, sehingga implementasi pluralisme yang sesungguhnya bisa di terapkan dengan baik tanpa memandang perbedaan agama. Dari sini penerapan ideologi pancasila sebagai dasar negara indonesia benar-benar terwujud. Tidak dapat dipungkiri pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta

mencerminkan kepribadian bangsa. Ditinjau dari asal-usulnya, kata “*Pancasila*” berasal dari bahasa sansekerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima dan sila dengan huruf yang dibaca pendek mempunyai arti satu sendi, dasar, alat atau asas. Sedangkan sila dengan pengucapan ”i” panjang (syi:la) berarti peraturan tingkah laku yang baik.

Di sisi lain pendidikan yang ada di desa Sukoreno tidak memandang perbedaan agama yang dimiliki. Satu lembaga memiliki guru dan siswa/siswi yang didalam ada perbedaan keyakinan dan tidak menjadikan masalah dan adanya konflik yang terjadi. Mengingat pendidikan tidak memandang siapa pun dan latar belakang bahkan keyakinan atau agama yang berbeda. Kemudian adanya pendidikan pluralisme yang diterapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai toleransi ditengah keanekaragaman perbedaan untuk menjadikan pendidikan sebagai garda depan terciptanya rasa toleransi. Nilai-nilai dalam pendidikan pluralitas akan menjadi salah satu alternatif terhadap carut marutnya sistem pendidikan di Indonesia.

Toleransi yang sangat tinggi di masyarakat Sukoreno desa pancasila menumbuhkan rasa kedamaian, keharmonisan, saling menghormati antar sesama sebagai wujud asli ideologi pancasila yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri A, 2011, “Pendidikan Pancasila [makalah]”, Yogyakarta [ID]: Universitas Gadjah Mada.
- Harta, 2016, “Implementasi Pendidikan Plural Dalam Kurikulum Pendidikan Islam Pada Madrasah Aliyah”, dalam Jurnal Al-Qur’an, Volume 22, nomor 1: 1-10.
- Heris Hermawan, Yaya Sunarya, *Filsafat Islam*, (Bandung, CV.Insan Mandiri, 2011)
- Kisman, 2017, ”Pluralisme Agama dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Perspektif Al-Qur’an)”, dalam Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 5, nomor 1:1-18.
- Muhandis A, 2012, “Konsep Multikulturalisme dan Kulturalisme dalam Pendidikan Agama”, dalam Forum Tarbiyah, Volume 10, Nomor 1: 1-17.
- Nazmudin. 2017, *Kerukunan dan Toleransi antar Umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. STISIP Banten Raya, Indonesia. Lihat lebih lanjut . *Journal of Government and Civil Society*
- Puspo Nugroho. 2016. *Membangun Tradisi Pluralisme dalam perspektif Pendidikan Islam*. (STAIN Salatiga. Jawa tengah, Indonesia)
- <http://faisolakhmad.blogspot.com/2015/08/pluralisme-pendidikan-upaya.html?m=1>, diakses pada 31 Januari 2019, pukul 14.44 WIB.
- <http://mukhsinblog.blogspot.cpm/2010/06/pendidika-pluralisme-multikultural.html?m=1>, diakses pada 31 Januari 2019, pukul 15.17 WIB.
- <https://m.merdeka.com/peristiwa/menelisik-aliran-kepercayaan-sapta-dharma.html>, diakses pada 31 Januari 2019, pukul 10.07 WIB.

STRATEGI PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGANAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI PASCA BENCANA ALAM

Hasanuddin¹, Alamsyah², Abdul Malik³
Universitas Muhammadiyah Makassar
hasanuddin@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Bencana alam ini menjadi perhatian semua pihak terkhusus pada perguruan tinggi maka berdampak pada setiap kali bencana terjadi, akses pendidikan terhenti serta pilar-pilar ekonomi di daerah akan lumpuh, bencana di beberapa daerah pastinya memberikan dampak dan berakibat berupa kerusakan dan kerugian dalam pendidikan maupun dalam ekonomi, kerusakan dan kerugian tersebut dialami oleh masyarakat terdampak secara langsung, secara pendidikan dan ekonomi ekonomis adanya bencana alam tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak sekolah maupun pada ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Strategi, Perguruan Tinggi, Pendidikan, Ekonomi, Bencana Alam

PENDAHULUAN

Posisi Indonesia berada pada situasi yang rawan bencana sehingga masuk dalam salah satu negara dengan intensitas bencana alam yang tinggi. Hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan baik dari pemerintah, swasta, dan instansi pendidikan untuk memberikan penanganan imitasi maupun pasca bencana alam seperti, gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, puting beliung, dan kekeringan merupakan sederetan bencana yang dapat menurunkan pendidikan kesejahteraan ekonomi daerah dan nasional secara mendadak. Daerah yang terkena bencana suasana pendidikan akan terganggu dan kondisi ekonomi yang tidak berjalan dengan baik.

Jika bencana alam ini menjadi perhatian semua pihak terkhusus pada perguruan tinggi maka berdampak pada setiap kali bencana terjadi, akses pendidikan terhenti serta pilar-pilar ekonomi di daerah akan lumpuh. Dengan demikian, akan mulai muncul penyakit masyarakat yakni pengangguran tinggi maupun investasi terhenti dan pendapatan daerah berkurang, disebabkan adanya pengungsi yang rawan terhadap bencana sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, kriminalitas.

Menjadi penting bagi perguruan tinggi mengembangkan sistem pemulihan pendidikan dan ekonomi daerah pascabencana alam sebagai institusi yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat, sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat dapat diterapkan di lokasi bencana sebagai institusi pendidik.

Selain peran pemerintah dalam penyediaan dana stimulus demi menghidupkan kembali pendidikan dan ekonomi daerah pascabencana menjadi penting maka dari perguruan tinggi juga harus andil bagian dalam penanganan bencana alam ini selain sumbangsi pemikiran juga sumbangsi relawan yang dapat membantu yang terkena bencana terkhusus pada bidang pendidikan dan pemulihan ekonomi untuk memberikan semangat pada warga yang terkena bencana untuk kembali ke daerah bencana dan membangun kembali ruang-ruang ekonomi yang lumpuh.

Dengan demikian, semua pihak bertanggung jawab masing-masing pada bidangnya terutama pada perguruan tinggi dibutuhkan strategi yang baik dalam penanganan pasca bencana alam karena telah dimuat aturan kebencanaan dalam Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11 yang menyatakan sebagai berikut. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Adapun ayat 12 menyatakan: rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

STRATEGI PERGURUAN TINGGIN DALAM PENANGANAN GEMPA

1. Peraturan tentang Bencana Alam

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Kategori bencana menurut Undang-undang No.24 Tahun 2007, bencana dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor-faktor alam diantaranya adalah gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, angin topan, tanah longsor dan kekeringan.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor-faktor non alam diantaranya adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor manusia yang meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas kelompok serta teror. Terjadinya

Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung, Abrasi dan kekeringan termasuk ke dalam bencana alam karena disebabkan oleh faktor alam.

Terjadinya beberapa bencana di beberapa daerah pastinya memberikan dampak dan berakibat berupa kerusakan dan kerugian dalam pendidikan maupun dalam ekonomi, kerusakan dan kerugian tersebut dialami oleh masyarakat terdampak secara langsung, secara pendidikan dan ekonomi ekonomis adanya bencana alam tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak sekolah maupun pada ekonomi keluarga.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. pada pasal 8, dinyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini membutuhkan rencana penanggulangan rencana yang disusun pada situasi tidak terjadi bencana. diamanatkan kembali pada pasal 4 bahwa setiap provinsi wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, peraturan Kepala badan penanggulangan bencana Nomor 04 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan bencana penanggulangan bencana juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiap siagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan.

2. Penanganan Perguruan Tinggi pada Bidang Pendidikan Pasca Bencana

Perguruan tinggi (PT) memiliki peranan dalam penanggulangan bencana alam yang dapat memberikan bantuan dalam bidang pendidikan hal ini untuk dapat mengurangi beban para korban bencana alam khususnya pada bidang pendidikan. Perguruan tinggi memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu para korban bencana dari bidang pendidikan. Selain itu posisi perguruan tinggi yang netral, dan secara fisik terletak menyebar di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi memiliki berbagai ilmu baik dari ilmu sosial hingga teknik sekali pun.

Peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana alam diperlukan kontribusi sumber daya yang siap untuk memberikan pemikiran inovatif pada masyarakat yang terkena bencana alam. Dalam lingkungan perguruan tinggi diperlukan pemahaman penanggulangan bencana dari pra bencana, saat bencana dan paska bencana sehingga membutuhkan berbagai pendekatan ilmu yang multi disiplin. Disinilah dituntut perguruan tinggi tidak hanya dalam penanggulangan bencana secara langsung di lokasi, perguruan tinggi dapat melakukan kajian sesuai bidangnya menyangkut pra bencana seperti pengurangan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penataan tata ruang, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga pelatihan itu sudah sangat mendukung sekali.

Peningkatan kapasitas pendidikan bagi pihak perguruan tinggi bagi korban bencana dapat dilakukan dengan berbagai beberapa hal, seperti melakukan penelitian untuk penanganan pasca bencana, melakukan pengabdian berbasis pendidikan dan pembentukan relawan kebencanaan. juga dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan seperti KKN, P2K atau KKP. Mahasiswa memiliki kekuatan yang cukup besar untuk diberdayakan khususnya melalui KKN, P2K atau KKP.

Dalam penanganan pendidikan bagi korban bencana memiliki tujuan khusus yang harus diperhatikan untuk memberikan semangat bagi korban bencana sehingga dapat

memiliki motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Sikap empati terhadap korban bencana juga harus dibangun agar mahasiswa dapat membantu orang lain. Harus disadari bahwa kemampuan dari setiap perguruan tinggi berbeda-beda dalam penanggulangan bencana, berbeda-beda dan tidak merata. Maka dibutuhkan penguatan perguruan tinggi dalam hal bencana.

Strategi kampus yang di perlukan dalam hal penanganan pendidikan bagi korban bencana alam:

- a. Menurunkan mahasiswa guna memberikan semangat yang mendalam bagi korban bencana
- b. Mengembalikan kebiasaan belajar mengajar disekolah pada korban bencana alam
- c. Memberikan fun games kepada golongan rentan terutama yang bersekolah agar tidak mengingat kembali kejadian tersebut.
- d. Membantu membangun jalur evakuasi dan di tularkan kepada siswa sekolah.
- e. Adanya tim relawan kebencanaan yang dapat memberikan bantuan pada pembinaan bagi korban bencana alam terutama bagi yang masih bersekolah.

3. Penaganan Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi Pasca Bencana

Perguruan tinggi, berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Melalui keikutsertaan dalam penanggulangan bencana, dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi melakukan tanggungjawabnya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Salah satu permasalahan pascabencana yang paling ditakutkan adalah dampak ekonominya. Akibat bencana akan berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya aktivitas ekonomi saling membutuhkan satu sama lain. Sektor konsumsi yang melemah, akan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian lainnya.

Semua bentuk bencana alam berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Karena itu, kemampuan untukantisipasi muncul bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana.

Perguruan tinggi sebagai salah satu lumbung ilmu dan pencetak generasi muda mempunyai tanggung jawab dalam bentuk mengajar, mendidik, melatih dan memotivasi mahasiswa agar menjadi generasi muda yang memiliki semangat serta daya juang yang tinggi, cerdas, kreatif, inovatif dan kepribadian yang baik. Dengan begitu output dari perguruan tinggi adalah anak bangsa yang mandiri dan mampu menciptakan berbagai peluang kerja atau usaha.

Untuk itu mutlak bagi setiap perguruan tinggi untuk memberikan arah kebijakan yang seimbang antara perguruan tinggi sebagai pusat pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai tempat untuk melahirkan generasi yang inovatif yang tangguh sehingga akan membantu mengentaskan keterpurukan perekonomian di negeri ini khususnya pada pasca bencana alam yang membutuhkan dorongan untuk meningkatkan perekonomiannya kembali.

Masyarakat, yang tidak memiliki cadangan finansial untuk menambal sejumlah aset yang rusak maupun hilang, perlu mendapatkan bantuan kredit usaha lunak atau

dana hibah untuk pengembangan kewirausahaan. Hilangnya berbagai dokumen penting akan mempengaruhi warga masyarakat dalam berusaha.

Bencana memang meninggalkan banyak permasalahan, namun bangsa yang pintar akan selalu belajar dan mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi. Bencana di Indonesia dapat menjadi pelajaran berarti bagi pemerintah, *stake holder* dan juga masyarakat agar di kemudian hari terbangun sebuah ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Peran strategis perguruan tinggi dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi pasca bencana antara lain:

1. Membangun mindset korban bencana karena mereka selalu berharap pada bantuan yang akan datang.
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan ekonomi sesuai dengan potensi daerah tersebut pada masyarakat yang terkena bencana untuk memulihkan perekonomiannya.
3. Membukakan akses jaringan kerjasama khususnya dengan dunia usaha yang bisa digunakan sebagai perluasan informasi.
4. Perguruan Tinggi dapat melakukan pengembangan terhadap dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kecakapannya dalam bidang ekonomi yang dapat diterapkan pada masyarakat yang terkena bencana alam agar dapat memotivasi dan mendampingi.
5. Dosen dan mahasiswa harus dapat beradaptasi mengenai permasalahan ekonomi di daerah, apalagi pasca bencana alam keadaan daerah tersebut mengalami perubahan.

KESIMPULAN

Bencana alam sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan adanya berbagai bidang yang terhenti seperti pendidikan dan perekonomian, bencana di akibatkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai antara lain bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana letusan gunung api, bencana Gempa Bumi, Bencana Tsunami, Bencana Kebakaran, Bencana Kekeringan, Kekeringan, Bencana Angin Siklon Tropis, Bencana Wabah Penyakit dan Bencana Kegagalan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas PB. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta: Lakhar Bakornas PB.
- Chamber, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

- Inoguchi, T., Newman, E., Paoletto, G., 2015. *Kota Dan Lingkungan Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Jakarta. LP3ES Indonesia
- Satria. 2019. <https://ugm.ac.id/id/berita/8406pt.berperan.penting.dalam.pengurangan.risiko.bencana>
- Qaiyim Asy'ari, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencanadi Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007)", *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, Vol. 01 No. 02 (Oktober 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Firmanzah. "Rehabilitasi Ekonomi Pascabencana". <https://economy.okezone.com/read/2014/01/27/279/932057/rehabilitasi-ekonomi-pascabencana> diakses pada 29 Januari 2019.
- Maryati. "Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi". <http://stimykpn.ac.id/2015/05/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada 27 Januari 2019.

TIPOLOGI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH ISLAM TERPADU (SIT)

Typhology of Integrated Islamic Schools at Tegal Regency

Aji Sofanudin

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

email: ajisofan@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kabupaten Tegal beragam. Setidaknya terdapat tiga varian SIT, yakni (1) SIT di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sebagaimana dipraktekkan oleh SMP IT Luqman Al-Hakim, (2) SIT yang berhaluan aswaja sebagaimana dilaksanakan oleh SMP IT Al-Azhar, dan (3) SIT yang bersifat nasionalis Islam, sebagaimana terdapat pada SMP IT Bimantara Al-Furqon. Ketiga varian SIT tersebut memiliki perbedaan dalam implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. SIT JSIT menerapkan kurikulum kombinasi dinas pendidikan dan kurikulum JSIT, SIT Aswaja menerapkan kurikulum dinas pendidikan dan pesantren, serta SIT Nasionalis menerapkan kombinasi kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum yayasan.

Kata kunci: SMP IT, JSIT, Aswaja, Nasionalis

PENDAHULUAN

Sepuluh lima belas tahun terakhir ini berkembang pesat sekolah-sekolah yang menggunakan *branding* Sekolah Islam Terpadu (SIT). Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia memiliki anggota 2.317 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK⁹⁴. Ada juga yang menyebut jumlah Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang bergabung dalam JSIT Indonesia sebanyak 2.418 unit sekolah⁹⁵. Padahal, konsep penyelenggaraan SIT sebenarnya hanya berawal dari keberadaan lima satuan sekolah dasar yang berdiri pada 1993 di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Kelima sekolah itu adalah SDIT Nurul Fikri Depok, SDIT al-Hikmah Jakarta Selatan, SDIT Iqro Bekasi, SDIT Ummul Quro Bogor, dan SDIT al-Khayrot Jakarta Timur.

SIT pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional SIT

⁹⁴JSIT, "JSIT Indonesia Berkomitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan," web jsit, 2019, <https://jsit-indonesia.com/berita/sukseskan-munas-4-jsit-indonesia/>. Accessed, 14/1/2019

⁹⁵Ahmad Islamy Jamil, "Pesat, Perkembangan Sekolah Islam Terpadu," *Republika*, 2017, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/15/ot3za2313-pesat-perkembangan-sekolah-islam-terpadu>. Accessed, 14/1/2019

merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah “Terpadu” dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat (*taukid*) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, *Integral*, bukan *parsial*, *syumuliah* bukan *juz’iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak *da’wah* di bidang pendidikan ini sebagai “perlawanan” terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz’iyah*⁹⁶.

Meskipun pada awalnya tumbuh di daerah perkotaan, sekarang sudah merambah ke wilayah pinggiran. Salah satunya adalah tumbuh subur di Kabupaten Tegal. Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tahun 2018 terdapat sedikitnya 207 lembaga setingkat SMP. Dari sejumlah satuan pendidikan tersebut, penggunaan *branding* SMP IT paling banyak digunakan pada SMP di Kabupaten Tegal, yakni sebanyak delapan lembaga.

Sekolah yang menggunakan *branding* Islam Terpadu di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: (1) SMP IT Luqman Al-Hakim, (2) SMP IT Al-Azhar, (3) SMP IT Bimantara Al-Furqon, (4) SMP IT Mahkota Al-Munawaroh, (5) SMP IT Al-Mubarak, (6) SMP IT Tunas Cendekia, (7) SMP IT El-Muna Berbasis Pesantren, dan (8) SMP IT Daar Al-Faradis (Data Dinas Pendidikan 2018, diolah).

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan hasil penelitian terhadap tiga SMP IT yakni (1) SMP IT Luqman Al-Hakim, (2) SMP IT Bimantara Al-Furqon, dan (3) SMP IT Al-Azhar. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang tidak sama.

Fokus penelitian ini menguraikan bagaimana pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada ketiga SMP IT tersebut. Bagaimana pendidikan agama Islam diimplementasikan ke dalam pembentukan budaya sekolah. Bagaimana varian kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di masing-masing sekolah.

LANDASAN TEORETIS

Sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada “sekularisasi” dimana pelajaran dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun “sakralisasi” dimana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan⁹⁷.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Alquran dan As Sunnah serta dilandasi oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep operasional SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah “terpadu” dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat (*taukid*) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh, menyeluruh, integral, bukan parsial, *syumuliah*

⁹⁶JSIT, “Pengertian Sekolah Islam Terpadu,” 2019, <https://jsit-indonesia.com/sample-page/pengertian-sekolah-islam-terpadu/>. Accesed, 15/1/2019

⁹⁷JSIT.

bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan ini sebagai “perlawanan” terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, dan *juz'iyah* (JSIT Indonesia, 2017: 6).

Dalam aplikasinya, SIT diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada “sakralisasi” di mana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Pelajaran umum seperti matematika, IPA, IPS, bahasa, jasmani/kesehatan, keterampilan dibingkai dengan pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara di pelajaran agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Di dalam SIT juga ditekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif. Implikasi dari keterpaduan ini menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif, dan menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Dengan pengertian ini, seharusnya pembelajaran di SIT dilaksanakan dengan pendekatan berbasis (a) problem solving yang melatih peserta didik berpikir kritis, sistematis, logis dan solutif; (b) berbasis kreativitas yang melatih peserta didik untuk berpikir orisinal, luwes (fleksibel), lancer dan imajinatif. Keterampilan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan penuh masalah bagi diri dan lingkungannya.

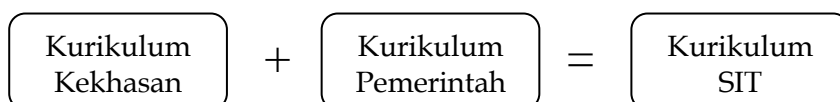
SIT juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Artinya SIT berupaya mendidik peserta didik menjadi anak yang berkembang kemampuan akal dan intelektualnya, meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt, terbina akhlak mulia, dan juga memiliki kesehatan, kebugaran dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

SIT memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu: sekolah, rumah, dan masyarakat. SIT berupaya untuk mengoptimalkan dan sinkronisasi peran guru, orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran sehingga terjadi sinergi yang konstruktif dalam membangun kompetensi dan karakter peserta didik. Orang tua dilibatkan secara aktif untuk memperkaya dan memberi perhatian yang memadai dalam proses pendidikan putera-puteri mereka. Sementara itu, kegiatan kunjungan ataupun interaksi ke luar sekolah merupakan upaya untuk mendekatkan peserta didik terhadap dunia nyata yang ada di tengah masyarakat.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) memiliki kekhasan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga memberikan Standar Kompetensi Lulusan SIT sebagai berikut: (1) memiliki aqidah yang lurus, (2) melakukan ibadah yang benar, (3) berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia, (4) menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu mengendalikan diri, (5) memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Alquran dengan baik, (6) memiliki wawasan yang luas, dan (7) memiliki keterampilan hidup (*life skill*) (Muhab, dkk., 2017: 17-25)

Muatan kurikulum SIT terdiri atas tiga rumpun: spiritual, kepribadian dan kemandirian, serta wawasan dan keilmuan. Rumpun spiritual meliputi: (1) PAI dan Pendalaman Agama, (2) Ibadah dan Adab Islami, dan (3) Al-Qur'an dan Hadits. Rumpun kepribadian dan kemandirian meliputi: (1) kenegaraan dan budi pekerti, (2) keterampilan, (3) seni budaya islami, (4) pendidikan jasmani dan kesehatan. Rumpun wawasan dan keilmuan meliputi: (1) ilmu sains, (2) ilmu social, dan (3) sejarah dan dunia Islam.

Model kurikulum SIT meliputi: kurikulum kekhasan dan konten kurikulum pemerintah.



Muatan kurikulum SIT meliputi tiga rumpun: muatan IT dan keterpaduan, muatan kurikulum nasional, dan muatan local global. Rumpun IT dan keterpaduan meliputi: aqidah, akhlak, ibadah, siroh dan islamisasi pengetahuan. Muatan kurikulum nasional adalah K-13. Muatan local global meliputi: teknologi, kebahasaan dan seni budaya.

Prinsip pembelajaran SIT yaitu Sajikan, Internalisasi, dan Terapkan. Sajikan yaitu tahap memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan pengetahuan dan keterampilan melalui dimensi akal, rasio/logika dan kinestetik dalam setiap bidang studi.

Internalisasi yakni tahap menumbuhkan rasa cinta dan butuh terhadap nilai-nilai kebaikan, melalui dimensi emosional, hati atau jiwa. Terapkan yakni tahap mempraktekkan nilai-nilai kebaikan, melalui dimensi perilaku kegiatan ibadah dan amal-amalan nyata serta berupaya untuk menebar kebaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tiga sekolah yakni: SMP IT Luqman Al-Hakim yang beralamat di Jl Gajah Mada No 77 Kalisapu; SMP IT Al-Azhar beralamat di Jl Pesantren No 1 Babakan Lebaksiu; dan SMP IT Bimantara Al-Furqon yang beralamat di Jl Gatot Subroto No 17 Slawi. SMP IT Luqman Al-Hakim mewakili sekolah di bawah JSIT, SMP IT Al-Azhar mewakili sekolah di bawah pesantren, dan SMP IT Bimantara Al-Furqon mewakili sekolah di bawah yayasan yang tidak berafiliasi ke dalam ormas keagamaan tertentu.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen yang valid, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2014: 38).

Adapun model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap lembaga pendidikan tertentu yang

dilakukan dengan jujur, cermat, mendalam terkait implementasi manajemen kurikulum pada ketiga sekolah tersebut.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, yayasan, dan orang tua wali. Sedangkan sumber sekunder yang dimaksud disini adalah dokumen-dokumen sekolah yang terdiri dari profil lembaga dan kurikulum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kurikulum SMP IT

Kurikulum SIT berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pada SIT muatan isi kurikulum pendidikan agama lebih banyak dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Secara mudah, kurikulum SIT agak mirip dengan madrasah dimana pengetahuan agama diberikan dalam porsi yang lebih banyak.

Selain itu, kurikulum SIT juga menekankan pada praktik beragama. Selain dimensi pengetahuan, dimensi praktik beragama lebih kental di SIT daripada sekolah negeri. Praktik ibadah seperti sholat (dhuhur dan ashar berjamaah), dhuha, tilawah, maupun tahfidz menjadi pembiasaan yang ada di sekolah.

Pada tiga sekolah yakni SMP IT Luqman Al-Hakim, SMP IT Bimantara Al-Furqon, dan SMP IT Al-Azhar terdapat pembiasaan praktik ibadah (sholat dhuhur). Selain itu, juga nampak pada pembiasaan tilawah, dhuha, dan puasa sunah senin dan kamis.

Meskipun sama-sama menggunakan label IT tetapi ketiga sekolah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Manajemen kurikulum pendidikan agama Islam pada masing-masing sekolah tidak sama.

Berikut ini adalah profil masing-masing satuan pendidikan yang menjadi sasaran penelitian.

SMP Luqman Al-Hakim

SMP IT Luqman Al-Hakim berlokasi di Jl Gajah Mada No 77 RT 04 RW VI Kalisapu Slawi. Sekolah ini berada satu kompleks dengan RA dan MI Luqman Al-Hakim (SD IT Luqman Al-Hakim). Sekolah ini berdiri tahun 2006.

Nama Luqman Al-Hakim terinspirasi pada salah satu ayat Al Qur'an QS Thoha: 128. Arti nama tersebut adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan pemikiran. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Ulin Nuha Slawi.

Yayasan Ulin Nuha memiliki beberapa bidang antara lain bidang pendidikan, bidang sosial dan dakwah, bidang ekonomi, bidang kewanitaan. Bidang pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Ulin Nuha meliputi TKIT Khadijah, Sekolah Islam Terpadu MI Luqman Al Hakim, dan SMP IT Luqman Al Hakim, dan SMA IT Luqman Al-Hakim. Sedangkan bidang pendidikan non formal adalah PAUD, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C.

Di bidang sosial dan dakwah Yayasan Ulin Nuha telah mendirikan rumah Yatim Bina Anak Soleh, disamping pula menitikberatkan kegiatan di masjid dan menyiapkan

kader dai yang siap diterjunkan ke masyarakat. Di bidang ekonomi dengan mendirikan BMT Amanah. Di Bidang kewanitaan sendiri meliputi Forum Tausiyah Ummat dan Annisa.

SMP IT Al-Azhar

Sedangkan SMP IT Al-Azhar beralamat di Jl Pesantren No 1 Babakan. Lokasi sekolah ini berada satu kompleks dengan lingkungan pondok pesantren Babakan Lebaksiu. SMP IT Al-Azhar merupakan sekolah yang baru berdiri tahun 2013. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Darul Rizqi Al-Khoiriyah.

Yayasan Al-Rizqi memiliki beberapa lembaga seperti: SMP IT Al-Azhar, SMK Entrepreneur, dan Madrasah Diniyah (MDTA dan MDTW). Yayasan Darul Rizqi Al-Khoiriyah berdiri melalui Akta No: 64, tanggal 26 Juli 2010 dengan para pendiri: (1) Hj Qomariyah, (2) Muhammad Zimamul Khaq, (3) Ali Fikri, (4) Resi Agustien, dan (5) Ifazah Alawiyah. Adapun susunan pengurus adalah Hj Qomariyah sebagai Pembina, dengan pengurus sebagai berikut: Ali Fikri (ketua), Resi Agustien (sekretaris), dan Ifazah Alawiyah (bendahara).

SMP IT Bimantara Al-Furqon

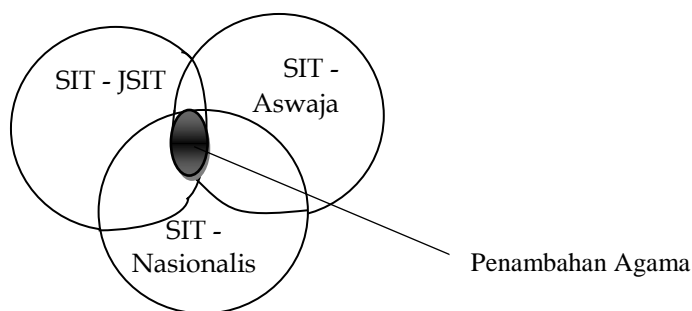
Sementara SMP IT Bimantara Al-Furqon berada di Jalan Gatot Subroto Slawi. Lokasi sekolah ini berada satu kompleks dengan RA Bimantara Al-Furqon, SD IT Bimantara Al-Furqon, dan Masjid Al-Furqon. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Al-Furqon yang diketuai pengusaha besar di Kabupaten Tegal, Abdullah Musa.

Abdullah Musa merupakan seorang pengusaha bergerak di berbagai bidang: pom bensin, alat pemecah batu, dan LPG. Namanya cukup terkenal di Kabupaten Tegal.

Varian Kurikulum Sekolah Islam Terpadu

Secara konseptual Sekolah Islam Terpadu (SIT) semestinya berbeda dengan Sekolah Negeri. SIT memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sekolah yang menggunakan branding "IT" memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah pada umumnya.

Berdasarkan temuan penelitian, setidaknya terdapat tiga karakteristik Sekolah Islam Terpadu, yakni (1) SIT di bawah JSIT, (2) SIT yang berhaluan aswaja, dan (3) SIT yang bersifat nasionalis Islam. Ketiga varian SIT tersebut memiliki perbedaan dalam implementasi kurikulum pendidikan agama Islam.



Gambar 1 Varian Sekolah Islam Terpadu

Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kabupaten Tegal beragam. Ada tiga varian SIT, yakni (1) SIT di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sebagaimana dipraktekkan oleh SMP IT Luqman Al-Hakim, (2) SIT yang berhaluan aswaja sebagaimana dilaksanakan oleh SMP IT Al-Azhar, dan (3) SIT yang bersifat nasionalis Islam, sebagaimana terdapat pada SMP IT Bimantara Al-Furqon.

Meskipun memiliki berbagai varian kurikulum sesungguhnya ada kesamaan pada masing-masing SIT yakni adanya penambahan agama. Pada setiap SIT ada penambahan jam pelajaran agama dengan berbagai program; baik program intrakurikuler, program kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Program intrakurikuler misalnya dengan penambahan mata pelajaran tertentu: tahfidz, fiqh, baca tulis Al-Qur'an. Selain itu juga ada pembiasaan yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Semuanya bermuara pada pembentukan budaya Islami pada sekolah.

Jika menggunakan analisis perbandingan ketiga sekolah tersebut, akan tampak sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan SIT

No	Nama SMP IT	Tahun Berdiri	Yayasan	Jumlah Guru	Siswa
1	SMP IT Luqman Al-Hakim	2006	Yayasan Ulin Nuha (JSIT)	23	344
2	SMP IT Al-Azhar	2013	Yayasan Darul Rizqi Al-Khoiriyah (Pesantren NU)	12	97
3	SMP IT Bimantara Al-Furqon	2017	Yayasan Al-Furqon (Nasionalis)	10	33

Sumber: Data Profil 2018, diolah

Masing-masing varian SIT memiliki perbedaan dalam manajemen kurikulum pendidikan agama Islam. SMP IT Luqman Al-Hakim menerapkan kurikulum kombinasi dinas pendidikan dan kurikulum JSIT. Di antara mata pelajaran PAI yang diterapkan adalah: (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Bahasa Arab, (3) Tahfidz, dan (4) Ke-IT-an. SMP IT Al-Azhar menerapkan kurikulum dinas pendidikan dan pesantren. Di antara mata pelajaran PAI yang diterapkan adalah: (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Fiqh, dan (3) BTA. SMP IT Bimantara Al-Furqon menerapkan kombinasi kurikulum Dinas pendidikan dan kurikulum yayasan. Di antara yang menjadi unggulan adalah program tahfidz.

Sistem pendidikan yang dikembangkan pada masing-masing SIT adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sistem Pendidikan

No	Nama SM IT	Sistem Belajar	Kurikulum	Ekstra kurikulum
1	SMP IT Luqman Al-Hakim	FDS atau Boarding	Dinas dan JSIT	Mentoring
2	SMP IT Al-Azhar	Biasa (<i>half day</i>) dan Pesantren	Dinas dan Pesantren	Hadroh
3	SMP IT Bimantara Al-Furqon	FDS atau Boarding (sampai pukul 20.30 WIB)	Dinas dan Yayasan	Memanah

Implementasi pendidikan agama Islam pada SMP IT Luqman Al-Hakim (SMP IT LH) sesuai dengan kebijakan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Pada SMP IT Luqmanul Hakim buku pegangan yang digunakan siswa sesuai dengan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, para siswa juga menggunakan “Modul Belajar” (PAI, Bhs Inggris, Biologi, IPA) yang disusun oleh para Guru SMP IT Luqman Al-Hakim.

Implementasi pendidikan agama pada SMP IT Al-Azhar sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan pesantren. Kurikulum pesantren yang ditekankan adalah Al-Qur’an yakni Baca Tulis Al-Qur’an (BTA). Selain itu juga ditekankan pada fiqh, terutama fasholatan. Peserta didik ditekankan untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan bisa menjalaankan sholat dengan benar.

Sementara pada SMP IT Bimantara Al-Furqon, ditekankan pada tahfidz dan penerapan ilmu agama. Terutama pada pelaksanaan ibadah sholat (dhuha dan dhuhur secara berjamaah).

Pembelajaran yang dilakukan di SMP IT LH menggunakan sistem *Full Day School*. Selain itu, juga terdapat pondok pesantren Ulin Nuha di mana sebagian siswa mengikuti *boarding* atau asrama/pesantren. Pihak sekolah memberikan kebebasan kepada pesertra didik (orang tua wali) untuk memilih apakah mengikuti *boarding* atau tidak. Pengelolaan pondok pesantren dikelola oleh Yayasan Ulin Nuha. Selain itu, Yayasan juga memiliki Rumah Yatim di mana sebagian siswa yang tidak mampu secara ekonomi bisa tinggal di rumah yatim.

Pembelajaran agama pada SMP IT Al-Azhar menggunakan system biasa. Waktu pulang adalah pukul 14.30 WIB. Sholat dhuhur dikerjakan di sekolah, sementara sholat ashar dilakukan di rumah atau pondok pesantren. Sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik apakah mengikuti pondok atau pun tidak.

Sementara pada SMP IT Bimantara Al-Furqon menerapkan system Fullday School dan *semiboarding school*. Sekolah memberikan alternatif kepada siswa untuk memilih apakah memilih full day (pulang sore) atau mengikuti program tahfidz sehingga pulang malam (pukul 20.30 WIB). Inilah kenapa disebut semi boarding, karena siswa tidak ada yang menginap.

Pada SMP IT Luqman Al-Hakim mengembangkan mutaba'ah harian yakni semacam buku cek list ibadah memuat: wudlu, sholat wajib, dan sholat sunnah. Pada SMP IT ini selain komite sekolah, juga dikembangkan komite kelas. Salah satu program yang dikerap dilaksanakan adalah buka puasa bersama pada hari senin dan kamis dengan melibatkan orang tua siswa. Terkait dengan tahfid, sekolah memiliki memiliki standar minimal kelulusan SMP yakni hafal juz 29 dan juz 30.

Pada umumnya, suasana kegamaan sangat kental pada masing-masing SIT. Pembiasaan yang dilakukan adalah pembelajaran diawali dengan tilawah atau BTA. Selain itu pembiasaan sholat dhuha dan dhuhur bersama dilakukan di masing-masing masjid atau musholla sekolah. Semua SIT mengembangkan pendidikan agama Islam berbasis masjid yang berfungsi semacam laboratorium agama.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Tipologi Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Kabupaten Tegal beragam. Ada tiga varian SIT, yakni (1) SIT di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sebagaimana dipraktekkan oleh SMP IT Luqman Al-Hakim, (2) SIT yang berhaluan aswaja sebagaimana dilaksanakan oleh SMP IT Al-Azhar, dan (3) SIT yang bersifat nasionalis Islam, sebagaimana terdapat pada SMP IT Bimantara Al-Furqon.

Masing-masing varian SIT memiliki perbedaan dalam manajemen kurikulum pendidikan agama Islam. SMP IT Luqman Al-Hakim menerapkan kurikulum kombinasi dinas pendidikan dan kurikulum JSIT. Di antara mata pelajaran PAI yang diterapkan adalah: (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Bahasa Arab, (3) Tahfidz, dan (4) Ke-IT-an. SMP IT Al-Azhar menerapkan kurikulum dinas pendidikan dan pesantren. Di antara mata pelajaran PAI yang diterapkan adalah: (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Fiqh, dan (3) BTA. SMP IT Bimantara Al-Furqon menerapkan kombinasi kurikulum Dinas pendidikan dan kurikulum yayasan. Di antara yang menjadi unggulan adalah program tahfidz.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media Group
- Idi, Abdullah. 1999. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*. Jakarta: Gaya Media
- Jahari, Jaja dan Amirullah Syarbini. 2013. *Manajemen Madrasah; Teori, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhab, Sukro, dkk. 2017. *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*. Edisi Keempat. Jakarta: JSIT Indonesia.
- Muhaimin, dkk. 2011. *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin, dkk. 2012. *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Cetakan kelima. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qomar, Mujamil. 2013. *Strategi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga
- Saridjo, Marwan. 1997. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI
- Soegito, AT. 2013. *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*. Semarang: Widya Karya Semarang
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta
- Syukur, Fatah. 2011. *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab. 2013. *Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Islam Terpadu di Surakarta dan Boyolali*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

**VALUES EDUCATION AND GLOBAL CITIZENSHIP: TOWARDS
THE ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
AND HUMANITIES
[STUDY CASE: INDOPED PROJECT]**

Dr. Abi Sujak, Cahya Kusuma Ratih

abi.sujak@seamolec.org, cahya@seamolec.org

Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre
(SEAMOLEC)

ABSTRACT

This study presents a higher education capacity building project funded by Erasmus+ program of European Union namely INDOPED. This project that was started from 2016 until 2018 aims to modernize Indonesian higher education by adapting tested European pedagogy approaches. Those learning methods put students as center of learning and mostly use multidisciplinary approach to prepare students for future professional challenges. By introducing and sharing different learning methods from European university partners, it is expected to bring added value to the current Indonesian pedagogical approaches and closer the gap what is taught in university and what is needed by industry. Those pedagogical practices are successfully piloted by Indonesian university partners and have positive impact in students and teachers innovation competencies.

Keywords: *higher education; innovation; multidisciplinary approach; student-centered learning; business sector involvement.*

1. Background

1.1 Development of Innovation Competencies in Europe

To face new challenges in Europe, the European Union implements ‘Europe 2020 Strategy’ for growth and jobs towards sustainable social market economy. This strategy leads to the creation of ‘Innovation Union’ by mutually reinforcing research, development and innovation to improve competitiveness, create jobs, help employability, reduce poverty and support effective use of energy (European Commission). To ensure innovative ideas becoming innovative products and services by future professionals, there is an urgent need to raise a new generation professionals that able to utilize existing knowledge and skills and transform it into innovative products or services. Therefore, higher education institutes that producing those professionals, have important role to develop innovation competencies of their students.

As an example of this effort, since ten years ago Turku University of Applied Sciences (TUAS), Finland introduces innovation pedagogy as one of learning approaches to support development of innovation competencies of their students. Innovation pedagogy is a new pedagogical approach of assimilation, production and utilization of knowledge

that can produce innovations. Active use of innovation pedagogy by lecturers in cooperation with practitioners in business sectors will enable the development of innovation competencies alongside with study field of students. Innovation pedagogy has key characteristics of active learning and teaching methods, working-life orientation, integration between study field and applied research development and innovation (RDI) activities, flexible curriculum, multidisciplinary, internationalization, entrepreneurship, versatile and development-oriented assessment (Kairisto-Mertanen, Räsänen, Lehtonen, & Lappalainen, 2012).

Innovation competences refer to integration of knowledge, skills, and attitudes as learning outcomes of innovation pedagogy. As a result of development works by Framework for Innovation Competencies Development and Assessment (FINCODA) Project as one of European project financed by European Union, a model of innovation competences is being introduced. There are three categories and five dimensions of innovation competences in this model. Those five dimensions are critical thinking, creativity, initiative, team work, and networking, and then it is grouped into three categories: individual, interpersonal, and networking innovation competences (Marin-Garcia, et al., 2016). Critical thinking that can be defined as an ability to analyze, evaluate, estimate, or even foresee on some issues, added with creativity – as an ability to think beyond the boundaries and generate various alternatives of ideas, designs, products or services, and also initiative ability that able to take decisions and or carry out actions for further implementations of their ideas, may result on the development of innovation competences in each individual. To gained optimal improvement of organizational performance, this individual competences is not standing alone, it need to be integrated with the ability to work effectively in group (team work) and the ability to involve external stakeholders (networking).

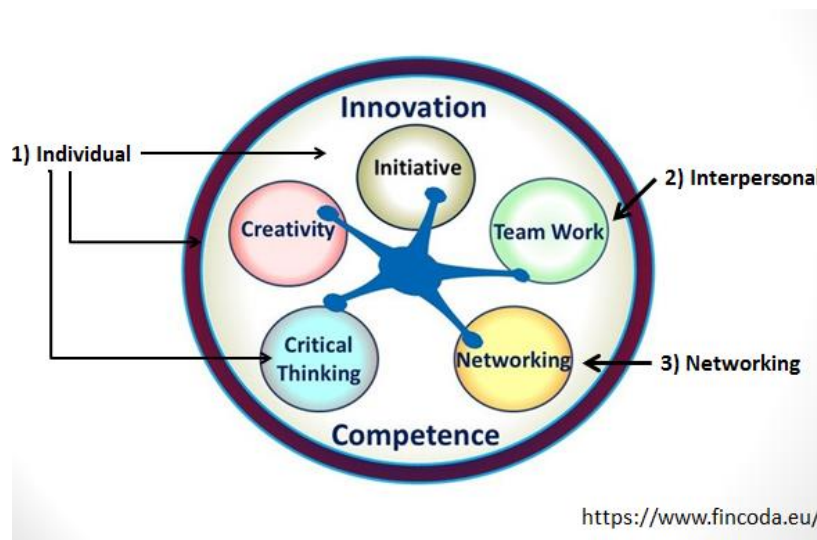


Figure 1: FINCODA Innovation Competences

1.2 Situation of Teaching and Learning Process in Indonesian Higher Education Institutes

With area more than 1.9 million km² that consist of approximately 17.000 islands, Indonesia is the largest country in Southeast Asia and also the largest archipelago country in the world. Indonesia is the fourth populous country with more than 250 million inhabitants. The partition of Indonesia by water, make this country is diverse with ethnics that speak with over 250 different languages and dialects. Those conditions are reflected in Indonesian Motto: 'Unity in Diversity'. With more than 200 million Islam people in Indonesia, nearly same number with Muslim at the entire Middle East, this country also protects the Catholic, Protestant, Hindu, Buddhist, and Confucianism believers.

Tertiary education in Indonesia is growing continuously in term of government budget, institutional development, and also enrolment rate of students. It makes impressive growth from 21.3% in 2008 to 31.5% in 2014 (OECD, 2010). Although that enrolment rate is still below than Malaysia, Thailand, and also Singapore, but Indonesia commits to increase competitiveness of their professionals to prepare the free movement of workforce in Southeast Asia. Tertiary education in Indonesia has six forms: university, institute, college, polytechnic, academy, and community academy (OECD, 2010). Currently, there are 4.645 Higher Education Institutes (HEIs) with 286.637 lecturers and 5.725.010 students⁹⁸. The degree system consists of bachelor (S1), master (S2), and doctoral (S3) and professional degrees. On the vocational side there are various diploma certificates and also specializations.

There are three functions of Higher Education Institutes by law which is described as Tridharma. It is stated that HEIs have obligation to provide education, research and community services. To improve the quality of education, enhancing teaching and learning process is the most important thing. According to the law, each HEI develops its own curriculum with reference to National Higher Education Standards. It means that every institution needs to focus on the improvement of content as well as pedagogy method.

There are growing awareness of implementation of student-centered learning and inquiry-based methods, but although there is a progress, mostly the teaching method is still lecturing. Shifting the teacher role from lecturing to facilitating is challenging. Activating students to be autonomous learner is facing cultural block. One of the biggest cultural barriers is the philosophy of total obedient as yardstick of good conduct. *Manut-miturut* philosophy is an example of those cultural constraints mentioned by Dardjowidjojo in his country report (Dardjowidjojo, 2001). *Manut-miturut* could be explained as yes-man in the western perspective. Whatever teachers say, students need to agree (*manut*) and also obey the instruction (*miturut*) without any questions. Teachers are always right and unquestioned mind is preferable by teachers. Students tend to meet this expectation by quietly come, sit, and listen all lectures. In order to prepare students in this 21st century era, the cultural block is need to be reduced by modifying teacher cultural mindset as well as adapting western teaching and learning concept to fit eastern cultures.

⁹⁸ Retrieved from <https://forlap.ristekdikti.go.id/> on July, 22, 2018

Based on the finding from Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Program in Education Sector 2013, universities and industries as main agents of innovation development and economy growth are still distant from each other (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), 2013). One fundamental challenge is lack of mutual understanding and trust between both sectors. Many universities develop their strategy without considering the (future) needs of industry. Universities that supposed to produce future professional are considered to produce un-relevant graduates. On the other hand, industrialists also see university academicians as bureaucratic; too many procedures to get mutual understanding. Both sectors need encouragement to be close each other. Structured encounters in governing boards or joint programs are needed for the sake of producing innovation as trigger of economic growth.

Unlike well developed countries such as: China, Korea, Japan, or even Singapore, Indonesia also lacks of industries that contribute in the creation of innovation. It means that Indonesian universities need to equip themselves to be strategic institutions with the culture of innovation. Universities require to produce qualify graduates that ready for the job market as well as able to meet unpredictable and emerging needs and create relevant jobs for others.

2. INDOPED Project 2016 – 2018

European Union through Erasmus+ program provides funding to support activities in the field of education, training, youth and sport. This funding could be used as incentives to develop networked projects participated by European institutions together with potential partners outside Europe. Aligned with Europe 2020 strategy, this capacity building project supports cooperation for innovation and exchange of good practices in higher education in order to fight (future) high level of unemployment and boost economic growth. The country partners are also chosen based on their potential to support each other enterprises collaboration (Kettunen, 2017).

‘Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices (INDOPEP)’ is a project funded by Erasmus+ with the aim to bring added value to Indonesian Higher Education system by updating pedagogical approaches and bridge the gap; what is thought in university and what is needed by industry. Turku University of Applied Sciences, Finland is the coordinator of this project and the other European higher education institutes are 1) Inholland University of Applied Sciences, Nederland, 2) Business Academy Aarhus, Denmark, 3) Gdansk University, Poland, and 4) Seville University, Spain. Those European partners work together with four Indonesian universities and one regional centre, namely Bina Nusantara International University, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Syah Kuala University, Widya Mandala Catholic University, Yogyakarta State University, and Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).

Both European and Indonesian partners have remarkable strengths in this project. All European partners are well-known higher education institutes and have rich experience on the implementation of pedagogical methods that relevant with industry requirements. There are universities of applied sciences as well as research-based universities that can share broad perspective on pedagogical practices and the university-industry partnership. Those European universities are also located in the north, south, east, and

west part of Europe. It means that those universities also bring and share their cultures as well as their national values and broaden perspective of pedagogical approaches. On the other hand, composition of Indonesian partners is also quite unique. It consists of secular, protestant, catholic, and also Islamic-based universities that represent the diversities of Indonesian cultures and believes. Both public and private Indonesian universities are present in this consortium. Although mainly those universities are located in Java Island, but their formal and informal network covers 34 provinces. Last, with support of SEAMOLEC networks, the INDOPED good practices could be share in Southeast Asia.

2.1 Need Analysis of INDOPED Project

Before those tested European pedagogy approaches are being piloted, a self-assessment is being conducted by the consortium. This assessment has an objective to be baseline of further adaptation of those practices. The need and readiness of Indonesian universities to pilot those approaches is available by those findings.

There are three major points highlighted as the result of self-assessment. First, there is an urgent need from Indonesian university partners to enhance their teaching and learning process by applying student-centered learning, improving engagement of students and sharpening their innovation competencies. The second point, there are major statements from lecturers that they do not have enough confidence to implement student-centered learning. Hence, intensive trainings and mentoring are needed by the lecturers. In addition, the gap between industrialists and academicians is quite distant and challenging to be narrowed in the near future. Lastly, Indonesian university partners also raise their need to extend this cooperation beyond pedagogy area to be part of institutions' internationalization (Hutagaol, et al., 2016).

2.2 Pilots of European Active Learning Practices

The good practices of European pedagogy are adapted into Indonesian partners teaching and learning pilots. There are 10 methods that have been piloted namely: Project Hatchery, Project Module, Learning by Teaching, Market Research, Rubrics, Gamification, Innovation Camp, Learning through Storytelling, Learning by Case and Learning to Learn. European partners take active roles in the pilot process by conducting teacher trainings, providing teaching materials/manuals, planning and conducting the pilot. Started from middle 2016 until 2017, more than 100 lectures and almost 3000 students have been participated in those pilots. As the major progress in this project, some methods have been part of the curriculum in Indonesian university partners. To give better understanding on the pilot implementation, there are three pilots that will be explained namely: The Project Hatchery, Gamification, and Innovation Camp.

Table1: List of European pedagogy methods and its pilots.

No	Pedagogy Methods	European Partners	Piloted by
1	The Project Hatchery	Turku University of Applied Sciences, Finland	Bina Nusantara University International Syiah Kuala University Yogyakarta State University
2	Gamification	Gdansk University, Poland	Widya Mandala Catholic University Syarif Hidayatullah State Islamic University
3	Innovation Camp	Business Academy Aarhus, Denmark	Yogyakarta State University Bina Nusantara University International
4	Learning through Storytelling	University of Sevilla, Spain	Yogyakarta State University
5	The Market Research	Inholland University, Netherlands	Syarif Hidayatullah State Islamic University Syiah Kuala University
6	Learning by Teaching	Turku University of Applied Sciences, Finland	Widya Mandala Catholic University Syiah Kuala University Bina Nusantara University International
7	The Project Module	Turku University of Applied Sciences, Finland	Bina Nusantara University International
8	Learning to Learn	University of Sevilla, Spain	Widya Mandala Catholic University
9	Learning by Case	University of Sevilla, Spain	Widya Mandala Catholic University Syarif Hidayatullah State Islamic University
10	Assessment Rubrics	Inholland University	Bina Nusantara University International

2.2.1 The Project Hatchery (PH)

Innovation Pedagogy in faculty of Technology, Environment and Business, Turku University of Applied Science is implemented through hatchery work since 2008. In this work, students are getting familiar with exploratory work and learning, adopting themselves in a multidiscipline team and gaining skills of project development. The

hatcheries (students' teams) are also expected to identify real problems from different perspectives, generate alternative solutions, and then communicate as well as convince those creative and innovative ideas to others. There are several types of hatchery work depend on the expertise level of students. Junior Project Hatchery (PH) is the first mandatory step of the hatchery path for first year students that equal with three credits. In this course, students learn various ways of working and studying. It serves as a baseline to shape competencies needed for their future. Although the mastery of contents are secondary in this course but it is still related with their study. After completing this course, students may choose different options such as joining research hatchery or advance project hatchery (Kairisto-Mertanen, Räsänen, Lehtonen, & Lappalainen, 2012).

One example of PH pilot is conducted by Syiah Kuala University in electronic course at Agricultural Engineering Department under Dr. Agus Arief Munnawar supervision. There are 64 students that were grouped in 8 hatcheries, participated in this course. Socolatte as a local company that produced cocoa-based products is involved in this project. Students were assigned to identify problems and generate several solutions related to electronics application in that industry. One major achievement from those hatcheries is the development of tool that able to rapidly and non-destructively predict quality of cocoa beans as well as its fermentation level. As summarize, implementation of PH is able to enhance students' problem solving, team work, and communication skills.

2.2.2 Gamification

Gamification in brief is integration of game mechanics and dynamics into teaching and learning process to increase students' engagements. This method is in line with the objective of students-centered learning where students are responsible of their own way of learning. Within gamify course, students are provided by several possible options to mastery the content and complete the course. Gamification is also in line with the constructivism paradigm, where teachers are seen as designer of learning environment and students are supposed to construct their knowledge and skills assisted by teachers. As game master, several game components are possibly used by teachers such as badges, points, missions, leaderboard, challenges, hazards, and many more. It takes times for students to be involved in the gamification. Therefore teachers are requested to implement gamification not only in single meeting but in a set of lessons. In Gdansk University, gamification is implemented by Joanna Mytnik, Ph.D and dr Wojciech Glac in faculty of Biology.

One of gamification pilot is taken place in Syarif Hidayatullah State Islamic University for Macroeconomic course under supervision of Zuhairan Yunmi Yunan. As a theory course, it is always challenging to engage students within a lesson. In the end of the lesson, students are expected to be able to understand and perform simple analysis of national and international economy phenomenon. Therefore gamification is considered a suitable method to construct students' knowledge, sharpen their critical thinking by providing various ways of learning as well as engage them within the lesson.

As a game master, Mr. Yunan provides a Book of Rule that contained rules that need to be followed by students. To motivate students, Malin kundang is used as a background story. Malin kundang is a well-known folk tale from West Sumatra regarding

punishment of ungrateful son then his mother cursed him into the stone. All rules within the book were presented to students. Students as Malin Kundang have a target to gain knowledge and transform from a stone into human. In order to do that, they must complete various levels of tasks inside or outside the class and accumulate points to be a real human.

Since most of students' efforts are rewarded by points and anonymously visible for all players in the leaderboard, students are enjoying integration of the Malin Kundang game mechanism into the lessons. They are actively seeking relevant information, eager to respond during discussion, raising questions and also sharing their understanding and perspective. Students are also competed each other to get the points. As a result, students show significant achievement in the midterm. Almost half points are scattered among students not too far from average points. It means that no students are dominated and also left behind. In summarize, students are successfully active in learning and gained the needed knowledge by conducting gamify course.

2.2.3 Innovation Camp

Innovation camp is an intensive, time-pressured group works that consist of various activities to generate ideas as well to concrete it. Real world challenges from companies, public authorities or communities are presented in this camp. Students from various disciplines work together to understand the situation/context, identify the challenges, generate alternative solutions, validate ideas, develop prototype and then present it. Teachers act as facilitators and coaches during the camp. This method is being introduced by Business Academy Aarhus. This interdisciplinary, dynamic, and practice-oriented works in collaboration with enterprises represents the pedagogical approach of Business Academy Aarhus.

Faculty of Language and Arts, Yogyakarta State University is one of Indonesian partners that piloted this method. This Innovation Camp was held for three days in a natural camp site Wisata Kembang Arum village and attended voluntarily by 70 students from 11 different study programs. The challenge was about creation of non-monetary incentives for people to reduce, reuse and recycle solid waste in their houses and neighborhood of Depok, Sleman, Yogyakarta. Stakeholders of this camp are Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA), as a non-governmental organization concern on environmental issue and district government of Depok, Sleman. That issue is raised by stakeholder and during the camp students who formed 12 teams are asked to discuss and find innovative solutions to overcome the challenge. After the camp students expresses their satisfaction in their communication and team work skills enhancement. This camp is positively widening their horizon by working with multidiscipline fellows and stakeholders.

2.3 Students and Teachers Evaluation of Pilots

To know the impact of the pilot, evaluation was held for participated teachers and students. Structured questioners were provided before and after pilots. They were 627 students from five Indonesian partners answered the questioners. Compared to the result of learning competencies before pilot, students feel improvement their ability to work systematically, engage in the learning process and also confidence to lead classroom discussion after pilot. Those methods also positively increase students learning

autonomy in term of ability to explore information and knowledge from various resources, collaborate with teachers and peers in problem solving and work well under pressure. As summarize those students enhance their individual, interpersonal and networking competencies. After pilots perception of teachers by students are shifting from the busy individual to cheerful and friendly partner.

Most of teachers are satisfy with the pilots. After pilots they express their improvement in their professional capacity by demonstrating productive and effective job. Teachers show their enthusiasm to pursue the goals and present creative ideas as well as look for possible ways to implement the idea. Teachers gain more confidentiality to take initiative and drive others to act together. Overall those pilots are helping teachers to be agents of change in the university teaching and learning cultures. Teachers become inspirational facilitator for future Indonesian professionals.

2.4 Dissemination of Pilots

In order to disseminate tested European pedagogical practices as well as result of implementation pilots for Indonesian and also to Southeast Asia educators, the webinar has been successfully conducted twice by SEAMOLEC. The first webinar was conducted in February 2017 after first phase of pilots and then after the second pilots, the second webinar was conducted in November 2017. All partners are actively contributed in this webinar and it successfully brought more than 700 online participants from Indonesia and Southeast Asia. Webinar participants inspired by those presented pilots to enhance their teaching and learning process.

Those INDOPED good practices are being reported and gained positive feedback from Ministry of Research, Technology and Higher Education (MoRTHE) Republic of Indonesia. Currently, MoRTHE become additional partner that support and utilize result of INDOPED researches and findings. Two major dissemination events have been conducted with MoRTHE support. First, International Discussion Forum on Innovation Pedagogy in Jakarta, September 2017 attended by 100 lectures from various Indonesian universities and the second INDOPED International conference is held in Yogyakarta on March 2018 and participated by more than 240 educators. Beside those main conferences, several dissemination activities were held locally by Indonesian partners.

3. Conclusion

To prepare professionals to be ready for future challenges, universities take important role to equip students not only with knowledge or skills but also with ability to utilize, assimilate, produce and transform it into innovative products or services. Since their study period, students need to sharpen their innovation competencies: critical thinking, creativity, initiative, team work and networking. In order to do that, in case of Indonesia higher education, current lecturers and students need to overcome the cultural constraints, creating environment of student autonomy in learning and involving business sector in research, development and innovation activity. INDOPED project gives incentives to work together among European and Indonesian university partners to pilot tested European pedagogy practices and adjusted it into Indonesian higher education system. Several researches and findings have been presented and several dissemination activities are still going on to extend the benefit of this project.

Acknowledgement

The author acknowledges all findings presented in this paper as the result of INDOPED consortium work. Since this project is not finished yet, more findings possibly arise.

References

- Dardjowidjojo, S. (2001). Cultural Constraints in the Implementation of Learner Autonomy: The Case in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Education*, 2(2), 309-322.
- Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). (2013). *Developing Strategies for University, Industry and Government Partnership in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Agency for Research and Development (Balitbang), Ministry of Education and Culture.
- European Commission. (n.d.). *Europe 2020 strategy*. Retrieved 22 7, 2018, from European Commission Policies, Information and Services: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
- Hutagaol, Y., Adiningrum, T., Budiono, T., Kongdro, H., Ramadhan, A., Putra, S., & Fibra, A. (2016). *Self-Assesment Data Analysis Report WPI-INDOPED Project*. Jakarta: INDOPED. Retrieved from http://docs.wixstatic.com/ugd/b4b8f4_aa321ac695bc428bb3cddb53f57158c.pdf
- Kairisto-Mertanen, L., Räsänen, M., Lehtonen, J., & Lappalainen, H. (2012, 3 28). Innovation pedagogy – learning through active multidisciplinary. *Revista de Docencia Universitaria*, 10(1), 67-86.
- Kettunen, J. (2017). Promoting Innovation Pedagogy in a Capacity Building Project in Indonesia. *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 11(1).
- Marin-Garcia, J., Andreu Andres, M., Angeles, A.-H., Lorena, A.-M., Lourdes E, G.-C., Amparo, G.-L.-d.-G., . . . Watts, F. (2016, 8 31). Proposal of a Framework for Innovation Competencies Development and. *Working Papers on Operations Management*, 7(2), 119-126. doi:<http://dx.doi.org/10.4995/wpom.v7i2.6472>
- OECD. (2010). *OECD Economic Surveys: INDONESIA*. OECD Publishing. doi:OECD Economic Survey INDONESIA

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Suku Laut (Duono) Kuala Tungkal Provinsi Jambi)

M. Syahrani Jailani

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Safuddin Jambi

email: m.syahrani@gmail.com HP.08127309578

ABSTRACT

This study is aimed at revealing how is the empowerment of education at Islamic schools in Fisherman village Suku Laut Kuala Tungkal. Islamic schools are generally born from the initiation of society as a form of concern for the condition of the people, especially children in understanding the special religion of Islam as a matter of doubt. This research is conducted by using qualitative approach, where the stage is based on the opinion of Spradley (1980). Data collection methods and data validity refer to Denzin and Lincoln (2009: 525) and Guba (1985: 328). Islamic schools gait has contributed greatly to this country not only in providing a religious understanding, but also in participating to educate the children of the nation through the educational process that has lasted tens or even hundreds of years. In its journey, the empowerment of Islamic schools experienced various dynamics, commitment of Islamic school leadership, public awareness and supporting efforts became the issue that made Islamic schools hard to develop as expected.

Keywords: *Empowerment of Islamic school, from and for society.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemberdayaan pendidikan di madrasah Perkampungan Nelayan Suku Laut Kuala Tungkal. Madrasah umumnya lahir dari inisiasi masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat terutama anak-anak dalam memahami agama khusus Islam sebagai sebuah keyaqinan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana tahapan berpedoman pada pendapat Spradley (1980). Metode pengumpulan data dan keabsahan data mengacu pada pendapat Denzin dan Lincoln (2009:525) dan Guba (1985:328). Kiprah madrasah telah memberi kontribusi besar untuk negeri ini tidak hanya memberi pemahaman keagamaan, akan tetapi turut serta mencerdaskan anak-anak bangsa melalui proses pendidikan yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Dalam perjalanannya, pemberdayaan madrasah mengalami berbagai dinamika, komitmen kepemimpinan madrasah, kesadaran masyarakat dan daya dukung menjadi persoalan yang turut menjadikan madrasah ta kunjung berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan madrasah, dari dan untuk masyarakat.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara dan bangsa yang maju, unggul, dan berkualitas serta bermartabat, karena negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia. Soedijarto (2008: 11) menyebut, pendidikan atau yang lebih luas pembangunan sumber daya manusia merupakan unsur paling strategis bagi pembangunan negara bangsa. Langgulung (1986) secara tegas menyatakan bahwa "Maju mundurnya kebudayaan dan peradaban suatu bangsa sangatlah ditentukan seberapa besar akses pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan". Novak (1986: 18) menyatakan bahwa "*education is an area of work through which one can hope to improve the quality of life*". Mengangkat dan memperoleh derajat dalam kehidupan manusia tersebut, manusia tidak dengan serta merta tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dan dilalui tanpa proses. Proses panjang yang dilalui seorang individu (manusia) tersebut dinamakan dengan "*Proses Pendidikan*".

Madrasah dengan misi dan tugas utama sama seperti lembaga pendidikan lainnya, tidak hanya sekedar transfer pengetahuan kepada peserta didik (anak). Lebih dari itu madrasah sebagai lembaga pendidikan juga memberi kontribusi edukasi dan sosial kepada masyarakat dan anak-anak, serta pembinaan generasi penerus yang memiliki kekuatan nilai-nilai keyakinan beragama yang ditunjukkan melalui perilaku keseharian. Misi dan tugas mulia madrasah sebagai lembaga pembentukan akhlak peserta didik diyakini akan mampu menjadi misi da'wah baik diri pribadi, keluarga maupun masyarakat luas, sebagaimana dikemukakan Abdul Rachman Shaleh (2005: 20) "madrasah mempunyai karakter yang spesifik bukan hanya melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan hidup". Oleh karena itu madrasah adalah milik masyarakat dan menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan di dalam kebudayaan sebagai milik masyarakat. Secara tegas Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Bab III Pasal 4, menyatakan bahwa; (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu keasatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Harus diakui, terkadang lembaga pendidikan seperti madrasah belum optimal melakukan pemberdayaan potensi diri anak dan memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan mereka melalui proses pembelajaran, apalagi pemberdayaan masyarakat yang menjadi pemegang saham terbesar kehadiran madrasah di tengah-tengah masyarakat, sering kali madrasah dipandang sebelah mata, dan lembaga kelas yang rendah. Padahal madrasah merupakan salah satu pilar komponen lembaga pendidikan

yang diharapkan mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan proses penyadaran akan pentingnya pendidikan, dan menjadikan pendidikan untuk semua anak menjadi wahana menggapai cita-cita tanpa membedakan latar belakang kehidupan. Kasus kehidupan anak-anak perkampungan nelayan Suku Bajau Kuala Tungkal dalam bidang pendidikan merupakan fakta, bahwa disekitar mereka terdapat beberapa madrasah yang kehadirannya belum menjadi perhatian orang tua dan anak-anak dari apa yang mestinya mereka peroleh tentang pendidikan. Madrasah belum menjadi bagian penting untuk menggali ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Meskipun disadari oleh mereka bahwa madrasah juga tempat belajar agama.

Fenomena di atas, menarik perhatian penulis mengkaji lebih dalam tentang “Pemberdayaan pendidikan di Madrasah (Studi masyarakat Nelayan Suku Laut Kuala Tungkal)”, dengan fokus penelitian, sebagai berikut: (1) Mengapa anak-anakmasyarakat Perkampungan Nelayan Suku Laut Kuala Tungkal belum menjadikan madrasah sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan apa pula faktor penyebabnya?

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam rangka menemukan “*kebermaknaan*”, dengan pendekatan menggunakan Langkah-langkah pemikiran Spradley (1980). Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengacu pada kriteria yang gunakan Spradley (1980), yaitu: (1) subjek yang telah cukup lama dan intensif “*menyatu*” dengan suatu kegiatan atau “medan aktivitas” yang menjadi sasaran perhatian penelitian; (2) subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran/perhatian penelitian; (3) subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diminta informasi; (4) subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung “*diolah*” atau “*dikemas*” terlebih dahulu; dan (5) subjek yang sebelumnya tergolong masih “*asing*” dengan peneliti sehingga dapat merasa lebih tertantang untuk “*belajar*” sebanyak mungkin dari subjek yang semacam guru baru bagi dirinya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang disarankan Denzin dan Lincoln (2009: 525), yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber non manusia, serta pencatatan hasil pengumpulan data. Didukung pula oleh interaksi langsung dengan subjek peneliti seperti, mendengarkan, melihat, berbicara, bertanya, meminta penjelasan, mengekspresikan dan menangkap isyarat yang tersirat dari subjek yang terlibat. Untuk uji keabsahan data, merujuk Lincoln dan Guba (1985: 328-332), menyarankan agar menggunakan, yaitu: (1) *standar kredibilitas*; (2) *standar tranferbilas*; (3) *standar dependabilitas*; dan (4) *standar konfirmabilitas*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman kepada pendapat Spradley (1980), yaitu; (1) analisis domain (*making a domain analysis*), (2) analisis taksonomi (*taxonomy analysis*), (3) analisis komponensial (*componential analysis*), dan (4) tema budaya (*cultural thema*).

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Secara Geografis Perkampungan Nelayan Suku Laut Kuala Tungkal berada pada posisi 0°45 – 1°27 Lintang Selatan (LS) dan 102°38 – 104°33 Bujur Timur. Dengan luas wilayah Tungkal II ± 1.080 Ha, dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Tungkal Iir yang meliputi ± 320.100 Ha. Berjarak 125 KM dari Ibu kota Provinsi Jambi atau 1440 KM dari Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta. Dilihat dari topografi, perkampungan nelayan yang berada di Kelurahan Tungkal II, terletak pada dataran rendah berawa-rawa dan tanah lumpur yang ditumbuhi pohon bakau, pohon nipah dan pohon api-api. Dengan kategori daerah pasang surut yang biasanya terjadi dua kali dalam 24 jam. Air pasang besar terjadi di bulan Desember- April. Berada di bibir pantai dengan letak ketinggian 0-2,5M dari permukaan laut. Perkampungan nelayan Suku Laut Kuala Tungkal termasuk daerah subtropis yang umumnya beriklim lembab/basah, dimana curah hujan hampir merata sepanjang tahun yaitu 2.000-3000 M³ dengan suhu rata-rata 23 °C dan maksimum 32 °C.

Jumlah penduduk Kelurahan Tungkal II 8.792 orang. Dari jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Tungkal Iir berjumlah 111.694 jiwa. Dari 8.792 penduduk Tungkal Iir, 4.362 laki-laki dan 4.430 orang perempuan. Sementara jumlah penduduk Khususnya dari Suku Laut berjumlah 400 jiwa atau 177 kepala keluarga. Dari 177 KK, terdapat 151 KK hidup di bawah garis kemiskinan atau masyarakat prasejahtera. (lihat lampiran data Kelurahan).

Tabel : 1 Data Penduduk Kelurahan Tungkal II

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4.362 Orang	4.430 Orang	8.792 Orang

Sumber: Monogram Kelurahan Tungkal II, tahun 2015

Menurut data kependudukan Kelurahan Tungkal II, penduduk perkampungan nelayan berada di empat Rukun Tetangga (RT), yaitu RT. 001, RT. 009, RT. 17, dan RT. 003.

Tabel : 2 Data Penduduk Suku Laut menurut jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Orang	Persentase
1	Laki - laki	193	48,3 %
2	Perempuan	207	51,7 %
3	Jumlah	400	100 %

Sumber: Informasi Sekretaris Lurah Tungkal II, tahun 2015

Umumnya penduduk nelayan Suku Laut yang berada di Kuala Tungkal, hidup berkelompok-kelompok mendiami sepanjang pesisir pantai sungai pengabuan yang berhadapan langsung dengan selat Berhala dan Laut China Selatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Suku Laut pak AB, mengemukakan sebagai berikut:

“ Sebelum kami bermukim dan menetap di darat, dahulu kami ini hidup dan tinggal di perahu-perahu besar maupun kecil sesuai dengan ukuran keluarga.

Perahu yang kami gunakan itu dinamakan perahu “*dekan*g” yang terdiri dari tiga bagian. Bagian depan perahu biasanya tempat tinggal anak-anak, bagian tengah tempat tidur yang terdiri dari kamar tidur anak-anak dan orang tua, bagian belakang biasanya tempat memasak dan tempat peliharaan binatang seperti burung, kucing dan hewan peliharaan lainnya. Baru tahun 1920-an, Suku kami mulai menetap dan bermukim di darat. Dengan pertimbangan tetap tidak jauh dari laut. Sebenarnya istilah “Bajau” menurut orang kami Suku Laut bukanlah istilah nama yang pantas di berikan kepada kami, karena orang kami Suku laut sendiri tidak menyebut dengan istilah Bajau, Istilah Bajau sendiri di berikan kepada masyarakat lain di luar Suku laut. Orang kami Suku Laut sendiri menyebut Suku Laut dengan sebutan “*Suku Dono atau Duano*”. Artinya penduduk yang berpindah-pindah. (Wawancara Minggu, tanggal 13 September 2017. Pukul. 16..00 Wib)).

Berdasarkan penelusuran sejarah dan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, bahwa orang (penduduk) yang pertama sekali mendiami/menghuni perkampungan nelayan Kuala Tungkal ini memang berasal dari orang-orang Suku Laut (Suku Duano). Asal-usul mereka berdasarkan beberapa sumber yang dapat di percaya, menyimpulkan bahwa Penduduk Suku Laut yang ada di Kuala Tungkal berasal dari Johor (Malaysia). Bila memaknai istilah “*Bajoe*” sendiri yang merupakan singkatan “*Baa*” artinya “Bangsa” dan “*Joe*” artinya “Joehor”. Jadi Bajoe bermakna “*Bangsa Joehor*”, maka istilah tersebut mengandung pengertian yang menandakan adanya unsur kedekatan sosiologis antara pengertian Bajoe dengan sebuah komunitas tertentu. Artinya ada kebenaran sejarah yang tidak bisa terbantahkan (M. Syahrani, 2013)

Versi lain, dalam buku “*Studies in Moro History, Law and Religion*” dikarang Juan. G. F Zaide terbitan tahun 1951, menjelaskan sejarah asal-usul penduduk Suku Laut (Duano), sebagai berikut:

“Pada tahun 1380 M, Islam mulai masuk ke Philipina yang dibawa oleh seorang mubaligh dari negeri arab bernama “Mak Dum”. Kemudian pada tahun 1390 M misi da’wah disusul oleh Rajo bagindo dari Minangkabau Sumatera Barat. Selanjutnya, pada tahun 1450 M seorang mubaligh berasal dari Palembang bernama Abu bakar berhasil memasuki kepulauan Sulu (Selatan Manila) mengembangkan dan menda’wahkan syiar Islam selama puluhan tahun. Pada tahun 1475 M, seorang saudagar Arab bernama Syarif Kebungsuan menikah dengan Putri Tumina di pulau Mindanau selatan Philipina, dan pada akhirnya beliau menjadi raja di kesulthanan Miindanau dan sekitarnya. Dari pulau Sulu dan Mindanau, Islam melebarkan syiarnya sampai kekepulauan Luzon ke utara Philipina yang berbatasan dengan pulau Sulawesi. Dan akhirnya pada tahun 1571 M, untuk pertama kalinya kerajaan Islam berdiri di Philipina di bawah kekuasaan seorang raja berna Sulthan Sulaiman.

Pada tahun 1569 M, bangsa Spanyol (Eropa) datang ke Philipna yang mulanya hanya sekedar singgah. Karena alam yang subur dan potensi kekayaan serta posisi yang strategis, lama-kelamaan bangsa Spanyol memiliki hasrat ingin menguasai. Apa lagi ketika itu bangsa Philipina

khususnya kota Manila yang mayoritas Islam, masih sangat sederhana dan belum begitu maju dalam peradaban. Infasi pun terjadi dan perang tak dapat dihindarkan, bangsa Spanyol menjajah dan merampas semua hak-hak rakyat Philipina dan sekitarnya, perang dahsat memakan waktu cukup panjang hampir selama lebih dari 300 tahun. Tahun 1876 M di lanjutkan oleh Amerika yang sempat menjajah wilayah Philipina dan berakhir tahun 1914 M. Akibat di jajah beratus tahun lamanya, bangsa Spanyol di samping menguasai potensi alam juga melakukan misi penyebaran Agama. Rakyat Philipina di paksa untuk beralih agama yang semula beraga Islam pindah ke agama Katholik. Akibatnya banyak penduduk Philipina yang mencari perlindungan dengan cara melarikan diri dengan berlayar ke pulau-pulau terdekat ke selatan Philipina seperti Moro, Mindanau, Sulu dan Zamboanga. Sebagian lagi ada yang melarikan diri dengan berlayar sehari-hari samapai akhirnya menetap ke kepulauan Sulawesi, Kalimantan, bahkan ada sampai ke pulau Sumatera terutama di pesisir pantai timur Sumatera, seperti Kepulauan Riau, Sumatera Selatan bahkan Kuala Tungkal (Jambi)”.

Diantara kehidupan sosial budaya masyarakat perkampungan nelayan Suku Laut Kuala Tungkal yang masih kuat dipertahankan adalah kebiasaan sebelum ke laut, yaitu dengan melakukan kegiatan ritual berupa do'a dengan diselingi kemenyan sebagai syarat agar terhindar dari musibah atau terhindar dari bahaya di laut dan ketika pulang dari melaut selamat sampai ke rumah. Menghindarkan diri dari pantangan-pantangan seperti larangan membawa bakul (terbuat dari rotan), dilarang berkata kotor, mengupat disaat melaut, atau melakukan tindakan tidak terpuji. Bila itu dilakukan, biasanya hasil tangkapan tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Jika dilihat dari karakteristik bentuk tubuh/fisik, terlihat cir-ciri khusus penduduk perkampungan nelayan Suku Laut, misalnya warna kulit kehitam-hitaman, bentuk kaki baik laki-laki atau perempuan berbentuk O, dan berjalan agak membungkuk, pinggul lebih menonjol, bentuk wajah pada gigi geraham menonjol kedepan, telapak kaki lebar dan antara ujung kaki dengan tumit hamper rata. Kebiasaan lain yang agaknya sulit dirobah dari perkampungan nelayan dan khususnya Suku Laut adalah kebiasaan berbicara keras. Bagi kita yang baru bertemu mereka, dengan melihat mereka berbicara seolah-olah bereka sedang bertengkar atau sedang berkelahi.

Umumnya masyarakat perkampungan nelayan khususnya masyarakat Suku Laut Kuala Tungkal, dari hasil pengakuannya status beragama Islam, ini terlihat dari kartu tanda penduduk (KTP) yang tertera. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa status mereka beragama Islam tidak di barengi dengan pengamalan agama sebagaimana dikehendaki ketentuan syariat. Praktek-praktek keagamaan (Islam) tidak dijalankan, misalnya ketika tiba waktu shalat zhuhur, shalat ashar, atau shalat magrib tidak dilaksanakan. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kalaupun ada kegiatan keagamaan hari besar Islam seperti kegiatan Isra' mi'raj, maulid Nabi Muhammad SAW, atau kegiatan tahun baru Islam dengan menghadirkan da'i (penceramah) dari luar kota/dalam kota hanya sedikit sekali datang. Di lokasi perkampungan nelayan ini terdapat tiga mesjid/langgar, kebanyakan yang mengisi waktu shalat lima waktu, justru penduduk di luar Suku laut

Dengan pengetahuan keagamaan yang terbatas, tidak didukung pemahaman keagamaan yang cukup, membuat kebanyakan dari mereka orang tua jauh dari pengamalan agama yang mestinya dilakukan. Sangatlah beralasan kemudian, apabila anak-anak mereka juga sangat jauh dari pengamalan keagamaan, ini terlihat dari pengamatan penulis ketika mengunjungi salah satu Taman Pengaji Al-Qur'an (TPA) Hidayatus Shobiyah, dari lima puluhan anak usia 0-6 tahun, anak 6-12 tahun belajar mengaji hanya 3-5 orang saja anak dari penduduk Suku Laut selebihnya anak-anak di luar Suku Laut.

Suasana dalam keluarga, sangat mempengaruhi kehidupan keagamaan dan pergaulan anak-anak. nilai-nilai agama yang semestinya dapat diterima anak-anak sejak dini tidak terjadi, dan kondisi ini diperparah dengan lingkungan sekitar pemukiman penduduk tidak kondusif untuk menunjang proses pendidikan anak-anak. Misalnya, terdapat tempat permainan bola bilyar yang mestinya menurut aturan tidak boleh ada di sekitar pemukiman penduduk. permainan kartu domino yang dilakukan orang-orang dewasa yang lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk, yang secara tidak langsung terlihat oleh anak-anak.

Kehadiran madrasah di lokasi perkampungan nelayan Suku Laut Kuala Tungkal sangat membantu para orang tua dalam ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa, meskipun disekitar lokasi perkampungan nelayan Suku Laut Kuala Tungkal telah berdiri Sekolah Dasar Negeri misalnya: Sekolah Dasar Negeri 14/V, Sekolah Dasar Negeri 24/V dan Sekolah Dasar Negeri 190/V Kuala Tungkal, namun tidak mengurangi niat dan i'tikad para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendirikan madrasah, terutama madrasah ibtidaiyah. Hal ini tidak terlepas dari keinginan kuat para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menginginkan agar anak-anak di sekitar perkampungan nelayan memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk masa depan anak-anak dikemudian hari. Pengakuan ini peneliti peroleh melalui wawancara bersama tokoh masyarakat seperti H. S. A (70 tahun) menyatakan bahwa:

“kehadiran madrasah di perkampungan nelayan ini awalnya untuk mengantisipasi banyaknya anak-anak disini yang belum mampu membaca al-Qur'an dan menulis Arab melayu, dan biasanya pada sore hari anak-anak ini lebih banyak bermain yang saya nilai kurang bermanfaat. Maka atas inisiatif tokoh masyarakat dan tokoh agama diantaranya dulu ada tokoh agama dikalangan Suku Laut bernama uztaj AA, bersepakat mendirikan madrasah agar anak-anak tau dan faham dengan Islam dan berharap dikemudian hari anak-anak ini dapat menjalankan ajaran agama secara benar (Wawancara Sabtu, tanggal 12 September 2017 Pukul: 17.00 Wib).

Dalam perjalanannya, madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah kampung nelayan Kuala Tungkal mengalami perkembangan yang cukup baik terutama diawal-awal berdiri tahun 1970-an, dan mengalami kemunduran beberapa tahun kemudian diakibatkan diantaranya, yaitu: (1) sistem kepemimpinan madrasah yang masih menganut faham ewuh pakewuh di kalangan guru-guru (uztaj/uztajah) yang tetap mempertahankan kepala madrasah berdasarkan senioritas (guru tua) meskipun dari segi visioner dan prospektif tidak mengalami perubahan baik dari kualitas lulusan maupun pengembangan madrasah, meskipun dari kuantitas para santri melebihi kapasitas daya

tampung ruang belajar, (2) pengembangan madrasah belum mendapatkan dukungan nyata dari pihak-pihak terkait, misalnya: minimnya bantuan bangunan ruang belajar dari Kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi, pemerintah kabupaten, dan tidak adanya bantuan dari badan usaha milik swasta yang berinvestasi disekitar perkampungan nelayan, dan (3) kompetensi para guru yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik umumnya dari tamatan lulusan madrasah Aliyah dengan niat keikhlasan beramal, meskipun jika ada honorarium tidak sebanding dengan pekerjaan sebagai pendidik.

Madrasah Tarbiyah Islamiyah perkampungan nelayan Kuala Tungkal satu diantara madrasah yang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang biasa umumnya digunakan di madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, misalnya menggunakan kitab-kitab arab melayu, menghafal ayat-ayat dalam surah pendek, dan tidak menggunakan kurikulum nasional yang berlaku di Sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya, kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum semi pondok pesantren, meskipun tidak semua menggunakan model pesantren. Hasil wawancara salah seorang uztaj bernama AB mengungkapkan sebagai berikut:

“ Kurikulum yang digunakan di madrasah Tarbiyah Islamiyah berpedoman pada kurikulum pondok pesantren yang umumnya digunakan pesantren-pesantren yang ada di Kuala Tungkal, meskipun tidak semuanya materi pelajaran menggunakan kurikulum pondok pesantren. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab yang digunakan guru (uztaj/uztajah), misalnya: kitab fiqh dalam bahasa arab melayu, kitab tauhid dalam bahasa arab melayu, dan kitab matan jurmiah, ilmu sharaf Tasyriful wadhi’ dan lain-lain. (Wawancara, Sabtu tanggal 19 September 2017. Pukul 16.30 Wib).

Kepemimpinan madrasah Tarbiyah Islamiyah perkampungan nelayan Kuala Tungkal mengacu pada tradisi/model kepemimpinan pesantren umumnya yaitu menempatkan guru (uztaj) yang menguasai pengetahuan agama yang mendalam dan lebih senior dari segi usia maupun pengalaman mengajar. Meskipun model/tradisi ini telah berlangsung cukup lama dari satu kepemimpinan ke pimpinan lainnya, namun aspek pemberdayaan madrasah belum membawa perubahan yang berarti. Misalnya: pemberdayaan guru-guru (uztaj/uztajah) yang belum dimaksimalkan dengan baik, meskipun diantara guru-guru (uztaj/uztajah) memiliki keahlian/keterampilan lain selain mengajar, seperti: keterampilan menulis kaligrafi, berjanji nazhom, atau keterampilan membaca ayat-ayat al-Qur’an. Mestinya, keahlian para guru-guru (uztaj/uztajah) menjadi daya tarik madrasah Tarbiyah Islamiyah untuk menggait dan menarik anak-anak untuk masuk ke madrasah.

Hasil temuan penelitian menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi madrasah belum menjadikan tempat yang menjadi favorit (senang) untuk belajar menuntut ilmu diantaranya, yaitu sebagai berikut, yaitu: (1) Pandangan (persepsi) orang tua tentang madrasah. Umumnya para orang tua beranggapan sekolah di SD lebih memberikan kemudahan terutama dari segi biaya, karena di sekolah dasar anak-anak tinggal masuk dan bebas biaya, bahkan sekolah dapat bantuan dari pemerintah, (2) sosialisasi dan promosi madrasah.

Meski pun madrasah sudah ada sebelum sekolah dasar didirikan, ketertarikan anak-anak untuk belajar dimadrasah terasa belum menjadi kebanggaan bagi para orang tua diperkampungan nelayan Kuala Tungkal, di samping persepsi orang tua yang masih memandang belajar di madrasah sebagai tempat yang belum menjamin masa depan. Pendekatan sosialisasi dan promosi madrasah sebagai tempat yang baik untuk menimba ilmu, tidak hanya ilmu keduniaan tetapi juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah dilakukan, pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan yang berkaitan “Pemberdayaan madrasah di perkampungan nelayan Suku Laut Kuala Tungkal, aspek-aspek yang melatarbelakangi baik secara sosiologis maupun historis, aspek keilmuan pendidikan, aspek pendekatan Agama.

Pemberdayaan madrasah yang konprehensif pada akhirnya akan melahirkan lembaga pendidikan dan sosok lembaga yang memiliki karakter yang kuat dan dibanggakan, tidak saja bagi kepemimpinan Kepala Madrasah yang bersangkutan, tetapi juga membawa suasana pencerahan di tengah terpaan dan sorotan tajam yang luar biasa bagi keberadaan madrasah di Indonesia, khususnya dan perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia umumnya, yang hari ini masih diliputi segudang problem begitu kompleksitas.

Melihat sejarah lahirnya madrasah, dari masyarakat untuk masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat, tak dapat dimungkiri kehadirannya telah memberikan nilai kontribusi nyata bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak bangsa. Masyarakat memberikan andil besar dalam mendorong lahirnya berbagai kelembagaan pendidikan di nusantara ini, hal ini terbukti dengan adanya pendidikan ala pesantren yang telah lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka. Suharto sebagaimana dikutip Azra (2005:329) menyebutkan, dikalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di Indonesia, mulai dari *rangrang*, *dayah*, *meunasah*, (Aceh), *surau* (Minangkabau), *pesantren* (Jawa), *bustanul athfal*, *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat muslim. Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.

Madrasah merupakan isim makan dari kata “*darasa*” yang berarti “belajar”. Jadi madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa (umat Islam). Dalam sejarah pendidikan Islam, makna dari madrasah tersebut memegang peranan penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sebab, pemakaian istilah madrasah secara definitif baru muncul pada abad ke-11. Penjelasan istilah madrasah merupakan transformasi dari mesjid ke madrasah, ada beberapa teori yang berkembang seputar proses transformasi tersebut antara lain George Makdis menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari mesjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung melalui tiga tahap: *Pertama*, tahap mesjid. *Kedua*, masjid-khan; dan *Ketiga*, tahap madrasah (Nizar, 2009:120).

Selanjutnya Nizar (2009: 120-121) mengemukakan bahwa, dilihat dari aspek historis, eksistensi madrasah baik pada abad klasik XXI (saat ini) tidak jauh berbeda. Dinamika madrasah yang tumbuh dan berakar dari kultur masyarakat setempat tidak akan luput dari dinamika dan peradaban masyarakat (*change of society*). Tidak salah kalau banyak mensinyalir bahwa madrasah tumbuh dan berkembang dari bawah ke atas. Kenyataan ini, sering kali kita menemukan madrasah yang mati, namun tetap eksis dan sejalan dengan kehidupan masyarakat setempat, meskipun kehidupannya sangat stagnan. Menurut ahli sejarah berbeda pendapat tentang madrasah yang berdiri, walaupun ada beberapa pendapat yang cukup representatif. Ali al-Jumbulati sebagaimana dikutip Nizar (2009: 121) mengungkapkan bahwa sebelum abad ke-10 dikatakan madrasah yang pertama adalah al-Baihaqiyah di kota Nisabur. Disebut sebagai al-Baihaqiyah karena ia didirikan oleh Abu Hasan al-Baihaqi (w.414). Pendapat ini diperkuat hasil penelitian Richard Bullir (1972) yang menyatakan bahwa dua abad sebelum berdirinya Madrasah Nizamiyah telah berdiri madrasah di Nisabur, yaitu madrasah Miyan Dahiya yang mengajarkan Fiqih Maliki. Abd. Al-'Al (1977) menjelaskan bahwa pada masa Sulthan Mahmud al-Gasnawi (998-1030) telah berdiri madrasah Sa'diyah. Demikian juga Naji Ma'ruf (1973) berpendapat bahwa madrasah pertama telah didirikan 165 tahun sebelum Khurasan. Ia mengemukakan bukti di Tarekh al-Bukhari dijelaskan bahwa Ismail ibn Ahmad Asad (w.295) yang dikunjungi oleh para pelajar mereka. Syalabi dalam (Mehdi,2003) sebagaimana dikutip Nizar (2009) mengemukakan bahwa madrasah Perguruan Tinggi yang pertama dibangun oleh Al-Juwaini (w. 475/1063) dan Abu Qasim al-Qusyairi (w. 465/1072) adalah di Nisabur.

Madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan Islam merupakan fondasi sekaligus prototipe dari kelanjutan sistem pendidikan Islam (madrasah) saat ini. Madrasah Nizam al-Muluk, misalnya adalah madrasah yang paling populer dikalangan ahli sejarah dan kalangan masyarakat Islam. Didirikan oleh Nizam al-Muluk seorang Perdana Menteri Dinasti Salajikah pada masa pemerintahan Sulthan Al-Arsham dan Sulthan Maliksyah pada tahun ke-5 H/11 M yang diresmikan 459 H/1067 M.

Pendapat Shaleh (2005: 11-12) mengemukakan bahwa, madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke-11 atau 12 M, atau abad ke-5-6 H, dikenal adanya madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam Al- Muluk seorang Wazir dari Dinasti Saljuk. Pendirian madrasah telah memperkaya khasanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam, karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan tradisional yang diselenggarakan di mesjdi-mesjid dan *dar al-hikmah*. Di Timur Tengah institusi madrasah berkembang untuk menyelenggarakan pendidikan keislaman tingkat lanjut (*advance/tinggi*), yaitu melayani mereka yang masih haus ilmu sesudah sekian lama menimbanya dengan belajar di msejid-mesjid dan/atau *dar al-khuttab*. Dengan demikian, pertumbuhan madrasah sepenuhnya merupakan perkembangan lanjut dan alamiah dari dinamika internal yang tumbuh dari dalam masyarakat Islam sendiri.

Menurut Shaleh (2005: 12), istilah madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal-awal abad ke-20. Berbeda dengan di Timur Tengah dimana madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat lanjut, sebutan madrasah di Indonesia mengacu kepada lembaga pendidikan

yang memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan menengah. Perkembangannya diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan modern barat. Dengan perkataan lain, tumbuhnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (*indegeus cultural/tradisional*) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan Barat (*modern*) di sisi lain.

Kehadiran madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masuknya agama Islam. Islam datang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, di syiarkan secara damai, tanpa paksaan, kekerasan dan perang. Proses penyebaran Islam dilakukan oleh pemuka agama yang telah mendalami Islam baik tatkala mereka belajar di Mekkah maupun mereka para Wali yang telah mengembangkan Islam di Nusantara ini. Kehadiran para Wali-wali Allah yang menguasai ilmu agama tersebut menjadi suluh dan penerang bagi penduduk untuk mempelajari Islam secara benar. Penyebaran Islam secara damai dan tanpa paksaan menjadi sentuhan dan keyakinan yang kuat oleh masyarakat untuk mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan biasanya penduduk atau masyarakat mempelajari Islam melalui membaca, menulis dan mengerjakan tata cara shalat di rumah-rumah, dilanggar, di mesjid-mesjid dan berkembang kemudian menjadi Pondok Pesantren.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang statusnya berada dan bernaung di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, madrasah-madrasah tersebut telah ada bahkan menjadi awal cikal bakal lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam sejenis lainnya di Indonesia. Menurut Muhaimin, (2009: 77) salah satu corak pengembangan pendidikan sebelum Indonesia merdeka ialah bercorak *isolative-tradisonal*, dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbau barat (*colonial*) dan terhambatnya pengaruh pemikiran-pemikiran dalam Islam untuk masuk ke dalamnya, sebagaimana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam adalah salah satu bentuk lain dari madrasah, jauh lebih dulu hadir sebagai wadah bagi umat Islam untuk belajar dan sebagai tempat untuk mendalami agama (Islam).

Keberadaan madrasah yang tersebar di penjuru bumi Nusantara ini, merupakan hasil insiasi warga masyarakat yang berupaya agar anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak dan mampu memberikan layanan maksimal terhadap pemenuhan pendidikan mereka, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan bangsanya (Nizar, 2009). Akan tetapi tidak semua madrasah-madrasah yang ada di seluruh penjuru bumi Nusantara ini, telah dan bahkan mampu memberikan layanan dan kebutuhan yang menjadi harapan anak-anak, orang tua maupun stakeholder lainnya.

Data statistik Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, mencatat ada terdapat 72.726 lembaga madrasah. Dari jumlah 72.726 madrasah, hanya 9 persen yang dikelola pemerintah, sedangkan 91 persen dikelola masyarakat melalui yayasan atau melalui swadaya masyarakat. Dari 91 persen madrasah yang dikelola masyarakat, terus berkembang secara dinamis seiring dengan kebutuhan di masyarakat. Berbagai

kebijakan yang dimiliki dengan dikeluarkannya PMA nomor 10 tahun 2010 Direktorat Pendidikan Madrasah sebagai payung hukum pengelola madrasah mesti berbasis analisis dinamika di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi faktual historis sosiologis, madrasah adalah *community based institution*. Hal ini searah dengan kebijakan dan amanah Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 10 tahun 2010 tentang Direktorat Pendidikan Madrasah (Ditpenma) untuk menjalankan tugas tidak boleh keluar dari sisi faktual historis dan sosiologis madrasah. Artinya, Direktorat Pendidikan Madrasah harus senantiasa melihat dan *inline* dengan dinamika yang berkembang. Diversifikasi atau penganekaragaman madrasah menjadi kata kunci untuk mengembangkan madrasah secara simultan (Menteri Kemenag RI, Media Indonesia. Jum'at, 5 Desember 2014).

Menurut Shaleh (2005:159) mengemukakan bahwa, keberadaan madrasah merupakan wujud dari kesadaran teolog umat Islam guna menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Semangat masyarakat untuk mendirikan madrasah biasanya akan selalu bergantung dengan tingkat kesadaran teologis masyarakat pendukungnya. Semangat sebagai *khalifah fil Ardh* dan kebutuhan untuk memperdaam dan mengamalkan jaran agamanya (*tafaquh fiddin*). Atas dasar kesadaran teologis tersebut umat Islam merasa memiliki beban wajib untuk mewujudkan pendidikan Islam yang baik serta menjaga kelestariannya. Selanjutnya kata Shaleh (2005) maju mundurnya madrasah akan bergantung kepada seberapa besar kesadaran umat Islam mendukung madrasah dapat memelihara keberlangsungannya. Lembaga tersebut selain menjadi kekuatan penyebaran Islam juga berfungsi sebagai lembaga perguruan rakyat dalam rentang waktu lama telah melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keadaan demikian walaupun di alam penjajahan Belanda, madrasa terus bertahan dan semakin kokoh, karena ditunjang oleh kekuatan besar, yaitu kesadaran teologis seperti disebutkan di atas pada satu sisi serta perhatian para Sulthan-Sulthan pada sisi yang lain.

Di dalam era reformasi sekarang ini, potensi daerah menjadi tumpuan dalam pembangunan, maka posisi madrasah dalam kesejarahannya adalah milik masyarakat harus dikembalikan seperti semula. Kementerian Agama harus berfungsi memberikan pelayanan, supervisi, pengendalian, dan menjalankan kualitas kontrol, khususnya dalam pengembangan standar nasional pendidikan madrasah dan ciri khas keislaman dalam kehidupan yang serba mengglobal dan dunia tanpa batas. Aparat kementerian Agama di bidang pendidikan harus lebih banyak berfungsi sebagai pengendali dan pelayanan supervisi. Dengan demikian, madrasah tidak harus tampil dalam bentuk yang uniform dan tunggal untuk seluruh wilayah Indonesia. Madrasah perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sejalan dengan aspirasi masyarakat lingkungannya. Kualitas hasil pendidikan madrasah akan dinilai oleh masyarakat. Demikian pula hidup matinya madrasah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri (Shaleh, 2005: 163)

Posisi dan kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional diakui secara egaliter sebagai salah satu lembaga pendidikan yang turut serta berkontribusi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, hal ini tertuang dalam pengumuman BPKNIP tertanggal 22 Desember 1945 (Berita RRI tahun II No.4 dan 5 halaman 20 kolom 1) menganjurkan agar: “ dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya agar pengajaran dan pendidikan di langgar-langgar dan di madrasah berjalan terus dan dipercepat”. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1945, BPKNIP

menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Setelah berdirinya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946, di samping bertugas mengurus masalah-masalah agama, juga tugas pokoknya mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum, dan masalah pendidikan di sekolah agama (madrasah dan pondok pesantren). Tugas pertama yang dijalankan adalah memberikan perbantuan kepada madrasah, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1946 dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama nomor 1142/Bhg A (Pengajaran) tanggal 2-12-1946 dan nomor 1285/K.J (Agama) tanggal 12-12-1946 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1947.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 tentang struktur Organisasi Departemen Agama dan Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2002 tentang kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja organisasi vertikal Departemen Agama. Adapun ruang lingkup pembinaan madrasah antara lain, meliputi: (1) mewujudkan ciri khas dan identitas madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengembangkan kehidupan keberagamaan yang sarwa ibadah melalui program kegiatan antara sekolah, masyarakat, dan keluarga, (2) mengupayakan kemandirian manajemen dan pembiayaan pendidikan yang didukung oleh swadaya masyarakat.

Strategi pembinaan madrasah oleh Departemen Agama, antara lain melalui program pencerahan madrasah, memiliki masa depan, madrasah yang berkualitas menjanjikan dan memasuki lapangan kerja dan melanjutkan sekolah, meliputi: (1) pembangunan madrasah model (sebagai agen perubahan) yang mengajak madrasah sekitarnya untuk bersama-sama menjadi madrasah berkualitas. Yang dilengkapi fasilitas, seperti perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, komputer, buku bahan ajar, dan alat peraga pendidikan, (2) madrasah terpadu, yaitu keterpaduan antara madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ditempatkan dalam satu lokasi. Keterpaduan dalam rangka keterpaduan administrasi, pengembangan kurikulum, pendayagunaan kelembagaan, penggunaan sarana dan fasilitas, serta pembiayaan pendidikan, dan (3) pemberdayaan (*empowering*) madrasah dimaksudkan sebagai upaya agar madrasah tetap survive dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Strategi pemberdayaan di maksud misalnya, program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Upaya pemberdayaan madrasah dalam rangka *school based management*, serta upaya mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka tanggung jawab oleh orang tua dan masyarakat (*community based management*), di samping madrasah diharapkan pula agar merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga mewujudkan kondisi dinamis yang mampu menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan pendidikan di madrasah, maka keterlibatan masyarakat menjadi penting, mengingat *stakeholder* pendidikan adalah para orang tua yang memiliki anak. Oleh karena peran serta masyarakat dalam pendidikan pemilik utama madrasah, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Bab XV Pasal 54 butir 1 dan 2 dengan tegas dinyatakan, bahwa: (1) peran

serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perserangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan madrasah yang konprehensif pada akhirnya akan melahirkan lembaga pendidikan dan sosok lembaga yang memiliki karakter yang kuat dan dibanggakan, tidak saja bagi kepemimpinan kepala madrasah yang bersangkutan, tetapi juga membawa suasana pencerahan di tengah terpaan dan sorotan tajam yang luar biasa bagi keberadaan madrasah di Indonesia, khususnya dan perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia umumnya, yang hari ini masih diliputi segudang problem begitu kompleksitas.

Keberadaan madrasah di Perkampungan Nelayan Suku Laut Kuala Tungkal belum menjadikan tempat di hati masyarakat. Meskipun pengelola telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pendekatan terutama anak-anak tertarik untuk belajar di madrasah. Disadari pengelolaan madrasah yang masih lemah, kepedulian masyarakat yang belum menjadikan madrasah sebagai tempat belajar, lingkungan sekitar madrasah dan fasilitas yang minim, keberpihakan dan pemangku kebijakan yang belum memiliki komitmen menjadikan pemberdayaan madrasah belum berjalan sebagaimana diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachaman Shaleh. (2005). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azyumardi Azra. (2000). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Adrian B. Lopian. (2009). *Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bogdan, Robert E. dan Taylor J. Steven. (1993). *Kualitatif Dasar - Dasar Penelitian. (terjemahan A. Khosim Afandi)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bogdan, Robert E. dan Bikland, Knopp.S. (1982). *Qualitative Research For Education*. Bostor : Allyn an Bacon Inc.
- Berns, Robert. M. (2007). *Child, Family, School, Community Socialization and Support*. New York: Thomson Learning, Inc.
- Denzin, Norman. K & Lincoln, Yvonna.S. (1994). *Handbook of Qualitatif Research*. New York: Sage Publication, Inc.
- Feinberg, Walter. (1986). *School and Society*. New York: Teacher College Press.
- Francois. Robert Zacot. (2008). *Orang Bajo Suku Pengembara Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Hasan Langgulang. (1986). *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Al- Husna.
- Koentjaraningrat & Donald K. Emmerson. (1985). *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gremedia.
- Lexy, J. Moleong. (1991). *Metodelogy Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lincoln, Y. Vonna and Guba, Edger. G. (1985). *Naturalistic Inguiry*. Beverly Hill Sage Publications.
- M. Syahran, dkk. (2013). The Implementation of Five-I Ideology in Learning Process (Study at Elementary School of Fisherman Rural Area of Bajau Ethnic Kuala Tungkal, Jambi Province, Indonesia). [www.ijern](http://www.ijern.com) (*International Journal of Education and Research*) .ISSN: 2201-6333/ISSN: 2201-6740 (Online), Vol.1 No. 7 July 2013.
- _____, (2013). *Keberadaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Jambi*, (Laporan Hasil Penelitian tidak dipublikasikan) DIPA IAIN STS Jambi tahun 2013.
- _____, (2014). The Professionalism of Certified Teachers in Intructional Process: A Case Study of Secondary School Teachers in Jambi. [www.al-ta'lim](http://www.al-ta'lim.com) ISSN: 1410-7546 e-ISSN: 2355-7893. Vol. 21 Number 2. July 2014. Padang.
- Mubyarto Dkk. (1984). *Nelayan dan kemiskinan*. Jakarta: Rajawali
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993) *Pemikiran pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Novak, Joseph D. (1986). *A Theory of Education*. London: Cornell University Press..
- Prosiding Seminar Internasional, (2015) *Kesiapan Pendidikan Islam Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Jambi: Penerbit Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Jambi. **ISBN 978-602-73772-0-2**
- Samsul Nizar. (2009). *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah samai Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subiyantoro. (2003). Pengembangan Model Pendidikan Nilai Humanis-Relegius Berbasis Kultul Madrasah, dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. ISSN 0216-1370, November 2013. XXXII, No. 3
- Spradley, James. P. (1980) *Participan Observation*. United state of America: Rinehart and winston.
- _____. (1997). *Metode Etnografi (terjemahan Misbah Elizabeth)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Toto Suharto.(2005). Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat, dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. ISSN: 0216-1370, November 2005. XXIV, No. 3. (Hal: 329).
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Penerbit Harvarindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005* tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005* tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE. DJ.I/PP.00/05/2008* tentang Akreditasi Madrasah.
- Van Scotter, D. Richard, Kraft, J. Richard, Haas, D. John. (1979). *Foundations of Education Social Perspectives*. United States of America: Englewood Cliffs.
- Winarno Surakhmad, (2009). *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Zaide, Juan. G. F, (1951). *Studies in Moro History, Law and Religion*. Singapura: Publishing

BIODATA PENULIS



Dr.H.M. Syahrani Jailani, M. Pd. Lahir di Kuala Tungkal (Jambi), 18 Agustus 1969. Pangkat/golongan Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (IV/c) NIDN 2018086902 adalah Alumni S3 Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang 2013. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam (2003-2007), pernah menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab & Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2015-2017). Anggota Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Jambi 2007-20012 & 20013-2018. Pengalaman kaderisasi di HMI, Maperca 1988, Basic Training 1989, LK II 1989 dan senior coursus. Ketum HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1990/1991, Ketum HMI Korkom IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1991/1992. Kabid PAO HMI Cabang Jambi 1992/1993. Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Cabang Jambi 1992/1993. Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Pusdiklatnas) Manajemen Modern Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 1993 Jakarta. Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Pelatihan Kahmi Wilayah Jambi 20016-2021. Dan Wakil Sekretaris Pengurus ICMI Wilayah Provinsi Jambi 20017-2022

IMPLIKASI INDUSTRI TERHADAP ADAPTASI PERAN PERGURUAN TINGGI

Abdul Rahman, PhD

Program Studi Sosiologi-Antropologi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
abdulrahman18542@gmail.com

Budi Santosa dan Imam Mujahid

Program Studi Bimbingan Konseling IslamFUD
Institut Agama Islam Negeri Surakarta- bsantosa23@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan industri, khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, teknologi berjalan begitu cepat, menuntut perubahan peran dan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia. Core business (urusan utama) perguruan tinggi berubah, substansi maupun fungsinya dalam dunia layanan jasa pendidikan. Misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program nasional maupun local pembangunan pendidikan tinggi juga mengalami penyesuaian mendasar. Peneliti, Pengambil kebijakan dan praktisi perguruan tinggi mendiskusikan beberapa pilihan tentang bentuk, jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Ada empat bentuk perguruan tinggi lagi trending saat ini, yaitu: teaching university, research university, entrepreneurial university, dan production university. Ke empat bentuk perguruan tinggi di atas berangkat dari kerangka konsep System Triple Helix dan Outcome Base Education.

Kata kunci: *Teaching university, research university, entrepreneurial university, production university, dan Triple Helix System.*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi punya kontribusi besar dalam pembangunan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengambil kebijakan nasional dan praktisi pendidikan menaruh perhatian terhadap pendidikan tinggi. Perdebatan tentang keberadaan dan peran perguruan tinggi masih dihiasi wacana, belum menjadi paradigma dan kerangka pemikiran utuh dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga bangsa.

Mengapa perguruan tinggi perlu adaptasi sejalan akselerasi perubahan industri? Bagaimana perguruan tinggi mengoptimalkan kontribusi di era transformasi industri? Bagaimana pendidikan, penelitian, pengabdian, dan inovasi dalam dunia digital sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap bermanfaat untuk semua? Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas bisa berbeda dari masa ke masa. Yang pasti, perubahan industri dan teknologi mendukung perguruan tinggi, universitas, Institut, Sekolah

Tinggi, Akademi, Politeknik atau Akademi komunitas perlu melakukan adaptasi dan adopsi peran baru, baik akademik maupun non akademik.

Saat ini, di Indonesia terdapat 4720 perguruan tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengidentifikasi tiga prioritas persoalan: mutu rendah, akses terbatas, inovasi teknologi lambat, dan tata kelola perguruan tinggi yang belum berjalan secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, secara internal kapasitas kelembagaan, kinerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi teknologi belum berjalan seperti amanat Undang-Undang Perguruan Tinggi no 12 Tahun 2012. Secara eksternal, lembaga akreditasi dan organisasi sertifikasi internasional, termasuk Asean University Network on Quality Assurance (AUN-QA) yang berbasis di Manila Filipina atau Accreditation Board For Engineering and Technology (ABET) yang berbasis di Amerika Serikat, belum banyak memberikan pengakuan mutu program studi maupun institusi perguruan tinggi, negeri maupun swasta, di Indonesia (AUN-QA, 2016; ABET, 2019).

Makalah ini berusaha merumuskan gagasan tentang peran, strategi, kebijakan dan program peningkatan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia. Pengelola perguruan tinggi diharapkan dapat menjabarkan gagasan ini kedalam statuta, kebijakan, petajalan (roadmap) pengembangan perguruan tinggi masing-masing.

1. Pendidikan Berbasis Outcome (PBO)

PEMBAHASAN

Pengaruh teknologi terhadap industri telah mendorong berkembang Pendidikan Berbasis Outcome (PBO) yang mengutamakan alumni program studi dari segala bentuk, jenis, program, dan tingkatan yang dikelola oleh pendidikan tinggi, dengan dua hal penting dan terukur: certified competency dan pekerjaan/vokasi/profesi yang dibutuhkan langsung oleh aneka industri mendatang. Melalui program studi, setiap perguruan tinggi wajib merumuskan jawaban atas dua pertanyaan berikut

- a. Kompetensi apa saja yang dikuasai oleh mahasiswa dan diakui oleh pengguna lulusan (dunia usaha dan industri) ketika mahasiswa lulus/tamat kuliah?
- b. Pekerjaan/profesi apa saja, yang perguruan tinggi bisa menjamin, bahwa alumni dapat menikmati kuliah atau bekerja profesional dalam kehidupan mereka, setelah 4-6 tahun tamat kuliah?

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 menjadi salah satu ‘enabling factor’ kepada pimpinan perguruan tinggi dan kepala program studi dalam berusaha menemukan jawabannya. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (PP 13/2015 tentang SNP) yang kemudian dilaksanakan dengan melalui akreditasi institusi dan program studi memberikan substansi mutu, mendorong upaya sistemik, terencana, dan progresif melaksanakan pembelajaran, penelitian, pengabdian dan inovasi secara terpadu, terencana dan progresif di setiap perguruan tinggi.

Kompetensi akademik dan ketrampilan vokasi alumni akan memanfaatkan teknologi informasi, yang saat ini mengalami perkembangan sangat pesat, semakin jelas

dampaknya pada dunia pelayanan pembelajaran, akademik maupun non akademik di Indonesia. Semakin terasa kuat dampak teknologi dan industri terhadap kompetensi dan vokasi alumni perguruan tinggi yang secara faktual masih dikelola secara konvensional di Indonesia.

Dosen adalah pelaku utama dalam penyiapan kualifikasi, kompetensi, dan vokasi alumni. Setelah terpenuhinya kualifikasi, S2 – S3, lengkap dengan sertifikasi dan tunjangan sertifikasi, banyak dosen perlu training ulang agar mampu mengampu mata kuliah secara digital. Setelah itu, eforia ICT bukan hanya harapan, mahasiswa menikmati pembelajaran, mencintai karya ilmiah, dan melibatkan di berinovasi dengan para dosen. Bahkan, dosen sebagai pendidik dan peneliti mampu menjadi pioneer budaya inovasi pembelajaran yang membuat mahasiswa krasan membaca dan menulis di perpustakaan, riset di laboratorium, atau berkreasi di workshop kampus.

Dalam situasi seperti ini, pilihan yang tersedia antara lain: adaptasi dan adopsi ‘doable best practices and lessons learnt’ dari pengalaman perguruan tinggi yang telah maju, termasuk 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia, menurut penilaian Kemenristek Dikti. Kecenderungan pasar yang semakin terbuka menuntut perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu bersaing. Global Competitiveness Index-WEF terbaru (Muhamad Dimiyati, 2019:8) menunjukkan data menarik: daya saing Indonesia naik dari peringkat 37 dari 140 negara tahun 2015 menjadi peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018. Kenaikan ini belum memuaskan bagi pengamat pendidikan dan pembangunan Indonesia. Tidak salah bila Wibisono (1999) menyatakan bahwa dilihat dari mutu lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan degradasi sehingga alumninya kurang berhasil dalam meniti karir: melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja profesional di perusahaan, termasuk pemerintahan, atau startup untuk wirausaha. Dengan demikian, ‘outcome based education’ menjadi keharusan bagi setiap program studi maupun institusi.

Kualifikasi, kompetensi, dan profesi/vokasi tidak lagi hanya dirancang untuk kebutuhan local, provinsial atau nasional. Era teknologi informasi yang sedang kita nikmati saat ini membuka luas kepada alumni menentukan pendidikan lanjut atau bekerja dalam maupun luar negeri. Dengan kompetensi dan vokasi yang jelas mutunya, mahasiswa dan alumni diharapkan bisa menghadapi disrupsi pekerjaan ditengah kaburnya batas-batas geografis, baik secara regional maupun internasional, dalam kehidupan masyarakat global masa depan.

Pemenuhan standard terkait kelengkapan dan fungsinya sarana prasarana, pendanaan, manajemen dan kepemimpinan, sumberdaya manusia, penelitian, dan lainnya akan membantu perguruan tinggi di Indonesia dalam merevisi urusan utama (core business), reposisi peran dan fungsi, reorganisasi kelembagaan, perbaikan kualitas berkelanjutan, dan peningkatan daya saing penelitian dan inovasi keilmuan.

Tatakelola perguruan tinggi berbasis digital perlu dilakukan bertahap untuk mengantisipasi ditinggalkannya layanan kuliah yang tradisional. Teknologi berhasil membangun ‘social trust’ dalam dunia industri. Aplikasi digital dalam layanan perkuliahan di perguruan tinggi giliran berikutnya. Situasi demikian pada satu sisi merupakan ancaman yang nyata, khususnya apabila perguruan tinggi di Indonesia tidak mampu mengadaptasi dan mengadopsi pendidikan berbasis outcome.

Koneksi jaringan internal – universitas, fakultas, program studi – dan mudahnya akses jaringan informasi dan data antar perguruan tinggi di Indonesia, ASEAN, ASIA, Amerika, Eropa, Afrika, Australia membuka kesempatan kolaborasi dan kemitraan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan inovasi untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Kelambanan perguruan tinggi merespon dampak teknologi industri menjadi ‘wake-call’ bagi pimpinan perguruan tinggi, terutama dosen dan alumni, supaya cepat dan tepat (1) melihat kapasitas kelembagaan, kesiapan sumber daya dan dana, (2) meninggalkan egosentrisme keilmuan maupun sektoralisme tatakelola layanan pembelajaran, (3) menjadikan momentum emas bagi perguruan tinggi memilih prioritas kebutuhan, menentukan strategi, membangun roadmap, perumusan kebijakan dan merencanakan program pembangunan jangka pendek dan menengah.

PERAN PENDIDIKAN TINGGI

Pendidikan Berbasis Outcome (PBO) membantu pimpinan perguruan tinggi, dibantu oleh pimpinan Fakultas dan program studi dalam merumuskan kembali peran dan fungsi perguruan tinggi di era industri saat ini. Berikut ini akan didiskusikan beberapa pilihan dalam tata kelola perguruan tinggi.

1. *Teaching University*

Secara teoritis, ‘knowledge is power.’ Pengetahuan adalah kekuatan. Wajar bila transfer ilmu pengetahuan, pembentukan sikap dewasa, dan ketrampilan ala Bloom masih berlaku hingga kini. Membekali ilmu pengetahuan kepada mahasiswa adalah peran utama perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarahnya, terutama di dunia barat, perguruan tinggi memiliki peran utama mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang ahli dan terampil sesuai kebutuhan lapangan kerja, di lingkungan pemerintah maupun swasta, untuk kehidupan yang lebih baik. Kemenristek-Dikti sangat mendukung perbaikan mutu pembelajaran dan penelitian. Bahkan, otonomi perguruan tinggi dengan nafas kemandirian tata kelola keuangan, diharapkan berperan aktif mempercepat adaptasi perguruan tinggi dalam produksi tenaga kerja terdidik, baik akademik maupun vokasional/terapan, sekaligus adopsi perbaikan mutu dan percepatan inovasi teknologi untuk kemaslahatan masyarakat.

Secara nyata, peran pendidikan bagi perguruan tinggi di Indonesia terasa masih didominasi hingga saat ini. Sehingga kebijakan, program dan pendanaan terhadap kegiatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, masih mengutamakan pelayanan jasa pendidikan. Mayoritas dosen menggunakan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk kegiatan perkuliahan yang sangat konvensional. Dengan semakin terpenuhinya kualifikasi “master” dikalangan dosen, secara mandiri maupun kolaborasi, para dosen sebaiknya bisa meningkatkan peran sebagai penulis buku, baik bahan ajar maupun referensi, keduanya menjadi indikator mutu pendidikan dan rekognisi professional bagi dosen.

Dengan angka partisipasi pendidikan tinggi kurang lebih sebesar 36%, teaching university masih memberikan kontribusi besar untuk perluasan akses layanan pendidikan tinggi. Bonus demografi berguna bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat bila mereka terdidik, minimal akademik atau terapan. Kecenderungan

sekarang hampir setiap perguruan tinggi melakukan wisuda sarjana dan diploma sebanyak 3-4 kali setahun dengan jumlah wisudawan seribuan per angkatan. Perluasan kesempatan kuliah dan akses lebih mudah di setiap kota/kabupaten. Orang tua dan keluarga menyambut baik lahirnya perguruan tinggi di setiap daerah. Dengan asumsi dan keyakinan bahwa kuliah untuk semua atau 'undergraduate for all' maka peran utama dan 'core business' teaching university adalah memberikan layanan pendidikan sarjana dan diploma terapan yang bermutu dan sebanyak-banyaknya.

2. *Research University*

Dengan penduduk 263 juta hidup di 17 ribu pulau hidup dengan 400 lebih Bahasa daerah, Indonesia kaya keduanya, sumberdaya alam dan kebudayaan. Riset pengembangan teknologi mutakhir diharapkan membantu eksplorasi SDA untuk percepatan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat. Namun riset dan pengembangan bidang kedirgantaraan, maritime, dan robot masih jauh dari harapan. Akibatnya, alokasi anggaran, yang mayoritas lebih diserap oleh ilmu pengetahuan alam daripada ilmu sosial budaya, tidak banyak kemajuan dari hasil riset berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics kalah saing dengan negara tetangga. Sebenarnya, kekayaan bidang kebudayaan dan seni sangat prospektif. Riset dan pengembangan bidang UMKM, yang mayoritas penerima manfaatnya golongan ekonomi menengah kebawah, khususnya warga pedesaan, perlu dukungan kebijakan dan program serta pendanaan yang lebih memadai untuk sektor pariwisata, transportasi, kesenian, dan produk maupun jasa berorientasi ekspor.

Penelitian adalah salah satu peran utama dan core business perguruan tinggi. Universitas berbasis penelitian ilmiah akan mampu mensinergikan pendidikan dan penelitian secara terpadu, hasil penelitian untuk perbaikan mutu pembelajaran; sebaliknya proses pembelajaran juga menjadi wahana penelitian yang berguna bagi mahasiswa. Penelitian diharapkan melahirkan ilmu pengetahuan baru dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. 'Trending topics' yang digadag-gadag oleh peneliti, pengambil kebijakan, maupun praktisi pendidikan tinggi untuk mencapai keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat, tanpa diskriminasi karena status sosial, jender, suku, dan keyakinan agamanya.

Inisiatif perubahan peran dari pendidikan ke penelitian masih berjalan lamban karena kebiasaan menulis, baik buku dan artikel, sebagai pundi keilmuan belum membudaya. Selain mengajar, pimpinan perguruan tinggi sedang memperluas akses program dan dana agar dosen dan mahasiswa lebih semangat melakukan penelitian, penulisan karya ilmiah, diseminasi model pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan kepada masyarakat. Skema pendanaan penelitian, insentif karya ilmiah, publikasi jurnal bereputasi nasional – internasional menjadi budaya baru di lingkungan masyarakat kampus dewasa ini. Di damping oleh peneliti dan mentor yang berpengalaman, penelitian sosial diharapkan dapat melahirkan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Perkembangan jumlah dan kualitas penelitian membuka kesempatan kerjasama penelitian, penulisan buku ajar, buku referensi, jurnal ilmiah dalam dua decade ini. Dengan jumlah 4 ribu lebih perguruan tinggi, dan insentif pemerintah terhadap profesi peneliti, Indonesia akan mampu menjadi negara terdepan di ASEAN bila produktivitas penelitian dan karya ilmiah ikutan lainnya terpublikasi internasional.

Pertumbuhan laporan penelitian menjadi kabar baik bagi Indonesia dalam pengumpulan ilmu pengetahuan di ASEAN. Adopsi Research University dalam tata kelola perguruan tinggi saat ini telah dan akan terus mendukung dosen menjadi peneliti yang professional berkelas internasional. Disamping menjalankan tugas pendidikan, dosen juga mampu shadowing, peneliti berpengalaman melatih peneliti pemula, melakukan mentoring penelitian dengan variasi skema pendanaan, membangun kolaborasi dosen-mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang bersifat local, regional maupun global, dan berbagi data untuk penulisan skripsi, thesis atau disertasi. Research University berperan ganda, pendidikan dan penelitian, sehingga perguruan tinggi tersebut memiliki skop kerja lebih luas dan peran satu tingkatan lebih tinggi daripada teaching university.

3. *Entrepreneurial University*

Abad 20 munculnya istilah '*second academic revolution.*' Intinya saat itu ada, tumbuh dan berkembang konsep '*entrepreneurial university*' (lihat Etzkowitz, Webster dan Healy, 1998). Perguruan tinggi bukan dipandang hanya sebagai layanan sosial kepada public. Tetapi, perguruan tinggi dipandang sebagai sama dengan dunia industri dan usaha. Dalam membelajarkan mahasiswa dan menghasilkan alumni yang berkompeten dan jelas vokasi/pekerjaannya, perguruan tinggi harus dikelola berdasarkan nilai-nilai universal, termasuk kejujuran, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, professional, integritas, budaya korporasi dan lainnya. Pimpinan universitas, dosen, staf administrasi, mahasiswa merupakan komunitas akademik yang mampu menciptakan perilaku dan suasana kehidupan kampus berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Hilangnya beberapa pekerjaan di era industri menantang perguruan tinggi merespon dengan tepat dan tepat untuk memasukkan kewirausahaan kedalam kurikulum setiap program studi. Elaborasi dan jelaskan rinci konsep entrepreneurial university dalam konteks pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kreativitas perguruan tinggi juga harus jelas tujuan dan nampak hasilnya agar inovasi teknologi membawa harapan baru bagi mahasiswa generasi millennials.

Unsur terpenting dan bahkan indikator utama misi ketiga perguruan tinggi tersebut adalah kapitalisasi ilmu pengetahuan, dimana hubungan perguruan tinggi sebagai produsen ilmu pengetahuan menjadi semakin lekat dengan masyarakat dan dunia industri selaku pengguna ilmu pengetahuan (Etzkowitz, 1998).

Entrepreneurial university (perguruan tinggi kewirausahaan) adalah perguruan tinggi yang mampu beradaptasi pada kondisi yang sangat kompleks dan penuh dengan ketidakpastian (Clark, 2001). *Entrepreneurial university* memposisikan aktivitas pendidikan dan penelitian sebagai kapital. Untuk membiayai diri agar dapat bertahan dan berkembang, perguruan tinggi memanfaatkan kapital tersebut melalui kegiatan bersama dunia usaha.

Mengacu pada model yang dikembangkan oleh Peterka (dalam Peterka dan Salihovic, tanpa tahun), dalam *entrepreneurial university* terdapat 4 komponen dasar (yaitu: *entrepreneurial university core, developed university periphery, strong collegiate leadership, dan diversified financing*) dan 2 komponen nilai (yaitu: *accountability and autonomy dan integrated entrepreneurial culture*). Disampaikan pula oleh Peterka dan Salihovic bahwa inisiasi transformasi perguruan tinggi menjadi

entrepreneurial university dapat bersifat *bottom-up* (dimulai oleh perguruan tinggi) sebagaimana yang terjadi di Amerika atau *top-down* (diinisiasi oleh pemerintah) seperti yang banyak dilakukan di negara Eropa.

Kurikulum perguruan tinggi harus mendorong lahirnya alumni pengusaha handal dimasa depan. Kemenristek-dikti menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar 2018 naik 5%, dari 29.92% tahun 2015 menjadi 34,37% tahun 2018. Bagaimana adopsi mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah Dasar Umum bagi semua mahasiswa menjadi kenyataan bahwa *entrepreneurial university* juga berkembang dari Sabang sampai Merauke. Kemenristek Dikti perlu meyakinkan bahwa pembelajaran kewirausahaan cukup membekali mahasiswa dan alumni dalam membangun *contingency career* di era *Disruptive industries*.

4. *Production University*

Banyak dugaan oleh pengusaha bahwa tamatan sarjana S1 atau D4 belum siap bekerja, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Pada saat yang sama, perguruan tinggi menyerahkan tugas dunia usaha dan industri untuk melakukan *On the Job Training (OJT)* terhadap sarjana baru. Perguruan tinggi memang punya laboratorium untuk meningkatkan praktek kerja mahasiswa ketika kuliah di kampus. Namun, fakta sulit dibantah. Peralatan belajar di laboratorium kampus berbeda, bahkan jauh ketinggalan dengan peralatan produksi produsen barang dan jasa yang berorientasi pasar, komersial dan benefit.

Production University, yang digagas menjadi pola kemitraan dunia usaha dan industri dengan perguruan tinggi diharapkan melahirkan gagasan baru tentang tujuan, strategi, kebijakan dan program baru dalam tata keleola perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan menuntut 70% praktek di industri dan 20% teori, serta *soft-skills* 10%. Dengan demikian, mahasiswa lebih menguasai pengalaman kerja sedekat mungkin dengan pekerja profesional bayaran.

Productive university perlu sarana dan prasarana yang mendekati sebuah industri. Hubungan pembelajaran antara mahasiswa-dosen berubah dari sifat instruksional menjadi *group mentoring*, bahkan lebih banyak *individual coaching*.

Secara eksplisit, De Groof (2018) menyebut peran perguruan tinggi yang ketiga sebagai misi inovasi. Sebagai catatan, bahwa sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia sudah sejak awal mencanangkan misi ketiga demikian dalam salah satu Dharma yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Namun mungkin perlu diformulasikan dengan lebih baik melalui konsep “misi inovasi” sebagaimana yang disampaikan De Groof. Berikan gagasan, *best practices* dan *lesson lerants*, tentang inovasi dari perguruan tinggi yang telah atau akan dilakukan di Indonesia.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, telah menjalankan peran penting dalam proses akumulasi pengetahuan, pengkajian dan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, juga menyiapkan sumberdaya tenaga ahli terpelajar dan terdidik untuk menjadi motor penggerak perubahan di masing-masing negara (Wu & Hawkins, 2018).

Peran strategis perguruan tinggi tersebut dicapai melalui proses kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa (*teaching*) dan penelitian/riset untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan dasar maupun dikembangkan guna memecahkan persoalan-persoalan nyata kemasyarakatan (Altbach, 2015). Pengajaran sendiri pada dasarnya merupakan proses mendidik dan melatih individu untuk mampu bekerja secara efektif dalam dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi tinggi. Proses mendidik dengan demikian berusaha melatih individu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan dan melaksanakan pekerjaan yang kini membutuhkan penguasaan pengetahuan dan teknologi canggih.

Sebagai suatu lembaga, maka perguruan tinggi harus produktif. Seperti apa perguruan tinggi yang produktif? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu akan sangat ditentukan oleh definisi dari perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi didefinisikan sebagai lembaga yang memiliki misi pengajaran dan riset, maka perguruan tinggi yang produktif adalah yang mampu mencetak SDM dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat/industri baik dari dimensi kualitas maupun kuantitas.

Seringkali perguruan tinggi terjebak dalam proses, tanpa begitu sadar terhadap *output*, apalagi *outcome* dari kegiatan yang dilakukan. Ketika melaksanakan pembelajaran, sebaiknya selalu melihat ulang apa tujuan pembelajaran tersebut terkait dengan kebutuhan SDM di masyarakat. Begitu juga dalam riset, permasalahan nyata apa yang ada di masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan riset. Dengan berangkat dari, dan selalu melihat ulang kebutuhan dan permasalahan nyata di masyarakat, diharapkan minimal dapat selalu menjaga kesadaran perguruan tinggi arti penting dari kegiatan pengajaran dan riset yang dilakukannya memang terarah pada kebutuhan dan permasalahan nyata di masyarakat.

Dengan kesadaran demikian, berkenaan dengan misi pengajaran, maka tidak akan ada permasalahan jumlah program studi yang terlalu banyak sehingga tidak terserap di dunia kerja, dan tidak akan ada lulusan yang kompetensinya tidak dibutuhkan masyarakat/industri. Secara lebih mikro, bahkan seharusnya tidak akan ada materi pembelajaran yang tidak berujung pada kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat/industri. Sedangkan pada wilayah riset, maka perguruan tinggi diharapkan tidak akan berhenti pada kegiatan penelitian, atau terperangkap pada daya tarik reputasi dari kegiatan publikasi. Dengan demikian dengan risetnya, diharapkan perguruan tinggi dapat memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi dan berujung pada inovasi yang secara nyata memberi sumbangsih pada masyarakat/industri.

Dilihat dari kacamata *production university*, ada baiknya apabila apabila perguruan tinggi meninjau ulang format pengabdian pada masyarakat. Perlu dijawab apakah pengabdian perguruan tinggi selama ini sebagai wujud penyampaian produk riset dan inovasi, atau lebih berbentuk kegiatan pemberian bantuan yang biasa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan merupakan program *cheryty*.

Kedudukan dan peran perguruan tinggi seperti dideskripsikan di atas kurang lebih adalah gambaran perguruan tinggi modern yang dibayangkan oleh Wilhelm von Humboldt pada tahun 1810 yang menjadi landasan didirikannya Universitas Berlin, yang merupakan perguruan tinggi modern Barat pertama (Boulton & Lucas, 2011).

Menurut Wilhelm von Humboldt bahwa perguruan tinggi bekerja dengan tiga prinsip: (1) kesatuan antara riset dan proses pembelajaran (*teaching*), (2) kebebasan

untuk menjalankan proses pembelajaran (*freedom of teaching*) dan (3) kemandirian mengelola proses akademik. Prinsip pertama menunjukkan bahwa kemajuan dan gagasan-gagasan dan pengetahuan baru yang dikejar melalui penelitian dibayangkan distimulasi melalui proses dialog dengan ilmuwan/mahasiswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran diharapkan tidak hanya sekedar sebagai proses transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, tetapi proses stimulasi dan *sharing* ide dan gagasan sehingga diharapkan lahir ide dan pemikiran baru yang segar untuk dilanjutkan melalui proses penelitian. Sistem pendidikan kita menghasilkan praktik pembelajaran yang lebih didominasi praktik yang memposisikan peserta didik sebagai gelas kosong yang perlu diisi. Al hasil, tidak banyak gagasan dan inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran.

Kebebasan menjalankan proses pembelajaran bermakna bahwa dosen/profesor memiliki kebebasan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian dan keyakinan rasionalnya. Prinsip pembelajaran ini juga berarti proses pembelajaran akan berjalan secara profesional dan terarah sesuai dengan bidang keahlian dosen/profesor yang diasumsikan memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya.

Prinsip ketiga dimana proses akademik dijalankan secara mandiri dimaknai bahwa proses akademik dilakukan relatif tanpa intervensi kepentingan kekuasaan/pemerintah secara langsung. Dengan kata lain, proses akademik berjalan secara natural sesuai dinamika kelembagaan universitas, tanpa mengabaikan interaksi perguruan tinggi dengan elemen di luar dirinya. Penekanannya adalah pada kemandirian perguruan tinggi untuk menentukan keputusan bagi dirinya.

Model perguruan tinggi sebagaimana yang dibayangkan oleh Wilhelm von Humboldt di atas pada dasarnya menjadi model bagi dijalankannya perguruan tinggi di dunia barat, baik perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara Eropa maupun Amerika, juga wilayah-wilayah yang kemudian dipengaruhi dan mengadopsi model pengelolaan perguruan tinggi model barat seperti universitas di wilayah Australia, Asia, dan Afrika. Model perguruan tinggi barat tersebut yang kurang lebih selama 200 tahun berhasil dijalankan dan dianggap sukses.

5. Digital University

Digitalisasi, computing power dan big data menjadi era baru perguruan tinggi untuk menyatukan cyber-physical, internet of things, dan bio-technology. Dikatakan sukses karena perguruan tinggi di barat dianggap berhasil membawa kemajuan dan menghasilkan temuan-temuan terobosan di bidang ilmu pengetahuan (sains) teknologi. Semua itu dianggap keberhasilan dari proses penelitian, pembelajaran, dan kebebasan akademik yang dijalankan universitas-universitas barat. Kesuksesan tersebut juga diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian diaplikasikan dalam masyarakat/industri maupun berbagai permasalahan nyata kemasyarakatan.

Kesuksesan perguruan tinggi model Barat tersebut tampak nyata di negara-negara Maju di mana banyak kebijakan pemerintah di bidang-bidang penting seperti ekonomi, politik, miiter, kesehatan, maupun sosial dilandasi oleh pengetahuan dan hasil penelitian akademik. Hal itu juga tampak dari besarnya perhatian pemerintah di negara-negara

maju terhadap kedudukan perguruan tinggi dilihat dari indikator bantuan anggaran yang besar bagi operasional perguruan tinggi.

6. *Triple Helix Systems*

Kesuksesan perguruan tinggi model barat sehingga membawa pengaruh dalam bidang industri, ekonomi dan pemerintahan melalui hasil kajian dan penelitian yang dijalankan dijelaskan oleh Etzkowitz & Ranga (2015) maupun Leydesdorff & Meyer (2006) melalui model *Triple Helix Systems* (THS). Konsep THS menunjukkan relasi antara perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah (*university-industry-government*). Konsep ini pada awalnya diajukan oleh Etzkowitz (1993). THS secara konseptual menjelaskan kedudukan penting perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran dan riset yang dijalankan memiliki pengaruh penting dalam kegiatan masyarakat/industri maupun berkontribusi pada berbagai upaya pemecahan masalah yang menjadi tanggung jawab pihak pemerintah di berbagai negara.

Pengaruh perguruan tinggi tersebut dimungkinkan karena sistem sosial modern kini tidak lagi dipengaruhi oleh produksi barang maupun jasa, yang menjadi karakteristik masyarakat/industri. Sistem sosial masyarakat kontemporer kini beranjak lebih ditopang dan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Pengetahuan kini menggantikan nilai strategis komoditas dan jasa yang dalam masyarakat/industri menjadi faktor penentu kemakmuran dan penguasaan/dominasi bidang sosial-ekonomi oleh banyak perusahaan dan pemerintah berbagai negara.

Dalam sistem sosial kontemporer, kemakmuran dan dominasi ekonomi satu perusahaan dan pemerintahan lebih ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan data. Sistem sosial di mana pengetahuan dan data kini lebih menentukan kemakmuran dan dominasi ini yang kemudian disebut sebagai Masyarakat Pengetahuan (*Knowledge Society*).

THS dengan demikian merupakan satu konsep yang menggambarkan bagaimana hubungan yang terkait antara tiga sistem yaitu perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah dalam masyarakat pengetahuan memiliki potensi inovasi dan pembangunan ekonomi yang kemudian mendatangkan kemakmuran dan penguasaan ekonomi. Hal itu dihasilkan dari percampuran (hibridisasi) peran perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah yang kemudian melahirkan bentuk baru kelembagaan dan fungsi sosial bagi proses produksi, transfer, dan aplikasi dari pengetahuan. Hibridisasi tersebut juga menunjukkan peran penting kajian dan penelitian di perguruan tinggi yang memiliki nilai kebaruan dan terobosan, atau yang juga disebut dalam masyarakat pengetahuan sebagai inovasi (Etzkowitz & Ranga, 2015; Smith, 2007)

THS secara lebih lanjut dapat dijelaskan melalui elaborasi lebih mendalam dari perspektif komponen-komponen/elemen yang berperan dalam sistem tersebut. THS juga dapat dijelaskan melalui relasi antar komponen dalam satu sistem yang saling terkait. Dan ketiga, THS juga dapat dimaknai sebagai sistem yang memiliki fungsi tertentu.

THS dalam pengertian komponen terdiri atas ruang hidup (*spheres*) perguruan tinggi, masyarakat/industri, dan pemerintah, dimana masing-masing ruang hidup terdiri atas elemen aktor yang juga bisa dibedakan menjadi aktor individu maupun aktor kelembagaan. THS akan mencapai titik optimal ketika ketiga elemen tersebut memiliki sinergi dalam hal kepentingan dan sistem kerja. Relasi antar komponen juga

menciptakan peluang terjadinya penentuan peran kepemimpinan, kerjasama, transfer pengetahuan, dan mediasi konflik.

THS dalam perspektif fungsi paling utama diharapkan dapat menciptakan sistem yang memiliki fungsi kompetensi yang akan menentukan kinerja sistem secara utuh. Kompetensi sistem THS secara umum diharapkan dapat mendorong kelahiran, penyebaran, dan utilisasi pengetahuan dan inovasi. Kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya diaplikasikan dalam bidang teknologi dan ekonomi, tetapi juga bidang-bidang sosial, kebijakan, maupun kebudayaan.

Paparan tentang THS di atas memberi pelajaran penting bahwa peran perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pembelajaran terjadi dalam ruang hidup (*spheres*) atau juga disebut *ekosistem* yang memungkinkan peran tersebut menjadi kompetensi yang mampu menjadi pemecah dalam relasi perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang teknologi dan ekonomi (Binz & Truffer, 2017; Oh, Phillips, Park & Lee, 2016; Smith, 2007; Etzkowitz, 2003).

Triple Helix telah dan sedang terus dikembangkan oleh Pemerintah, dunia usaha dan industry, serta beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, BAN PT memasukkan kemitraan sebagai salah satu standar mutu dan menjadi bagian penting perbaikan kinerja kelembagaan perguruan tinggi. Assessor BAN-PT sigap melakukan evaluasi melalui akreditasi program studi (APS) maupun institusi (AIPT). Data (BAN-PT, 5 Mei 2018) menunjukkan bahwa hanya 4% (70) perguruan tinggi terakreditasi A, 35% (558) terakreditasi B, dan 60% (961) perguruan tinggi terakreditasi C. lebih dari itu, akreditasi program studi A 15%, B 55%, dan C 30% dari total 19.841 perguruan tinggi. Data tersebut diatas mengindikasikan bahwa kemitraan bukan pekerjaan gampang dan belum berjalan dengan baik. Para ahli dan pengambil kebijakan di perguruan tinggi perlu berinisiatif untuk memulai dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Tenaga berpengalaman dari perusahaan, terutama alumni masing-masing perguruan tinggi, sebagai jembatan membangun jaringan, kolaborasi dan kemitraan antara industry, pemerintah dan perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Gagasan tentang THS dapat menjadi acuan dasar untuk melihat kembali dan merevitalisasi kedudukan dan peran perguruan tinggi dalam proses pembangunan seutuhnya di Indonesia.

Pertama, perguruan tinggi perlu menguatkan visi misi strategis untuk menemukan kembali peran vitalnya dalam bidang penelitian dan pembelajaran. Namun untuk menemukan kembali relevansi dan pentingnya peran perguruan tinggi, aktor-aktor perguruan tinggi seharusnya tidak merumuskan visi misi kelembagaannya sendiri. Perguruan tinggi justru perlu membangun sinergi dengan masyarakat/industri dan pemerintah dimana perguruan tinggi berada, dalam merumuskan perannya. Strategi ini akan menjamin nilai relevansi dan urgensi proses pembelajaran dan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi akan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat/industri dan pemerintah, khususnya

pada lingkup lokal dan regional. Penentuan visi misi yang lebih konkrit sesuai dengan kebutuhan industri dan pemerintah di tingkat lokal dan regional akan menuntun arah pengembangan kompetensi kelembagaan perguruan tinggi sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan pemangku kepentingan dimana perguruan tinggi tersebut berada.

Visi-misi yang memiliki relevansi kelembagaan yang tinggi khususnya di tingkat lokal dan regional akan menjadi dasar bagi pengembangan kualitas kompetensi kelembagaan perguruan tinggi (baik pengembangan SDM, manajemen, model pembelajaran dan sebagainya).

Kedua, sinergi perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah di tingkat lokal dan regional akan menciptakan ekosistem yang berguna bagi langkah pengembangan masing-masing kelembagaan. Sinergi tersebut juga memungkinkan dilakukan transfer dan pertukaran sumberdaya antara perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan secara lebih konkrit akan memberi pemahaman kebutuhan dan kompetensi kelembagaan masing-masing. Hal itu diharapkan mendekatkan kemungkinan terjadinya transfer pengetahuan dan pertukaran sumberdaya antar lembaga.

Catatan yang juga penting bagi perguruan tinggi adalah semakin kuatnya kecenderungan perguruan tinggi untuk sibuk mempertanyakan kompetensi diri dan kualitas pengelolaan akademik perguruan tinggi tanpa pernah mempersoalkan peran nyata, yang sebetulnya dapat diperoleh dengan membangun sinergi dengan dua kelembagaan yang lain. Hal demikian misalnya tampak pada hiruk-pikuk perguruan tinggi untuk mengurus peringkat akreditasi maupun proses pemerolehan akreditasi yang memang diamanatkan oleh undang-undang sebagai sistem akuntabilitas kelembagaan perguruan tinggi. Namun upaya tersebut akan seperti menegakkan benang basah (sia-sia) apabila perguruan tinggi tidak memiliki dan menentukan visi-misi strategisnya. Kegagalan merumuskan visi-misi strategis akan menjadikan perguruan tinggi kehilangan arah pengembangan kompetensi dan pengelolaan kegiatan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- ABET (2019) ABET-Accredited Programs. <http://main.abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx>. (diakses 17 Maret 2019).
- Altbach, P. G. (2011). "The complex roles of universities in the period of globalization" *Higher Education in the World*, 3, 5-14. <https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8111/1/altbach.pdf>
- AUN-QA (2016) List of Actual Quality Assessments at Program Level. <http://aun-qa.org/assessmentanalysis>. (diakses 17 Maret 2019).
- Binz, C., & Truffer, B. (2017). Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts. *Research Policy*, 46(7), 1284-1298.
- Boulton, G., & Lucas, C. (2011). What are universities for? *Chinese Science Bulletin*, 56(23), 2506-2517.

- Clark B. (2001), The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement. *Higher Education Management, Vol.13, No.2*
- De Groof, J. (2018). On the 'Innovative University': A few Challenging Reflections. *European Review, Vol. 26, No. S1, S114–S123.*
- Dimiyati, M., 2019. Potret, Peluang dan Tantangan Pada RI 4.0, Makalah Simposium KAHMI , Solo, 16 Februari 2019.
- Etzkowitz, H. (1993). Enterprises from science: The origins of science-based regional economic development. *Minerva, 31(3)*, 326-360.
- Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations. *Social science information, 42(3)*, 293-337.
- Etzkowitz, H. (2008). *The triple helix: university-industry-government innovation in action*. Routledge.
- Etzkowitz, H., & Ranga, M. (2015). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. In *Entrepreneurship and Knowledge Exchange* (pp. 117-158). Routledge.
- Etzkowitz, H., Webster, A., & Healey, P. (1998) *Capitalizing Knowledge: New Intersections of Industry and Academia* (Albany, State University of New York press).
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2019) Grafik Jumlah Perguruan Tinggi. <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> (diakses 17 Maret 2019)
- Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. *Technovation, 54*, 1-6.
- Peraturan Pemerintah no 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peterka, S. O. dan Salihovic, V. (tanpa tahun) What is entrepreneurial university and why we need it? <http://cepor.hr/App%206-What%20is%20entrepreneurial%20university%20and%20why%20we%20need%20it.pdf> (diakses 18 Maret 2019)
- Smith, H. L. (2007). Universities, innovation, and territorial development: a review of the evidence. *Environment and Planning C: Government and Policy, 25(1)*, 98-114.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Wibisono, E. (1999) Tinjauan atas Paradigma Kualitas dalam Pendidikan Tinggi Indonesia. *Unitas, Vol. 7 No. 2, 72-81.*
- Wu, A. M., & Hawkins, J. N. (Eds.). (2018). *Massification of higher education in Asia: Consequences, policy responses and changing governance*. Singapore: Springer.

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ABAD 21: KARAKTERISTIK, ASAS DAN PRINSIP

M. Alfian Santoso

Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

This Study had aims to collaborate and analyze how Islamic Education develops Curriculum based on 21st Century Skills Perspective. Because, it is the importance of a new thought in the development of Islamic institution towards contemporary education. The Researcher used Library Research by combining various reference resources that discusses about the concepts of

21st Century Learning – 4C Skills - and Islamic Education. The data analysis results encouraged by collaborating results, showed that Islamic education curriculum should have three kinds of fundamental aspects, these are Humanist - Futuristic Character, 21st Learning Skills Foundation, and Student Outcomes Principle. First, answering the Islamic future education is discussing two

characteristics, curriculum should implement the social approach with society and orientate the science development to construct the social, culture, technology and religion. Second, discussing the 4C skills to be the goals of education foundation like C
ritical

Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity is integrating 4 common foundations like Philosophy, Psychology, Social,

and Science. But, the question where Islamic value does contribute is adding two important skills (Citizenship and Character) and two primary Foundations (Religion and Multicultural). Third, explaining about principle it is always connected by the goal itself,

that the Islamic Education Principle is not just Transfer of Islamic Knowledge but to be the way of student transformation. It is

stated that how many principles used, the goal is changing student behavior as good as Muslim being. From three aspects above, Islamic education has important role and different goal beside common education, it has to focus on creating modern Islamic

civilization start form Media, Strategy, Curriculum, Institution until Environment by Integrating Islamic Resources in education process.

Keywords: *Curriculum Development, Islamic Education, 21st Century Skills, and Contemporary Education*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan memiliki akal sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang dituntut bisa berfikir (*Thinking*) dan berkreasi (*Creative*). Imam Suprayogo⁹⁹ mendeskripsikan kategori Manusia berfikir adalah pada kata “*Ulul Albab*” yang diambilnya dari surah al-Imran (3) : 190 – 191, bahwa mereka adalah orang yang selalu ber*Dzikir* – Mengingat – Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring, serta memikirkan ciptaan Allah baik yang ada dilangit maupun di bumi. Dengan kata lain, Manusia Berfikir adalah senantiasa mengingat Tuhannya baik dalam keadaan apapun sebagai realisasi Ketaqwaannya, serta memikirkan alam semesta yang merupakan ayat (tanda) kekuasaan Tuhan sebagai implementasi ke-eksistensinya.

Komponen paling penting yang bisa meningkatkan daya pikir dan kreatifitas seseorang adalah pendidikan, aspek ini sangat diharapkan, karena dilain sisi telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan yakni ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Dengan kata lain, pendidikan saat ini harus mampu berdampingan dengan perkembangan zaman yang dikenal dengan Abad 21. Namun, Indonesia masih baru memulainya pada tahun 2017 (Revisi K13), yang memasukkan Ketrampilan abad 21 pada kurikulum. Berdasarkan data tahun 2016 yang diambil dari PISA (*Program of International Student Assessment*), output pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan, Hanya kurang dari 30% siswa Indonesia yang bisa berfikir kritis (*Critical Thinking*) dan kreatif dalam menyelesaikan masalah (*Problem Solver*).¹⁰⁰

Mengingat pentingnya merubah gaya pandang pengembangan kurikulum, Pendidikan Agama Islam juga diharapkan mampu menjadi contoh pengembangan kurikulum berbasis abad 21 yang kredibel, Jangan sampai ada anggapan bahwa Pendidikan Agama Memisahkan diri dari proyek tersebut. Pendidikan Agama Islam harus menjadi ruh dalam mengawal perkembangan baik standarisasi, penilaian, kurikulum, pengembangan individu, serta budaya sekolah (*academic culture* dan *religious culture*) yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kurikulum pendidikan berbasis abad 21 ini.¹⁰¹ Dengan menggunakan Grounded Theory Designs untuk menganalisis teori yang masih dalam konsep ke dalam rumusan tersistematis,¹⁰² penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang bentuk karakteristik, asas dan prinsip dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis abad 21 yang komprehensif .

⁹⁹Guru Besar Pendidikan Islam STAIN Malang (sekarang UIN) lihat : “Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 12

¹⁰⁰Indonesia menduduki posisi hampir akhir dalam pemeringkatan PISA yang dirilis 2016. Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 65 pada kemampuan matematika, 64 pada kemampuan sains, dan 66 pada kemampuan membaca dari 72 negara yang disurvei. ([Http://MetroNews.com/70% siswa Indonesia tak mampu jawab soal HOTS](http://MetroNews.com/70%_siswa_Indonesia_tak_mampu_jawab_soal_HOTS)) Diakses pada 05/10/2018

¹⁰¹Framework for 21th century Learning, (<http://www.p21.org/about-us/p21-framework>). Diakses 04/10/2018

¹⁰²Jhon. W Creswell, *Educational research (Planning, Conducting, and Evaluating) 4th Edition*. (Boston: Pearson Education, 2012), 422 - 423

PEMBAHASAN

Karakter Kurikulum yang Humanis dan Futuristik

Wacana Pendidikan abad 21 (*21st Century Education*) telah menjadi *pilot project* di berbagai belahan dunia, baik pendidikan barat maupun timur tengah, tidak terkecuali di negara – negara Asean. Raja Roy Singh, dinilai sebagai peletak dasar awal pandangan tentang pendidikan pada abad ke-21 di Asia Tenggara melalui bukunya “*Education for The Twenty – First Century* :

Asia Pacific Perspective”. Dia menempatkan pendidikan yang baik adalah yang berorientasi pada pengembangan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan.¹⁰³ Dia juga menambahkan untuk merubah pendidikan berwawasan masa depan adalah dengan cara merekonstruksi dan mereorientasi system pendidikan secara kritis, sistem pendidikan harus memiliki kapasitas untuk menjadi pendukung institusi kreatif yang secara efektif melakukan pendidikan.¹⁰⁴ Pendidikan dituntut tidak kolot menghadapi perkembangan zaman, harus kreatif dalam menciptakan Inovasi pendidikan terbaiknya.

Oemar Hamalik (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia) membagi dua model pendekatan kurikulum untuk mengetahui secara terperinci karakter antara keduanya. **Pertama**, Pendekatan kultural dengan pandangan *child-centered*, menurutnya pendekatan kultural adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan, dengan memiliki karakteristik yang menyakini manusia sebagai Makhluk yang berpotensi, bersosial, *agen of change*, dan toleransi. **Kedua**, Pendekatan *Activity Curriculum*, menurutnya pendekatan ini sangat berbeda dengan berpusat pada anak, yaitu dengan menitik beratkan pada pembelajaran kontekstual, pengalaman langsung, anak disuruh memilih kebutuhan dan model belajarnya sendiri, dan menjadikan anak adalah satu – satunya nilai.¹⁰⁵ Artinya Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang sangat jauh, bisa diambil kesimpulan bahwa pendekatan pertamalah yang sesuai dengan tuntutan masa depan dari pada pendekatan kedua, pasalnya akan menjadikan anak lebih tertutup dengan *social change*. Begitupun Ringkasan gambaran konsep Hilda Taba bahwa pendekatan pertama tidak hanya mengembangkan *Conservative forces* pada anak, tetapi juga *Innovative Forces*.¹⁰⁶

Abuddin Nata¹⁰⁷ memberi masukan tentang Model Pendidikan Islam yang memanusiaikan, secara singkat dia mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam atau Lembaga Pendidikan Islam harus memiliki rumusan yang sesuai dengan konsep

¹⁰³Raja mengatakan bahwa pendidikan masa depan adalah pusat dari pengembangan kemanusiaan. Tujuan utama dari pendidikan berorientasi masa depan adalah didefinisikan oleh proses pengembangan sebagai visi bersama masyarakat. Lihat : Raja Roy Singh “*Education for The Twenty – First Century : Asia Pacific Perspective*” (Bangkok: Unesco Principal Regional Office, 1991) hal 24

¹⁰⁴Ibid, 51

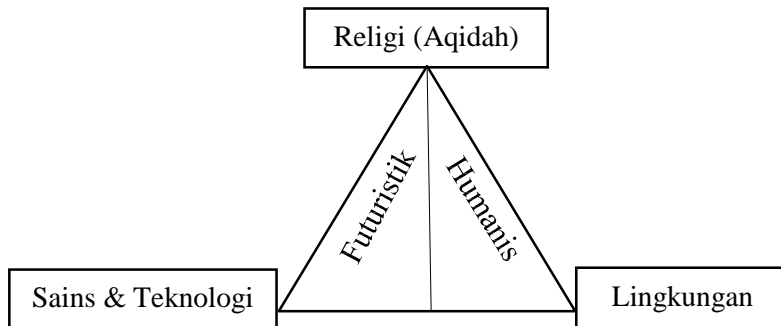
¹⁰⁵Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 120

¹⁰⁶ Ibid, 121

¹⁰⁷Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009). 50 - 52

manusia yang seutuhnya (*al – Insan*) sebagai Makhluk berfikir, apabila ingin tercapai tujuan pendidikannya. Pendidikan harus selalu mengedepankan aspek Religius, Kognitif, Afektif, Psikomotorik dan Sosial sebagai hakekat potensi sejak lahir untuk dididik dan diarahkan. Sehingga, kurikulum pendidikan masa depan lebih dititik beratkan pada pembekalan mental anak didik, bukan hanya pengetahuan, dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi nilai - nilai masyarakat dalam membentuk manusia yang seutuhnya.

Dari diskusi para ilmuwan baik dari teori umum dan pandangan Islam tentang karakteristik yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan abad 21, pada intinya karakter Pendidikan Islam harus lebih memanusiakan (*Humanist*) dan berorientasi masa depan (*Futuristic*). Esensi kurikulum yang mendidik manusia (*Human Being Education*) yang hilang belakangan ini harus dikembalikan lagi kepada lingkungannya (*Environment*) baik Masjid, lembaga sosial dan kegiatan – kegiatan lain untuk dijadikan salah satu sumber ilmu yang valid. Dalam kurikulum abad 21, peserta didik diharap mampu memberikan perhatiannya tidak hanya pada nilai ujian dan tugas gurur, tapi sikap sosial yang dibangun di sekolah dan masyarakat. Hal ini akan menjadi sejalan dengan pemikiran Ahmad Tafsir yang memasukkan tiga unsur penting dalam menghasilkan output yang manusiawi yakni Jasmani, Rohani dan Kalbu.¹⁰⁸ Secara sistematis karakteristik Kurikulum Pendidikan Agama Islam abad 21 adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Karakteristik Pengembangan Kurikulum PAI abad 21

Asas Pengembangan Kurikulum PAI abad 21

Pengembangan kurikulum merupakan urgensifitas yang harus dilakukan oleh bangsa dan lembaga pendidikan secara terus menerus, terutama dalam menghadapi arus Global, akan jauh tertinggal apabila suatu pendidikan apatis terhadap perkembangan ini. Pengembangan kurikulum (*Curriculum development*) menurut Andrew Nicholls & S Howard Nicholls yang dikutip oleh Oemar Hamalik, memiliki

¹⁰⁸Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam (integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu memanusiakan manusia)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). 129

arti bahwa perencanaan dari sebuah kesempatan belajar untuk membawa peserta didik menuju perubahan yang diinginkan serta menilai sejauh mana perubahan itu terjadi.¹⁰⁹ Jadi kurikulum didesign bukan hanya sebagai bahan acuan *transfer knowledge* saja, lebih dari itu, yakni memberi ruang bagi siswa untuk merealisasikan keilmuannya kepada kehidupan. Hal ini senada dengan ungkapan Syed Ali Ashraf yang dikutip oleh Masdar Hilmy bahwa Pendidikan Agama Islam bukan hanya sebagai proses belajar mengajar di dalam kelas (*learning Instruction*).¹¹⁰

Heri Gunawan¹¹¹ menjelaskan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, dia menyebutnya sebagai idea vital yang menjadi landasan terselenggaranya pendidikan yang ideal, bahkan kurikulum menjadi tolak ukur ideal dan tidaknya suatu sistem pendidikan. Secara tidak langsung, dia terlalu terpaku pada sebuah aturan tertulis sehingga mengabaikan hal fundamental lainnya. Pendapat ini dipatahkan oleh Hattie yang dikutip oleh Paul Eggen & Don Kauchak¹¹² bahwa Pengajar yang baik adalah unsur terpenting dari pembelajaran, pengajar yang baik itu lebih penting dari pada kurikulum, pengaturan ruang kelas, rekan sebaya, pendanaan, akreditasi, ukuran sekolah dan bahkan kepala sekolah. Maka kemudian, yang terpenting dan harus lebih selektif adalah Tenaga Pendidik (*Who will teach them*) bukan hanya Kurikulum (*How to teach them*). Asas atau lebih familiarnya Dasar, Dasar Pengembangan Kurikulum menurut para ahli menjadi pijakan analisis terhadap pengembangan menuju abad 21, karena dari dasar itulah akan terciptanya rumusan yang benar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja yang menjadi ciri khas Pembelajaran abad 21. Dilingkungan lembaga pendidikan Indonesia, ada 4 aspek yang menjadi landasan penyusunan kurikulum dan pembelajaran K-13 revisi 2017, yakni HOTS (*Higher Order Thinking Skill*), 4C Skill, Literasi dan PPK.¹¹³ keempat aspek itu sangat menarik untuk dikaji, sebenarnya secara tujuan mereka memiliki kesamaan yakni ingin peserta didik memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dengan memiliki *critical thinking* dalam segala hal. Pengembangan Kurikulum Berbasis Ketrampilan Abad 21 yang dikenal dengan *4C skills* yang terdiri dari *Critical Thinking*, *Collaboration*, *Communication*, dan *Creativity* pertama kali disosialisasikan oleh lembaga non-Profit Amerika bernama P21 (*Partnership for 21st Century Skills*).¹¹⁴ Namun, menurut Halim Tamuri¹¹⁵ yang mengutip dari James ing

¹⁰⁹Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 98.

¹¹⁰Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*. (Malang : Madani Intrans Publising, 2016). 125. Lihat Syed Ali Ashraf, *New Horizons in Muslim Education* (London: Horder & Stoughton, 1985), 1

¹¹¹Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Bandung : Alfabeta, 2012). 19

¹¹²Paul Eggen & Don Kauchak, *Strategies and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills, 6th Edition*.(Boston: Pearson Education, 2012). 5

¹¹³4 aspek yang harus masuk dalam kurikulum 13 revisi 2017. (1) Hots (*Higher Order Thinking Skill*) merupakan implementasi level Analysis, Sitisis dan Evaluasi dari Bloom's Taxonomi pada ranah Kognitif. (2) 4C Skill (*Critical Thinking, Collaboration, Communication, Creativity*) merupakan kemampuan atau ketrampilan yang harus dimiliki siswa di abad 21. (3) Literasi, dan (4) Penguatan program Karakter PPK

¹¹⁴*Framework for 21st century learning*, ([Http://www.21stcenturyskills.com](http://www.21stcenturyskills.com)). Diakses 05/10/2018

¹¹⁵Halim Tamuri, *Pembelajaran Abad 21 dalam Kepelbagaian Budaya: Harapan dan Cabaan*.

mengatakan bahwa perlu ada penambahan 2 skill lagi yakni (*Citizenship* dan *Character*). Sehingga, Institusi harus memahami secara terperinci terhadap indikator - indikator yang ingin dicapai sebelum menggunakan Asas Pengembangan Kurikulum.

Dalam pengembangan kurikulum PAI, ada asas – asas yang harus diperhatikan agar tidak keluar dari tujuan dan hasil. Asas – asas tersebut dipakai sebagai jalan implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar. Dalam hal Asas Kurikulum, para ahli baik dari dunia Barat maupun Indonesia memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda. Oemar Hamalik¹¹⁶ menjelaskan pendapat Ronald Doll yang meletakkan 4 dasar yakni, Dasar Filsafat dan Sejarah, dasar psikologi, dasar sosial, dan dasar ilmu pengetahuan. Dia menjelaskan dasar filsafat dan sejarah tidak bisa dipisahkan karena erat kaitannya dengan bagaimana institusi mengetahui landasan filosofis negara serta sejarah perkembangan negara, dasar psikologi sebagai landasan yang menitik beratkan pada kebutuhan peserta didik, dasar sosial sebagai acuan pengembangan berbasis tatanan sosial masyarakat yang terus berkembang, dan yang terakhir dasar ilmu pengetahuan sebagai landasan pertimbangan pemilihan materi pembelajaran.

Muhaimin¹¹⁷ mencoba memberikan nuansa berbeda dalam menanggapi Landasan Kurikulum PAI, dalam bukunya “*Pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi Islam*” meletakkan Dasar Agama sebagai Landasan Pertama yang harus difahami. Hal ini sesuai dengan Pancasila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, semua agama berhak menjadikan pedoman agamanya menjadi dasar pertama dalam membuat kurikulum pendidikannya. Agama Islam sendiri telah memiliki sumber yang valid yakni al-Qur’an dan al-Hadits. Berdasarkan kedua sumber tersebut Institusi Islam harus mengedepankan Asas ketuhanan (Tauhid) dalam menyusun Teori, Standard, dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fleksibel terhadap perubahan Sosial.

Abdul Halim¹¹⁸ menuliskan tentang Pendidikan Kurikulum PAI berbasis Multikultural, dia mencoba memaparkan hasil pemikirannya untuk memasukkan Asas Multikulturalisme dalam Pengembangan Kurikulum PAI, dia berpendapat dengan mengutip pernyataan dari Zakiyuddin Baidhawiy bahwa Pendidikan Islam sangat beriringan dengan konsep pluralisme dan Multikulturalisme, mengingat bahwa kemajemukan bangsa Indonesia baik Agama, Suku, Bahasa dan Aliran adalah

Disampaikan pada Kertas Kerja Ucapan Seminar Pedagogi Antarabangsa ke-8 (PEDA8) anjuran IPG Ilmu Khas, Kuala Lumpur, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor pada 19 September 2017 di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur, Malaysia.

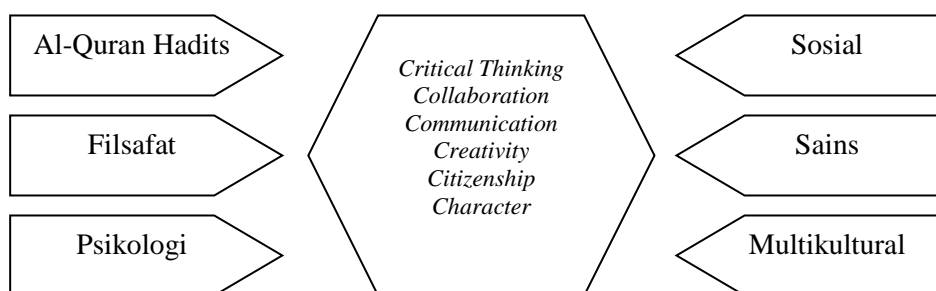
¹¹⁶Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 101 – 102, bandingkan dengan Ronald Doll, *Curriculum Improvement: A practical guide 2nd Ed.* (London: Gorge Allen Unwin, 1982)

¹¹⁷Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 61

¹¹⁸Abdul Halim, “Asas – Asas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Multikulutal”, *Nidhamul Haq Vol 1 No.2 Juli 2016 ISSN: 2503-1481*, lihat Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2007)

keniscayaan yang tidak bisa dilupakan. Dengan harapan akan terjadinya harmoni tanpa melihat perbedaan pada proses pembelajaran di institusi. Asas Multikulturalisme juga memiliki kaitan dengan Asas Sosial – Budaya yang dijelaskan di awal, namun lebih memiliki konsep yang terperinci dalam membangun keserasian dalam kemajemukan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Dari analisis teori dan hasil pemikiran ahli dalam hal Asas – Asas yang dibutuhkan sebelum melakukan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 Asas atau Dasar yang umum dipakai yaitu Filsafat, Psikologi, Sosial, dan Ilmu Pengetahuan. Agar tidak terjadinya kegagalan dalam mengembangkan Kurikulum PAI, perlu ditambahkan 2 Asas yang sangat diperlukan, yakni Asas Agama (al-Qur'an dan Hadits)¹¹⁹ dan Asas Multikultural. Maka kemudian, ada 6 Asas yang harus difahami oleh para Praktisi Pendidikan Islam. Berikut adalah gambaran koneksi Asas – Asas Pengembangan Kurikulum pada Pendidikan Islam yang terintegrasi dengan Ketrampilan abad 21:



Gambar 2: Asas Pengembangan Kurikulum PAI abad 21

Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI berbasis *Student Outcomes*

Membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum PAI, sebenarnya tidak bisa lepas dari ajaran yang ada dalam Agama Islam itu sendiri. Karena berbicara Prinsip (*Principle*) sangat erat hubungannya dengan Tujuan (*Goal*), begitupun dengan Prinsip Kurikulum Pendidikan Islam sangat erat hubungannya dengan Tujuan Agama Islam. Maka dari itu, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam abad 21 ini, seharusnya memberi solusi perbaikan terhadap masalah yang sering dihadapi oleh peserta didik dan menjadi garansi (*Garanty*) kepada orang tua terhadap perkembangan dan pencapaian anaknya, yang tentunya sesuai dengan kemajuan zaman serta dalam pengawasan nilai – nilai Agama.¹²⁰

Ahmad tafsir¹²¹ membandingkan beberapa ahli tentang tujuan Pendidikan Islam, dia mengatakan bahwa Naquib al-Attas menghendaki pendidikan Islam mengantarkan Peserta didik menjadi Manusia yang Baik, Marimba berpendapat agar terbentuk

¹¹⁹*The Qur'an and hadith constitute two primary vehicles of knowledge and education for Muslim communities and make the seeking of knowledge, learning, and education a religious obligation and a central part of belief.* Lihat Yahia Baiza, *Islamic Education and Development of Educational Traditions and Institutions (Handbook of Islamic Education, 2018).* 77

¹²⁰Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.* (Bandung : Alfabeta, 2012). 19

¹²¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 64

kepribadian Muslim, Al- Abrasyi menginginkan terwujudnya Manusia yang berakhlak Mulia, sedangkan Munir Mursyi menginginkan pendidikan Islam menjadikan Manusia sempurna. Dengan demikian, Pendidikan Islam harus menjaga kefokusannya pada tujuan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadist yakni menjadikan Manusia memiliki kualitas baik ketaqwaan dan akhlaqnya.

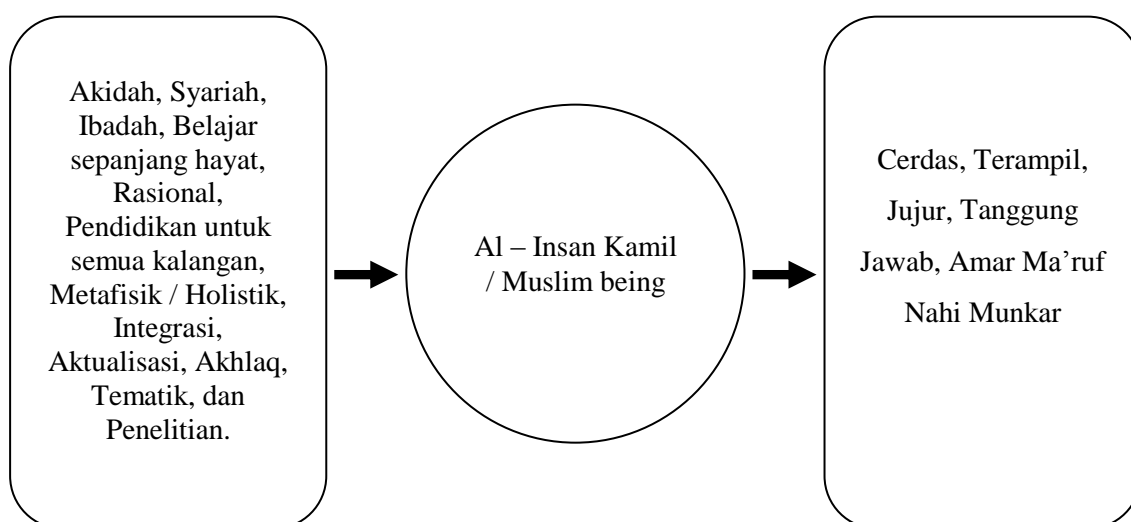
Mohammad Johdi Salleh¹²² memberi perhatian kepada prinsip Pendidikan Islam, bahwa prinsip bisa kita ketahui melalui pengertian yang ingin difahami dari sebuah kata “*Tarbiyah*” yang berarti Mendidik, “*Ta’lim*” yang berarti memberi tahu atau “*Ta’dib*” yang berarti mencontohkan akhlaq. Ketiga unsur kata tersebut memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda, dia juga membuat sebuah akronim tujuan pembelajaran PAI yaitu JERISAH – Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosialisasi, Alam, dan Hamba Allah – sebagai perkembangan yang seimbang dari *Human Personality*. Maka dari itu, Johdi menjabarkan 12 Prinsip yang perlu dikokohkan dalam Pengembangan Kurikulum PAI berbasis Pencapaian Peserta didik (*Student Outcomes*) yang islami terdiri dari: Akidah, Syariah, Ibadah, Belajar sepanjang hayat, Rasional, Pendidikan untuk semua kalangan, Metafisik / Holistik, Integrasi, Aktualisasi, Akhlaq, Pemahaman Tematik, dan Penelitian. Dari pemaparan konsep di atas, Prinsip Pendidikan Islam menginginkan tercapainya kenaikan derajat keimanan dan ketaqwaan peserta didik ketika mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendalaman ilmu agama.

Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (*Tarbiyah*) memberikan pemahaman bahwa pendidikan Islam tidak hanya memberikan Ilmu Agama Islam (*Islamic knowledge*), tetapi juga mengedepankan bagaimana menjadi Muslim yang utuh (*Real Muslim*). Kurikulum yang dikembangkan harus fokus pada nilai – nilai pendidikan untuk Pelajaran Agama Islam – Kepercayaan, Moral, Jujur, Tanggung Jawab, dan Sikap – secara sistematis tercantum di dalam tujuannya. Hal ini disinggung oleh Zainuddin¹²³ yang mengatakan bahwa Pengembangan pendidikan masa depan tidak hanya *transfer of knowledge*, tetapi sudah pada level *transformation* yang berarti merubah peserta didik dari tidak mampu menjadi mampu.

Dari analisis pendapat para ahli tentang Prinsip yang tidak bisa dipisahkan dari Tujuan Pengembangan Kurikulum PAI berbasis *Student Outcomes*, dapat ditarik kesimpulan bahwa berapapun banyaknya prinsip yang harus dikokohkan, baik prinsip yang sifatnya umum maupun prinsip yang berasal dari sumber Agama Islam, tetap tujuannya adalah ingin terwujudnya Pendidikan Islam yang bisa menjadikan siswa muslim sesungguhnya (*Be – Muslim*). Berikut adalah framework antara Prinsip dan Tujuan Pengembangan Kurikulum PAI berbasis *Student Outcomes*:

¹²²Mohammad Johdi Salleh, *The Integrated Islamic education: Principles and needs fro thematic approaches*. Singapore Islamic education seminar (SIES), 14 Nov 2009

¹²³Zainuddin, *reformulasi paradigm transformatif dalam kajian pendidikan islam*, makalah disampaikan pada wisuda sarjana, magister dan doctor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik 2011/2012.



Gambar 3: Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI berbasis *Student Outcomes*

PENUTUP

Dari pemaparan yang penulis uraikan tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Abad 21 antara Karakteristik, Asas – Asas, dan Prinsip, maka dapat penulis menyimpulkan terkait ketiga aspek tersebut:

Pertama, Karakteristik Pengembangan Kurikulum PAI yang harus diperhatikan adalah karakter Humanis dan Futuristik. Karakter Humanis (Memanusiakan) adalah karakter yang didukung oleh lingkungan, budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat tertentu. Sedangkan karakter Futuristik (Berkemajuan) adalah karakter yang didukung oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa depan. Kedua karakter ini berorientasi pada Tauhid (Ketuhanan) sebagai konsep valid Pembelajaran Agama Islam.

Kedua, Asas Pengembangan Kurikulum PAI sangat erat kaitannya dengan Keterampilan abad 21, karena keterampilan itu bisa tercapai apabila asas-asas yang dipakai sesuai. Keterampilan abad 21 yang disebut 4C (Critical Thinking, Collaboration, communication, dan Creative) ditambah keterampilan 2C lagi yaitu Citizenship dan Character. Sedangkan Asasnya yang umumnya menggunakan 4 asas (Filsafat, Psikologi, Sosial dan Ilmu pengetahuan) ditambah dengan 2 Asas yang fundamental dalam PAI yakni Agama dan Multikultural.

Ketiga, Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI sangat dekat kaitannya dengan *Student Outcomes* sebagai tujuan pembelajaran. Keduanya seperti botol dengan tutupnya, prinsip Pendidikan Islam adalah tujuan Agama Islam itu sendiri. Prinsip yang dipakai ada banyak versi, yakni Akidah, Syariah, Ibadah, Belajar sepanjang hayat, Rasional, Pendidikan untuk semua kalangan, Metafisik / Holistik, Integrasi, Aktualisasi, Akhlaq, Pemahaman Tematik, dan Penelitian. Sedangkan Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah menjadikan Peserta didik Muslim seutuhnya (*Muslim Being*) yang “*Amar*

Ma'ruf Nahi Munkar” – membudayakan kebaikan dan membuang kejelekan.

Demikian penelitian ini penulis buat, penulis merasa masih belum cukup referensi dan analisis dalam penulisan ini, baik dari buku, journal atau kajian personal. Penulis memohon masukan agar karya penelitian ini bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, Syed Ali, 1985. *New Horizons in Muslim Education* (London: Horder & Stoughton) Baiza, Yahia, 2018. *Islamic Education and Development of Educational Traditions and Institutions* (Handbook of Islamic Education)
- Creswell, Jhon. 2012, W, *Educational research (Planning, Conducting, and Evaluating) 4th Edition*. (Boston: Pearson Education)
- Doll, Ronald, 1982. *Curriculum Improvement: A practical guide 2nd Ed*. (London: Gorge Allen Unwin)
- Gunawan, Heri, 2012. *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Alfabeta,)
- Hamalik, Oemar, 2017, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Halim Tamuri, *Pembelajaran Abad 21 dalam Kepelbagaian Budaya: Harapan dan Cabaan*.
- Hilmy, Masdar, 2016. *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*. (Malang: Madani Intrans Publising,)
- Halim, Abdul, “Asas–Asas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Multikulutal”, *Nidhamul Haq Vol 1 No.2 Juli 2016 ISSN: 2503-1481*
- Nata, Abuddin, 2009, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Paul Eggen & Don Kauchak, 2012. *Strategies and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills, 6th Edition*. (Boston: Pearson Education)
- Muhaimin, 2005. *Pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Suprayogo, Imam. “*Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Singh, Raja Roy. 1991, “*Education for The Twenty – First Century: Asia Pacific Perspective*” (Bangkok: Unesco Principal Regional Office)
- Salleh, Mohammad Johdi, *The Integrated Islamic education: Principles and needs fro thematic approaches*. Singapore Islamic education seminar (SIES), 14 Nov 2009
- Tafsir, Ahmad, 2012. *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Tafsir, Ahmad, 2017. *Filsafat Pendidikan Islam (integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu memanusikan manusia)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Zainuddin, *reformulasi paradigm transformatif dalam kajian pendidikan islam*, makalah disamapaikan pada wisuda sarjana, magister dan doctor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik 2011/2012.

([Http:MetroNews.com](http://MetroNews.com)/70% siswa Indonesia tak mampu jawab soal HOTS) Diakses pada 05/10/2018

Framework for 21th century Learning, (<http://www.p21.org/about-us/p21-framework>). Diakses 04/10/2018

SITUASI PENDIDIKAN BAGI ANAK DIFABEL KORBAN KEKERASAN

Siti Kasiyati dan Abdullah Tri Wahyudi

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

email: kasiyati_siti@yahoo.com

email: ap_advo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan bagi difabel telah dijamin oleh Undang-Undang namun kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak anak difabel tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Penelitian ini akan memaparkan beberapa situasi anak difabel korban kekerasan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi mereka. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan mengambil lokasi penelitian di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang banyak melakukan pendampingan terhadap anak difabel korban kekerasan. Hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran situasi pendidikan anak difabel korban kekerasan dan upaya-upaya pemenuhan pendidikan bagi anak difabel korban kekerasan yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.

Kata kunci: Anak, Disabilitas, Difabel, Pendidikan, Korban.

VARIASI MODEL INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS “*TARBIYA MUKMIN ULUL ALBAB*”

Dr. Lailial Muhtifah, M. Pd dan Hadiatus Sa’adah, S. Pdi

IAIN Pontianak

Email: laily_azhar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Paper ini dilatar belakangi oleh pentingnya paradigma pendidikan karakter berbasis “Tarbiya Mukmin Ulu Al-Albab” (TMUA) di era global saat ini, terutama dalam pertumbuhan karakter peserta didik. Tujuan kajian untuk menemukan kerangka konseptual variasi model integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dari para ahli. Penulisan paper menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka (*literature review*) dengan cara mengumpulkan informasi/data dari berbagai sumber. Data-data diperoleh dari Al Quran, peraturan, dan berbagai jurnal serta buku-buku pendukung yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, dengan mendokumentasikan berbagai sumber yang diperoleh. Sumber yang berkaitan dengan pendidikan karakter dianalisis secara *hermeneutik*, yaitu ditafsirkan atau diinterpretasikan. Pendidikan karakter berbasis TMUA merupakan konsep pendidikan Islam yang mengantarkan lulusannya melalui proses pertumbuhan berkarakter “*Mukmin Ulul- Albab.*” Pertumbuhan karakter tersebut bisa dilakukan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pendidikan, baik proses pendidikan di sekolah/madrasah, rumah maupun di masyarakat. Proses integrasi ilmu pengetahuan yang bersumber dari ilmu kaunyah dan ilmu qauliyah. Kerangka ini mengungkap sebuah proses dan langkah untuk meningkatkan moral dan perilaku yang benar. Studi ini menemukan variasi model integrasi nilai-nilai pendidikan karakter yang beragam dari berbagai sudut pandang antara lain; Thomas Lickona, Grand Desaign Kemendiknas, dan Heritage Foundation. Variasi model tersebut dianalisis berdasarkan filosofi sekuntum bunga model TMUA.

Kata Kunci: Tarbiya Mukmin Ulu Al-Albab, Integrasi Nilai-nilai Pendidikan, Filosofi Model Sekuntum Bungan, Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidik

PENDAHULUAN

Paradigma pendidikan karakter berbasis Tarbiya Mukmin Ulul Albab (TMUA) sangat penting untuk dikembangkan di era global saat ini, terutama dalam pertumbuhan karakter peserta didik. Pendidikan karakter di sekolah dapat diimplementasikan melalui 3 pendekatan, yaitu; (1) pendekatan formal, (2) pendekatan budaya sekolah dan (3) pendekatan paradigmatic. Pendekatan formal adalah memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan. Pendekatan budaya sekolah yaitu pengelolaan pendikar yang dikembangkan melalui pengelolaan budaya sekolah. Pendekatan paradigmatic, yakni perubahan paradigma pada unsur-unsur utama pendidikan yang berkaitan secara langsung dengan pembentukan karakter peserta didik. Bagus Mustakim (2011: 98)

menegaskan ada tiga unsur utama dalam sistem pendidikan nasional yang berhubungan langsung dengan pembentukan karakter bangsa yang dirumuskan dalam UU pendidikan, yaitu; (1) pendidikan agama, (2) pendidikan sains, dan (3) pendidikan kewarganegaraan. Maya Bialik, (2015: iii) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah tentang perolehan dan penguatan kebaikan (kualitas), nilai (cita dan konsep), dan kemampuan untuk membuat pilihan bijak untuk kehidupan dalam masyarakat yang berkembang. Tujuan dari pendidikan karakter adalah (Maya Bialik, et. al., 2015: 3): 1) untuk membangun fondasi pembelajaran seumur hidup; 2) untuk mendukung hubungan kesuksesan di rumah, di komunitas, dan tempat kerja; dan 3) untuk mengembangkan nilai personal dan kebaikan untuk partisipasi berkelanjutan dalam dunia global. Jadi, ketiga tujuan pendidikan karakter itu mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Dengan kata lain nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter secara holistik.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan melalui integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan. Amirullah Syarbini (2012: 59) menguraikan strategi pendidikan karakter dalam uraian berikut.

Strategi pendikar dalam mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendikar ke dalam kompetensi dasar (KD). Dalam konteks ini setiap guru mata pelajaran di sekolah diharuskan untuk merancang standar kompetensi (SK) yang mengintegrasikan nilai-nilai pendikar di dalamnya. Selanjutnya KD yang telah terintegrasikan dengan nilai-nilai pendikar tersebut dikembangkan pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Berbeda dengan Zubaedi (2011: 200) menegaskan bahwa untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, karena memang misinya adalah mengembangkan nilai-nilai dan sikap, maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan nilai. Untuk kedua mata pelajaran tersebut, nilai karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (*instructional effect*) dan juga dampak pengiring (*murturant effects*). Program pendidikan karakter mencerminkan pendekatan moralitas yang terinspirasi oleh karakter (kebaikan dan keburukan), pendidikan ini ditujukan untuk mengembangkan kebaikan tertentu pada peserta didik yang dapat berpengaruh besar dalam praktik pendidikan (Jeanne Pietig, 1977: 170). Ada 11 prinsip (Thomas Lickona, 1996: 99) yang dapat digunakan sekolah untuk merencanakan pendidikan karakter dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Pendidikan karakter meningkatkan nilai etis inti sebagai dasar karakter yang baik;
- 2) “karakter” harus ditentukan secara komprehensif yang meliputi pemikiran, perasaan, dan tingkah laku;
- 3) pendidikan karakter yang efektif membutuhkan pendekatan yang disengaja, proaktif, dan komprehensif yang meningkatkan nilai-nilai inti dalam semua tahapan kehidupan di sekolah;
- 4) sekolah harus menjadi komunitas yang peduli;
- 5) untuk mengembangkan karakter, peserta didik perlu peluang untuk aksi moral;
- 6) pendidikan karakter yang efektif meliputi kurikulum akademik yang menyenangkan dan menantang dan menghormati semua peserta didik dan membantu mereka berhasil;
- 7) pendidikan karakter harus diupayakan untuk mengembangkan motivasi intrinsik peserta didik;
- 8) staf sekolah harus menjadi komunitas pembelajaran dan moral,

dimana semua berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan mencoba mematuhi nilai inti yang memandu pendidikan peserta didik; 9) pendidikan karakter memerlukan kepemimpinan moral dari staf dan peserta didik; 10) sekolah harus merekrut orang tua dan masyarakat sebagai mitra penuh di upaya membangun karakter; dan 11) evaluasi pendidikan karakter dapat menilai karakter dari sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter dan penyebaran karakter dengan manifestasi karakter peserta didik yang baik.

Ke- 11 prinsip tersebut di atas, dapat menjadi dasar yang efektif, efisien dan strategis dalam penyusunan perencanaan pendidikan karakter di lembaga pendidikan secara menyeluruh. Penulisan paper ini hasil dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah studi pustaka (*literature review*) dengan cara mengumpulkan informasi/data dari berbagai sumber. Data-data diperoleh dari Al Quran, peraturan, dan berbagai jurnal serta buku-buku pendukung yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, dengan mendokumentasikan berbagai sumber yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Sumber yang berkaitan dengan pendidikan karakter dianalisis secara *hermeneutik*, yaitu ditafsirkan atau diinterpretasikan.

PEMBAHASAN

Konsep “*Tarbiya Mukmin Ulul Albab*”

Konsep *ulul albab* merupakan salah satu model pendidikan yang ada di dalam pendidikan Islam. Konsep *ulul-albab* pertama kali ditemukan di UIN Maliki (Maulana Malik Ibrahim) Malang dari hasil penelitian (disertasi). Lailial Muhtifah (2010: 30) menguraikan bahwa istilah *ulul albab* dapat ditemukan dalam teks Al-Qur’an sebanyak 16 kali yang tersebar di 10 surah dengan topik yang berbeda, yaitu: 1) dalam QS .Al-Baqarah ayat 179, 197, 269; 2) QS.Ali- Imran ayat 7 dan 190; 3) QS.Al-Maidah ayat 100; 4) QS. Yusuf ayat 111; 5) QS.Al-Ra’d ayat 19; 6) QS.Ibrahim ayat 52; 7) QS.Shad ayat 29, 43; 8) QS.Al-Zumar ayat 9, 18, 21; 9) QS.Al- Mu’min ayat 54; dan 10) al-Thalaq ayat 10. Konsep tersebut sebagai bentuk diversifikasi kurikulumnya.

UIN Malang (2010: 59) menetapkan standar kelulusan mahasiswa dengan menetapkan indikatornya. Adapun indikatornya adalah apabila mahasiswa telah memiliki identitas dan kepribadian sebagai mahasiswa yang mempunyai: 1) ilmu pengetahuan yang luas; 2) penglihatan yang tajam, 3) otak yang cerdas, 4) hati yang lembut; dan 5) semangat tinggi karena Allah. Identitas *ulul albab* dapat dikenali melalui keluasan ilmu pengetahuan seseorang karena ia menganggap seluruh jenis ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi kehidupan. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan memiliki semangat atau gairah untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan untuk mengambil manfaatnya. Seseorang dengan penglihatan yang tajam juga merupakan salah satu identitas insan *ulul albab* yang mengandung pengertian bahwa seseorang memiliki kemampuan menganalisis seluruh kenyataan yang dapat ditangkap oleh seluruh indera manusia dalam upaya memperoleh ilmu pengetahuan. Seseorang dengan kualitas identitas *ulul albab* juga memiliki hati

yang lembut untuk dapat menerima kebenaran yang datang dari Allah SWT. Terakhir, seseorang dengan kualitas ulul albab akan selalu memiliki semangat tinggi karena Allah. Dalam hal ini, semangat untuk memperoleh pengetahuan yang dicita-citakan.

Kemudian konsep tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk 4 (empat) pilar pendidikan di UIN Maliki Malang, yakni: 1) kekuatan aqidah dan kedalaman spritual, 2) keagungan akhlaq, 3) keluasan ilmu dan 4) kematangan profesional. Ke- 4 pilar tersebut dijadikan penjaminan mutu lulusannya. Berdasarkan penjelasan tersebut bentuk diversifikasi kurikulumnya yang memayungi pengelolaan pendidikan di UIN Maliki Malang bernama “*Tarbiyah Ulul-Albab*”.

Dalam konsepsi Islam, *Tarbiyah Ulul-Albab* juga bisa dianggap sebagai integrasi antara kekuatan wahyu dan kekuatan akal, atau dengan kata lain integrasi antara ilmu dan agama.

Dengan demikian, insan ulul albab adalah insan yang dalam dirinya terbina di atas dasar keimanan yang kukuh dan intelektualitas yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan gagasan baru yang kreatif, dinamis dan inovatif, untuk dapat diterjemahkan dalam bentuk amal saleh. Hal ini sejalan dengan firman Allah salah-satunya dalam QS. Ali Imran: 190-191. Selanjutnya, istilah “*Mukmin Ulul Allbab*” ditemukan oleh Lailial Muhtifah (2012:80) dari hasil analisis terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan tentang fungsi dan tujuan Sisdiknas sebagai berikut.

Pendidikan nasional berfungsi (1) mengembangkan kemampuan dan (2) membentuk karakter serta (3) peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman (*Mukmin*) dan bertakwa (*Muttaqiin*) kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia (*Zikir*), sehat (*Zikir*), berilmu (*Fikir*), cakap (*Fikir*), kreatif (*Zikir*), mandiri (*Zikir*), dan menjadi warga negara yang demokratis (*Zikir* dan *Amal Shaleh*) serta bertanggung jawab (*Zikir* dan *Amal Shaleh*). Menurut Al-Qur’an *Zikir*, *Fikir* dan *Amal Shaleh* adalah kriteria manusia yang beridentitas *Ulu Al-Albab* (ada 16 ayat dalam Al- Qur’an). Adapun *muttaqiin* sudah termasuk ke dalam identitas orang yang beriman. Dengan demikian tujuan sisdiknas adalah “*Mukmin-Ulul Albab*” (MUA), dan diversifikasi kurikulumnya yang memayungi pendidikannya menjadi “*Tarbiyah Mukmin Ulul-Albab*”.

Jadi, ada kesamaan konsep diversifikasi kurikulum di UIN Maliki Malang dengan tujuan Sisdiknas. Kemudian konsep tarbiya ulul albab diintegrasikan, disinkronkan dan diharmonisasikan dengan konsep dan makna fungsi dan tujuan Sisdiknas menjadi “*Tarbiya Mukmin Ulu Al-Albab*” (TMUA).

Manusia dalam pandangan Islam dilengkapi dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan antara lain berupa fitrah ketauhidan (Q.S. 15:29). Dengan fitrah ini diharapkan manusia dapat hidup sesuai dengan hakekat penciptaannya, yaitu mengabdikan kepada Allah swt. selaku Penciptanya (Q.S. 51:56).¹²⁴

¹²⁴Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 17-18.

Kata mukmin dapat ditemukan dalam teks al-Qur'an sebanyak 15 kali di beberapa tempat dan topik yang berbeda, yaitu dalam QS.Al-Baqarah ayat 221; QS.An-Nisa' ayat 92, 124, 93; QS.At-Taubah ayat 10; QS.Yusuf ayat 17; QS.An-Nahl ayat 97; QS.Al-Isra' ayat 19; QS.At-Taha ayat 112; QS. Al-Anbiya' ayat 94; QS.Al-Ahzab ayat 36; QS.Al-Hasyr ayat 23; QS.At-Tagabun ayat 2. Sementara kata *mukminun* disebut sebanyak 35 kali. Sedangkan kata *mukminin* muncul paling banyak, sebanyak 144 kali.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, ada 24 karakter orang yang beriman (mukmin), boleh jadi lebih dari itu, yaitu: (1) tawakkal kepada Allah (QS.Ali Imran: 160); (2) memperdalam pengetahuan tentang agama dan menyebarkannya (QS.Al-Baqarah: 122); (3) orang-orang mukmin bersaudara sesamanya (QS.Al-Hujurat); (4) mendengar dan mematuhi perintah Allah (QS.Al-Baqarah: 285); (5) pemimpin memimpin satu sama lain (QS.Al-Baqarah: 71); (6) pengorbanan diri dan harta; (7) tidak pantas menikah dengan wanita yang ternoda (QS.An-Nur: 3); (8) sangat dekat dengan Nabi (QS.Al-Ahzab: 6); (9) tambah beriman dan menyerahkan diri ketika menghadapi musuh (QS.Al-Ahzab: 22); (10) jangan menyakiti orang mukmin yang tiada bersalah (QS.Al-Ahzab: 58); (11) jiwanya tenang (QS.Al-Fath: 4); (12) menguji keimanan kaum mukminat (QS.Al-Mumtahanah: 10); (13) kaum mukminat mengambil bai'at (QS.Al-Mumtahanah: 12); (14) laki-laki mukminin hendaklah membatasi pandangan dan jaga kehormatan terhadap wanita (QS.An-Nur: 30); (15) wanita mukminat hendaklah membatasi pandangan, menjaga kehormatan dan menutup aurat (QS.An-Nur: 31); (16) mukminin tiada boleh berhati lemah dan berdukacita (QS.Ali-Imran: 139); dan (17) mencari pemimpin dari golongan sendiri (QS.Ali-Imran: 139); (18) orang-orang mukmin, mereka mengamalkan dan menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar (QS.At-Taubah: 71); (19) gemetarlah hatinya jika disebut nama Allah, dan senantiasa bertambahlah imannya bila dibacakan ayat-ayat-Nya (QS.Al-Anfal: 2-4); (20) mereka selalu menepati dan memelihara amanah dan janji-janjinya (QS.As-Sajadah: 15-16); (21) mereka memelihara shalat dan melaksanakannya dengan khusyuk (QS.An-Nahl: 94-97); (22) mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka (QS.Al-Hujurat: 14-15), (23) menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tak berguna, menjaga kemaluannya/kehormatannya, menunaikan zakat, dan sebagainya (QS.As-Saff: 10-13); dan (24) mereka itulah yang beriman dengan sebenarnya (QS.Al-Mu'minun: 1-11).

Lailial Muhtifah (2012: 122-123) menguraikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan keimanan sangat bervariasi sejalan dengan bervariasinya lapangan kehidupan itu sendiri. Contohnya firman Allah dari Qs. Al-Baqarah ayat 1-5, dimana firman Allah tersebut menggugah keimanan melalui perkara gaib, ayat-ayat Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah seperti shalat dan zakat. Dengan pengarahan tersebut manusia diharapkan beriman kepada Allah, pencipta segala sesuatu dan perenungan tentang kerajaan Allah sehingga iman seseorang akan makin kokoh. Penyebutan Al-Qur'an tentang "orang-orang beriman" yang selalu diiringi dengan sifat "orang-orang yang mengerjakan amal shaleh" menunjukkan hubungan yang erat antara iman dan amal shaleh (QS.Al-'Asr: 1-3). Fadhil Al-Jamali mengemukakan hubungan antara iman, akhlak, ilmu dan amal shaleh sebagai konstruksi pendidikan qur'ani dimana setiap komponennya saling terkait secara koordinatif dan kokoh yaitu: Iman

merupakan sumber akhlak yang luhur. Akhlak pada gilirannya menuntun manusia untuk menemukan kebenaran dan hakikat, yaitu ilmu, sedangkan ilmu akan menuntun manusia untuk mengerjakan amal saleh. Jadi, iman merupakan dasar akhlak yang luhur; akhlak merupakan dasar ilmu yang benar; dan ilmu merupakan dasar amal yang saleh. Selanjutnya, dapat diuraikan bahwa kegunaan iman pada orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal saleh yaitu mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya, dibawah mereka mengalir sungai-sungai yang penuh kenikmatan (QS.Yunus: 9).

Sabda Rasulullah SAW di bawah ini menegaskan hubungan antara iman dan amal, akhlak, serta muamalat sebagai berikut.

“Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.” Beliau ditanya, “Siapakah yang dimaksud, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya.” (Muttafaq ‘alaih).

Berdasarkan uraian di atas, cenderung bahwa konsep TUA yang dipraktekkan di UIN Maliki Malang perlu disempurnakan menjadi “*Tarbiyah Mukmin Ulu Al-Albab* (TMUA)” sebagai diversifikasi kurikulum Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang berkarakter “*Mukmin Ulu Al-Albab*”.

Integrasi Pertumbuhan Nilai-Nilai Karakter MUA melalui Pendidikan Karakter yang Holistik

Akhir sebuah proses pendidikan adalah karakter. Pada umumnya disepakati bahwa karakter yang baik menyiratkan moral dan perilaku yang benar (Arthur, J, Wilson, K & Gray, B, 2009: 11). Pendidikan karakter adalah “seperangkat program pendidikan moral berbasis sistematis di sekolah” (David I. Walker, Michael P. Roberts & Kristján Kristjánsson, 2015:79). Berbeda dengan konsep Islam, Islam mengakhiri proses pendidikan dengan terwujudnya karakter atau akhlak mulia. Pendidikan Islam mengantarkan lulusannya melalui proses pendidikan yang berkarakter “*Mukmin Ulul-Albab*”. Karakter *Mukmin Ulul-Albab* ditumbuhkan melalui proses pendidikan dan pengajaran dalam pembelajaran baik di kelas, sekolah dan di rumah. Pertumbuhan karakter “*Mukmin Ulul-Albab*” bisa dilakukan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pendidikan, baik proses pendidikan di sekolah/madrasah, rumah maupun di masyarakat. Proses integrasi ilmu pengetahuan yang bersumber dari ilmu kaunyah dan ilmu qauliyah.

Karakter “*Mukmin Ulul-Albab* (MUA)” ditumbuhkan melalui pengembangan kepribadian *Mukmin Ulul-Albab* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang tertuang di dalam Al-Qur’an- Hadits, filosofi Pancasila, sesuai dengan tujuan Sisdiknas, sesuai dengan konsep pendidikan karakter, dan sesuai dengan konsep Pendidikan Islam. Lebih rinci praktek baik pengembangan karakter ulul albab di UIN Maliki Malang meliputi 9 komponen dasar yaitu: (1) filosofi TUA, (2) ukuran keberhasilan, (3) orientasi TUA, (4) pendekatan TUA, (5) budaya pendidikan, (6) struktur keilmuan, (7) dosen, mahasiswa dan karyawan, (8) identitas dan bahasa pergaulan warga kampus, dan (9) manajemen pengelolaan dan pengembangan kampus.

Dalam rumusan standar mutu menurut UIN Maliki Malang sebagaimana dikutip oleh Lailial Muhtifah (2012: 104-105) telah menggambarkan karakter “*Ulul Al*

Albab” dengan 4 pilar, yaitu:

”*Pertama*, kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual dengan indikator yakni; (1) mencari Ridha Allah SWT dan dekat dengan Allah SWT, (2) jiwanya menjadi tenang, (3) rajin beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, (4) menjadi individu yang memiliki kesalehan individual dan sosial, (5) bisa membaca al Qur’an dengan benar dan baik, (6) terbiasa membaca dan mempelajari al Qur’an dan hadist sebagai sumber ajaran Islam, (7) hati gemetar jika disebut nama Allah, (8) menjalankan perintah Allah, (5) selalu menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT, (9) menunaikan zakat, puasa ramadhan dan amalan sunnah yang lain yang dianjurkan, (10) menjaga moral dan mengontrol tabiat dan perilaku seksual, (11) menghormati dan mencintai saudara, (12) menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna, (13) memuliakan tetangga dan tamu, dan (14) memiliki kepekaan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu perbuatan. *Kedua*, keagungan akhlak dengan indikator terdiri dari; (1) memiliki sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul (siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah), (2) jujur, (3) sopan santun dalam pergaulan, (4) menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna, (5) bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan (6) disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku. *Ketiga*, keluasan ilmu dengan indikator yaitu; (1) berpikir ilmiah, mampu memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah, (2) berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan alternatif baru dalam memecahkan masalah, (3) mengambil keputusan, mampu memilih salah satu dari berbagai alternatif, (4) mampu memahami isi buku teks berbahasa asing minimal dua bahasa (Arab/Inggris) tanpa banyak kesulitan, (5) mampu menyajikan isi pikiran secara lisan dengan sistematis dan mudah dipahami, (6) mampu menulis karya ilmiah dengan sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, (7) mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, (8) memahami pokok-pokok IPS, IPA dan humaniora sebagai landasan bagi pengembangan keahliannya, (9) memahami ajaran Islam yang normatif dan empiris sebagai landasan bagi pengembangan bidang keahliannya dan (10) menguasai bidang keahliannya yang dilandasi oleh spirit ajaran dan nilai-nilai Islam. *Keempat*, kematangan profesional (*professional maturity*) indikatornya adalah; (1) mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, (2) memiliki komitmen terhadap mutu dan proses dari pekerjaan, (3) memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, (4) mampu memberikan layanan yang bermutu terhadap masyarakat, (5) selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, (6) terampil memilih, mengoperasikan dan memanfaatkan serta memelihara perangkat teknologi, (7) terampil mencari, mengolah dan menyajikan informasi, (8) terampil mengelola sumberdaya (manusia, dana, waktu, dan barang), (9) terampil dalam menentukan skala prioritas, (10) terampil dalam bekerjasama, (11) memiliki rasa optimisme, (12) selalu menginginkan pembaharuan, dan (13) berani menanggung resiko”.

Empat pilar tersebut di atas dapat diintegrasikan dengan 9 pilar karakter dari *Heritage Foundation* (HF), dari karakter grand desain Kemendiknas (GDK), dan delapan karakter Indonesia Emas (KIE) 2025, dapat dibaca pada Tabel 1.

Tabel 1: Core Values (CV), Pilar Karakter dan Nilai-Nilai Karakter

NO.	CORE VALUES (CV)	PILAR KARAKTER TMUA-GD Kemendiknas	NILAI-NILAI KARAKTER
1.	<p><i>Zikir (Tarbiyah Mukmin Ulul Albab)</i> <i>Moral Feeling (Thomas Lickona)</i></p>	<p>- Kekokohan Aqidah dan Kedalaman Spiritual (Tarbiyah Mukmin Ulul Albab) - Olah Hati (GD Kemendiknas) - Keagungan Akhlak-Olah Rasa dan Karsa</p>	<p>- TMUA: Banyak jumlahnya sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran yang dipelajari, antara lain; Cinta kepada Allah dan Rasul/Nabi, rajin beribadah, terampil dan terbiasa membaca Al-Qur'an, dll. - Thomas Lickona: Conscience, self esteem, empathy, loving the good, self control, dan humilify. - GD Kemendiknas: Religius - TMUA: Banyak jumlahnya sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran yang dipelajari, antara lain; Siddiq, amanah, tabligh, fathonah, disiplin, dll - GD Kemendiknas: Jujur, tanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, peduli, dan kerjasama (gotong royong).</p>
2.	<p>- <i>Fikir (Tarbiyah Mukmin Ulul Albab)</i> - <i>Moral Knowing (Thomas Lickona)</i></p>	<p>- Keluasan Ilmu-Olah Pikir</p>	<p>- TMUA: Banyak jumlahnya sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran yang dipelajari, antara lain; Berpikir dan bertindak dengan pendekatan ilmiah, kreatif, inovatif, dll. - Thomas Lickona: Moral awareness, knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making, self knowledge - GD Kemendiknas: Cerdas, kreatif, gemar membaca, dan rasa ingin tahu.</p>
3.	<p>- <i>Amal Shaleh (Tarbiyah Mukmin Ulul Albab)</i> - <i>Moral Action (Thomas Lickona)</i></p>	<p>- Kematangan Profesional- Olah Raga</p>	<p>- Thomas Lickona: Competence, will, habit - GD Kemendiknas: Sehat, dan bersih</p>

Tabel 2: Integrasi Nilai-Nilai Karakter Sumber Ilmu *Qauliyah* dan *Kauniyah*

No.	Nilai-Nilai Karakter/Sumber Ilmu	Model Pengembangan Karakter
1.	<p><i>Tarbiyah Ulul Albab/Qauliyah dan Kauniyah:</i> Mencari Ridha Allah SWT dan dekat dengan Allah SWT, jiwanya menjadi tenang, rajin beribadah, memiliki kesalehan individual dan sosial, bisa membaca al Qur'an dengan benar dan baik, terbiasa membaca dan mempelajari al Qur'an dan hadist sebagai sumber ajaran Islam, hati gemetar jika disebut nama Allah, menjalankan perintah Allah, selalu menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan amalan sunnah yang lain yang dianjurkan, menjaga moral dan mengontrol tabiat dan perilaku seksual, menghormati dan mencintai saudara, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna, memuliakan tetangga dan tamu, dan memiliki kepekaan moral, siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, jujur, sopan santun dalam pergaulan, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku, berpikir ilmiah, mampu memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan alternatif baru dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, mampu memilih salah satu dari berbagai alternatif, mampu memahami isi buku teks berbahasa asing minimal dua bahasa (Arab/Inggris) tanpa banyak kesulitan, mampu menyajikan isi pikiran secara lisan dengan sistematis dan mudah dipahami, mampu menulis karya ilmiah dengan sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, memahami pokok-pokok IPS, IPA dan humaniora sebagai landasan bagi pengembangan keahliannya, memahami ajaran Islam yang normatif dan empiris sebagai landasan bagi pengembangan bidang keahliannya dan menguasai bidang keahliannya yang dilandasi oleh spirit ajaran dan nilai-nilai Islam, mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, memiliki komitmen terhadap mutu dan proses dari pekerjaan, memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, mampu memberikan layanan yang bermutu terhadap masyarakat, selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, terampil memilih, mengoperasikan dan memanfaatkan serta memelihara perangkat teknologi, terampil mencari, mengolah dan menyajikan informasi, terampil mengelola sumberdaya (manusia, dana, waktu, dan barang), terampil dalam menentukan skala prioritas, terampil dalam bekerjasama, memiliki rasa optimisme, selalu menginginkan pembaharuan, dan berani menanggung resiko.</p>	<p>UIN Maliki Malang</p>
2.	<p>Nilai-nilai karakter/Kauniyah: Religius, jujur, tanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, cerdas, kreatif, gemar membaca, rasa ingin tahu, sehat, bersih, peduli, dan kerjasama (gotong royong).</p>	<p>Grand Design Kemendiknas</p>
3.	<p>Nilai-nilai karakter/Kauniyah: Moral awareness, knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making, self knowledge, competence, will, habit, conscience, self esteem, empathy, loving the good, self control, dan humilify.</p>	<p>Thomas Lickona</p>
4.	<p>Nilai-nilai karakter/Kauniyah: Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.</p>	<p>Heritage Foundation</p>

Filosofi Model Sekuntum Bunga Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis “*Tarbiya Mukmin Ulul Albab*”

Filosofi model variasi nilai-nilai pendidikan karakter berbasis tarbiya “*mukmin ulul albab*” dinamakan dengan model sekuntum bunga berdasarkan filosofi biologi bunga. Bunga berfungsi utama menghasilkan biji. Fungsi biologi bunga adalah sebagai wadah memproduksi atau menyatunya gamet jantan (mikospora) dan betina (makrospora) untuk menghasilkan biji. Proses dimulai dengan penyerbukan, yang diikuti dengan pembuahan, dan berlanjut dengan pembentukan biji. Lailial Muhtifah (2017:10) menguraikan tentang filosofi bunga sebagai berikut.

Filosofi bunga dapat ditransformasi ke dalam pendidikan karakter, yaitu bersatunya tripusat pendidikan (lembaga pendidikan informal, formal dan nonformal) sebagai wadah menyatunya/integrasinya nilai-nilai karakter yang bersumber dari sumber ilmu yang berasal dari Al-Qur’an-Hadits (*Qauliyah*) dan nilai-nilai yang bersumber dari sumber ilmu fenomena alam (*kauniyah*) untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menghasilkan peserta didik yang berkarakter kuat dan baik. Peserta didik yang memiliki karakter kuat dan baik akan menarik untuk dilihat serta akan menyegarkan dan menyenangkan hati. Dalam konteks pengembangan kurikulum pendidikan karakter berbasis TMUA filosofi bunga tersebut adalah upaya menumbuhkan, mengembangkan dan menghasilkan karakter “*Mukmin Ulul Albab*” melalui bekerja samanya dan terhubungnya program-program tripusat pendidikan dengan mengintegrasikan/menyatukan nilai-nilai karakter yang bersumber dari sumber ilmu *qauliyah* dan nilai-nilai karakter yang bersumber dari sumber ilmu *kauniyah*. Peserta didik yang memiliki karakter kuat dan baik menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan, ayat 74 dinamakan dengan “*Qurrata ‘A’yun*” (menyegarkan mata dan menyenangkan hati), karena memiliki sikap dan perilaku yang menyenangkan. Sikap dan perilaku yang positif itu akan mengharumkan nama baik pendidik (orang tua, guru, dan tokoh agama/tokoh masyarakat), agama, bangsa dan negara sebagaimana harumnya bunga yang semerbak, serta menjadikannya pemimpin bagi orang yang bertaqwa. Harum bunga tersebut dan karakter orang yang bertaqwa dan atau beriman dapat mensejahterakan dan membahagiakan hidup di dunia sampai akhirat. Karakter “*Mukmin Ulul Albab*” akan memiliki daya saing yang tinggi dalam membangun bangsa yang bermartabat.

Filosofi bunga yang sempurna (ideal) terdiri dari 6 jenis; 1) tangkai bunga, 2) daun bunga, 3) kelopak bunga, 4) mahkota bunga, 5) benang sari, putik, dan proses pembentukan biji, dan 6) faktor penentu keberhasilan proses pembentukan karakter bangsa melalui diversifikasi kurikulum berbasis “*Tarbiyah Mukmin Ulul Albab*” yang holistik dan terintegrasi. Keenam jenis tersebut dapat ditransformasi ke dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter melalui PAI berbasis “*Tarbiyah Mukmin Ulul Albab*” holistik-terintegrasi dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, tangkai bunga mencerminkan pendekatan yang digunakan dalam membentuk karakter MUA dengan pendekatan paradigmatis melalui pendidikan kritis transformatif, dengan paradigma; pendidikan yang humanis-konstruktivistik, pendidikan agama Islam yang rasional-fungsional bukan pendidikan agama Islam yang dogmatis-doktriner, dan pendidikan

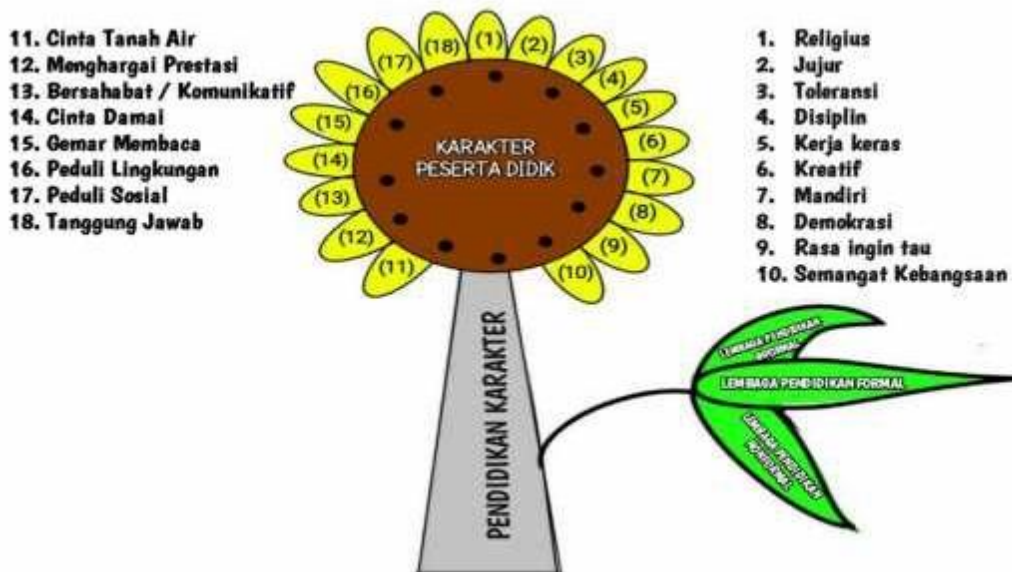
kewarganegaraan yang demokratis dengan mengutamakan proses musyawarah. *Kedua*, daun bunga melambangkan bekerja samanya dan terhubungnya tripusat pendidikan melalui perencanaan program dalam membentuk peserta didik berkarakter “*Mukmin Ulul Albab*”. Fungsi tripusat pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang penting dan strategis dalam memasok kebutuhan akan nilai-nilai karakter dan pengembangannya serta memproses terbentuknya karakter “*Mukmin Ulul Albab*” melalui konversi proses pemberdayaan, pembiasaan, dan intervensi nilai-nilai karakter menjadi energi budaya dan pedoman dalam kehidupan. *Ketiga*, kelopak bunga mencerminkan nilai-nilai inti (*core values*) atau CV dari karakter yang dikembangkan. CV dari model TMUA, yakni; zikir (afektif), fikir (kognitif) dan amal shaleh (psikomotor). CV dari *grand design* pendikar Kemendiknas, yaitu: olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa. *Keempat*, mahkota bunga melambangkan pengembangan nilai-nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai inti, pokok bahasan pada mata pelajaran, nilai-nilai budaya yang dikembangkan, dan sumber ilmunya. Pengembangan nilai dari model TMUA yakni; kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional. Keempat pilar tersebut dapat dikembangkan nilai-nilai karakter sesuai dengan pokok bahasan dan budaya tripusat pendidikan. Keempat pilar tersebut dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai inti dan nilai-nilai karakter dari sumber ilmu *Qauliyah* (Al-Qur’an-Hadits) dan dari sumber ilmu *Kauniyah* (empirik/fenomena alam).

Kelima, benang sari, putik dan proses pembentukan biji. Benang sari adalah nilai-nilai inti, nilai-nilai karakter dan pengembangannya yang berasal dari sumber ilmu *Qauliyah* (Al-Qur’an-Hadits). Putik adalah nilai-nilai inti, nilai-nilai karakter dan pengembangannya yang berasal dari sumber ilmu *Kauniyah* (empirik/fenomena alam). Integrasi kedua sumber ilmu tersebut menghasilkan peserta didik yang berkarakter MUA yang kuat dan baik. *Keenam*, faktor-faktor penentu keberhasilan proses pembentukan karakter bangsa melalui diversifikasi kurikulum berbasis “*Tarbiyah Mukmin Ulul Albab*” yang holistik dan terintegrasi.

Keenam jenis filosofi bunga tersebut di atas sungguh indah, menarik, saling kait mengait dan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pertumbuhan karakter TMUA melalui tahapan keenam proses tersebut.

Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional

Nilai-nilai pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam beberapa variasi model, sebagaimana uraian berikut.



Gambar 1 Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional

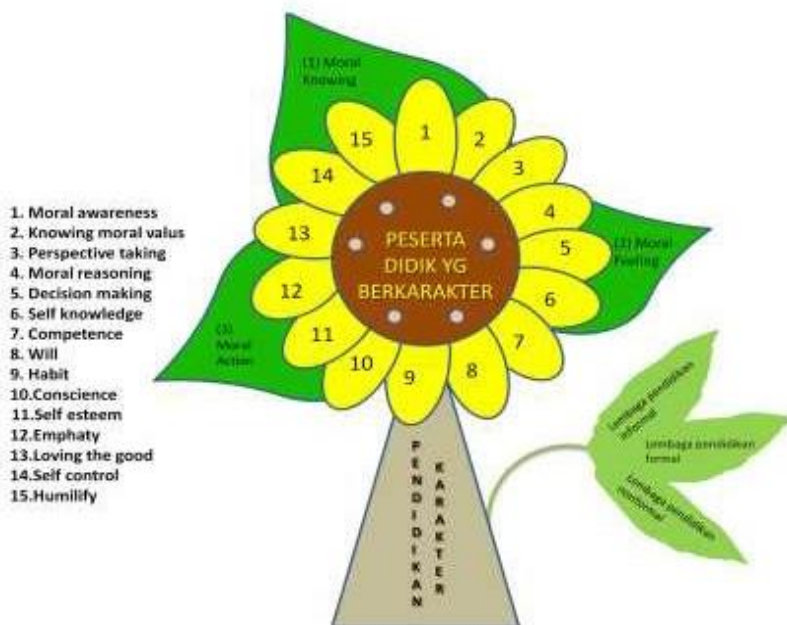
Model tersebut dapat di analisis berdasarkan filosofi biologi bunga yang belum lengkap/sempurna, karena tidak ditemukan adanya kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti atau CV (*Core Values*) dari karakter yang dikembangkan. Sebagai contoh CV; zikir, fikir dan amal shaleh. Perbedaan lainnya: model tersebut tidak ditemukan landasan pokok sebagai basisnya dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan ada 18.

Dari Heritage Foundation



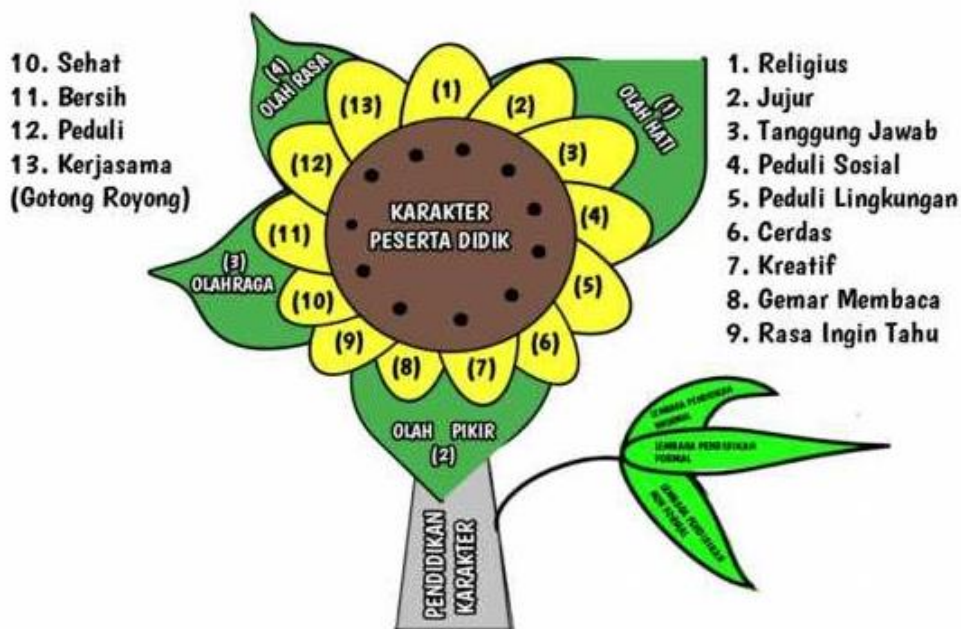
Gambar 2 Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidikan

Secara umum, hasil analisis model tersebut sama dengan hasil analisis gambar 4. Perbedaannya terletak pada jumlah nilai-nilai karakter yang dikembangkan ada 9. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan berasal dari sumber ilmu *kauniah*. Model tersebut dapat dianalisis berdasarkan filosofi biologi bunga yang belum lengkap/sepurna. Karena tidak ditemukan adanya kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti atau CV (*Core Values*) dari karakter yang dikembangkan. Sebagai contoh CV: zikir, fikir dan ama shaleh. Perbedaan lainnya adalah model *Heritage Foundation* (HF) tersebut tidak ditemukan landasan pokok sebagai basisnya.



Gambar 3. Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidikan dari Thomas Lickona

Hasil analisis model tersebut sama dengan hasil analisis gambar 3. Perbedaannya terletak pada jumlah nilai-nilai karakter yang dikembangkan ada 15. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan berasal dari sumber ilmu *kauniah*. Model tersebut dapat di analisis berdasarkan filosofi biologi bunga yang lengkap/sepurna, karena memiliki kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti atau CV (*Core Values*) dari karakter yang dikembangkan, yaitu; *moral knowing* (fikir), *moral feeling* (zikir), dan *moral action* (amal shaleh). Perbedaan lainnya adalah model tersebut tidak memiliki landasan pokok sebagai basisnya.



Gambar 4 Variasi Model Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dari Kurikulum Pendidik *Grand Design* Kemendiknas

Temuan model tersebut sama dengan hasil analisis gambar 3 dan 6. Perbedaannya adalah nilai-nilai karakter yang dikembangkan ada 13, dan model tersebut belum memiliki landasan sebagai basisnya. CV pada model tersebut, yakni; olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan berasal dari sumber ilmu *kaunyah*. Model tersebut dapat di analisis berdasarkan filosofi biologi bunga yang lengkap/sempurna, karena ditemukan adanya kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti atau CV (*Core Values*) dari karakter yang dikembangkan. Sebagai contoh CV; zikir, fikir dan amal shaleh.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan deskripsi hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter berbasis tarbiya mukmin *ulul albab* dapat ditemukan empat alternatif variasi model integrasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut. Variasi model pertama bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Variasi model kedua bersumber dari pendidikan karakter heritage foundation. Variasi model ketiga bersumber dari Thomas Lickona. Variasi model keempat bersumber dari kurikulum pendidikan karakter grand design Kemendiknas. Namun, variasi model integrasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut menunjukkan bahwa pada keempat variasi model tersebut tidak ditemukan adanya kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti (*core values*) dari karakter yang dikembangkan jika berbasis *core values* tarbiya mukmin *ulul albab* yaitu dzikir, pikir, dan amal shaleh. Pada model pertama, kedua, dan ketiga tidak ditemukan landasan pokok sebagai basisnya, jika

dianalisis berdasarkan filosofi bunga. Pada variasi model keempat ditemukan dianggap lengkap/sepurna karena ditemukan adanya kelopak bunga yang mencerminkan nilai-nilai inti atau *core values* dari karakter yang dikembangkan, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1971. Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Amirulloh Syarbini. 2012. *Buku Pintar Pendidikan Karakter, Panduan Lengkap Mendidik karakter Anak di sekolah, madrasah, dan Rumah*. Jakarta; as@-prima Pustaka.
- Arthur, J, Wilson, K & Gray, B 2009, *Graduates of Character - Values and Character: Higher Education and Graduate Employment*. Birmingham; 15 2TT UK. University of Birmingham.
- Bagus. 2011. *Pendidikan Karakter Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat*. Yogyakarta. Penerbit; Samudra Biru.
- David I. Walker, Michael P. Roberts & Kristján Kristjánsson (2015). Towards a new era of character education in theory and in practice, *Educational Review*, 67:1, 79-96.
- Elfendri, Lilik Hendrajaya, Muhammad Basri Wello, Hendmaidid, Elfa Eriyani, Ristapawa Indra. 2012. *Pendidikan Karakter, Kerangka, Metode dan Aplikasi untuk Pendidik dan Profesional*. Jakarta; Baduose Media.
- Endah Sulistyowati. 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta; Citra Aji Pratama.
- Jeanne Pietig. 1977. John Dewey and Character Education. *Journal of Moral Education*, 6 (3), 170-180.
- Lailial Muhtifah. 2012. *Opportunities and Challenges of Religious in the Global Era" Solution and Action": Rekonstruksi Manajemen Pendidikan Islam Yang Berkarakter Berbasis Multikulturalisme*. Pontianak: Stainpress
- 2010. Disertasi: *Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Core Value Tarbiyah Ulul Albab*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Lailial Muhtifah dan Ricka Tesi Muskania. 2017. Kerangka Konsep Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter Melalui Pai Berbasis "Tarbiyah Mukmin Ulul Albab". *AtTurats, Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*. At-Turats Vol. 11 No.1 (2017) 3 – 15.
- Maya Bialik, et. al. 2015. *Character Education for 21st Century: What Should Students Learn?*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- Thomas Lickona. 1996. Eleven Principles of Effective Character Education. *Journal of Moral Education*, 25 (1), 93-100.

Wina Sanjaya. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

BUDAYA MUTU DALAM BINGKAI PROFESIONALITAS DOSEN

(Autokritik Untuk Menjadi Dosen Yang Sadar Pada Profesinya)

Adri Efferi

A. PENDAHULUAN

Tulisan sederhana ini terinspirasi dari fakta-fakta yang tersaji dengan cukup gamblang di kalangan para dosen kita saat ini. Fakta pertama bermula dari sebuah perbincangan sederhana dalam group pertemanan di WhatsApp (WA). Perbincangan tersebut membahas tentang rencana pelatihan, yang akan diselenggarakan oleh salah satu Kementerian. Sejatinya bukan substansi dari pelatihan itu yang mencuri perhatian penulis, sehingga kemudian menjadi inspirasi untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Akan tetapi yang agak mengusik adalah ketika pihak panitia menyebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota group, agar bisa menjadi salah satu peserta dalam pelatihan tersebut.

Tensi perbincangan sedikit menjadi serius bahkan cenderung mulai memanas, ketika ada salah seorang anggota group yang mempertanyakan tentang batasan capaian skor, untuk menunjukkan kemampuan berbahasa asing bagi calon peserta pelatihan. Hampir seluruh anggota yang terlibat dalam perbincangan, meminta kepada pihak panitia untuk menurunkan batasan skor yang sudah ditetapkan. Ada kesan ironis atau bahkan mungkin bagi sebagian yang lain memandangnya miris, menyikapi fenomena ini apalagi perbincangan tersebut terjadi di group yang notabene anggotanya kaum terpelajar (para dosen).

Fakta kedua bernama scopus atau lebih lengkapnya adalah jurnal-jurnal yang terindeks scopus. Terus terang saja dalam bahasa yang bernada provokatif, saat ini scopus menjadi semacam musuh bersama (*public enemy*), di kalangan para akademisi atau dosen-dosen yang akan meningkatkan jenjang karir kepangkatannya (khususnya menjadi Guru Besar), karena merasa terganjal dengan karya ilmiah yang harus dipublikasi oleh jurnal-jurnal yang telah terindeks scopus. Beragam ekspresi dan nada keputusan terungkap, pihak pencetus ide menjadi pergunjungan karena dipandang yang paling bertanggungjawab atas mandek atau terhambatnya karir kedosenan mereka.

Tentunya masih banyak fakta yang lain seputar problematika yang terjadi dalam dunia dosen, tetapi sebagai bahan ilustrasi rasanya dua fakta itu sudah cukup mewakili pemikiran selanjutnya yang ingin penulis kemukakan. Karena terus terang penulis juga merasa khawatir apabila kemudian tulisan ini dicap sebagai ajang curhatan semata, padahal sesungguhnya ada ide yang lebih besar dari itu yaitu terkait dengan mutu atau masih rendahnya kesadaran akan budaya mutu di kalangan para dosen.

Barangkali ada yang bertanya, penjelasan lebih lanjutnya bagaimana sehingga penulis sampai pada kesimpulan di atas. Secara sederhana alur pikir yang penulis bangun, bahwa di era yang tingkat persaingan cukup ketat seperti sekarang ini, tentunya standard atau persyaratan apa pun juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi *supply and demand*, semakin rendah ketersediaan maka akan semakin tinggi nilainya. Sebagai contoh menjadi Guru Besar (Profesor) adalah impian atau target

setiap dosen sebagai posisi puncak dalam karir kedosenannya. Sudah barang pasti dalam kasus ini akan banyak dosen yang menginginkannya, dan berusaha untuk mencapai posisi terhormat tersebut. Sudah pasti sesuai dengan hukum alam, bila ada kompetisi maka akan ada pihak yang menang atau memperoleh kesempatan dan sudah pasti ada juga pihak-pihak yang belum mendapat kesempatan.

Demikian pula untuk kasus mengikuti pelatihan, lagi-lagi karena kuota terbatas maka pihak panitia kemudian menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Agar kemudian ketika ada pihak yang tidak bisa mengikuti, tidak membuat opini yang negatif tentang panitia, mungkin dianggap pilih-pilih, tidak profesional dan lain sebagainya.

Jadi menurut penulis sebenarnya dalam dua contoh kasus di atas, pada dasarnya merupakan hal yang normal-normal saja. Akan tetapi kemudian menjadi sesuatu yang ironis manakala terjadi tawar-menawar, bahkan ada kecenderungan untuk menggiring opini agar persyaratan atau standarnya diturunkan. Pertanyaannya, apakah sudah sedemikian rendahkah kualitas para dosen kita, sehingga tidak lagi mampu berkompetisi, atau dengan bahasa yang lebih halus apakah faktor yang menyebabkan sehingga para dosen kita mengalami krisis kepercayaan, sehingga takut memasuki suasana yang penuh persaingan seperti sekarang ini.

B. DOSEN SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL

Menurut arti bahasa, kata profesional bisa menunjukkan pada dua makna. *Pertama*, orang yang menyanggah suatu profesi tertentu, sehingga dalam keseharian biasa dipanggil sebagai seorang profesional. *Kedua*, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang sedang ditekuninya. Dalam pengertian yang kedua ini, istilah profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatiran.

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Lebih spesifik pada bab III berkenaan dengan prinsip profesionalitas, dalam pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Senada dengan bunyi ketentuan undang-undang di atas, Achmad Sanusi (2002) mengemukakan ciri utama suatu profesi sebagai berikut:

1. Fungsi dan signifikansi sosial; suatu profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang krusial.
2. Keterampilan/keahlian; untuk mewujudkan fungsi ini, dituntut derajat keterampilan/keahlian tertentu.
3. Pemerolehan keterampilan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Batang tubuh ilmu; suatu profesi didasarkan kepada suatu disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit (*a systematic body of knowledge*) dan bukan hanya *common sense*.
5. Masa pendidikan; upaya mempelajari dan menguasai batang tubuh ilmu dan keterampilan/keahlian tersebut membutuhkan masa latihan yang lama, bertahun-tahun, dan tidak cukup hanya beberapa bulan. Hal ini dilakukan pada tingkat perguruan tinggi.
6. Aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional; proses pendidikan tersebut juga merupakan wahana untuk sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan para siswa/mahasiswa.
7. Kode etik; dalam memberikan pelayanan kepada klien, seorang profesional berpegang teguh kepada kode etik yang pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.
8. Kebebasan untuk memberikan *judgement*; anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan *judgement*-nya sendiri dalam menghadapi atau memecahkan sesuatu dalam lingkup kerjanya.
9. Tanggung jawab profesional dan otonomi; komitmen pada suatu profesi adalah melayani klien dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab profesional harus diabdikan kepada mereka. Oleh karena itu, praktek profesional itu otonom dari campur tangan pihak luar.
10. Pengakuan dan imbalan; sebagai imbalan dari pendidikan dan latihan yang lama, komitmennya dan seluruh jasa yang diberikan kepada klien, maka seorang profesional mempunyai prestise yang tinggi di mata masyarakat, dan karenanya juga imbalan yang layak.

Jadi tidak diragukan lagi bahwa dosen adalah tenaga profesional dengan segala atribut yang melekat pada profesi tersebut. Bahkan pada pasal 3 ayat 1 jelas-jelas

disebutkan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun secara legal formal sudah tidak bisa terbantahkan lagi bahwa dosen adalah tenaga profesional, namun secara substansial apakah juga demikian. Barangkali butuh diskusi yang cukup serius untuk membuat sebuah kesimpulan, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa terpojokkan, karena tidak cocok dengan pilihan kata yang digunakan.

Akan tetapi beberapa kasus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh beberapa oknum dosen, seperti tidak memenuhi target minimal tatap muka di kelas, sering datang telat, pelecehan seksual, perselingkuhan, plagiasi dan lain sebagainya, barangkali cukup menjadi alasan mengapa kemudian penulis cenderung mengatakan bahwa profesionalitas dosen itu terkadang masih di atas kertas (legal formal), namun dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Meskipun penulis sadar bahwa kasus per kasus tidak bisa dijadikan sebagai bukti untuk melakukan generalisasi, tapi ibarat kata bijak “*karena nila setitik, rusak susu sebelanga*”, barangkali situasi seperti itulah yang saat ini kita hadapi.

C. BUDAYA MUTU VERSUS BUDAYA INSTAN

Mencoba untuk mengurai situasi pelik yang saat ini melanda dunia akademik, atau khususnya berhubungan dengan para dosen kita, menurut hemat penulis karena kurangnya kesadaran akan mutu dalam melakukan aktifitas profesinya. Lagi-lagi dalam bahasa penulis, masih banyak di kalangan dosen kita pada saat bekerja baru sebatas memenuhi persyaratan administrasi (menggugurkan kewajiban), dan belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas atau mutu dari yang dikerjakan.

Perlu diakui memang masih sulit untuk mendefinisikan apa itu mutu atau kualitas secara tegas, atau dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Akan tetapi secara umum, mutu didefinisikan oleh Goetsch D.L dan Davis D.L (2002) sebagai keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Dijelaskan “keadaan dinamik” merujuk pada kenyataan bahwa apa yang dianggap bermutu dapat dan sering berubah sejalan dengan berlakunya waktu dan pergantian keadaan lingkungan. Unsur “produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan”, menunjukkan mutu tidak hanya berlaku untuk produk dan jasa yang disediakan, melainkan juga orang dan proses yang menyediakan produk dan jasa itu serta lingkungan di mana produk dan jasa tersebut disediakan. Karena sifatnya yang dinamis Dawood (2007) menjelaskan “*Quality is elusive concept difficult to define; neither consultants nor business professionals agree on a universal definition. Part of the difficulty appears in expressing the philosophy and vision of quality in meaningful words and concepts.*”

Terlepas dari beragamnya definisi terkait mutu atau kualitas, namun satu hal yang barangkali kita bisa sepakat khususnya para dosen, dalam menjalankan tugas-tugas atau profesi kedosenan harus senantiasa berorientasi pada mutu atau kualitas, jangan hanya sekedar menunaikan kewajiban atau melepas tanggung jawab semata.

Oleh karena itu, proses menjadikan mutu sebagai bagian dari budaya (kebiasaan) rasa-rasanya menjadi kegiatan yang harus segera dimulai atau tidak dapat ditunda-tunda

lagi. Karena sesungguhnya sebagai insan berkeyakinan (pemeluk agama Islam), anjuran-anjuran untuk melakukan sesuatu dengan baik, berkualitas (bermutu) itu sangat banyak sekali, diantaranya: *“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila melakukan sesuatu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya.”* (Hadis Riwayat Baihaqi). Bahkan di dalam al-Qur’an disebutkan, kala berdebat pun kita harus melakukannya dengan cara terbaik. *“...Dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik...”* (an-Nahl/16: 125).

Oleh karena itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *“Fiqh Prioritas”* menegaskan bahwa kalau ada persaingan antar sesama Muslim, maka hendaknya itu adalah persaingan dalam melakukan yang baik dan yang paling baik. Bukan yang baik dengan yang buruk. Sementara itu, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa kala berdoa meminta surga, mintalah surga Firdaus. *“Apabila kamu meminta surga kepada Allah, maka mintalah Surga Firdaus karena ia surga yang terletak paling tengah dan paling tinggi, dan di atas adalah singgasana Tuhan.”* (Hadis Riwayat Bukhari).

Sejarah juga telah mencatat dengan tinta emasnya, betapa para sahabat dan ulama terkenal dalam Islam, dalam melakukan kebajikan juga berlomba untuk memberikan yang terbaik. Diantaranya Abu Bakar r.a dalam masa dua tahun telah berhasil mengalahkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu, mengembalikan orang murtad ke pangkuan Islam, mengirimkan tentara untuk menaklukkan Persia dan Romawi, mendidik orang-orang yang enggan membayar zakat, menjaga hak fakir miskin dan lain-lain.

Kemudian dari kalangan ulama, ada Imam Syafi’i, yang hidup selama 54 tahun (150-204 H) mampu memberikan berbagai sumbangan ilmiah yang orisinal. Imam Nawawi, yang hidup selama 45 tahun (631-676 H) meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi kaum Muslimin secara menyeluruh, baik berupa hadits maupun fiqh.

Kembali pada pembahasan kita di awal terkait dengan masih lemahnya kesadaran atau budaya mutu di kalangan para dosen kita, sesungguhnya banyak hal yang bisa menjadi variabel penyebabnya, dan satu diantaranya adalah merebaknya budaya instan atau semua serba ingin cepat.

Ada guyonan menarik di kalangan teman-teman kantor, apakah karena sekarang ini kita dihadapkan pada segala sesuatu yang serba instan, mulai dari makanan, minuman dan seterusnya. Maka tidak heran kemudian perilaku akademis kita sebagai dosen juga ikut-ikutan menyukai yang instan juga. Serba ingin cepat, serba ingin mudah, serba ingin murah dan serba-serba yang lainnya.

Berawal dari perilaku yang serba instan ini, maka tidak heran kemudian memunculkan tindakan-tindakan yang kurang terpuji pada beberapa oknum dosen. Sebagai contoh tindakan dosen yang memplagiat karya orang lain. Kalau dilihat secara akademis, mereka tidak tertinggal atau kekurangan dalam kemampuan akademisnya (karena ada yang bergelar profesor atau doktor), tetapi mengapa mereka bisa melakukan tindakan tidak terpuji ini ? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak mau repot, tidak mau susah atau dengan bahasa lain ingin yang instan.

Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan falsafah jawa: *“jer basuki mowo beo”*, arti secara sederhana adalah “untuk mencapai keberhasilan diperlukan biaya atau

pengorbanan”. Dengan bahasa lain, tidak ada capaian yang diperoleh secara gratis tanpa melewati usaha-usaha tertentu, bahkan terkadang untuk memperoleh hasil yang diharapkan, kita harus mengorbankan berbagai hal katakanlah waktu, tenaga, finansial dan lain sebagainya.

Dan tidak bermaksud menggurui, sebenarnya menurut penulis pada dosen kita sudah pada paham dengan logika sederhana tentang proses di atas. Tapi terkadang kenapa masih terjerembab juga dalam perbuatan tidak terpuji semisal plagiasi di atas. Bahasa penulis, disinilah butuhnya senantiasa memperkuat “Iman Akademis” kita, agar tidak mudah tergoda dengan bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu yang bersifat instan itu tadi. Lantas caranya bagaimana, yaitu dengan membudayakan mutu dalam setiap gerak dan nafas akademis kita. Tentunya banyak variabel pendukung untuk menciptakan budaya mutu ini, satu contoh: rasa malu. Implementasinya antara lain: merasa malu bila datang terlambat untuk memulai kuliah, merasa malu bila target penyampaian materi tidak tercapai, merasa malu dalam jangka waktu tertentu tidak punya karya penelitian, dan demikian seterusnya.

Barangkali dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sederhana ini, sesuai dengan pembahasan kita di awal bahwa profesionalitas dosen itu betul-betul terwujud secara substansial bukan hanya sebatas legal formal. Karena sesuatu yang substansi tentunya akan abadi, dan yang legal formal seiring dengan perjalanan waktu akan berubah, bahkan punah digantikan oleh sesuatu yang baru pula.

D. SIMPULAN

Pada dasarnya pertimbangan penghasilan atau imbalan, merupakan salah satu indikator suatu pekerjaan itu layak disebut sebuah profesi, dan orang yang mengerjakannya dipanggil sebagai profesional. Namun ironinya, yang terjadi belakangan ini adalah indikator penghasilan atau imbalan tersebut justru menjadi pertimbangan utama, sehingga dijadikan alasan atas ketidakprofesionalan seseorang dalam menjalankan profesi yang telah disandangnya.

Sebut saja beberapa oknum dosen, karena alasan penghasilan atau imbalan yang belum layak untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka profesi dosen yang seharusnya menjadi prioritas utama, malah menjadi nomer dua atau bahkan nomer tiga. Sehingga tidak heran pada saatnya mengisi kuliah, dosen yang bersangkutan malah berada di tempat lain sebagai konsultan proyek, pertemuan dengan klien dan lain sebagainya. Sejatinya ini juga tidak sepenuhnya dilarang, karena toh seorang dosen tugasnya mencakup tri dharma (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Akan tetapi menjadi kurang pas secara etika atau prinsip sebagai seorang profesional, ketika dia tidak bisa memilah-milah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prioritasnya.

Hal lain yang juga terkadang mencederai prinsip profesionalitas seorang dosen, adalah terperangkap dalam pola pikir pragmatis yang pada akhirnya perilaku atau budaya instan menjadi pilihan. Maka tidak heran kemudian kita lihat bersama terbongkarnya kasus seorang dosen mengakui hasil karya mahasiswanya sebagai hasil karyanya sendiri, atau beberapa tindakan plagiasi karya ilmiah demi semata-mata untuk memenuhi angka kredit kenaikan pangkat dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, mengakhiri tulisan singkat ini ada tiga hal yang ingin penulis tekankan kembali, pertama, marilah kita sebagai seorang dosen, betul-betul menyadari bahwa kita adalah kaum profesional, sehingga gerak-gerik kita dalam menjalankan profesi juga harus mencerminkan atau mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Kedua, hendaknya kesadaran akan mutu atau membudayakan mutu menjadi nafas dalam bekerja atau menjalankan profesi sebagai dosen, artinya ibarat nafas yang masuk dan keluar dari tubuh secara natural atau alami, itu jugalah yang harus kita lakukan. Hindarilah bekerja karena takut dimarahi atasan, gajinya akan dipotong, tidak bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, buanglah jauh-jauh budaya instan atau budaya semua serba cepat, serba mudah, serba murah dan sejenisnya. Karena ketika budaya ini kita anut atau menjadi prinsip dalam menjalankan profesi kedosenan kita, maka percayalah hanya akan menunggu waktu berbunyinya lonceng, sebagai tanda berakhirnya masa kita dalam menjalankan profesi yang mulia ini.

Semoga bisa menjadi inspirasi, tanpa bermaksud menggurui.

DAFTAR REFERENSI

- David L. Goetsch dan Stanley B Davis. (2002). *Pengantar Manajemen Mutu 2*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Mamoon, Dawood. (2007). *Macro Economic Uncertainty of 1990s and Volatility at Karachi Stock Exchange*. Munich Personal RePEc Archive Paper, No. 3219 Mei.
- Qardawi. Yusuf. (1996). *Fiqh Prioritas (Sebuah kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah)*. Jakarta: Rabbani Press.
- Sanusi. A. (2002). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Bandung: IKIP & Departemen P dan K.

LESSON STUDY SEBAGAI MODEL PEMBINAAN GURU DI SEKOLAH

Tjipto Subadi

Pendidikan Geografi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta Indonesia

e-mail: tjipto.subadi@ums.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) mencari model lesson study yang efektif sebagai model pembinaan guru di sekolah, 2) mengkaji validasi lesson study sebagai model pembinaan guru di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bergerak pada kajian mikro. Desain yang digunakan berbasis class action modication. Tempat penelitian di Sekolah Muhammadiyah Sukoharjo. Subjeknya guru IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan guru IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sedangkan informannya guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan anggota DPRD. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teori first order understanding dan second order understanding. Kesimpulan penelitian ini: 1) model lesson study yang efektif adalah lesson study berbasis siklus plan-do-see, berbasis MGMP, berbasis sekolah, berkolaborasi, dan belajar tutor sebaya, 2) validasi lesson study menggunakan a) validasi pengembangan teaching plan, b) validasi teaching material, c) validasi pelaksanaan open lesson dan refleksi, d) validasi teori, dan validasi implementasi.

Kata Kunci: model, peningkatan, guru, berbasis, lesson study, validasi.

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain; minat guru, siswa, metode, strategi, media, sarana dan prasarana, perpustakaan, laboratorium, lingkungan dan manajemen, serta model pembinaan yang digunakan. Peningkatan kualitas pembelajaran guru dengan model pembelajaran yang tepat di setiap jenjang pendidikan akan berpengaruh positif pada kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi akademik siswa dan kemudian akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang sekarang ini kualitasnya berada pada posisi sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain.

The Social Sciences dengan judul *A Development Model of Lesson Study-Based Social Science Teachers at Muhammadiyah Schools in Sukoharjo Regency, Central Java, Indonesia* mencatat bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 yang mendapat pengakuan

dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP), dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Khusus kualitas guru (sebelum sertifikasi guru) data guru yang layak mengajar, untuk SD hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12 % (negeri) dan 60,09 % (swasta), untuk SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), serta untuk SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta). (Subadi: 2016).1]

Data rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas menunjukkan ada masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. *Pertama*; masalah mendasar adalah kesalahan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. *Kedua*; masalah yang berkaitan dengan model pembinaan guru dan strategi pembelajaran. *Ketiga*; masalah lain yang berkaitan dengan aspek praktis penyelenggaraan pendidikan, antara lain; biaya, sarana-prasarana, kesejahteraan guru.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain, pemerintah telah menetapkan UU RI, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru atau dosen, agar guru atau dosen menjadi profesional. Pada satu pihak, pekerjaan sebagai guru atau dosen akan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi pada pihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru atau dosen memenuhi sejumlah persyaratan standar minimal sebagai seorang pendidik profesional yaitu kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan kompetensi.

Selain perangkat UU, *lesson study* sebagai model pembinaan guru yang dikembangkan di Jepang bisa dimanfaatkan sebagai model pembinaan guru di Indonesia. *Lesson study* sebagai model pembinaan guru dalam penelitian ini dimaksudkan suatu proses pelatihan guru yang bersiklus, berkelanjutan, diawali dengan guru berkolaborasi dengan guru lain melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi.

Peningkatan profesional pendidik dimaksudkan peningkatan kualitas tugas profesi guru utamanya pembelajaran adalah usaha untuk menjadikan pembelajaran lebih baik sesuai dengan keadaan yang diinginkan, diciptakan, kriterianya bersifat normatif yakni hasil tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang berpengaruh positif kepada prestasi akademik peserta didik (siswa). Pembelajaran seperti ini pada hakikatnya adalah merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik (Mulyasa, 2002).2] itulah sebabnya upaya guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran memiliki peran sebagai sumber belajar, fasilitator, organisator, demonstrator, konselor, motivator dan evaluator. Untuk menjadi guru yang berkualitas diperlukan pembinaan secara intensif melalui “model pembinaan guru” yang telah teruji dan berhasil seperti *lesson study* yang berhasil dikembangkan di Jepang sebagai model pembinaan pendidik profesional.

Lesson study dimulai di Jepang sekitar tahun 1870-an (Inagaki and Sato, 1996). *Lesson study* adalah suatu model analisis kasus pada praktik pembelajaran, ditujukan untuk membantu pengembangan profesional para guru dan membuka kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan praktik-praktik nyata di tingkat kelas.3]

Lesson study merupakan model pembinaan guru profesional yang dikembangkan di Jepang tersebut telah terbukti mampu meningkatkan profesional guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di negara sakura tersebut. *Lesson study* oleh guru-guru di Jepang dijadikan model pembinaan pendidik berkelanjutan, para guru berkolaborasi mengkaji pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan observasi, dan refleksi, bertujuan untuk memotivasi siswa aktif berkolaborasi dalam pembelajaran, guru dalam pembelajaran berusaha menciptakan siswa untuk belajar (mebejarkan siswa).

Dalam kegiatan *lesson study* guru dapat memilih dan menerapkan berbagai model maupun strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi. Banyak model pembelajaran yang bisa dipilih dan dimanfaatkan guru dalam pembelajaran berbasis *lesson study*, misalnya; model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran quantum, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran kooperatif.

Selain model pembelajaran juga banyak strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang bisa dipilih oleh guru dalam pembelajaran berbasis *lesson study*, misalnya; strategi pembelajaran yang tergolong dalam model pembelajaran kooperatif adalah; 1) *Student Teams Achievement Division (STAD)*. 2) *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC.)*. 3) *Jigsaw*. 4) *Learning Together*. 5) *Group Investigation*. 6) *Cooperative Scripting*. Lie (2004).4] *Lesson study* dalam penelitian ini para guru di sekolah SMA dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo yang peneliti jadikan subjek penelitian mengimplementasikan beberapa strategi pembelajaran tersebut.

Permasalahan penelitian adalah 1) bagaimana model *lesson study* yang efektif sebagai model pembinaan guru di sekolah? 2) bagaimana validasi *lesson study* sebagai model pembinaan guru di sekolah dalam skala terbatas?

Tujuan penelitian adalah 1) mencari model *lesson study* yang efektif sebagai model pembinaan guru di sekolah, 2) validasi *lesson study* sebagai model pembinaan guru di sekolah dalam skala terbatas,

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian memberikan interpretasi terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Desain penelitian ini menggunakan model *lesson study* berbasis PTK (Penelitian Tindakan Kelas), siklus *lesson study* menggunakan PTK modifikasi model Tjipto Subadi (2009).5]

Latar penelitian ini adalah guru-guru di Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan informan penelitiannya adalah siswa, guru, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Anggota Dewan (DPRD), dan Dosen.

Teknik pengumpulan data adalah metode observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati praktek pembelajaran di kelas, Wawancara dilakukan baik kepada guru, Kepala Sekolah, Pengawas pendidikan, dan dosen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru di Sekolah-sekolah Muhammadiyah

Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis *lesson study*, mendiskrifikasikan *lesson study* yang efektif sebagai model pembinaan profesional guru, validasi *lesson study* sebagai model pembinaan profesional guru.

Proses wawancara menggunakan teori *first order understanding and second order understanding* yaitu peneliti memberi peluang individu sebagai subjek penelitian untuk memberikan interpretasi terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu untuk memberikan pemaknaan, tetapi pemaknaan oleh peneliti tersebut tidak boleh bertentangan dengan interpretasi yang pertama (Subadi, 2013).6]

Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).7]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa *lesson study* yang efektif sebagai model pembinaan guru di sekolah Muhammadiyah Sukoharjo adalah *lesson study* berbasis MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), berbasis sekolah, berbasis berkolaborasi dengan teman sejawat, berbasis pembelajaran tutor sebaya. *Lesson study* yang efektif dilaksanakan dengan sistem bersiklus, bertahap: plan (planning/perencanaan), do (tindakan dan observasi), see (refleksi dan evaluasi). Proses pelatihan guru di sekolah berbasis *lesson study* dalam penelitian ini diawali dengan kolaborasi guru-guru (diskusi tentang masalah pembelajaran yang dihadapi), dilanjutkan 1) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 2) Melakukan pembelajaran berdasarkan rencana yang dibuat, mengundang sejawat untuk observasi 3) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran tersebut.

Ditunjukkan bahwa *lesson study* sebagai model pembinaan guru di Sekolah Muhammadiyah Sukoharjo berbasis siklus (plan-do-see) oleh guru model bernama Anggit Wibowo guru mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah 1 Kecamatan Sukoharjo Kota, dan Wuryani (bukan nama sebenarnya) guru mata pelajaran IPS SMA Muhammadiyah Kartasura. Respon siswa terhadap pembelajaran berbasis *lesson study* tersebut di atas, berdasarkan hasil angket dan wawancara kepada siswa peserta *open lesson* diperoleh keterangan bahwa sebelum pelaksanaan *lesson study* terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dengan setelah pelaksanaan *lesson study* yaitu untuk SMA 15 % dan 55% sedangkan untuk SMK 20% dan 60%.

Menurut guru model pelaksanaan *lesson study* “sangat positif” sebagai model pembinaan pendidik profesional dan menyatakan setuju dengan program *lesson study* karena terjadi peningkatan cukup signifikan pada kompetensi guru, indikatornya; 1) perangkat pembelajaran menjadi lebih lengkap dan siap, 2) penguasaan IT lebih meningkat, 3) multi metode dan strategi pembelajaran meningkat, 4) perlu adanya keberlanjutan program *lesson study*.

Dari uraian tersebut di atas, agar *lesson study* lebih efektif sebagai model pembinaan guru disarankan berbasis MGMP dan berbasis sekolah, dilaksanakan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) atau MKKS (Musyawarah Kerja Kepala

Sekolah), sedangkan implementasi (program) *lesson study* dilaksanakan atas koordinasi KKG (Kelompok Kerja Guru), dan implementasi (pelaksanaan) *lesson study* dilaksanakan di sekolah masing-masing oleh guru model, dilakukan *monev* secara rutin, didukung dengan dana sekolah dan tim wark, motivasi kepala sekolah terhadap guru model, dilaksanakan secara kolaborasi antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta tercipta belajar tutor sebaya.

Dampak dari efektivitas *lesson study*, 1) sebelum pelaksanaan *lesson study* terdapat perbedaan yang signifikan dengan setelah pelaksanaan *lesson study* yaitu 15 % dan 55% pada siklus SMA, dan 20% dan 60% pada siklus SMK; 2) terjadi peningkatan cukup signifikan pada kompetensi guru, indikatornya; perangkat pembelajaran menjadi lebih lengkap dan siap, penguasaan IT lebih meningkat, multi metode dan strategi pembelajaran meningkat, terjadi pembelajaran tutor sebaya, perlu adanya keberlanjutan program *lesson study*; 3) ada kontribusi peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu; kontribusi peningkatan persiapan pembelajaran, kontribusi menumbuhkan kerja kolaborasi, kontribusi pengembangan strategi pembelajaran, kontribusi kolegalitas, kontribusi kesiapan belajar siswa, kontribusi perbaikan proses pembelajaran berdasarkan hasil refleksi, kontribusi pengembangan media pembelajaran, dan kontribusi pengembangan alat penilaian.

Validasi *lesson study* sebagai model pembinaan guru di sekolah Muhammadiyah Sukoharjo menggunakan a) validasi pengembangan *teaching plan*, b) validasi *teaching material*, c) validasi pelaksanaan *open lesson* dan refleksi, d) validasi teori, dan validasi implementasi. Keempat validasi tersebut dikembangkan menjadi validasi tim *lesson study*, validasi jadwal pelaksanaan, validasi konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan, validasi dokumentasi, validasi peningkatan mutu pembelajaran, validasi tanggapan dari kepala sekolah dan siswa, dan validasi pakar sebagai pendamping.

Selain itu, validasi pengembangan model pembelajaran *lesson study* dilakukan oleh KKG (Kelompok Kerja Guru) tingkat Gugus, uji coba (implementasi) di sekolah masing-masing yang diikuti oleh guru-guru di sekolahnya. Temuan yang positif dari implementasi *lesson study* didiskusikan di tingkat MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Validasi pengembangan *lesson study* diperlukan tindak lanjut yang terprogram dan diimplementasikan secara terprogram sehingga pelaksanaannya lebih efektif maksimal, serta dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Validasi *lesson study* sebagai model untuk meningkatkan kualitas guru pada skala terbatas dilaksanakan secara terprogram, dilaksanakan di sekolah masing-masing oleh guru model, temuan-temuan yang positif didiskusikan di tingkat KKG tingkat gugus, serta dilakukan refleksi dan evaluasi.

Tanggapan Guru terhadap *lesson study* sebagai model untuk meningkatkan kualitas guru “sangat positif”, untuk berkolaborasi diperlukan fasilitator, dan motivasi dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas, selain itu diperlukan pendampingan, dan dalam implementasi di kelas harus ada monitoring.

Tanggapan pengambil kebijakan (Pengawas Pendidikan) sangat mendukung dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua guru yang berminat meningkatkan keprofesionalitasnya melalui pembelajaran berbasis *lesson study*. Sedangkan peningkatan

keprofesian guru melalui *leson study* ini sebaiknya diimplementasikan di sekolah masing-masing dan hasilnya didiskusikan ditingkat KKG. Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD bahwa terhadap pembinaan guru dengan model *lesson study*, Legeslatif khususnya komisi yang membidangi pendidikan memberikan dukungan, dan disarankan dibentuk tim work.

Model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan berbasis *lesson study* sebagai model pembinaan guru di sekolah Muhammadiyah Sukoharjo adalah model pembelajaran berbasis *lesson study* kolaboratif dan kooperatif, karena dua hal ini sulit dibedakan dan dipisahkan dalam pelaksanaannya, selain itu efektifitas *lesson study* sebagai model pembinaan guru dilaksanakan melalui koordinasi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan implementasinya oleh guru model di sekolah masing-masing melalui koordinasi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Jika terjadi hambatan di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis *lesson study*, sebagai solusi diusulkan; (a) pelatihan secara rutin dan berkesinambungan, (b) memasukkan anggaran pelatihan dalam RAPBS, RAPBD dan RAPBN, (c) terbentuknya tim work, (d) program kegiatan monev secara berkala, (e) motivasi dari pembina dan pejabat, (f) monitoring secara berskala dari para pembina, dan (g) MOU sekolah dengan Komisi DPRD dan Perguruan Tinggi yang memiliki pakar *lesson study*.

Lesson study yang efektif sebagai model pembinaan guru profesional disarankan Thompson (2007) dalam penelitian yang berjudul: *Inquiry in the Life Sciences: The Plant-in-a-Jar as a Catalyst for Learning* berkesimpulan bahwa: (1) Adanya usaha guru untuk mengubah pola pembelajaran, ini berarti guru dituntut lebih kreatif dan inovatif. (2) Guru mencari terobosan untuk menyampaikan materi pelajaran pada KD tertentu agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. (3) Usaha guru membuat model pembelajaran sebagai referensi siswa. Lebih lanjut Thompson menyarankan bahwa pentingnya pengembangan profesional para pendidik yang lebih kreatif dan inovatif yang dapat mempengaruhi pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan demokratis.8]

Pembahasan tentang validasi pengembangan model sebagai peningkatan kualitasnya dihubungkan dengan penelitian Stewart (2005), yang berjudul : *A Model for Teacher Collaboration*, maka penelitian ini saling melengkapi dan ada kesesuaian. Hasil penelitian Stewart menunjukkan bahwa cara yang terbaik untuk menyempurnakan perbaikan yang sifatnya positif di setiap tingkatan kelas pada suatu sekolah adalah dengan mengadopsi suatu model pembelajaran yang teruji (validasi).9]

Model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan berbasis *lesson study* sejalan dengan penelitian Robinson (2006) tentang: *Prospective Teachers' Perspectives On Microteaching Lesson Study*) berkesimpulan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis *micro-teaching* dan *lesson study* yang melibatkan beberapa guru berkolaborasi mendukung hubungan pembelajaran yang berupa teori dan praktik, hal ini sejalan dengan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas.10]

Selain itu penelitian *lesson study* ini sejalan dengan penelitian William Cerbin and Bryan Kopp (2006) dosen University of Wisconsin-L Crosse yang berjudul: *Lesson Study as a Model for Building Paedagogical Knowledge and Improving Teaching*, salah

satu bahasannya bahwa model *lesson study* guru dapat mengadakan kolaborasi memecahkan kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran antara mengajar dan belajar siswa yang bermutu.11] Marsigit (2007) dalam “*Mathematics Teachers’ Professional Development Through Lesson Study in Indonesia*” pada bahasan penelitiannya menuliskan bahwa model *lesson study* memberikan kesempatan kepada guru dan para siswa untuk membangun inisiatif baru.12]

SIMPULAN

Model *lesson study* yang efektif sebagai model pembinaan guru profesional adalah *lesson study* berbasis siklus plan-do-see, berbasis MGMP, berbasis sekolah, berkolaborasi, dan belajar tutor sebaya, dikoordinasikan melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Implementasi (program) *lesson study* dilaksanakan atas koordinasi KKG (Kelompok Kerja Guru), sedangkan implementasi (pelaksanaan) *lesson study* dilaksanakan di sekolah masing-masing oleh guru model, dilakukan monev secara rutin. Dampak dari efektivitas *lesson study*; a) sebelum pelaksanaan *lesson study* terdapat perbedaan yang signifikan dengan setelah pelaksanaan *lesson study* yaitu; 15% dan 55% pada siklus SMA, dan 20% dan 60% pada siklus SMK, b) terjadi peningkatan cukup signifikan pada kompetensi dengan indikator; perangkat pembelajaran menjadi lebih lengkap, penguasaan IT lebih meningkat, pemilihan metode dan strategi pembelajaran lebih tepat. c) terdapat kontribusi kualitas pembelajaran yaitu kontribusi pada peningkatan; persiapan pembelajaran, kerja kolaborasi, pengembangan strategi pembelajaran, kolegialitas, kesiapan belajar siswa, perbaikan proses pembelajaran berdasarkan hasil refleksi, pengembangan media pembelajaran, pengembangan perangkat penilaian, dan belajar tutor sebaya.

Validasi *lesson study* sebagai model pembinaan guru di sekolah Muhammadiyah Sukoharjo menggunkan a) validasi pengembangan *teaching plan*, b) validasi *teaching material*, c) validasi pelaksanaan *open lesson* dan refleksi, d) validasi teori oleh pakar, dan validasi implementasi oleh guru model dan dosen pendamping.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada pemerintah, hendaknya dalam menyusun strategi kebijakan penataan pendidikan diarahkan pada; pengembangan model peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis *lesson study* berkelanjutan, dilanjutkan implementasi berbasis pendamping. Diusulkan agar *lesson study* sebagai alternative model pembinaan guru profesional.

Ucapan terima kasih penelitian sampaikan kepada Kemenristek Dikti yang telah memberikan dana penelitian ini sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini sehingga penelitian ini bisa peneliti selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Sekolah, dan para siswa SMA, SMK, Muhammadiyah Kabupaten

Sukoharjo yang telah bersedia bekerja sama sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan hasil yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Subadi T., 2016. *A Development Model of Lesson Study-Based Social Science Teachers at Muhammadiyah Schools in Sukoharjo Regency, Central Java, Indonesia. Journal International. The Social Sciences Year: 2016. Volume 11. Issue 24. Page No. 5919-5927.*
- Mulyasa, 2004, *Menjadi Kepala sekolah Profesional*. Bandung: Remaja rosda Karya.
- Saito, M. and Inagaki, T. (1996). *Jugyo Kenkyu Nyumon (Introduction to Lesson Study*. Tokyo: Iwanami.
- Lie Anita. 2004. *Cooperative Learning*. Jakarta: Grasindo.
- Subadi. 2009. *Pengembangan Model Untuk Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study di Sekolah Dasar Kota Surakarta*. Jurnal Sekolah Dasar Kajian Teori dan Praktik Pendidikan. Tahun 18. Nomor 2 November 2009. ISSN 0854-8285. Malang: UN Malang.
- Subadi. T, Sutarni, Rita S P. 2013. *A Lesson Study as a Development Model of Professional Teachers*. (Macrothink Institute Journal International of Education. ISSN 1948-5476. Vol. 5, No. 2. 2013). United States. info@macrothink.org. Website: www.macrothink.org
- Miles, B.M., Michael, H. 1992. *Qualitative Data Analisis*. Jakarta: UI Press
- Thompson, 2007, *Science Activities*, Washington: Winter 2007. Vol. 43. Iss. 4, pg.27, 7 pgs.
- Stewart. 2005. *Phi Delta Kappan*, Bloomington: May 2005. Vol. 86. Iss. 9, pg.681, 7 pgs.
- Robinson N. 2006. *Lesson Study: An example of its adaptation to Israeli middle school teachers*. (Online): stwww.weizmann.ac.il/G-math/ICMI/ Robinson Proposal.doc
- William Cerbin and Bryan Kopp. 2006. *Lesson Study as a Model for Building Pedagogical Knowledge and Improving Teaching*. In International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 18 (3), 150-257. ISSN 1812-9129.
- Marsigit. 2007. *Mathematics Teachers' Professional Development Through Lesson Study in Indonesia*. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3 (2), 141-144.

MODALITIES TO UNLEASH UNIVERSITY POTENTIAL FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: INDONESIAN CASES

Hafid Abbas¹²⁵

A. INTRODUCTION

World Conference on Higher Education in 1998, successfully adopts higher education vision and missions for the twenty-first century. Two of the six missions and functions of university and higher education relate to social and humanity issues. *First* is to advance, create and disseminate knowledge through research and provide, as part of its service to the community, relevant expertise to assist societies in cultural, social and economic development, promoting and developing scientific and technological research as well as research in the social sciences, the humanities and the creative arts. *Second* is to help protect and enhance societal values by training young people in the values which form the basis of democratic citizenship and by providing critical and detached perspectives to assist in the discussion of strategic options and the reinforcement of humanistic perspectives.¹²⁶

These missions clearly show that university has socio-economic mandates within its tri-dharma activities (teaching, research and community services) to contribute to the enhancement of socio, political, humanistic and cultural and economic values, and science and technology development. These orientations imply to the need of a university to unleash its potential not only to innovate, create, develop and sustain those social values but also to contribute to the enhancement of economic values and prosperity for improving the quality of life. These orientations are the inherent values of social entrepreneurship.¹²⁷

To do so, for Indonesia, the creation of a center of technology (COT) or a center of excellent at selected universities appears to be a bridging strategy for university to innovate creatively and to engage with wider participation of all segment of societies in accordance with their local economic corridors, such as: tourism and hospitality in the island of Bali, agro-business in Sulawesi, energy and mining in Kalimantan, etc.

¹²⁵Hafid Abbas is Professor of Education a State University of Jakarta, former UNESCO Consultant in Asia and the Pacific Region.

¹²⁶We affirm that the core missions and values of higher education, in particular the mission to contribute to the sustainable development and improvement of society as a whole, should be preserved, reinforced and further expanded, namely, to: (a) educate highly qualified graduates and responsible citizens able to meet the needs of all sectors of human activity, by offering relevant qualifications, including professional training, which combine high-level knowledge and skills, using courses and content continually tailored to the present and future needs of society; (b) provide opportunities (*espace ouvert*) **for higher learning and for learning throughout life**, giving to learners an optimal range of choice and a flexibility of entry and exit points within the system, as well as an opportunity for individual development and social mobility in order **to educate for citizenship and for active participation in society**, with a worldwide vision, for endogenous capacity-building, and for the consolidation of human rights, sustainable development, democracy and peace, in a context of justice; (d) help **understand, interpret, preserve, enhance, promote and disseminate national and regional, international and historic cultures**, in a context of cultural pluralism and diversity; (f) contribute to the development and improvement of education at all levels, including through the training of teachers

¹²⁷According to Dees (2001) to create and sustain social value - <https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2014-2-page-143.htm>

This paper addresses these issues on how university readjusts its tri-dharma activities in developing social entrepreneurship and link it to its local economic corridors. Such linkage is a triggering factor for university to explore its potential to innovate, and mobilize its resources and capacities to serve their communities to solve their social problems by promoting their general welfare, improving the quality of their life and advancing civilization.

B. COT DEVELOPMENT FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Similar to SEAMEO model in developing its center of excellent, university could adopt this model to develop its respective COT to unleash its potential for social entrepreneurship. Today, SEAMEO has 21 specialist institutions as canters of excellent that undertake training and research programs at various fields of education, science, and culture to serve all ASEAN member states as a single community of nations, economically, security and socio-politically, and culturally. For example, since its inception in 1968, Indonesia has been the center for Tropical Biology, locates in Bogor, with its main activities is to focus on Forest, Pest and Aquatic Biology. It assists SEAMEO Member Countries in developing the expertise to identify, prioritize, analyze and recommend solutions or alternative approaches to critical biological problems in the region, especially those related to sustainable development of tropical ecosystems.

Similarly, Malaysia is the Regional Centre for Education in Science and Mathematics. This has been established in Penang, Malaysia since 1967, with the mandate to meet the needs of the SEAMEO Member Countries in developing science, mathematics and technology education programs. While Brunei Darussalam is the Centre for Vocational and Technical Education and Training which was established in 1990.¹²⁸

Indonesia adopts such modality to develop COT at selected universities that meet the criteria of resource availability, expertise, and willingness to be a model institution to serve and capacitate other universities or higher education institutions within the territory of relevant economic corridors with the aims at maximizing their contribution to address social problems at the corridor through partnership with local stakeholders and communities at large.

Similar to SEAMEO model, to meet COT goals, these activities are inherent part of COT development at the university: (1) mapping a certain knowledge and skill level of academic staff at all aspects of tri-dharma (teaching, research and community services), including production process if any and its management, maintaining facilities and human resources, (2) possibility to integrate the local community economic activities into educational programs to ensure both student competencies and self-generated revenue programs achieved simultaneously in an effective and efficient way to get maximum reciprocal social and economic benefits of both community and university, (3) developing a strategic plan of tri-dharma action based on the analysis

¹²⁸It is mandated to assist the SEAMEO-member countries to identify and solve common problems in technical vocational education and training. To support its mandate, it undertakes activities in professional development, research and consultancy, and information dissemination. Its vision is "A globally recognised Regional Centre of Excellence in TVET", and its mission is "We are committed to enhance the TVET systems of SEAMEO member countries through innovative capability building, research and development and information services." **Motto:** "Together We Excel" **Theme:** "Ensuring greater impact of TVET for sustainable development" **Core Values:** Professionalism • Respect for Diversity • Accountability • Innovativeness • Synergy • Excellence

of internal condition of a university and external local community condition including the need and trend of market demands.

These activities need further elaboration to meet their objectives, concepts and social impacts not only to university environment but to local community as well.¹²⁹

COT as a bridge to unleash university potential creatively and innovatively for social entrepreneurship development needs a conducive academic environment. On the other hand, social entrepreneurship development also needs conducive COT supports to engage larger participation of all segments of societies. COT plays as a social magnet role for a tri-dharma collaboration in developing and implementing social entrepreneurship.

The concept of social entrepreneurship implementation at university could be justified by the nature of its COT, university resources, student and academic staff size and ratio, expertise, facilities, curriculum development, research agenda, etc. If university is being managed for-profit entrepreneurs, its management parameters typically measure performance using business metrics like profit, revenues and increases, etc. However, social entrepreneurship as non-profit orientation or blend for-profit goals has other parameters, such as: generating a positive "return to society", contribution to address social problems such as: unemployment, poverty reduction, community development, etc.¹³⁰

However, social entrepreneurship is affected by various macro-level factors. The influencing factors of social entrepreneurship education which are related to the external environment are classified according to PEST analysis.¹³¹

Firstly, the lack of government support is mentioned as one of the key factors that hinder the development of social entrepreneurship. For example, in the UK political climate is one which visibly supports the development of social enterprises but in Latvia the great obstacle is that social entrepreneurship is not legally introduced in legislation and is not accepted as the form of entrepreneurship.

Secondly, there are problems with access to finance for social entrepreneurship. Financing enables social entrepreneurs to hire talented employees, find a market, pursue pilot projects, and carry out other activities related to growing their enterprises. As social entrepreneurship has no financial support at the national level, it is not conducive to students' interest to address this kind of business.

Thirdly, there is a lack of understanding about social entrepreneurship as a term. According to Zagare research, only 37% of Latvia residents have heard the term 'social

¹²⁹CONCEPT: - Combines the learning and working environment, - Realistic and relevant learning experience, - Synergy between a numbers of multi-discipline and inter-related Key-Success Factor (KSF), - The quality of teaching and learning, - Attitude and mindset of staff and students also industry as well, and - A hub for collaborative innovation. OBJECTIVES: - Remain relevant to the industrial need, -Build a relationship between polytechnic and relevance industries, -Industrial practice to the campus, - Transferring New knowledge or technology to the industry; IMPACT: - Concurrent development of technologies and skills, - the storage of skilled professionals by improving engineering skills, - Real life practice, strong linkage with industry, and - Real life problem under business conditions.

¹³⁰Aidin Salamzadeh* and Mohammad Ali Azimi, *Social entrepreneurship education in higher education: insights from a developing country*, (Tehran, Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 20, No. 1, 2013), p. 19

¹³¹Ibid

entrepreneurship' and have some understanding about it. But the understanding of this term should be strengthened by the explanation of benefits that social enterprises fulfil in society and social entrepreneurship education can provide for individuals and society.

Bornstein and Davis emphasize that thinking of society has to be moved from 'me' to 'us' and, eventually, to 'all of us'. In order to build strong community, it is essential to respect others' rights and responsibilities because if people work only for their own benefit, it is difficult to reach social welfare and sustainable development. To achieve this aim collaboration skills between different parties are important. Without effective networks and intermediaries, it is very difficult to connect ideas, resources and people, which is a pre-condition for the development and growth of social entrepreneurship.¹³²

Fourthly, a study conducted by Hynes reveals that the Internet is an important factor affecting social entrepreneurship. The advancement of technologies and communication facilitates the exchange of information and experiences. Developments in information and communications technologies have created exciting possibilities for introducing online study courses in social entrepreneurship.¹³³

To address those issues, social entrepreneurship education is likely increase social awareness, make people sensitive to problems in their environment, help them to create innovative solutions for the problems and support their ability of giving an opinion about created solutions. In addition to these individual achievements, it is possible to say that social entrepreneurship education also has effects on society. Social entrepreneurship has come forward to find sustainable solutions for social problems and these solutions have significant role in social progress of the society.¹³⁴ Social entrepreneurship education supports individual's self-sufficiency, creativity, empathy, rational thinking, and entrepreneurship skills. It promotes the social problem solving in society and contribute to developing a sustainable national economy.¹³⁵

Social entrepreneurship education shall therefore promote capacities on social problem solving in society and promote general welfare and contribute to the development of sustainable national economy.¹³⁶

¹³²Peredo and McLean (2006) further put some indicators on social entrepreneurship, such as:⁸ (1) aims at creating social value, either exclusively or at least in some prominent way; (2) shows a capacity to recognize and take advantage of opportunities to create that value ('envision'); (3) employs innovation, ranging from outright invention to adapting someone else's novelty, in creating and/or distributing social value; (4) is willing to accept an above-average degree of risk in creating and disseminating social value; (5) and is unusually resourceful in being relatively undaunted by scarce assets in pursuing their social venture"

¹³³Ibid

¹³⁴Lasma Dobele, *A New Approach in Higher Education: Social Entrepreneurship Education*, (Latvia: University of Agriculture, 2016), p. 228

¹³⁵ibid

¹³⁶The core values to address social problem solving and strengthen social cohesion, the cohesion between university and community, university and industry, and industry and community in which social entrepreneurship education can contribute are: honesty, reliability, cooperativeness, and a sense of duty to others. Francis Fukuyama, *Trust* (New York: Free Press Paperbacks, 1996), p. 43.

C. SOME BEST PRACTICES FOR LESSONS LEARNED: INDONESIAN CASES

As a part of its missions and mandates, university has moral, intellectual and social responsibilities to address the recurrent and contemporary issues on social gaps and economic discrepancy across the country. Indonesia has been recorded as the fourth most unequal, after Russia, India, and Thailand.¹³⁷ With its COT, university may contribute to the acceleration of development in six economic corridors; improving national connectivity; and strengthening human resources, science, and technology capabilities, which are prerequisites to sustained, accelerated, and green growth.¹³⁸ University with its tri-dharma mission shall support the economic corridors development in various sectors such as: tourism in Bali, services and manufacturing in Java, agro industry in Sulawesi, mining and energy in Kalimantan, etc.

To execute such noble missions, universities have to meet key performance indicators, such as: (1) managerial excellence; (2) technical excellence; (3) relevance with community and industry linkages; and (4) resources excellence. Lessons learned and capacity-building materials are to be archived for dissemination to other universities in the same corridor for replication.

1. Economic Corridors on Food Services and Manufacturing

Politeknik Negeri Malang

As a part of Brawijaya University Malang in the past, since its transformation from a regular institution to a Public Service Agency (BLU) in 2012, with its COT on innovation for small scale food industry machines, this institution has been playing very vital roles to reduce unemployment and poverty not only in Malang, but also across other municipalities and districts in East Java.

Through its innovation on machines for small scale food industries, and facilitating local salt industries at all costal areas in the province, Polinema could significantly uplift the local people prosperity. Reciprocally, Polinema could also earn significant margin to these businesses to increase its turnover from some IDR 200 billion in 2012 to about IDR 500 billion in 2015. It is expected that if the COT within BLU management could be properly implemented, its turnover could likely reach to IDR 1 trillion annually in a few years to come.

a. Vision

With its vision to be a competitive vocational higher education (VHE) institution in ASEAN, Polinema prioritizes its first decade development 2011-2020 on internal capacity improvement and development as the foundation to be a competitive institution in the future.¹³⁹ With its excellent center on innovation

¹³⁷The Independent Report, UK, 2016

¹³⁸National Plan (2014-2019) Bappenas

¹³⁹Polinema five-year cycle strategic plans (2011-2015) as the translation of its longterm vision puts the priority on the reform and development of Polinema internal capacity. The following five years of 2016-2020 is on strengthening its internal capacity. Gradually, then in the next five year cycle 2021-2025 is the development of Polinema in a regional competitiveness. The last target, 2026-2030, is the development Polinema to be competitive in globalized era.

on machines for small scale food industries, Polinema is now the partner of more than 170 local and national companies, including its support to capacitate Timor-Leste's VHE institutions and all vocational schools in the country.

b. Curriculum

The methodology of teaching and learning processes and teaching materials development do focus on the improvement of hard skill and soft skill competences. To get such competences, for hard skills development, its approach is to implement "learning by doing principle", in which, 40 percent of the total teaching and learning activities is for theory, and 60 percent is field practice. This approach is popularly known as curriculum competence-based 5+1 for Diploma 3 program and 7+1 for Diploma 4 program. "+1" means, at the last semester course, students will take their internship program at industrial partners and at the same-time, they will complete their thesis.

c. Managements

Similar to other regular universities, Polinema has an organizational structure where the Director is assisted by four Deputy Directors, dealing with academic affairs, administrative and finance matters, student affairs and international cooperation. Service units, Senate Board and Study Programs, and lecturers are all under the control of Board of Directors.

To sustain its existing partnership with over 170 institutions, industries and companies, both at local and national levels, Polinema has to recruit new lecturers with the support of its internal fund. At the moment, its total student is approaching to ten thousands and its total lecturers is about four hundred, making its ratio one lecturer for twenty five students.¹⁴⁰

d. Partnership with Industries

With its existing partnership with local and national industries and companies, two years prior to their graduation, 70-80 percent of Polinema total students have been recruited to be employees of those 170 partners.

Polinema is one of the higher education institutions which has significantly contributed to zero or approach to zero unemployment rate to its total graduates at the first year after graduation.

Totally, the annual budget of Polima is approaching to IDR 400 billion, and every year this amount increases significantly and very likely to reach IDR 1000 billion or one trillion over the few years ahead. With this margin, again Polinema invest it to various small scale businesses to absorb more labors, empower local communities and reduce poverty.¹⁴¹

¹⁴⁰**Library.** Since last few years, Polinema has been intensively preparing its digital library. Polinema has discussed this matter with the National Library, to explore its supports to Polinema. The existing library collects some 25 thousands books, and most are old collection. This equivalent to the ratio 1:2,3 or one student could only borrow two or three books a day. This library, initially, in 1984, was a part of Brawijaya University. This was then integrated into the main university library in 1988. Shortly after being a separated and independent institution from Brawijaya University, Polinema developed its own library.

¹⁴¹**Language Center.** To support the increase of international cooperation of Polinema, Language Center appears to be greatly demanded both by students and young lecturers. Students do enjoy various academic competitions initiated by this center, such as

2. Economic Corridors on Agro-industry

Polimdo, Manado, North Sulawesi

a. Local resources and new vision

According to Bureau of Statistic in North Sulawesi (2016), the total area of coconut productive plantation across fifteen districts is 267,813 Ha, and non-productive one is 267,435 Ha (2015). The largest area of productive district is in Minahasa Tenggara which covers some 34,344 ha. These coconut areas are belong to local farmers.¹⁴² Other data shows that some 3.5 million coconut trees are not productive anymore with range of their age is 80 to over a century. These huge number of coconut trees are greatly underutilized. Similarly, coconut shells and their coir are just waste.

Therefore, despite this province is the richest area of Indonesia for coconut but out of 2,461 million people 8.1 percent of them live below poverty line with their income below IDR 344.418 per month.¹⁴³ The Gini coefficient of the province is 0.39, means the gap between the have and the have nots is slightly higher than the national average.¹⁴⁴

Under these circumstances, Polimdo opens its new vision to put its tri-dharma orientation on agro-industry by maximizing the utilization of local coconut. Last year, Polimdo procured 34 types of processing machine for various coconut products, such as: machines for briquetting coconut trunk charcoal, machines for coconut wood processing for furniture and houses, etc.

b. Prototype of Coconut Products and their Social Dimensions

To maximize the utilization of the abundant old coconut trees, since 2016, with its COT orientation, Polimdo has produced various products, such as traditional houses, and furniture of export quality which are all displayed at the main Campus.

The implementation of its COT goes to these 3 steps of education processes:

The first phase is 3 semesters, the students will learn the basic practical program using structure job (exercise case but useable) and or industrial job (job order) which are sale-able. This phase called Problem-Based Education (Industrial problem is adopted as a case of practical problem),

The second phase is 2 semesters, the student will learn in the real industry for 1 year in fully time. This phase called Production-Based Education (on the job training in industry)

The third phase is 3 semesters, the student will learn in how to handle a project work (can be also as industrial engineering order) for 2 semester and

English Competition, PECT or TOEIC score competition for new students, seminars, bilingual teaching, etc. This center also serves the public for English course and Indonesian language for expatriates.

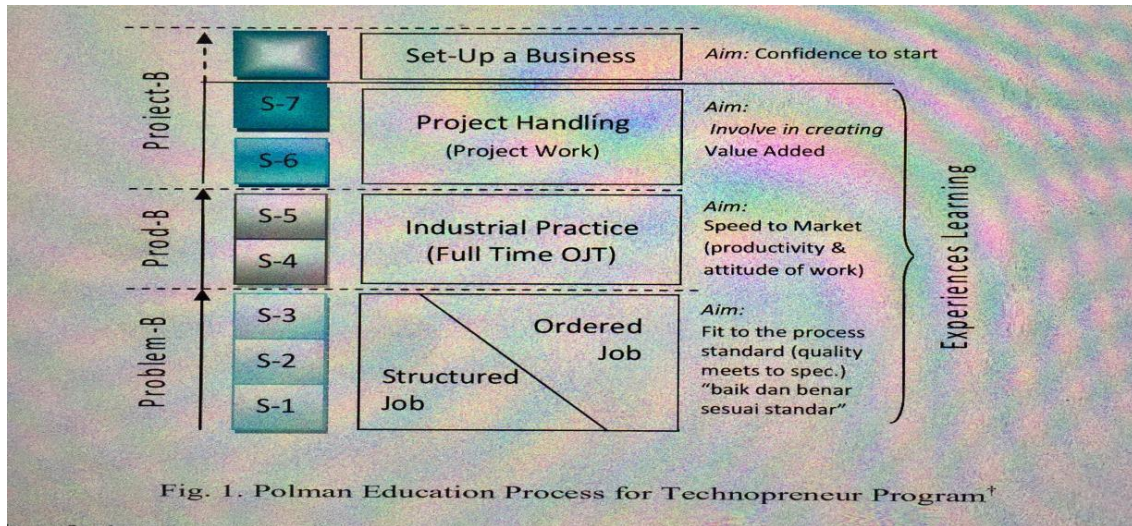
¹⁴²BPS Sulut 2018

¹⁴³It equals to 194.850 live below poverty line

¹⁴⁴BPS Sulut 2017

the last semester the student will prepare to open own company based on their technical competencies. This phase called Project- Based Education (project work and business incubator program).

In figure below it is shown how the education program developed based on above arrangement in three phases.¹⁴⁵



With such approaches and modalities, Polimdo could be pro-active to engage with its local industrial partners within its COT framework.

Shortly after the engagement with industrial partners for the production of such prototype, then local community as coconut farmers will not only as supplier for materials but also could produce a certain component of the product.

To sustain the local community involvement at this system, Polimdo capacitates them through technology transfer program to local indigenous coconut house and furniture producers.

c. Polimdo Key Roles in Social Entrepreneurship Transformation

Polimdo has shown its various prospective key roles in social entrepreneurship transformation, such as: *first*, to share its achievements and experiences for lesson learned on agro-industry to other public and private universities, polytechnics, academic community and secondary vocational schools (SMK) across its economic corridor at the six provinces of Sulawesi and North Maluku.¹⁴⁶

¹⁴⁵10th Triple Helix Conference 2012 Center of Technology (COT) for Industrial Product Development through Collaboration and Partnership in Polytechnic Education Mohammad Nurdin, ST, MBA* Bandung Polytechnic for Manufacturing (POLMAN Bandung), Jalan Kanayakan No. 21, Dago-Bandung 40135, West Java, Indonesia

¹⁴⁶North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, West Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Gorontalo, and North Maluku

Second, Polimdo choice on coconut creative industry has been managed as a model for: (1) providing graduates with relevant skill competencies and attitudes needed by industries and local communities; (2) bridging between higher education institution orientation and industries' orientation in maximizing the utilization of local resources for local community empowerment economically, socially, and culturally, and (3) providing new opportunities for research and developments on coconut creative industry innovations for generating revenue for fair share benefits between industries, communities and universities.

Third, Polimdo with its COT on coconut creative industry shall play as a training center to other related institutions on how to replicate such excellence. Areas of excellence might be different from one university or polytechnic to another due to unique condition at each of these institutions, but Polimdo best practices for lessons learned shall be a vivid testimony for others to replicate it in its economic corridor.

Fourth, with its icon coconut creative industry, Polimdo could be a hub for a learning network across all universities and higher education institution at this economic corridor. This network will then serve as foundation for a collegial relationship between and among universities and polytechnics for a more constructive knowledge-exchange platform to engage with industries, companies and communities

3. Tanri Abeng University (TAU) Jakarta as a Center of Excellence on Management

TAU is one of private universities in Indonesia which popularly known with its icon as “a center of excellence for career ready professional”

To articulate such icon, TAU formulates its vision to be a world class university to produce leaders and professional managers who are competitive at their fields and contribute to the improvement of people prosperity by 2027. With this vision, TAU commits its missions: (i) to produce young future leaders who dedicates and transforms their managerial and leadership excellence, (ii) to promote management as a profession through their in-depth research and publication study to meet with company, industry, and government demands, and (iii) to prepare future leaders of the nation with the highest qualification standards.

To achieve those vision, and missions, TAU reorients its tri-dharma on three areas of the following excellences.

a. Managerial Excellence

To indicate its managerial excellence, TAU has shown various key performance indicators, such as: (1) the availability of TAU Business Plan including the development plan of 7000 People Owned Enterprises (BUMR) across Indonesia, (2) availability of various university supporting facilities: library, computer lab, student center, sport center, roof-top swimming pool, etc., (3) the availability of student and lecturer evaluation system, (4) the availability of various Professional Certification Programs, such as: language center, etc., (5)

the availability of learning network system at all study programs, and blended online learning system, and (6) the MoU with the association of all provinces, districts and municipalities across the country.

The development of BUMR for example is the university contribution for social entrepreneurship development across Indonesia.

b. Technical Excellence

TAU prepares its graduates to have competencies that are readily applicable in the industrial world. This reciprocal relationship requires commitment of both parties, how the industry can be on campus, and vice versa campus is in the industry.

All tri-dharma activities at TAU have to meet the eight standards of teaching and learning, research and community activities: (1) graduate competence standard has to meet the minimum general qualification students are expected to perform (knowledge, attitudes and skills) set by BNSP, (2) Education content standard gives a more detailed explanation about knowledge, attitudes and skills students are expected at every subject and every tri-dharma activity, (3) Educational process standard is criteria in which teaching and learning process should be conducted to support students to achieve the graduate competence standards, (4) Educator and educational personnel standard elaborates qualifications of lecturers, administrators, supervisors, academic advisors, researchers, librarians, etc., (5) Infrastructures and facility standards describes the standards in which the physical environment of TAU should have, such as: building, classroom, library, lab, etc., (6) Educational management standard describes all aspects that university should consider when managing a university, for example: how to design TAU strategic plan in short term, midterm and long-term, (7) Education funding standard describes TAU standard expenditures, and (8) Educational assessment standard are standards related to the scope, purpose, benefits, principles, mechanisms, procedures, and instruments for assessing students learning outcomes

c. Relevance with Community and Enterprise Demands linkages¹⁴⁷

TAU has shown its utmost commitment to cooperate with local, provincial, national and international institutions, industries and enterprises based on the principles of reciprocity, security and benefit not only on academic dimensions but also to improve the quality of life of the poor. With such cooperation, TAU could bring together academicians and professionals, give each other input and insight, especially in the curriculum development and community services that fit to the needs and developments of industries, companies and enterprises to address social problems.

To strengthen the cooperation, TAU has set up Professional Advisory Council (PAC) as a bridge between university and enterprise for community empowerment economically and socially. PAC therefore supports TAU to play

¹⁴⁷Refers to: <http://tau.ac.id/>

a distinctive role not only to prepare its graduates with career ready professionals who can compete on par with or even outcompete the global business professionals, but also to empower the 7000 BUMRs. With the support of PAC for example, TAU has set up village enterprise for rice in Pasir Halang, Sukabumi, West Java. TAU capacitates local farmers to increase their productivity, manage their products through its cooperative to get a better market price. Similarly for corn cluster, TAU capacitates some 700 local corn farmers in 70 integrated corn corporate groups in Dompu, West Nusa Tenggara.

To support and sustain the three excellences for social entrepreneurship development, TAU has developed some centers, such as: *first*, Center for People's Own Enterprise (BUMRA). This model delivers mutual benefits between the Industry & Trade with the BUMRA representing the SMEs: (1) the industry is guaranteed supply of raw materials according to the number and quality required, (2) the BUMRA is guaranteed market at current fair prices in accordance with market developments, (3) the Industry / Trade and BUMRA synergize to create value through high levels of efficiency and productivity as the basis of national competitiveness.

Second is the Center for Inclusive Economic Development. At this Center, TAU collaborate closely with various government agencies, banks, and others to: (1) establish the economic clusters appropriate to the potential, strengths and interests of the government / regional community, (2) building a value chain analysis that begins with a market analysis, (3) building an Inclusive Financial and Economic Plan, and (4) collaboration with financial and other supporting institutions in facilitating access to funding and relevant grants.

Third is the Center Entrepreneurial Development. This center focuses: (1) to develop, co- coordinate and undertake research in entrepreneurship and enterprise development and disseminate research findings, (2) to serve as a forum for national, regional and international meetings, conference seminars/workshops, focusing on entrepreneurship, (3) to develop, document cases studies and other resource materials for use in the teaching of entrepreneurship and other related business courses, (4) to provide consultancy and training services for the stakeholders in entrepreneurship and enterprise development, and (5) to establish and promote linkages between and within universities, industry, and other stakeholders in entrepreneurship and enterprise development.

D. ANALYSIS AND STEPS TO UNLEASH UNIVERSITY POTENTIAL TO SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

With references to the analysis of Polinema Malang, Polimdo Manado, and TAU Jakarta experience and best practices in their COT development for social entrepreneurship within the respective economic corridors, the following are proposed steps to unleash university potential to social entrepreneurship.

First, university needs to identify social problems across its corridor. North Sulawesi, for example, out of 2.4 million of its total population, 9 percent of them live below poverty

line. This problem relates to unemployment and poverty issues. As a social status, local labor force and young graduates put their dream to be a civil servant, and being a farmer is the last alternative. Education and employment are at two different entities, and education isolates itself from its own root on agriculture. University tri-dharma activities therefore need to link and match with local resources and local social problems.

Second, university needs to map out its capacities and resources to set up its COT orientation which matches with local economic corridor. University with its tri-dharma mission shall support the economic corridors development in various sectors such as: fishery in Maluku, tourism in Bali, services and manufacturing in Java, agro industry in Sulawesi, mining and energy in Kalimantan, etc. A university could lead one, two or more COT if its managerial and technical excellence could match with local resources, industry and local community demands.

Third, university needs to integrate social entrepreneurship in all tri-dharma activities through monolithic or thematic approach at all relevant subjects, research and community service activities. Such integration has to meet the eight standards of teaching and learning, research and community activities: (1) graduate competence standard, (2) Education content standard, (3) Educational process standard, (4) Educator and educational personnel standard, (5) Infrastructures and facility standards describes the standards, (6) Educational management standard, (7) Education funding standard, and (8) Educational assessment standard.

Fourth, university has to promote its cooperation with any relevant stakeholders to address social problems through entrepreneurship. Manado addresses its social problems with its COT on coconut ago-industry, Bali responds its social issues by introducing its COT on tourism and hospitality, Malang on the production of small scale machine for food industries, and TAU on BUMR development.¹⁴⁸

Fifth, university has to be a model for social entrepreneurship development. As a model, the university has shown its capacity and resources to be a training center to share its achievements and experiences for lesson learned on social entrepreneurship to other public and private universities, polytechnics, academic community, and any related institution. With its COT, this university shall be a hub for a learning network across all other universities and higher education institutions at its economic corridor. This network will then serve as foundation for a collegial relationship between and among universities for a more constructive knowledge-exchange platform to engage with industries, companies and communities.

REFERENCES

Aidin Salamzadeh and Mohammad Ali Azimi, *Social entrepreneurship education in higher education: insights from a developing country*, (Tehran, Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 20, No. 1, 2013), p. 19

BPS Sulut 2017 and 2018

¹⁴⁸Polinema, Malang, for example, has established its cooperation to some 300 partners which allows this university to earn some IDR 300 billion margin annually and create new job opportunities at all salt industry areas across 17 districts in East Java.

Francis Fukuyama, Trust (New York: Free Press Paperbacks, 1996), p. 43.

Lasma Dobeles, *A New Approach in Higher Education: Social Entrepreneurship Education*, (Latvia: University of Agriculture, 2016), p. 228

Mohammad Nurdin, ST, MBA. *10th Triple Helix Conference 2012 Center of Technology (COT) for Industrial Product Development through Collaboration and Partnership in Polytechnic Education Bandung Polytechnic for Manufacturing*, (Bandung: POLMAN, 2012)

The Independent Report, UK, 2016

National Plan (2014-2019) Bappenas

UNESCO. *World Conference on Higher Education for the Twenty First Century*, (UNESCO: Paris, 1988).

Digital Sources:

<http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/>

<http://tau.ac.id/>

<http://www.polinema.ac.id/>

<http://www.polimdo.ac.id/>

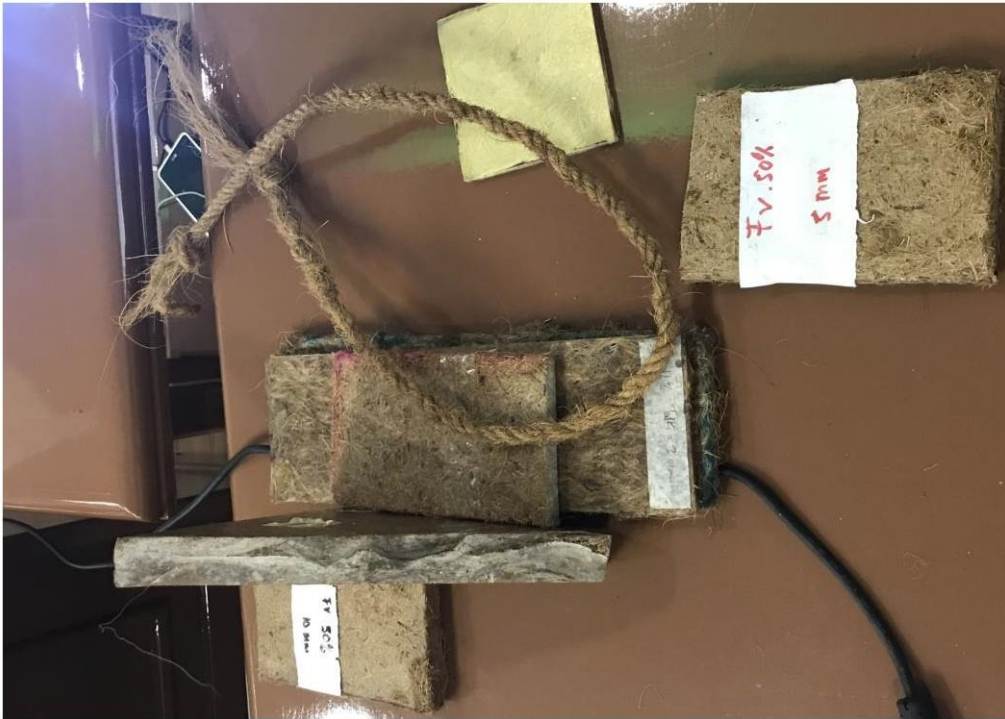
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED561984.pdf>

<https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2014-2-page-143.htm>



Products of coconut fibre









MODEL PENILAIAN KEMAMPUAN PENALARAN PROPORSIONAL MAHASISWA CALON GURU SEKOLAH DASAR AWAL

Rahmi Tasty Rosandi, Yetti Supriyati, dan Elindra Yetti
Paud Pascasarjana Unj
rahmitasty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan produk instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan proporsional mahasiswa S1 PGSD UNJ. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan model Borg and Gall, yang meliputi mengumpulkan informasi, melakukan perencanaan, mengembangkan produk awal, ujicoba lapangan utama, dan uji coba lapangan operasional. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 PGSD. Penelitian dilakukan tiga tahap uji one to one 8 orang mahasiswa, pengujian lapangan awal 15 orang mahasiswa, dan uji coba kelompok besar sebanyak 30 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan uji coba lapangan yang telah dilakukan persentase rata-rata keseluruhan aspek sebesar 64,79%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian yang dikembangkan menunjukkan interpretasi yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian untuk mengukur kemampuan penalaran proporsional.

Kata kunci: kemampuan proporsional, penilaian, penelitian pengembangan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal yang mengemban tugas untuk dapat menyiapkan siswa untuk menghadapi lingkungan hidup yang terus mengalami perubahan yang sangat pesat, mampu bersaing dikehidupan dan dapat menyesuaikan diri terhadap tantangan yang semakin besar. Untuk itu perlu adanya usaha memberikan pendidikan dan pengajaran yang tepat bagi anak, khususnya anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan yang mempunyai tanggung jawab yang besar, karena pada masa ini anak-anak membentuk keterampilan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan pesat yang mana periode ini disebut dengan masa *golden age* dimana anak pada usia dini memiliki daya serap yang sangat baik dalam menyerap informasi yang diberikan kepadanya melalui interaksi yang ada. Berbagai macam pendidikan yang ada dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan kognitif anak, salah satunya melalui pendidikan mengenai sains dimana masa anak ke depannya, kehidupan anak tidak akan terhindar dari sains. Anak dapat memahami gejala fenomena yang terjadi di sekitarnya, mengetahui sebab dan

akibat mengenai sesuatu dan juga dibutuhkan pola berfikir matematika untuk berbagai macam kegiatan seperti berbelanja, membuat sesuatu, dan sebagainya. Untuk dapat mengembangkan pendidikan anak mengenai sains yang diharapkan dibutuhkan sosok yang mengerti akan pendidikan tersebut, seperti dosen yang mengajarkan pendidikan sains kepada mahasiswanya, serta mahasiswa yang nantinya akan mengemban tugas untuk mendidik anak usia dini.

Bagi seorang dosen ataupun calon pendidik perlu adanya penguasaan materi dan konsep yang matang guna menunjang tingkat keberhasilan dalam penyampaian informasi kepada pihak lain. Calon guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan kreativitas. Menjadi seorang tenaga pendidik yang professional merupakan beban tugas mulya yang sangat penting, karena dengan kepiawaian seorang tenaga pendidik dalam menyajikan dan mentransferkan ilmu kepada pihak lain, diharapkan ilmu tersebut dapat diterima dan diserap dengan baik. Salah satu kemampuan seorang calon pendidik yaitu harus dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Adapun kemampuan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yaitu diantaranya seorang guru atau calon pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan secara khusus perubahan yang semakin zaman semakin baik agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta didik. Guru ataupun pendidik merupakan kunci besar dari mutu pendidikan yang ada di kehidupan. Dalam mengembangkan pendidikan, menurut Jacques Delors perlu dirancang berdasarkan empat dasar cara belajar sepanjang hidup. Cara belajar tersebut disebut dengan pilar pendidikan (*the four pillars of education*) yaitu belajar untuk tahu (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar untuk bersama atau hidup dengan orang lain (*learning to live together or learning to live with others*) dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*).

Pendidikan sains dan matematika dapat dilakukan oleh anak melalui cara berfikirnya sesuai tahap perkembangan anak. Anak yang sudah memasuki fase operasi formal lebih dapat berfikir abstrak. Kemampuan berfikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan ide-ide dan memprediksi kejadian yang akan terjadi. Adapun bagian dari fase operasional formal adalah penalaran proporsional, yang mana sangat dibutuhkan anak untuk berfikir matematika yang melibatkan pemahaman anak tentang kovariansi dan berbagai perbandingan.

Sehubungan dengan masalah tersebut, terdapat beberapa penelitian mengenai penalaran formal, khususnya mengenai penalaran proporsional. Penelitian pertama dilakukan oleh Stephen ditemukan hasil bahwa banyak ditemukannya siswa yang dapat menerapkan pendekatan numerik tetapi tidak dapat menerapkan struktur perkalian yang terkait dengan penalaran proporsional. Setiap orang akan dihadapkan dengan kecepatan, kepadatan, jarak tempuh suatu bensin mobil, dan berbagai satuan angka.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lay Yoon Fah yang berjudul *Logical Thinking Abilities among Form 4 Students in the Interior Division of Sabah Malaysia* menemukan hasil bahwa kemampuan rata-rata berfikir logis siswa masih rendah, dengan skor rata-rata persentase untuk semua penalaran lebih rendah dari rata-rata

keseluruhan. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat 98% responden berada di tahap operasional konkret sedangkan 2% lainnya dikategorikan di tahap transisi. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk kemampuan berfikir seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Konsep rasio dan perbandingan diterapkan secara luas dalam matematika, sains dan setiap kehidupan. Penalaran proporsional juga digunakan dalam membaca peta, membuat perkiraan jarak menggunakan skala pada peta.

Hasil penelitian ketiga yang dilakukan oleh Lesh, Post dan Behr ditemukan bahwa karakteristik penting dari penalaran proporsional yaitu dengan melibatkan penalaran tentang hubungan holistik antara dua ekspresi rasional seperti tarif, rasio, perbandingan dan fraksi. Penelitian keempat mengenai sains yang dilakukan oleh Nancy ditemukan bahwa dalam mengembangkan pembelajaran sains dan matematika perlu adanya rancangan dalam pengalaman belajar yang difokuskan pada domain kognitif dan afektif anak. Selain itu perlu adanya berbagai macam metode pengajaran yang dapat diberikan karena siswa memiliki beragam kemampuan yang berbeda-beda.

Hasil penelitian kelima yang dilakukan oleh Kathrin dan Peter ditemukan bahwa masih banyaknya siswa yang cukup mengalami kesulitan dalam menerapkan penalaran proporsional mengenai rasio atau produk dari dua kuantitas varian, yaitu jumlah yang sebanding ataupun berbanding terbalik dengan satu dan lainnya.

Di lembaga-lembaga perguruan tinggi, penilaian yang dilakukan hanya melalui proses, penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan praktek serta kehadiran. Sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia PAUD dalam mengajar anak-anak usia dini, tentu diharapkan memiliki kemampuan proporsional yang baik pula dimana mahasiswa dituntut memahami dalam variasi dan perbandingan serta memahami pengukuran besaran dengan menggunakan alat-alat ukur yang akan berguna dalam praktek kegiatan pada anak usia dini, khususnya mengenai sains. Berdasarkan uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, menunjukkan belum ada penelitian yang membuat penilaian khusus yang dapat mengukur penalaran proporsional mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mencoba mengembangkan model penilaian yang dapat mengukur kemampuan penalaran proporsional mahasiswa.

Penilaian

Penilaian merupakan komponen yang penting dalam suatu penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya dimana kedua tersebut saling terkait. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik pula dimana kualitas pembelajaran tersebut dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk dapat menentukan strategi pembelajaran yang baik dan dapat memotivasi peserta didik agar belajar lebih baik.

Seperti yang telah diuraikan di atas, penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu. Adapun proses penilaian menurut Mardapi (2007: 6) meliputi pengumpulan bukti-bukti mengenai hasil belajar peserta didik, dimana bukti ini tidak hanya diperoleh melalui tes saja, tetapi bisa dikumpulkan

melalui pengamatan atau laporan diri. Penilaian memerlukan data yang baik mutunya sehingga perlu didukung oleh proses pengukuran yang baik.

Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah *assessment*. Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Gronlund dalam Arifin (2011: 4) mengartikan penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu Anthony J. Nitko dalam Zainal Arifin (2011: 4) menjelaskan “*assessment is a broad term defined as a process for obtaining information that is used for making decisions about students...*”. Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses dan belajar, bukan hanya cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian harus dapat menginformasikan guru mengenai peningkatan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik mencapai perkembangan belajarnya secara optimal.

Menurut Chittenden dalam Djemari Mardapi (2007: 6), kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada empat hal, yaitu (1) penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai yang direncanakan atau tidak; (2) pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran; (3) pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung; dan (4) kesimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik. Data untuk kepentingan penilaian diperoleh dengan menggunakan alat ukur, dimana alat ukur yang banyak digunakan dalam penilaian pendidikan adalah tes.

Kemampuan Penalaran Proporsional (*Proportional Reasoning*)

Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Desmita (2007: 46) mengungkapkan menurut Hetherington & Parke walaupun proses berfikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalamannya dengan dunia disekitarnya, anak juga berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman serta dalam mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi mengenai dunia yang telah ia miliki.

Jamaris (2006: 19-22) mengatakan bahwa Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam empat fase, yaitu fase sensorimotor (usia 0-2 tahun), fase praoperasional (usia 2-7 tahun), fase operasional konkret (usia 7-12 tahun) dan fase operasi formal (12 tahun sampai usia dewasa). Adapun keempat fase tersebut tersusun secara hierarkis, yaitu seseorang tidak akan dapat memasuki fase tahapan operasi formal sebelum fase sensorimotor dan praoperasional dilampaui.

Fase operasional formal ditandai oleh perpindahan dari cara berfikir konkret ke abstrak. Kemampuan berfikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi, dan melakukan proses berfikir ilmiah

yaitu mengemukakan hipotesis dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Berdasarkan teori perkembangan kognitif yang diusulkan oleh Jean Piaget, anak usia 12 tahun keatas berada pada tahap operasional formal yang mana pada masa itu anak sudah dapat berfikir logis tentang proposisi abstrak dan uji hipotesis. Seperti halnya yang dikatakan oleh Wilson dalam Yoon Lay Fah (2009), penalaran operasional formal merupakan penentu keberhasilan siswa dalam sains dan matematika pada jenjang berikutnya. Kelemahan siswa dalam mengembangkan daya nalar ikut berimbas pada kemampuan pemecahan masalah. Piaget menyatakan bahwa siswa dianggap siap mengembangkan konsep atau materi khusus jika memperoleh skema yang diperlukan. Artinya proses belajar mengajar akan menjadi terhambat bila penalaran formal siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diperlukan.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat memacu guru dan para pendidik untuk menyiapkan mahasiswa agar siap bersaing dalam kehidupan global. Keterampilan dalam memecahkan masalah adalah poin utama dalam kehidupan, selain itu melalui pemecahan masalah mahasiswa akan terlatih dan terdorong untuk mengembangkan penalaran formalnya secara mandiri.

Menurut Dahar (2011: 139-141), ada lima operasi penalaran yaitu penalaran proporsional, pengontrolan variabel, penalaran probabilistik, penalaran korelasional dan penalaran kombinatorial. Sedangkan menurut Flavell ada empat karakteristik dari berfikir operasional formal, pertama yaitu berfikir adolensensi ialah hipotesis-deduktif. Seseorang dapat merumuskan alternatif hipotesis yang banyak dalam menanggapi masalah dan mengecek data terhadap setiap hipotesis untuk membuat suatu keputusan yang layak, namun belum memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak hipotesis. Kedua, yaitu berfikir proporsional, dalam berfikir suatu anak yang berada di tahapan operasional formal tidak akan merasa terbatas dengan benda ataupun peristiwa yang konkret saja, tapi juga dapat menangani proposisi yang berlawanan dengan fakta. Ketiga yaitu berfikir kombinatorial yaitu berfikir meliputi semua kombinasi benda, gagasan atau proposisi yang memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu berfikir reflektif, seorang anak yang berada pada periode ini dapat berfikir seperti orang dewasa, dan dapat berfikir kembali mengenai apa yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakannya.

Van de Walle dalam Arvyaty dan Cipto (2013: 61) mengatakan bahwa bagian dari penalaran proporsional adalah kemampuan mengenali rasio dalam berbagai situasi. Hal ini dipertegas juga oleh Nur yang mendefinisikan penalaran proporsional sebagai suatu struktur kualitatif yang memungkinkan pemahaman sistem-sistem fisik kompleks yang mengandung banyak faktor. Yang termasuk dalam sistem fisik ini misalnya konsep tentang rasio dan proporsi. Konsep rasio dan perbandingan diterapkan secara luas dalam matematika, sains dan setiap kehidupan. Penalaran proporsional juga digunakan dalam membaca peta, membuat perkiraan jarak menggunakan skala pada peta. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Wilson dalam Lay Yoon Fah (2009), penalaran proporsional merupakan penentu keberhasilan siswa dalam sains dan matematika pada tahap selanjutnya dalam menjalani kehidupan. Nickerson dalam Nur juga mengemukakan bahwa anak yang mampu menalar proporsional dapat mengembangkan hubungan proporsional berat dan volume, mentransfer penalaran proporsional dari dua dimensi ketiga dimensi, menggunakan penalaran proporsional untuk menaksir ukuran suatu

proporsional satu populasi yang tidak diketahui. Lesh, Post dan Behr (1988: 93-118) mendefinisikan penalaran proporsional sebagai berikut:

“Proportional reasoning is a form of mathematical reasoning that involves a sense of co-variation and of multiple comparisons, and the ability to mentally store and process several pieces of information. Proportional reasoning is very much concerned with inference and prediction and involves both qualitative and quantitative methods of thought”.

Pernyataan tersebut memiliki makna yaitu penalaran proporsional adalah bentuk penalaran matematika yang melibatkan pemahaman tentang kovariansi dan berbagai perbandingan, serta kemampuan secara mental untuk menyimpan dan memproses beberapa informasi. Penalaran proporsional sangat terkait dengan kesimpulan dan prediksi dan melibatkan kedua metode berfikir kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka siswa yang telah tergolong tahap operasional formal akan dapat memahami dan menjawab dengan benar soal-soal yang berkaitan dengan masalah proposisi dan rasio, meskipun mereka belum mempelajarinya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa siswa yang telah memasuki operasi formal akan mempunyai kemampuan penalaran proporsional. Penalaran proporsional telah dikaji oleh para peneliti dan menyepakati bahwa penalaran proporsional merupakan konsep penting bagi mahasiswa. Mahasiswa harus selalu melibatkan penalaran proporsional dalam proses pemecahan masalah. Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran proporsional mahasiswa, kemampuan memecahkan masalah terlebih dahulu harus dibangkitkan.

Adapun keempat penalaran yang terdiri dari hipotesis deduktif, proporsional, kombinatorial maupun reflektif merupakan suatu penguat seseorang saat berada di tahapan operasional formal, karena di periode ini akan sangat menentukan dan membantunya dalam kehidupan di era modern di masa yang akan datang, dan dapat membantu seseorang dalam menjalani suatu kehidupan.

Seseorang yang mampu berfikir secara proporsional memiliki beberapa karakteristik, adapun karakteristik dari pemikir proporsional adalah sebagai berikut: 1) memiliki pemahaman tentang kovariansi, dimana dapat memahami hubungan dua kuantitas yang mempunyai variasi yang sama dan dapat melihat kesesuaian antara dua variasi yang berbeda; 2) mampu mengenali hubungan proporsional dan non proporsional dalam dunia nyata; 3) mampu mengembangkan banyak strategi untuk menyelesaikan masalah proporsi; 4) mampu memahami rasio sebagai entitas tersendiri yang menyatakan hubungan yang berbeda antar kuantitas-kuantitas yang dibandingkan.

Menurut Lamon dalam John a Walle (2008: 97), diperkirakan lebih dari setengah populasi orang dewasa tidak dapat dianggap sebagai pemikir proporsional. Hal ini berarti dengan bertambahnya usia kita, belum tentu kita dapat menguasai kebiasaan dan keterampilan proporsional. Pengajaran yang diberikan dapat memberikan pengaruh, terutama jika aturan dan logaritma untuk perhitungan pecahan, untuk membandingkan rasio, dan untuk menyelesaikan proporsi ditunda terlebih dahulu. Seorang anak harus diberikan waktu yang cukup dalam memahami sesuatu, sebelum memasuki ke tahapan pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan pengertian kemampuan penalaran proporsional menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran proporsional adalah kemampuan tahapan berfikir lebih mendalam yang berada di tahapan operasional formal, dimana pada penalaran ini seseorang memiliki kemampuan dalam menjawab dan memahami suatu masalah yang berkaitan dengan proporsi dan rasio dengan aspek (1) memahami berbagai variasi; (2) memahami perbandingan; (3) memiliki kemampuan dalam memproporsikan sesuatu serta; (4) dapat menggunakan rasionalnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R n D). Desain penelitian yang digunakan adalah model Borg an Gall Gall. Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Sekolah Dasar yang telah mengikuti perkuliahan mata kuliah Konsep Dasar Biologi. Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian itu sendiri yaitu mengembangkan penilaian mata kuliah Konsep Dasar Biologi untuk mengukur Kemampuan Penalaran Proporsional.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil skor angket subjek penelitian. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari tanggapan para ahli dan subjek penelitian. Data yang diperoleh dari validasi uji kelayakan ahli dan dari uji kelayakan (baik dari uji coba perorangan, kelompok kecil, dan uji lapangan atau kelompok besar) yang akan di analisis dengan cara menghitung nilai berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Skala yang akan digunakan adalah Skala Likert dengan nilai maksimal adalah empat.

PEMBAHASAN

Validasi Teoritik

Validasi teoritik dilakukan dengan meminta penilaian dan masukan dari beberapa *expert judgement* (para ahli) dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas dari produk model yang dikembangkan oleh peneliti yaitu model penilaian mata kuliah Konsep Biologi Dasar untuk mengukur penalaran proporsional mahasiswa PGSD di UNJ. Para ahli yang diminta untuk menguji kelayakan model memiliki latar belakang keahlian dalam bidang desain dan materi yang tepat bagi mahasiswa.

Pakar Materi

Validasi uji kelayakan materi biologi memiliki dua aspek penilaian yaitu kesesuaian materi dan kesesuaian kemampuan peserta didik. Adapun hasil dari validasi ditinjau dari segi kesesuaian materi sebesar 4,6% dan kesesuaian kemampuan peserta didik sebesar 4% serta validasi keseluruhan aspek sebesar 4,43%. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang ditinjau dari kedua segi aspek tersebut memiliki interpretasi sangat baik dan produk instrumen yang dikembangkan layak digunakan sebagai penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam pembelajaran konsep dasar biologi.

Validasi uji kelayakan materi biologi yang kedua juga memiliki dua aspek penilaian yaitu kesesuaian materi dan kesesuaian kemampuan peserta didik. Adapun hasil dari validasi ditinjau dari segi kesesuaian materi sebesar 4,8% dan kesesuaian kemampuan peserta didik sebesar 4% serta validasi keseluruhan aspek sebesar 4,57%. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang ditinjau dari kedua segi aspek tersebut memiliki interpretasi sangat baik dan produk instrumen yang dikembangkan layak digunakan sebagai penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam pembelajaran konsep dasar biologi.

Pakar Bahasa

Validasi uji kelayakan bahasa memiliki dua aspek penilaian yaitu kelayakan bahasa dan kelayakan penyajian. Adapun hasil dari validasi ditinjau dari segi kelayakan bahasa sebesar 4,2% dan kelayakan penyajian sebesar 4,5% serta validasi keseluruhan aspek sebesar 4,33%. Hal ini menunjukkan bahwa soal yang ditinjau dari kedua segi aspek tersebut memiliki interpretasi sangat baik dan produk instrumen yang dikembangkan layak digunakan sebagai penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam pembelajaran konsep dasar biologi.

Validasi Empiris

1. Uji coba *one to one*

Uji coba *one to one* pada penelitian ini menggunakan jumlah siswa sebanyak 10 orang. Dimana mahasiswa dipilih secara acak yang sedang maupun yang telah mengikuti perkuliahan mata kuliah konsep dasar biologi. Setelah melakukan ujicoba, mahasiswa memberikan masukan-masukan mengenai instrumen yang telah peneliti kembangkan, adapun komentar dan masukan yang diberikan berupa adanya kalimat yang kurang dipahami serta ada beberapa pertanyaan yang mereka kesulitan untuk menjawabnya.

Dalam melakukan uji coba produk *one to one* diperoleh data rata-rata persentase penilaian seluruh aspek adalah 66,89% dan jawaban butir soal mahasiswa peroleh adalah 62,5%. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan oleh peneliti memiliki interpretasi yang baik dan penalaran proporsional mahasiswa dinyatakan rata-rata baik. Dari hasil validasi dan uji coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bahwa produk penilaian tersebut layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian kemampuan penalaran proporsional mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar biologi. Sebelum melakukan ujicoba kelompok kecil dan ujicoba lapangan skala besar maka perlu dilakukan berbagai macam revisi baik berupa masukan dari beberapa para ahli (*expert judgement*) maupun mahasiswa.

2. Uji coba kelompok kecil

Setelah melakukan ujicoba *one to one*, maka langkah selanjutnya yaitu merevisi produk yang akan digunakan. Setelah Draf I selesai, maka dapat dilakukan ujicoba pada kelompok kecil, hal ini dilakukan guna melihat dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam produk model yang dikembangkan. Revisi yang dilakukan telah melalui proses *expert judgement* oleh 3 orang ahli, masing-masing 2 orang pada ahli materi biologi, dan 1 orang pada ahli bahasa.

Ujicoba yang dilakukan pada kelompok kecil ini yaitu melibatkan 15 orang mahasiswa, yang dipilih secara random yang sedang mengikuti mata kuliah konsep dasar biologi maupun yang telah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Dari rekapitulasi data yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Lapangan Kelompok Kecil

No	Aspek Penilaian	Presentasi Keseluruhan	Interprestasi
1	Variasi	71,66667	Baik
2	Perbandingan	74,1667	Baik
3	Proporsi	74,1667	Baik
4	Rasional	29,1667	Kurang Baik
Rata-rata		62,2917	Baik

Keterangan:

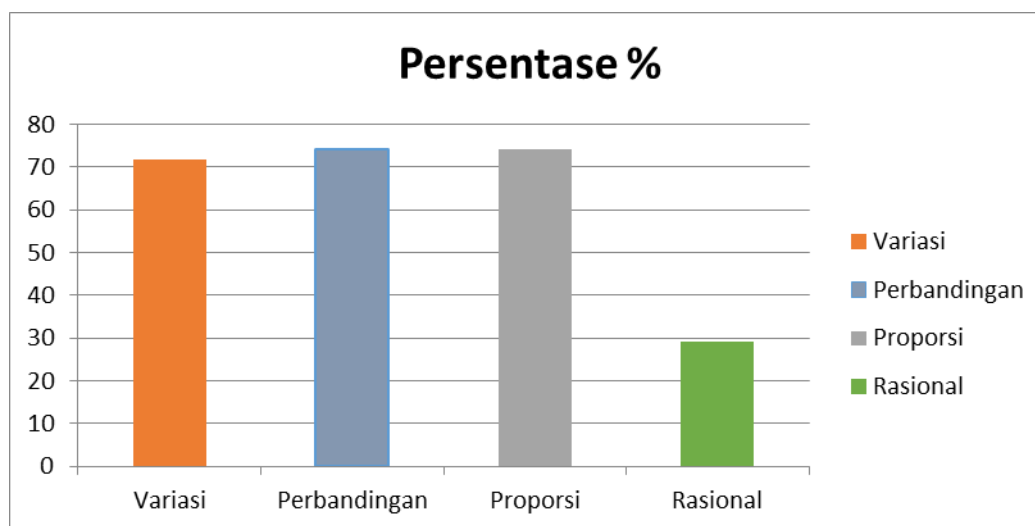
81% - 100% = Sangat Baik

61% - 80% = Baik

41% -60% = Sedang

21% - 40% = Tidak Baik

0 – 25% = Sangat Tidak Baik



Gambar 4.2 Diagram Batang Persentase Aspek Proporsional Kelompok Kecil

Dari hasil ujicoba kelompok kecil di atas diperoleh hasil rata-rata persentase penilaian seluruh aspek sebesar 62,29% yang berarti bahwa produk penilaian yang dikembangkan memiliki interpretasi yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian dalam mengukur kemampuan penalaran proporsional mahasiswa.

3. Uji coba kelompok besar

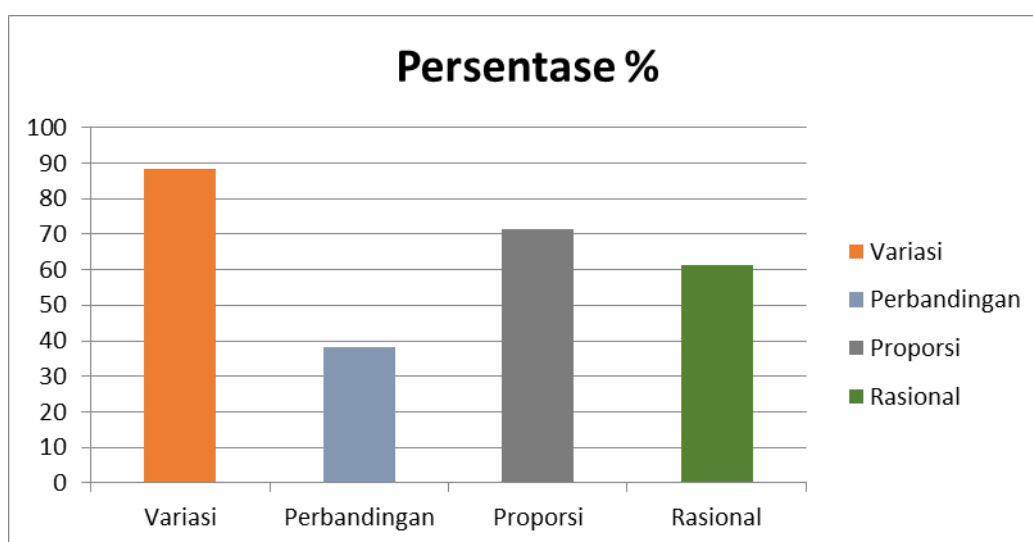
Uji coba kelompok besar dapat diuji cobakan kepada mahasiswa setelah dilakukan revisi kembali terhadap produk model yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan oleh *expert judgement* dan mahasiswa. Dari hasil ujicoba yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 30 orang tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Kelompok Besar

No	Aspek Penilaian	Presentasi Keseluruhan	Interprestasi
1	Variasi	88,3333	Sangat Baik
2	Perbandingan	38,3333	Kurang Baik
3	Proporsi	71,25	Baik
4	Rasional	61,25	Baik
Rata-rata		64,7917	Baik

Keterangan:

- 81% - 100% = Sangat Baik
- 61% - 80% = Baik
- 41% -60% = Sedang
- 21% - 40% = Tidak Baik
- 0 – 25% = Sangat Tidak Baik



Gambar 4.3 Diagram Batang Persentase Aspek Proporsional Kelompok Besar

Dari hasil ujicoba kelompok besar di atas diperoleh hasil rata-rata persentase penilaian seluruh aspek sebesar 64,79% yang berarti bahwa produk penilaian yang dikembangkan memiliki interpretasi yang baik dan layak untuk diimplementasikan sebagai alat penilaian dalam mengukur kemampuan penalaran proporsional mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar biologi.

KESIMPULAN

Guru belum memiliki produk penilaian khusus untuk mengukur berfikir tingkat tinggi mahasiswa, khususnya dalam aspek proporsional. Model penilaian ini akan dapat membantu guru untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki mahasiswa, sehingga guru dapat memberikan rangsangan agar setiap aspek yang ada pada penalaran proporsional dapat tercapai dengan baik yang nantinya akan menunjang keberhasilan anak dalam berfikir tingkat tinggi dalam kehidupan selanjutnya.

Model penilaian merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya penalaran proporsional seseorang. Dengan mengacu pada teori dan aspek-aspek yang terdapat dalam variabel proporsional tersebut maka dikembangkanlah sebuah instrumen yang dapat mewakili aspek-aspek tersebut ketika di uji cobakan. Adapaun produk tersebut sudah dirancang dan dikembangkan oleh peneliti melalui kajian teoritis yang mendalam mengenai penalaran proporsional dan konsep dasar biologi atau sains. Bahkan untuk mengukur validasi dari instrumen tersebut, peneliti meminta bantuan kepada pakar ahli dalam menilai instrumen tersebut. Adapun pakar yang ikut membantu dalam memvalidasi instrumen tersebut berjumlah 3 orang dengan 2 orang ahli pada materi biologi, dan 1 orang ahli bahasa. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka produk final model penilaian untuk mengukur kemampuan proporsional mahasiswa tersebut dapat diperoleh.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada mahasiswa PGSD strata satu di Universitas Negeri Jakarta terbukti secara efektif bahwa model penilaian yang dikembangkan dapat mengukur kemampuan penalaran proporsional yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mata kuliah konsep dasar biologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2011). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2011). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arvyaty dan Cipto Saputra. (2013). *Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) Terhadap kemampuan Penalaran Proporsional Siswa Sekolah Pertama*. Journal Pendidikan Matematika Vol. 4 No. 1. (diakses 09 Oktober 2016).
- Borg, W.R. dan Gall, M.D. (2009). *Educational Research: An Introduction*. London: Longman.
- Bruce, Joyce, Marsha Well, dan Emily Calhoun. (2009). *Models of Teaching*. America: Allyn an Bacon Pearson.
- Dahar, Ratna Wilis. (2011). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Desmita. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fah, Yoon Lay. (2009). *Logical Thinking Abilities Among Form 4 Students In The Interior Devision of Sabah Malaysia*. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia Vol. 32 No. 2 (diakses 10 Oktober 2016).

- Gallenstein, Nancy L. (2005). *Engaging Young Children in Science and Mathematics*. Journal of Elementary Science Education Vol. 17 No. 2. (diakses 15 Oktober 2016).
- Glaser, Kathrin dan Peter Riegler. (2015). *Beginning Students May Be Less Capable of Proportional Reasoning Than They Appear To be*. Journal of Teaching Mathematics and Its Applications Vol. 34. (diakses 08 Oktober 2016).
- Hino, Keiko Ito. “ *Proportional Reasoning and Learning in American and Japanese Sixth-Grade Students*.” ProQuest Dissertations Publishing (diakses 08 Oktober 2016).
- Howe, Christine et al. (2015). “*Rational Number and Proportional Reasoning in Early Secondary School Toward Principled Improvement in Mathematics*” Research in Mathematics Education Vol. 17 No. 1. UK: Routledge.
- Jamaris, Martini. (2006). *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Grasindo.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012.
- Lesh, R., Post, T., dan Behr, M. *Proportional Reasoning Number Concepts and Operations on the Middle Grades*. Journal of Rston Lawrence Erlbaum & National Council of Teachers of Mathematics (diakses 08 Oktober 2016).
- Mardapi, Djemari. (2007). Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Norton, Stephen J. (2005). The Construction of Proportional Reasoning. Queensland University of Technology Vol. 4 Melbourne: PME. (diakses 08 Oktober 2016).
- Nugraha, Ali. (2005). Pengembangan Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini. Jakarta: Departemen Pendidikan Tinggi.
- Nur. (1991). Pengadaptasian Test of Logical Thinking (TOLT) dalam Setting Indonesia. Laporan Hasil Penelitian, IKIP Surabaya.
- Nur, Andi Saparuddin. (2013). Pemecahan Masalah Matematika Sebagai Sarana Mengembangkan Penalaran Formal Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Sainsmat Vol. 11 No. 1. (diakses 8 Oktober 2016).
- Nurani, Yuliani dan Bambang Sujiono. (2010). Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak. Jakarta: Indeks.
- Purwanto. (2010). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Richey, Rita C. (2007). Design and Development Research. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc..
- Pribadi, Benny A. (2009). Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat.
- Putra, Sitiavata Rizema. (2013). Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains. Yogyakarta: Diva Press.

- Sanjaya, Wina. (2013). Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: Kencana..
- Setyosari, Punaji. (2010). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Eko. (2018). Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAUD dan SD/MI. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- . (2016). Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno dan Suyadi. (2016). Desain Kurikulum Perguruan Tinggi mengacu kerangka Kualifikasi nasional Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tegeh, I Made, I Nyoman Jampel dan Ketut Pudjawan. (2014). Model Penelitian Pengembangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Walle, John A. (2008). Pengembangan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar dan menengah edisi ke-6 Jilid 2 terjemahan Suryono. Jakarta: Erlangga.
- Walle, Van de dan Jhon A. (2008). Matematika Sekolah Dasar dan Menengah Jilid 2 Edisi 6 Terjemahan Suryono. Jakarta: Erlangga.

MUTU LULUSAN PERGURUAN TINGGI, ANTARA *SOFTSKILL* DAN IJAZAH: SEBUAH PEMIKIRAN

Okta Hadi Nurcahyono

ABSTRAK

Jumlah pendaftar Perguruan Tinggi dari berbagai jalur meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN berjumlah 797.020 peserta dan meningkat pada tahun 2018 mencapai 817.257 peserta. Lebih dari satu juta siswa dari lulusan SMA maupun SMK mendaftar di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Para calon mahasiswa mencari perguruan tinggi sesuai dengan keinginan, cita-cita, bakat, prestasi atau pilihan dan kemampuan orang tua mereka, Tetapi daya tampung perguruan tinggi yang ada tentunya terbatas. Pada sisi yang lain, para lulusan perguruan tinggi tidak mudah mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Lebih dari 80 % iklan lowongan pekerjaan baik di media cetak maupun media social mencari lulusan dari perguruan tinggi jika dibandingkan dengan sekolah vokasi, dan sebagian dari iklan lowongan pekerjaan mencari lulusan perguruan tinggi dari semua jurusan. Tulisan ini membahas bagaimana proses pendidikan dalam perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan mutu lulusannya baik input, proses dan outputnya. Artikel ini mengawali bahasannya mengenai proses penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi, kedua mengenai tantangan dalam mendidik sarjana, struktur pendanaan perguruan tinggi, dan pada bagian akhir membahas mengenai *mis or match* antara lapangan kerja dan kualifikasi lulusan.

Kata kunci: mutu lulusan, *softskill* dan perguruan tinggi.

PENTINGNYA IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) SEBAGAI PENYEMPURNA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA PERGURUAN TINGGI

Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Jakarta

snurjanah@unj.ac.id/mama2afl@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini, mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditawar lagi keberadaannya. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan pemerintahan dikarenakan masyarakat mulai kritis dalam memonitor, mengevaluasi manfaat, serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Institusi publik berupa universitas juga dituntut untuk menerapkan *Good University Governance* (GUG) sebagai standar mutu yang baik.

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Kemristekdikti melalui Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Ban-PT, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Tinjauan telaah atas SPMI dengan perspektif GUG menjadi sangatlah penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan layanan terbaik pada masyarakat khususnya bidang Pendidikan Tinggi yang merupakan menara tinggi, namun harus mampu membumi. Karena itulah tulisan ini perlu dipaparkan.

Prinsip-prinsip *Good University Governance* terhadap keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah jauh lebih bermakna ketimbang capaian output, prestasi dosen dan mahasiswanya. Prinsip-prinsip *Good University Governance* yang digunakan terdiri dari peraturan dan kualitas peraturan; akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Keywords: *Good University Governance* (GUG), SPMI.

PERGURUAN TINGGI, RISET, DAN INOVASI: UPAYA MERUMUSKAN KOMPETENSI PERGURUAN TINGGI

Budi Santosa dan Imam Mujahid
IAIN Surakarta
Surakarta, Indonesia
Bsantosa23@gmail.com

1. Merumuskan Kembali Peran Perguruan tinggi

Nyaris tidak ada perdebatan bahwa keberadaan perguruan tinggi harus memiliki peran dan kontribusi yang signifikan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kontribusi apa dan dapat diberikan melalui peran yang seperti apa yang harus dilakukan perguruan tinggi? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan berbeda dari masa ke masa. Perbedaan jawaban demikian salah satunya disebabkan oleh gerak adaptif perguruan tinggi terhadap pergeseran tantangan jaman.

Dalam perjalanan sejarahnya, terutama di dunia Barat, perguruan tinggi memiliki dua peran utama: pendidikan/pengajaran dan penelitian/riset. Dengan pendidikan/pengajaran perguruan tinggi mendeseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan sumberdaya manusia yang ahli dan terampil, sementara melalui riset perguruan tinggi memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi. Baru belakangan muncul gagasan mengenai peran perguruan tinggi yang ketiga, yaitu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki kepada masyarakat secara luas. Semakin besarnya perhatian perguruan tinggi atas perannya dalam transfer pengetahuan kepada masyarakat, termasuk dunia industri, sampai pada tahap munculnya istilah “*second academic revolution*”, yang terjadi pada abad ke-20 dengan ditandai oleh munculnya konsep “*entrepreneurial university*” (Etzkowitz, Webster dan Healy, 1998). Unsur terpenting dan bahkan penciri utama dari misi ketiga perguruan tinggi tersebut adalah kapitalisasi ilmu pengetahuan, dimana hubungan perguruan tinggi sebagai produsen ilmu pengetahuan menjadi semakin lekat dengan masyarakat dan dunia industri selaku pengguna ilmu pengetahuan (Etzkowitz, 1998). Secara eksplisit, De Groof (2018) menyebut peran perguruan tinggi yang ketiga sebagai misi inovasi. Dan sebagai catatan bahwa sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia sudah sejak awal mencanangkan misi ketiga demikian dalam salah satu Dharma yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Namun mungkin perlu diformulasikan dengan lebih baik melalui konsep “misi inovasi” sebagaimana yang disampaikan De Groof.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, telah menjalankan peran penting dalam proses akumulasi pengetahuan, pengkajian dan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, juga menyiapkan sumberdaya tenaga ahli terpelajar dan terdidik untuk menjadi motor penggerak perubahan di masing-masing negara (Wu & Hawkins, 2018). Peran strategis perguruan tinggi tersebut dicapai melalui proses kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa (*teaching*) dan penelitian/riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dasar maupun dikembangkan guna memecahkan persoalan-persoalan nyata

kemasyarakatan (Altbach, 2015). Pengajaran sendiri pada dasarnya merupakan proses mendidik dan melatih individu untuk mampu bekerja secara efektif dalam dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi tinggi. Proses mendidik dengan demikian berusaha melatih individu memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan dan melaksanakan pekerjaan yang kini membutuhkan penguasaan pengetahuan dan teknologi canggih.

Kedudukan dan peran perguruan tinggi seperti dideskripsikan di atas kurang lebih adalah gambaran perguruan tinggi modern yang dibayangkan oleh Wilhelm von Humboldt pada tahun 1810 yang menjadi landasan didirikannya Universitas Berlin, yang merupakan perguruan tinggi modern Barat pertama (Boulton & Lucas, 2011). Menurut Wilhelm von Humboldt bahwa perguruan tinggi bekerja dengan tiga prinsip: (1) kesatuan antara riset dan proses pembelajaran (*teaching*), (2) kebebasan untuk menjalankan proses pembelajaran (*freedom of teaching*) dan (3) kemandirian mengelola proses akademik. Prinsip pertama menunjukkan bahwa kemajuan dan gagasan-gagasan dan pengetahuan baru yang dikejar melalui penelitian dibayangkan distimulasi melalui proses dialog dengan ilmuwan/mahasiswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran diharapkan tidak hanya sekedar sebagai proses transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, tetapi proses stimulasi dan *sharing* ide dan gagasan sehingga diharapkan lahir ide dan pemikiran baru yang segar untuk dilanjutkan melalui proses penelitian. Kebebasan menjalankan proses pembelajaran bermakna dosen/profesor memiliki kebebasan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian dan keyakinan rasionalnya. Prinsip pembelajaran ini juga berarti proses pembelajaran akan berjalan secara profesional dan terarah sesuai dengan bidang keahlian dosen/profesor yang diasumsikan memiliki kompetensi mumpuni di bidangnya. Prinsip ketiga dimana proses akademik dijalankan secara mandiri dimaknai bahwa proses akademik dilakukan relatif tanpa intervensi kepentingan kekuasaan/pemerintah secara langsung. Dengan kata lain, proses akademik berjalan secara natural sesuai dinamika kelembagaan universitas, tanpa mengabaikan interaksi perguruan tinggi dengan elemen di luar dirinya. Penekanannya adalah pada kemandirian perguruan tinggi untuk menentukan keputusan bagi dirinya.

Model perguruan tinggi sebagaimana yang dibayangkan oleh Wilhelm von Humboldt di atas pada dasarnya menjadi model bagi dijalankannya perguruan tinggi di dunia Barat, baik perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara Eropa maupun Amerika, juga wilayah-wilayah yang kemudian dipengaruhi dan mengadopsi model pengelolaan perguruan tinggi model Barat seperti universitas di wilayah Australia, Asia, dan Afrika. Model perguruan tinggi Barat tersebut yang kurang lebih selama 200 tahun berhasil dijalankan dan dianggap sukses. Dikatakan sukses karena perguruan tinggi di Barat dianggap berhasil membawa kemajuan dan menghasilkan temuan-temuan terobosan di bidang ilmu pengetahuan (sains) teknologi. Semua itu dianggap keberhasilan dari proses penelitian, pembelajaran, dan kebebasan akademik yang dijalankan universitas-universitas Barat. Kesuksesan tersebut juga diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian diaplikasikan dalam masyarakat/industri maupun berbagai permasalahan nyata kemasyarakatan. Kesuksesan perguruan tinggi model Barat tersebut tampak nyata di negara-negara Maju di mana banyak kebijakan pemerintah di bidang-bidang penting seperti ekonomi, politik, militer, kesehatan, maupun sosial dilandasi oleh pengetahuan dan hasil penelitian

akademik. Hal itu juga tampak dari besarnya perhatian pemerintah di negara-negara maju terhadap kedudukan perguruan tinggi dilihat dari indikator bantuan anggaran yang besar bagi operasional perguruan tinggi.

Kesuksesan perguruan tinggi model Barat sehingga membawa pengaruh dalam bidang industri, ekonomi dan pemerintahan melalui hasil kajian dan penelitian yang dijalankan dijelaskan oleh Etzkowitz & Ranga (2015) maupun Leydesdorff & Meyer (2006) melalui model *Triple Helix Systems* (THS). Konsep THS menunjukkan relasi antara perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah (*university-industry-government*). Konsep ini pada awalnya diajukan oleh Etzkowitz (1993) juga Etzkowitz & Leydesdorff (1995). THS secara konseptual menjelaskan kedudukan penting perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran dan riset yang dijalankan memiliki pengaruh penting dalam kegiatan masyarakat/industri maupun berkontribusi pada berbagai upaya pemecahan masalah yang menjadi tanggung jawab pihak pemerintah di berbagai negara. Pengaruh perguruan tinggi tersebut dimungkinkan karena sistem sosial modern kini tidak lagi dipengaruhi oleh produksi barang maupun jasa, yang menjadi karakteristik masyarakat/industri. Sistem sosial masyarakat kontemporer kini beranjak lebih ditopang dan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Pengetahuan kini menggantikan nilai strategis komoditas dan jasa yang dalam masyarakat/industri menjadi faktor penentu kemakmuran dan penguasaan/dominasi bidang sosial-ekonomi oleh banyak perusahaan dan pemerintah berbagai negara. Dalam sistem sosial kontemporer, kemakmuran dan dominasi ekonomi satu perusahaan dan pemerintahan lebih ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan data. Sistem sosial di mana pengetahuan dan data kini lebih menentukan kemakmuran dan dominasi ini yang kemudian disebut sebagai Masyarakat Pengetahuan (*Knowledge Society*).

THS dengan demikian merupakan satu konsep yang menggambarkan bagaimana hubungan yang terkait antara tiga sistem yaitu perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah dalam masyarakat pengetahuan memiliki potensi inovasi dan pembangunan ekonomi yang kemudian mendatangkan kemakmuran dan penguasaan ekonomi. Hal itu dihasilkan dari percampuran (hibridisasi) peran perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah yang kemudian melahirkan bentuk baru kelembagaan dan fungsi sosial bagi proses produksi, transfer, dan aplikasi dari pengetahuan. Hibridisasi tersebut juga menunjukkan peran penting kajian dan penelitian di perguruan tinggi yang memiliki nilai kebaruan dan terobosan, atau yang juga disebut dalam masyarakat pengetahuan sebagai inovasi (Etzkowitz & Ranga, 2015; Smith, 2007)

THS secara lebih lanjut dapat dijelaskan melalui elaborasi lebih mendalam dari perspektif komponen-komponen/elemen yang berperan dalam sistem tersebut. THS juga dapat dijelaskan melalui relasi antar komponen dalam satu sistem yang saling terkait. Dan ketiga, THS juga dapat dimaknai sebagai sistem yang memiliki fungsi tertentu.

THS dalam pengertian komponen terdiri atas ruang hidup (*spheres*) perguruan tinggi, masyarakat/industri, dan pemerintah, dimana masing-masing ruang hidup terdiri atas elemen aktor yang juga bisa dibedakan menjadi aktor individu maupun aktor kelembagaan. THS akan mencapai titik optimal ketika ketiga elemen tersebut memiliki sinergi dalam hal kepentingan dan sistem kerja. Relasi antar komponen juga menciptakan peluang terjadinya penentuan peran kepemimpinan, kerjasama, transfer pengetahuan, dan mediasi konflik. THS dalam perspektif fungsi paling utama

diharapkan dapat menciptakan sistem yang memiliki fungsi kompetensi yang akan menentukan kinerja sistem secara utuh. Kompetensi sistem THS secara umum diharapkan dapat mendorong kelahiran, penyebaran, dan utilisasi pengetahuan dan inovasi. Kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya diaplikasikan dalam bidang teknologi dan ekonomi, tetapi juga bidang-bidang sosial, kebijakan, maupun kebudayaan.

Paparan tentang THS di atas memberi pelajaran penting bahwa peran perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pembelajaran terjadi dalam ruang hidup (*spheres*) atau juga disebut *ekosistem* yang memungkinkan peran tersebut menjadi kompetensi yang mampu menjadi pemecah dalam relasi perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang teknologi dan ekonomi (Binz & Truffer, 2017; Oh, Phillips, Park & Lee, 2016; Smith, 2007; Etzkowitz, 2003).

2. Catatan dan Tantangan Perguruan tinggi

Gagasan tentang THS dapat menjadi acuan dasar untuk melihat kembali dan merevitalisasi kedudukan dan peran perguruan tinggi dalam proses pembangunan seutuhnya di Indonesia.

Pertama, perguruan tinggi perlu menguatkan visi misi strategis untuk menemukan kembali peran vitalnya dalam bidang penelitian dan pembelajaran. Namun untuk menemukan kembali relevansi dan pentingnya peran perguruan tinggi, aktor-aktor perguruan tinggi seharusnya tidak merumuskan visi misi kelebagaannya sendiri. Perguruan tinggi justru perlu membangun sinergi dengan masyarakat/industri dan pemerintah dimana perguruan tinggi berada, dalam merumuskan perannya. Strategi ini akan menjamin nilai relevansi dan urgensi proses pembelajaran dan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi akan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat/industri dan pemerintah, khususnya pada lingkup lokal dan regional. Penentuan visi misi yang lebih konkrit sesuai dengan kebutuhan industri dan pemerintah di tingkat lokal dan regional akan menuntun arah pengembangan kompetensi kelembagaan perguruan tinggi sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan pemangku kepentingan dimana perguruan tinggi tersebut berada.

Visi-misi yang memiliki relevansi kelembagaan yang tinggi khususnya di tingkat lokal dan regional akan menjadi dasar bagi pengembangan kualitas kompetensi kelembagaan perguruan tinggi (baik pengembangan SDM, manajemen, model pembelajaran dan sebagainya).

Kedua, sinergi perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah di tingkat lokal dan regional akan menciptakan ekosistem yang berguna bagi langkah pengembangan masing-masing kelembagaan. Sinergi tersebut juga memungkinkan dilakukan transfer dan pertukaran sumberdaya antara perguruan tinggi-masyarakat/industri-pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan secara lebih konkrit akan memberi pemahaman kebutuhan dan kompetensi kelembagaan masing-masing. Hal itu diharapkan mendekatkan kemungkinan terjadinya transfer pengetahuan dan pertukaran sumberdaya antar lembaga.

Catatan yang juga penting bagi perguruan tinggi adalah semakin kuatnya kecenderungan perguruan tinggi untuk sibuk mempertanyakan kompetensi diri dan kualitas pengelolaan akademik perguruan tinggi tanpa pernah mempersoalkan peran nyata, yang sebetulnya dapat diperoleh dengan membangun sinergi dengan dua kelembagaan yang lain. Hal demikian misalnya tampak pada hiruk-pikuk perguruan tinggi untuk mengurus peringkat akreditasi maupun proses pemerolehan akreditasi yang memang diamanatkan oleh undang-undang sebagai sistem akuntabilitas kelembagaan perguruan tinggi. Namun upaya tersebut akan seperti menegakkan benang basah (sia-sia) apabila perguruan tinggi tidak memiliki dan menentukan visi-misi strategisnya. Kegagalan merumuskan visi-misi strategis akan menjadikan perguruan tinggi kehilangan arah pengembangan kompetensi dan pengelolaan kegiatan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P. G. (2011). "The complex roles of universities in the period of globalization" *Higher Education in the World*, 3, 5-14. <https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8111/1/altbach.pdf>
- Binz, C., & Truffer, B. (2017). Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts. *Research Policy*, 46(7), 1284-1298.
- Boulton, G., & Lucas, C. (2011). What are universities for? *Chinese Science Bulletin*, 56(23), 2506-2517.
- De Groof, J. (2018). On the 'Innovative University': A few Challenging Reflections. *European Review*, Vol. 26, No. S1, S114–S123.
- Etzkowitz, H. (1993). Enterprises from science: The origins of science-based regional economic development. *Minerva*, 31(3), 326-360.
- Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government relations. *Social science information*, 42(3), 293-337.
- Etzkowitz, H. (2008). *The triple helix: university-industry-government innovation in action*. Routledge.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development.
- Etzkowitz, H., & Ranga, M. (2015). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. In *Entrepreneurship and Knowledge Exchange* (pp. 117-158). Routledge.
- Etzkowitz, H., Webster, A., & Healey, P. (1998) *Capitalizing Knowledge: New Intersections of Industry and Academia* (Albany, State University of New York press).
- Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. *Technovation*, 54, 1-6.

Smith, H. L. (2007). Universities, innovation, and territorial development: a review of the evidence. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 25(1), 98-114.

Wu, A. M., & Hawkins, J. N. (Eds.). (2018). *Massification of higher education in Asia: Consequences, policy responses and changing governance*. Singapore: Springer.

REGULASI BERBASIS HUKUM PANCASILA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENELITIAN DI PENDIDIKAN TINGGI¹⁴⁹

Hassan Suryono¹⁵⁰

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana regulasi hukum yang berbasis Pancasila dapat meningkatkan mutu penelitian di Pendidikan Tinggi. Metode penelitian yang dipakai adalah normatif. Metode pengumpulan datanya adalah kepustakaan. Obyek yang dikaji adalah produk hukum yang berkaitan dengan penelitian di Pendidikan Tinggi. Hasil analisis data menggunakan analisis isi, untuk mengkaji makna yang terkandung dalam peraturan-peraturan tentang penelitian di Pendidikan Tinggi. Hasil analisis isi memperoleh bahwa regulasi perundang-undangan yang berbasis Pancasila untuk meningkatkan mutu penelitian haruslah dimulai dari penjabaran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, berlanjut pada pasal 31 Undang-Undang dasar, dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan harus direalisasikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai standar nasional Pendidikan Tinggi yang sudah ditetapkan dengan peraturan no 44 tahun 2015. Regulasi ini harus menetapkan standar mutu penelitian yang menentukan isi penelitian, proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana-prasarana serta pengelolaannya.

KATA KUNCI: Hukum Pancasila, dan mutu penelitian

CURICULUM VITAE:

Hassan Suryono lahir di Sragen, 15 Mei 1956. Menyelesaikan studi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Civics Hukum tahun 1979, Sarjana pendidikan Jurusan Civics Hukum Tahun 1982. Magister Pendidikan Tahun 1993, Sarjana Hukum Tahun 1998 dan Magister Hukum Tahun 2002.

Karya Ilmiah yang pernah ditulis adalah, Pancasila Progressif (2006) Ilmu Negara (2013), Statistik dalam teori dan aplikasi (014), Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan (2015). Pendidikan integritas anti korupsi (2015) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Pancasila (2016) Politik Hukum Pancasila dan Kewarganegaraan (2017), Kapita Selekta Hukum, asas, teori dan aplikasi dalam kasus hukum (2017).

Kegiatan Ilmiah sebagai nara sumber di DPR dan MPR tahun 2016 dan Departemen Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak tentang Kesadaran Wajib pajak pada Mata

¹⁴⁹ Makalah dipresentasikan pada Simposium pendidikan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada hari Sabtu 16 februari 2019 di UNS INN Kentingan Surakarta.

¹⁵⁰ Kepala P3 MKU LPPMP Universitas Sebelas Maret dan Dosen pada Prodi PPKn FKIP UNS

Kuliah Umum di Universitas Sebelas Maret 2017. Nara sumber Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara di Dina s Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar 2017. Nara sumber seminar nasional nilai-nilai kebangsaan pada Mata Kuliah Umum Kewarganegaraan di Prodi PPKn UNS (2018)

Jabatan Struktural yang pernah dipegang Ketua Program PMP dan KN FKIP UMS (1984 – 1986), Sekretaris Program PPKn FKIP UNS (1994 – 1996), Ketua Laboratorium Program PPKn FKIP UNS (1999 – 2001), Ketua Program PPKn FKIP UNS (2003 – 2007), Sekretaris Pusat studi Konstitusi dan HAM UNS (2011 – 2012) Seretaris UPT MKU UNS (2012 – 2014) Kepala UPT MKU UNS (2015 sampai 2016) Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (P3MKU) UNS (2016- 2019).

Pendidikan dan pelatihan antara lain Program statistika (1986), Ms Ws Word, Power Point dan eksel (2002) Training olah data (2003) TOT Pendidikan anti korupsi (2012)

Jabatan dalam organisasi / asosiasi / keilmuan / kemasyarakatan .yang pernah dijabat sebagai berikut Asesor BAN PT (2005 sampai 2013) Asesor Internal Program Studi Di UNS (2009 sampai sekarang) Tim Pokja penyusunan materi bela negara di PKN di Dirjen Pohan Dephan (2009), Tim Pokja Penerapan Pancasila di Perguruan Tinggi Dirjen Dikti Kemendikbud (2009). Anggota Pengurus Pusat HISPISI (2007 – 2011 / 2011 – 2016) Koordiantor Nasional MPK Pancasila (2009 – 2012). Pengurus Pusat AP3 KnI (2012 – 2016) Pembina AP3KnI Jawa tengah (2015 – 2017), Pembina AP3KnI Jawa Tengah (2018 – 2023), Ketua RT 03 Rw 05 Perum UNS ,Jati, Jaten, Karanganyar 2011 – 2014 ,Ketua IPHI Ranting Jati , Jaten , Karanganyar (2018 – 2023)

Penghargaan yang telah diterima (1) sebagai dosen teladan FKIP UNS (1994), (2) Sebagai dosen teladan 3 UNS (1994), (3) penerima Satya Lancana Karya Satya XX tahun 2012 dan (4) Karya Satya XXX tahun pada tahun 2017 dari Presiden RI.

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI: BEST PRACTICES DARI KALIMANTAN TIMUR

Makalah

Disampaikan pada Simposium Pendidikan Nasional
Diselenggarakan oleh Majelis Nasional
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI)
Pada tanggal 16 Februari 2019 di Kampus UNS, Ketingan Solo.

Dwi Nugroho Hidayanto

Guru Besar FKIP Univ. Mulawarman
Kepala BPSDM Prov. Kaltim

Abdul Rahman

Program Studi Sosiologi-Antropologi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
abdulrahman18542@gmail.com

ABSTRACT

Perguruan Tinggi di daerah dibangun dengan tujuan memajukan daerah di berbagai bidang kehidupan. Hasil akreditasi oleh BAN-PT diharapkan pada munculnya kualitas yang standard dan relatif sama antar perguruan tinggi di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Kenyataan di lapangan menunjukkan, dari hasil akreditasi, secara umum perguruan tinggi di wilayah Pulau Jawa lebih baik daripada yang di luar Jawa. Diduga, kenyataan ini lebih disebabkan faktor yang bersifat *given* (*milliu*, kultur, habit, *athmospere academic*, dan seterusnya), sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk merubahnya agar faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai pengungkit (*leverage*) kualitas perguruan tinggi daerah. Sambil tetap berjuang menuju tercapainya kualitas akreditasi yang lebih baik, secara institusional perguruan tinggi di daerah juga perlu didorong untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah agar dapat berkontribusi secara maksimal untuk ikut membangun dan mensejahterakan masyarakat. Perguruan Tinggi tidak perlu lagi memposisikan sebagai Menara gading, menara api atau pun menara air, tetapi justru hadir untuk membangun menara-menara tersebut sebagai pusat-pusat keunggulan baru yang bermanfaat bagi daerah. Agar proses untuk berkontribusi berlangsung dalam kendali dan terselenggara dengan baik, dibutuhkan pemimpin perubahan (*change leadership*) yang tangguh dan sanggup membuat terobosan-terobosan baru dan berpikir lintas batas, akseleratif, serta bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Tanpanya, perguruan tinggi di daerah akan menjadi stagnan dan minim kontribusi terhadap pembangunan daerah, disamping tetap berada pada ketidakpastian akan pencapaian kualitas akreditasi yang lebih baik. Melalui prinsip *simbiosis mutualistis* dan *mutual adaptive* dengan strategi berkelanjutan akan tumbuh sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Daerah, dan secara bersama saling memajukan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Kata-kata kunci: Sinergi, kualitas, change leadership, simbiosis-mutualistik, pusat-pusat keunggulan baru, sustainable strategy.

Sekitar 40 tahun yang lalu, dalam buku *Wawasan Almamater* karya Prof. Dr. Brigjen TNI Nugroho Notosusanto, yang kala itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis tiga kemungkinan posisi perguruan tinggi. Posisi tersebut ialah perguruan tinggi sebagai Menara Gading, sebagai Menara Air, dan sebagai Menara Api. Sekarang, di tahun 2019 kiranya masih relevan untuk menagih dan menegaskan kembali posisi dominan perguruan tinggi. Manfaat perguruan tinggi bagi pembangunan ditentukan oleh dominasi posisi tersebut. Condong sebagai menara Gading, menara Api, atau menara Air. Pilihan kecondongan antara Gading, Api, dan Air oleh pimpinan perguruan tinggi merupakan penentu kontribusi nyata perguruan tinggi sebagai agen perubahan masyarakat, dalam arti sebagai agen pembangunan. Untuk sebagian perguruan tinggi di daerah terlibat secara nyata dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pimpinan daerah meminta kepada pimpinan PTN/PTS agar orang-orang kampus turun gunung, tidak lagi hanya sebagai "begawan" yang kaya dengan teori dan hanya diteorikan di kelas, tetapi dipraktikkan langsung di dalam proses pembangunan, *theory into practice*.

Apa yang pernah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur boleh disebut sebagai *best practice*, dan dapat diangkat sebagai kajian dalam melihat sebuah proses kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat, serta bagaimana tantangan dan kendala yang dihadapinya. Tentu, ini menurut pandangan penulis yang selama lebih sepuluh tahun terlibat dalam sebagian proses kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya, beberapa pandangan yang akan penulis sampaikan, paling tidak mencakup: (1) posisi dan peran perguruan tinggi di daerah, (2) persepsi umum perguruan tinggi di daerah, (3) tantangan dan masa depan perguruan tinggi daerah, (4) perguruan tinggi daerah: *best practice* dari Kalimantan Timur, (5) penutup.

Sebelum masuk ke bahasan singkat, perlu penulis angkat apa yang pernah ditulis oleh Kieran Egan (2008) dalam bukunya *The Future of Education: Reimagining our school from the Ground Up*. Dalam bagian kedua dari buku itu ditulis tentang program reformasi pendidikan lima puluh tahun, dengan penggalan tiap sepuluh tahunan, yang dimulai dari 2010 - 2060. Memperhitungkan relevansi waktu, saya batasi dengan mengangkat periode 2020 - 2030. Ia katakan bahwa pendidikan, untuk sepuluh tahun ke depan (termasuk pendidikan tinggi) sangat dipengaruhi oleh krisis ekologis. Dan ia nyatakan pula bahwa "*government.....mandated that all schools introduce new ecological curricula to ensure that children were equipped to understand the crises they faced, and to encourage behaviors that would mitigate the damage*" Penegasan perlunya keterlibatan siswa dalam mengatasi problem lingkungan dinyatakan: "*...mobilizing the schools and its curriculum to help fight the ecological battle of the day....and involving students in the world outside the school walls*". Apa yang dinyatakan Egan lebih menitik beratkan ke issue lingkungan, akan tetapi juga mengisyaratkan perlunya kepemimpinan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi untuk mendekatkan sekolah (kampus) dengan *best practices* di masyarakat. Ini berujung pertanyaan apa yang telah dilakukan para pemimpin pendidikan dalam keterlibatannya dalam proses

pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan respon terhadap isue global. Sebagai lembaga Tri Dharma, maka pertanyaannya apakah pendidikan, penelitian dan pengabdian masarakat telah di desain sedemikian rupa sebagai skenario masa kini yang membumi dan masa depan yang menjanjikan. Jika di daerah, maka panggunnya adalah pemerintah daerah.

1. Posisi dan Peran Perguruan Tinggi di Daerah

Semua paham, perguruan tinggi di manapun berposisi sebagai pusat keunggulan (*The Center of Excellency*), sebagai agen perubahan (*The Agent of Change*). Dengan posisi ini, tidak serta-merta memberikan kontribusi bagi keunggulan dan perubahan masyarakat, baik di nasional maupun di daerah. Tentu banyak variabel yang menjadikan perguruan tinggi belum terasa penetrasinya bagi keunggulan dan perubahan masyarakat. Akan tetapi, kepemimpinan perguruan tinggi penulis yakin bisa menjadi variabel utama pengungkit (*leverage*) dalam keunggulan dan perubahan. *Change Leadership* sangat diperlukan bagi kemajuan perguruan tinggi. Variabel-variabel lainnya lebih sebagai pelengkap. Tanpa terasa, sampai sekarang, masih ada yang membuat dikotomi Perguruan Tinggi di "Jawa dan Luar Jawa", dengan persepsi bahwa yang di Jawa *is better than the others* (di luar Jawa). Bahwa masih dimilikinya sejumlah kelemahan di "*the others*" ini perlu dimaklumi dengan terus berbenah diri. Akan tetapi masih adanya ledakan kawan dengan menyebut "*garbage in garbage out*" (GIGO) dapat menjadikan perguruan tinggi "*the others*" ini semakin kurang percaya diri jika bersama atau berhadapan dengan perguruan tinggi ternama, khususnya yang di Jawa. Atmosphere academic yang merupakan kumulatif multi variabel tidak mudah untuk menghadirkannya. Diperlukan *effort* dari semua pihak agar "*the others*" ini bisa sejajar dengan rekan-rekannya di Jawa. Sembari menunggu hasil dari *efforts* tersebut, perguruan tinggi di daerah perlu bergandengan dan bermitra abadi dengan pemerintah daerah, membangun *simbiosis mutualistis*. Bukan lagi sebagai menara Api dan Air, apalagi menara Gading, tetapi bersama Pemerintah Daerah Membangun Menara-menara Air dan Menara-menara Api, membawa dan menciptakan kesejahteraan serta menerangi masyarakat. Ini bukan utopis, tetapi nyata dan telah ada yang melakukan. Proses perbaikan internal institusi sambil berkontribusi nyata ini ibarat "berjalan sambil memperbaiki tali sepatu". Mungkin, sedikit tertatih. Tapi ini lebih baik, ketimbang tidak ada upaya. Bukan menunggu dipenetrasi, tetapi kita lah yang melakukan penetrasi ke daerah.

2. Persepsi Umum Perguruan Tinggi di Daerah

Sebenarnya semua perguruan tinggi berada di daerah. Seperti, UI di Daerah Khusus Ibukota, UGM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi yang terasa, yang berada di luar Jawa sering disebut orang sebagai Perguruan Tinggi Daerah (PTD), dengan sebutan kelas tertentu. Diakui, masih banyak kelemahan di sana. Tetapi, dikotomi ini tidak perlu terjadi. Hasil akreditasi dan standar-standar yang diterapkan BAN-PT sebenarnya upaya keras menyamakan kualitas. Akan tetapi berbagai diterminan ikut berpengaruh terhadap kualitas. Pun, penulis secara pribadi belum percaya sepenuhnya terhadap hasil akreditasi yg lebih bersifat administratif. Apakah jika, institusi terakreditasi A berarti aspek input, proses, output, termasuk outcome, impact sudah betul-betul excellent? Professor HAR Tilaar pernah mengungkapkannya bahwa akreditasi yang murni adalah pengakuan dari masyarakat. Apa pun, yang

dilakukan BAN-PT itu upaya positif yang harus diapresiasi. Di samping itu, *Higher Education Leadership* pegang peran utama untuk pembenahan-pembenahan sesuai regulasi (*tekstual*) dengan tetap menjaga kearifan dan keunggulan lokal sebagai tema sentral pengembangannya (*kontekstual*). Secara akademis, disebut Pola Ilmiah Pokok sebagai jati diri keunggulan. Jadi, dalam konteks memajukan bangsa, kehati-hatian memilih pimpinan perguruan tinggi sama pentingnya dengan kehati-hatian dalam memilih pimpinan nasional.

3. Tantangan dan Masa depan Perguruan Tinggi Daerah

Sama dengan yang dihadapi perguruan tinggi mana pun. Menghadapi era disrupsi, dan akselerasi kemajuan iptek digital yang sangat cepat, serta fenomena tercerabutnya hal-hal yang fundamental dari kehidupan di era arus industri ini, memerlukan kalkulasi yang cermat dan tidak jarang melibatkan intuisi. Dengan melihat kondisi nyata perguruan tinggi daerah, maka penulis tidak dulu ikut-ikutan bicara tentang Era Industri 4.0 yang sedang menjadi arus wacana di banyak level, di samping sudah ada ahlinya untuk itu. Terlalu sering membandingkan dan kagum dengan negara lain sekaligus mengulang sebut kelemahan negara sendiri, menurut penulis dapat menjadikan kita pesimis. Apa yang nyata di depan kita, dan dengan kapasitas yang kita miliki lalu kita merubahnya, mungkin lebih produktif. *Well done is better than well speak*. Tantangan nyata perguruan tinggi daerah lebih pada diterminan-determinan yang mengitarinya yang secara langsung berpengaruh terhadap *atmosphere academic*-nya. Sinergi *good leader and good leadership* baik yang ada di perguruan tinggi dan pemerintah bisa mendobrak diterminan kebakuan menuju institusi pendidikan tinggi yang cair dan siap menerima perubahan. Sejarah dan pengalaman di salah satu PTN di Kalimantan Timur telah membuktikannya. Keberanian pimpinan untuk menginisiasi terobosan dan berpikir lintas batas menjadi prasyarat utama. Jika tidak, sampai kapan pun tetap menjadi perguruan tinggi "*the others*". Namun, tantangan dan peluang yang begitu besar bagi perguruan tinggi di daerah sejatinya merupakan masa depannya. Masa depan yang menjadikan eksistensi "*the others*" ini melejit menjadi institusi yang *excellent*. Peluang-peluang dimaksud, antara lain:

1. Inisiator pendirian PT di daerah biasanya adalah Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan mantan-mantan pejabat serta tokoh sentral di daerah.
2. Semangat primordial orang "asli" daerah membentuk sikap militan memajukan daerah
3. Kesadaran para kepala daerah dan DPRD akan peran strategis PT menjadi faktor yang memudahkan penggelontoran dana APBD bagi pembangunan dan pengembangan sarpras PT setempat.
4. Lebih memberi kesempatan kepada putra-putra daerah yang potensial atau siapa pun yang peduli daerah dalam menempuh pendidikan lanjutan
5. Dimilikinya semangat para stakeholders untuk memajukan daerah dengan semboyan "menjadi yang terdepan, dan minimal sama dengan Jawa," dapat menjadi pemantik percepatan kemajuan.

6. Tumbuhnya *trust* pimpinan daerah terhadap perguruan tinggi setempat untuk bersama ikut membangun daerah.
7. Adanya *evident* hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat telah mengokohkan keyakinan bersama di daerah bahwa sinergi ini punya potensi mengungkit kemajuan bersama secara *simbiosis mutualistis*.
8. Simpul-simpul pembangunan di daerah semacam Rintisan Proyek Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi ladang pembuktian kredibilitas perguruan tinggi setempat dan meningkatkan *trust* dari pemerintah dan masyarakat.
9. Pembukaan program-program studi baru dilakukan dengan memperhitungkan ketersediaan lulusan sejalan dengan program pembangunan di daerah.
10. Dibukanya proyek-proyek berteknologi tinggi di daerah, semisal fasilitas nuklir (PLTN, *Nuclear Science Techno Park*, Radio Isotop, Irradiator) menjadi triger pengembangan teknologi pendukungnya.

4. Perguruan Tinggi Daerah: *Best Practices* dari Kalimantan Timur

Boleh jadi, yang terjadi di Kalimantan Timur juga dialami di provinsi lain. Tetapi, penulis hanya bisa menuliskan yang dialaminya, dengan harapan sebagai *lesson learnt* bagi yang lain. Universitas negeri pertama di Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih menjadi kebanggaan adalah Universitas Mulawarman (UNMUL), yang lahir tahun 1962, lima puluh tujuh tahun yang lalu. Sudah cukup tua. Ketika penulis datang dan jadi dosen di situ, pada 1984, UNMUL baru memiliki 5 fakultas, yakni: Fisipol, Fekon, Faperta, Fahutan, dan FKIP. Sekarang telah berkembang menjadi 13 fakultas, yakni Kedokteran, Farmasi, Kesmas, Perikanan, Hukum, MIPA, Ilmu Budaya, dan Teknik, plus 5 fakultas yang pertama. Salah satu dekan FKIP, Prof. Awang Faroek Ishak pernah menjadi Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur selama 2 periode. Hal yang sedang diupayakan oleh pimpinan perguruan tinggi adalah bagaimana menaikan peringkat di antara PT yang lain, karena usia tua ternyata tidak linier dengan hasil yang dicapainya. Sementara masih pada peringkat lima puluhan.

Best practice yang penulis angkat tentu tidak terkait dengan peringkat, tetapi lebih kepada *effort* yang ditunjukkan Pemerintah Daerah dalam mengawal UNMUL sejak kelahirannya hingga pengembangannya sampai sekarang. *Effort* dan dukungan yang luar biasa patut diapresiasi karena bukan hanya membantu melahirkan, tetapi pemerintah daerah lah yang mengandung, yang melahirkan dan lalu merawatnya. Dari tanah, bangunan gedung, beasiswa, serta fasilitas lain jika dikalkulasi bernilai triliunan rupiah. Hanya dengan satu harapan, bahwa UNMUL dapat menjadi Pusat Keunggulan dan membantu memajukan serta mensejahterakan masyarakat Kaltim. Dengan perkembangan waktu, UNMUL bersama Pemprov Kaltim telah melahirkan dua PTN yakni Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong, serta insitusi pendidikan bertaraf internasional yakni Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) di Samarinda. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, UNMUL telah maksimal

melaksanakan *simbiosis mutualistis* bersama Pemerintah Daerah. Jika diantara PT dan khususnya PTN sampai hari ini masih menempati ranking bawah, ini indikasi ada problem internal institusi, yang layak dibantu dan didampingi. Tetapi dari sisi kiprahnya yang diberikan untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat layak untuk diapresiasi. Hampir semua pimpinan daerah di Kaltim dan Kaltara adalah lulusan UNMUL. Begitu pula pimpinan-pimpinan di instansi terkait. Dari sini, UNMUL telah menunjukkan keunggulannya. Akan tetapi, agar tidak muncul kiasan "karena tidak ada Elang, maka Belalang pun di-Elangkan", maka berbagai pemikiran alternatif dan solutif sangat diharapkan kemunculannya. Penulis tidak sendirian, karena boleh jadi tulisan ini juga mewakili problem yang serupa yang sedang dihadapi rekan-rekan lain di daerah.

5. Penutup

Tulisan sederhana ini jika belum bisa disebut "*best practice*", paling tidak sekedar ungkapan pemikiran dari penulis untuk memperoleh masukan bagaimana seharusnya sikap Pemerintah Daerah terhadap Perguruan Tinggi dan sebaliknya. Pemda perlu memajukan PT di daerah agar mampu berperan sebagai pusat keunggulan, dan sebaliknya PT perlu membantu Pemda dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Diperlukan strategi *mutual adaptive*, yang secara konkrit saran-sarannya diharapkan muncul dari pembaca dan peserta simposium. Strategi yang saling mencerdaskan untuk jangka panjang. *Sustainable Strategy!* Sebagai bagian akhir penutup ini, penulis sampaikan beberapa bentuk/produk kerjasama Pemprov Kaltim dengan Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Lahirnya Perda Pendidikan no 03/2010, dan no 16/2016
2. Pengalokasian dana di APBD untuk:
 - a. Pembebasan tanah untuk Kampus ITK seluas 300 ha
 - b. Pembebasan tanah untuk Kampus ISBI seluas 30 ha
 - c. Pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) untuk siswa, mahasiswa (D3, S1, S2, S3) dalam dan luar negeri. Untuk siswa/mahasiswa penerima selama 4 tahun terakhir ini dari tahun 2015 hingga 2018 ada 279.905 orang dg total beasiswa 286,5 milyar.
3. Mahasiswa penerima beasiswa yang telah lulus sebanyak 11.542 orang, diantaranya Doktor 436 orang, Magister 864 orang, dan selebihnya Sarjana dan Diploma.
4. Oleh Gubernur baru (Dr. Ir. Isran Noor), BKC diganti nama dengan BKT (Beasiswa Kaltim Tuntas) dengan beberapa perubahan yang cukup mendasar, antara lain: Penerima setelah selesai harus segera pulang ke Kaltim untuk mengabdikan di perdesaan dengan diberi insentif. Konsep ini masih dimatangkan. Sekedar informasi, APBD Pendidikan Kaltim 2019 sebesar 885 M.

REKOMENDASI HASIL SIMPOSIUM NASIONAL KAHMI
BIDANG PENDIDIKAN
TEMA - TEKNOLOGI, INDUSTRI DAN PENDIDIKAN

UNS INN Surakarta, Sabtu 16 Februari 2019

Oleh Abdul Rahman

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abdulrahman18542@gmail.com

A. PENGANTAR

Teknologi telah mengubah dunia industri. Industri berbasis teknologi menuntut perubahan sistem pendidikan dalam menyiapkan generasi emas dan milenials yang produktif hidup di era Indonesia emas 2040. Para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan mengakui bahwa Indonesia belum memiliki sumberdaya manusia handal menguasai tehnologi dalam keduanya, adaptasi dan adopsi dinamika masyarakat industri global. Ketidaksiapan tersebut ditandai dengan fluktuasi peringkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia 1990-2018 dan telah menjadi bukti bahwa pendidikan lamban merespon perubahan teknologi dan industri. Simposium ini menggali data yang berguna bagi pemerintah dan pengelola pendidikan memperbaiki prioritas persoalan dan arah kebijakan pendidikan sebagai ‘enabling factors’ perbaikan mutu, akses dan manajemen sekolah di Indonesia.

Menelaah laporan dan data United Nations Development Programme (UNDP) terbaru, Indonesia mengalami kenaikan peringkat IPM dari 185 (2010) ke 116 (2017). Namun peringkat IPM tersebut belum setinggi capaian peringkat 101 di tahun 1990. Pada tahun 2018 peringkat IPM Indonesia di antara Negara-negara Asia Tenggara hanya diatas peringkat Kamboja 146, Laos 139 dan Timor Leste 132. IPM Indonesia di bawah peringkat Thailand 83, Malaysia 57, dan Brunei Darussalam 39. Dalam simposium ini para ahli telah menyediakan strategi dan ukuran kinerja kepada pemerintah dalam memperbaiki mutu sistem pendidikan dengan mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan big data untuk layanan pendidikan formal maupun non-formal dan meningkatkan peran dunia usaha/industri dalam mewujudkan IPM yang lebih baik.

Menurut Data Pokok Pendidikan (DAPODIK, 2018) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Pemerintah sedang melayani 45.332.238 peserta didik, termasuk 51.7% murid laki-laki. Mereka tersebar di 219,434 sekolah termasuk SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Penguatan kapasitas kompetisi, jaringan, kemitraan dan kolaborasi pembangunan pendidikan menjadi prioritas kebutuhan. Para ahli menyediakan masukan kepada pemerintah agar setiap kebijakan, program dan dana pendidikan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui masyarakat regional maupun internasional. Peserta simposium memberikan sasaran dan program kepada pemerintah mendatang segera melakukan perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh, berkelanjutan dan terukur kemajuannya berbasis data sehingga kinerja

pemerintah dan setiap lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada rakyat.

Selama simposium para akademisi, peneliti, praktisi dan inovator pendidikan telah berbagi informasi dan data tentang persoalan, strategi, kebijakan dan program untuk menggerakkan 2.751.481 pendidik, dibantu oleh 648.863 tenaga kependidikan, menjangkau sekolah yang tersebar di 83,447 Kelurahan/Desa di Indonesia, dan meyakinkan bahwa 45 juta peserta didik akan terjamin dapat menikmati mutu pembelajaran di setiap sekolah.

Dengan simposium ini, peneliti dan akademisi dari anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang berkualifikasi Profesor dan Doktor dan berasal dari berbagai lembaga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dari Sabang sampai Merauke, menyampaikan rekomendasi berdasarkan keahlian dan pengalaman untuk melahirkan inisiatif baru tentang kebijakan dan program pendidikan yang ramah teknologi dan mendukung industri terkini.

Rekomendasi berikut ini merupakan akumulasi pemikiran dari pokok-pokok pikiran berbasis data yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Dimiyati, mewakili Prof. Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dr. Ananto Kusumo Seto, mewakili Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muchlas Samani, Universitas Negeri Surabaya, Prof. Ravik Karsidi, Rektor Universitas Sebelas Maret dan Prof. Dede Rosyada, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta sambutan dari Prof Laode M Kamaluddin, mewakili MN-KAHMI.

Rekomendasi ini juga dikembangkan berdasarkan tiga puluh lebih artikel, dilengkapi data dan pengalaman praktis penulis, yang disajikan oleh pemakalah yang telah didiskusikan secara paralel tiga kelompok: Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pendidikan Vokasi. Agar masyarakat akademik maupun mahasiswa dapat menikmati karya ilmiah hasil symposium ini, MK-KAHMI juga mempublikasikan artikel tersebut dalam bentuk Proceeding ber ISBN dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Bersama MN-KAHMI, Drs. Hardono, MM, ketua Majelis Daerah, mengucapkan terimakasih kepada 700 lebih peserta simposium, mahasiswa, pelajar dan guru. Panitia juga mengucapkan terimakasih kepada narasumber dan pemakalah yang telah menyumbangkan gagasan baru, pengalaman dan masukan untuk perumusan kebijakan dan program pendidikan yang berorientasi industri 4.0. Secara khusus, MN-KAHMI memberikan penghargaan kepada panitia, tim pendamping, tim reviu makalah, dan warga HMI Cabang Surakarta.

KAHMI berharap agar rekomendasi berikut ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah - provinsi, kota dan kabupaten - dalam perbaikan tatakelola, perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, terutama:

1. Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi.
2. Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan dan Vokasi

B. REKOMENDASI PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

1. *Perbaikan Pengakuan Mutu Internasional.* Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi, namun sedikit jumlahnya yang mendapatkan akreditasi dan rekognisi internasional. Saat ini di Indonesia terdapat 4.633 perguruan tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019). Data QS World Ranking 2018 menunjukkan bahwa Indonesia baru ada tiga universitas ranking dunia – Universitas Indonesia (292), Institut Teknologi Bandung (359) dan Universitas Gadjah Mada (391).

Rekomendasi #1 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk perluasan akses perbaikan pengakuan mutu internasional dengan target 70 perguruan tinggi yang telah terakreditasi A sehingga selama mencapai sertifikasi, akreditasi atau rekognisi oleh lembaga akreditasi internasional 2019 - 2024.

2. *Perbaikan Mutu Institusi (Paralel).* Akreditasi nasional bukan hanya menjadi jaminan mutu bagi mahasiswa dan lulusan setiap perguruan tinggi, tetapi langkah awal menuju pengakuan mutu oleh masyarakat internasional. Pada saat ini BAN PT melaporkan bahwa hanya 34% (1.589) dari 4.633 perguruan tinggi secara institusi telah terakreditasi oleh BAN-PT (data BAN-PT, 5 Mei 2018). Dari perguruan tinggi yang terakreditasi tersebut, sebanyak 35% terakreditasi B dan 60% terakreditasi C dan sebanyak 66% (3.044) perguruan tinggi belum terakreditasi.

Rekomendasi #2 – Selama 2019-2024 Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk melaksanakan program perbaikan mutu nasional secara parallel dengan target sebagai berikut:

- 1) 40% (250) dari 558 perguruan tinggi yang telah terakreditasi B mendapatkan akreditasi A oleh BAN-PT.
 - 2) 50% (480) dari 961 perguruan tinggi yang telah terakreditasi C mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT.
 - 3) 70% (2.130) dari 3.044 perguruan tinggi yang belum terakreditasi mendapatkan akreditasi C/B oleh BAN-PT.
3. *Perbaikan Mutu Program Studi (Paralel).* Program studi bertanggung jawab menyiapkan ketrampilan akademik maupun soft skills, kualifikasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu alumni sebelum mereka masuk dunia usaha dan industri. Akreditasi nasional menjadi jaminan mutu bagi mahasiswa dan lulusan setiap perguruan tinggi. Bahkan, akreditasi juga modal menuju pengakuan mutu internasional. Pada saat ini BAN PT melaporkan bahwa mayoritas 73% (19.841) dari 27.194 program studi telah terakreditasi oleh BAN-PT (data BAN-PT, 5 Mei 2018) dan sisanya 27% (7.353) program studi belum terakreditasi. Komposisi program studi terakreditasi A sebesar 15% (3.008), B sebesar 55% (10.831) dan C 30% (6.002).

Rekomendasi #3 – Selama 2019-2024 Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk melaksanakan program perbaikan mutu program studi secara parallel dengan target sebagai berikut:

- 1) 80% (8.000) dari 10.831 program studi yang telah terakreditasi B mendapatkan akreditasi A oleh BAN-PT.
 - 2) 83% (5000) dari 6.002 program studi yang telah terakreditasi C mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT.
 - 3) 75% (5.515) dari 7.353 program studi yang belum terakreditasi mendapatkan akreditasi C/B oleh BAN-PT.
4. *Perbaikan Mutu dan Kinerja Dosen.* Mutu perguruan tinggi dipengaruhi mutu (kualifikasi dan sertifikasi) dosen. Sampai dengan 20 Desember 2018 jumlah dosen dengan kualifikasi S3 naik 40% dari 24.747 (2015) menjadi 41.028 kualifikasi S3. Sedangkan jumlah dosen mengikuti sertifikasi dosen mengalami fluktuasi dari 12.743 (2015) turun 10.936 (2016) turun lagi 9.892 (2017) dan kembali naik 10.371 (2018).

Rekomendasi #4 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk memberikan beasiswa S3 ditambah tunjangan keluarga (istri/suami dan 2 anak) selama studi bagi dosen dan atau peneliti yang melanjutkan S3, dalam maupun luar negeri, dengan target sebagai berikut:

- 1) kenaikan 25% dosen lulus S3 per perguruan tinggi pada akhir tahun 2024.
 - 2) setiap dosen berkualifikasi S3 otomatis memperoleh sertifikasi dosen dan tunjangan ketika kembali menjalankan tugas di home base program studi.
5. *Akselerasi Publikasi Internasional.* Scopus (berbagai jenis dokumen, 25 Januari 2019) menunjukkan data bahwa capaian publikasi internasional Indonesia mengalami kenaikan dari 5.303 (2013) menjadi 30.924 (2018). Dengan dukungan kebijakan, terutama peraturan Menteri Ristek-Dikti, dan 6,475 SDM berkualifikasi Master dan Doktor perguruan tinggi wajib menambah jumlah dan mutu publikasi internasional.

Rekomendasi #5 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk menyediakan dana kolaborasi dan kemitraan bidang pembelajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dosen ilmu murni MIPA maupun IPS, peneliti di lembaga penelitian di setiap kementerian lain, praktisi dari industri/perusahaan atau lembaga riset luar negeri, dengan target 100.000 publikasi referensi, buku ajar, artikel (termasuk model pelatihan) internasional selama 2019-2024.

6. *Perbaikan Mutu Publikasi Nasional.* Akreditasi Sinta yang dikelola Kemenristek-dikti (Slide 25, 16 Februari 2019) menunjukkan data bahwa capaian publikasi nasional Indonesia mengalami kenaikan dari 141 (2014) menjadi 2.288 (2018). Capaian jumlah jurnal ilmiah Indonesia terindeks Scopus mengalami kenaikan dari 15 (2014) menjadi 46 (2018).

Rekomendasi #6 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden guna mencegah capital flight (peneliti berebut jurnal Scopus keluar negeri) dengan menambah variasi dan daya tampung dari 1.500 menjadi 30.000 paper untuk peneliti Indonesia maupun peneliti dari luar negeri.

7. *Perluasan PATEN*. WIPO 2018 meliris data bahwa capaian dan trend perkembangan Paten (KI) meningkat tiga kali lipat, dari 700 (2014) menjadi 2.271 (2018). Pada periode sama, Paten Domestik terdaftar di ASEAN juga meningkat dan data 2018 Indonesia memiliki 2.842 paten, jauh lebih baik dari Philippines yang memiliki 415 paten.

Rekomendasi #7 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden guna menyediakan dana untuk mendapatkan paten (KI) kepada peneliti dan inovator dengan target 30.000 paten, terdaftar di Indonesia maupun di luar negeri.

8. *Penguatan Inovasi Start Up*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunjukkan data (slide 31) bahwa ada kenaikan akumulasi jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) dari 52 (2015) menjadi 1.000 (2019) yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan bisnis di berbagai sektor, termasuk industri di sektor pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata, dan komoditas lokal Indonesia.

Rekomendasi #8 - Pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk mendukung setiap perguruan menjadi agent penyaluran 'seed funding' dan IT base business mentoring oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara terpadu kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan target 500 PPBT dan 2000 CPPBT per perguruan tinggi PT selama 2019-2024.

9. *Peningkatan Daya Saing (Budaya dan Seni)* – Muhamad Dimiyati menyajikan data dari Global Competitiveness Index-WEF terbaru dan menunjukkan bahwa daya saing Indonesia naik dari peringkat 37 dari 140 negara tahun 2015 ke peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018.

Rekomendasi #9 - Penguatan kapasitas perguruan tinggi mempromosikan variasi kebudayaan dan kesenian daerah kepada 125 negara di dunia, terpadu dengan program kolaborasi, jaringan, dan kerjasama perbaikan akreditasi dan rekognisi mutu pendidikan, penelitian, pengembangan, inovasi, dan publikasi ilmiah.

10. *Perbaikan Akreditasi PTN/S di luar Jawa*. Hingga saat ini, data yang disajikan pada fakta no 2 dan 3 di atas secara implisit juga menunjukkan bahwa jumlah PTN/S berakreditasi A oleh BAN-PT didominasi PTN/S di Jawa. Hasil temuan auditor eksternal BAN-PT menunjukkan bahwa tantangan dihadapi oleh PTN/PTS di luar Jawa adalah lambatnya pemenuhan kualifikasi dosen dan *dana pembangunan sarana prasarana pendidikan terutama laboratorium pembelajaran*. Tindak lanjut temuan AIPT/APS menjadi kebutuhan nyata bagi setiap perguruan tinggi, khususnya di luar Jawa, untuk pemerataan layanan bermutu untuk semua.

Rekomendasi #10 – Pemerintah perlu menganalisa data akreditasi institusi maupun program studi untuk menyusun prioritas PTN terakreditasi B di luar Jawa, mengoptimalkan pemanfaatan dana Beasiswa S3 dari LPDP, kerjasama Pemerintah Kota/Kabupaten untuk pengadaan lahan, dan penambahan sarana prasarana, workshop, laboratorim untuk percepatan akreditasi institusi maupun program studi, dari B ke A.

11. *Perbaikan Kolaborasi PTN, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten.* Pemerintah sedang mengusahakan perluasan kesempatan dan membuka akses kepada penduduk usia kuliah, 18-24 tahun, untuk melanjutkan kuliah. Saat ini, Kemenristek-dikti menunjukkan bahwa 34.58% angka partisipasi kasar penduduk usia kuliah telah dicapai 2018. Angka ini belum cukup untuk mengantarkan bonus demografi dan generasi emas menjadi pelaku pembangunan di negeri sendiri 2030-2040.

Rekomendasi #11 – Pemerintah melakukan pendampingan perguruan tinggi melaksanakan program ‘cost, infrastructure and facility sharing’ dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga dapat membuka campus-campus baru, membuka program studi berbasis SDA dan kebutuhan daerah, menggunakan layanan ‘blended learning’ untuk menambah jumlah mahasiswa daerah sekitarnya, dibantu oleh perusahaan daerah dan BUMN untuk mencapai 54% angka partisipasi kasar tahun 2024.

12. *Revitalisasi Pendidikan Vokasi.* Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara 10 Oktober 2018 memberikan arahan kepada pimpinan PTN agar fakultas dan program studi merespon kebutuhan masyarakat dan industri. Penambahan jumlah dan sebaran politeknik menjadi prioritas untuk meningkatkan layanan pendidikan vokasional.

Rekomendasi # 12 – Pemerintah mendukung revitalisasi Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, Institut, terutama Politeknik dan Akademi Komunitas. Target utamanya adalah membangun 1500 politeknik atau akademi komunitas baru di 34 provinsi dan 460 Kota/Kabupaten. Manfaatnya, perluasan akses layanan pendidikan vokasi dapat menciptakan wirausaha dan penguatan lembaga UMKM di setiap daerah.

13. *Revitalisasi Pendidikan Moral Pancasila* - Undang-Undang Negara Republik Indonesia mengakui 6 agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam pada tahun 2010 sebanyak 87,18 persen. Pemeluk agama Kristen 6,96 persen. Pemeluk Katolik sebanyak 2,91 persen. Pemeluk Kong Hu Cu 0.71 persen. Diduga oleh pakar sosial bahwa kebinekaan harus dijaga dalam arus globalisasi ideologi, sosial, politik, budaya, ekonomi, lingkungan, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan keamanan masyarakat global yang berjalan dengan cepat. Pendidikan moral diharapkan mampu mengatasi masalah dan dampak dari revolusi industri, dehumanisasi, dan mungkin krisis nasionalisme di kalangan generasi muda.

Rekomendasi # 13 – Pemerintah melanjutkan integrasi pelaksanaan pendidikan Pancasila di setiap jenjang, jenis dan bentuk pendidikan, dengan strategi:

- 1) Kemristek-Dikti mendukung 4.633 perguruan tinggi, termasuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, Institut, terutama Politeknik dan Akademi Komunitas, memadukan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengembangan soft skills di setiap matakuliah.
- 2) Kemdikbud mendukung guru dan tenaga kependidikan di 219.434 Sekolah mensinerjikan nilai agama, norma moral sosial, dan kewarganegaraan dari SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dan SLB sehingga 45 juta murid sekolah siap melaksanakan kehidupan sosial secara harmonis, aman dan rukun.

- 3) Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Gubernur mendukung widyaiswara, penyuluh sosial, dai dan mubaligh melalui pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah dan Pondok Pesantren mengarusutamakan nilai kebhinekaan, kebangsaan (Pancasila) dan pelaksanaan aqidah agama.

C. PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN VOKASI

14. *Peningkatan Kualifikasi Guru Sekolah Dasar* – Untuk mendidik 25 juta siswa SD, Indonesia memiliki ‘pasukan pena’ sebanyak 1.460.270 guru SD, 642.176 guru SMP, 311.714 guru SMA, dan 302.921 guru SMK (Dapodik Kemendikbud 2019). Guru pensiun semakin banyak. Sebagian besar guru pensiun belum diganti dengan guru tetap. Ini terjadi di setiap jenjang dan jenis sekolah. Sekolah kehilangan guru kelas di SD/MI dan guru bidang studi di SMP dan SMA/SMK. Akibatnya, pembelajaran terganggu di banyak sekolah. Kekurangan guru kelas di SD dan SMP perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Kekurangan guru bidang studi SMK/SMK/MA perlu dipenuhi oleh pemerintah Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rekomendasi #14a – 34 Gubernur bekerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka formasi ASN guru bidang studi di SMA/PLS/Pendidikan non formal dan memprioritaskan pengangkatan guru kontrak yang sesuai kualifikasi dan relevansi keilmuan serta pengabdian paling lama.

Rekomendasi #14b – 250 Bupati dan atau Walikota bekerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka formasi ASN guru kelas SD dan memprioritaskan pengangkatan guru kontrak yang sesuai kualifikasi dan relevansi keilmuan serta pengabdian paling lama.

15. *Perluasan akses dari SD ke SMP ke SMA/SMK* – Data Pokok Pendidikan Kemendikbud menyediakan data jumlah siswa SD sebanyak 25.144.270, Siswa SMP 9.944.620 dan siswa SMA/SMK sebanyak 9.813.789 pada semester Ganjil 2019. Layanan pendidikan dasar, khususnya layanan pendidikan SMP, merupakan prioritas untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di 514 Kota Kabupaten. Kenaikan angka partisipasi dari SD ke SMP ke SMA perlu keselarasan kebijakan antara Peraturan Walikota/Bupati dengan Peraturan Gubernur.

Rekomendasi #15 – 300 Pemerintah Kota/Kabupaten secara bertahap perlu membuat Peraturan Walikota/Bupati untuk memenuhi hak dasar kemanusiaan, berupa layanan pendidikan, bagi 60% dari 25 juta siswa terdaftar di SD dalam lima tahun kedepan akan masuk SMP/MTs yang lebih mudah, lebih baik mutu, dan lebih efektif tata kelolanya.

16. *Perluasan Akses SMA/SMK/MA*- Kebijakan wajib belajar 9 tahun sangat membantu pemenuhan hak sekolah bagi penduduk usia 6-15 tahun. Minat orang tua dengan anak tamatan SMP/MTs ingin menyekolahkan SMA/SMK/MA meningkat di setiap kota maupun desa. Kerjasama antara Pemerintah dan Gubernur belum berkembang di setiap Provinsi. Tatakelola layanan pendidikan SMA/SMK dan Pendidikan non formal/luar sekolah belum berjalan lancar di setiap Provinsi. Gubernur perlu lebih serius memenuhi kebutuhan layanan pendidikan kepada penduduk usia 20-34 tahun

(generasi millennials dan warga generasi emas) yang jumlahnya mencapai di atas 90 juta orang tapi rentan pengangguran dan kemiskinan (BPS, 2018).

Rekomendasi # 16 - Pemerintah menyediakan insentif kepada 20 Gubernur dan 250 Walikota/Bupati yang berhasil membuat Peraturan Gubernur tentang wajib belajar (wajar) 12 tahun agar mengantisipasi kenaikan jumlah siswa dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di 25 provinsi selama 2019-2024.

17. *Perubahan dari Tes ke Evaluasi Sekolah* – Mengukur mutu pendidikan harus menyeluruh (setiap unsur kompetensi pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan hati) dan meluas (mencapai setiap jenjang, jenis dan bentuk pelayanan pembelajaran). Indonesia terjebak dalam menilai proses dan keberhasilan pendidikan. Dominasi tes dan pengukuran segera diminimalisasikan. Penggunaan asesmen dan evaluasi ditingkatkan. Tes terstandar hanya mengukur sebagian pengetahuan akademik dan sedikit menilai soft-skills. Hasil ujian sekolah belum memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pendidikan lanjut maupun pengembangan karir pekerjaan setiap alumni sekolah.

Rekomendasi # 17a – Pemerintah mentraining ulang 1.000.000 guru, kepala sekolah dan pengawas agar menerapkan pendekatan dari sistem tes/pengukuran terstandar menuju ke sistem asesmen/evaluasi agar menemukan harkat keunikan potensi kemanusiaan murid

Rekomendasi # 17b - 20 Gubernur dan 300 Walikota dan Bupati memfasilitasi 1.000.000 guru, kepala sekolah, dan pengawas dapat menggunakan baseline data potensi individual siswa dan siswa menikmati pembelajaran sebagai pendewasaan kepribadian secara utuh dengan kehidupan sehari-hari maupun kesesuaian pilihan karir pekerjaan.

18. *Pengembangan Kesiapan Kerja/Usaha (employability)* - Setiap satuan pendidikan, 219.434 sekolah, wajib meyakinkan siswanya, orang tua murid, dan warga masyarakat umum bahwa ‘futuristic employability’ kesiapan bekerja yang dikembangkan oleh sekolah bahwa 60 - 70% kurikulum sekolah sesuai pekerjaan, baik di dunia usaha/industri maupun dunia wirausaha di era generasi emas, 20 tahun dari sekarang. Hasil analisis McKinsey Global Institutes memprediksikan bahwa 9 juta dari 133 juta angkatan kerja di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pembelajaran soft-skills yang dibutuhkan dunia usaha mandiri dan industri oleh para guru. Akibatnya, alumni sekolah tidak bekerja di sektor formal juga tidak berwirausaha.

Rekomendasi #18 Pemerintah Pusat menambah peran dan fungsi setiap P4TK dan 30 LPMP bekerjasama dengan Gubernur dan 70 BUMN dan 100 BUMD untuk

- 1) menyiapkan 10.000 Master Trainer (MT) nasional atau 20 MT per Kabupaten untuk pelatihan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan IT base wirausaha;
- 2) menyiapkan dana untuk Gubernur berkolaborasi dengan Bupati-Walikota memobilisasi Master Trainer dikelola oleh P4TK, LPMP dan Balai Diklat (Kemenag) bekerjasama dengan Gubernur dan praktisi dari BUMN/BUMD untuk melatih ulang 100.000 Pengawas, 100.000 Kepala Sekolah, 100.000

tenaga kependidikan, dan 1.000.000 guru bidang studi dalam pengelolaan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan IT base wirausaha; dan

- 3) memfasilitasi Gubernur berkolaborasi dengan Bupati – Walikota membuat Peraturan Daerah dan pelaksanaan program kerjasama prakerin dan rintisan wirausaha antara SMK/SMK/MA dan BLK dalam perencanaan, pembelajaran, uji kesiapan kerja, sertifikasi, akses informasi pekerjaan usaha mandiri/pekerjaan, dan pendampingan usaha/kerja.

19. *Integrasi pengembangan soft-skills kedalam Kurikulum*. World Education Forum 2015 menyajikan ringkasan tentang 3 ketrampilan abad 21 -- literasi dasar, kompetensi dan mutu kepribadian -- sebagai solusi pendidikan era industri berbasis teknologi. Tiga ketrampilan tersebut dapat diintegrasikan dengan aneka ragam literasi melalui pelaksanaan konsep belajar sepanjang hidup (lifelong learning).

Rekomendasi # 19 – Pemerintah mendukung setiap pengawas, kepala sekolah dan 1.000.000 guru melaksanakan pembelajaran ketrampilan (soft skills) yang diperlukan pekerja mulai 2030, antara lain: mengatasi masalah, berfikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, kerjasama kelompok, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, orientasi melayani, negosiasi, mendengarkan aktif, dan fleksibilitas pengetahuan.

20. *Pemberdayaan Pemuda Rentan Kemiskinan* – Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 6.87 juta (5.13%) dari 133.94 juta angkatan kerja tidak dapat terserap dalam dunia kerja. Mereka hidup dalam ketidakpastian pendapatan dan daya beli rendah karena status pekerjaan sebagai pegawai kontrak dan atau paruh waktu. BPS melaporkan bahwa pemuda pengangguran dan paling rentan pengangguran adalah alumni SMK.

Rekomendasi #20 – Pemerintah – khususnya BPS, Kemenaker, dan Kemenpora – perlu memperluas peran dan fungsi layanan Data Pokok Pendidikan pemantauan dan perencanaan pendidikan oleh 25 Gubernur, 300 Walikota dan Bupati untuk

- 1) mengembangkan integrated baseline data 50 juta pemuda pengangguran dan rentan kemiskinan setiap provinsi, kota, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2) mengembangkan 20 peraturan gubernur untuk memandu kerjasama antara 20 Dinas Provinsi dan 400 Kota dan Kabupaten dan 1000 perusahaan daerah, industri nasional dan internasional dalam penyiapan, pelaksanaan, penempatan, pemantauan, dan pemberhentian pekerja/buruh.
- 3) memberdayakan 150 Balai Latihan Kerja, akademi komunitas, politeknik, lembaga pelatihan dan kursus kerja swasta, UKM dan SMK untuk perintisan inovasi dan inisiatif industri maupun wirausaha.

21. *Pengkaderan Pioneer Kewirausahaan* – Era teknologi dan industri 4.0 membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang siap menggunakan higher order thinking skills (HOTS). Dengan kemudahan informasi digital, setiap daerah akan muncul pemuda berbakat dan kreatif membangun inisiatif usaha/pekerjaan berbasis aplikasi. Penguatan kekuatan HOTS dan aplikasi teknologi dapat menumbuhkan UMKM lokal dan menciptakan potensi pasar global baru. Setiap

alumni pendidikan dipersiapkan pilihan strategi dan taktik kehidupan setelah lulus sekolah.

Rekomendasi # 21– Pemerintah mendukung pelaksanaan tiga pilihan langkah bagi 20 juta warga generasi emas (usia 20-34 tahun) sebagai:

- 1) Job seeker/pencari kerja, mendapatkan akses lowongan kerja dan atau kesempatan sekolah lanjutan;
- 2) Job creator/penggas wirausaha agar mampu hidupi diri sendiri sekaligus menciptakan jenis dan bentuk pekerja yang baru.
- 3) Bisnis owner/pemilik usaha, membuka program pendidikan berikutnya yang mampu menciptakan pilihan karier bagi setiap kehidupan pekerja.

22. *Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Moral Pancasila* - Pendidikan Moral Pancasila menjadi model pembinaan kehidupan 263 juta warga masyarakat dengan variasi adat istiadat, agama, suku, nilai dan norma sosial. Guru menjadi pionir pembelajaran kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis. Guru penjaga utama perwujudan keharmonisan sosial yang terkoyak oleh hingar-bingar kegiatan politik. Guru PMP mampu mencegah terjadinya konflik horizontal sekaligus menjaga kerukunan antar suku, agama, adat istiadat.

Rekomendasi # 22 – 400 Walikota dan Bupati menjamin mutu pelaksanaan Pendidikan Moral Pancasila di setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan dari PAUD sampai SMA/SMK dengan kegiatan-kegiatan:

- 1) Coaching dan mentoring guru PMP di MGMP bagi guru PMP
- 2) Penulis buku ajar dan LKS PMP pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, termasuk pendidikan luar sekolah.
- 3) Memobilisasi pengawas/kepala sekolah untuk memantau pelaksanaan pembelajaran PMP dari SD – SMA yang ramah perilaku kehidupan sosial murid di era digital ini.